



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL TAHUN 2020-2024**

**MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	177.775,2			
	Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,0	68,0	68,8	69,2	70,3				
KP : Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW)	686,5	1.001,1	1.921,8	1.778,2	3.662,7	165.677,1			
ProP : Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan							165.677,1			
<i>PLTA</i>	<i>Kapasitas terpasang tambahan (MW)</i>	165,2	440,3	955,9	397,0	1.951,4	74.996,7	<i>Tersebar</i>		<i>KESDM, BUMN, Swasta</i>
<i>PLT Panas Bumi (PLTP)</i>	<i>Kapasitas terpasang tambahan (MW)</i>	140,0	80,0	132,0	300,0	375,0	42.270,0	<i>Tersebar</i>		<i>KESDM, BUMN, Swasta</i>
<i>PLT Bioenergi</i>	<i>Kapasitas terpasang tambahan (MW)</i>	246,7	152,0	484,8	159,0	252,6	24.656,0	<i>Tersebar</i>		<i>KESDM, BUMN, Swasta</i>
<i>PLT Surya (PLTS)</i>	<i>Kapasitas terpasang tambahan (MW)</i>	134,6	328,8	339,1	643,2	643,7	17.931,6	<i>Tersebar</i>		<i>KESDM, BUMN, Swasta</i>
<i>PLT Bayu (PLTB)</i>	<i>Kapasitas terpasang tambahan (MW)</i>	-	-	10,0	279,0	440,0	5.797,9	<i>Tersebar</i>		<i>KESDM, BUMN, Swasta</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan PLTN Komersial (Tambah Baru)	PLTN Komersial yang Dibangun	Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan	Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia	Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN	Melakukan analisis multikriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder.	Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional.	25,0	Pusat		KESDM
KP : Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (Juta kilo liter)	10,0	10,2	14,2	14,6	17,4	11.969,0			
ProP : Akselerasi Pengembangan BBN							11.969,0			
Kilang BBN	Tahapan Pembangunan Green Refinery Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per Day di RUIII Plaju (Tahapan)	Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition)	Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision)	EPC	EPC	Mid 2024 Start Up dan On Stream	11.900,0	Pusat	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Pertamina



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024					
<i>Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri di Perdesaan dekat Perkebunan (Demetalized Palm Oil Mill) (mill)</i>	<i>Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri di Perdesaan dekat Perkebunan (Demetalized Palm Oil Mill) (mill)</i>	1.520,0	1.520,0	1.520,0	1.520,0	1.520,0	19,0	Sentra Sawit	<i>Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit</i>	Swasta	
<i>Pengembangan Teknologi FCC untuk Pembuatan Green Gasoline Berbasis CPO 100%</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Teknologi FCC untuk Green Gasoline berbasis CPO 100% hingga Pembuatan Desain Skala Komersial (Unit)</i>	-	1 <i>(Penyempurnaan Pilot Plant (alat kontrol dan alat ukur))</i>	1 <i>(Simulasi menggunakan bahan baku Olein (Co-Product CPO))</i>	1 <i>(Simulasi menggunakan bahan baku RBDPO (refine, bleached, deodorized, palm oil) (Main Product CPO))</i>	1 <i>(FS dan DED skala komersial dan simulasi konversi minyak nabati menjadi green gasoline)</i>	50,0	Pusat	<i>Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit</i>	Kemen ESDM	
KP : Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	139,5	138,0	136,6	135,2	133,8	2,1				
	penurunan Intensitas energi final (SBM/Rp Miliar)	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8					
Prop : Perluasan Penerapan Efisiensi Energi								2,1			
<i>Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum</i>	<i>Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya (Peralatan)</i>	3,0	2,0	1,0	-	-	2,1	34 Provinsi		Kemen ESDM	
KP : Peningkatan pemenuhan energi domestik	Domestic Market Obligation (DMO) Batubara (Juta Ton)	155,0	168,0	177,0	184,0	187,0	37,5				
	Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0					
Prop : Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Energi								37,5			
<i>DMO Batubara</i>	<i>DMO Batubara (Juta Ton)</i>	155,0	168,0	177,0	184,0	187,0	5,0	Pusat		KESDM, Kemen PUPR	
<i>Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)</i>	<i>Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)</i>	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	15,5	Pusat		Kemen ESDM	
<i>Produksi Gas Bumi</i>	<i>Produksi Gas Bumi (Ribu BOPD)</i>	1.191,0	1.234,0	1.241,0	1.199,0	1.163,0	17,0	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	Kemen ESDM	
KP : Pengembangan industri pendukung EBT	TKDN sektor pembangkit EBT (Persen)	-	-	-	-	-	89,5				
Prop : Pengembangan Industri EBT							89,5				
<i>TKDN Pembangkit PLT Bayu</i>	<i>TKDN Pembangkit PLT Bayu (Persen)</i>	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	6,5	Pusat		Kemen ESDM	
<i>TKDN Pembangkit PLT Surya</i>	<i>TKDN Pembangkit PLT Surya (Persen)</i>	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	6,5	Pusat		Kemen ESDM	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
TKDN Pembangkit PLT Air	TKDN Pembangkit PLT Air (Persen)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	6,5	Pusat		Kemen ESDM
TKDN Pembangkit PLT Bioenergi	TKDN Pembangkit PLT Bioenergi (Persen)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	6,5	Pusat		Kemen ESDM
TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi	TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi (Persen)	30,0	30,0	33,0	33,0	35,0	6,5	Pusat		Kemen ESDM
Projek Bangunan dan Fasilitas Pabrik Solar Module							57,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PT. LEN
PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	283.664,7			
KP : Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (Juta ha)	65	65	65	65	65	6.220,7			
Prop : Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (Ekoregion)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	1.996,4			
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (Juta ha)	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	73,3	Pusat		KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif (Provinsi)	7,0	10	8	6	3	91,6	Pusat		KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta ha)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	1.831,5	Pusat		KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
Prop : Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	500	1.500,0	2.500,0	3.500,0	4.500,0	4.224,3			
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	122,1	Pusat		Kemen LHK
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)	500	1.500,0	2.500,0	3.500,0	4.500,0	2.747,3	Pusat		Kemen LHK
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya (Unit KEE)	11	22	33	44	55	54,9	Pusat		Kemen LHK
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (Juta Ha)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1.000,0	Pusat		Kemen LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi</i>	<i>Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)</i>	1	1,6	1	-	-	300,0	Pusat		Kemen LHK
KP : Pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)	33,9	34.1	34,3	34,5	34,7	1.288,4			
Prop : Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan (juta m3)	30	30	30	30	30	197,8			
<i>Produksi HHBK</i>	<i>Jumlah Produksi HHBK (Ton)</i>	353.000,0	378.000,0	403.000,0	428.000,0	453.000,0	107,8	Pusat		Kemen LHK
<i>Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi (air, panas bumi, dan karbon)</i>	<i>Jumlah unit pemanfaatan (Unit)</i>	20,0	20	20	20	20	10,0	Pusat		Kemen LHK
<i>Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati</i>	<i>Jumlah pilot IPTEK yang dimanfaatkan oleh satuan kerja terkait (Unit)</i>	-	10	10	10	10	80,0	Pusat		Kemen LHK
Prop : Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya (KPH)	20	40	60	80	110	1.090,7			
<i>KPH yang masuk kategori Maju</i>	<i>Jumlah KPH yang masuk kategori Maju (Unit)</i>	20	40	60	80	110	180,0	Pusat		KLHK, Kemendagri, Kemenperin, Kemendag
<i>Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan</i>	<i>Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)</i>	4	8,5	9	9	3	830,0	Pusat		Kemen LHK
<i>Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak</i>	<i>Jumlah SDM LHK ditingkat tapak yang kompeten (Orang)</i>	2310	3210	3210	3210	3210	80,7	Pusat		Kemen LHK
KP : Penyediaan air untuk pertanian							101.185,4			
Prop : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare) (Hektare)	45.000,0	113.750,0	113.750,0	113.750,0	113.750,0	99.833,1			
	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)	874.469,8	281.382,5	281.382,5	281.382,5	281.382,5				
<i>Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat</i>	<i>Luas jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa kewenangan pusat yang dibangun (Hektare) (Hektare)</i>	15.000,0	79.625,0	79.625,0	79.625,0	79.625,0	50.925,0	Tersebar		Kemen PU&PERA
<i>Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah</i>	<i>Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun (Hektare) (Hektare)</i>	30.000,0	34.125,0	34.125,0	34.125,0	34.125,0	11.655,0	Tersebar		Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)
<i>Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat</i>	<i>Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)</i>	80.000,0	115.403,3	115.403,3	115.403,3	115.403,3	14.820,3	Tersebar		Kemen PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah	Luas jaringan daerah irigasi permukaan (Hektare) (Hektare)	783.082,0	143.826,2	143.826,2	143.826,2	143.826,2	20.375,8	Tersebar		Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/ kota)
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	Luas jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)	11.387,8	22.153,0	22.153,0	22.153,0	22.153,0	2.056,9	Tersebar		Kemen PU&PERA
ProP : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare) (Hektare)	229,2	2.192,7	2.392,7	2.592,7	2.592,7	1.352,3			
Penyediaan air untuk komoditas perkebunan rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk perkebunan rakyat (Unit)	-	1,0	1,0	2,0	2,0	24,0	Tersebar	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kemen PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas peternakan rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk peternakan rakyat (Unit)	-	2,0	2,0	2,0	2,0	32,0	Tersebar	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kemen PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas hortikultura rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk hortikultura (Unit)	-	2,0	3,0	3,0	3,0	44,0	Tersebar	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kemen PU&PERA
Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat	Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Hektare) (Hektare)	229,2	1.192,7	1.192,7	1.192,7	1.192,7	1.252,3	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Kemen PU&PERA
KP : Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) (m3/detik)	4,3	11,3	11,4	11,4	11,4	16.838,5			
ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Tambahan penyediaan air baku (m3/detik) (m3/detik)	4,3	11,3	11,4	11,4	11,4	16.838,5			
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik) (m3/detik)	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	360,2	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau		Kemen PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)</i>	<i>Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik) (m3/detik)</i>	0,5	4,2	4,1	5,1	3,7	5.783,8	<i>Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Penyediaan air baku di kawasan perkotaan</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik) (m3/detik)</i>	1,1	2,0	2,3	2,3	2,1	3.320,8	<i>Kawasan Metropolitan Banjarmasin, Denpasar, Manado, Palembang, Makassar, Perkotaan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kota Baru Sofifi, Maja, Tanjungselor, Ibu Kota Negara</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan strategis KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintang Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu (m3/detik) (m3/detik)</i>	-	0,2	0,3	-	-	232,7	<i>KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintang Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan strategis DPP Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Morotai (m3/detik) (m3/detik)</i>	-	0,1	0,2	-	0,0	134,4	<i>DPP Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	Tambahan debit air baku di kawasan strategis lainnya (m3/detik) (m3/detik)	-	0,1	0,1	0,7	0,7	535,2	KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI Kuala Tanjung, DPP Padang-Bukittinggi, KI Kemuningking, KEK/DPP Tanjung Kelayang, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, KI Tanggamus, KEK/DPP Tanjung Lesung, KI Madura, KI Jorong-Tanah Laut, DPP Derawan-Berau, KI Batulicin, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Tanah Kuning, DPP Wakatobi, KI/KEK Bitung, KEK/DPP Morotai, DPP Raja Ampat, KI/KEK Sorong, KEK/DPP Singosari, KI Tenayan, KI Brebes, KI Ladong, KI Katibung, KI Tanjung Buton, KI Sumbawa Barat, KI Pesawaran, KI Batanjung, KEK Kendal, KI Way Pisang, KI Takalar, DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih, DPP Baru		Kemen PU&PERA
Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik) (m3/detik)	-	2,0	0,5	-	-	796,8	Kabupaten Cirebon, Pekalongan		Kemen PU&PERA
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik) (m3/detik)	2,4	2,5	3,8	3,1	4,7	5.674,6	Tersebar		Kemen PU&PERA
KP : Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Peningkatan tutupan hutan (Hektar)	375.000,0	385.000,0	425.000,0	450.000,0	475.000,0	7.224,7			
Prop : Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional (Hektar)	375.000,0	385.000,0	425.000,0	450.000,0	475.000,0	7.097,7			
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Hektar)	56.000,0	40.000,0	30.000,0	25.000,0	20.000,0	6.540,5	Pusat dan Daerah		KLHK, Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (Unit)	3.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	502,0	Pusat dan Daerah		Kemen LHK
Penanaman/pengkayaan pada hutan produksi	Luas penanaman di hutan produksi (Hektar)	310.000,0	330.000,0	370.000,0	400.000,0	400.000,0	55,2	Pusat		Kemen LHK
ProP : Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Indeks kualitas danau						127,0			
Pengendalian Kerusakan Danau	Jumlah danau yang dilakukan pengendalian kerusakannya (Danau)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100,0	Pusat		Kemen LHK
Tampungan alami yang direvitalisasi	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi (kumulatif) (Unit)	8,0	8,0	10,0	10,0	15,0	7,5	Pusat dan Daerah		Kemen PU&PERA
Pengembangan perikanan tangkap darat (KemenKP)	Jumlah usaha perikanan di luar danau (Unit)	45,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	Pusat		KKP
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah obyek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS)	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	19,5	Pusat		Kemen ATR/BPN
Fasilitas Budidaya Pertanian berkaidah konservasi/ramah lingkungan (Kementan)	Jumlah danau yang terfasilitasi pertanian ramah lingkungan (Danau)	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	Pusat		Kementan
KP : Pengembangan waduk multiguna	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif) (m3)	14,3	15,2	15,8	16,3	16,8	150.907,0			
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah pembangunan bendungan multiguna (Unit)	-	-	-	-	8,0	139.001,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Bendungan baru yang selesai dibangun</i>	<i>Jumlah pembangunan bendungan multiguna lanjutan (Unit)</i>	<i>45 lanjutan 11 selesai</i>	<i>34 lanjutan 11 selesai</i>	<i>23 lanjutan 12 selesai</i>	<i>11 lanjutan 7 selesai</i>	<i>4 selesai</i>	<i>42.415,1</i>	<i>Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Tigadihadji, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Bener, Bendungan Sadawarna,</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Bendungan baru yang dibangun</i>	<i>Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (Unit)</i>	<i>-</i>	<i>4 baru</i>	<i>3 baru 4 lanjutan</i>	<i>2 baru 7 lanjutan</i>	<i>2 baru 9 lanjutan</i>	<i>12.401,4</i>	<i>Bendungan Rongkong, Bendungan Matenggeng, Bendungan Mbay, Bendungan Pelosika, Bendungan Jenelata, Bendungan Digul, Bendungan Busuk, Bendungan Lambakkan, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Warsamson</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Bendungan baru yang dibangun</i>	<i>Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun dengan skema KPBU (Unit)</i>	-	-	-	-	6,0	24.000,0	<i>Bendungan Merangin, Bendungan Muara Juloi, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Kusan</i>		<i>KPBU</i>
<i>Bendungan baru yang dibangun</i>	<i>Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (Unit)</i>	-	-	-	-	2,0	60.000,0	<i>Bendungan Kayan, Bendungan Mentarang</i>		<i>BUMN dan/ atau Swasta</i>
<i>Bendungan yang direhabilitasi</i>	<i>Jumlah bendungan yang sedang direhabilitasi / ditingkatkan (Unit)</i>	2,0	1,0	1,0	1,0	-	185,0	<i>Bendungan Wonogiri, Benanga, Bili-bili, Sutami</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (Kumulatif) (Unit)	14,0	17,0	28,0	40,0	50,0	11.905,5			
<i>Bendungan yang dimanfaatkan untuk PLTA</i>	<i>Jumlah energi listrik yang bersumber dari bendungan (MW) (MW)</i>	112,7	1,7	27,4	33,9	11,9	5.250,8	<i>Bendungan Bajulmati, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Lau Simeme,</i>		<i>BUMN dan/ atau Swasta</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku</i>	<i>Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik) (m3/detik)</i>	6,2	0,9	10,0	5,6	0,9	883,7	<i>Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak,</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi</i>	<i>Luas lahan irigasi yang diairi dari bendungan (Ha) (Hektare)</i>	105.461,0	14.697,0	116.375,0	53.959,0	52.057,0	5.771,0	Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh,		Kemen PU&PERA
PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	235.053,8			
	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0				
	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0				
	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/tahun)	58,3	58,9	59,5	60,2	60,9	4.319,3			
	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7				
	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/tahun)	260,2	273,2	286,9	301,3	316,3				
	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	10,7	10,7	10,8	10,9	11,0				
	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	10-20%	40,0	60,0	80,0	100,0				
	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95				
	Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	10.000,0	50.000,0	100.000,0	150.000,0	20.000,0				
	Persentase pangsa pangan organik** (Persentase)	5,0	8,0	10,0	15,0	20,0				
Prop : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan						2.219,4				
<i>Kawasan Ubi Kayu</i>	<i>Jumlah Kawasan Ubi Kayu (hektar)</i>	20.000,0	20.700,0	21.425,0	22.174,0	22.950,0	136,8	18 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
<i>Kawasan Ubi Jalar</i>	<i>Jumlah Kawasan Ubi Jalar (hektar)</i>	2.500,0	2.588,0	2.678,0	2.772,0	2.869,0	89,2	4 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
<i>Kawasan Kacang Tanah</i>	<i>Jumlah Kawasan Kacang Tanah (Ha)</i>	30.000,0	31.050,0	32.137,0	33.262,0	34.426,0	645,2	24 Provinsi		Kementan
<i>Kawasan Kacang Hijau</i>	<i>Jumlah Kawasan Kacang Hijau (Ha)</i>	20.000,0	20.700,0	21.425,0	22.174,0	22.950,0	118,3	16 Provinsi		Kementan
<i>Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya</i>	<i>Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya (Ha)</i>	500,0	518,0	536,0	554,0	573,0	5,9	Jawa Barat, Banten		Kementan
<i>Benih sumber aneka umbi</i>	<i>Jumlah Benih sumber aneka umbi (stek)</i>	170.000,0	170.000,0	170.000,0	170.000,0	170.000,0	2,2	4 Provinsi		Kementan
<i>Benih sumber aneka kacang dan serea lain</i>	<i>Jumlah benih sumber aneka kacang dan serea lain (kg)</i>	65.000,0	65.000,0	65.000,0	65.000,0	65.000,0	5,0	17 Provinsi		Kementan
<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</i>	<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)</i>	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,4	Pusat		Kementan
<i>Pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM</i>	<i>Teroptimalkanya pangan lokal (Lokasi)</i>	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	122,1	34 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pekarangan Pangan Lestari</i>	<i>Terbinanya kelompok pemanfaatan pekarangan (Lokasi)</i>	2.231,0	2.000,0	2.000,0	2.500,0	2.500,0	667,6	34 provinsi		Kementan
<i>Pekarangan Pangan Lestari Stunting</i>	<i>Terlaksananya intervensi stunting (Lokasi)</i>	1.369,0	1.000,0	1.000,0	500,0	500,0	396,7	260 Kab/Kota		Kementan
ProP : Peningkatan Keamanan Pangan							1.374,2			
<i>Penguatan Keamanan dan Mutu pangan segar</i>	<i>Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar (Lokasi)</i>	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	140,4	Pusat, 34 provinsi		Kementan
<i>Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH</i>	<i>Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan (Unit Usaha)</i>	135,0	160,0	175,0	200,0	220,0	36,6	34 Provinsi		Kementan
<i>Pengawasan mutu dan keamanan produk</i>	<i>Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (Sampel)</i>	29.800,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	115,4	34 Provinsi		Kementan
<i>Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaaan</i>	<i>Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan (Jumlah)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	24,4	Pusat		Kementan
<i>Kebijakan Kerjasama nasional/ Internasional</i>	<i>Kebijakan Kerjasama nasional/ Internasional (Kebijakan)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	18,9	Pusat		Kementan
<i>Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaaan</i>	<i>Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaaan (Kebijakan)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	13,4	Pusat		Kementan
<i>Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani</i>	<i>Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Kebijakan)</i>	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	56,8	Pusat		Kementan
<i>Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati</i>	<i>Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Kebijakan)</i>	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	66,5	Pusat		Kementan
<i>Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati</i>	<i>Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati (Dokumen)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	9,8	1 Provinsi		Kementan
<i>Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati</i>	<i>Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Dokumen)</i>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	32,4	1 Provinsi		Kementan
<i>Pengawasan dan Penindakan</i>	<i>Pengawasan dan Penindakan (kasus)</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	54,9	33 Provinsi		Kementan
<i>Prasarana infrastruktur PLBN</i>	<i>Prasarana infrastruktur PLBN (m2)</i>	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	58,0	3 Provinsi		Kementan
<i>Sarana PLBN</i>	<i>Sarana PLBN (unit)</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,2	4 Provinsi		Kementan
<i>Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi</i>	<i>Prasarana wilker sentra produksi, distribusi, dan importasi/ pengembangan sapi/ lainnya (M2)</i>	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	52,5	3 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (laporan)	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	589,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati (Diseminasi)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	70,8	1 Provinsi		Kementan
Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	Jumlah kab/kota fokus penurunan stunting (Kab/Kota)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	Pusat		Kemenerin
ProP : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan							725,7			
Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Jumlah Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) (hektar)	10.000,0	50.000,0	100.000,0	150.000,0	200.000,0	707,4	Sentra padi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan (varietas)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	18,3	1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
KP : Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penggunaan Benih Bersertifikat (Persen)	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	191.890,3			
	Ketersediaan Beras (Juta ton)	39,2	42,7	44,0	45,4	46,8				
	Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9				
	Produksi jagung (Juta ton)	30,9	31,9	33,0	34,1	35,3				
	Produksi daging (Juta ton)	4,0	4,2	4,4	4,6	4,6				
	Produksi umbi-umbian (Juta ton)	24,3	24,6	24,9	25,2	25,5				
ProP : Peningkatan Produksi Padi							167.850,5			
Kawasan Padi	Jumlah Kawasan Padi (hektar)	791.000,0	791.000,0	791.000,0	791.000,0	791.000,0	6.766,1	Pusat, 32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	Jumlah areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat (hektar)	2.120.000,0	2.120.000,0	2.120.000,0	2.120.000,0	2.120.000,0	3.000,4	Pusat, 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Benih Sumber Padi	Jumlah benih Sumber Padi (kg)	1.044.000,0	1.044.000,0	1.044.000,0	1.044.000,0	1.044.000,0	60,2	31 Provinsi		Kementan
Produsen Benih Padi	Terlaksananya pemberdayaan produsen benih padi (unit)	5.560,0	5.560,0	5.560,0	5.560,0	5.560,0	70,2	Pusat, 4 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Areal sertifikat benih</i>	<i>Jumlah areal sertifikat benih (hektar)</i>	124.500,0	124.500,0	124.500,0	124.500,0	124.500,0	221,6	31 Provinsi		Kementan
<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</i>	<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,4	Pusat		Kementan
<i>Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT</i>	<i>Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT (hektar)</i>	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	1.353,8	Pusat	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Kementan
<i>Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman</i>	<i>Jumlah sertifikat/LHP Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman (Sertifikat/LHP)</i>	2.450,0	2.450,0	2.485,0	2.485,0	2.485,0	50,2	Pusat		Kementan
<i>Penerapan Penanganan DPI</i>	<i>Terlaksananya Penerapan Penanganan DPI (hektar)</i>	550,0	560,0	570,0	580,0	590,0	17,8	22 Provinsi		Kementan
<i>Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI</i>	<i>Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI (Lokasi)</i>	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	303,9	Pusat		Kementan
<i>Areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT</i>	<i>Jumlah areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT (hektar)</i>	44.180,0	50.000,0	51.000,0	52.000,0	53.000,0	370,0	Pusat, 32 provinsi		Kementan
<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</i>	<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)</i>	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	36,5	Pusat		Kementan
<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</i>	<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)</i>	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	979,7	34 Provinsi		Kementan
<i>Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih</i>	<i>Terlaksananya Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih (Metode)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	23,2	Pusat		Kementan
<i>Model Percontohan Pertanian Modern</i>	<i>Jumlah Model Percontohan Pertanian Modern (Model)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	82,9	Jawa Barat	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Kementan
<i>Model Peramalan OPT</i>	<i>Jumlah Model Peramalan OPT (Model)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	24,3	Jawa Barat		Kementan
<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</i>	<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)</i>	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	6,6	Pusat		Kementan
<i>Galur Harapan Unggul Tanaman</i>	<i>Galur Harapan Unggul Tanaman (Galur)</i>	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	25,6	1 Provinsi		Kementan
<i>Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG</i>	<i>Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG (Teknologi)</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	9,2	1 Provinsi		Kementan
<i>Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian</i>	<i>Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Teknologi)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,9	1 provinsi		Kementan
<i>Benih Padi</i>	<i>Benih Padi (ton)</i>	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	49,6	32 Provinsi		Kementan
<i>Diseminasi Teknologi Mektan</i>	<i>Diseminasi Teknologi Mektan (Teknologi)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	17,1	1 Provinsi		Kementan
<i>Varietas Unggul Padi</i>	<i>Varietas Unggul Padi (varietas)</i>	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,3	1 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi produksi padi	Teknologi produksi padi (Teknologi)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	22,0	2 Provinsi		Kementan
Teknologi Mekanisasi Pertanian	Teknologi Mekanisasi Pertanian (Teknologi)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	36,0	1 Provinsi		Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan (Teknologi)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	62,3			Kementan
Benih Padi	Jumlah Benih Padi yang Diproduksi (Ton)	185,0	190,0	195,0	200,0	205,0	17,7	2 Provinsi		Kementan
Subsidi/ Bantuan pupuk	Subsidi/ Bantuan pupuk						142.500,0	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Non KL
Aplikasi teknologi pengolahan beras metode Buhler							11.700,0		Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Suasta
ProP : Peningkatan Produksi Jagung		105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	7.939,6			
Kawasan jagung	Jumlah kawasan jagung (hektar)	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	476,9	27 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Kawasan Sereal Lainya	Jumlah Kawasan Sereal Lainya (hektar)	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	29,8	20 Provinsi		Kementan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	49,7	33 Provinsi		Kementan
Area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	Jumlah area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat (hektar)	2.150.000,0	2.150.000,0	2.150.000,0	2.150.000,0	2.150.000,0	7.260,7	Pusat, 31 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Benih Sumber Jagung	Jumlah Benih Sumber Jagung (kg)	71.000,0	71.000,0	71.000,0	71.000,0	71.000,0	6,1	16 Provinsi		Kementan
Produsen Benih Jagung	Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Jagung (hektar)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	59,7	Pusat		Kementan
Benih Jagung	Benih Jagung (Ton)	158,0	158,0	158,0	158,0	158,0	22,6	10 Provinsi		Kementan
Teknologi Budidaya Jagung	Teknologi Budidaya Jagung (Teknologi)	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	9,8	1 Provinsi		Kementan
Varietas Unggul Jagung	Varietas Unggul Jagung (Varietas)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	16,5	1 Provinsi		Kementan
Benih Jagung	Jumlah Benih Jagung yang Diproduksi (Ton)	32,0	111,0	111,0	111,0	111,0	7,9	1 Provinsi		Kementan
Pro P : Peningkatan Produksi Kedelai							3.306,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kawasan Kedelai</i>	<i>Jumlah Kawasan Kedelai (Ha)</i>	500.000,0	517.500,0	535.613,0	554.359,0	573.267,0	3.053,3	26 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Produsen Benih Kedelai</i>	<i>Tertelaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Kedelai (Unit)</i>	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	32,6	<i>Pusat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara</i>		<i>Kementan</i>
<i>Benih Sumber Kedelai</i>	<i>Jumlah Benih Sumber Kedelai (kg)</i>	192.600,0	192.600,0	192.600,0	192.600,0	192.600,0	14,4	25 Provinsi		<i>Kementan</i>
<i>Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya</i>	<i>Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya (ton)</i>	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	95,0	31 Provinsi		<i>Kementan</i>
<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</i>	<i>Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	26,5	<i>Pusat</i>		<i>Kementan</i>
<i>Benih Kedelai</i>	<i>Benih Kedelai (Ton)</i>	656,0	656,0	656,0	656,0	656,0	84,9	13 Provinsi		<i>Kementan</i>
Prop : Peningkatan Produksi Daging							6.744,2			
<i>Hijauan Pakan Ternak</i>	<i>Penanaman dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ha)</i>	2.341,0	2.341,0	2.341,0	2.341,0	2.341,0	247,9	25 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pakan Olahan dan Bahan Pakan</i>	<i>Produksi bahan pakan/pakan (ton)</i>	8.000,0	8.500,0	9.000,0	9.500,0	10.000,0	271,1	9 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Mutu dan Keamanan Pakan</i>	<i>Pengawasan mutu dan keamanan bahan pakan/pakan (Sampel)</i>	5.000,0	6.000,0	7.000,0	8.000,0	9.000,0	65,9	24 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan</i>	<i>Surveilans Penyakit Hewan (sampel)</i>	190.000,0	325.296,0	325.296,0	325.296,0	325.296,0	398,0	<i>Pusat, 9 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan</i>	<i>Pencegahan dan Pengamanan PHMS (Dosis)</i>	5.167.450,0	5.167.450,0	5.167.450,0	5.167.450,0	5.167.450,0	591,2	<i>Pusat, 33 provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan</i>	<i>Surveilans Obat Hewan (Sampel)</i>	1.610,0	1.610,0	1.610,0	1.610,0	1.610,0	43,3	1 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Obat Hewan dan Bahan Biologik</i>	<i>Penyediaan vaksin dan bahan biologik (Dosis)</i>	6.030.325,0	5.471.100,0	5.471.100,0	5.471.100,0	5.471.100,0	125,8	<i>Pusat, 1 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kelembagaan Veteriner</i>	<i>Penguatan Kelembagaan Veteriner (Unit)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	209,3	<i>Pusat, 9 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Optimalisasi Reproduksi</i>	<i>Jumlah Akseptor IB, PKB, ATR dan Sinkronisasi (akseptor)</i>	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	2.604,5	<i>Pusat, 34 provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Benih Ternak Unggul</i>	<i>Penyediaan Semen Beku dan Embrio Ternak (dosis)</i>	5.450.945,0	5.450.945,0	5.450.945,0	5.450.945,0	5.450.945,0	242,0	<i>2 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Bibit Ternak Unggul</i>	<i>Jumlah produksi bibit ternak unggul (Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau, Babi, Ayam dan Itik) (ekor)</i>	956.054,0	956.054,0	956.054,0	956.054,0	956.054,0	359,0	<i>Pusat, 8 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pengembangan ternak ruminansia potong</i>	<i>Pengembangan ternak ruminansia potong (Sapi Potong, Kerbau, Kambing/ Domba) (ekor)</i>	16.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	873,8	<i>Pusat, 8 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pengembangan ternak ruminansia perah</i>	<i>Pengembangan ternak ruminansia perah (Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah) (ekor)</i>	400,0	500,0	500,0	700,0	700,0	44,8	<i>Pusat, 13 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pengendalian Pematangan Betina produktif</i>	<i>Penurunan Pematangan Betina Produktif (RPH)</i>	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	39,1	<i>33 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pengembangan unggas dan aneka ternak</i>	<i>Pengembangan unggas dan aneka ternak (ekor)</i>	501.000,0	501.000,0	501.000,0	501.000,0	501.000,0	303,9	<i>Pusat, 1 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan</i>	<i>Terlaksananya fasilitasi sarana prasarana penjaminan keamanan produk hewan (Unit)</i>	6,0	10,0	16,0	20,0	25,0	6,7	<i>3 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non Pangan</i>	<i>Terlaksananya Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan (unit)</i>	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0	26,7	<i>13 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pemasaran Peternakan	Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Peternakan (unit)	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	14,1	6 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Terlaksananya kelembagaan dan usaha peternakan (Lokasi)	112,0	115,0	117,0	120,0	120,0	87,3	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak (galur)	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	34,8	3 Provinsi		Kementan
Teknologi peternakan dan veteriner	Teknologi peternakan dan veteriner (Teknologi)	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	57,4	3 Provinsi		Kementan
Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis) (ekor)	82.990,0	82.990,0	82.990,0	82.990,0	82.990,0	3,7	1 Provinsi		Kementan
Bibit sumber ternak	Bibit Sumber Ternak (ekor)	45.250,0	45.250,0	45.250,0	45.250,0	45.250,0	55,6	3 Provinsi		Kementan
Diseminasi teknologi	Diseminasi dan penyiapan teknologi peternakan dan veteriner untuk dimanfaatkan pengguna (Kegiatan)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	38,5	3 Provinsi		Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Cabai							515,9			
Kawasan Aneka Cabai	Luas Kawasan Aneka Cabai (hektar)	13.328,0	13.328,0	13.328,0	13.328,0	13.328,0	489,6	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Benih bawang dan cabai	Jumlah Produksi Benih Bawang dan Cabai (Kg)	39.744,0	39.744,0	39.744,0	39.744,0	39.744,0	26,3	20 Provinsi		Kementan
Benih Cabai	Jumlah produksi benih cabai (Kg)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	0,0	1 Provinsi		Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Bawang Merah							955,4			
Kawasan Bawang Merah	Kawasan Bawang Merah (hektar)	5.704,0	5.704,0	5.704,0	5.704,0	5.704,0	925,5	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Benih Bawang merah	Jumlah Benih Sumber dan Sebar Bawang Merah	34.400,0	35.890,0	37.380,0	38.870,0	40.360,0	0,0	1 Provinsi		Kementan
VUB Bawang Merah dan Cabai	Jumlah VUB Bawang Merah dan Cabai (VUB)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,1	1 Provinsi		Kementan
Benih bawang dan cabai	Jumlah Benih Bawang Merah dan Cabai (Kg)	34.500,0	36.000,0	37.500,0	39.000,0	40.500,0	18,3	1 Provinsi		Kementan
Teknologi Produksi Bawang Merah dan Cabai	Jumlah Teknologi Budidaya Bawang Merah dan Cabai (Teknologi)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,5	1 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan Mutu Hasil Pangan							4.577,9			
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Unit)	6.191,0	7.245,0	8.245,0	9.344,0	10.454,0	4.300,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Sertifikat/ Register)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	14,9	24 Provinsi		Kementan
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Unit)	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	98,4	23 Provinsi		Kementan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	16,6	Pusat		Kementan
Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan (Lokasi)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,1	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pertanian Yang Dihilangkan (Teknologi)	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	39,7	1 Provinsi		Kementan
Diseminasi Teknologi Pertanian	Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Teknologi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	23,2	1 Provinsi		Kementan
KP : Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%) (%)	65 - 80	70-80	75-80	80-90	80-95	22.396,3			
	Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/tahun)	49,2	51,7	54,3	57,0	59,8				
	Nilai tukar petani	103,0	103,0	104,0	104,0	105,0				
ProP : Asuransi Pertanian							1.027,8			
Asuransi Usaha Ternak (AUT)	Jumlah ternak yang terlindungi asuransi (ekor)	120.000,0	150.000,0	175.000,0	200.000,0	225.000,0	161,0	Pusat dan 20 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Asuransi Pertanian	Jumlah luas pertanaman pertanian yang terlindungi asuransi (hektar)	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	779,8	Pusat dan 24 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan pembiayaan dan asuransi Syariah sesuai fatwa DSN no 82							87,0		Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Swasta
ProP : Pendidikan Pertanian							2.667,9			
Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Terjalinnnya Kemitraan dengan Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian dan KOSTRATANI (Orang)	1.215,0	1.300,0	1.400,0	1.500,0	1.600,0	354,4	Pusat, 8 Provinsi		Kementan
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Jumlah Dosen, Guru dan Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal S2 dan S3 (Orang)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	127,0	Pusat		Kementan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (Siswa)	22.427,0	22.427,0	22.427,0	22.427,0	22.427,0	190,5	Pusat, 5 Provinsi		Kementan
Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan vokasi Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi yang Ditingkatkan Kualitasnya (Orang)	315,0	350,0	400,0	450,0	500,0	63,1	Pusat, 11 Provinsi		Kementan
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Jumlah Wirausahawan Muda Pertanian yang ditumbuhkan sebagai pengusaha pertanian milenial (Kelompok)	2.090,0	2.100,0	2.110,0	2.120,0	2.130,0	423,6	Pusat, 11 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas (satker)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	1.097,1	Pusat, 11 Provinsi		Kementan
Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling)	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling) mendukung pengusaha pertanian milenial (Orang)	250,0	300,0	350,0	400,0	450,0	37,3	Pusat		Kementan
Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) (Kabupaten)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3 Provinsi		Kementan
Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian (kontrak)	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	164,2	1 Provinsi		Kementan
Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengembangan Sumberdaya Manusia (Orang)	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	186,2	1 Provinsi		Kementan
Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi (Invensi)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	9,8	1 Provinsi		Kementan
Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbarqan	Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbarqan (Lisensi)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	14,7	1 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang							4.816,3			
Penumbuhan dan penguatan P4S	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S dalam penumbuhan pengusaha pertanian milenial (Unit)	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	29,9	Pusat, 7 Provinsi		Kementan
Tenaga Kediklatan Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kediklatan yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	22,6	Pusat, 7 Provinsi		Kementan
Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani dan penumbuhan pengusaha pertanian milenial (Poktan)	2.394,0	2.394,0	2.394,0	2.394,0	2.394,0	122,1	Pusat		Kementan
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program KOSTRATANI (Orang)	35.322,0	35.322,0	35.322,0	35.322,0	35.322,0	575,7	Pusat, 7 Provinsi		Kementan
Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan	Kinerja Penyuluh di KOSTRATANI yang ditingkatkan (orang)	43.150,0	43.150,0	43.150,0	43.150,0	43.150,0	2.512,2	34 Provinsi		Kementan
SL Petani Mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian	SL Petani Mendukung Program KOSTRATANI (Poktan)	23.250,0	45.000,0	45.000,0	75.000,0	75.000,0	332,1	34 Provinsi		Kementan
Kelembagaan penyuluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Balai Penyuluhan Pertanian yang melaksanakan KOSTRATANI (Unit)	3.054,0	5.646,0	5.646,0	5.646,0	5.646,0	69,6	34 Provinsi		Kementan
Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	Tumbuh dan Berkembangnya Pengusaha pertanian milenial melalui Korporasi Petani (Unit)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,1	34 Provinsi		Kementan
Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian	Penguatan Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian mendukung KOSTRATANI (Unit)	68,0	102,0	102,0	102,0	102,0	28,6	34 Provinsi		Kementan
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi (model)	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	134,9	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang (model)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	296,7	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Paket Teknologi)	125,0	190,0	190,0	190,0	190,0	630,7	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
ProP : Korporasi Petani							13.884,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Korporasi UsahaTani</i>	<i>Terbentuknya korporasi usahatani (Lokasi)</i>	13,0	-	-	-	-	4,9	12 Provinsi		Kementan
<i>Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian</i>	<i>Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial (Orang)</i>	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	45,3	Pusat, 7 Provinsi		Kementan
<i>Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi</i>	<i>Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi (Teknologi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	91,6	1 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Kementan
<i>Digitalisasi rantai pasok pangan dgn ewallet syariah</i>							1.450,0		<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Swasta
<i>Grand desain model bisnis dan spasial</i>							650,0		<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Swasta
<i>Pembangunan korporasi petani berbasis Society 5.0</i>							767,6		<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Swasta
<i>Proyek Indonesia City Haji</i>							10.875,0		<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Swasta
<i>Terminal Agro Bisnis Produk Pangan dan Pertanian Indonesia untuk Jamaah Haji di Mekah</i>							0,0		<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Swasta
KP : Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	50,0	65,0	80,0	90,0	100,0	14.422,8			
	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur)	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8				
	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Akses)	4.250,0	4.250,0	4.250,0	4.250,0	4.250,0				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian							2.757,6			
Jaringan Irigasi Tersier	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian (Ha)	135.600,0	269.884,0	269.884,0	269.884,0	269.884,0	1.536,0	32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Irigasi Perpompaan	Jumlah pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanam tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan (Unit)	1.000,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	716,4	32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Embung Pertanian	Jumlah unit embung pertanian untuk penambahan areal pertanian (Unit)	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	254,8	31 Provinsi		Kementan
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (Unit)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	134,2	Pusat dan 22 provinsi		Kementan
Irigasi Perpipaan	Jumlah unit irigasi perpipaan mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Unit)	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	84,3	21 provinsi		Kementan
Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain irigasi pertanian yang tersedia (Dokumen)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	31,9	10 provinsi		Kementan
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian							11.665,2			
e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan Kartu Tani	Jumlah lokasi (Provinsi/Kabupaten) dalam rangka penyusunan e-RDKK mendukung penerapan Kartu Tani (Lokasi)	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0	1.623,0	Pusat dan 33 provinsi		Kementan
Cetak Sawah	Jumlah perluasan areal pertanian (Ha)	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	1.021,7	21 provinsi		Kementan
Optimasi Lahan	Jumlah lahan pertanian yang dioptimasi (Ha)	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	2.309,2	15 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Data Lahan Pertanian	Jumlah peta geospasial lahan cetak sawah yang tersedia (Dokumen peta)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	114,6	Pusat dan 7 provinsi		Kementan
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia (Unit)	23.440,0	25.800,0	27.000,0	28.500,0	29.500,0	4.969,3	Pusat dan 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Jumlah unit pengolah pupuk organik yang tersedia (Unit)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	716,7	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (ha)	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	265,5	Pusat		Kementan
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Rekomendasi)	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	143,9	Pusat dan 25 provinsi		Kementan
Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain cetak sawah yang tersedia (Dokumen)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	95,2	10 Provinsi		Kementan
Perbengkelan Alsintan	Jumlah perbengkelan Alsintan yang tersedia (Unit)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	68,5	Pusat		Kementan
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian) (Teknologi)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	199,0	3 Provinsi		Kementan
Diseminasi Teknologi Pertanian	Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Teknologi)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	97,1	3 Provinsi		Kementan
Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim (Teknologi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,1	1 Provinsi		Kementan
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim (Teknologi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8	1 Provinsi		Kementan
Peta Sumberdaya Lahan Pertanian	Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian (Peta)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	31,7	1 Provinsi		Kementan
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan (Teknologi)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,9	1 Provinsi		Kementan
KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Global food security index	64,0	65,5	66,9	68,4	69,8	2.025,1			
ProP : Stabilisasi Harga Pangan							743,2			
Lumbung Pangan Masyarakat	Terbinanya lumbung pangan masyarakat (Unit)	300,0	220,0	220,0	220,0	225,0	109,9	28 provinsi		Kementan
Lembaga Distribusi Pangan	Terbinanya lembaga distribusi pangan (Unit)	962,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	603,8	22 provinsi		Kementan
Pengelolaan Informasi Pemasaran	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pemasaran (Lokasi)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	23,2	Pusat, 34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kebijakan Impor Pangan yang Harmonis dengan Kebijakan Pangan Nasional</i>	<i>Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Pokok (Permendag)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,3	<i>pusat</i>		<i>Kemendag</i>
ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat							1.281,9			
<i>Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)</i>	<i>Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi)</i>	389,0	135,0	135,0	135,0	135,0	160,2	<i>Pusat, 34 provinsi</i>		<i>Kementan</i>
<i>Pengembangan Pertanian Keluarga/Family Farming</i>	<i>Terbentuknya pertanian keluarga/family farming (Lokasi)</i>	727,0	646,0	565,0	485,0	404,0	992,3	<i>17 provinsi</i>		<i>Kementan</i>
<i>Pertanian Masuk Sekolah</i>	<i>Terbentuknya pertanian masuk sekolah (Lokasi)</i>	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	129,4	<i>34 provinsi</i>		<i>Kementan</i>
PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9	15.942,0			
	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	≤80				
KP : Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	600,3			
	Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)	14,0	24,0	26,0	26,0	12,0				
ProP : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dikelola oleh lembaga (WPP)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	283,4			
<i>Data dan/atau Informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI</i>	<i>Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI (WPP)</i>	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	137,5	<i>11 WPP</i>	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	<i>KKP</i>
<i>Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber dayanya</i>	<i>Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan (%)</i>	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	12,7	<i>11 WPP</i>		<i>KKP</i>
<i>Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional</i>	<i>Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)</i>	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	101,1	<i>11 WPP</i>	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	<i>KKP</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data dan/ atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	Jumlah Data dan/ atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) (KPP-PUD)	8,0	10,0	12,0	14,0	14,0	32,1	15 PUD		KKP
ProP : Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)	14,0	24,0	26,0	26,0	12,0	257,6			
Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Perairan laut)	6,0	6,0	4,0	-	-	19,7	10 perairan laut		KKP
Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	25,0	28,0	19,0	9,0	5,0	41,9	75 kawasan		KKP
Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K (Provinsi)	13,0	24,0	29,0	24,0	31,0	28,0	31 Provinsi		KKP
Pemetaan garis pantai prioritas	Panjang garis pantai terpetakan	10.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	165,5	Lombok, Selat Sunda, Bali, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Kendari, Kolaka, Labuan Bajo, Maumere, Manokwari, Makassar, Pare-Pare, Selayar, Poso, Kaimana, Nabire, Biak, Serui, Merauke, Bontang, Tarakan, Tegal, Pekalongan, pemalang, Madura, Probolinggo, Jakarta, Cirebon, Indramayu, Cilacap, Rembang, Jepara, Padang, Mamuju, Gorontalo, Manado, Bengkulu, Batam, Singkawang, Palopo, Toli-Toli, Waingapu, Amahae		BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Sinkronisasi antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (daerah)</i>	5,0	10,0	20,0	30,0	34,0	2,5	Pusat		Kemendagri
ProP : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut							59,4			
<i>Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut</i>	<i>Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)</i>	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	41,5	34 Provinsi		KKP
	<i>Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)</i>	12,0	27,0	26,0	40,0	46,0				
<i>Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi</i>	<i>Jumlah Kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (lokasi)</i>	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	17,9	Daerah		KKP
KP : Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan							292,7			
ProP : Pengembangan wisata bahari dan jasa maritim							250,6			
<i>Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT</i>	<i>Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT (Kawasan)</i>	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	85,0	18 Provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	KKP
<i>Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan</i>	<i>Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Hektare)</i>	10.000.000,0	14.500.000,0	17.500.000,0	19.000.000,0	20.000.000,0	143,6	34 Provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bahan Kebijakan Jasa Kemaritiman	Jumlah Bahan Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa Kemaritiman yang dikoordinasikan (Dokumen) (Dokumen)	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	22,0	Pusat		Kemenko Marin
ProP : Pengembangan marine bioproduct dan bioteknologi							42,1			
Pengelolaan Biofarmakologi	Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun (Unit)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0	10 Provinsi		KKP
Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Paket)	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	22,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	KKP
KP : Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Produksi ikan (Juta ton)	15,5	16,3	17,6	18,5	20,4	12.794,2			
	Produksi rumput laut (Juta ton)	11,0	11,6	11,9	12,1	12,3				
	Produksi garam (Juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4				
ProP : Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Ikan	15,5	16,3	17,6	18,5	20,4	11.159,8			
Produksi induk unggul	Jumlah produksi induk unggul (ekor, non kumulatif) (Ekor)	1.000.000,0	1.100.000,0	1.200.000,0	1.300.000,0	1.400.000,0	327,1	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	KKP
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat (Ekor)	48.960.722,0	50.000.000,0	51.000.000,0	52.000.000,0	54.000.000,0	137,1	34 provinsi		KKP
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat (Ekor)	158520000	159000000	160000000	161000000	162000000	90,5	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	KKP
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat (Ekor)	8.277.000,0	9.000.000,0	9.500.000,0	10.000.000,0	10.500.000,0	219,8	34 provinsi		KKP
Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana UPT (Lokasi)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	369,1	10 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	KKP
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan (Paket)	80,0	110,0	120,0	140,0	150,0	42,6	18 provinsi		KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Ikan Skala Rakyat yang bersertifikat</i>	<i>Jumlah unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi (Unit)</i>	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	148,0	33 provinsi		KKP
<i>Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan</i>	<i>Jumlah monitoring residu (Paket)</i>	10.000,0	14.000,0	18.000,0	22.000,0	26.000,0	256,0	24 Provinsi		KKP
<i>Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya</i>	<i>Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha (Paket)</i>	551,0	800,0	900,0	1.000,0	1.100,0	506,7	34 provinsi	<i>Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng</i>	KKP
<i>Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan</i>	<i>Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan (Paket)</i>	38,0	100,0	110,0	120,0	125,0	552,9	10 provinsi	<i>Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng</i>	KKP
<i>Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan</i>	<i>Jumlah Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan (lokasi)</i>	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	302,5	10 Provinsi		KKP
<i>Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri</i>	<i>Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan pakan mandiri (Paket)</i>	91,0	101,0	110,0	120,0	130,0	177,0	20 provinsi		KKP
<i>Kapal perikanan bantuan yang terbangun</i>	<i>Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (Unit)</i>	30,0	50,0	70,0	90,0	110,0	183,4	34 Provinsi	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	KKP
<i>Alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun</i>	<i>Jumlah alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (Unit)</i>	500,0	750,0	1.000,0	1.250,0	1.500,0	150,5	34 Provinsi	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	KKP
<i>Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya</i>	<i>Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (Lokasi)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	199,7	7 lokasi		KKP
<i>Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat</i>	<i>Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (%)</i>	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	127,9	7 lokasi		KKP
<i>Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya</i>	<i>Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (Lokasi)</i>	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	326,3	21 lokasi		KKP
<i>Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat</i>	<i>Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (%)</i>	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	132,9	21 lokasi		KKP
<i>Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya</i>	<i>Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (lokasi)</i>	12,0	3,0	4,0	5,0	6,0	423,7	18 lokasi		KKP
<i>Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya</i>	<i>Jumlah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi)</i>	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	444,5	15 lokasi		KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.34

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional</i>	<i>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional (lokasi)</i>	-	3,0	3,0	3,0	3,0	750,0	3 lokasi	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	KKP
<i>Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan</i>	<i>Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit) (Unit)</i>	12.000,0	15.000,0	16.000,0	18.000,0	20.000,0	21,7	UPT Pusat dan UPT Daerah	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	KKP
<i>Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) - Menu DAK Bidang KP</i>	<i>Jumlah pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (unit)</i>	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	1.670,0	32 Provinsi	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	Pemda/DAK
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil - Menu DAK Bidang KP</i>	<i>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan dan pembudidayaan ikan skala kecil (lokasi)</i>	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	3.600,0	34 Provinsi		Pemda/DAK
ProP : Peningkatan Produksi rumput laut	Jumlah Produksi Rumput Laut (Juta ton)	11,0	11,6	11,9	12,1	12,3	73,6			
<i>Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat</i>	<i>Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (kg)</i>	200.000,0	350.000,0	400.000,0	450.000,0	500.000,0	73,6	18 provinsi		KKP
ProP : Peningkatan Produksi garam	Jumlah Produksi Garam (Juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	751,7			
<i>Lahan Garam yang difasilitasi</i>	<i>Jumlah lahan garam yang difasilitasi (Ha)</i>	600,0	750,0	750,0	750,0	750,0	381,0	12 Provinsi		KKP
<i>Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat</i>	<i>Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi (Unit)</i>	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	170,7	12 Provinsi		KKP
	<i>Jumlah sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun (Unit)</i>	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	80,0	4 Provinsi		KKP
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam - Menu DAK</i>	<i>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana tambak garam (Provinsi)</i>	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	120,0	13 Provinsi		Pemda/DAK
ProP : Karantina Ikan dan jaminan mutu							809,2			
<i>Sarana dan prasarana pengawasan karantina</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengawasan karantina (Lokasi)</i>	25,0	28,0	30,0	32,0	32,0	296,8	10 Provinsi		KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.35

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Operasional pengawasan mutu hasil perikanan	Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor (Persentase)	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	113,9	34 Provinsi		KKP
Sarana dan prasarana pengujian mutu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu (Lokasi)	33,0	35,0	37,0	38,0	38,0	148,8	34 Provinsi		KKP
Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit Kerja)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	87,4	34 Provinsi		KKP
	Jumlah unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium (SNI 8340:2016) (Unit Kerja)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	34 Provinsi		KKP
	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 (Unit Kerja)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	34 Provinsi		KKP
	Jumlah unit pelaksana teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) (Unit Kerja)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	34 Provinsi		KKP
Laporan Penindakan Pelanggaran Perkarantinaaan dan Keamanan Hayati Ikan	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan ikan yang diselesaikan (Persentase)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	26,3	34 Provinsi		KKP
Operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI (Persentase)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	136,1	34 Provinsi		KKP
KP : Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (Rp Triliun)	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	523,5			
	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102,0	103,0	105,0	106,0	107,0				
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (indeks)	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0				
Prop : Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi (orang)	190.000,0	172.000,0	174.000,0	176.000,0	178.000,0	146,8			
Bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (Orang)	150.000,0	120.000,0	120.000,0	120.000,0	120.000,0	107,7	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.36

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi</i>	<i>Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya (Hektar)</i>	5.000,0	6.000,0	7.500,0	9.000,0	10.000,0	39,1	33 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
ProP : Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (Rp Triliun)	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	234,5			
<i>Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap</i>	<i>Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan) (Nelayan)</i>	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	34,3	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya</i>	<i>Jumlah fasilitas kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi)</i>	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	15,0	25 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Kampung Nelayan Maju</i>	<i>Jumlah Kampung Nelayan Maju (Lokasi)</i>	-	10,0	10,0	15,0	20,0	55,0	20 lokasi		KKP
<i>Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (Bidang)</i>	<i>Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (Bidang)</i>	13.000,0	13.000,0	13.000,0	13.000,0	13.000,0	8,5	23 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Sertifikasi hak atas tanah nelayan yang difasilitasi sertifikasinya</i>	<i>Jumlah fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan (Bidang)</i>	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	27,8	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Pelaku usaha yang difasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi (Pelaku usaha)</i>	1.510,0	1.620,0	1.730,0	1.840,0	1.950,0	30,7	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya</i>	<i>Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (Kelompok)</i>	2.250,0	2.400,0	2.550,0	2.750,0	3.000,0	16,6	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Penumbuhan wirausaha KP</i>	<i>Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (wirausaha)</i>	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	11,0	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP</i>	<i>Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga usaha)</i>	20,0	30,0	35,0	40,0	45,0	9,5	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

A.1.37

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya</i>	<i>Jumlah Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP)</i>	2.900,0	4.000,0	5.000,0	6.000,0	7.000,0	26,3	34 Provinsi		KKP
Prop : Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	142,2			
<i>Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi</i>	<i>Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)</i>	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	84,1	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Alokasi Izin yang Diterbitkan</i>	<i>Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan (Unit)</i>	10.500,0	10.600,0	10.650,0	10.700,0	10.750,0	16,0	34 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	KKP
<i>Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya</i>	<i>Jumlah kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (Unit)</i>	17.100,0	21.500,0	21.750,0	22.000,0	22.350,0	42,1	Pusat dan Daerah		KKP
KP : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5,0	8,0	11,0	13,0	15,0	1.731,1			
Prop : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	(Mutu)						1.070,4			
<i>Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih</i>	<i>Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (Orang)</i>	25.200,0	26.000,0	27.000,0	28.000,0	30.000,0	289,3	34 Provinsi	<i>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</i>	KKP
<i>Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP</i>	<i>Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (Kelompok)</i>	41.000,0	42.000,0	43.000,0	44.000,0	45.000,0	543,6	34 Provinsi		KKP
<i>Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</i>	<i>Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terstandar (unit)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	10,0	237,5	<i>Tegal, Banyuwangi, Ambon, Medan, Sukamandi, Bitung, Palembang</i>		KKP
Prop : Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan							660,8			
<i>Teknologi Hasil Riset Perikanan</i>	<i>Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan (Paket)</i>	23,0	30,0	30,0	30,0	30,0	105,2	5 Provinsi		KKP
<i>Sarana dan Prasarana Riset Perikanan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Perikanan (Unit)</i>	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	170,3	4 Provinsi	<i>Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng</i>	KKP
<i>Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan</i>	<i>Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan (paket)</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	35,3	<i>Jakarta Utara</i>		KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.38

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Kelautan (Unit)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	207,2	7 Provinsi		KKP
Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar (Scene)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	87,9	BROL-Perancak		KKP
Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar	Jumlah Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar (Unit)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	32,9	BROL-Perancak		KKP
Bahan Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang Dihasilkan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindakan lanjut Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang dikoordinasikan (Dokumen)	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	22,0	Pusat		Kemenko Marin
PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	6.006,8			
	Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0				
	Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5				
KP : Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan (Persen)	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	542,5			
ProP : Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk							297,0			
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk (KUMKM)	1.703,0	2.000,0	2.100,0	2.205,0	2.315,0	31,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemen KUKM
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi	Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi (Produk/usaha)	250,0	270,0	330,0	230,0	200,0	41,1	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kememparekraf
Jumlah Pengguna Pasar Lelang	Jumlah Pelaku Pengguna Pasar Lelang (Pelaku)	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	9,5	Riau, Jambi, Lampung, Bali, NTB, Sulut,Sultra, Gorontalo, Jabar, Jatim, Sulsel, Jateng, Sumbar, DKI Jakarta		Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.39

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembinaan Penerapan SPK bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha dan LPK yang dibina penerapan SPK (Pelaku Usaha dan LPK)</i>	225,0	350,0	430,0	585,0	628,0	41,1	Pusat		BSN
<i>Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis</i>	<i>Jumlah stakeholder yang terlayani standarisasi dan penilaian kesesuaian (Stakeholder)</i>	1.800,0	1.800,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	25,0	Makassar, Riau, Palembang, Surabaya, Bekasi		BSN
<i>Pengembangan IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Berbasis Teknologi</i>	<i>Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))</i>	6,0	20,0	30,0	50,0	80,0	33,5	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenperin
<i>Pengembangan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Berbasis Teknologi</i>	<i>Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))</i>	8,0	20,0	40,0	60,0	100,0	33,5	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenperin
<i>Pengembangan IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Berbasis Teknologi</i>	<i>Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))</i>	6,0	20,0	30,0	50,0	80,0	28,4	Pusat	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	Kemenperin
<i>Pengembangan Layanan IKM Persepatuan melalui BPIPI</i>	<i>Layanan BPIPI (layanan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	46,5	Sidoarjo, Jawa Timur		Kemenperin
<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan mendukung Pengembangan IKM Ekspor, Kemitraan Usaha, dan Penerapan Making Indonesia 4.0</i>	<i>Rekomendasi Kebijakan (Rekomendasi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,4	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenperin
ProP : Perluasan Kemitraan Usaha							141,1			
<i>Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar</i>	<i>TERFASILITASINYA KEMITRAAN strategis ANTARA KUMK DENGAN USAHA MENENGAH (UM) DAN USAHA BESAR (UB) (KUMK)</i>	<i>150 KUMK di 3 Lokasi</i>	<i>170 KUMK di 3 Lokasi</i>	<i>179 KUMK di 3 Lokasi</i>	<i>187 KUMK di 3 Lokasi</i>	<i>197 KUMK di 4 Lokasi</i>	38,8	Pusat	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Kemen KUMK
<i>Advokasi Kemitraan</i>	<i>Jumlah Advokasi Kemitraan (Advokasi)</i>	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	6,5	Pusat	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	KPPU
<i>Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan</i>	<i>Jumlah Perkara Pengawasan Kemitraan (Perkara)</i>	18,0	19,0	21,0	23,0	25,0	17,4	Pusat	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	KPPU
<i>Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan</i>	<i>Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan (Laporan)</i>	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1,2	Pusat	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	KPPU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.40

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak dalam rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri</i>	<i>Terjalannya kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak (Kemitraan)</i>	3,0					3,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Untuk Industri Besar dan Sedang</i>	<i>Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM Kumulatif)</i>	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	24,8	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Untuk Industri Besar dan Sedang</i>	<i>Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM Kumulatif)</i>	20,0	60,0	90,0	125,0	165,0	24,8	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Untuk Industri Besar dan Sedang</i>	<i>Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM Kumulatif)</i>	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	24,8	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
Prop : Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra							104,4			
<i>KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan</i>	<i>Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan (KUKM)</i>	25,0	40,0	42,0	44,0	46,0	30,9	Pusat	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kemen KUKM</i>
<i>KUKM Sektor Perikanan dan Peternakan yang diperkuat kapasitas usaha melalui Kemitraan</i>	<i>Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang perikanan dan peternakan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan (KUKM)</i>	25,0	40,0	42,0	44,0	46,0	33,4	Pusat	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kemen KUKM</i>
<i>KUKM bidang Industri dan Jasa yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan</i>	<i>KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA MELALUI KEMITRAAN (KUKM)</i>	25,0	40,0	42,0	44,0	46,0	30,9	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemen KUKM</i>
<i>Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism</i>	<i>Jumlah Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism (KUMKM)</i>	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	9,3	Pusat	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen KUKM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.41

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal (8.10.1(b)) (Persen)	25,2	26,5	27,8	29,3	30,8	586,8			
	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (Persen)	19,8	20,3	20,9	21,4	22,0				
	Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*) (Persen)	2,4	2,8	3,4	4,1	5,0				
	Proporsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor produksi (Persen)	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0				
ProP : Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha							551,3			
<i>Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (Start Up Capital)</i>	<i>Tersalurkannya Dukungan Modal Awal Usaha kepada Wirausaha Pemula (Orang)</i>	1.900,0	2.000,0	2.100,0	2.205,0	2.315,0	167,1	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kemen KUKM
<i>Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi</i>	<i>Jumlah Modal yang disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi (Miliar)</i>	255,0	270,0	320,0	240,0	220,0	255,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenparekraf
<i>Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi</i>	<i>Jumlah Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif (Miliar)</i>	5.082,0	5.225,0	5.650,0	5.150,0	4.900,0	128,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenparekraf
ProP : Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit							31,0			
<i>Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Didampingi Mengakses dan Mengelola Pembiayaan/ Kredit KUR</i>	<i>Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi mangakses KUR (UMi)</i>	3.000,0	5.000,0	5.250,0	5.513,0	5.788,0	24,6	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kemen KUKM
<i>Usaha mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mengakses kredit melalui lembaga keuangan non</i>	<i>Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi melalui kerjasama dengan perusahaan fintech (UMK)</i>	-	750,0	788,0	827,0	868,0	6,5	Pusat		Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM							4,4			
<i>Desain skema pembiayaan usaha</i>	<i>Jumlah skema pembiayaan yang dikembangkan (Skema)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,4			Kemen KUKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.42

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi							216,4			
	jumlah koperasi moderen yang dikembangkan (unit)	25,0	75,0	200,0	340,0	500,0				
ProP : Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi							169,8			
<i>Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan</i>	<i>Kenaikan jumlah PPKL (PPKL)</i>	<i>100,0</i>	<i>113,0</i>	<i>119,0</i>	<i>125,0</i>	<i>131,0</i>	<i>15,2</i>	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kemen KUKM</i>
<i>Pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi</i>	<i>Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi (Orang)</i>	<i>3.360,0</i>	<i>4.000,0</i>	<i>4.200,0</i>	<i>4.410,0</i>	<i>4.631,0</i>	<i>103,0</i>	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kemen KUKM</i>
<i>Pelatihan perkoperasian syariah bagi pengurus dan manajer koperasi</i>	<i>Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi (Orang)</i>	<i>1.690,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.100,0</i>	<i>2.205,0</i>	<i>2.315,0</i>	<i>51,6</i>	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kemen KUKM</i>
ProP : Pendampingan kelompok untuk membentuk koperasi							9,9			
<i>Pendampingan kelompok pra koperasi untuk membentuk koperasi</i>	<i>Terlaksananya Penyuluhan Pembentukan Koperasi (Kelompok Pra Koperasi)</i>	<i>500,0</i>	<i>300,0</i>	<i>331,0</i>	<i>347,0</i>	<i>599,0</i>	<i>9,9</i>	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kemen KUKM</i>
ProP : Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha							21,6			
<i>Pengembangan akses dan jaringan koperasi</i>	<i>Jumlah Koperasi yang dikembangkan jaringan dan akses ke dalam dan luar negeri (Koperasi)</i>	<i>-</i>	<i>2,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>4,3</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemen KUKM</i>
<i>Konferensi Koperasi Nasional</i>	<i>Terselenggaranya Konferensi Koperasi (Forum)</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>17,2</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemen KUKM</i>
ProP : Pengembangan Inovasi Koperasi							15,1			
<i>Pengembangan inovasi koperasi</i>	<i>Jumlah Koperasi model baru yang dikembangkan (Koperasi)</i>	<i>-</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>15,1</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemen KUKM</i>
KP : Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha	Pertumbuhan jumlah wirausaha (Persen)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4.582,1			
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Kumulatif)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (Persen)	18,5	18,9	19,3	19,6	20,0				
	Penumbuhan startup (unit)	700,0	1.400,0	2.100,0	2.800,0	3500 (kumulatif)				
	ProP : Pelatihan Kewirausahaan						2.309,0			
<i>Pemberdayaan Kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan</i>	<i>Terlatihnya SDM KUMKM melalui pelatihan kewirausahaan (Orang)</i>	<i>6.500,0</i>	<i>7.500,0</i>	<i>7.875,0</i>	<i>8.269,0</i>	<i>8.682,0</i>	<i>194,1</i>	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemen KUKM</i>
<i>Wirausaha baru</i>	<i>Jumlah wirausaha baru (orang)</i>	<i>43.340,0</i>	<i>45.057,0</i>	<i>47.782,0</i>	<i>50.171,0</i>	<i>52.680,0</i>	<i>981,4</i>	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemenaker</i>
<i>Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan</i>	<i>Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan (orang)</i>	<i>5.000,0</i>	<i>5.250,0</i>	<i>5.513,0</i>	<i>5.788,0</i>	<i>6.078,0</i>	<i>150,7</i>	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemenaker</i>
<i>Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani</i>	<i>Jumlah wirausaha muda pertanian yang ditumbuhkan</i>	<i>1.513,0</i>	<i>1.763,0</i>	<i>2.013,0</i>	<i>2.263,0</i>	<i>2.513,0</i>	<i>486,6</i>	<i>Polbangtan (Medan, Bogor, Yogya, Magelang, Malang, Gowa, Manokwari) dan SMK PP (Sembawa Palembang, Banjarbaru Kalsel, Kupang NTT)</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Fasilitasi pemuda sebagai kader wirausaha</i>	<i>Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan</i>	<i>5.000,0</i>	<i>5.000,0</i>	<i>5.000,0</i>	<i>5.000,0</i>	<i>5.000,0</i>	<i>24,1</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemempora</i>
<i>Mahasiswa Mulai Berwirausaha</i>	<i>Jumlah Mahasiswa Mulai Berwirausaha</i>	<i>3.000,0</i>	<i>4.000,0</i>	<i>4.500,0</i>	<i>5.000,0</i>	<i>5.500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemen Ristek/ BRIN</i>
<i>Wirausaha yang Meningkatkan Pendapatannya Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal</i>	<i>Jumlah wirausaha yang meningkatkan pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	<i>41,8</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemendes, PDT & TRANS</i>
<i>Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga</i>	<i>Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi (Orang)</i>	<i>1.500,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.100,0</i>	<i>2.205,0</i>	<i>2.315,0</i>	<i>50,6</i>	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemen KUKM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.44

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah</i>	<i>Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB (Kumulatif))</i>	810,0	2.800,0	4.200,0	5.600,0	7.000,0	79,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah</i>	<i>Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB (Kumulatif))</i>	1.400,0	2.800,0	4.200,0	5.600,0	7.000,0	79,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah</i>	<i>Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB (Kumulatif))</i>	1.200,0	2.400,0	3.600,0	4.800,0	6.000,0	79,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pelatihan bagi dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dalam memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh peningkatan kapasitas</i>	<i>Jumlah dinas yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan korban kekerasan (Unit)</i>		9,0	9,0	8,0	8,0	14,4	34 Provinsi		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	<i>Persentase Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang difasilitasi dalam pendampingan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Persen)</i>		31,0	14,0	27,0	28,0	5,4	32 Provinsi		<i>Kemen PPPA</i>
	<i>Jumlah SDM pendamping perempuan pelaku kewirausahaan (Mekaar) yang ditingkatkan kapasitasnya tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Orang)</i>		18.000,0	18.000,0	18.000,0	18.000,0	21,1	32 Provinsi		<i>Kemen PPPA</i>
Prop : Inkubasi Usaha							531,9			
<i>Fasilitasi Ide usaha melalui kompetisi dan inkubasi</i>	<i>Terlaksananya Jumlah Inkubator yang memberikan pendampingan pengembangan ide usaha (Inkubator)</i>	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	14,9	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemen KUKM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.45

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Wirausaha baru inkubasi bisnis	Jumlah wirausaha yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis (orang)	9.000,0	9.270,0	9.550,0	9.835,0	10.130,0	400,2	34 Provinsi		Kemenaker
Pre-Start Up yang Difasilitasi (termasuk melalui Digital Lab, Digital Entrepreneurship, Pemagangan Internasional)	Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi (Orang/komunitas)	250,0	384,8	400,0	372,7	363,6	116,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kememparekraf
ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha							1.370,8			
Sarana prasarana layanan usaha terpadu	Terwujudnya pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (PLUT-KUMKM) (Unit)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	154,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemen KUKM
Pedagang skala mikro informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi	Tersedianya fasilitas PKL untuk memperoleh kepastian tempat usaha (UMI)	350,0	368,0	386,0	405,0	425,0	23,0	Pusat		Kemen KUKM
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya	Jumlah BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	71,1			Kemendes, PDT & TRANS
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	34,0	34,0	34,0	35,0	35,0	352,5	Pusat		Kemendes, PDT & TRANS
Peningkatan Kewirausahaan dan Bantuan Pemasaran	Jumlah bantuan sarana usaha perdagangan (Unit)	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	644,8	Pusat		Kemendag
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan	Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang mendapat pembinaan (Pelaku Usaha/Aparatur)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	74,7			Kemendag
UMKM Go Online	Jumlah (Active Selling) UMKM Go Online (UMKM)	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	2.000,0	50,0		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemen Kominfo
ProP : Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah							370,3			
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah provinsi yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya (Provinsi)	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	370,3	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.46

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Kontribusi usaha sosial (Persen PDB)	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	79,2			
ProP : Pendampingan akses permodalan bagi wirausaha sosial berbasis ekonomi kreatif							56,8			
<i>Social Entrepreneur Mentoring Program</i>	<i>Jumlah Social Entrepreneur yang difasilitasi (Orang/ komunitas)</i>	-	685,0	725,0	690,0	650,0	56,8	<i>Pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
ProP : Pembinaan Wirausaha Sosial							22,4			
<i>Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga</i>	<i>(Orang)</i>	600,0	700,0	735,0	772,0	810,0	18,1	<i>Pusat</i>		<i>Kemen KUKM</i>
<i>Forum Kewirausahaan Sosial</i>	<i>(Forum)</i>	-	1,0	1,0	1,0	1,0	4,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemen KUKM</i>
PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	800.341,9			
	Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8				
	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1				
	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5				
	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689				
	Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4				
	Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0				
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5				
	Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7				
	Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0				
	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0				
	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0				
KP : Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (Persen)	8,09-8,22	8,21-8,37	8,33-8,51	8,45-8,65	8,57-8,79	152.101,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.47

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan(9.2.1*) (Persen)	19,7	19,8	20,0	20,4	21,0				
	Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen)	5,5	6,1	6,9	7,7	8,4				
	Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen)	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0				
	Peningkatan produksi kakao (Persen)	2,1	2,3	2,5	2,6	2,7				
	Peningkatan produksi kopi (Persen)	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5				
	Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0				
	Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen)	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0				
	Peningkatan produksi buah-buahan (Persen)	3,9	4,3	4,7	5,2	5,7				
	Peningkatan produksi sayuran (Persen)	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1				
	Peningkatan produksi florikultura (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5				
ProP : Pengembangan Industri berbasis perkebunan							5.929,6			
<i>Kawasan Kopi</i>	<i>Kawasan Kopi (Ha)</i>	<i>11.750,0</i>	<i>11.750,0</i>	<i>11.750,0</i>	<i>11.750,0</i>	<i>11.750,0</i>	<i>87,7</i>	<i>15 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Kawasan Kakao</i>	<i>Kawasan Kakao (Ha)</i>	<i>10.150,0</i>	<i>10.150,0</i>	<i>10.150,0</i>	<i>10.150,0</i>	<i>10.150,0</i>	<i>139,3</i>	<i>11 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Kawasan Karet</i>	<i>Kawasan Karet (Ha)</i>	<i>8.300,0</i>	<i>8.300,0</i>	<i>8.300,0</i>	<i>8.300,0</i>	<i>8.300,0</i>	<i>153,8</i>	<i>9 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Kawasan Kelapa</i>	<i>Kawasan Kelapa (Ha)</i>	<i>13.005,0</i>	<i>13.005,0</i>	<i>13.005,0</i>	<i>13.005,0</i>	<i>13.005,0</i>	<i>89,2</i>	<i>12 Provinsi</i>	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kementan</i>
<i>Area Tanaman Sagu</i>	<i>Area Tanaman Sagu (Ha)</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>8,7</i>	<i>2 Provinsi</i>		<i>Kementan</i>
<i>Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan</i>	<i>Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (Desa)</i>	<i>69,0</i>	<i>69,0</i>	<i>69,0</i>	<i>69,0</i>	<i>69,0</i>	<i>63,0</i>	<i>15 Provinsi</i>		<i>Kementan</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.48

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (Pekebun)	7.400,0	7.400,0	7.400,0	7.400,0	7.400,0	40,8	14 Provinsi	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Kementan
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun (Ha)	1.245,0	1.245,0	1.245,0	1.245,0	1.245,0	84,7	15 Provinsi		Kementan
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (Kasus)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	6,2	13 Provinsi	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Kementan
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (Ha)	11.425,0	11.425,0	11.425,0	11.425,0	11.425,0	459,7	13 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh (Ha)	32.030,0	32.030,0	32.030,0	32.030,0	32.030,0	219,5	25 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Nursery	Nursery (Unit)	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	999,8	3 Provinsi	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Kementan
Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan (Unit)	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0	361,9	27 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	440,8	28 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan (Ha)	1.920,0	1.920,0	1.920,0	1.920,0	1.920,0	195,1	33 Provinsi		Kementan
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan (Batang)	41.195.600,0	41.195.600,0	41.195.600,0	41.195.600,0	41.195.600,0	2.261,2	32 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Benih Tebu	Jumlah benih tebu yang dihasilkan (Budset)	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0	1,8	4Provinsi		Kementan
Benih Tanaman Palma	Jumlah benih tanaman palma yang dihasilkan (Butir)	196.420,0	196.420,0	196.420,0	196.420,0	196.420,0	14,0	27 Provinsi		Kementan
Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	Varietas Unggul Tanaman Perkebunan (Varietas)	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	25,6	3 Provinsi		Kementan
Teknologi Tanaman Perkebunan	Teknologi Tanaman Perkebunan (Teknologi)	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	50,7	3 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.49

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang (Model)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	93,4	2 Provinsi		Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan (Teknologi Diseminasi)	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	28,7	3 Provinsi		Kementan
Benih komoditas perkebunan non strategis	Benih komoditas perkebunan non strategis (Pohon)	1.148.520,0	1.148.520,0	1.148.520,0	1.148.520,0	1.148.520,0	54,9	27 Provinsi		Kementan
Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB (Model)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	37,2	3 Provinsi		Kementan
VUB Bibit Tebu (Budset)	Jumlah VUB Bibit Tebu (Budset)	3.370.000,0	3.400.000,0	3.450.000,0	3.500.000,0	4.000.000,0	5,5	2 Provinsi		Kementan
Benih Unggul Tebu Mendukung Kemandirian Benih	Jumlah Benih Unggul Tebu (Budset)	-	-	-	-	-	0,0	2 Provinsi		Kementan
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah daerah yang menyusun rencana dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah)		6,0	12,0	18,0	25,0	2,5	Pusat	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Kemendagri
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi (Paket Rekomendasi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	Pusat		Kemenko Perekonomian
ProP : Pengembangan industri berbasis hortikultura							4.218,0			
Kawasan Bawang putih	Luas Kawasan Bawang putih (hektar)	8.353,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	1.639,2	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Kawasan Sayuran Lainnya	Luas Kawasan Sayuran Lainnya (hektar)	760,1	760,1	760,1	760,1	760,1	78,1	Pusat, 12 provinsi		Kementan
Benih Umbi	Luas Produksi Benih Umbi (m2)	1.570.000,0	1.570.000,0	1.570.000,0	1.570.000,0	1.570.000,0	106,8	31 Provinsi		Kementan
Benih Batang	Luas Produksi Benih Batang (batang)	4.808.000,0	4.808.000,0	4.808.000,0	4.808.000,0	4.808.000,0	188,0	33 Provinsi		Kementan
Penerapan PHT (PPHT)	Jumlah Penerapan PHT (PPHT) (Kelompok)	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	48,2	30 Provinsi		Kementan
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim (hektar)	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	11,0	31 Provinsi		Kementan
Sarana Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Jumlah Kelembagaan Perlindungan Hortikultura (Unit)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	26,9		Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.50

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
GAP Buah dan Florikultura	Jumlah GAP Buah dan Florikultura (Kelompok)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	29,3	20 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Registrasi Lahan Usaha	(Lahan Usaha)	-	-	-	-	-	0,0			Kementan
Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura	Jumlah Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura (Unit)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	20,1	17 Provinsi		Kementan
Sertifikasi Benih Hortikultura	Jumlah Sertifikasi Benih Hortikultura (unit)	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	152,6	32 Provinsi		Kementan
Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Jumlah Sarana Prasarana Benih Hortikultura (Unit)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,5	16 Provinsi		Kementan
Kawasan Jeruk	Luas Kawasan Jeruk (hektar)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	48,8	9 Provinsi		Kementan
Kawasan Florikultura	Luas Kawasan Florikultura (M2)	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	274,7	12 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Kawasan Mangga	Luas Kawasan Mangga (hektar)	1.375,0	1.375,0	1.375,0	1.375,0	1.375,0	67,8	7 Provinsi		Kementan
Kawasan Manggis	Luas Kawasan Manggis (hektar)	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	109,9	6 Provinsi		Kementan
Kawasan Pisang	Luas Kawasan Pisang (hektar)	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	213,1	6 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Kawasan Durian	Luas Kawasan Durian (hektar)	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	87,9	10 Provinsi		Kementan
Kawasan Buah Lainnya	Luas Kawasan Buah Lainnya (hektar)	1.351,0	1.351,0	1.351,0	1.351,0	1.351,0	93,4	5 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Area Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah Area Pengendalian OPT Hortikultura (hektar)	14.215,0	14.215,0	14.215,0	14.215,0	14.215,0	357,8	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
GHP Hortikultura	Jumlah GHP Hortikultura (kelompok)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	12,8	16 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Kementan
Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Jumlah Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura yang teregistrasi (Unit)	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	13,4	9 Provinsi		Kementan
Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Sarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran hortikultura (Unit)	462,0	462,0	462,0	462,0	462,0	305,9	34 Provinsi		Kementan
Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Fasilitas Prasarana Produk Hortikultura (unit)	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	68,4	19 Provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.51

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Benih Buah Tropika dan Sub Tropika</i>	<i>Benih Buah Tropika dan Sub Tropika (Batang)</i>	19.000,0	19.000,0	19.000,0	19.000,0	19.000,0	4,9	2 Provinsi		Kementan
<i>Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang</i>	<i>Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang (Model)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	93,4	2 Provinsi		Kementan
<i>Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura</i>	<i>Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura (Varietas)</i>	17,0	20,0	23,0	25,0	27,0	26,9	3 Provinsi		Kementan
<i>Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura</i>	<i>Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Teknologi)</i>	10,0	10,0	11,0	11,0	12,0	44,6	3 Provinsi		Kementan
<i>Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Hortikultura</i>	<i>Diseminasi, Inovasi, Teknologi Komoditas Hortikultura (Teknologi Diseminasi)</i>	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	63,5	3 Provinsi		Kementan
ProP : Pengembangan industri berbasis tanaman obat							67,2			
<i>GAP Sayuran dan Tanaman Obat</i>	<i>Jumlah GAP Sayuran dan Tanaman Obat (Kelompok)</i>	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	6,7	5 Provinsi	<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	Kementan
<i>Kawasan Tanaman Obat</i>	<i>Luas Kawasan Tanaman Obat (hektar)</i>	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	47,6	11 Provinsi		Kementan
<i>Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu (Paket)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,8	1 Provinsi		Kementan
ProP : Pengembangan industri berbasis kehutanan							146,9			
<i>Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR,</i>	<i>Jumlah produksi hasil hutan kayu (juta m3/ tahun)</i>	47,0	50,0	55,0	57,0	60	50,0	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	Kemen LHK
<i>Pengembangan industri kehutanan berbasis kayu</i>	<i>Jumlah Produk Kayu Olahan Bersertifikat Legalitas Kayu (Juta m3)</i>	45	45	45	45	45	6,8	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	Kemen LHK
<i>Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu</i>	<i>Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu melalui Pembukaan Kran Ekspor Log Terbatas (Dokumen)</i>	1	1	1	1	1	5,0	Pusat		KLHK, Kemenperin, Kemen Perdagangan, Kemenkeu
<i>Pengembangan industri primer kehutanan berbasis nonkayu</i>	<i>Jumlah industri primer kehutanan berbasis nonkayu (Unit)</i>	6	6,0	7,0	7,0	7,0	13,0	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	Kemen LHK
<i>Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati</i>	<i>Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit) (Unit)</i>	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	6,8	Pusat		Kemen LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.52

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat</i>	<i>Peningkatan Kapasitas produksi sektor Industri Kimia Hulu (Persentase)</i>	2,5	3,5	4,5	6,0	7,0	46,5	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</i>	<i>Persentase Rekomendasi yang Ditindak lanjuti (Rekomendasi)</i>	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	18,8	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
ProP : Pengembangan industri Kemaritiman	Nilai ekspor perikanan (USD miliar)	6,2	6,6	7,0	7,5	8,0	1.407,7			
<i>Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan</i>	<i>Berkembangnya industri antara baha baku hasil samping perikanan (industri)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	22,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan</i>	<i>Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan (Paket Kebijakan)</i>	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan</i>	<i>Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (unit)</i>	31,0	35,0	35,0	40,0	45,0	385,3	34 Provinsi	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KKP</i>
<i>Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan</i>	<i>Jumlah sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan (unit)</i>	41,0	41,0	41,0	45,0	50,0	171,9	34 Provinsi	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KKP</i>
<i>Sarana dan Prasarana pemasaran yang dibangun</i>	<i>Jumlah pasar ikan yang dibangun (unit)</i>	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	151,8	10 Provinsi	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KKP</i>
	<i>Jumlah sentra kuliner yang dibangun (unit)</i>	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.53

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional</i>	<i>Jumlah Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang dibangun (unit)</i>	-	3,0	3,0	3,0	3,0	450,0	3 Provinsi	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	KKP
<i>Keikutsertaan dalam promosi skala internasional</i>	<i>Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (USD Juta)</i>	250,0	275,0	300,0	325,0	350,0	63,7	5 negara	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	KKP
<i>Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan</i>	<i>Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (dokumen) (sertifikat)</i>	2.250,0	2.500,0	2.750,0	3.000,0	3.250,0	54,6	34 Provinsi	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	KKP
<i>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan yang disediakan (unit)</i>	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0	57,0	34 Provinsi	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	KKP
<i>UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste</i>	<i>Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste (lokasi)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	34,4	5 Provinsi	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	KKP
<i>Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability</i>	<i>Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)</i>	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	13,3	34 Provinsi	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	KKP
Prop : Pengembangan industri Kimia, Farmasi dan Logam							140.332,0			
<i>Alokasi Availability Payment KPBU Teluk Bintuni</i>	<i>Jumlah Industri yang terbangun (Jumlah Industri)</i>			1,0	1,0	1,0	825,0	Papua Barat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.54

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Industri daur ulang sampah plastik	Rasio impor bahan baku sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi terhadap PDB sektor industri non migas (Persentase)	1,0	2,1	2,0	2,0	2,0	36,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Pilot Project Produk Karet dalam rangka peningkatan utilisasi	Jumlah Perusahaan Pilot Project (Perusahaan)	-	2,0	2,0	2,0	2,0	19,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	Jumlah Industri yang Terbangun (Jumlah Industri)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	29,7	Pusat - Papua Barat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenperin
Pemanfaatan Limbah Sebagai Bahan Baku Industri Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persentase Pemanfaatan Limbah sebagai Bahan Baku Industri Barang Galian Non Logam (Persentase)	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	17,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyeqar	Jumlah industri antara sektro minuman, hasil tembakau dan bahany penyeqar yang berkembang (industri)		1,0	1,0	1,0	1,0	7,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenperin
Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - Ferronickel Stainless Steel	Tingkat utilisasi kapasitas produk (Persen)	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	25,3	Pusat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenperin
Konversi Batubara menjadi UDP							11.139,2			Antam
Rare Earth Element							74.075,7			Bukit Asam
Pengembangan Pabrik NPK							167,1		9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Timah
							4.200,0		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Pupuk Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.55

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Pabrik Methanol</i>							12.400,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Pupuk Indonesia</i>
<i>Pengembangan Pabrik Urea Senoro</i>							15.800,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Pupuk Indonesia</i>
<i>Proyek Pabrik Soda Ash dan AIF2</i>							3.600,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Pupuk Indonesia</i>
<i>Pabrik Asam Fosfat dan Asam Sulfat</i>							600,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Pupuk Indonesia</i>
<i>Pabrik Ammonium Nitrat</i>							100,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Pupuk Indonesia</i>
<i>Pabrik Semen Baturaja III Kapasitas 2,2 Juta Ton</i>							6.000,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Semen Baturaja</i>
<i>Proyek Pabrik Insulin</i>							715,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Indofarma</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.56

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Proyek Fasilitas Pengembangan Produk skala pilot dan biosimilar (Trastuzumab)</i>							532,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Biofarma</i>
<i>Proyek Fasilitas Yeast-Based (produksi bulk hepatitis B, insulin, HPV)</i>							126,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Biofarma</i>
<i>Pengembangan Pabrik Wheelset Kereta Api</i>							35,0			<i>Barata</i>
<i>Pembangunan Pabrik Forging</i>							560,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Barata</i>
<i>Penyerahan Pabrik AN Bontang</i>							270,0			<i>Dahana</i>
<i>Pembangunan Pabrik Elemented Detonator</i>							150,0			<i>Dahana</i>
<i>EDB, Composite, Rocket Motor (Fasell)</i>							7.700,0			<i>Dahana</i>
<i>Pengembangan Divisi Munisi, Alat Berat, Handakkom</i>							1.200,0			<i>Pindad</i>
KP : Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)	5 KI - 8 KEK	9 KI - 8 KEK	12 KI - 8 KEK	15 KI - 8 KEK	16 KI - 8 KEK	370.385,2			
Prop : Pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi							296.235,0			
<i>Fasilitasi Perizinan Kawasan Industri</i>	<i>Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)</i>	3,0	27,0	27,0	27,0	27,0	21,8	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri</i>	<i>Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)</i>	3,0	27,0	27,0	27,0	27,0	41,5	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemenperin</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.57

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI (Unit)	1,0	4,0	7,0	10,0	13,0	460,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenperin
Jalan Trans Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	109,5	109,5	89,5	89,5	89,5	5.123,6	Papua	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Trans Papua Barat	Panjang jalan yang dibangun (km)	109,5	109,5	89,5	89,5	89,5	800,0	Papua Barat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	Panjang jalan yang dibangun (km)		5,0	8,0	7,0	5,5	250,0	Papua Barat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)		4,5	6,0	2,1		120,0	Papua Barat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	38,1	Papua Barat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenhub
Pengembangan Bandara Bintuni	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	-	1,0	-	-	-	45,0	Papua Barat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenhub
Jalan akses KI Weda	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	25,0	275,0	Maluku Utara	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Pembangunan Bandara Weda	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	220,0	Maluku Utara	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenhub
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)	786,0	-	-	-	-	1.016,0	Sulawesi Tengah	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1,0	-	-	-	-	325,0	Sulawesi Tengah	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan dampak bencana Palu	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1,0	-	-	-	-	32,8	Sulawesi Tengah	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI/KEK Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	7,0	60,0	Sulawesi Tengah	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	812,0	Sulawesi Tengah	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenhub (PHLN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.58

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	245,0	Sulawesi Tengah	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenhub
Jalan Tol Maminasata	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	-	5,0	6.000,0	Sulawesi Selatan		Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Madura	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	5,0	50,0	Jawa Timur	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemen PU&PERA
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	Luas lahan kawasan (ha)	50,0	50,0	25,0	25,0	25,0	384,8	Jawa Timur	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	BPWS
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	Panjang jalan dibangun/ dipelihara (km)	22,8	26,3	24,8	31,1	29,4	308,6	Jawa Timur	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	BPWS
Jalan akses menuju KKJSM yang terintegrasi dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	20,0	20,0	20,0	180,0	Jawa Timur	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	BPWS
Jalan Akses KI Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	3,0	30,0	Jawa Tengah	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab. Brebes	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	-	5,0	5,0	-	80,0	Jawa Tengah	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Ketapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	12,0	123,0	Kalimantan Barat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/ Kayong Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Kalimantan Barat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2,0	-	-	-	10,0	Kalimantan Barat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Surya Borneo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	1,0	10,0	Kalimantan Tengah	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (berlanjut)	96 (berlanjut)	96 (berlanjut)	96 (berlanjut)	96 (selesai)	3.001,4	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenhub, Pemda, KPBU
Jalan Akses KI Jorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	6,0	60,0	Kalimantan Selatan	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Batu Licin	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	6,0	60,0	Kalimantan Selatan	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	-	-	1,0	-	-	45,0	Kalimantan Selatan	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenhub
Jalan Akses KIPi Tanah Kuning	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	12,5	12,5	600,0	Kalimantan Utara	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	115,0	Kalimantan Utara	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.59

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	Panjang jalan dibangun/ dipelihara (Km) (Km)	22,8 Km	26,3 Km	24,8 Km	31,1 Km	29,4 Km	308,6	Jawa Timur		BPWS
Jalan akses KI Sadai	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2,0	3,9	1,0		50,0	Bangka Belitung	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Jalan Trans Bangka	Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)						100,0	Bangka Belitung		Kemen PU&PERA
Jalan lintas Bintan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	25,0	-	250,0	Kepulauan Riau	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)						0,0	Kepulauan Riau		KemenPUPR (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)						36,3	Kepulauan Riau		Kemenhub
Jalan Akses KEK Galang Batang I	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1,8	-	-	-	11,8	Kepulauan Riau	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Moco	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)						75,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Jalan Akses KI Tanggamus	Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)					2,0	20,0	Lampung		Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Seimangke	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	10,0	30,0	Sumatera Utara	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	25.000,0	Sumatera Utara	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk Linggau)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (Km)	8,0	20,0	20,0	20,0	6,0	438,8	Sumatera Selatan		Kemenhub
Jalan akses KI Tanjung Enim	Panjang jalan yang dibangun (km)		3,0	4,0	4,3		85,0	Sumatera Selatan	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen PU&PERA
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (Km)					8,0	2.100,0	Sumatera Selatan		Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)					8,0	80,0	Sumatera Selatan		Kemen PU&PERA
Percepatan pembangunan smelter	Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (Kumulatif) (Unit Smelter)	4,0	30,0	31,0	31,0	31,0	23,5	Tersebar di Luar Pulau Jawa	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen ESDM
Pecepatan hilirisasi mineral skala kecil	Fasilitas percepatan hilirisasi mineral skala kecil (Unit Pengolahan)	32,0	39,0	51,0	42,0	41,0	5,0	Tersebar	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	Kemen ESDM
Pembangunan smelter aluminium di Balungan	Pembangunan smelter (Tahapan)	EPC (Engineering, Procurement and Construction)	EPC (Engineering, Procurement and Construction)	EPC (Engineering, Procurement and Construction)	EPC (Engineering, Procurement and Construction)	EPC (Engineering, Procurement and Construction)	12.196,2	Balungan, Kalimantan Utara	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	BUMN (PT.Antam-PT.Inalum)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.60

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan smelter tembaga di Gresik</i>	<i>Pembangunan smelter (Tahapan)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement and Construction)</i>	<i>EPC (Engineering, Procurement and Construction)</i>	<i>Operasional</i>	<i>-</i>	38.938,8	<i>Gresik, Jawa Timur</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta (PT.Freeport)</i>
<i>PT Ketapang Bangun Sarana</i>	<i>(Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Industri dan Smelter Alumunium)</i>	<i>Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,5 Mtpa</i>	<i>Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,5 Mtpa</i>	<i>Operasional Smelter Alumina Kapasitas 3,0 Mtpa</i>	<i>Operasional Smelter Alumina Kapasitas 4,5 Mtpa</i>	<i>Operasional Smelter Alumina Kapasitas 4,5 Mtpa</i>	18.200,0	<i>KI Ketapang</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>PT Bintang Alumina Indonesia</i>	<i>(Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Industri dan Smelter Alumunium)</i>	<i>Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa</i>	<i>Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa</i>	<i>Operasional Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa</i>	<i>Operasional Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa</i>	<i>Operasional Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa</i>	28.250,0	<i>KI/KEK Galang Batang</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>PT Indonesia Weda Bay Industrial Park</i>	<i>(Pembangunan Infrastruktur Fisik KI, Smelter Nikel dan Pabrik Baterai)</i>	<i>Pembangunan Power Plant, Smelter FeNi dan infrastruktur kawasan</i>	<i>Pembangunan Power Plant, Smelter FeNi dan infrastruktur kawasan</i>	<i>Pembangunan Power Plant, Smelter FeNi dan infrastruktur kawasan</i>	<i>Pembangunan Smelter dan Pabrik Baterai</i>	<i>Pembangunan Smelter dan Pabrik Baterai</i>	64.400,0	<i>KI Teluk Weda</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>PT Surya Borneo Industri</i>	<i>(Pembangunan Infrastruktur Fisik KI Surya Borneo)</i>						2.070,0	<i>KI Surya Borneo</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>PT Ration Bangka Abadi</i>	<i>(Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Industri Aneka Industri)</i>						5.000,0	<i>KI Sadai</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>KPBU KI Teluk Bintuni</i>	<i>(Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Pabrik Methanol)</i>			<i>Pembangunan infrastruktur kawasan</i>	<i>Pembangunan infrastruktur kawasan</i>	<i>Pembangunan infrastruktur kawasan</i>	11.300,0	<i>KI Teluk Bintuni</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>KPBU</i>
<i>PT Bintang Inti Industrial Estate</i>	<i>(Pembangunan infrastruktur Bintang Aerospace Park)</i>	<i>Pembangunan Runway Bintang Airport</i>	<i>Pembangunan Bandar Bintang</i>	<i>Pembangunan infrastruktur Aerospace</i>	<i>Pembangunan infrastruktur Aerospace</i>	<i>Pembangunan infrastruktur Aerospace</i>	10.500,0	<i>KI Bintang Aerospace</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>KI/KEK Sei Mangkei</i>	<i>(Pembangunan Kawasan dan Investasi Tenant)</i>						8.396,2	<i>KI/KEK Sei Mangkei</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>KI/KEK Palu</i>	<i>(Investasi Tenant)</i>						276,3	<i>KI/KEK Palu</i>	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Swasta</i>
<i>Konversi Batubara menjadi DMF</i>							46.900,0			<i>Bukit Asam</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.61

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan nilai tambah							74.150,2			
<i>Pengembangan Teknologi pembuatan logam neodymium (logam tanah jarang) dari monazite untuk bahan permanen magnet</i>	<i>Pengembangan dan penelitian pembuatan strong magnet dari bahan baku monazite hingga rancangan skala komersial (Tahapan)</i>	-	<i>Penelitian Teknologi solvent ekstraksi pembuatan neodymium oksida</i>	<i>Pengembangan teknologi garam lebur dalam pembuatan logam neodymium</i>	<i>Penelitian pencampuran logam neodymium dengan boron dan besi untuk menjadi strong magnet permanen</i>	<i>Rancangan DED pembuatan strong magnet skala komersial</i>	11,0	Pusat	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Kemen ESDM</i>
<i>Teknologi pirolisis batubara untuk produksi syncrude oil ,COG dan batubara kualitas tinggi</i>	<i>Pembangunan dan pengembangan pilot plant teknologi pirolisis batubara hingga desain skala komersial (Tahapan)</i>	-	<i>Pengadaan, perakitan, dan commisioning pilot plant pirolisis batubara di palimanan dengan kapasitas 25kg/ jam</i>	<i>ujicoba formula produksi syncrude oil</i>	<i>ujicoba syncrude skala lab di Pertamina sebagai umpan kilang mini</i>	<i>desain scale up pirolisis batubara skala komersial dan pemanfaatan syncrude pada kilang pertamina (satu rancang bangun, 2 usulan paten)</i>	9,8	Pusat		<i>Kemen ESDM</i>
<i>Pengembangan katalis sintetik untuk proses konversi syngas batubara menjadi DME</i>	<i>Pembuatan dan pengembangan katalis sintetik (Tahapan)</i>	-	<i>Pembuatan dan uji aktifitas Katalis</i>	<i>Optimalisasi Pembuatan dan uji aktifitas Katalis terpilih</i>	<i>scale up pemanfaatan katalis</i>	-	8,5	Pusat		<i>Kemen ESDM</i>
<i>Rekomendasi Wilayah Keprospekan Mineral</i>	<i>Jumlah rekomendasi wilayah keprospekan mineral (Rekomendasi)</i>	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0	40,8	Pusat		<i>Kemen ESDM</i>
<i>Dokumen Studi Kelayakan Mineral untuk mendukung kawasan industri (Dokumen)</i>	<i>Jumlah dokumen studi kelayakan mineral untuk mendukung kawasan industri (Dokumen)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Pusat		<i>Kemen ESDM</i>
<i>Rekomendasi Sumber Daya Potensi Batubara</i>	<i>Jumlah rekomendasi Sumber Daya batubara (Rekomendasi)</i>	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	54,6	Pusat		<i>Kemen ESDM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.62

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Gasifikasi Batubara Tanjung Enim</i>	<i>Konversi Batubara menjadi Urea, Dimethyl Ether (DME), dan Polypropylene (Tahapan)</i>	<i>Front End Engineering Design (FEED)</i>	<i>Engineering Procurement Construction (EPC)</i>	<i>Engineering Procurement Construction (EPC)</i>	<i>Engineering Procurement Construction (EPC)</i>	<i>Operasional (500 kta Urea, 400 kta DME, 450 kta Polypropylene)</i>	74.021,4	Tanjung Enim, Sumatera Selatan	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	BUMN (PT. Bukit Asam)
KP : Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (Destinasi)	5 (kumulatif)	10 (kumulatif)	10 (kumulatif)	10 (kumulatif)	10 (kumulatif)	175.879,7			
	Revitalisasi destinasi Bali (Destinasi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
	Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas (Unit)	25 (kumulatif)	25 (kumulatif)	25 (kumulatif)	25 (kumulatif)	25 (kumulatif)				
	Destinasi wisata berbasis Geopark (Destinasi)	16 (kumulatif)	16 (kumulatif)	16 (kumulatif)	16 (kumulatif)	16 (kumulatif)				
	Destinasi wisata bahari (Destinasi)	6 (kumulatif)	6 (kumulatif)	6 (kumulatif)	6 (kumulatif)	6 (kumulatif)				
Prop : Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Destinasi wisata alam prioritas (Unit)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	1.800,0			
<i>Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate)</i>	<i>Jumlah Taman Nasional Laut (Unit)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	400,0	Taman Nasional (TN) Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	KLHK, KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.63

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) = TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama)</i>	<i>Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Unit)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	500,0	<i>TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama)</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>KLHK, Kemendikbud</i>
<i>Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderawasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)</i>	<i>Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Unit)</i>	15	15	15	15	15	900,0	<i>TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderawasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen LHK</i>
ProP : Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata (Destinasi Pariwisata Prioritas)	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	169.582,0			
	(Destinasi Pariwisata Pengembangan)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0				
	(Revitalisasi Destinasi Bali)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
<i>Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan</i>	<i>Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP)</i>	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	33,0	<i>Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.64

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan</i>	<i>Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan (DPP)</i>	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0	47,0	<i>DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru</i>	<i>Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru (DPP)</i>	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	65,0	<i>Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Papua</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Revitalisasi Bali</i>	<i>Selesaiannya Revitalisasi Bali (Destinasi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	<i>Bali</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas</i>	<i>Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas (Destinasi)</i>	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	29,4	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.65

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas</i>	<i>Jumlah Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas (Dokumen)</i>	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	21,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Market sounding di destinasi investasi</i>	<i>Jumlah Market sounding di destinasi investasi (Event)</i>	-	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata</i>	<i>Jumlah Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata (Rekomendasi Kebijakan)</i>	-	1,0	2,0	2,0	2,0	21,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat</i>	<i>Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat (Daerah)</i>	-	10,0	10,0	10,0	10,0	8,4	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.66

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah</i>	<i>Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah (Daerah)</i>	-	10,0	10,0	10,0	10,0	8,4	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas</i>	<i>Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas (Daerah)</i>	-	4,0	5,0	6,0	7,0	44,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah Timur</i>	<i>Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah Timur (Daerah)</i>	-	10,0	10,0	10,0	10,0	8,4	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas</i>	<i>Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas (Daerah)</i>	-	4,0	5,0	6,0	7,0	44,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.67

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP)</i>	<i>Jumlah Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP) (Destinasi)</i>	1,0	3,0	3,0	3,0	1,0	28,6	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas</i>	<i>Jumlah Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas (Lokasi)</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata</i>	<i>Jumlah Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata (Dokumen)</i>	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0	28,5	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)</i>	<i>Jumlah Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage) (Dokumen)</i>	4,0	5,0	6,0	5,0	-	29,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.68

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya</i>	<i>Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya (Dokumen)</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	23,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemendikbud</i>
<i>Penyusunan concept note Bidding MICE Internasional</i>	<i>Jumlah Penyusunan concept note Bidding MICE Internasional (Dokumen)</i>	6,0	10,0	12,0	15,0	18,0	61,0	<i>pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan</i>	<i>Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan (Dokumen)</i>	10,0	12,0	14,0	15,0	15,0	69,3	<i>pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Kajian Pengembangan Kepariwisata</i>	<i>Jumlah Kajian Pengembangan Kepariwisata (Dokumen)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0	<i>pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata</i>	<i>Jumlah Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata (Dokumen)</i>	-	1,0	-	-	-	2,0	<i>pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)</i>	11,0	13,0	15,0	17,0	20,0	34,5	<i>pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)</i>	<i>Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas) (Taman Nasional Prioritas)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.69

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)</i>	<i>Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	52,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)</i>	<i>Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	84,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km) (km)</i>	-	-	-	-	20,0	223,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	38 <i>(berlanjut)</i>	17 <i>Selesai</i>	90 <i>(berlanjut)</i>	90 <i>(berlanjut)</i>	90 <i>(berlanjut)</i>	3.007,3	<i>pusat</i>		<i>Kemenuh</i>
<i>Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	15 <i>(berlanjut)</i>	15 <i>(berlanjut)</i>	15 <i>(selesai)</i>	24 <i>(berlanjut)</i>	24 <i>(berlanjut)</i>	1.010,0	<i>pusat</i>		<i>Kemenuh (KPBU)</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.70

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	15 <i>(berlanjut)</i>	15 <i>(berlanjut)</i>	15 <i>(selesai)</i>	24 <i>(berlanjut)</i>	24 <i>(berlanjut)</i>	1.010,0	<i>pusat</i>		<i>Kemenhub (KPBU)</i>
<i>Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)</i>	100,0	56,0	-	-	-	209,6	<i>pusat</i>		<i>Kemenhub</i>
<i>Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)</i>	91,0	20,0	20,0	30,0	53,0	699,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub</i>
<i>Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)</i>	65,0	60,0	70,0	70,0	60,0	908,2	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub</i>
<i>Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas</i>	<i>KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)</i>	2,0	-	-	-	-	7,5	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.71

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo</i>	<i>KA akses Bandara yang dibangun (km)</i>	13 <i>(berlanjut)</i>	13 <i>(berlanjut)</i>	13 <i>(selesai)</i>	-	-	240,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemhub</i>
<i>Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda</i>	<i>KA akses Bandara yang dibangun (km)</i>	-	-	-	10 <i>(berlanjut)</i>	10 <i>(selesai)</i>	300,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemhub</i>
<i>Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(selesai)</i>	10.000,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemhub, BUMN (Pelindo III), Swasta</i>
<i>Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa</i>	<i>Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)</i>	-	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(selesai)</i>	13,2	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemhub</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.72

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo</i>	<i>Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (km)</i>	60,0	-	-	-	-	600,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh</i>
<i>Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	3,8	3,8	3,8	3,8	150,1	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	3,0	3,0	3,0	85,0	<i>Jawa Tengah</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	3,0	3,0	-	-	45,0	<i>Jawa Tengah</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.73

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab. Purworejo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	5,5	5,5	5,5	5,5	176,0	Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA
<i>Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen</i>	<i>Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)</i>	-	-	3,8	-	-	19,0	Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA
<i>Pembangunan Bandara Sukabumi</i>	<i>Bandara baru yang dibangun (lokasi)</i>	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	400,0	Jawa Barat		Kemenhub
<i>Jalan Akses KSPN Borobudur</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	20,0	-	-	-	175,0	Yogyakarta	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA
<i>Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta</i>	<i>KA akses Bandara yang dibangun (km)</i>	6 (berlanjut)	6 (selesai)	-	-	-	800,0	yogyakarta	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.74

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Bandara Kulon Progo</i>	<i>Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	200,0	Yogyakarta	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub, BUMN
<i>Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	300,0	Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub, BUMN
<i>Jalan Lintas Utara Bali</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	1.083,0	1.083,0	933,0	-	1.050,0	Bali		Kemen PU&PERA
<i>Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	3,0	2,3	5,0	-	215,0	Bali		Kemen PU&PERA
<i>Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)</i>	<i>Jembatan yang dibangun (lokasi)</i>	-	1,0	-	-	-	80,0	Bali		Kemen PU&PERA
<i>Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	-	-	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	325,0	Bali		Kemenhub (KPBU)
<i>Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan KPBU)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	-	-	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	2.770,0	Bali		Kemenhub (KPBU)
<i>Pengembangan Pelabuhan Benoa</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	184,0	Bali	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub (KPBU)
<i>Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	150,0	Bali		Kemenhub (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.75

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan Bandara Bali Baru</i>	<i>Bandara baru yang dibangun (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Bali	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub
<i>Pengembangan Bandara Ngurah Rai</i>	<i>Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	900,0	Bali	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	BUMN
<i>Pembangunan Dermaga 3 Pelabuhan Padangbai</i>	<i>Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	-	3 (berlanjut)	3 (berlanjut)	3 (selesai)	-	255,0	Bali		Kemenhub
<i>Pengembangan Dermaga di Danau Batur</i>	<i>Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	45,0	Bali		Kemenhub
<i>Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi)</i>	<i>Jembatan yang dibangun (lokasi)</i>	-	-	-	-	1,0	0,0	Sumatera Selatan	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	KemenPUPR (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.76

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan By Pass Balige</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	7,0	6,5	-	-	-	135,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA
<i>Jalan Akses KSPN Danau Toba</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	5,0	16,5	12,5	12,5	12,5	1.333,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA
<i>Jalan Akses Terminal Tipe A</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	1,5	-	36,0	Sumatera Barat		Kemen PU&PERA
<i>Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	-	-	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	305,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub (KPBU)
<i>Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	-	-	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	1.105,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.77

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Bandara Kualanamou</i>	<i>Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200,0</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh, BUMN</i>
<i>Pengembangan Bandara Silangit</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh (KPBU)</i>
<i>Pengembangan Bandara Sibisa</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>124,2</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh</i>
<i>Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba</i>	<i>Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	<i>7 (berlanjut)</i>	<i>7 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>295,3</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.78

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan Trans Bangka</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	10,0	12,0	16,0	12,0	350,0	<i>Bangka Belitung</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Jalan Trans Belitung</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	5,0	8,0	10,0	7,0	210,0	<i>Bangka Belitung</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	120,0	<i>Bangka Belitung</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub, BUMN</i>
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	<i>Bangka Belitung</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.79

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bangka Belitung	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tq Berikat)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	10,0	12,0	80,0	Kepulauan Riau		Kemen PU&PERA
Jalan lintas Bintan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	25,0	-	250,0	Kepulauan Riau		Kemen PU&PERA
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1,0	-	-	-	0,0	Kepulauan Riau		KemenPUPR (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	36,3	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Dompok	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Bandara Tambelan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	62,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	49,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Jembatan Muna-Buton (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1,0	-	0,0	Sulawesi Tenggara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.80

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan Akses KSPN Wakatobi</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	30,0	225,0	<i>Sulawesi Tenggara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Jalan Akses Likupang (Dukungan KPBU)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>		4,0	5,0	4,3		120,0	<i>Sulawesi Utara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>KPBU</i>
<i>Jembatan Kapota (Wakatobi)</i>	<i>Jembatan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	1,0	250,0	<i>Sulawesi Tenggara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Jalan Akses Terminal Tipe A Liwas</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	3,0	-	72,0	<i>Sulawesi Utara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.81

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan Trans Pulau Buton (DAK/ APBN)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	3,4	5,0	4,8	4,7	4,4	279,7	<i>Sulawesi Tenggara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>KemenPUPR/ Pemd a</i>
<i>Jalan Trans Pulau Muna (DAK/ APBN)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	5,3	7,8	7,5	7,3	6,9	436,8	<i>Sulawesi Tenggara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>KemenPUPR/ Pemd a</i>
<i>Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	-	1,0	-	-	-	244,3	<i>Sulawesi Tenggara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub (KPBU)</i>
<i>Pengembangan Pelabuhan Wanci</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(selesai)</i>	-	90,0	<i>Sulawesi Tenggara</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.82

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Pelabuhan Likupang</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	1,0	-	-	-	-	7,5	Sulawesi Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenuh
<i>Pengembangan Pelabuhan Kaledupa</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	1,0	-	-	-	-	5,0	Sulawesi Tenggara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Hasanuddin</i>	<i>Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	250,0	Kota Makassar-Sulawesi Selatan		Kemenuh, BUMN
<i>Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	288,2	Sulawesi Tenggara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenuh
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.83

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	85,0	Sulawesi Utara	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh</i>
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	85,0	Sulawesi Utara	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh</i>
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	85,0	Sulawesi Tenggara	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh</i>
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	85,0	Sulawesi Tenggara	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenuh</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.84

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sulawesi Tenggara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub
Jalan perbatasan Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,0	-	-	-	-	98,4	Kalimantan Barat		Kemen PU&PERA
Jembatan Sambas Besar	jembatan yang dibangun (lokasi)					1,0	1.860,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	1,0	-	-	-	-	200,0	Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	115,0	Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Maratua	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	75,0	Prov. Kalimantan Timur		Kemenhub
Pengembangan Bandara Pangsuma-Putussibau	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	1,0	-	-	-	-	1,5	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Prov. Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-Sintete	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)				1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	30,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Penanganan Jalan lingkaran Nunukan	Panjang Jalan lingkaran yang dibangun/ ditingkatkan (km)	-	-	10,0	-	-	80,0	Kalimantan Utara		Kemen PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2,0	-	-	-	10,0	Kalimantan Barat		Kemen PU&PERA
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (Lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.000,0	Kalimantan Barat		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.85

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan Lingkar Pulau Morotai (Dukungan DAK/APBN)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	14,0	9,7	9,7	9,7	-	422,8	Maluku Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA
<i>Pengembangan Bandara Pitu-Morotai</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (Lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	47,0	Maluku Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub
<i>Trans Pulau Biak (DAK/APBN)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km) (km)</i>	12,9	18,9	18,2	17,6	16,6	1.054,4	Papua		Kemen PU&PERA
<i>Pengembangan Pelabuhan Sorong</i>	<i>Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (Lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30.000,0	Papua Barat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
<i>Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat</i>	<i>Jumlah bandara perairan yang dibangun (Lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Papua Barat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.86

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (Lokasi)</i>	1,0	-	-	-	-	0,8	Papua Barat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenuh
<i>Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat</i>	<i>Jumlah bandara perairan yang dibangun (Lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Papua Barat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenuh
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemenuh
<i>Jalan Bypass BIL-Mandalika</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	17,4	10,2	11,2	12,6	1.392,0	Nusa Tenggara Barat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemen PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.87

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan Akses KSPN Labuan Bajo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km) (km)</i>	6,7	21,4	21,4	21,4	21,4	1.402,2	<i>Nusa Tenggara Timur</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	4,5	4,0	5,0	4,2	150,0	<i>Nusa Tenggara Barat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>KemenPUPR (KPBU)</i>
<i>Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	1,0	-	-	-	-	28,5	<i>Nusa Tenggara Timur</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub (KPBU)</i>
<i>Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan</i>	<i>Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	150,0	<i>Nusa Tenggara Barat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemenhub</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.88

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Bandara Lombok</i>	<i>Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (Lokasi)</i>	1 <i>(berlanjut)</i>	1 <i>(selesai)</i>	-	-	-	350,0	Nusa Tenggara Barat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemhub, BUMN
<i>Investasi amenitas dan atraksi dalam kawasan pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>Jumlah investasi amenitas dan atraksi dalam kawasan pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (Destinasi Pariwisata Prioritas)</i>	3,0	5,0	5,0	5,0	10,0	94.208,2	10 DPP	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	S swasta
<i>Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata</i>	<i>Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata (Provinsi)</i>	11,0	11,0	19,0	19,0	34,0	2,0	Pusat (alokasi Kementerian)		Kemendagri
ProP : Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata							788,4			
<i>Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah</i>	<i>Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah (Daerah)</i>	-	10,0	20,0	34,0	34,0	49,0	pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kememparekraf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.89

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha</i>	<i>Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha (Kerjasama)</i>	-	5,0	5,0	5,0	4,0	19,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja (Kerjasama)</i>	-	5,0	5,0	5,0	4,0	19,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya (Kerjasama)</i>	-	5,0	5,0	5,0	4,0	19,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata</i>	<i>Jumlah Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata (Jenis usaha)</i>	10,0	15,0	17,0	10,0	10,0	27,9	<i>pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
<i>Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata</i>	<i>Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (Ruang Lingkup)</i>	2,0	5,0	8,0	6,0	6,0	13,5	<i>pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
<i>Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata</i>	<i>Jumlah Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata (Dokumen)</i>	1,0	-	-	-	-	1,0	<i>pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
<i>Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata (Kerjasama)</i>	-	5,0	6,0	7,0	8,0	26,0	<i>pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.90

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata</i>	<i>Jumlah Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata (Sistem Informasi)</i>	-	1,0	1,0	1,0	1,0	20,0	pusat		Kemendagri
<i>Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat</i>	<i>Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat (Orang)</i>	-	500,0	750,0	1.000,0	1.250,0	10,5	pusat		Kemendagri
<i>Asesor yang dilatih</i>	<i>Jumlah Asesor yang dilatih (Orang)</i>	1.000,0	1.500,0	2.000,0	1.750,0	1.500,0	77,5	pusat		Kemendagri
<i>SDM Tersertifikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata</i>	<i>Jumlah SDM Tersertifikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata (Orang)</i>	104.000,0	130.000,0	136.500,0	102.375,0	81.900,0	388,5	pusat		Kemendagri
<i>Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata</i>	<i>Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata (Orang)</i>	11.800,0	11.800,0	12.390,0	9.912,0	9.416,4	117,4	pusat		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata							3.613,2			
<i>Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas</i>	<i>Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas (Daerah)</i>	-	4,0	5,0	6,0	7,0	44,0	pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemendagri
<i>Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba</i>	<i>Jumlah Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Potensial Investor)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.91

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Lokasi)</i>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	1.629,0	Sumatera Utara	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba</i>	<i>Jumlah Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Pasar Wisatawan)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	45,0	Sumatera Utara	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur</i>	<i>Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur (Potensial Investor)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0	<i>DI Yogyakarta, Jawa Tengah</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur (Lokasi)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	693,5	<i>DI Yogyakarta, Jawa Tengah</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.92

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur</i>	<i>Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur (Pasar Wisatawan)</i>	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	32,0	<i>DI Yogyakarta, Jawa Tengah</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo</i>	<i>Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo (Potensial Investor)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,7	<i>Nusa Tenggara Timur</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo (Lokasi)</i>	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	960,0	<i>Nusa Tenggara Timur</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo</i>	<i>Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo (Pasar Wisatawan)</i>	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	35,0	<i>Nusa Tenggara Timur</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.93

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan</i>	<i>Jumlah Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan (Dokumen)</i>	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	42,0	<i>pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemendikbud</i>
<i>Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan</i>	<i>Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan (Dokumen)</i>	-	8,0	8,0	4,0	4,0	48,0	<i>pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan</i>	<i>Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan (Dokumen)</i>	-	7,0	7,0	7,0	7,0	56,0	<i>pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
Prop : Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark							96,2			
<i>Pusat informasi Geopark</i>	<i>Jumlah pusat informasi Geopark/ Geologi (Unit)</i>	2,0	3,0	4,0	3,0	3,0	51,0	<i>Geopark Kaldera Toba, Geopark Natuna, Geopark Siloek, Geopark Ngarai Sianok, Geopark Sawahlunto, Geopark Belitong, Geopark Pongkor, Geopark Cileteuh Pelabuhan Ratu, Geopark Karangsambung, Geopark Gunung Sewu, Geopark Banyuwangi, Geopark Rinjani, Geopark Tambora, Geopark Maros-Pangkep, Geopark Raja Ampat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen ESDM</i>
<i>Rekomendasi Penetapan Geoheritage</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Penetapan Geoheritage (Rekomendasi)</i>	-	4,0	4,0	4,0	4,0	10,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemen ESDM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.94

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pusat Informasi Pariwisata berbasis Geopark</i>	<i>(Unit)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0	<i>Tersebar (16 Geopark dalam DPP)</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pengembangan Geopark (Geopark)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	15,0	<i>Pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kemen PPN/Bappenas</i>
<i>Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark</i>	<i>Alternatif Pendanaan Pengembangan Geopark (Skema)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemen PPN/Bappenas</i>
KP : Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (Persen)	5,3	5,34-5,5	5,38-5,7	5,42-5,9	5,45-6,10	100.326,6			
	Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi (Kab/kota)	7,26-7,54	7,40-7,95	7,40-8,22	7,54-8,37	7,54-8,78				
	Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan (Kab/kota)	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0				
	Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan (Lokasi)	8,0	8,0	8,0	8,0	11,0				
	Revitalisasi ruang kreatif (Unit)	30,0	31,5	34,0	31,0	27,0				
	Skema pembiayaan berbasis HKI (Skema)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
ProP : Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand							77,2			
<i>Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan (Gerai/Pusat)</i>	<i>Jumlah Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan (Gerai/pusat)</i>	-	3,0	3,0	3,0	3,0	77,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
ProP : Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI							213,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.95

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang) (Orang)</i>	4.650,0	4.850,0	5.250,0	4.650,0	4.450,0	77,5	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Produk/ Jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/ Jasa)</i>	<i>Jumlah Produk/ Jasa Ekraf yang didaftarkan (Produk/ Jasa) (Produk/ jasa)</i>	2.500,0	2.650,0	2.950,0	2.400,0	2.300,0	110,4	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/ Usaha)</i>	<i>Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/ Usaha) (Orang/ usaha)</i>	200,0	220,0	245,0	195,0	165,0	25,7	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
Prop : Fasilitasi Rantai Pasok dan Scale-up Karya dan Platform Kreatif Unggulan							142,7			
<i>Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (termasuk komersialisasi hasil riset)</i>	<i>Jumlah Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (Kerjasama)</i>	25,0	30,0	35,0	20,0	15,0	142,7	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
Prop : Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif							321,3			
<i>Kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan</i>	<i>Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan (Kab/kota)</i>	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0	51,3	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.96

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi Cultural Heritage Regeneration</i>	<i>Jumlah lokasi pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif (Lokasi)</i>	-	25,0	30,0	25,0	20,0	270,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Kemendikbud
ProP : Pengembangan 'start-up parks' dan Center of Excellence							138,6			
<i>Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB, Friend Of Creative Economy)</i>	<i>Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (Kerjasama)</i>	5,0	6,0	6,0	4,0	4,0	138,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendikbud
ProP : Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif							784,2			
<i>Infrastruktur TIK yang Difasilitasi</i>	<i>Jumlah Infrastruktur TIK yang Difasilitasi (Orang)</i>	8.500,0	9.000,0	10.100,0	8.500,0	7.500,0	274,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendikbud
<i>Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (Unit)</i>	4,0	5,0	7,0	4,0	3,0	41,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.97

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi (khususnya di lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif)</i>	<i>Jumlah Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi (Unit)</i>	30,0	31,5	34,0	31,0	27,0	419,9	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kebijakan)</i>	3,0	3,0	4,0	3,0	2,0	49,3	<i>Pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
ProP : Pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)							98.649,0			
<i>Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (Unit)</i>	4,0	5,0	7,0	4,0	3,0	41,1	<i>Pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
<i>SDM Ekonomi Kreatif yang Didedukasi</i>	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Didedukasi (Orang)</i>	11.200,0	11.500,0	12.000,0	11.400,0	11.200,0	258,2	<i>Pusat</i>	<i>10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)</i>	5.000,0	5.400,0	5.875,0	5.300,0	5.000,0	131,9	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi</i>	<i>Jumlah Modal yang disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi (Miliar)</i>	255,0	270,0	320,0	240,0	220,0	255,6	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.98

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat</i>	<i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat (Orang)</i>	1.700,0	1.800,0	2.000,0	1.650,0	1.550,0	38,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi</i>	<i>Jumlah Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif (Miliar)</i>	5.082,0	5.225,0	5.650,0	5.150,0	4.900,0	128,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan akses permodalan (Orang)</i>	1.500,0	1.600,0	1.750,0	1.450,0	1.350,0	46,2	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI</i>	<i>Jumlah Skemapembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI yang dikembangkan (Naskah)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	33,4	Pusat		<i>Kememparekraf</i>
<i>Infrastruktur TIK yang Difasilitasi</i>	<i>Jumlah Infrastruktur TIK yang Difasilitasi (Orang)</i>	8.500,0	9.000,0	10.100,0	8.500,0	7.500,0	274,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Pre-Start Up yang Difasilitasi (termasuk melalui Digital Lab, Digital Entrepreneurship, Pemagangan Internasional)</i>	<i>Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi (Orang/ komunitas)</i>	250,0	384,8	400,0	372,7	363,6	116,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang) (Orang)</i>	4.650,0	4.850,0	5.250,0	4.650,0	4.450,0	77,5	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.99

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/Jasa)</i>	<i>Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan (Produk/Jasa) (Produk/jasa)</i>	2.500,0	2.650,0	2.950,0	2.400,0	2.300,0	110,4	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)</i>	<i>Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha) (Orang/usaha)</i>	200,0	220,0	245,0	195,0	165,0	25,7	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi</i>	<i>Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi (Produk/usaha)</i>	250,0	270,0	330,0	230,0	200,0	41,1	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (termasuk komersialisasi hasil riset)</i>	<i>Jumlah Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (Kerjasama)</i>	25,0	30,0	35,0	20,0	15,0	142,7	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Pengembangan Be Creative District (BCD)</i>	<i>Jumlah kawasan Be Creative District (BCD) dikembangkan (Kawasan)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	445,0	<i>Jawa Barat dan Banten</i>		<i>Kememparekraf</i>
<i>Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB, Friend Of Creative Economy)</i>	<i>Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (Kerjasama)</i>	5,0	6,0	6,0	4,0	4,0	138,6	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Penyediaan air baku di kawasan perkotaan</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik) (m3/detik)</i>	1,1	2,0	2,3	2,3	2,1	3.320,8	<i>Maja</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan strategis KEK BCD Maja-Rangkas Bitung, KEK BCD Karawang (m3/detik) (m3/detik)</i>	-	0,6	0,6	0,7	0,7	856,7	<i>KEK BCD Maja-Rangkas Bitung, KEK BCD Karawang</i>		<i>Kemen PU&PERA</i>
<i>Peningkatan Kinerja BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM</i>	<i>Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management (PDAM)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0	<i>Maja</i>		<i>KPBU</i>
<i>Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)</i>	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai); 15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	800,0	<i>Banten</i>		<i>Kemenuh</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.100

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung-Pandeglang- Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (Km)	-	17 (berlanjut)	17 (berlanjut)	17 Selesai	20 (berlanjut)	900,0	Banten		Kemenuh
Pembangunan infrastruktur dalam kawasan BCD		-	-	-	-	-	90.000,0	Jawa Barat dan Banten		BUMN dan Swasta
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga	Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi (Orang)	1.500,0	2.000,0	2.100,0	2.205,0	2.315,0	50,6	Pusat		Kemen KUKM
Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan (Orang)	5.000,0	5.250,0	5.513,0	5.788,0	6.078,0	150,7	34 Provinsi		Kemenaker
Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	Jumlah Rencana Investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri (rencana investasi)	(Rp 1.022,8 Triliun)	(Rp 1.125,1 Triliun)	(Rp 1.237,6 Triliun)	(Rp 1.361,3 Triliun)	(Rp 1.497,4 Triliun)	47,6	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	BKPM
Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri (minat investasi)	350,0	450,0	500,0	500,0	500,0	40,7	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	BKPM
Gerakan menuju Smart City	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kumulatif) (Kab/kota)	40,0	70,0	100,0	125,0	150,0	18,5	Tersebar		Kemen Kominfo
Digital technopreneur	Jumlah startup aktif yang terbentuk (start-up)	30,0	60,0	90,0	120,0	150,0	140,5	Tersebar		Kemen Kominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.101

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi startup menjadi unicorn</i>	<i>Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif) (unicorn)</i>	-	-	1,0	2,0	3,0	6,1	<i>Tersebar</i>		<i>Kemen Kominfo</i>
KP : Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: -jumlah prosedur -waktu (Ranking EoDB)	menuju 40	menuju 40	menuju 40	menuju 40	menuju 40	1.573,3			
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp triliun)	886,0	991,3	1128,3	1294,1	1.500,0				
	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5				
	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782				
	Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67				
	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	Selesai				
ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi							394,9			
<i>Standarisasi tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah</i>	<i>Jumlah usulan standard tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah (dokumen usulan standard)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,9	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.102

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Sistem informasi standardisasi NSPK perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah</i>	<i>Jumlah usulan standar sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah (dokumen usulan standard)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM
<i>Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDE</i>	<i>Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha (usulan rekomendasi)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,4	Jakarta, Surabaya, Pusat		BKPM
<i>Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi</i>	<i>Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (usulan rekomendasi)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	22,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM
<i>Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah</i>	<i>Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi (usulan rekomendasi)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.103

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengawasan Persaingan Usaha</i>	<i>Jumlah kajian pengawasan persaingan usaha (kajian)</i>	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	15,9	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KPPU</i>
<i>Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah</i>	<i>Jumlah pengawasan pelaku usaha di daerah (pengawasan)</i>	18,0	20,0	20,0	20,0	24,0	8,5	<i>Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel</i>		<i>KPPU</i>
<i>Investigasi Pelanggaran Persaingan Usaha</i>	<i>Jumlah investigasi pelanggaran persaingan usaha (dugaan pelanggaran)</i>	100,0	117,0	137,0	157,0	177,0	36,5	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KPPU</i>
<i>Rekomendasi Perkara Persaingan Daerah</i>	<i>Jumlah rekomendasi perkara persaingan usaha di daerah (perkara)</i>	36,0	36,0	40,0	46,0	46,0	17,6	<i>Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel</i>		<i>KPPU</i>
<i>Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</i>	<i>Jumlah laporan pemberkasan perkara persaingan usaha (perkara)</i>	32,0	25,0	25,0	30,0	30,0	11,1	<i>Pusat</i>		<i>KPPU</i>
<i>Penilaian Merger dan Akuisisi</i>	<i>Jumlah penilaian merger dan akuisisi (penilaian)</i>	39,0	38,0	42,0	46,0	50,0	16,5	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KPPU</i>
<i>Penanganan Perkara Persaingan Usaha</i>	<i>Jumlah persidangan majelis dan penetapan/putusan perkara persaingan usaha (perkara)</i>	45,0	47,0	50,0	52,0	55,0	58,6	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KPPU</i>
<i>Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kemetrolgian</i>	<i>Jumlah pejabat fungsional bidang kemetrolgian yang diberikan pembinaan (orang)</i>	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	3,1	<i>Jawa Barat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Pengawasan Barang Beredar terhadap Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label</i>	<i>Jumlah pengawasan barang beredar terhadap ketentuan SNI, MKG, dan Label (produk)</i>	660,0	670,0	680,0	690,0	700,0	34,8	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ</i>	<i>Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang diberikan pembinaan (orang)</i>	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	17,7	<i>Jawa Barat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN</i>	<i>Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang diberikan pembinaan (orang)</i>	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	26,3	<i>Jawa Barat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Pengawasan Kegiatan Perdagangan</i>	<i>Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diawasi (pelaku usaha)</i>	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	34,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.104

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penanganan Perkara Merger dan Akuisisi</i>	<i>Jumlah dugaan perkara merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti (perkara)</i>		6,0	8,0	9,0	10,0	2,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	KPPU
<i>Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi</i>	<i>Jumlah penuntutan perkara persaingan usaha (perkara)</i>		19,0	21,0	23,0	25,0	23,2	Pusat		KPPU
<i>Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU</i>	<i>Jumlah laporan litigasi perkara persaingan usaha (perkara)</i>		12,0	14,0	16,0	18,0	7,7	Pusat		KPPU
<i>Pembinaan SDM Lembaga Perlindungan Konsumen</i>	<i>Jumlah SDM LPK yang dibina (Orang)</i>	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	21,5	Pusat		Kemendag
<i>Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis</i>	<i>Jumlah Pengawasan (Pelaku Usaha)</i>	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	5,9	Pusat		Kemendag
Prop : Fasilitas Kemudahan Usaha dan Investasi							1.018,3			
<i>Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS</i>	<i>Pengadaan Perpanjangan Lisensi/ Annual Technical Support (ATS) (paket)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	109,9	Pusat		BKPM
<i>Pengembangan Data Center dan DRC yang mendukung OSS</i>	<i>Jumlah pengembangan data center, DRC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang handal (paket)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	109,0	Pusat		BKPM
<i>Peningkatan mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat</i>	<i>Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat (IKM dari skala 4)</i>	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	BKPM
<i>Partisipasi dalam kerjasama internasional</i>	<i>Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama Internasional (partisipasi)</i>	14,0	23,0	24,0	24,0	25,0	22,1	Pusat		BKPM
<i>Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal</i>	<i>Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal (bahan posisi)</i>	14,0	23,0	24,0	24,0	25,0	3,2	Pusat		BKPM
<i>Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan Pemangku Kepentingan Usaha di dalam dan luar negeri (MoU)</i>	<i>Jumlah kerjasama penanaman modal dengan Pemangku Kepentingan Usaha di dalam dan luar negeri (MoU)</i>	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	4,2	Pusat		BKPM
<i>Penyelenggaraan fasilitasi minat outward investment</i>	<i>Jumlah forum fasilitasi minat outward investment kepada perusahaan nasional (perusahaan)</i>	15,0	15,0	18,0	18,0	20,0	4,4	Pusat		BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.105

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah</i>	<i>Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi (peta potensi daerah)</i>	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	19,9	<i>Daerah di 34 Provinsi</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>
<i>Penyelenggaraan dan pengembangan IPC (Indonesian Investment Promotion Center) di Luar Negeri</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri (minat investasi)</i>	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	246,3	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>
<i>Penyusunan analisis negara target dan negara pesaing</i>	<i>Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing (kajian)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,4	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.106

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional</i>	<i>Jumlah Rencana Investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri (rencana investasi)</i>	<i>(Rp 1.022,8 Triliun)</i>	<i>(Rp 1.125,1 Triliun)</i>	<i>(Rp 1.237,6 Triliun)</i>	<i>(Rp 1.361,3 Triliun)</i>	<i>(Rp 1.497,4 Triliun)</i>	47,6	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM
<i>Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri</i>	<i>Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri (minat investasi)</i>	350,0	450,0	500,0	500,0	500,0	40,7	Daerah di 34 Provinsi	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM
<i>Keikutsertaan Pada Pameran Penanaman Modal di Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah minat investasi yang dicapai melalui keikutsertaan pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri (minat investasi)</i>	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	28,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.107

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I (perusahaan)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	8,1	Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II (perusahaan)	33,0	41,0	44,0	47,0	50,0	8,0	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III (perusahaan)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	7,7	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV (perusahaan)	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	12,9	Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.108

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang terfasilitasi (proyek)</i>	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	2,8	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	BKPM
<i>Evaluasi Rencana Strategis BKPM</i>	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Strategis BKPM (dokumen evaluasi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,3	Pusat		BKPM
<i>Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</i>	<i>Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya (profil proyek)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,5	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	BKPM
<i>Fasilitasi rencana penanaman modal di bidang industri manufaktur</i>	<i>Jumlah Proyek di Sektor Industri Manufaktur yang terfasilitasi (proyek)</i>	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	3,5	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	BKPM
<i>Fasilitasi rencana penanaman modal di daerah</i>	<i>Jumlah Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota (kegiatan)</i>	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	6,1	<i>Daerah di 34 Provinsi</i>		BKPM
<i>Evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM/RUPMK)</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/ Kota (daerah)</i>	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	2,8	<i>Daerah di 34 Provinsi</i>		BKPM
<i>Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur</i>	<i>Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur (profil proyek)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,1	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.109

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan</i>	<i>Jumlah Proyek Prioritas Pemerintah yang Terasilitasi (proyek)</i>	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	17,1	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>
<i>Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan (kawasan)</i>	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	2,9	<i>Daerah di 34 Provinsi</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>
<i>Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>jumlah Fasilitasi Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (proyek)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	10,6	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>
<i>Fasilitasi rencana investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</i>	<i>Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU (proyek)</i>	5,0	7,0	7,0	8,0	8,0	11,9	<i>Pusat</i>		<i>BKPM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.110

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur</i>	<i>Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur (proyek)</i>	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	7,9	Pusat		BKPM
<i>Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur 2020-2024</i>	<i>Jumlah kajian analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur (kajian)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,3	Pusat		BKPM
<i>Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur</i>	<i>Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur (profil proyek)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,1	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	BKPM
<i>Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah dokumen tata kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (SOP)</i>	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	14,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	BKPM
<i>Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Pusat dan Daerah (KL/D)</i>	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	20,8	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.111

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (paket)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	39,5	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>
<i>Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (KL/D)</i>	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	44,0	<i>Daerah di 34 Provinsi</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	<i>BKPM</i>
<i>Analisa dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah</i>	<i>Jumlah kajian analisa kebijakan persaingan (kajian)</i>	7,0	9,0	9,0	11,0	11,0	15,0	<i>pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KPPU</i>
<i>Advokasi Persaingan Usaha</i>	<i>Jumlah advokasi persaingan usaha (advokasi)</i>	15,0	15,0	16,0	17,0	18,0	10,9	<i>pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>KPPU</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.112

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Harmonisasi Kebijakan Persaingan Daerah	Jumlah kebijakan daerah yang harmonis dengan nilai persaingan usaha sehat (kebijakan daerah)	18,0	20,0	20,0	20,0	24,0	19,0	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	KPPU
Fasilitasi Investasi pada Sektor Industri Barang Galian Non Logam	Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi (Perusahaan)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	17,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti (Rekomendasi)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Harmonisasi Kebijakan untuk Mendorong Ekspor dan Investasi Penyusunan dan Monitoring Surat Saran	Jumlah Kebijakan yang Diharmonisasikan (Jumlah Kebijakan) Jumlah surat saran pertimbangan KPPU kepada K/L/D (surat saran pertimbangan)	-	2,0	3,0	3,0	4,0	11,9	Pusat		Kemenperin
Penyusunan bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment	Jumlah surat saran pertimbangan KPPU kepada K/L/D (surat saran pertimbangan)	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	0,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	KPPU
Penyusunan bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment	Jumlah bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment (paket)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	Pusat		BKPM
Prop : Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial							160,1			
Perusahaan yang mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan struktur skala upah	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang telah menerapkan struktur dan skala upah dan mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan pengupahan (perusahaan)	500,0	700,0	1.000,0	1.200,0	1.500,0	27,4	34 provinsi		Kemenaker
Perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan SMK3 (perusahaan)	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	50,7	34 provinsi		Kemenaker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.113

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja	Jumlah perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja (perusahaan)	8.000,0	8.400,0	8.820,0	9.261,0	9.724,1	62,0	34 provinsi		Kemenaker
Koordinasi Kebijakan Cipta Lapangan Kerja	Ditetapkannya Undang - undang dan Naskah Akademik UU Cipta Lapangan Kerja (UU / Naskah Akademik)	1 UU dan 1 Naskah Akademik	-	-	-	-	15,0	Pusat		Kemenko Perekonomian
	Terselesainya Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Peraturan Perundang-undangan)	15,0	-	-	-	-	0,0	Pusat		Kemenko Perekonomian
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Paket Rekomendasi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	Pusat		Kemenko Perekonomian
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	Pusat		Kemenko Perekonomian
KP : Pengembangan industri halal	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	75,7			
ProP : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal							75,7			
Fasilitasi Kawasan Industri Tematik	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	Pusat		Kemenperin
Daerah Tertib Ukur	Jumlah Daerah Tertib Ukur (Daerah Tertib Ukur)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	16,2	Pusat		Kemendag
Pengawasan Kemetrolagian	Pengawasan Kemetrolagian (Unit)	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	55,6	Pusat		Kemendag
PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	12.112,3			
	Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0				
	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0				
KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Pertumbuhan ekspor pertanian (Persen)	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	650,7			
	Ekspor hasil pertanian (US\$ juta)	30.305,03				33.327,1				
	Ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,2	6,6	7,1	7,7	8,24				
	Kontribusi ekspor industri pengolahan (Persen)	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.114

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara) (Persen)	10,8	11,4	11,9	12,5	13,0				
	Pertumbuhan ekspor non migas (Persen)	5,2	6,3	7,2	8,5	9,8				
	Rasio ekspor jasa terhadap PDB (Persen)	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0				
	Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5				
	Prop : Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa						139,3			
<i>Penyusunan Dokumen Business Plan Green Gasoline Stand Alone Berbahan Baku Minyak Kelapa Sawit</i>	<i>Tersusunnya dokumen business plan (Dokumen)</i>	1,0					1,0	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penyusunan Studi Kelayakan industri IVO/ILO</i>	<i>Tersusunnya dokumen business plan (Dokumen)</i>		1,0				1,3	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penyusunan Detail Engineering Design (DED) industri IVO/ILO</i>	<i>Tersusunnya dokumen business plan (Dokumen)</i>			1,0			1,5	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur</i>	<i>Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan (IKM)</i>	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	24,8	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Berbasis Teknologi</i>	<i>Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))</i>	6,0	20,0	30,0	50,0	80,0	28,4	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.115

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pelatihan dan pendampingan ekspor IKMKimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka</i>	<i>Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan (IKM)</i>	20,0	30,0	40,0	40,0	40,0	24,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut</i>	<i>Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan (IKM)</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	24,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor</i>	<i>(KUMKM)</i>	400,0	500,0	525,0	551,0	579,0	32,9	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemen KUKM</i>
ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa							511,4			
<i>Layanan Pengujian Mutu Barang</i>	<i>Jumlah contoh/sampel yang diuji mutu barang (Contoh)</i>	4.500,0	4.600,0	4.700,0	4.800,0	4.900,0	57,4	DKI Jakarta	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang</i>	<i>Jumlah pejabat fungsional penguji mutu barang yang diberikan pembinaan (orang)</i>	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	12,2	DKI Jakarta		<i>Kemendag</i>
<i>Pemantauan Mutu BOKOR</i>	<i>Jumlah pemantauan mutu bokor (Komoditi)</i>	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	15,1		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Layanan Kalibrasi</i>	<i>Jumlah sertifikat/sampel yang diuji layanan kalibrasi (Sertifikat)</i>	7.100,0	7.120,0	7.140,0	7.160,0	7.180,0	20,3	DKI Jakarta	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.116

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Sertifikasi	Jumlah layanan sertifikasi (Sertifikat)	169,0	179,0	189,0	199,0	209,0	13,1	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center	Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC (Produk)	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	55,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Fasilitasi Pengembangan produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk (Produk)	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	16,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Pengembangan Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekspor sektor jasa dan ekonomi kreatif yang dikembangkan (Produk)	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Jumlah pendidikan dan pelatihan ekspor (Angkatan)	119,0	124,0	129,0	134,0	139,0	70,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Export Coaching Program	Jumlah peserta export coaching program (Peserta)	125,0	150,0	175,0	200,0	225,0	26,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Jumlah fasilitasi kebijakan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan (Paket)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	26,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.117

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM</i>	<i>Jumlah UKM yang diberikan fasilitasi promosi dan diklat (UKM)</i>	500,0	550,0	600,0	650,0	700,0	99,4	Pusat		Kemendag
<i>Kebijakan Ekspor Produk Industri</i>	<i>Jumlah Peraturan Menteri terkait ekspor produk industri (Permendag)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
<i>Fasilitasi peningkatan hilirisasi ekspor produk perindustrian dan pertambangan berteknologi tinggi</i>	<i>Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk industri dan pertambangan (Paket)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	26,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
<i>Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu</i>	<i>Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Nomor Pendaftaran)</i>	7.500,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0	11,5	DKI Jakarta	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
KP : Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Jumlah negara tujuan ekspor (Negara)	219,0	220,0	221,0	222,0	223,0	2.343,6			
	Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Persen)	0,8	1,3	1,8	2,3	2,8				
	Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (Persen)	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2				
Prop : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia							975,7			
<i>Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah pusat promosi ekspor dalam dan luar negeri (Pusat promosi)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	40,9	<i>Sydney, Jeddah, Lagos, Hongkong, Skow, Nunukan, Atambua</i>		Kemendag
<i>Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang Utama</i>	<i>Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang utama (Laporan Intel Bisnis)</i>	6,0	10,0	15,0	20,0	25,0	41,4	Pusat		Kemendag
<i>Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur</i>	<i>Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur (Laporan Intel Bisnis)</i>	4,0	7,0	10,0	15,0	20,0	27,9	Pusat		Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.118

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Customer Service Center (Export helpdesk) Online/Offline	Jumlah export helpdesk (Kegiatan)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	19,5	Pengumpulan data dilakukan di daerah(Jateng, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku)	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemendag
Pengembangan market place berorientasi ekspor	Jumlah Layanan Market Place (Market Place)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	25,0		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang utama (Kegiatan promosi)	11,0	15,0	20,0	25,0	30,0	101,0	Amerika Serikat, Eropa Barat, Vietnam, Jepang, Australia	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur (Kegiatan promosi)	4,0	10,0	15,0	20,0	25,0	138,8	Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Kegiatan Pencitraan	Jumlah kegiatan pencitraan (Kegiatan)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	27,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemendag
Promosi Produk dan Jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	Jumlah Promosi Produk dan Jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia (Promosi)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	67,1	Jakarta, Surabaya	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.119

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor (MOU)</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,6	<i>Swiss, Amerika Serikat, RRT, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor</i>	<i>Jumlah kerjasama pengembangan ekspor (Pelaku usaha)</i>	750,0	770,0	790,0	810,0	830,0	16,8	<i>Jateng, Jatim, Kaltim, Sumut, Sumsel, Bali</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Pengembangan Kerjasama Ekspor Sektor Jasa</i>	<i>Jumlah kerjasama pengembangan ekspor sektor jasa (Rekomendasi)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,2	<i>Jabar, Banten</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama</i>	<i>Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama (Kegiatan)</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	<i>Sulsel, NTT, Kalbar, Jabar, Yogya, Jatim</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar</i>	<i>(Submisi)</i>	29,0	31,0	33,0	35,0	37,0	54,9	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor</i>	<i>Jumlah informasi standar mitra tujuan ekspor (Mitra)</i>	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	4,9	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar</i>	<i>Jumlah pengamanan dan perlindungan akses pasar (Submisi)</i>	29,0	31,0	33,0	35,0	37,0	54,9	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Buyer Inquiry</i>	<i>Jumlah buyer inquiry (inquiry)</i>	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	75,0	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.120

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Market Intelligence dan Co Working Space di Pasar Potensial	Jumlah Market Intelligence dan Co Working Space (Paket)	21 Martel dan 5 Co Working Space	22 Martel dan 6 Co Working Space	23 Martel dan 7 Co Working Space	24 Martel dan 8 Co Working Space	25 Martel dan 9 Co Working Space	168,0	Canberra, Sydney, Singapore, KL, Bangkok, Manila, Hanoi, Hongkong, Taiwan, Shanghai, Beijing, Seoul, Busan, Osaka, Tokyo, Chennai, New Delhi, Dubai, Riyadh, Jeddah, Kairo, Johannesburg, Lagos, Moscow, Budapest, Roma, Barcelona, Madrid, Milan, Lyon, Jeneva, Paris, London, Den Haag, Brussel, Hamburg, Berlin, Copenhagen, Santiago, Sao Paolo, Mexico, LA, Vancouver, Chicago, Washington, Ottawa	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri	(KUMKM)	140,0	200,0	210,0	221,0	232,0	63,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemen KUMKM
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang	Negara	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,6	Pusat		Kemendag
Penghargaan Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang diberi penghargaan dan fasilitas (Pelaku Usaha)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	17,5		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (Paket Rekomendasi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	Pusat		Kemenko Perekonomian
ProP : Fasilitasi Ekspor							503,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.121

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor untuk Pelaku/Usaha Kreatif</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor (Orang/usaha)</i>	1.500,0	1.650,0	1.775,0	1.450,0	1.250,0	141,2	<i>Kabupaten/kota di 34 provinsi</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif (Kerjasama)</i>	10,0	10,0	12,0	10,0	9,0	51,3	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri (Produk)</i>	32,0	34,0	40,0	30,0	28,0	231,0	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kememparekraf</i>
<i>Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui Inatrade</i>	<i>Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui Inatrade (Layanan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,8	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Skema Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia</i>	<i>Jumlah Skema Fasilitasi Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan Lainnya (Skema)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,3	<i>DI Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Bengkulu,Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.122

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan (Laporan)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Dukungan terhadap Implementasi Fasilitasi Perdagangan (KNFP)	Jumlah layanan KNFP (Layanan)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	13,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
Fasilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah Perbatasan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu(SKPT)			20,0	31,0	31,0	31,0	38,0	Pusat	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	Kemendag
Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional (Paket Rekomendasi)	Tersusunnya Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional (Paket Rekomendasi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	Pusat		Kemenko Perekonomian
Prop : Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor							864,2			
Perusahaan Restrukturisasi Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	Perusahaan Industri TPT yang difasilitasi/ didampingi/ diberikan insentif (SDM, Teknologi, Manajemen/ organisasi) dalam rangka penerapan industri 4.0 (perusahaan)	25,0	300,0	300,0	300,0	300,0	96,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala	Rekomendasi dokumen dalam perundingan kerjasama internasional (Rekomendasi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,8	Pusat		Kemenperin
Pelatihan Ekspor bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro	Jumlah SDM industri agri yang dilatih (Orang)	180,0	185,0	190,0	190,0	190,0	50,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.123

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional</i>	<i>Terfasilitasinya Industri Agro dalam temu bisnis dan promosi dalam skala internasional (Perusahaan)</i>	60,0	60,0	65,0	65,0	65,0	28,7	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Quick Wins Peningkatan Ekspor Produk (Komoditas) Prioritas Sektor ILMATE</i>	<i>Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan (Industri)</i>	2,0					2,0	Pusat		<i>Kemenperin</i>
<i>Fasilitasi Industri permesinan dan alat mesin pertanian yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor</i>	<i>Jumlah industri yang difasilitasi ekspor (Industri)</i>		5,0	7,0	8,0	8,0	19,8	Pusat		<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan Industri dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Logam</i>	<i>Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan (Industri)</i>	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0	3,9	Pusat	<i>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan Market Intelligence</i>	<i>Rekomendasi Industrial dan Market Intelligence (Jumlah Rekomendasi Market Intelligence)</i>	6,0	8,0	10,0	10,0	12,0	34,7	Pusat		<i>Kemenperin</i>
<i>Penilaian Akreditasi Laboratorium</i>	<i>Jumlah akreditasi laboratorium (Penilaian Akreditasi)</i>	1.035,0	1.095,0	1.150,0	1.205,0	1.260,0	97,2	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>BSN</i>
<i>Laboratorium SNSU</i>	<i>Jumlah Laboratorium yang terakreditasi (Laboratorium)</i>	1,0					70,0	Serang	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>BSN</i>
<i>Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi</i>	<i>Jumlah Lembaga Inspeksi dan sertifikasi yang terakreditasi (Penilaian Akreditasi)</i>	650,0	700,0	750,0	800,0	850,0	41,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>BSN</i>
<i>Sistem dan Skema Akreditasi</i>	<i>Jumlah total skema dan sistem yang dihasilkan pada tahun berjalan (Skema)</i>	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	14,5	Pusat		<i>BSN</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.124

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i>	<i>Jumlah Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Sistem)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0	Pusat		BSN
<i>Penelitian Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i>	<i>Jumlah total penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dihasilkan pada tahun berjalan (Penelitian)</i>	4,0	10,0	12,0	14,0	18,0	15,2	Pusat		BSN
<i>Roadmap Pengembangan SPK</i>	<i>Jumlah dokumen roadmap yang diselesaikan (Rekomendasi)</i>	1,0	1,0				1,0	Pusat		BSN
<i>Pelatihan dan Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i>	<i>Jenis Pendidikan dan Pelatihan untuk SDM standardisasi (Pendidikan dan pelatihan)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	35,9	Pusat		BSN
<i>Pengembangan keahlian spesifik SPK bagi Standards Professionals Indonesia</i>	<i>Jumlah Kegiatan pengembangan keahlian spesifik SPK (Kegiatan pengembangan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0	Pusat		BSN
<i>Skema Penerapan Standar</i>	<i>Jumlah kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian (kebijakan/ Skema)</i>	275,0	375,0	480,0	600,0	725,0	14,1	Pusat		BSN
<i>Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i>	<i>Jenis Layanan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (layanan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,7	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	BSN
<i>Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi</i>	<i>Jumlah keterukuran yang dapat dipenuhi oleh SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi (Kemampuan Pengukuran)</i>	62,0	62,0	65,0	65,0	65,0	110,1	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	BSN
<i>Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia</i>	<i>Jumlah keterukuran yang dapat dipenuhi oleh SNSU Termoelektrik dan Kimia (Kemampuan Pengukuran)</i>	71,0	71,0	73,0	73,0	73,0	169,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	BSN
<i>Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor</i>	<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor (Paket Rekomendasi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	Pusat		Kemenko Perekonomian
<i>Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Substitusi Impor</i>	<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Substitusi Impor (Paket Rekomendasi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	Pusat		Kemenko Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.125

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Pengelolaan Impor	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)	43,3				50,0	605,3			
	Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (Produk per tahun)	6.000,0	6.500,0	7.000,0	7.500,0	8.000,0				
	Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)	310,0	320-333	330-355	340-378	350-400				
ProP : Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri							605,3			
<i>Industri alat kesehatan yang memproduksi alat kesehatan di dalam negeri</i>	<i>Jumlah alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. (Alat Kesehatan)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	46,6	<i>Industri Alkes di Provinsi/ Kabupaten/ Kota</i>		<i>Kemendes</i>
<i>Pengawasan Post Border</i>	<i>Jumlah Pengawasan Post Border (Berita acara)</i>	3.162,0	3.162,0	3.162,0	3.162,0	3.162,0	137,2	<i>Medan, Surabaya, Bekasi, Makassar</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri (Peserta)</i>	2.500,0	3.000,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0	77,1	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Impor di Post Border</i>	<i>Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan impor di post border (Laporan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	13,0	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Layanan fasilitasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia</i>	<i>Terciptanya layanan penyusunan RUU LPPI (layanan)</i>	1,0	1,0	1,0			10,0	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Dalam Negeri</i>	<i>Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)</i>	37,7	38,5	39,2	40,0	40,8	15,1	<i>Pusat</i>		<i>Kemenperin</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.126

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Dalam Negeri</i>	<i>Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)</i>	37,7	38,5	39,2	40,0	40,8	15,1	Pusat		Kemenperin
<i>Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Dalam Negeri</i>	<i>Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)</i>	37,7	38,5	39,2	40,0	40,8	15,1	Pusat		Kemenperin
<i>Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri</i>	<i>Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri (Jumlah Rekomendasi)</i>	7,0	10,0	10,0	11,0	12,0	16,1	Pusat		Kemenperin
<i>Fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri</i>	<i>Industri Dalam Negeri (IDN) yang didampingi (Jumlah IDN)</i>	12,0	12,0	13,0	14,0	15,0	13,5	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenperin
<i>Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding</i>	<i>Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Event)</i>	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	246,4	pusat		Kemendikbud
KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100,5			
Prop : Pengembangan sistem katalog							100,5			
<i>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah</i>	<i>Rekomendasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (rekomendasi)</i>	1 Rekomendasi dan fasilitasi 250 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 850 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 950 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 1150 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 1200 sertifikat	27,7	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenperin
<i>Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral</i>	<i>Jumlah Kontrak Katalog Lokal/Sektoral (Kontrak Katalog Lokal /Sektoral)</i>	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	20,2	Pusat dan daerah		LKPP
<i>Pengembangan Produk yang Masuk e-catalogue</i>	<i>Jumlah Produk yang tersedia dalam e-catalogue (Produk)</i>	125.000,0	150.000,0	175.000,0	200.000,0	225.000,0	12,8	Pusat		LKPP
<i>Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Dokumen Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik (Dokumen)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	39,8	Pusat		LKPP
KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	350,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.127

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Prop : Peningkatan Investasi (inbound & outbound) Industri GPN berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi							350,4			
<i>Kebijakan Impor Dalam Rangka Penguatan Struktur Impor Bahan Baku dan Penolong</i>	<i>Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Baku dan Penolong (Permendag)</i>	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	11,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan</i>	<i>Tersusunnya dokumen profil investasi industri (Profil Investasi)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	14,9	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Peningkatan kemampuan industri kedirgantaraan (komponen pesawat terbang) melalui Bimbingan Teknis sertifikasi</i>	<i>Jumlah industri yang mendapatkan bimbingan teknis sertifikasi (Industri)</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	27,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Peningkatan kemampuan industri kedirgantaraan (komponen pesawat terbang) melalui Bimbingan Teknis sertifikasi</i>	<i>Jumlah industri yang mendapatkan bimbingan teknis sertifikasi (Industri)</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	27,7	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penguatan Struktur Industri Elektronika dan Telematika</i>	<i>Industri Komponen yang difasilitasi (Industri Komponen)</i>	5,0	7,0	7,0	8,0	8,0	27,4	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri</i>	<i>Industri Yang Mendapatkan Pendampingan (Industri)</i>	10,0	10,0	13,0	15,0	15,0	12,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian</i>	<i>Tersedianya jumlah profil investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian (Profil investasi project)</i>	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	17,9	Pusat		<i>Kemenperin</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.128

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi industri komponen	Jumlah industri komponen yang difasilitasi (Industri komponen yang terfasilitasi)	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	15,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (Dokumen Kebijakan)	2,0					3,0	Pusat		Kemenperin
Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah Dokumen Peta Jalan (Peta Jalan)	2,0					6,0	Pusat		Kemenperin
Penyusunan Profil Investasi Industri Logam Dasar Non-Besi	Industri Logam yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor dan substitusi impor (Industri yang Terbangun)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	19,3	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenperin
Fasilitasi investasi dalam Global Value Chain	Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global (Jumlah Kesepakatan)	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	91,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Pendampingan investasi perusahaan Multinasional	Jumlah perusahaan multinasional (Jumlah perusahaan multinasional)	2,0	3,0	3,0	4,0	5,0	12,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kemenperin
Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain	Jumlah Industri yang difasilitasi (Jumlah Perusahaan)	-	10,0	10,0	10,0	10,0	11,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Peningkatan utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	Utilisasi Tarif Preferensi FTA/PTA/EPA (Persentase)	30	35	40	45	50	32,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.129

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyusunan Profil Investasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan</i>	<i>Tersedianya Profil Investasi (Profile Investasi Project)</i>	3,0					12,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Implementasi Pilot Project Pengembangan AMMDES</i>	<i>Jumlah Pilot Project yang dikembangkan (Pilot Project)</i>	1,0					6,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (Juta orang)	18,0	19,0	20,0	21,0	22,3	4.752,3			
	Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)	21,5-22,6	22,25-23,4	23-24,2	23,75-25	24,5				
ProP : Branding Wonderful Indonesia							1.739,6			
<i>Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik</i>	<i>Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik (Media)</i>	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	361,7	Pusat		<i>Kemendikbud</i>
<i>Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak</i>	<i>Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak (Media)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	134,3	Pusat		<i>Kemendikbud</i>
<i>Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang</i>	<i>Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang (Media)</i>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	442,4	Pusat		<i>Kemendikbud</i>
<i>Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital</i>	<i>Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital (Media)</i>	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	801,2	Pusat		<i>Kemendikbud</i>
ProP : Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru							2.354,3			
<i>Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding</i>	<i>Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Pameran)</i>	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	702,2	Pusat		<i>Kemendikbud</i>
<i>Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding</i>	<i>Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Misi Penjualan)</i>	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	265,1	Pusat		<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.130

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding</i>	<i>Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Orang)</i>	1.415,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0	413,6	Pusat		Kemendag
<i>Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE</i>	<i>Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE (Misi Penjualan)</i>	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	107,4	Pusat		Kemendag
<i>Kerjasama Pemasaran ke wilayah yang dikerjakamakan dengan Maskapai dan Wholesaler</i>	<i>Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah yang dikerjakamakan dengan Maskapai dan Wholesaler (Orang)</i>	195.359,0	195.359,0	195.359,0	195.359,0	195.359,0	385,1	Pusat		Kemendag
<i>Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/ Tour Operator</i>	<i>Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/ Tour Operator (Kerjasama)</i>	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	326,3	Pusat		Kemendag
<i>International MICE Bidding</i>	<i>Jumlah International MICE Bidding (Forum)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	76,5	Pusat		Kemendag
<i>Promosi Wisata Gastronomi</i>	<i>Jumlah Promosi Wisata Gastronomi (Kegiatan)</i>						76,6	Pusat		Kemendag
<i>Partisipasi Indonesia dalam Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (Circumnavigation) oleh Magellan</i>	<i>Promosi Perekonomian Maluku Utara melalui Partisipasi pada Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (Circumnavigation) (Dokumen)</i>	2,0	-	-	-	-	1,5			Kemendagri
ProP : Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce							145,5			
<i>Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri (termasuk melalui platform e-commerce dan event promosi berkelas internasional dalam negeri)</i>	<i>Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri (Orang)</i>	2.050,0	2.100,0	2.350,0	2.000,0	1.950,0	145,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag
ProP : Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran							512,8			
<i>Pelatihan pelaku kreatif terkait manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce)</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pelatihan manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce) (Orang)</i>	1.500,0	1.600,0	1.900,0	1.480,0	1.200,0	38,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.131

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat</i>	<i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat (Orang)</i>	1.700,0	1.800,0	2.000,0	1.650,0	1.550,0	38,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan akses permodalan (Orang)</i>	1.500,0	1.600,0	1.750,0	1.450,0	1.350,0	46,2	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi</i>	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi (Orang)</i>	11.200,0	11.500,0	12.000,0	11.400,0	11.200,0	258,2	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)</i>	5.000,0	5.400,0	5.875,0	5.300,0	5.000,0	131,9	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
KP : Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia (Negara)	90,0	92,0	94,0	96,0	98,0	3.309,6			
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Negara)	82,0	82,0	86,0	92,0	94,0				
	Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional (Ratifikasi)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
	Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0				
	PTA/FTA/CEPA yang disepakati	20 (kumulatif)	25 (kumulatif)	30 (kumulatif)	35 (kumulatif)	40 (kumulatif)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.132

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Prop : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center							18,8			
<i>FTA Center di Daerah</i>	<i>Jumlah FTA Center di Daerah (Daerah)</i>	1,0	1,0	-	-	-	13,0	<i>Jatim</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah</i>	<i>Jumlah Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat LN dan Daerah (Dokumen)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,8	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>
Prop : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional							848,3			
<i>Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra</i>	<i>Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra (Dokumen)</i>	88,0	90,0	92,0	94,0	96,0	236,5	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional</i>	<i>Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional (Laporan)</i>	13,0	15,0	17,0	19,0	21,0	17,0	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional</i>	<i>Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional (Dokumen)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	40,8	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional</i>	<i>Jumlah tindak lanjut perundingan perdagangan internasional (Dokumen)</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	7,3	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.133

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan Akses Pasar Jasa di Pasar</i>	<i>Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar sektor jasa di negara mitra (Dokumen)</i>	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	33,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Koordinasi Perundingan Bidang Jasa</i>	<i>Jumlah dokumen koordinasi perundingan bidang jasa (Dokumen)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	20,4	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Penyusunan Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa</i>	<i>Jumlah dokumen Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa (Dokumen)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	41,3	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Fora Multilateral</i>	<i>Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Multilateral (Dokumen)</i>	29,0	31,0	33,0	35,0	29,0	41,3	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral</i>	<i>Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral (Laporan)</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum ASEAN dan Mitra ASEAN</i>	<i>Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum ASEAN dan Mitra ASEAN (Dokumen)</i>	110,0	115,0	120,0	125,0	110,0	56,3	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
<i>Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN</i>	<i>Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN (Laporan)</i>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	5,7	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.134

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral</i>	<i>Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Bilateral (Dokumen)</i>	90,0	100,0	110,0	120,0	100,0	75,9	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
<i>Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum APEC dan Organisasi Internasional</i>	<i>Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum APEC dan organisasi internasional (Dokumen)</i>	76,0	81,0	86,0	91,0	96,0	38,3	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
<i>Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI</i>	<i>Jumlah laporan Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI (Laporan)</i>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,4	Pusat		Kemendag
<i>Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra</i>	<i>Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra (Dokumen)</i>	88,0	90,0	92,0	94,0	88,0	218,5	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
ProP : Promosi Terintegrasi							2.442,5			
<i>Promosi penanaman modal dalam forum internasional</i>	<i>Jumlah Rencana Investasi melalui Kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) (rencana investasi)</i>	<i>(Rp 2.386,5 Triliun)</i>	<i>(Rp 2.625,1 Triliun)</i>	<i>(Rp 2.887,6 Triliun)</i>	<i>(Rp 3.176,4 Triliun)</i>	<i>(Rp 3.494,0 Triliun)</i>	137,8	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.135

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyelenggaraan Forum Internasional bekerjasama dengan Media Internasional</i>	<i>Jumlah minat investasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Forum Internasional bekerjasama dengan Media Internasional (minat investasi)</i>	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	47,8	Pusat	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai</i>	BKPM
<i>Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca Kegiatan, World Dubai Expo 2020</i>	<i>Jumlah pelaksanaan WED 2020 (Kegiatan promosi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	330,5	Dubai	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
<i>CA Expo Nanning China dan Penugasan Pameran Terintegrasi</i>	<i>Jumlah promosi terintegrasi (Pameran)</i>	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	50,1	China, Jerman,	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
<i>FTA Center</i>	<i>Jumlah layanan FTA Center Piloting (Sebelum beralih ke export center) (Pelayanan)</i>	903,0	910,0	910,0	910,0	903,0	70,1	Jakarta, Jateng, Maluku, Sulsel, Sumut, Jabar	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemendag
<i>Pameran/Promosi dan Publikasi</i>	<i>Jumlah Laporan Promosi yang dilakukan (Laporan)</i>	1.800,0	1.850,0	1.900,0	1.950,0	2.000,0	1.764,4	Perwakilan RI	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenlu
<i>Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang/ Forum Kerjasama Lainnya</i>	<i>Terciptanya posisi perundingan dalam kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/ Forum Kerjasama lain (Posisi Runding)</i>	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	11,9	Pusat		Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.136

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pilot Project Pendirian Export Center</i>	<i>Jumlah Export Center di Daerah (Export Center)</i>		1,0	2,0	3,0	4,0	30,0	<i>Medan, Bandung, Surabaya, Makassar</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendag</i>
PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	197.732,7			
	Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0				
	Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.				
KP : Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Rasio M2/PDB (Persen)	41,6	41,8	42,2	42,5	43,2	34,2			
	Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (Unit)	55,8	56,3	56,7	57,1	57,5				
	Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3				
Prop : Peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan							26,9			
<i>Skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI</i>	<i>Jumlah skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI yang dikembangkan (Skema)</i>	-	1,0	1,0	1,0	1,0	26,9	<i>Pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
Prop: Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah							7,4			
<i>Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien</i>	<i>Jumlah daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien (Daerah)</i>	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	6,1	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Pengembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN dengan Skema Investasi Pemerintah</i>	<i>Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah (Draft perubahan PP)</i>	1,0	-	-	-	-	0,6	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkeu</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.137

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kajian Mengenai Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Pendalaman Pasar Keuangan</i>	<i>Rekomendasi kebijakan terkait dampak dan kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap pendalaman pasar keuangan (Rekomendasi kebijakan)</i>	1,0	-	-	-	-	0,7	Pusat		Kemenkeu
KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Kontribusi ekonomi digital (Persen)	3,2	3,5	3,9	4,3	4,7	189.295,2			
	Nilai transaksi e-commerce (Rp triliun)	260,0	345,0	430,0	515,0	600,0				
	Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (Orang)	8.500,0	9.000,0	10.100,0	8.500,0	7.500,0				
ProP : Penguatan Industri Fintech, e-commerce, on-demand Service, dan Internet Of Things							18,2			
<i>Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik (Rancangan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,2	Pusat		Kemendag
<i>Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan</i>	<i>Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (Fasilitator)</i>	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	12,0	Pusat		Kemendag
ProP : Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri							189.277,0			
<i>Rencana Implementasi Making Indonesia 4.0</i>	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan implementasi Making Indonesia 4.0 (Dokumen)</i>	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	89,7	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenperin
<i>Data dan Informasi Industri 4.0</i>	<i>Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (Platform)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	25,5	Pusat		Kemenperin
<i>Pilot Project Industri 4.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi</i>	<i>Perusahaan yang melakukan transformasi IR 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Perusahaan)</i>	-	2,0	2,0	2,0	2,0	27,7	Pusat		Kemenperin
<i>Transformasi 4.0 pada Sektor Industri Barang Galian Non-Logam</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Transformasi 4.0 (Jumlah Perusahaan)</i>	-	3,0	3,0	3,0	3,0	36,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.138

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengoptimalan supply chain melalui transformasi industri 4.0 di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar</i>	<i>Jumlah perusahaan yang teroptimalisasi supply chain di Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar (industri)</i>		3,0	3,0	3,0	3,0	7,9	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan</i>	<i>Terverifikasinya kebutuhan bahan baku industri pangan (industri pangan)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	25,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pendampingan dan Center of Excellence</i>	<i>Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan) (Industri)</i>	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	23,6	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pilot Project</i>	<i>Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dengan Nilai INDI 3 (Kumulatif) (Industri)</i>	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Elektronika</i>	<i>Industri Elektronika dan Telematika yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan) (Industri)</i>	5,0	8,0	9,0	9,0	10,0	26,7	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Perluasan Akses Technopark ke Industri Elektronika</i>	<i>Jumlah Tenant yang terfasilitasi (Tenant yang terfasilitasi)</i>	3,0					2,4	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Kerja Sama Akselerasi Penerapan Industri 4.0 Dengan National Research Council (NRC) Korea</i>	<i>Tersedianya rencana aksi dan kerjasama dengan NRC Korea (rencana aksi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.139

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi Inovasi Produk Tanah Jarang</i>	<i>produk inovasi (Produk tanah jarang)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemenperin</i>
<i>Pengembangan Helpdesk Industri</i>	<i>Helpdesk Industry (Jumlah Modul)</i>	-	1,0	6,0	8,0	10,0	11,9	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Litbang PRN: Antioksidan, anti-aging dan fragrance untuk industri kosmetik berbasis minyak atsiri</i>	<i>Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN)</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	49,4	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Litbang PRN: Pengembangan Collaborative Robot Machine pada industri makanan/ minuman dan farmasi/kesehatan</i>	<i>Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN)</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	49,4	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Litbang PRN: Material Serat, Tekstil dengan Fungsi Khusus dan Tekstil Hijau Berbahan Baku Ramie yang ramah Lingkungan (RM-SDA)</i>	<i>Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN)</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	49,4	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penyusunan Kebijakan Ekosistem Inovasi Industri KFTLMATE untuk mendukung Industri 4.0</i>	<i>Kebijakan teknis terkait Teknologi Industri KFTLMATE (Jumlah Rekomendasi Kebijakan)</i>	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	9,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemenperin</i>
<i>Fasilitasi Inkubasi dan Konsultansi Teknologi Industri KFTLMATE</i>	<i>Paket Teknologi Industri KFTLMATE (Jumlah Paket Teknologi)</i>		25,0	40,0	55,0	70,0	9,7	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri KFTLMATE</i>	<i>Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)</i>	7,0	20,0	20,0	20,0	20,0	33,9	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.140

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri</i>	<i>Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)</i>	11,0	13,0	15,0	16,0	20,0	88,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri KFTLMATE 4.0</i>	<i>Pengadaan alat litbang (Jumlah alat litbang (unit))</i>	-	35,0	25,0	24,0	23,0	58,8	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Litbang Prioritas Riset Nasional (PRN) Industri Agro</i>	<i>Litbang PRN Agro (Jumlah Litbang PRN Industri Agro)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	51,1	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri Agro</i>	<i>Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	67,9	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri Agro</i>	<i>Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)</i>	6,0	15,0	16,0	19,0	20,0	30,7	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri agro 4.0</i>	<i>Pengadaan alat litbang (Jumlah alat litbang (unit))</i>	-	25,0	25,0	24,0	22,0	40,0	Pusat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>
<i>Pembangunan gedung BBPK</i>	<i>Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2))</i>	-	300,0	4.471,0	3.500,0	300,0	35,0	Bandung, Jawa Barat	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemenperin</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.141

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan lahan BBPK	Pengadaan lahan (Luas Lahan (m2))	-	-	-	3.568,0	3.568,0	85,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Pengadaan lahan BBTPPI	Pengadaan lahan (Luas Lahan (m2))	-	-	-	8.000,0	8.000,0	35,0	Semarang, Jawa Tengah	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Pembangunan gedung BBK dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2))	-	400,0	4.000,0	3.000,0	200,0	30,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Renovasi gedung kantor, lab, layanan teknis	Renovasi gedung (Luas Gedung (m2))	-	19.775,2	5.368,3	5.664,4	1.773,9	98,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Pembangunan gedung B4T dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2))	-	300,0	4.000,0	3.000,0	200,0	28,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Kemenperin
Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Makanan Minuman	Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	39.607,7		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Swasta
Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Elektronika	Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	17.947,3		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Swasta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.142

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Otomotif</i>	<i>Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15.471,8		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Swasta
<i>Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Kimia dan Farmasi</i>	<i>Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	17.018,9		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Swasta
<i>Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Tekstil dan Busana</i>	<i>Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	16.864,2		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Swasta
<i>Ev Battery Value Chain</i>							81.200,0		<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	Antam
KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Skor Logistic Performance Index	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	4.354,7			
	Tingkat inflasi (Persen)	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7				
Prop : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik							4.036,9			
<i>Pasar Rakyat Yang Dibangun/ Direvitalisasi</i>	<i>Jumlah Pasar Rakyat Yang Dibangun/ Direvitalisasi (Unit)</i>	49,0	70,0	72,0	68,0	48,0	3.712,6	Pusat	<i>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</i>	Kemendag
<i>Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi</i>	<i>Jumlah Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi (System Pembayaran di Pasar)</i>	3,0	10,0	20,0	30,0	40,0	51,5	Pusat		Kemendag
<i>Penataan Perdagangan Antar Provinsi</i>	<i>Jumlah Sistem Perdagangan Antar Provinsi (Kegiatan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,7	Pusat		Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.143

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System</i>	<i>Jumlah Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System (Daerah)</i>	6,0	12,0	17,0	22,0	27,0	28,0	<i>Tanah Datar, Madiun, Kudus, Gorontalo, Tapin, Garut</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang/pasar lelang</i>	<i>Jumlah analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang (Analisis)</i>	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	23,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang</i>	<i>Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang (Lembaga)</i>	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	19,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi</i>	<i>Jumlah Pasar yang Direvitalisasi (Unit)</i>	29,0	30,0	32,0	34,0	35,0	171,3		<i>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</i>	<i>Kemen KUKM</i>
Prop : Pengendalian Inflasi							317,8			
<i>Verifikasi Data Gudang dan Stok Barang di Gudang</i>	<i>Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang dan Laporan Stok Barang di Gudang (Kegiatan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	75,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat</i>	<i>Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat (Data dan informasi)</i>	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	183,8	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN</i>	<i>Jumlah stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN (Kab/ Kota)</i>	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	44,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Konvensional</i>	<i>Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional (Rancangan)</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	13,6	<i>Pusat</i>		<i>Kemendag</i>
<i>Pengendalian Inflasi Daerah</i>	<i>Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah (Daerah)</i>			1,0	10,0	20,0	1,2			<i>Kemendagri</i>
KP : Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)	1.845,0	2.634,0	3.423,0	4.211,0	5.000,0	464,3			
	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) (Lokasi)	12,0	15,0	17,0	20,0	22,0				
Prop : Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan							115,1			
<i>Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)</i>	<i>Jumlah Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi) (Destinasi)</i>	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	34,8	<i>Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi branding</i>		<i>Kememparekraf</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.144

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO)</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO) (Sustainable Tourism Observatory)</i>	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0	58,3	<i>Destinasi Pariwisata Prioritas</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018)</i>	<i>Jumlah Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018) (Destinasi Pariwisata Prioritas)</i>	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	17,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataaan</i>	<i>Jumlah Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataaan (Pedoman)</i>	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
ProP : Penerapan Industri Hijau	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)						349,2			
<i>Penyusunan Regulasi Teknis Standardisasi Industri</i>	<i>Rancangan Regulasi Teknis (Jumlah Regulasi Teknis)</i>	21,0	23,0	23,0	23,0	23,0	19,3	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendagri</i>
<i>Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri</i>	<i>Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/ sertifikat kesesuaian sesuai regulasi (Persentase)</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	14,4	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Lab Uji (Jumlah Paket Peralatan dan Bangunan)</i>	13,0	205,0	128,0	104,0	148,0	181,0	<i>Pusat</i>	<i>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi</i>	<i>Kemendagri</i>
<i>Penurunan Emisi GRK Sektor Industri</i>	<i>Rancangan Standar (Jumlah Rancangan Standar)</i>	5,0	4,0	12,0	16,0	20,0	11,4	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri</i>	<i>Rancangan Standar (Jumlah Rancangan Standar)</i>	4,0	4,0	12,0	16,0	20,0	16,8	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendagri</i>
<i>Penyusunan dan Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)</i>	<i>Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (Persentase Perusahaan Industri Menengah Besar)</i>	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	24,2	<i>Pusat</i>	<i>9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter</i>	<i>Kemendagri</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.145

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Standar Nasional Indonesia bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	Jumlah SNI Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)	150,0	175,0	190,0	205,0	230,0	20,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	BSN
Standar Nasional Indonesia bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SNI Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	20,5	Pusat		BSN
Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)	200,0	220,0	240,0	260,0	280,0	28,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	BSN
Restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru	Jumlah Komtek yang difasilitasi (KOMTEK)	160,0	166,0	172,0	178,0	180,0	12,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	BSN
KP : Reformasi Fiskal	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (Persen)	9,7-10,5	10,1 -10,7	10,3-11,2	10,5-11,7	10,7-12,3	2.581,0			
	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (Persen)	1,5	9,5	52,4	100,0	Selesai				
	Imbal hasil (yield) surat berharga negara (Persen)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun				
	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Meningkat (Persen)	10,6	13,1	15,6	18,1	20,6				
Prop : Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan							2.580,4			
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)	(Persen)	1,5	9,5	52,4	100,0	Selesai	2.580,4	Pusat		Kemenkeu
Prop : Layanan kepabeanaan terkait e-commerce, transshipment, dan perbatasan							0,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.146

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan kelancaran logistik dan perdagangan di perbatasan serta percepatan pelayanan e-commerce dan transshipment</i>	<i>(Laporan)</i>	9,0	-	-	-	-	0,6	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkeu</i>
KP : Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Data base)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.003,2			
	Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (Data base)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
	Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (Data base)	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0				
ProP : Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							302,0			
<i>Big Data Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah laporan PDB, Ekspor dan tenaga kerja (Publikasi/ Laporan)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	130,9	<i>Pusat</i>		<i>Kememparekraf</i>
<i>Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara</i>	<i>Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)</i>	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	145,6	<i>Pusat</i>		<i>BPS</i>
<i>Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara</i>	<i>Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)</i>	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	11,7	<i>Pusat</i>		<i>BPS</i>
<i>Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)</i>	<i>Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA) (Publikasi/Laporan)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	13,8	<i>Pusat</i>		<i>BPS</i>
ProP : Pengembangan Statistik e-commerce							62,5			
<i>Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce</i>	<i>Jumlah publikasi/laporan statistik e-commerce yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)</i>	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	62,5	<i>Pusat</i>		<i>BPS</i>
ProP : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan							638,7			
<i>Publikasi/Laporan Tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)</i>	515,0	515,0	515,0	515,0	515,0	277,6	<i>Pusat</i>		<i>BPS</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.147

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area</i>	<i>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)</i>	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	361,1	Pusat		BPS
<i>Publikasi/Laporan Sensus Pertanian*</i>	<i>Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (Publikasi/Laporan)</i>						0,0	Pusat		BPS
JUMLAH							1.728.629,5			

Keterangan :

Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	3.992,5			
	Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10				
	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80				
KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan							175,0			
ProP : Perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan							140,0			
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun	92	95	97	98	100	35,0	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemendagri
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (16.9.1*)	N/A	N/A	N/A	N/A	100	0,0	34 Provinsi		Kemendagri
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa	20	40	60	80	100	35,0	34 Provinsi		Kemendagri
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	20	40	60	80	100	35,0	34 Provinsi		Kemendagri
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	70	100	100	100	100	35,0	34 Provinsi		Kemendagri
ProP : Percepatan kepemilikan dokumen pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus							35,0			
Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	112	112	112	112	112	35,0	23 Provinsi		Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan							77,1			
ProP : Penguatan integrasi data administrasi kependudukan							35,0			
<i>Penguatan integrasi data administrasi kependudukan melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional</i>	<i>Jumlah K/L yang mengintegrasikan data melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional</i>	6	10	16	20	22	35,0	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemendagri</i>
ProP : Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu							42,1			
<i>Pembentukan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB</i>	<i>Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB</i>	50	60	68	75	80	7,1	Pusat dan 34 Provinsi		<i>BKKBN</i>
<i>Penyediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</i>	<i>Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</i>	3	5	10	15	20	35,0	34 Provinsi		<i>Kemendagri</i>
KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	25	50	60	70	80	2.906,2			
	Presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15	30	50	60	70				
	Persentase Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	15,69	30	40	50	60,95				
ProP : Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu							1.519,5			
<i>Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir</i>	<i>Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir</i>	107.200.000	109.600.000	110.700.000	111.800.000	112.900.000	419,6	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
<i>Tersedianya Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial</i>	6	6	6	6	6	631,7	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Sistem layanan dan rujukan terpadu</i>	<i>Daerah yang menyelenggarakan Sistem layanan dan rujukan terpadu (Kabupaten/ Kota)</i>	220	300	380	460	514	401,7	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
<i>Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)</i>	<i>Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan Sosial</i>	600	760	920	1.028	900	66,5	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
Prop : Penguatan pendampingan masyarakat							1.386,7			
<i>Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial</i>	<i>Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang telah dibina/ dikembangkan profesinya</i>	27.695	32.000	35.000	38.000	40.000	170,9	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
<i>Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat</i>	<i>Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang memperoleh pendidikan dan pelatihan</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	559,7	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
<i>Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Telah Mendapatkan Akreditasi</i>	5.000	12.000	18.000	20.000	23.000	310,9	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
	<i>Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza</i>	189	195	200	210	220	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang</i>	200	214	221	228	195	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang</i>	55	55	55	55	55	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV</i>	100	100	100	100	100	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Anak</i>	300	300	300	300	300	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia</i>	50	100	100	150	150	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Pendamping Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas</i>	240	288	346	415	498	0,0			<i>Kemensos</i>
	<i>Pendamping Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang</i>	50	100	100	100	100	0,0			<i>Kemensos</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Pendamping Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV</i>	44	44	44	44	44	0,0			Kemensos
	<i>Pendamping Rehabilitasi Sosial anak</i>	120	140	150	170	109	0,0			Kemensos
	<i>Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia</i>	110	250	350	450	520	0,0			Kemensos
<i>Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)</i>	<i>SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang memperoleh peningkatan kapasitas</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	56,4	34 Provinsi		Kemensos
<i>Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</i>	<i>SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan</i>	7.201	7.201	7.201	7.201	7.201	288,8	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	Kemensos
KP : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk							834,2			
ProP : Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang							21,2			
<i>Pemanfaatan GDPK sebagai salah satu dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah</i>	30% prov & 21% kab/kota	45% prov & 27% kab/kota	60% prov & 33% kab/kota	75% prov & 38% kab/kota	100% prov & 45% kab/kota	21,2	Pusat dan 34 Provinsi		BKKBN
ProP : Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	90	90	95	95	100	141,3			
<i>Peningkatan Kab/Kota yang memiliki kebijakan pembangunan daerah yang berawasan</i>	<i>Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berawasan kependudukan</i>	30% prov & 21% kab/kota	45% prov & 27% kab/kota	60% prov & 33% kab/kota	75% prov & 38% kab/kota	100% prov & 45% kab/kota	29,0	Pusat dan 34 Provinsi		BKKBN
<i>Peningkatan efektivitas kelompok kerja KKBPK Provinsi dan</i>	<i>Persentase Kelompok Kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota uana efektif</i>	10% prov & 10% kab/kota	20% prov & 20% kab/kota	30% prov & 30% kab/kota	40% prov & 40% kab/kota	50% prov & 50% kab/kota	21,2	Pusat dan 34 Provinsi		BKKBN
<i>Penyediaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat Provinsi dan Kab/Kota</i>	<i>Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk</i>	30% prov & 10% kab/kota	45% prov & 20% kab/kota	60% prov & 30% kab/kota	75% prov & 40% kab/kota	100% prov & 50% kab/kota	91,0	Pusat dan 34 Provinsi		BKKBN
ProP : Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (termasuk hasil Pendataan Keluarga) - (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	20	25	30	35	40	671,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Data dan Informasi KKBPK	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK	57,60	60,69	63,41	66,51	70,05	671,7	Pusat dan 34 Provinsi		BKKBN
PP : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	821.547,7			
	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80				
KP : Sistem jaminan sosial nasional							249.988,4			
ProP : Pengembangan program jaminan sosial							249.938,4			
Peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	107	109	110	111	113	249.938,4	34 Provinsi		Kemendes
ProP : Penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional							50,0			
Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku	Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan	10	7	5	3	3	50,0	181 Kab/Kota; 11 Provinsi		Kemendagri
KP : Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	567.063,6			
	Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000				
	Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000				
	Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000				
ProP : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran							567.063,6			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	154.422,2	514 Kab/Kota; 34 Provinsi		Kemensos
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Program Sembako	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	49.853,7	11 Provinsi; 181 Kab/Kota		Kemensos
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Program Sembako	5.238.377	5.238.377	5.238.377	5.238.377	5.238.377	47.336,4	12 Provinsi; 151 Kab/Kota		Kemensos
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Program Sembako	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	43.861,7	11 Provinsi; 182 Kab/Kota		Kemensos



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyediaan listrik yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan</i>	<i>Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik</i>	60.080	64.258	68.894	73.609	78.191	12,9	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemen ESDM</i>
<i>Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran</i>	<i>Alokasi Elpiji 3 kg untuk Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran</i>	7.000	7.364 - 7.399	7.754 - 7.836	8.165 - 8.321	8.614 - 8.870	271.576,7	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemen ESDM</i>
<i>Terwujudnya kemudahan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan</i>	<i>Realisasi capaian penambangan pembangkit tenaga listrik</i>	4.920					0,0			
KP : Perlindungan sosial adaptif	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif						1.668,5			
ProP : Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif							1.668,5			
<i>Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/ Kota Siaga Bencana</i>	<i>Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (Jiwa)</i>	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	595,1	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
<i>Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam</i>	<i>Warga masyarakat di lokasi rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (Jiwa)</i>	247.404	250.000	255.000	257.000	260.000	772,4	34 Provinsi	<i>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</i>	<i>Kemensos</i>
<i>Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial</i>	<i>Korban Bencana Sosial Yang Mendapat Pelayanan Kebutuhan Dasar</i>	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000	0,0	34 Provinsi		<i>Kemensos</i>
<i>Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial</i>	<i>Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial</i>	43.018	44.000	44.000	44.000	44.000	301,0	34 Provinsi		<i>Kemensos</i>
KP : Kesejahteraan Sosial	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)	18,9	20	22	24	25	2.827,2			
	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)	37,5	42	45	48	50				
	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kab/kota inklusif (%)	2,7	5	10	15	20				
ProP : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif							1.009,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual	Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000	0,0	34 Provinsi		Kemensos
Penyediaan literasi khusus bagi penyandang disabilitas	Literasi khusus bagi penyandang disabilitas	47000	50000	52000	53000	55000	0,0			Kemensos
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi lanjut usia	Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)	30200	31000	32000	33000	35000	644,0	34 Provinsi		Kemensos
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar	Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)	27000	27000	27500	27500	27500	365,4	34 Provinsi		Kemensos
ProP : Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)							97,0			
Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	12	13	14	15	16	97,0	Pusat		BKKBN
ProP : Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long-term Care)							116,9			
Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	9984	10215	10214	10214	10214	116,9	34 Provinsi		BKKBN
ProP : Penguatan pelayanan sosial kelompok rentan lainnya							1.603,9			
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan	Korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial (jiwa)	21.714	25.000	27.000	28.000	30.000	1.192,6	34 Provinsi		Kemensos
Pemberdayaan bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (Keluarga)	2.667	3.000	3.500	4.000	4.500	411,3	Pusat		Kemensos
PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	303.770,9			
	Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0				
	Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4				
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4				
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0				
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0				
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0				
	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18				
	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0				
	Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09				
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7				
	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8				
	Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1				
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0				
	Persentase rumah sakit terakreditasi	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0				
KP : Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	64	68	71	75	90	14.299,1			
	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	25,11	25,93	26,75	27,57	28,39				
Prop : Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	87	89	91	93	95	12.614,5			
	Cakupan kunjungan antenatal (persen)	80	85	90	92	95				
	Cakupan kunjungan neonatal (persen)	86	88	90	92	95				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	401	431	452	471	488				
<i>Penguatan sistem integrasi pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)</i>	5	8	11	14	17	120,2	17 Provinsi dan 17 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Pencatatan kematian ibu</i>	<i>Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian ibu</i>	40	50	60	80	100	23,9	34 provinsi dan 514 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap</i>	<i>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap</i>	92,9	93,6	94,1	94,6	95,0	267,5	32 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Penyediaan vaksin imunisasi dasar lengkap</i>	<i>Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap</i>	91	92	93	94	95	6.092,8	Pusat/provinsi/kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak</i>	<i>Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak</i>	100	100	100	100	100	11,4	Pusat/provinsi/kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal</i>	<i>Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal</i>	960	960	960	960	960	165,5	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Pelatihan tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit</i>	<i>Jumlah tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit yang dilatih</i>	100	100	100	100	100	10,3	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Pelaksanaan pelayanan operasi sectio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit</i>	<i>Jumlah RS dengan kemampuan melaksanakan operasi sectio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit</i>	66	132	198	264	331	33,6	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
<i>Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan</i>	<i>Persentase pelayanan KB pasca persalinan</i>	29	32	35	38	40	241,0	Pusat dan 34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BKKBN
<i>Peningkatan sarana cold chain imunisasi</i>	<i>Jumlah puskesmas yang mendapatkan dukungan peningkatan sarana cold chain imunisasi</i>	684	1.230	-	-	-	339,2	684 puskesmas	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	DAK/Pemda
<i>Jaminan persalinan</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan jaminan persalinan</i>	514	514	514	514	514	5.309,1	514 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	DAK/Pemda
Prop : Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop out/DO)	25,79	24,50	23,10	21,59	20,00	1.684,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	120	200	320	470	514	134,6	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	38,32	46,12	53,92	61,72	69,52	1.507,5	Pusat dan 34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BKKBN
Peningkatan kualitas pelayanan KB	Indeks Informasi Metode KB (method information index/ MII)	77,50	79,50	81,50	83,50	85,50	10,7	Pusat dan 34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BKKBN
Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Persentase kesertaan KB di 100 kabupaten/kota dengan kesertaan KB rendah	37,96	38,46	38,96	39,46	39,96	12,6	Pusat dan 34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BKKBN
Peningkatan kinerja penyuluh KB dalam capaian Program KKBPK	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	60	65	70	75	85	17,8	Pusat dan 34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BKKBN
Integrasi rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	-	50	55	60	70	1,5	Pusat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendagri
KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	40	45	50	55	60	149.219,5			
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	16,0	14,5	13,0	11,5	10,0				
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	8,08	7,8	7,52	7,26	7,00				
ProP : Penurunan Stunting	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	51	70	90	100	100	149.219,5			
Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	16,0	14,5	13,0	11,5	10,0	1.016,0	514 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	60	70	75	80	85	1.280,5	514 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
Penyediaan obat gizi	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi	100	100	100	100	100	446,9	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
Suplementasi gizi mikro pada balita	Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	90.000	140.000	190.000	240.000	290.000	284,6	514 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/kota	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	51	70	90	100	100	481,3	514 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengawasan produk pangan fortifikasi	Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	88	89	90	90	13,5	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BPOM
Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK (keluarga)	4.122.784	4.122.784	4.122.784	4.122.784	4.122.784	179,4	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BKKBN
Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	29.327	29.327	29.327	29.327	29.327	340,1	33 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	BKKBN
Peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi keluarga	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	35.000	51.000	65.000	75.000	51.000	280,5	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendikbud
Fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan stunting bagi provinsi	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan stunting	-	7	6	6	6	4,0	32 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemen PPPA
Diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional	Persentase K/L/D yang melaksanakan urusan PIKP dan mitra strategis yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional	65	70	75	85	90	30,0	Pusat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemen Kominfo
Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah lokasi promosi Gemarikan	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	137,5	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	KKP
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penilaian kinerja penanganan stunting	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	160	260	360	460	514	3,0	Pusat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendagri
SPALD-T skala kota/regional	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala kota	62.352	62.352	62.352	62.352	62.352	19.965,0	28 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	KemenPUPR, DAK, APBD
SPALD-T skala permukiman	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala permukiman	303.028	284.145	284.145	284.145	284.145	40.611,0	168 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	KemenPUPR, DAK, Pemda
SPALD-S skala kota (IPLT)	Jumlah IPLT terbangun (unit)	24	77	101	152	151	4.435,0	374 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemen PU&PERA
SPALD-S skala individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik sesuai standar (rumah tangga)	2.940.304,0	2.940.304,0	2.940.304,0	2.940.304,0	2.940.304,0	74.220,0	514 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	KemenPUPR, DAK, Pemda, Masyarakat
Implementasi dokumen SSK	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kabupaten/kota)	66	66	62	62	52	385,0	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	KemenPUPR, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kabupaten/kota)</i>	87	87	87	88	88	327,9	437 kabupaten/kota	<i>Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting</i>	<i>KemenPUPR, Pemda</i>
<i>Sosialisasi tentang upaya penurunan stunting bagi provinsi</i>	<i>Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting</i>	4	4	4	4	4	4,0	20 provinsi	<i>Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting</i>	<i>Kemen PPPA</i>
<i>Penguatan intervensi stunting melalui Therapeutic Feeding Center, penyediaan obat, makanan tambahan dan alat antropometri</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan penguatan intervensi stunting</i>	260	360	460	514	514	4.774,4	514 kabupaten/Kota	<i>Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting</i>	<i>DAK/Pemda</i>
KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	40	45	50	55	60	11.454,8			
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	90	90	90	90	90				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405				
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100				
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	416	436	458	482	514				
	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	80	93	106	150	190				
	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28				
	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	52	129	232	360	514				
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514				
ProP : Pengendalian Penyakit Menular	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	77	80	85	90	95		9.537,4		
	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	80	85	90	90	90				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	466	475	484	495	500				
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100				
	Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	87	88	89	90	>90				
	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	136	190	207	220	236				
	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28				
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)	60	65	70	75	80	260,9	34 provinsi		Kemendes
Peningkatan kekarantina kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat	20	40	60	80	100	633,0	34 provinsi		Kemendes
Intensifikasi upaya eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	141	130	119	110	95	315,5	32 provinsi		Kemendes
Intervensi eliminasi schistosomiasis	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28	22,0	28 desa di 2 kabupaten (Poso dan Sigi)		Kemendes
Intervensi eliminasi filariasis	Jumlah kabupaten/kota dengan intervensi eliminasi filariasis	106	150	191	207	212	554,1	32 provinsi		Kemendes
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	77	80	85	90	95	519,4	34 provinsi		Kemendes
Penemuan dan pengobatan TBC	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)	80	85	90	90	90	1.073,5	34 provinsi		Kemendes
Pencegahan dan pengendalian ISPA	Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia standar	50	52	55	57	60	35,6	34 provinsi		Kemendes
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90	90	90	90	90	116,2	472 kabupaten/kota		Kemendes
Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100	503,5	514 kabupaten/kota		Kemendes



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk negara</i>	<i>Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan</i>	86	89	93	97	100	753,9	49 KKP		Kemenkes
<i>Kewaspadaan dini kejadian penyakit</i>	<i>Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan</i>	80	85	90	95	100	242,1	10 BTKLPP		Kemenkes
<i>Pengendalian anti microbial resistance</i>	<i>Persentase RS kelas A dan B Pendidikan yang melakukan surveilan AMR sesuai standar</i>	20	40	60	80	100	12,5	Pusat		Kemenkes
<i>Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB</i>	<i>Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis</i>	100	100	100	100	100	1.718,0	Pusat/provinsi/kabupaten/kota		Kemenkes
<i>Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS</i>	<i>Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program HIV/AIDS</i>	100	100	100	100	100	2.693,4	34 provinsi		Kemenkes
<i>Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria</i>	<i>Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan</i>	100	100	100	100	100	84,0	Pusat/provinsi/kabupaten/kota		Kemenkes
ProP : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	103	205	308	411	514	1.917,4			
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514				
<i>Deteksi dini faktor risiko PTM</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%</i>	52	129	232	360	514	545,5	52 kabupaten/kota		Kemenkes
<i>Pelaksanaan pengendalian PTM terpadu di Puskesmas</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas</i>	103	205	308	411	514	173,4	103 kabupaten/kota		Kemenkes
<i>Pelayanan berhenti merokok (konseling dan terapi)</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota dengan ≥ 40% FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)</i>	50	100	175	275	350	204,8	50 kabupaten/kota		Kemenkes
<i>Advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)</i>	324	374	424	474	514	9,7	277 kabupaten/kota		Kemenkes
<i>Deteksi dini gangguan indera</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi</i>	155	206	308	360	514	140,4	155 kabupaten/kota		Kemenkes
<i>Deteksi dini kanker</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-59 tahun</i>	283	309	360	411	514	170,0	283 kabupaten/kota		Kemenkes



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	45	60	75	90	100	40,2	34 provinsi		Kemendes
Pengawasan label dan iklan produk tembakau	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diaawasi yang memenuhi ketentuan	60.000	60.200	60.400	60.600	60.800	10,2	34 provinsi		BPOM
Penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan alat deteksi dini penyakit tidak menular	274	120	120	-	-	623,1	35 provinsi		DAK/Pemda
KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas)	Jumlah kabupaten/kota sehat	110	220	280	380	420	102.812,1			
ProP : Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	40	50	60	70	90	101.516,0			
	Jumlah kabupaten/kota sehat	110	220	280	380	420				
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	Jumlah kabupaten/kota sehat	110	220	280	380	420	76,0	34 provinsi		Kemendes
Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	40	50	60	70	90	445,2	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
Pengawasan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang diaawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	60	64	68	72	76	291,2	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemendes
Pembangunan SPAM	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/ Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota (LPD)	3225	3225	3225	3225	3225	8.272,3	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemen PU&PERA
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM	Jumlah SR	44258	44258	44258	44258	44258	4.425,8	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	DAK/Pemda
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	25985	25985	25985	25985	25985	5.980,0	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemen PU&PERA
Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Jumlah SR	221290	221290	221290	221290	221290	2.212,9	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	DAK/Pemda
Peningkatan kapasitas SPAM	Kapasitas SPAM Kabupaten/ Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota (LPD)	940	940	940	940	940	1.050,0	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kemen PU&PERA
Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM	Jumlah SR	36522	36522	36522	36522	36522	858,5	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	DAK/Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal	Kumulatif jumlah rumah tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal	16948228	18572179	20354341	22310323	24457290	0,0	34 provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	DAK/Pemda
Pembangunan rumah susun	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	4153	10847	20000	25000	35000	61.880,0	34 provinsi		Kemen PU&PERA
Fasilitasi peningkatan kualitas rumah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (rumah tangga)	156000	156000	156000	156000	156000	15.677,0	34 provinsi		Kemen PU&PERA
Penerapan sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	660	1330	2010	2700	3400	116,8	34 provinsi		BPOM
Penerapan desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	211	427	648	874	1.105	172,2	34 provinsi		BPOM
Intervensi pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	84	165	255	350	450	58,1	34 provinsi		BPOM
ProP : Penguatan Promosi Germas	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	35	40	45	50	1.296,1			
	Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	25	35	50	60	70				
Pembinaan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	35	40	45	50	361,6	34 provinsi		Kemenkes
Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja	308	334	360	385	411	195,4	Pusat dan 34 provinsi		Kemenkes
Penyusunan pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	3	6	9	12	15	24,3	Pusat		Kemenkes
Pembinaan posyandu aktif	Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	51	70	90	100	100	182,7	34 provinsi		Kemenkes
Promosi makanan dan minuman sehat nusantara	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat nusantara	300	400	500	600	700	62,5	34 provinsi		Kemendag
Kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	11274	11274	11274	11274	11274	25,1	Pusat		Kemempora
Kampanye olahraga di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	17000	17000	17000	17000	17000	17,5	Pusat		Kemempora



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kampanye olahraga rekreasi, massal, petualang, tantangan dan wisata</i>	<i>Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata</i>	14020	14020	14020	14020	14020	140,9	Pusat		Kemempora
<i>Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi</i>	3	3	3	3	3	21,4	Pusat		Kemempora
<i>Fasilitasi bantuan untuk sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi</i>	<i>Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi</i>	59	58	58	58	58	264,8	Pusat		Kemempora
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas tanpa dokter	6	0	0	0	0	25.985,3			
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83				
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	70	75	80	85	90				
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100				
	Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100				
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85	90	92	94	96				
	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	25	35	45	55	65				
	Persentase obat memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90,0	92,3				
	Persentase makanan memenuhi syarat	78	80	82	84	86				
ProP : Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	80	85	90	95	100	14.298,7			
	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	75	83	90	95	100				
<i>Pembinaan FKTP yang memiliki sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar</i>	<i>Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar</i>	75	83	90	95	100	15,2	34 provinsi		Kemendes
<i>Pembinaan rumah sakit yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar</i>	<i>Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar</i>	80	85	90	95	100	25,9	34 provinsi		Kemendes



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan fasilitas rujukan di Kawasan Timur Indonesia	Jumlah RS UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan	2	2	2	2	2	1.727,5	3 lokasi		Kemendes
Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarananya RS UPT vertikal	Jumlah RS UPT vertikal yang dikembangkan dan ditingkatkan sarana dan prasarananya	6	6	6	7	7	3.596,7	7 RS		Kemendes
Penyusunan rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1	-	-	-	2,5	34 provinsi		Kemendes
Pembinaan RSUD di DITPK (Daerah Tertinggal, Terpentil, Perbatasan, Kepulauan)	Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpentil, Perbatasan, Kepulauan (DITPK) yang dibina	7	14	21	28	35	24,1	15 provinsi		Kemendes
Pembinaan puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan yang ditingkatkan SPA sesuai standar	Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DITPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar	250	200	200	200	200	16,3	28 provinsi		Kemendes
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	18	51	84	117	150	324,9	28 provinsi		Kemendes
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	105	200	300,0	400,0	514,0	129,6	514 kabupaten/kota		Kemendes
Pelayanan rujukan non spesialis di FKTP	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialis $\leq 2\%$	40,0	50,0	60,0	80,0	100,0	37,9	34 provinsi		Kemendes
Pembinaan UTD yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan transfusi darah	42	126	210	252	294	10,1	34 provinsi		Kemendes
Penerapan telemedicine	Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	67	134	201	268	335	62,2	34 provinsi		Kemendes
Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	Persentase rumah sakit rujukan yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	20	40	60	80	100	57,2	34 provinsi		Kemendes
Penerapan sistem rujukan terintegrasi	Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi	34	34	34	34	34	25,2	34 provinsi		Kemendes
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu FKTP untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	4.478	4.009	4.720	6.110	5.706	59,1	34 provinsi		Kemendes
Pelayanan kesehatan lansia	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut lansia	45	50	55	60	65	115,4	34 provinsi		Kemendes
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu rumah sakit untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1028	851	1195	1169	991	65,5	34 provinsi		Kemendes



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan RS Pratama</i>	<i>Jumlah RS Pratama yang dibangun</i>	15	10	10	10	10	2.466,2	15 kabupaten/kota		DAK/Pemda
<i>Penyediaan sarpras puskesmas DTPK</i>	<i>Jumlah puskesmas DTPK yang mendapatkan dukungan peningkatan sarana prasarana</i>	300	150	100	50	-	5.537,0	300 puskesmas		DAK/Pemda
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas tanpa dokter	6	0	0	0	0	3.911,5			
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83				
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	70	75	80	85	90				
<i>Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim</i>	<i>Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim</i>	1356	1493	1200	1200	1200	296,8	100 puskesmas		Kemenkes
<i>Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu</i>	<i>Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu</i>	4177	5487	4000	4000	4000	270,0	500 puskesmas		Kemenkes
<i>Pendayagunaan dokter spesialis</i>	<i>Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan</i>	660	660	660	660	660	75,2	431 RS		Kemenkes
<i>Penyediaan bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)</i>	<i>Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)</i>	2020	1885	1785	1650	1540	633,8	34 provinsi		Kemenkes
<i>Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK</i>	<i>Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK</i>	0	500	1000	1500	1500	155,3	Pusat dan Poltekkes Kementerian Kesehatan		Kemenkes
<i>Pelatihan strategis sumber daya manusia kesehatan</i>	<i>Jumlah SDM kesehatan yang mendapat pelatihan strategis</i>	2700	2700	2700	2700	2700	237,0	34 provinsi		Kemenkes
<i>Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan</i>	<i>Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan</i>	52	104	156	208	260	221,8	Pusat dan 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan		Kemenkes
<i>Pendayagunaan tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes di fasyankes Pemerintah</i>	<i>Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah</i>	0	500	1000	1500	1500	1.407,8	34 provinsi		Kemenkes
<i>Pendayagunaan dokter pasca internsip</i>	<i>Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan</i>	0	400	600	800	1000	613,8	34 provinsi		Kemenkes



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85	90	92	94	96	3.074,0			
	Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	91	92	93	94	95				
<i>Pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasyankes</i>	<i>Jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</i>	3000	4000	5000	6000	7000	102,7	<i>Fasyankes di provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Penggunaan obat sesuai FORNAS di rumah sakit</i>	<i>Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS</i>	70	75	80	85	90	33,2	<i>RS provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Penyediaan buffer obat dan perbekalan kesehatan program pelayanan kesehatan dasar</i>	<i>Jumlah paket buffer obat pelayanan kesehatan dasar yang disediakan</i>	10	10	10	10	10	1.084,5	<i>34 provinsi</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Pelaksanaan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar</i>	164	264	364	464	514	17,4	<i>Pusat/provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Penerapan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di instalasi farmasi provinsi dan kab/kota</i>	<i>Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</i>	68	136	204	272	340	24,6	<i>Pusat/provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Penyediaan vaksin baru untuk pneumonia (PCV)</i>	<i>Persentase ketersediaan PCV di provinsi rencana introduksi</i>	100	100	100	100	100	1.673,1	<i>Pusat/provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Penyediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas</i>	<i>Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial</i>	77	79	81	83	85	38,5	<i>Pusat/provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal</i>	<i>Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal</i>	1	1	1	1	1	2,7	<i>Jakarta</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Pengawasan produk alkes dan PKRT</i>	<i>Persentase produk alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat</i>	90	90	90	95	95	31,7	<i>Pusat/provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
<i>Pemberian sertifikat CPOTB untuk UMKM OT</i>	<i>Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap</i>	42	54	65	76	87	13,7	<i>33 provinsi</i>		<i>BPOM</i>
<i>Penyelesaian permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu</i>	16.300	16.500	16.700	16.900	17.100	5,3	<i>33 provinsi</i>		<i>BPOM</i>
<i>Produksi alat kesehatan di dalam negeri</i>	<i>Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri</i>	7	7	7	7	7	46,6	<i>Industri Alkes di provinsi/kabupaten/kota</i>		<i>Kemenkes</i>
ProP : Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	25	35	45	55	65	1.786,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun	2	2	2	2	2				
	Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	100	100	100	100	100				
<i>Pendampingan tata kelola program kesehatan</i>	<i>Jumlah provinsi/ kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan</i>	25	35	45	55	65	111,2	34 provinsi	Kemendes	
<i>Integrasi sistem informasi kesehatan</i>	<i>Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)</i>	10	25	45	70	100	137,2	Pusat	Kemendes	
<i>Peningkatan kualitas data rutin kesehatan</i>	<i>Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin</i>	0	5	10	20	30	12,6	Pusat	Kemendes	
<i>Penguatan sistem pencatatan data rutin program</i>	<i>Jumlah rekomendasi penguatan sistem pencatatan data rutin program</i>	2	1	1	1	1	48,5	35 provinsi	Kemendes	
<i>Penyusunan rancangan kebijakan determinan pembangunan kesehatan</i>	<i>Jumlah rancangan kebijakan determinan pembangunan kesehatan yang dihasilkan</i>	4	4	4	4	4	50,2	Pusat	Kemendes	
<i>Penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan</i>	<i>Jumlah hasil penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan</i>	3	4	4	4	4	104,7	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat	Kemendes	
<i>Penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional</i>	<i>Jumlah hasil penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional</i>	1	1	1	1	1	256,2	34 provinsi	Kemendes	
<i>Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang upaya kesehatan masyarakat</i>	<i>Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait upaya kesehatan masyarakat</i>	1	1	1	1	1	116,0	34 provinsi	Kemendes	
<i>Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah II</i>	<i>Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II</i>	1	1	1	7	2	219,9	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Maluku	Kemendes	
<i>Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah V</i>	<i>Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V</i>	1	1	1	6	2	133,1	Babel, Kalbar, Kalsel,, Sultra, Gorontalo, Pabar	Kemendes	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	Jumlah hasil riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	10,6	28 provinsi		Kemendes
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah I	Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I	1	1	1	7	2	205,6	Aceh, Riau, Jakarta, Jateng, DIY, NTT, Sulsel		Kemendes
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah IV	Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV	1	1	1	7	2	108,2	Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulbar		Kemendes
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah III	Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah III	1	1	1	7	2	241,1	Ada 7 provinsi : Sumbar, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Maluku, dan Papua		Kemendes
Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional	2	2	2	2	2	31,5	Pusat		Kemendes
ProP : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90,0	92,3	2.914,3			
	Persentase makanan memenuhi syarat	78	80	82	84	86				
Sertifikasi pengawas obat dan makanan yang kompeten sesuai standar	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	770	820	875	935	1.000	101,0	Pusat		BPOM
Pengembangan sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang real time dan terintegrasi	Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan real time	35	55	70	85	100	246,7	33 provinsi		BPOM
Penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	50	52	54	56	58	179,8	33 provinsi		BPOM
Pemeriksaan dan pengujian sampel makanan sesuai standar	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85	192,5	33 provinsi		BPOM
Pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai standar	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	262,0	33 provinsi		BPOM
Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	48,0	33 provinsi		BPOM
Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71	301,1	33 provinsi		BPOM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	70	75	80	85	90	1.282,9	33 provinsi		BPOM
Penerapan manajemen risiko pada industri pangan olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko	19	38	57	76	95	31,2	Pusat		BPOM
Pemberian keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80	81	82	83	84	43,7	Pusat		BPOM
Pemberian keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	78	80	82	84	86	5,6	Pusat		BPOM
Pengawasan pangan olahan sesuai standar di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	50	125	200	275	350	26,0	33 provinsi		BPOM
Pengawasan fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat sesuai standar	Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, dan bahan baku obat yang diaawasi sesuai standar	84	86	88	90	92	18,2	33 provinsi		BPOM
Pemberian keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78	79	80	81	82	46,8	Pusat		BPOM
Pemberian keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	60	63	66	69	72	49,9	33 provinsi		BPOM
Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	74,0	33 provinsi		BPOM
Pengembangan grand design penguatan laboratorium dan balai POM	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan dan penguatan balai POM	-	5	20	30	40	5,0	Pusat		BPOM
PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	289.780,0			
	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16				
	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16				
KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2	9.390,5			
		26,5	27,4	28,3	29,2	30,1				
		30,4	31,4	32,4	33,4	34,4				
	Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	67,5	70,9	74,6	78,2	81,8				
ProP : Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif							996,8			
Kurikulum yang dikembangkan	Jumlah Kurikulum dan pembelajaran pendidikan umum yang dikembangkan	148	148	148	148	148	75,4			Kemendikbud
Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	Jumlah Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	171	171	171	171	171	195,7			Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	174,6			Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	148.805	148.805	148.805	148.805	148.805	154,1			Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	15.383	15.383	15.383	15.383	15.383	184,7			Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	400	400	400	400	400	20,7			Kemendikbud
Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,8			Kemenag
Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	79,0			Kemenag
Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	4,5			Kemenag
Program Studi Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	Jumlah Program Studi yang Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	600	700	800	900	1.000	58,2	Pusat		Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	Jumlah Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	200	250	300	350	400	8,0	Pusat		Kemendikbud
Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	29,0			Kemenag
ProP : Peningkatan Kompetensi Pendidik							6.121,4			
Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	105,2			Kemendikbud
Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	676	676	676	676	676	150,3			Kemendikbud
Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	117,7			Kemendikbud
Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	Jumlah Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	21.219	21.219	21.219	21.219	21.219	499,8			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa Bahasa	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa Bahasa	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	138,9			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	133,3			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	135,8			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	150,8			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	136,5			Kemendikbud
Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	96,5			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069	116,3			Kemendikbud
Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	39.564	39.564	39.564	39.564	39.564	1.022,1			Kemendikbud
Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14	14	14	14	14	58,1			Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	Jumlah Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	-	4.212	4.212	4.212	4.212	82,8			Kemendikbud
Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	49,2			Kemendikbud
Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	-	900	900	900	900	27,2			Kemendikbud
Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	64,8			Kemendikbud
Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	204	204	204	204	204	16,6			Kemendikbud
Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Memperoleh Pembinaan Kemahiran Berbahasa Indonesia	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27,9			Kemendikbud
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	Jumlah Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	40.510,00	40.510,00	40.510,00	40.510,00	40.510,00	829,4			Kemenag
Guru PAI yang meningkat kompetensinya	Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya	3.950,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	49,7			Kemenag
Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	4.369,00	4.369,00	4.369,00	4.369,00	4.369,00	166,8			Kemenag
Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	1.245,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	352,0			Kemenag
Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0,00	78,00	100,00	200,00	300,00	5,1			Kemenag
KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	571,0			Kemenag
Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	4,2			Kemenag
Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	2,3			Kemenag
Penguatan KKG/MGMP	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penguatan KKG/MGMP	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	324,8			Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan Kompetensi Guru</i>	<i>Jumlah Guru yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	62,7			<i>Kemenag</i>
<i>Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	<i>Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	9,3			<i>Kemenag</i>
<i>Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya</i>	<i>Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	71,9			<i>Kemenag</i>
<i>Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	<i>Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	163,00	170,00	175,00	180,00	185,00	11,1			<i>Kemenag</i>
<i>SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi</i>	<i>Jumlah SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi</i>	915	1.000	1.100	1.200	1.300	155,8	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar</i>	<i>Jumlah SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar</i>	380	500	600	700	800	22,9	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>Jumlah Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	99	99	99	99	99	16,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>Jumlah Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	115	115	115	115	115	12,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya</i>	42	42	42	42	42	13,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Dosen yang Tersertifikasi</i>	<i>Jumlah Dosen yang disertifikasi</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Dosen yang bersertifikat</i>	<i>Jumlah Dosen yang disertifikasi</i>	100	100	100	100	100	2,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi</i>	<i>Jumlah Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi</i>	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	75,0	<i>Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Dosen PTA Katolik Tersertifikasi</i>	<i>Jumlah Dosen PTA Katolik yang Disertifikasi</i>	50	50	50	50	50	1,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	635	635	635	635	635	55,6	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Peningkatan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa PTKH</i>	<i>Jumlah Dosen dan Mahasiswa PTKH yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	921	921	921	921	921	40,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Sertifikasi Dosen</i>	<i>Jumlah Dosen Yang Disertifikasi</i>	50	50	50	50	50	0,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Dosen yang tingkatan kompetensinya</i>	<i>Jumlah Dosen yang ditingkatkan kompetensinya</i>	310	310	310	310	310	8,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen</i>	<i>Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen</i>	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	62,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit</i>	<i>Jumlah SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	49,4	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Kompetensi Guru Agama Khonghucu</i>	<i>Jumlah Guru yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1,8			<i>Kemenag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Agama Khonghucu Penerima Insentif	Jumlah Guru yang Menerima Insentif	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	2,8		Kemenag	
ProP : Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan							1.398,7			
Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	Jumlah Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	7	7	7	7	7	83,1		Kemendikbud	
Model Penilaian Pendidikan	Jumlah Model Penilaian Pendidikan	9	9	9	9	9	49,3		Kemendikbud	
Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	Jumlah Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	8.424.500	8.424.500	8.424.500	8.424.500	8.424.500	1.003,2		Kemendikbud	
Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000	86,8		Kemendikbud	
Soal yang dikembangkan	Jumlah Soal yang dikembangkan	66.280	66.280	66.280	66.280	66.280	100,6		Kemendikbud	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	3.492,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	14,7		Kemenag	
Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	Jumlah Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	1.575,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	25,1		Kemenag	
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	9,6		Kemenag	
Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	26,4		Kemenag	
ProP : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi							821,6			
Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	Jumlah Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	180,0		Kemendikbud	
Model Media Pendidikan Berbasis TIK	Jumlah Model Media Pendidikan Berbasis TIK	11	11	11	11	11	21,0		Kemendikbud	
Satuan Pendidikan Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	9.460	10.000	10.500	11.000	11.500	117,4		Kemendikbud	
Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	Jumlah Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	300	500	600	700	800	116,2		Kemendikbud	
Produksi Dokumenter	Jumlah paket siaran dokumenter	65	65	65	65	65	17,0	Pusat	LPP RRI	
Kanal Pendidikan dan Budaya	Jumlah jam siar konten pendidikan dan budaya	1.460	2.190	2.920	2.920	2.920	370,0	Pusat	LPP TVRI	
ProP : Integrasi Softskill dalam Pembelajaran							52,0			
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	Jumlah Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	106	106	106	106	106	52,0		Kemendikbud	
KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (Persen) Pendidikan Tinggi	33,4	35,4	37,4	39,5	41,7	232.259,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	105,5	105,5	104,4	104,4	104,4				
Prop : Sarana dan Prasarana Pendidikan							24.250,5			
Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/ Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/ Direvitalisasi	250	300	350	400	450	273,5			Kemendikbud
Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/ Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/ Direvitalisasi	-	25	25	25	25	135,9			Kemendikbud
Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	-	500	500	500	500	150,2			Kemendikbud
SD-SMP Satu Atap yang dibangun	Jumlah SD-SMP Satu Atap yang dibangun	-	15	15	15	15	75,8			Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	5	5	5	5	5	49,8			Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	58	58	58	58	58	459,0			Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	132	132	132	132	132	373,9			Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	20	20	20	20	20	59,4			Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	6	6	6	6	6	148,4			Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	131,0			Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	209,2			Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	20	20	20	20	20	316,2			Kemendikbud
Asrama pada Madrasah yang dibangun	Jumlah Asrama pada Madrasah yang dibangun	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	24,8			Kemenag
Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	63,5			Kemenag
Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	30,7			Kemenag
Laboratorium Komputer MA yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MA yang dibangun	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	178,4			Kemenag
Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	178,4			Kemenag
Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	14,00	15,00	20,00	25,00	30,00	25,1			Kemenag
Madrasah yang direvitalisasi	Jumlah Madrasah yang direvitalisasi	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,8			Kemenag
Madrasah yang Ditingkatkan Mutu UKS/M	Jumlah Madrasah yang ditingkatkan mutu UKS dan sanitasinya	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	11,7			Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	Jumlah MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	451,7			Kemenag
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	72,2			Kemenag
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	9,1			Kemenag
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	0,00	300,00	350,00	400,00	450,00	93,5			Kemenag
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	0,00	300,00	350,00	400,00	450,00	107,0			Kemenag
Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	42,5			Kemenag
Ruang kelas MA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MA yang dibangun	135,00	140,00	150,00	160,00	170,00	27,5			Kemenag
Ruang kelas MA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MA yang direhabilitasi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	229,8			Kemenag
Ruang kelas MI yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MI yang dibangun	159,00	170,00	180,00	190,00	200,00	28,0			Kemenag
Ruang kelas MI yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MI yang direhabilitasi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	229,8			Kemenag
Ruang kelas MTs yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MTs yang dibangun	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00	26,2			Kemenag
Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	229,8			Kemenag
Ruang kelas RA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas RA yang dibangun	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	15,8			Kemenag
Ruang kelas RA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas RA yang direhabilitasi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	76,6			Kemenag
Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	6,4			Kemenag
Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	74,00	80,00	85,00	90,00	95,00	21,0			Kemenag
Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	Jumlah Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	80	50	50	50	50	5.086,9	Pusat		Kemendikbud
Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarannya melalui SBSN	8	10	10	10	10	5.291,6	Pusat		Kemenag
Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarana Perpustakaan	58	58	58	58	58	43,0	Pusat		Kemenag
Sarana dan Prasarana PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarannya	58	58	58	58	58	400,0	Pusat		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana PTK yang memenuhi Standar	Jumlah PTA yang direhabilitasi Sarana dan Prasarana PTT/AK yang memenuhi standar	95	355	355	355	355	402,5	Pusat		Kemenag
Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	Jumlah Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	2	5	5	5	5	17,6	Pusat		Kemendikbud
Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	Jumlah Item Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	12	8	2	2	2	2.472,1	Pusat		Kemendikbud
Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama Khonghucu	Jumlah Sarana dan Prasarana	24	24	24	24	24	3,3			Kemenag
Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama	136	136	136	136	136	5.871,4			Kemenag
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/ Renov/ Pembangunan	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/ Renov/ Pembangunan	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	39,8			Kemenag
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	45,0			Kemenag
Prop : Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat							200.646,1			
Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	Jumlah Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	135.581	135.581	135.581	135.581	135.581	1.373,7			Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	60,4			Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	94,6			Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303	38,2			Kemendikbud
Sekolah yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	27,9			Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	23.320,8		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.368.243	1.368.243	1.368.243	1.368.243	1.368.243	6.558,7		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.829.167	1.829.167	1.829.167	1.829.167	1.829.167	8.501,3		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	15.065,5		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5.168	5.168	5.168	5.168	5.168	280,9			Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	238,6			Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	443,1			Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/ olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional	9.261	9.261	9.261	9.261	9.261	485,7			Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	3.294	4.056	4.056	4.056	4.056	384,1			Kemendikbud
Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	365.380	289.854	208.624	113.572	-	9.239,3	Pusat		Kemendikbud
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	5.148	7.798	8.198	8.898	9.148	658,4	Pusat		Kemendikbud
Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	297	400	500	600	700	7,6	Pusat		Kemendikbud
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa PPA	970	970	970	970	970	14,6	Pusat		Kemenag
Beasiswa BIDIK MISI	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa BIDIK MISI	1.345	1.345	1.067	767	467	55,1	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Beasiswa Mahasiswa Miskin	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Mahasiswa Miskin	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	15,6	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Bidik Misi PTKI	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Bidik Misi PTKI	38.000	26.364	18.576	10.788	3.000	1.006,2	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	35,9	Pusat		Kemenag
Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	1.768	1.768	1.607	1.107	607	77,8	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	100,0	Pusat		Kemenag
Mahasiswa penerima beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa PPA	75	75	75	75	75	2,0	Pusat		Kemenag
Mahasiswa Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bidik Misi	20	20	20	15	10	1,1	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	Jumlah Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	30,0	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	250	250	100	150	100	12,5	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya, dan Utama Widya Pasraman	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya, dan Utama Widya Pasraman	333	333	333	333	333	2,2			Kemenag
PIP Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	Jumlah Siswa Penerima Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	293	293	293	293	293	1,0	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	30.176	30.176	30.176	30.176	30.176	79,7		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	27.540	27.540	27.540	27.540	27.540	145,4			Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	46.283,00	46.283,00	46.283,00	46.283,00	46.283,00	314,2		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	18.562,00	18.562,00	18.562,00	18.562,00	18.562,00	153,9			Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	105.203,00	105.203,00	105.203,00	105.203,00	105.203,00	462,4		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.34

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	114.516,00	114.516,00	114.516,00	114.516,00	114.516,00	696,1			Kemenag
Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	Jumlah Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7,4			Kemenag
Siswa MA penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MA penerima Bantuan PIP	320.372,00	320.372,00	320.372,00	320.372,00	320.372,00	1.879,5		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Siswa MI penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MI penerima Bantuan PIP	939.607,00	939.607,00	939.607,00	939.607,00	939.607,00	2.480,5		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Siswa MTs penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan PIP	745.086,00	745.086,00	745.086,00	745.086,00	745.086,00	3.278,3		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Siswa SDTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	10,7			Kemenag
PIP SDTK	Jumlah Siswa SDTK Penerima KIP	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	2,7		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3,5		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Siswa SMPK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMPK Penerima BOS	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	18,1			Kemenag
PIP SMPK	Jumlah Siswa SMPK Penerima KIP	2.838,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	12,5		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Siswa SMTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMTK Penerima BOS	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	71,7			Kemenag
PIP SMTK/ SMAK	Jumlah Siswa SMTK penerima KIP	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	46,7		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,3	Pusat		Kemenag
Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	63.320,0	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.35

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	17.565	37.565	62.565	92.565	145.130	3.733,3	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	1.690	3.380	5.070	6.760	8.450	267,7	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	100	200	300	400	500	15,9	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	398	796	1.192	1.588	1.984	63,1	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	180	360	540	720	900	28,6	Pusat	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Kemenag
Siswa MI penerima BOS	Jumlah Siswa MI penerima BOS	3.894.365	3.894.365	3.894.365	3.894.365	3.894.365	20.562,0			Kemenag
Siswa MTs penerima BOS	Jumlah Siswa MTs penerima BOS	3.358.771,00	3.358.771,00	3.358.771,00	3.358.771,00	3.358.771,00	21.675,0			Kemenag
Siswa MA penerima BOS	Jumlah Siswa MA penerima BOS	1.497.606,00	1.497.606,00	1.497.606,00	1.497.606,00	1.497.606,00	13.158,4			Kemenag
Siswa SMAK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan BOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20,7			Kemenag
ProP : Penanganan Anak Tidak Sekolah							1.767,7			
Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Orang Dewasa yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	-	100.000	100.000	100.000	100.000	866,1			Kemendikbud
SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	Jumlah SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	-	500	500	500	500	84,8			Kemendikbud
Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	Jumlah Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	-	30	30	30	30	80,5			Kemendikbud
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	-	549	549	549	549	52,2			Kemendikbud
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	7	7	7	7	7	27,6			Kemendikbud
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	245	245	245	245	245	179,4			Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.36

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif</i>	<i>Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif</i>	500	500	500	500	500	36,8			<i>Kemendikbud</i>
<i>Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus</i>	<i>Jumlah Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus</i>	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	440,2			<i>Kemendikbud</i>
ProP : Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah							5.595,4			
<i>Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan</i>	<i>Jumlah Anak Usia Dini yang Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan</i>	-	6.500	6.500	6.500	6.500	52,5			<i>Kemendikbud</i>
<i>Kabupaten/Kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar</i>	-	514	514	514	514	521,9			<i>Kemendikbud</i>
<i>Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas</i>	<i>Jumlah Lembaga PAUD yang Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas</i>	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	245,1			<i>Kemendikbud</i>
<i>Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif</i>	<i>Jumlah Lembaga PAUD yang Menyelenggarakan Holistik Integratif</i>	-	1.200	1.200	1.200	1.200	83,7			<i>Kemendikbud</i>
<i>Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari</i>	<i>Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari</i>	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	6,5			<i>Kemenag</i>
<i>BOP RA</i>	<i>Jumlah Siswa RA penerima BOP</i>	1.331.207,00	1.331.207,00	1.331.207,00	1.331.207,00	1.331.207,00	4.685,8			<i>Kemenag</i>
KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan							17.074,4			
ProP : Revitalisasi LPTK							100,5			
<i>Penyelenggaraan LPTK</i>	<i>Jumlah Penyelenggaraan LPTK</i>	7	7	7	7	7	10,9	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)</i>	<i>Jumlah LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)</i>	41	41	41	41	41	89,6	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
ProP : Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik							13.865,5			
<i>Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir</i>	<i>Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir</i>	43.360	43.360	43.360	43.360	43.360	160,6			<i>Kemendikbud</i>
<i>Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4 S1/D4</i>	<i>Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4</i>	60	60	60	60	60	11,6			<i>Kemendikbud</i>
<i>Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4</i>	<i>Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4</i>	50	50	50	50	50	19,3			<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.37

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	24.697	24.697	24.697	24.697	24.697	1.058,3			Kemendikbud
Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	20	20	20	20	20	9,9			Kemendikbud
Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	11.052	11.052	11.052	11.052	11.052	538,1			Kemendikbud
Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251	210,2			Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	899	899	899	899	899	168,4			Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	483,3			Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	246,8			Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	243,8			Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	90	90	90	90	90	18,7			Kemendikbud
SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Jumlah SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	10.505	16.514	20.739	26.242	30.715	8.540,4	Pusat		Kemendikbud
GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	84,9			Kemenag
Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	Jumlah Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	120,7			Kemenag
Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	Jumlah Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	3,5			Kemenag
Guru yang mengikuti Program PPG	Jumlah Guru yang mengikuti Program PPG	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	34,4			Kemenag
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00	15,3			Kemenag
Guru/Pengawas Madrasah penerima beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	44,2			Kemenag
Guru/Pengawas/Dosen PAI penerima Beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas/Dosen PAI yang menerima Beasiswa S2	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00	118,9			Kemenag
KKM/ KKG/ MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	Jumlah KKM/ KKG/ MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	0,00	120,00	130,00	140,00	150,00	306,3			Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	15,7			Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.38

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah dan RA</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA yang Mendapatkan Pengembangan Karir</i>	1.662,00	1.700,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	13,4			Kemendikbud
<i>Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah</i>	<i>Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.398,9			Kemendikbud
ProP : Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan							3.108,4			
<i>Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus</i>	<i>Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus</i>	17.797	18.000	18.000	18.000	18.000	1.629,3			Kemendikbud
<i>Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus</i>	<i>Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus</i>	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	238,6			Kemendikbud
<i>Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus</i>	<i>Jumlah Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus</i>	893	893	893	893	893	94,4			Kemendikbud
<i>Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus</i>	<i>Jumlah Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus</i>	630	630	630	630	630	79,8			Kemendikbud
<i>Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)</i>	<i>Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)</i>	800	800	850	900	950	148,3			Kemendikbud
<i>Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)</i>	<i>Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)</i>	500	500	550	600	650	74,7			Kemendikbud
<i>Penataan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas</i>	<i>Jumlah Penataan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas</i>	34	34	34	34	34	113,9			Kemendikbud
<i>Penataan Guru Dikdas</i>	<i>Jumlah Penataan Guru Dikdas</i>	34	34	34	34	34	52,6			Kemendikbud
<i>Penataan Guru Dikmen</i>	<i>Jumlah Penataan Guru Dikmen</i>	34	34	34	34	34	75,6			Kemendikbud
<i>Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen</i>	<i>Jumlah Daerah yang Melakukan Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen</i>	34	34	34	34	34	122,8			Kemendikbud
<i>Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus</i>	<i>Jumlah Guru Non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus</i>	4.514,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	427,7			Kemendikbud
<i>Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan</i>	<i>Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan</i>	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	2,2			Kemendikbud
<i>Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif</i>	<i>Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	48,4			Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.39

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B:	80,11	81,19	82,28	83,37	84,46	11.352,5			
	SD/MI	74,54	76,01	77,48	78,95	81,33				
	SMP/MTS	73,65	74,53	75,41	76,29	80,86				
	SMA/MA									
	Perguruan Tinggi Terakreditasi A	135,0	160,0	185,0	205,0	225,0				
Prop : Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi		64	66	68	71	73	7.308,1			
<i>Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi</i>	<i>Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang Diakreditasi</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1.185,1		<i>Kemendikbud</i>	
<i>Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional</i>	<i>Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional</i>	17.083	17.083	17.083	17.083	17.083	419,2		<i>Kemendikbud</i>	
<i>Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang Diakreditasi</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.525,1		<i>Kemendikbud</i>	
<i>Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	15.943	15.943	15.943	15.943	15.943	2.155,0		<i>Kemendikbud</i>	
<i>Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP</i>	214.312	214.312	214.312	214.312	214.312	959,2		<i>Kemendikbud</i>	
<i>SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)</i>	<i>Jumlah SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)</i>	10.795	10.795	10.795	10.795	10.795	146,0		<i>Kemendikbud</i>	
<i>Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)</i>	<i>Jumlah Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)</i>	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	820,4	<i>Pusat</i>	<i>Kemendikbud</i>	
<i>Madrasah dan RA yang Terakreditasi</i>	<i>Jumlah Madrasah dan RA yang Terakreditasi</i>	532,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	42,6		<i>Kemenag</i>	
<i>Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi</i>	<i>Jumlah Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi</i>	52,00	55,00	60,00	65,00	70,00	13,0		<i>Kemenag</i>	
<i>SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B</i>	<i>Jumlah SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	4,1		<i>Kemenag</i>	
<i>Prodi yang Terakreditasi Menjadi Minimal B</i>	<i>Jumlah Prodi yang Terakreditasi Menjadi Minimal B</i>	425	500	500	500	500	21,0		<i>Kemenag</i>	
<i>PTKI yang Terakreditasi</i>	<i>Jumlah PTKI yang Terakreditasi</i>	1	1	1	1	1	17,5		<i>Kemenag</i>	
Prop : Perluasan Budaya Mutu Pendidikan							4.044,4			
<i>Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	81,9		<i>Kemendikbud</i>	
<i>Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas</i>	<i>Jumlah Lembaga/Mitra PAUD yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas</i>	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	120,2		<i>Kemendikbud</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.40

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	350	350	350	350	350	97,1			Kemendikbud
Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	216.924	216.924	216.924	216.924	216.924	106,7			Kemendikbud
Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya Sekolah Berbasis Komunitas	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya Sekolah Berbasis Komunitas	216.974	216.974	216.974	216.974	216.974	651,5			Kemendikbud
Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	-	425	425	425	425	112,0			Kemendikbud
Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	Jumlah Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	514	514	514	514	514	59,4			Kemendikbud
Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	-	280	280	280	280	66,0			Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	514	514	514	514	514	83,6			Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	650	650	650	650	650	409,7			Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	380,6			Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871	198,0			Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	-	125	125	125	125	30,8			Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	200	200	200	200	200	85,9			Kemendikbud
Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	-	200	200	200	200	28,6			Kemendikbud
Program Studi Dibina Menjadi Prodi Unggul	Jumlah Program Studi Dibina yang Menjadi Prodi Unggul	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	51,6	Pusat		Kemendikbud
Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	Jumlah Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	360	400	400	400	400	780,4	Pusat		Kemendikbud
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	29,3			Kemenag
Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Jumlah Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	268,0			Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.41

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	4,1			Kemenag
<i>Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu</i>	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	5,2			Kemenag
<i>Siswa Madrasah yang Berdaya Saing</i>	<i>Jumlah Siswa Madrasah dan RA yang Berdaya Saing</i>	1.535,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	61,8			Kemenag
<i>Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia</i>	<i>Jumlah Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia</i>	5	11	14	14	14	303,7	Pusat		Kemendikbud
<i>Perguruan Tinggi Menerapkan SNDIKTI</i>	<i>Jumlah Perguruan Tinggi yang Menerapkan SNDIKTI</i>	900	1.000	1.000	1.000	1.000	28,3	Pusat		Kemendikbud
KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan							19.702,8			
Prop : Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan							2.841,5			
<i>Provinsi/ Kab/ Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya</i>	<i>Jumlah Provinsi/ Kab/ Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya</i>	34	34	34	34	34	119,2			Kemendikbud
<i>Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan</i>	-	34	34	34	34	71,8			Kemendikbud
<i>Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD</i>	<i>Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD</i>	35	35	35	35	35	44,3			Kemendikbud
<i>Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan</i>	192	192	192	192	192	43,4			Kemendikbud
<i>Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan</i>	<i>Jumlah Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan</i>	8	8	8	8	8	78,6			Kemendikbud
<i>Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam</i>	<i>Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam</i>	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	131,2			Kemenag
<i>Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)</i>	<i>Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)</i>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2.351,0			Kemenag
<i>Peningkatan kapasitas kelembagaan UKS/M di daerah</i>	<i>Jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M</i>	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2,0	Pusat		Kemendagri
Prop : Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan							16.709,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.42

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Perencanaan	Jumlah Layanan Perencanaan	1	1	1	1	1	124,5		Kemendikbud	
PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN	Jumlah PTA Katolik Negeri yang Menerima BOPTN	364	364	364	364	364	3,4	Pusat	Kemenag	
PTA Penerima BOPTN	Jumlah PTA yang Menerima BOPTN	15.378	15.378	15.378	15.378	15.378	143,8	Pusat	Kemenag	
PTKIN Penerima BOPTN	Jumlah PTKIN Penerima BOPTN	58	58	58	58	58	5.315,0	Pusat	Kemenag	
Buku Pustaka (BOPTN)	Jumlah Buku yang diseragkan kepada PTN sebagai bantuan dari BOPTN	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137	239,4	34 Propinsi	Kemendikbud	
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	Jumlah Laporan Kegiatan Mahasiswa PTN dengan bantuan dari BOPTN yang Dilaporkan	745	745	745	745	745	889,9	34 Propinsi	Kemendikbud	
Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Jumlah Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM yang Dikembangkan dengan bantuan dari BOPTN	192	192	192	192	192	372,1	34 Propinsi	Kemendikbud	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	Jumlah PTN yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran melalui BOPTN	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	854,8	34 Propinsi	Kemendikbud	
Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	Jumlah Bulan Rumah Sakit Pendidikan yang mendapat layanan bantuan operasional dari BOPTN	12	12	12	12	12	400,0	34 Propinsi	Kemendikbud	
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH)	Jumlah PTN BH yang Mendapat Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH)	11	11	11	11	11	8.366,5	Pusat	Kemendikbud	
ProP : Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan							151,8			
Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah SKPD yang Menyediakan Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	548	548	548	548	548	119,5		Kemendikbud	
Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32,3		Kemenag	
PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	971,8			
	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun				
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,27794284	91,27896233	91,33469578	91,38627023				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun				
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67				
KP : Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak						453,1			
Prop : Penjaminan pemenuhan hak anak secara universalnya	a. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	10,19	9,8	9,44	9,08	8,74	260,1			
	b. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	3,64	3,59	3,55	3,51	3,47				
	c. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64	65,79	67,6	69,44	71,34				
	d. Jumlah Provinsi/ Kab/ Kota yang memperoleh peringkat KLA	247	270	290	315	335				
<i>Peningkatan kapasitas dan peran forum anak</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak</i>	34	17	17	17	17	9,0	548 Provinsi/ Kab/ Kota		Kemen PPPA
<i>peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak</i>	34	17	17	17	17	8,0	34 Kab/ Kota		Kemen PPPA
<i>peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelatihan pengasuhan berbasis hak anak</i>	10	9	9	9	9	6,0	13 Prov/ Kab/ Kota		Kemen PPPA
	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)</i>	24	20	20	20	20	6,7	19 Kab/ Kota		Kemen PPPA
	<i>Jumlah kab/ kota yang difasilitasi dalam pengembangan daycare</i>	5	10	25	25	25	18,0	40 Provinsi/ Kab/ Kota		Kemen PPPA
<i>pengecahan perkawinan anak</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak</i>	20	20	20	20	20	8,0	100 Provinsi/ Kab/ Kota		Kemen PPPA
<i>pengembangan lingkungan ramah anak</i>	<i>jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak</i>	10	10	10	10	12	8,2	11 Kab/ Kota		Kemen PPPA
<i>promosi pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan</i>	10	10	10	10	10	8,3	28 Kab/ Kota		Kemen PPPA
	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan</i>	10	4	5	5	6	4,7	13 Kab/ Kota		Kemen PPPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.44

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan sekolah ramah anak</i>	5	2	2	2	2	5,6	10 Kab/Kota		Kemen PPPA
<i>fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pembangunan fasilitas kreativitas dan budaya anak</i>	5	2	2	2	2	7,6	10 Kab/Kota		Kemen PPPA
<i>Penguatan kelembagaan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)</i>	<i>Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penerapan Kebijakan KLA</i>	0	34	34	34	34	15,0	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>Koordinasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)</i>	<i>Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/ Kota Layak anak (KLA)</i>	34	22	24	28	34	4,0	Pusat		Kemendagri
<i>Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA sesuai standar</i>	<i>Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal</i>	60	70	80	90	100	86,5	Daerah		KemenKumham
<i>Pemenuhan Hak Pendidikan klien Anak di Luar Lembaga</i>	<i>Persentase klien pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan di luar lembaga</i>	20	25	30	35	40	64,5	Daerah		KemenKumham
Prop : Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya							193,0			
	a. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	6,03	5,53	5,02	4,51	4,00				
	b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	100	100	100	100	100				
	c. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	74,46	76,13	77,77	79,39	81				
<i>Pelaksanaannya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)</i>	<i>Terlaksananya SNPHAR 2022</i>	-	1	-	-	1	0,0	Pusat		Kemen PPPA
<i>Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kampanye perlindungan anak dari kekerasan</i>	<i>jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kampanye perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi</i>	2	2	3	3	3	5,5	13 provinsi		Kemen PPPA
<i>Lembaga Layanan yang dilatih manajemen kasus dan pelayanan terpadu</i>	<i>Jumlah provinsi yang lembaga Layanannya mendapatkan pelatihan manajemen kasus dan pelayanan terpadu</i>	-	8	8	9	9	5,0	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>penyediaan hotline bagi korban (TeSA)</i>	<i>jumlah layanan pengaduan melalui hotline bagi anak yang memertukan perlindungan khusus.</i>	-	1	1	1	1	7,0	Pusat		Kemen PPPA
<i>SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi</i>	<i>Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi</i>	0	416	456	496	536	4,0	34 Provinsi		Kemen PPPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.45

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>koordinasi penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak</i>	<i>Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan dan eksploitasi pada anak</i>	0	12	14	14	16	3,7	56 provinsi/kab/kota		Kemen PPPA
<i>Aktifis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online</i>	<i>Jumlah Aktifis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak</i>	-	1584	1742	1916	2108	5,0	514 Kab/Kota		Kemen PPPA
<i>Fasilitasi Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan</i>	<i>Jumlah Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan</i>	-	3	6	6	3	6,0	Kota Malang, Kab. Bintan, Kota Kupang, Kota Samarinda, Kab. Deli Serdang, Kota Palu, Kota Banda Aceh, kab. Solok, Kab. Gorontalo		Kemen PPPA
<i>Fasilitasi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi</i>	<i>Jumlah Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi</i>	-	2	4	4	2	4,5	Kab. Berau, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Tobasa, Kab. Magelang, Kab. Bogor		Kemen PPPA
<i>SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan</i>	<i>Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan</i>	-	225	250	275	300	4,0	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi</i>	<i>Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi</i>	9	0	0	0	0	3,5	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi</i>	<i>Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) daerah dengan kasus pornografi yang tinggi</i>	600	670	680	690	700	3,0	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>Fasilitasi Desa Bebas Pornografi</i>	<i>Jumlah Desa Bebas Pornografi</i>	-	7	7	8	8	5,2	30 Desa/Kelurahan		Kemen PPPA
<i>Penyedia Layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan</i>	<i>Jumlah provinsi yang lembaga layanannya sudah mendapat pelatihan dukungan psikososial</i>	-	8	8	9	9	6,3	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>Pelaksanaan koordinasi lintas K/L dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja</i>	<i>Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja</i>	-	8	8	8	8	3,8	Pusat		Kemen PPPA
<i>Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)</i>	2	30	34	40	50	78,0	208 Kab/Kota		Kemen PPPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.46

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak</i>	<i>Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perumusan kebijakan dan penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak</i>	7	7	7	7	6	10,0	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>advokasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan ABH</i>	<i>Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi tentang penanganan kasus berbasis pemenuhan hak anak</i>	-	200	200	200	200	2,8	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme</i>	<i>Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme</i>	4	4	4	4	4	5,0	20Provinsi		Kemen PPPA
<i>Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)</i>	<i>Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)</i>	200	100	100	100	100	2,2	34 Provinsi		Kemen PPPA
<i>Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus</i>	<i>Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus</i>	2	3	3	3	3	2,8	14 provinsi		Kemen PPPA
<i>Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA</i>	<i>Jumlah Wilayah yang Mendapat Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA</i>	19	-	-	-	-	2,0	provinsi		KemenKumham
<i>Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instanse Teknis Lainnya</i>	<i>Jumlah APH yang Mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA</i>	270	-	-	-	-	2,7	Pusat dan Daerah		KemenKumham
<i>Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung</i>	<i>Jumlah Peserta Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung</i>	160	-	-	-	-	2,1	Pusat dan Daerah		MA
<i>Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan</i>	<i>Jumlah Angkatan Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan</i>	8	-	-	-	-	3,0	Pusat dan Daerah		Kejagung
<i>Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak</i>	<i>Persentase anak yang mengikuti pendidikan dan pengentasan anak</i>	60	70	80	90	100	0,0	Pusat		KemenKumham
<i>Pekerja sektor anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja</i>	<i>Jumlah Pekerja sektor anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja</i>	9000	9.500	10.000	-	-	16,0	Pusat		KemenNaker
KP : Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan							254,8			
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG							61,7			
<i>Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di KL</i>	<i>Jumlah K/L bidang polhukam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya</i>	5	10	10	10	10	6,6	Pusat		Kemen PPPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.47

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang polhukam	4	4	4	4	4	5,0	Provinsi		Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di KL	Jumlah K/L bidang infrastruktur dan lingkungan yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	2	10	10	10	10	6,7	Pusat		Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang infrastruktur dan lingkungan	9	9	9	9	9	11,9	Provinsi		Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di KL	Jumlah K/L bidang bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5	8	11	11	11	5,5	Pusat		Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga	5	7	9	9	9	7,0	Provinsi		Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di KL	Jumlah K/L bidang ekonomi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	8	11	11	11	11	8,4	Pusat		Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang ekonomi	4	8	8	8	8	6,1	Provinsi		Kemen PPPA
Fasilitasi integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	-	22	24	28	34	4,6	Pusat		Kemendagri
ProP : Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang							193,1			
peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari TPPO	Jumlah K/L yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas TPPO	21	21	21	21	21	17,9	Pusat		Kemen PPPA
KIE Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui berbagai media	1	1	1	1	1	9,4	Pusat		Kemen PPPA
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan korban TPPO	Jumlah perempuan Korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan	100	100	100	100	100	8,3	Pusat		Kemen PPPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.48

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)</i>	<i>Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)</i>	-	20	22	26	32	4,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)</i>	<i>Terlaksananya SPHPN</i>	-	1	-	-	1	0,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari KDRT</i>	<i>Jumlah KL dan Provinsi yang difasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari KDRT</i>	10	10	10	10	10	24,9	<i>Pusat dan Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT</i>	<i>Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT</i>	10	10	10	10	10	5,5	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
	<i>Jumlah SDM pada lembaga penyedia layanan bagi korban (UPTD dan P2TP2A) yang dilatih tentang penanganan korban dan pendataan</i>	-	170	170	170	170	57,8	<i>Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>KIE Pencegahan dan Penanganan KDRT melalui berbagai media</i>	<i>Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan KDRT melalui berbagai media</i>	-	1	1	1	1	7,7	<i>Pusat</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus</i>	<i>Jumlah K/L dan provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus</i>	15	15	15	15	15	10,7	<i>Pusat dan provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus</i>	<i>Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan dan pemberdayaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus</i>	180	180	180	180	180	7,1	<i>Pusat</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Penyusunan pedoman perempuan tangguh bencana</i>	<i>Jumlah pedoman perempuan tangguh bencana</i>	1	-	-	-	-	0,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media</i>	<i>Jumlah dokumen KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media</i>	-	1	1	1	1	7,7	<i>Pusat</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan</i>	<i>Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan</i>	11	11	11	11	11	11,3	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan</i>	<i>Jumlah perempuan yang mendapat layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan</i>	200	200	200	200	200	5,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi penguatan kelompok BK-PMI</i>	<i>Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelompok BK-PMI</i>	15	8	8	8	6	5,6	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.49

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui berbagai media</i>	<i>Jumlah dokumen KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui Berbagai Media</i>	-	1	1	1	1	7,7	Pusat		Kemen PPPA
<i>Monitoring dan Evaluasi SPPT PKKTP</i>	<i>Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi SPPT PKKTP</i>	1	-	-	-	-	2,0	Pusat		Komnas Perempuan
KP : Kualitas Pemuda							263,9			
Prop : Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan							44,6			
<i>Penyusunan dan pemanfaatan naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan</i>	<i>Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan</i>	1	1	1	1	1	0,4	Pusat		Kemenpora
<i>Koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri</i>	<i>Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri</i>	6	6	6	6	6	41,0	Pusat		Kemenpora
<i>Koordinasi penerapan RAD penyelenggaraan pelayanan kepemudaan</i>	<i>Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan</i>	-	18	24	30	34	3,2	Pusat		Kemendagri
Prop : Pencegahan Perilaku Beresiko							56,4			
<i>Fasilitasi pemuda kader dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba</i>	<i>Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	28,2	Pusat		Kemenpora
<i>Fasilitasi pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia</i>	<i>Jumlah keikutsertaan dalam Jambore Pemuda Indonesia</i>	34	34	34	34	34	28,2	Daerah		Kemenpora
Prop : Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda							162,9			
<i>Fasilitasi pemuda sebagai kader kewirausahaan</i>	<i>Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24,0	Pusat		Kemenpora
<i>Fasilitasi sentra kewirausahaan pemuda</i>	<i>Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi</i>	34	34	34	34	34	20,0	Pusat		Kemenpora
<i>Fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan</i>	<i>Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarnas/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi</i>	17	17	17	17	17	50,7	Pusat		Kemenpora
<i>Fasilitasi pemuda kader dalam pengembangan kepemimpinan pemuda</i>	<i>Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	8,5	Pusat		Kemenpora



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.50

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Fasilitasi pemuda kader dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda</i>	<i>Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	16,9	Pusat		Kemempora
<i>Fasilitasi pengelola organisasi kepemudaan dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan</i>	<i>Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan</i>	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	42,8	Pusat		Kemempora
PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40	12.759,1			
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50				
	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000				
	Bidang tanah yang didistribusikan	750.000				7.750.000				
	Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087				
KP : Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK)						2.285,9			
ProP : Fasilitasi Modal Usaha							2.285,9			
<i>Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan</i>	<i>Penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan kelompok usaha</i>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	648,9	34 Provinsi		Kemensos
<i>Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan</i>	<i>Penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan kelompok usaha</i>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	644,3	34 Provinsi		Kemensos
<i>Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan</i>	<i>Penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan kelompok usaha</i>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	661,4	34 Provinsi		Kemensos
<i>Usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan ultra mikro (Umi)</i>	<i>Jumlah Kelompok yang Memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro</i>	1.641.000	2.800.000	3.500.000	4.200.000	4.900.000	296,3	34 Provinsi		Kemenkeu
<i>Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)</i>	<i>Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana (PIP)</i>	334	334	334	334	334	35,0	34 Provinsi		Kemenkeu
<i>Bantuan Ekonomi Keluarga Sakinah</i>	<i>Jumlah keluarga yang Memperoleh Pelatihan Keluarga Sakinah</i>						0,0	34 Provinsi		Kemenag
<i>Bantuan Ekonomi Produktif melalui Zakat dan Wakaf</i>	<i>Jumlah keluarga yang Memperoleh Zakat dan Wakaf Produktif</i>						0,0	34 Provinsi		Kemenag
KP : Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha	11500	11600	11700	11800	11900	701,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.51

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya	8.687.613	8.687.613	8.687.613	8.687.613	8.687.613				
	Pengembangan kewirausahaan sosial	535	535	535	535	535				
	ProP : Fasilitasi keberantaraan usaha produktif						218,5			
	<i>Desa yang Memperoleh Keberantaraan Usaha</i>	<i>30 Desa</i>	<i>30 Desa</i>	<i>30 Desa</i>	<i>30 Desa</i>	<i>30 Desa</i>	<i>50,0</i>		<i>Kemendes, PDT & TRANS</i>	
	<i>Desa yang Memperoleh Keberantaraan Usaha</i>	<i>500 Desa</i>	<i>500 Desa</i>	<i>500 Desa</i>	<i>500 Desa</i>	<i>500 Desa</i>	<i>168,5</i>		<i>Kemendes, PDT & TRANS</i>	
	ProP : Penguatan pemberdayaan berdampak sosial						26,2			
	<i>Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>26,2</i>	<i>34 Provinsi</i>	<i>Kemensos</i>	
	ProP : Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan						457,0			
	Jumlah KTH Mandiri	100	200	300	400	500				
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS	10	180	210	250	300				
	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi)	5000	6000	6500	7000	7500				
	<i>Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>120,8</i>		<i>Kemen LHK</i>	
	<i>Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>6,2</i>		<i>Kemen LHK</i>	
	<i>Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>210</i>	<i>250</i>	<i>56,9</i>	<i>34 provinsi</i>	<i>Kemen LHK</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.52

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat</i>	<i>Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi).</i>	5000	6000	6500	7000	7500	273,0			Kemen LHK
KP : Reforma Agraria	Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agraria	1.502.135	1.766.315	1.766.315	1.766.315	1.766.315	7.573,2			
	Jumlah kelompok masyarakat penerima tanah objek reforma agraria (TORA) yang memperoleh pemberdayaan	176	492	492	492	492				
Prop : Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)							1.682,1			
<i>Terlaksananya inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan</i>	<i>Jumlah bidang tanah yang diinventarisasi</i>	1.161.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	650,3	34 Provinsi		Kemen ATR/BPN
<i>Terlaksananya Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar</i>	<i>Jumlah bidang tanah terlantar yang ditertibkan</i>	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	52,2	34 Provinsi		Kemen ATR/BPN
<i>Teridentifikasinya data HGU habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian</i>	<i>Jumlah bidang tanah hasil pengendalian HGU Habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	50,6	34 Provinsi		Kemen ATR/BPN
<i>Terlaksananya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA</i>	<i>Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA</i>	130.000,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0	929,0	Pusat		Kemen LHK
Prop : Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora							2.911,4			
<i>Terlaksananya redistribusi tanah</i>	<i>Luas bidang tanah yang didistribusi</i>	602.135	866.315	866.315	866.315	866.315	2.911,4	34 Provinsi		Kemen ATR/BPN
<i>Terlaksananya legalisasi tanah (sertipikat hak atas tanah)</i>	<i>Luas cakupan bidang tanah yang dilegalisasi</i>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0,0	34 Provinsi		Kemen ATR/BPN
Prop : Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA							2.979,7			
<i>Terlaksananya operasional Gugus Tugas Reforma Agraria</i>	<i>Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria</i>	72	536	536	536	536	2.772,4	33 Provinsi		Kemen ATR/BPN
<i>Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat penerima TORA</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pemberdayaan</i>	176	492	492	492	492	207,3	34 Provinsi		Kemen ATR/BPN
KP : Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (HA)	500.000,0	1.000.000	1.250.000	750	500,0	2.198,3			
Prop : Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (Ha)	500.000	1.000.000	1.250.000	750	500	2.198,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.53

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat</i>	<i>Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan</i>	500.000,0	1.000.000	1.250.000	750.000	500.000,0	648,4			Kemen LHK
<i>Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat</i>	<i>Jumlah Kelompok pengelola kawasan hutan yang meningkat kinerjanya</i>	2.077	3.150	3.600	3.300	3.250	1.388,6			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kominfo
<i>Kemitraan investasi/usaha</i>	<i>Jumlah mitra usaha perhutanan sosial (mitra)</i>	125	150	175	200	225	46,4			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kominfo
<i>Industri nilai tambah produk</i>	<i>jumlah sentra pengelolaan produk unggulan (sentra industri kecil)</i>	14	14	14	14	14	52,5	Pusat		Kemen LHK
<i>Pemasaran/Promosi produk perhutanan sosial</i>	<i>Jumlah fasilitas pemasaran produk perhutanan sosial (kelompok usaha)</i>	50	50	50	50	50	62,5			Kemen LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.54

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	135.227,1			
	Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University									
	a. Top 200	0	0	0	0	1				
	b. Top 300	1	1	1	1	2				
	c. Top 500	2	2	2	2	3				
	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0				
KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	1.890.345	1.890.345	1.890.345	1.890.345	1.890.345	97.283,9			
	PT Vokasi berakreditasi A	8	10	12	14	16				
	Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi (orang)	1.829.664	1.913.804	1.997.944	2.082.084	2.166.224				
	Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi (orang)	60.681,0	64.224,0	67.767,0	71.310,0	74.853,0				
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (orang) (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	2 juta	2,2 juta	2,4 juta	2,6 juta	2,8 juta				
	Jumlah pemagangan dalam negeri (orang)	1.824.466 (SMK)	1.908.367 (SMK)	1.992.268 (SMK)	2.076.169 (SMK)	2.160.070 (SMK)				
	Jumlah pemagangan luar negeri (orang)	5.198 (SMK)	5.437 (SMK)	5.676 (SMK)	5.915 (SMK)	6.154 (SMK)				
PropP : Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						2.036,7				
Analisis Pasar Kerja pada Sektor Prioritas	Jumlah dokumen analisis pasar kerja pada sektor prioritas	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	35,4	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Layanan Informasi Pasar Kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, badan job portal swasta	Jumlah informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, dan badan job portal swasta	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	55,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	872,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri	1.822	3.000	5.000	7.500	8.000	248,7	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Migas	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Migas	5.245	6.294	7.552	9.063	10.876	134,5			Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.55

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Geominerba	5.103	6.123	7.348	8.817	10.581	107,1			Kemen ESDM
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor KEBTKE	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri KEBTKE	1.722	2.066	2.479	2.975	357	26,1			Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Migas	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Migas	300	360	432	518	622	22,6			Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Geominerba	120	144	173	207	249	15,4			Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor KEBTKE	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor KEBTKE	160	192	230	276	332	9,9			Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor BDTBT	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor BDTBT	154	185	222	266	319	16,1			Kemen ESDM
Politeknik Bidang Energi dan Mineral	Jumlah Mahasiswa Politeknik Bidang Akamigas	998	1.058	1.118	1.178	1.178	136,0	Cepu		Kemen ESDM
Politeknik Bidang Energi dan Pertambangan	Jumlah Mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan	262	532	720	840	900	106,4	Bandung, Prabumulih, Bali		Kemen ESDM
Koordinasi Kebijakan Kartu Pra-Kerja	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan implementasi program Kartu Pra-Kerja	1	1	1	1	1	250,0	Pusat		Kemenko Perekonomian
	Terselenggaranya Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja dalam Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	1	1	1	1	1	0,0			
ProP : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							81.638,8			
Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	-	15	15	16	16	31,6	Pusat dan daerah	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemendikbud
Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	-	15	15	16	16	638,4	Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	DAK/Pemda
Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkat	Jumlah Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkat	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	360,7	Pusat		Kemendikbud
Sekolah yang Sarana dan Prasarannya Meningkat	Jumlah Sekolah yang Sarana dan Prasarannya Meningkat	400	400	400	400	400	406,6	Pusat		Kemendikbud
Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkat	Jumlah Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkat	200	200	200	200	200	219,3	Pusat		Kemendikbud
Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkat	Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkat	500	500	500	500	500	643,6	Pusat		Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.56

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkatkan</i>	<i>Jumlah Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkatkan</i>	140	140	140	140	140	65,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan</i>	<i>Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan</i>	200	200	200	200	200	100,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik</i>	<i>Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik</i>	300	300	300	300	300	150,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa</i>	<i>Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa</i>	600	600	600	600	600	150,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK</i>	<i>Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK</i>	400	500	600	700	800	29.283,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan</i>	<i>Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan</i>	315	315	315	315	315	1.575,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory</i>	<i>Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory</i>	200	200	200	200	200	200,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK</i>	<i>Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi</i>	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	156,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK</i>	<i>Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang Didirikan</i>	15	15	15	15	15	477,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)</i>	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	679,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)</i>	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	843,1	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan</i>	100	100	100	100	100	25,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Pengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan</i>	40	40	40	40	40	10,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Fasilitasi Uji Kompetensi</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Terwujudnya Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)</i>	<i>Jumlah Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)</i>	50	55	55	55	55	53,3			<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.57

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan dan Penyelarasan Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/ Industri	Jumlah Pemetaan dan Penyelarasan Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/ Industri	33	33	33	33	33	101,8			Kemendikbud
Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/ karakter Kerja	Jumlah Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/ karakter Kerja	33	33	33	33	33	58,3			Kemendikbud
Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri	Jumlah Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri	60	60	60	60	60	121,1			Kemendikbud
Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	86,9			Kemendikbud
Penyelenggaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi	Jumlah Penyelenggaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi	50	50	50	50	50	17,8			Kemendikbud
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan vokasi di Politeknik Pertanian	5.478	6.494	6.809	7.124	7.124	1.043,2			Kementan
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Jumlah S2 dan S3 yang difasilitasi tugas belajar	350	350	350	350	350	143,2			Kementan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Kependidikan, serta Peserta Didik Pendidikan Vokasi Pertanian	Jumlah tenaga pendidik, kependidikan serta peserta didik yang ditingkatkan kompetensinya	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	90,6			Kementan
Pendampingan Program Prioritas Pembangunan Pertanian serta Fasilitasi Pengabdian Masyarakat di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Jumlah pendamping program prioritas pembangunan pertanian	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	396,5			Kementan
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Jumlah wirausahawan muda pertanian dalam rangka regenerasi petani	1.513	1.600	1.700	1.800	1.800	346,0			Kementan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Jumlah peserta pembelajaran pada SMK PP	22.427	22.500	22.600	22.700	22.700	114,9			Kementan
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan (satker)	12	12	12	12	12	1.418,4			Kementan
Pemagangan bagi Mahasiswa dan Alumni Politeknik Pembangunan Pertanian	Jumlah peserta magang	250	300	400	500	500	39,0			Kementan
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian	Jumlah peserta pelatihan vokasi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	607,1			Kementan
Penumbuhan Petani Milenial	Jumlah peserta pelatihan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50,0			Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.58

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (Orang)</i>	<i>Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Berkompeten (orang)</i>	8.239	9.173	10.633	12.286	13.115	1.155,8	19 UPT		KKP
<i>Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan</i>	21	22	22	22	22	711,3	19 UPT		KKP
<i>Pengabdian Pendidikan Tinggi KP</i>	<i>Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP</i>	17	17	17	17	17	34,4	14 UPT		KKP
<i>Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya</i>	<i>Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya</i>	433	423	423	424	424	3.358,6	Pusat	<i>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</i>	<i>Kemenaker</i>
<i>Pengembangan BLK Komunitas</i>	<i>Jumlah BLK Komunitas yang dikembangkan</i>	2.000	500	500	500	500	4.000,0	Pusat	<i>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</i>	<i>Kemenaker</i>
<i>Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi</i>	228.820	225.000	250.000	260.000	275.000	9.559,4	34 Provinsi	<i>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</i>	<i>Kemenaker</i>
<i>Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia</i>	<i>Jumlah tenaga teknis menengah kehutanan</i>	472	473	473	473	473	628,0	<i>SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.</i>		<i>Kemen LHK</i>
<i>Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha</i>	<i>Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha</i>	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	273,0	Pusat		<i>Kemen LHK</i>
<i>Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi dan Sertifikasi</i>	<i>Dokumen Standardisasi Produk Iptek Nuklir</i>	6	7	7	7	7	3,5	Pusat		BATAN
<i>Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi dan Sertifikasi</i>	<i>Akreditasi dan Sertifikasi Iptek Nuklir</i>	2	7	7	7	7	3,2	Pusat		BATAN
<i>Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (retooling dosen dan sertifikasi mahasiswa, penguatan kelembagaan, dan penguatan prodi)</i>	<i>Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi</i>	43	43	43	43	43	1.753,2	Pusat	<i>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</i>	<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan Daya Tampung Politeknik Eksisting</i>	<i>Jumlah Politeknik yang Ditingkatkan Daya Tampungnya</i>	10	43	43	43	43	2.400,0	Pusat	<i>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</i>	<i>Kemendikbud</i>
<i>Penambahan Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU</i>	<i>Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU yang Ditambah</i>	43	43	43	43	43	495,0	Pusat		<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.59

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis SKKNI	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	472	473	473	473	473	612,9	SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.		Kemen LHK
Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	Jumlah Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	2	2	2	2	2	4,6	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemendikbud
Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill	100	200	250	300	350	40,8			Kemenag
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri	Renovasi Gedung Pendidikan Non-Formal	0	2	2	2	1	79,0			Kemenperin
Pengadaan Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	0	2	2	2	1	59,3			Kemenperin
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Menengah Industri	Renovasi Gedung Pendidikan Menengah	0	2	2	2	3	138,3			Kemenperin
Pengadaan Peralatan Pendidikan Menengah Industri	Peralatan Pendidikan Menengah Industri	0	2	2	2	3	138,3			Kemenperin
Pilot Project Learning Factory 4.0	Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi	25	32	38	44	50	156,4			Kemenperin
Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Industri melalui Renovasi gedung pendidikan satuan kerja	Renovasi Gedung Pendidikan Tinggi Industri	0	3	3	3	3	177,8			Kemenperin
Pengadaan Peralatan Pendidikan Tinggi Industri	Peralatan Pendidikan Tinggi Industri	0	2	2	2	3	138,3			Kemenperin
Pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan Industri 4.0	Pilot Project Learning Factory 4.0	0	1	1	1	1	313,5		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenperin
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah lulusanDiklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	5.428	5.289	5.369	5.463	5.660	1.170,8	(Sumssel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)		Kemenhub
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat (orang)	4.652	7.746	9.393	9.673	9.574	655,1	(Sumssel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)		Kemenhub
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	6	6	6	6	6	399,5	(Sumssel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)		Kemenhub
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	16.038	16.983	17.416	17.981	18.822	2.710,7	(Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat)		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.60

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut (orang)	168.637	171.523	173.228	173.570	179.545	2.248,1	(Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat)		Kemenuh
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	-	12	12	12	12	431,0	(Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat)		Kemenuh
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	4.873	5.434	5.674	5.626	5.883	1.164,8	(Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua)		Kemenuh
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara (orang)	7.145	7.169	7.906	8.017	8.303	1.672,5	(Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua)		Kementerian Perhubungan
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	-	8	8	8	8	215,5	(Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua)		Kemenuh
Layanan Pendidikan Vokasi Kemetropolitan	Jumlah lulusan Akademi Metrologi	165	165	215	265	315	38,2			Kemendag
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	2.350	2.350	2.550	2.750	2.800	229,0			Kememparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450	182,6			Kememparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan	Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan	1.411	1.411	1.611	1.811	2.011	156,8			Kememparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar	2.492	2.492	2.692	2.892	3.092	163,8			Kememparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang	1.200	1.300	1.400	1.600	1.700	162,6			Kememparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok	1.400	1.400	1.500	1.700	1.800	129,2			Kememparekraf
Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Jumlah Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang tersedia	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	97,5			Kememparekraf
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Luas Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	5.000	5.000	0	0	0	327,1			Kememparekraf
Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	2.033	2.033	2.500	2.500	2.500	160,2			Kememparekraf
Pembangunan Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah Pembangunan Politeknik Pariwisata Palembang	14.159	0	0	0	0	500,1			Kememparekraf
Peningkatan Sarana dan prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Medan	Jumlah Peningkatan Sarana dan prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Medan	1.220	1.220	1.420	1.420	1.420	110,3			Kememparekraf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.61

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok	Luas Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok	14.948	0	0	0	0	525,9		Kemendiknas	
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Lombok	Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Lombok yang tersedia	439	500	700	900	1.000	199,8		Kemendiknas	
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Palembang yang tersedia	500	500	700	900	1.000	177,3		Kemendiknas	
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Politeknik Negeri Pariwisata Medan	Luas Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Politeknik Negeri Pariwisata Medan	11.872	0	0	0	0	218,4		Kemendiknas	
Sarana dan Prasarana Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik Pariwisata Makassar yang tersedia	932	932	1.000	1.100	1.200	33,6		Kemendiknas	
Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata	Luas Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	26.712	0	0	0	0	213,8		Kemendiknas	
Lanjutan Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata Makassar	Luas Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata Makassar	10.656	0	0	0	0	186,7		Kemendiknas	
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Jumlah Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	1	0	0	0	0	2,0		Kemendiknas	
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sorong	Jumlah dokumen Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sorong	1	0	0	0	0	2,0		Kemendiknas	
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi baru	Jumlah dokumen Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi baru	0	1	0	0	0	2,0		Kemendiknas	
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sulawesi Utara	Jumlah dokumen Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sulawesi Utara	0	2	0	0	0	14,0		Kemendiknas	
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sorong	Jumlah dokumen Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sorong	0	2	0	0	0	14,0		Kemendiknas	
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Destinasi baru	Jumlah dokumen Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Destinasi baru	0	0	2	0	0	14,0		Kemendiknas	
Pembangunan PTNP Sulawesi Utara	Jumlah PTNP Destinasi Baru yang dibangun	0	0	1	1	1	106,0		Kemendiknas	
Pembangunan PTNP Sorong	Jumlah PTNP Destinasi Baru yang dibangun	0	0	1	1	1	36,0		Kemendiknas	
Pembangunan PTNP Destinasi Baru	Jumlah PTNP Destinasi Baru yang dibangun	0	0	0	1	1	6,0		Kemendiknas	
Prop : Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi							5.099,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.62

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	743	743	743	743	743	91,3			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	105,2			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	556	556	556	556	556	94,6			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	157,0			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	145,8			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	106,5			Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432	125,1			Kemendikbud
Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	0	2.000	2.000	2.000	2.000	265,8			Kemendikbud
Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri		200	200	200	200	32,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemendikbud
Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		500	500	500	500	104,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemendikbud
Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi		500	500	500	500	52,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemendikbud
Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	2.580,0	Pusat		Kemendikbud
Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)	Jumlah Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)	240	500	500	500	500	328,0	Pusat		Kemendikbud
Instruktur pemerintah dan swasta baru	Jumlah instruktur pemerintah dan swasta baru yang dilatih	2.160	240	160	160	160	168,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.63

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	7.693	8.890	9.620	10.350	11.080	743,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
ProP : Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							3.633,5			
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	300	1000	1250	1500	1750	2.802,4			Kemendikbud
Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan/Skill Development Fund	Pengembangan pola pendanaan pelatihan	1	1	1	1	1	28,7	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang ditingkatkan kualitas mutu lembaga	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	378,3	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Pusat Pengembangan Keahlian/ Skill Development Center	Jumlah pusat pengembangan keahlian	20	22	24	25	25	303,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
SKKNI dan KKNi berbasis okupasi dan KKNi yang disusun	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	20	20	20	20	20	31,7			Kemenperin
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	20	20	20	20	20	9,9			Kemenperin
Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project Learning Factory 4.0	9	12	17	22	27	76,9		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenperin
Penetapan dan implementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	Jumlah daerah yang diimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	6	7	7	7	7	1,8	Pusat		Kemendagri
ProP : Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi							4.875,6			
Siswa SMK yang Tersertifikasi	Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	128.000	130.000	135.000	140.000	145.000	346,1			Kemendikbud
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Jumlah yang tersertifikasi	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	454,0			Kementan
Tenaga kerja yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	382.083	400.000	400.000	400.000	425.000	2.069,8		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNi	Jumlah skema sertifikasi kualifikasi KKNi	50	50	50	50	50	15,4		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenaker
Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan	Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri	32.000	39.000	42.000	44.000	46.000	840,9		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenperin
Registrasi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000	194,3			Kemenkes
Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	75,7	TUK Samarinda, TUK Makassar, TUK Kadipaten, TUK, Pekanbaru, TUK, Bogor, Jakarta		Kemen LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.64

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	375	410	450	500	550	9,2	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemendikbud
Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan	Tenaga kerja industri terampil yang kompeten	7.000	2.100	2.200	2.400	2.600	189,8		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenperin
Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten	13.000	2.600	2.800	2.900	3.000	411,4		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenperin
Mahasiswa dan Lulusan Program D1 Berbasis Kompetensi dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis	Tenaga kerja industri lulusan D1 industri yang kompeten	500	800	900	1.000	1.100	95,8		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenperin
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	16.219	19.463	23.356	28.027	33.632	51,3			Kemen ESDM
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	2.888	3.466	4.159	4.991	5.989	33,6			Kemen ESDM
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	3.768	4.522	5.426	6.511	7.813	38,8			Kemen ESDM
Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja industri	Tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	49,5		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kemenperin
KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	64,7	65,2	65,7	66,2	66,7	11.381,9			
	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	14300	15730	17303	19033	20937				
	Jumlah sitasi di jurnal internasional	5760	6336	6969	7666	8433				
	Jumlah KI yang didaftarkan	3751	4502	5402	6482	7779				
Prop : Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan							190,1			
Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT	115	120	130	135	150	190,1			Kemen Ristek/BRIN
Prop : Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian							10.905,2			
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		Kemenag
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		Kemenag
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	2.614,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.65

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	Jumlah Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	1.022	1.100	1.200	1.300	1.400	880,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN BH	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN BH	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500	6.029,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk	Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan	1.200	3.750	3.900	4.250	4.500	62,5	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	800	2.650	2.800	3.000	3.150	74,7	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (Teaching Industri)	Jumlah Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri	11	11	11	11	11	750,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Penelitian pada PTKI	Penelitian pada PTKI	1	5	10	15	20	66,3	Pusat		Kemenag
Penelitian yang Bermutu	Penelitian yang Bermutu	150	150	150	150	150	25,0	Daerah		Kemenag
Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	35	35	35	35	35	10,7	Pusat		Kemenag
Penelitian yang berkualitas	Penelitian yang berkualitas	325	325	325	325	325	56,3	Pusat		Kemenag
Penelitian yang mendapat HAKI	Penelitian yang mendapat HAKI	5	5	5	5	5	1,0	Pusat		Kemenag
Penelitian Dosen yang bermutu	Penelitian Dosen yang bermutu	116	116	116	116	116	272,6	Pusat		Kemenag
Penelitian Mahasiswa yang bermutu	Penelitian Mahasiswa yang bermutu	150	150	150	150	150	3,1	Pusat		Kemenag
Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	Jumlah Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Prop : Peningkatan Kualitas Lulusan PT							286,7			
Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	150,0			Kemendikbud
LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	Jumlah LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	43	43	43	43	43	91,4			Kemendikbud
Lulusan yang tersertifikasi di bidang nuklir	Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	96	68	107	96	96	31,9	Yogyakarta		BATAN
	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir	15	20	20	20	20	13,4			BATAN
KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Peringkat Global Innovation Index	80-85	80-85	80-85	75-80	75-80	22.323,9			
	Jumlah paten yang diberikan (resident)	900	925	950	975	1.000				
Prop : Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan							15.927,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Aplikasi Sistem Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.66

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA (KOORDINATOR PRN)</i>	1	2	2	2	1	35,0	Pusat		LAPAN
	<i>Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk Keselamatan Transportasi, Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)</i>	3	3	3	3	3	95,0	Jawa Barat		LAPAN
	<i>Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)</i>	3650000	3650000	3650000	3650000	3650000	296,0	Pusat		LAPAN
	<i>Space Map untuk Multi Sektor (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)</i>	4					10,0	Pusat		LAPAN
	<i>Mission System Pesawat Tanpa Awak MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT MALE KOMBATAN)</i>	1	1	1	1	1	275,0	Jawa Barat		LAPAN
	<i>Pesawat N219 Amphibi (KOORDINATOR PRN)</i>	1	1	1	1	1	250,1	Jawa Barat		LAPAN
	<i>Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah (KOORDINATOR PRN)</i>	1	1				844,2			LAPAN
	<i>Prototipe roket bertingkat 100 KM (KOORDINATOR PRN)</i>	1	1	1	1	1	975,0	Jawa Barat		LAPAN
	<i>Decision Support Tools (DST) berbasis Sains dan Teknologi Atmosfer untuk mendukung Smart Water Management System</i>	-	3	3	3	3	100,5	Jawa Barat		LAPAN
	<i>Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat</i>	1	1	1	1	1	5,5	Lampung		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat</i>	1	1	1	1	1	3,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat</i>	1	1	1	1	1	110,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat</i>	1	1	1	1	1	1,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi</i>	1	1	1	1	-	1,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri</i>	1	1	1	1	1	8,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.67

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri</i>	1	1	1	1	1	173,7	Gresik, Jawa Timur		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi</i>	1	1	1	1	1	1,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Produksi Pembibitan Hortikultura</i>	1	1	1	1	1	17,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Bioteknologi untuk Pengembangan Bahan Baku Obat</i>	1	1	1	1	1	17,3	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Uji Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai untuk mendukung Bidang Maritim dan Transportasi</i>	1	1	1	1	1	8,7	Yogyakarta		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pangan untuk Mencegah Stunting</i>	1	1	1	1	1	13,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk e-Services (e-Government dan e-Business)</i>	1	1	1	1	1	24,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	4,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	2,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	2,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	83,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Propulsi Kendaraan Berbasis Listrik</i>	1	1	1	1	1	25,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	3	3	3	3	3	607,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	1	1	1	1	1	0,9	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases</i>	1	1	1	1	1	77,3	Provinsi Riau		BPPT
	<i>Produk bidang Transportasi Perkeretapian</i>	2	2	2	2	2	1.308,2	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Implan Tulang Titanium dan Gigi</i>	2	2	2	2	2	120,2	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Bangunan Tahan Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun dan Murah</i>	1	1	1	1	1	10,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	11,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.68

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	1	1	1	1	1	1,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi teknologi produksi bahan baku obat herbal</i>	1	1	1	1	1	13,7	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	1	1	1	1	1	8,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim</i>	1	1	1	1	1	4,2			BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik</i>	1	1	1	1	1	2,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik</i>	5	5	5	5	5	5,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil</i>	1	1	1	1	1	331,6	Kamojang		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Industri Perkapalan</i>	5	5	5	5	5	363,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Vaksin Rekombinan dan HPV</i>	2	2	2	2	2	79,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat</i>						14,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka</i>	4	4	4	4	4	109,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat Amoksilin</i>		1	1	1	1	98,6	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Hasil Pengembangan Biosimilar Insulin</i>						67,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Bioteknologi Modern dan teknologi pendukung VUB Padi produktivitas tinggi</i>		3	3	2	2	26,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Teknologi VUB jagung potensi hasil tinggi</i>		1	1	1	1	4,1	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Teknologi VUB Kedelai potensi hasil tinggi</i>		1	1	1	1	7,5	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Teknologi pemuliaan dan produksi benih cabai berproduksi tinggi</i>		2	2	1	1	19,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Perbanyakkan massal umbi bawang varietas unggul untuk penyediaan benih</i>		2	2	2	2	19,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Bioteknologi modern bibit sapi potong unggul</i>		1	2	0	0	18,8	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Bioteknologi modern untuk pembentukan galur ayam lokal unggul</i>		1	1	1	1	2,8	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Riset dan Inovasi Mikrostruktur Komponen Rumah Tahan Gempa dan Tahan Api</i>		1	1			55,8	Provinsi Jawa Barat		LIPi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.69

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Hasil Penelitian tentang Perubahan Masyarakat dalam Revolusi Digital	1	3	3	3	3	102,0	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Penguatan Demokrasi Indonesia		1	1	1	1	82,0	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif dan Maritim	1	11	11			95,0	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Penguatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Nasional	1	3	3	3	3	63,0	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Pengembangan Risk Culture Melalui Peningkatan Pengetahuan Kebencanaan yang Terintegrasi		1	1	1	1	12,0	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Radar Pertahanan Udara Nasional			1	1	1	36,0	Provinsi Jawa Barat		LIPI
	Baterai Lithium Berlisensi Indonesia			1	1	1	44,0	Provinsi Banten		LIPI
	Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi Untuk Produksi Greenfuel		1	1	1	1	16,0	Provinsi Banten		LIPI
	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumihan untuk Ekosistem Perairan Darat dan Laut	5					13,1	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Penguatan Riset Samudra Nasional	1	1	1	1	0	102,2	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Model pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs)	19	2	2	2	2	25,0	Pusat		LAPAN
	Layanan Pengguna Bidang Pemanfaatan Penginderaan Jauh	100	3	3	3	3	29,8	Pusat		LAPAN
	Satelit Mikro LAPAN-A4	1					1,0	Jawa Barat		LAPAN
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary Ecoregion		2	2	2	2	84,0	DKI Jakarta		LIPI
	Hasil Kajian Pembangunan Energi Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat di Indonesia		1	1	1	1	12,0	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Core Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project	5	5		0	0	263,1	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
	Konservasi & Manajemen Pengelolaan SDA: Perencanaan Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis Integritas Fungsi Ekosistem Sungai untuk Mendukung Pembangunan Daerah		1	1	1	1	26,0	Provinsi Jawa Barat		LIPI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.70

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)</i>		1	1	1	1	42,0	Provinsi Jawa Barat		LIPi
<i>Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana</i>	<i>Produk Litbangyasa Teknologi dan Data Penginderaan Jauh</i>	9	9	9	9	9	10,0	Pusat		LAPAN
	<i>Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot</i>	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		LAPAN
	<i>Informasi cuaca antariksa</i>	3	3	3	3	3	47,9	Jawa Barat		LAPAN
	<i>Tersedianya Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (detektor radiasi yang beroperasi dan terintegrasi)</i>	4	15	15	15	15	157,9			BAPETEN
	<i>Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS</i>	1	1	1	1	1	14,1	Yogyakarta		BPPT
	<i>Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS</i>	1	1	1	1	1	215,9	DKI Jakarta, Mentawai dan Selat Sunda		BPPT
	<i>Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS</i>	2	2	2			7,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS</i>	1	1	1	1	1	4,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS</i>	5	5	5	5	5	135,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan</i>	2	2	2	2	2	86,2	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)</i>	3		16	16	16	26,5	Provinsi Jawa Barat		LIPi
	<i>Inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana</i>	1	1	1	1	1	2.250,0	Kepulauan Mentawai dan Selat Sunda		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel</i>	1	1	1	1	1	10,0	Morowali		BPPT
	<i>Uji Teknologi dan Armada untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Rawan Bencana</i>	4	4	4	4	4	101,0	Provinsi Riau		BPPT
	<i>Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS</i>	4	4	4	4	4	23,7	DKI Jakarta		BPPT
	<i>Pengadaan armada pendukung modifikasi Cuaca dan Peralatannya</i>						355,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT
	<i>Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumihan dan Kelautan untuk Kajian Potensi Bencana</i>	3					4,1			LIPi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.71

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir						0,0	Prov Banten		BATAN
	Prototipe RF Radiosinovectori		1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	4,2	Prov Banten		BATAN
	Prototipe Senyawa Bertanda untuk Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	23,7			BATAN
	Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka	5	5	7	7	7	31,3	Prov Banten		BATAN
	Dokumen Pengoperasian, Pemeliharaan Fasilitas Pengembangan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	1	1	1	1	1	17,6	Prov Banten		BATAN
	Dokumen Teknis Teknologi dan Keselamatan PLTN Besar dan SMR	4	5	6	7	8	32,7	Prov Banten		BATAN
	Teknologi Operasi Terbang dan Diseminasi	2	2	2	2	2	5,0	Jawa barat		LAPAN
	Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan Khusus	2					5,0			LAPAN
	Hasil pengembangan dan aplikasi alat kesehatan: clip anuarisma untuk implan bedah otak, implan tulang, dan karteter diagnostik jantung	0	3	3	3	3	90,0	Provinsi Banten		LIPI
	Hasil pengembangan dan aplikasi Alat Kesehatan						60,0	Provinsi Banten		LIPI
	Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan Multimedia yang Terdiseminasi kepada Stakeholder	1	1	1	1	1	11,5	DKI Jakarta		LIPI
	Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional		3	3	3	3	32,0	Provinsi Banten		LIPI
	Repositori ilmiah nasional (RIN)	-	-	-	-	-	26,0	Provinsi Banten		LIPI
	Inovasi Teknologi Hidrodinamika Bidang Maritim	3	3	3	3	3	29,5	Jawa Timur		BPPT
	Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara	21	4	5	5	7	107,5	Provinsi Jawa Barat		LIPI
	Teknologi Kendaraan Listrik	1	1	1	1	1	873,0	Provinsi Jawa Barat		LIPI
	Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	1					315,0	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Flagship Riset Nasional	22	43	43	43	43	2.100,0	Pusat		Kemen
	Penelitian Insentif Sistem Inovasi	260	260	260	260	260	405,2			Kemen
	Penelitian Pengembangan Teknologi Industri	24	50	60	70	80	316,4			Kemen Ristek/BRIN
	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur						138,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		BPPT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.72

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pengembangan Research Power-House							3.908,4			
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir	15	20	20	20	20	12,7	Pusat		BATAN
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	500	500	600	600	600	9,2	Pusat		BATAN
	Jumlah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	2	2	2	2	2	8,0	Pusat		BATAN
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Sertifikasi Personel	3.25	3.25	3.26	3.26	3.27	30,6	Pusat		BATAN
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi)	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa DN	400	450	450	450	450	192,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa LN	250	200	230	260	260	470,5	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Pengembangan Research Power-House	Program Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis	220	240	300	350	500	176,9	Provinsi Banten		LIPI
	Peraturan Jabatan Fungsional Baru	5					5,0	Provinsi Jawa Barat		LIPI
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	5					3,7	Provinsi Jawa Barat		LIPI
	Procurement of Multi Purposes Research Vessels	1	1	3	3	3	0,1	Provinsi Jawa Barat		LIPI
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi)	Jumlah Perekrutan yang mendapatkan Beasiswa S3	103	103	103	103	103	77,5	Pusat		BPPT
	Jumlah Perekrutan yang mendapatkan Beasiswa S2	54	54	54	54	54	0,0			BPPT
	Program Pembinaan Pejabat Fungsional Perekrutan dan Teknisi Litkayasa						2,8	Pusat		BPPT
	IPTEK LIPI Termamfaatkan oleh UKM/Masyarakat	10	10	10	10	10	20,0	Provinsi Jawa Barat		LIPI
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	Jumlah Lembaga Litbang Yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	138	138	138	138	138	225,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang Ditetapkan	114	120	126	131	138	184,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Penjaminan mutu Pranata Litbang	Jumlah Pranata Litbang yang Terakreditasi	55	60	65	70	75	20,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Pengembangan PLTN Skala Industri	5	6	6	6	7	168,3			BATAN
	Infrastruktur Produktif Cibinong Science and Technology Park (C-STP)	1					100,0	Kab. Bogor (Cibinong STP)		LIPI
	Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual	1	1	1			496,5	Kab. Bogor (Cibinong STP)		LIPI
	Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi	1	1				259,0	Kab. Bogor (Cibinong STP)		LIPI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.73

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Laboratorium proses dan pendukungnya untuk pangan tradisional yang berstandar current Good Manufacturing Practices (c-GMP)	1	1				145,0	Kab. Gunung Kidul, DI Yogyakarta		LIPI
	Teknologi Pengemasan Makanan Olahan	2	2	2	2	2	67,0	Kab. Gunung Kidul, DI Yogyakarta		LIPI
	Fasilitas kawasan geodiversitas Indonesia - Karang Sambung		1	0	0	0	78,0	Provinsi Jawa Tengah		LIPI
	Bandar Antariksa Skala Kecil	-	-	-	-	-	3,2	Papua		LAPAN
	Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional	-	4	4			270,0			LAPAN
	Observatorium Nasional (Obsnas) di NTT	1		-	-	-	164,5	Provinsi NTT		LAPAN
	Pembangunan Laboratorium Pengujian Komponen Pesawat Udara Berdasarkan Standar Internasional DO-160	1	-	-	-	-	125,0	Jawa Barat		LAPAN
	Laboratorium Terbang Nasional	-	1	-	-	-	125,0			LAPAN
Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	Jumlah Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	28	28	28	28	28	100,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Lembaga litbang yang dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek	Jumlah Lembaga litbang yang dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek	100	110	120	130	140	369,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Prop : Penciptaan ekosistem inovasi							2.480,0			
Implementasi RIRN dan ARN	Infrastruktur STP Berbasis PT/LPNK Iptek Eksisting Yang Dikembangkan	5	5	5	5	5	750,0	Pusat	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	Kemen Ristek/BRIN
	Inkubator pada STP Eksisting yang Fungsional	18	18	18	18	18	50,0	Pusat	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	Kemen Ristek/BRIN
Produk Inovasi Litbang di Industri	Jumlah Produk Inovasi Litbang di	60	65	70	75	80	394,5	Pusat		Kemen
Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan	Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan	7	7	7	7	7	22,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan	18	19	20	21	22	628,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis	Jumlah Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	297	250	250	250	250	605,5	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
Klaster Inovasi	Jumlah klaster inovasi sebagai wahana kolaborasi N-Helix	4	5	5	5	5	30,0			Kemen Ristek/BRIN
Prop : Peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang							8,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.74

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penguatan basis data riset/litbang industri melalui pelaksanaan survei belanja litbang industri</i>	<i>Persentase industri manufaktur yang terpetakan data belanja riset/litbangnya (persen)</i>		80	90	100	100	0,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
<i>Fasilitasi platform kolaborasi multisumber pendanaan</i>	<i>Persentase kontribusi matching grant non APBN dalam pelaksanaan litbang di Kemenristek/BRIN</i>						0,0			
<i>Fasilitasi forum pendanaan inovasi (pitching)</i>	<i>Jumlah start-up teknologi yang mendapatkan dukungan pendanaan non APBN dari fasilitasi forum pendanaan inovasi</i>		10	10	10	10	4,0			Kemen Ristek/BRIN
<i>Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana Abadi Penelitian</i>	<i>Persentase hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek</i>		25	50	75	100	4,0	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
KP : Prestasi Olahraga	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	meningkat	35,40	meningkat	meningkat	40	4.237,3			
	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	2	N/A	N/A	N/A	3				
	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	1	N/A	N/A	N/A	3				
	Peringkat pada Asian Games	N/A	N/A	5	N/A	N/A				
	Peringkat pada Asian Para Games	N/A	N/A	4 s/d 6	N/A	N/A				
ProP : Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan							1,3			
<i>Penyusunan dan pemanfaatan naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi</i>	<i>Jumlah naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi yang disusun dan dimanfaatkan</i>	1	1	1	1	1	0,6	Pusat		Kemempora
<i>Penyusunan dan pemanfaatan naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus</i>	<i>Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus keolahragaan yang disusun dan</i>	1	1	1	1	1	0,7	Pusat		Kemempora
ProP : Pengembangan budaya olahraga							204,9			
<i>Kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan</i>	<i>Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan</i>	11.274	11.274	11.274	11.274	11.274	25,1	Pusat		Kemempora
<i>Kampanye olahraga olimpik di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Nonformal dan Informal</i>	<i>Jumlah peserta olahraga olimpik yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal</i>	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17,5	Pusat		Kemempora
<i>Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan</i>	<i>Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata</i>	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	140,9	Pusat		Kemempora



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.75

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Kejuaraan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan kejuaraan olahraga rekreasi	3	3	3	3	3	21,4	Pusat		Kemempora
ProP : Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade							3.525,6			
Fasilitasi peserta PPLP/PPLM dalam pembinaan dan pengembangan	Jumlah peserta PPLP/PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	1381	1381	1381	1381	1381	623,0	Pusat dan Daerah		Kemempora
Peningkatan kualitas pengelolaan sentra keolahragaan dan sekolah khusus keolahragaan	Jumlah peserta olahraga di sekolah khusus keolahragaan	253	253	253	253	253	183,5	Pusat		Kemempora
Fasilitasi olahragawan andalan	Jumlah olahragawan andalan nasional	1000	1000	1000	1000	1000	1.409,3	Pusat		Kemempora
Fasilitasi penyelenggaraan dan/ atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/ atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/ atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/ atau multi event)	44	44	44	44	44	50,7	Pusat		Kemempora
Fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional (PON, Peparnas)	2	N/A	N/A	N/A	2	328,2	Pusat		Kemempora
Fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional (Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games, ASEAN Para Games)	3	2	2	2	2	868,9	Pusat		Kemempora
Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/ atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/ atau multi event)	62	62	62	62	62	62,0	Pusat		Kemempora
ProP : Penataan kelembagaan olahraga							24,2			
Fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	Jumlah pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	17	17	17	17	17	24,2	Pusat		Kemempora
ProP : Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional							123,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.76

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi pengelola organisasi keolahragaan olimpiik dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan olimpiik yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	29,6	Pusat		Kemenpora
Fasilitasi tenaga keolahragaan olimpiik dalam pengembangan tenaga keolahragaan	Jumlah tenaga keolahragaan olimpiik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	93,5	Pusat dan Daerah		Kemenpora
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional							329,6			
Fasilitasi bantuan untuk prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiik	Jumlah fasilitasi prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiik	29	29	29	29	29	64,8	Pusat		Kemenpora
Fasilitasi bantuan untuk sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiik	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiik	59	58	58	58	58	264,8	Pusat		Kemenpora
ProP : Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan							28,6			
Penyusunan naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang dapat dimanfaatkan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat		Kemenpora
Koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	28,2	Pusat		Kemenpora
JUMLAH							1.568.049,2			

Keterangan :

Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER							3.237,5			
KP : Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti							1.463,8			
Prop : Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (bullying free school environment)							538,5			
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMP Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	39423	39423	39423	39423	39423	77,3	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	540	540	540	540	540	174,4	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	816	850	850	850	850	54,8	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMA Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	5612	5612	5612	5612	5612	136,3	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	Anak Remaja Mengikuti Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	20000	20000	20000	20000	20000	95,7	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Prop : Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan							853,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam</i>	<i>Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam</i>	79	79	79	79	79	131,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu</i>	<i>Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu</i>	200	210	220	230	240	15,3	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Guru PAI yang meningkat kompetensinya</i>	<i>Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya</i>	3950	4000	4500	5000	5500	49,7	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	<i>Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	4369	4369	4369	4369	4369	166,8	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	<i>Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	120	120	120	120	120	4,2	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Peningkatan Kompetensi Guru</i>	<i>Jumlah Guru yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	5712	5712	5712	5712	5712	62,7	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya</i>	<i>Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya</i>	1900	1900	1900	1900	1900	71,9	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan</i>	<i>Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan</i>	1245	8000	9000	10000	11000	352,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemenag</i>
ProP : Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan							71,6			
<i>Fasilitasi pemuda kader dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda</i>	<i>Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda</i>	1800	1800	1800	1800	1800	16,9	<i>Pusat</i>		<i>Kemempora</i>
<i>Penguatan pendidikan pramuka</i>	<i>Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarnas/Saka/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi</i>	17	17	17	17	17	50,7	<i>Pusat</i>		<i>Kemempora</i>
<i>Penguatan penyelenggaraan KKN Revolusi Mental</i>	<i>Mahasiswa Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik</i>	300	300	300	300	300	4,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
KP : Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif							23,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya							9,1			
<i>Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat</i>	<i>Tingkat mutu pelayanan di PTSP Pusat</i>	<i>3,2 dari 4</i>	<i>3,2 dari 4</i>	<i>3,2 dari 4</i>	<i>3,2 dari 4</i>	<i>3,2 dari 4</i>	6,7	<i>Pusat</i>		<i>BKPM</i>
<i>Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik</i>	<i>Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik</i>	-	50	50	50	50	0,8	<i>Pusat/Daerah</i>		<i>KEMEN PAN DAN RB</i>
<i>Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik</i>	<i>Jumlah Intansi di Wilayah II yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik</i>	-	50	50	50	50	0,8	<i>Pusat/Daerah</i>		<i>KEMEN PAN DAN RB</i>
<i>Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik</i>	<i>Jumlah Intansi di Wilayah III yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik</i>	-	50	50	50	50	0,8	<i>Pusat/Daerah</i>		<i>KEMEN PAN DAN RB</i>
ProP : Penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi							14,0			
<i>Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun PNS</i>	<i>Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS</i>	25	25	25	25	25	0,5	<i>Pusat</i>		<i>BKN</i>
<i>Penyelesaian dan Penyelidikan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku</i>	<i>Jumlah rekomendasi penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku yang ditindaklanjuti</i>	160	160	160	160	160	10,0	<i>Pusat</i>		<i>KASN</i>
<i>Penegakan disiplin SDM Aparatur</i>	<i>Jumlah Instansi Pemerintah yang melakukan penegakan disiplin ASN</i>	60	60	80	100	100	3,5	<i>Pusat</i>		<i>KEMEN PAN DAN RB</i>
KP : Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter							410,8			
ProP : penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup							61,9			
<i>Peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter</i>	<i>Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja</i>	75,72	76,22	76,72	77,22	77,72	30,9	<i>Pusat</i>		<i>BKKBN</i>
<i>Pengembangan karakter remaja yang berkualitas</i>	<i>Indeks karakter remaja</i>	67,92	68,42	68,92	69,42	69,92	30,9	<i>Pusat</i>		<i>BKKBN</i>
<i>Bimbingan Perkawinan Pra Nikah</i>	<i>Bimbingan Perkawinan Pra Nikah</i>	241000	353000	452000	577000	738000	0,0	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani</i>	<i>Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani</i>	17	17	17	17	17	0,0	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia</i>	<i>Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia</i>	805	805	805	805	805	0,0	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Bimbingan Keluarga Sukinah</i>	<i>Bimbingan Keluarga Sukinah</i>	1559	1559	1559	1559	1559	0,0	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Pembinaan Keluarga Hittasukhaya</i>	<i>Pembinaan Keluarga Hittasukhaya</i>	100	138	190	263	363	0,0	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
Prop : peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga							284,9			
<i>Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter</i>	<i>Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter</i>	38,68	39,68	40,68	41,68	42,68	153,1	<i>Pusat dan 34 Provinsi</i>		<i>BKKBN</i>
<i>Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga</i>	<i>Persentase Keluarga yang berwirausaha</i>	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	131,8	<i>Pusat dan 34 rovinsi</i>		<i>BKKBN</i>
<i>Keluarga Sakinah yang Terbina</i>	<i>Keluarga Sakinah yang Terbina</i>	18000	18000	18000	18000	18000	0,0	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
Prop : Pewujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha							64,0			
<i>Penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang mendapat Penguatan PUG dan PUHA di Bidang PPPA</i>	10	50	70	100	150	15,3	<i>Pusat/ Daerah</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Sinergi Percepatan Program PPPA</i>	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA</i>	-	100	150	200	250	14,8	<i>Pusat/ 30 Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi Program Sinergi untuk Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media</i>	<i>Jumlah Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA</i>	-	130	160	200	250	14,2	<i>Pusat/ 34 Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Fasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender</i>	<i>Jumlah Provinsi yang difasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Keluarga yang Responsif Gender</i>	-	10	20	25	34	12,8	<i>Pusat/ 34 Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
<i>Replikasi Inovasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Program PPPA</i>	<i>Jumlah Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA</i>	-	6	9	12	15	4,2	<i>Pusat/ 34 Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Replikasi Inovasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Program PPPA	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA	-	6	12	16	20	2,7	Pusat/ 34 Provinsi		Kemen PPPA
KP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental							457,9			
ProP : Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu							333,9			
Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik untuk mendorong Gerakan Indonesia Melayani	Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik	5	5	5	5	5	3,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia (%)	76	71	66	61	56	18,0	Pusat dan daerah		Kemenko Marin
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	20	25	30	35	40	15,0	Pusat dan daerah		Kemenko Marin
Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah TPS 3R yang berfungsi dengan baik	15	20	25	30	35	15,0	Pusat dan daerah		Kemenko Marin
Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase pengurangan sampah nasional	7	12	17	22	27	18,0	Pusat dan daerah		Kemenko Marin
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah partisipasi semua pihak dalam aksi publik, edukasi, dan pendampingan terkait hidup bersih dan sehat	16	20	24	30	34	18,0	Pusat dan daerah		Kemenko Marin
Peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait perilaku hidup bersih dan sehat	9	14	19	24	29	15,0	Pusat dan daerah		Kemenko Marin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penguatan perilaku tertib di ruang publik melalui Gerakan Indonesia Tertib</i>	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib</i>	1	1	1	1	1	11,5	Pusat		Kemeko Polhukam
<i>Penguatan sinergi program peningkatan pendapatan melalui Gerakan Indonesia Mandiri</i>	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Mandiri</i>	1	1	1	1	1	0,0	Pusat		Kemeko Perekonomian
<i>Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan</i>	<i>Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan</i>	34	34	34	34	34	10,5	Pusat dan Daerah		Kemendagri
<i>Perluasan diseminasi GNRM pada Masyarakat</i>	<i>Jumlah Layanan Diseminasi GNRM pada Masyarakat</i>	1	1	1	1	1	148,4	Pusat		Kemeko PMK
<i>Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental</i>	<i>Jumlah Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental</i>	49	49	49	49	49	45,8	Pusat		Kemeko PMK
<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM</i>	1	1	1	1	1	15,8	Pusat		Kemeko PMK
Prop : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah							124,0			
<i>Penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan dan menguatkan program GNRM</i>	15	20	25	30	34	124,0	Pusat dan Daerah		Kemeko PMK
KP : Pembangunan dan Pembedayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila							166,7			
<i>Kaderisasi pendamping/penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi di tingkat kabupaten/kota dan desa</i>	<i>Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi</i>	3360	3360	3360	3360	3360	0,0	Pusat		Kemen KUKM
<i>Kaderisasi pendamping/penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi di tingkat kabupaten/kota dan desa</i>	<i>Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi</i>	3360	3360	3360	3360	3360	0,0	Pusat		Kemen KUKM
Prop : Peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong							15,2			
<i>Pemasyarakatan Kewirausahaan</i>	<i>Jumlah Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan</i>	2000	2000	2000	2000	2000	15,2	Pusat		Kemen KUKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri							151,5			
<i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri</i>	2500	3000	3500	4000	4500	77,1	Pusat		Kemendag
<i>Edukasi Konsumen</i>	<i>Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya</i>	6500	6500	6500	6500	6500	71,0	Pusat		Kemendag
<i>Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang dibina</i>	500	500	500	500	500	3,4	Pusat		Kemendag
KP : Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme							715,1			
ProP : Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara							410,0			
<i>Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	3	3	3	3	3	15,4	Pusat dan daerah		BPIP
<i>Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila</i>	<i>Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	100	100	100	100	100	15,4			BPIP
<i>Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	3	3	3	3	3	13,8	Pusat dan daerah		BPIP
<i>Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila</i>	<i>Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	100	100	100	100	100	13,8			BPIP
<i>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	1	1	1	1	1	19,2	Pusat dan daerah		BPIP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	19,2			BPIP
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan	100	100	100	100	100	19,2			BPIP
Penguatan ketahanan nasional	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara	1	4	4	4	4	14,3	Pusat		Wantanas
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	0	500	500	500	500	12,8	Pusat dan Daerah		Lemhanas
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	0	500	500	500	500	12,8	Pusat dan Daerah		Lemhanas
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Sosialisasi/ Dialog Wawasan Kebangsaan	190	400	400	400	400	12,5	Pusat dan Daerah		Lemhanas
Pengembangan bela negara	Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki Nilai-Nilai Bela Negara	42700	43000	43000	43000	43000	181,7	Pusat		Kemenhan
Pengembangan bela negara	Jumlah Keterlibatan Warga Negara dalam Upaya Bela Negara	-	875	875	875	875	51,9	Pusat		Polri
Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	15	16	17	18	19	8,0	Daerah		Kemendagri
ProP : Peningkatkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)							155,6			
Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan	1	1	1	1	1	91,7	Pusat dan daerah		BPIP
Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	1	1	1	1	1	30,6	Pusat dan daerah		BPIP
Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3	3	3	3	3	11,1	Pusat dan daerah		BPIP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa</i>	<i>Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan</i>	100	100	100	100	100	11,1			BPIP
<i>Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah</i>	<i>Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan</i>	100	100	100	100	100	11,1			BPIP
ProP : Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.							64,3			
<i>Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila</i>	<i>Jumlah dokumen rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan</i>	3	3	3	3	3	13,8	<i>Pusat dan daerah</i>		BPIP
<i>Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila</i>	<i>Persentase penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila</i>	100	100	100	100	100	13,8	<i>Pusat dan daerah</i>		BPIP
<i>Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional</i>	<i>Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat dan daerah yang diselesaikan</i>	1	1	1	1	1	36,7	<i>Pusat dan daerah</i>		BPIP
ProP : Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara							85,2			
<i>Evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara</i>	<i>Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara</i>	1	1	1	1	1	28,4	<i>Pusat dan daerah</i>		BPIP
<i>Evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara</i>	<i>Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara</i>	1	1	1	1	1	28,4	<i>Pusat dan daerah</i>		BPIP
<i>Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila</i>	<i>Jumlah evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila</i>	1	1	1	1	1	28,4	<i>Pusat dan daerah</i>		BPIP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA							7.377,1			
KP : Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal							1.035,8			
ProP : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal							234,0			
<i>Penguatan integrasi Kebudayaan pada proses pembelajaran</i>	<i>Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran</i>	30.5	31	33	35	37	234,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
ProP : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip							577,3			
<i>Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri</i>	<i>Persentase museum yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan</i>	75	76	77	78	79	59,1	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri</i>	<i>Presentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)</i>	45	49	52	53	57	75,6	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri</i>	<i>Jumlah kunjungan museum</i>	1861792	1861792	1861792	1861792	1861792	170,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri</i>	<i>Jumlah kunjungan Galeri</i>	1200472	1200472	1200472	1200472	1200472	75,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri</i>	<i>Jumlah Kunjungan Cagar budaya</i>	987000	987000	987000	987000	987000	140,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	<i>Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	254.650	280.110	308.145	338.945	372.835	37,7	<i>Pusat/ Daerah</i>		<i>Arsip Nasional</i>
<i>Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	<i>Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120	19,8	<i>Pusat/ Daerah</i>		<i>Arsip Nasional</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa							224,5			
<i>Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi</i>	<i>Jumlah alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno dan budaya etnis nusantara</i>	50	50	50	50	50	22,2	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi</i>	<i>Jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi</i>	34765	34765	34765	34765	34765	24,7	<i>Pusat</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi</i>	<i>Jumlah alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno</i>	39750	39750	39750	39750	39750	34,0	<i>Pusat</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi</i>	<i>Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi</i>	122.851	293.730	323.823	356.845	392.970	58,6	<i>Pusat/Daerah</i>		<i>Arsip Nasional</i>
<i>Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya</i>	<i>Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan</i>	347	347	347	347	347	85,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
KP : Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat							1.310,0			
ProP : Pengembangan produk seni, budaya, dan film							511,9			
<i>Peningkatan pemanfaatan produk seni</i>	<i>Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung</i>	30	35	40	45	50	378,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan pemanfaatan produk seni</i>	<i>Persentase izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang diterbitkan</i>	30	33	35	37	39	46,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan pemanfaatan produk seni</i>	<i>Persentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang didukung</i>	45	47	49	50	51	47,4	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan pemanfaatan produk seni</i>	<i>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikaji dan dipetakan</i>	20	23	25	27	29	40,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
ProP : Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional							276,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan penyelenggaraan festival budaya	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	218	230	231	239	238	276,5	Pusat dan daerah		Kemendikbud
ProP : Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat							427,2			
Peningkatan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (terhadap yang terdaftar)	3,91	4,65	5,39	6,13	6,90	69,5	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Peningkatan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan (terhadap yang dilindungi)	34	37	40	43	45	217,7	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Peningkatan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Kunjungan Cagar budaya	987000	987000	987000	987000	987000	140,0	Pusat dan daerah		Kemendikbud
ProP : Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim							94,4			
Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Bahari	Jumlah rumusan kebijakan dan rumusan tindak lanjut kebijakan bidang budaya, seni dan olahraga bahari yang dihasilkan	6	7	7	7	7	24,4	Pusat		Kemenko Marin
Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya maritim	Jumlah kekayaan budaya maritim yang dikembangkan atau dimanfaatkan	5	5	5	5	5	40,0	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	5	12	18	24	30	30,0	7 provinsi		KKP
KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif							3.156,4			
ProP : Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup							3.001,4			
Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	30	40	45	45	45	114,5	Pusat dan daerah		Kemendikbud
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	Tersedianya data potensi konflik	48	55	60	65	70	47,3	Daerah		Kemen LHK
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	Diterbitkannya SK Penetapan Hutan Adat	20	25	30	35	40	25,0	Daerah		Kemen LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pelindungan dan pengembangan hutan adat</i>	<i>SK Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (SK KUPS) dan RKU/RPH/RKT</i>	1000	1500	2000	2500	3000	305,0	Daerah		Kemen LHK
<i>Pelindungan dan pengembangan hutan adat</i>	<i>Berita acara serah terima bantuan ekonomi produktif</i>	1393	1500	2000	2500	3000	634,2	Pusat		Kemen LHK
<i>Pelindungan dan pengembangan hutan adat</i>	<i>Meningkatnya kinerja kelompok usaha Perhutanan Sosial</i>	200	400	600	800	1000	600,0	Daerah		Kemen LHK
<i>Pelindungan dan pengembangan hutan adat</i>	<i>Jumlah mitra pendamping Perhutanan Sosial</i>	50	100	150	200	250	136,8	Pusat		Kemen LHK
<i>Pelindungan dan pengembangan hutan adat</i>	<i>Tersedianya pendamping dalam pengembangan Perhutanan Sosial</i>	2500	3000	3500	4000	4500	887,5	Pusat		Kemen LHK
<i>Sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat</i>	<i>Jumlah provinsi yang dilaksanakan sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat</i>	34	34	34	34	34	251,1	Pusat		Kemen ATR/BPN
ProP : Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya							100,0			
<i>Peningkatan dukungan terhadap komunitas adat dan penghayat kepercayaan</i>	<i>Persentase komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan</i>	40	45	49	53	56	100,0	Pusat dan daerah		Kemendikbud
ProP : Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta							55,0			
<i>Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya</i>	<i>Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual yang diinventarisasi</i>	48	52	55	56	57	50,0	Pusat dan daerah		Kemendikbud
<i>Pembuatan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal</i>	<i>Jumlah data KI komunal</i>	120	120	120	120	120	5,0	Pusat		Kemenkumham
KP : Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia							185,0			
ProP : Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara							115,0			
<i>Penguatan diplomasi kebudayaan</i>	<i>Jumlah misi dan karawan budaya tingkat dunia yang dikirim</i>	300	300	300	300	300	85,0	Pusat		Kemendikbud
<i>Penguatan diplomasi kebudayaan</i>	<i>Jumlah forum kebudayaan internasional yang diintervensi</i>	10	10	10	10	10	30,0	Pusat		Kemendikbud
ProP : penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri							70,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penguatan kegiatan kebudayaan di luar negeri</i>	<i>Jumlah Diaspora Indonesia yang terlibat dalam kegiatan budaya Indonesia di Luar Negeri</i>	60	60	60	60	60	50,0	Pusat		Kemendikbud
<i>Penguatan kegiatan kebudayaan di luar negeri</i>	<i>Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang memiliki program kebudayaan dan dikelola secara berkelanjutan</i>	8	8	8	8	8	20,0	Pusat		Kemendikbud
KP : Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan							1.690,0			
ProP : Pengelolaan dana perwalian kebudayaan							1.325,0			
<i>Peningkatan fasilitasi melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan</i>	<i>Jumlah pengelolaan dana perwalian kebudayaan</i>	1	1	1	1	1	1.070,0	Pusat		Kemendikbud
<i>Peningkatan fasilitasi melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan</i>	<i>Jumlah fasilitasi yang diberikan melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan</i>	189	189	189	189	189	255,0	Pusat		Kemendikbud
ProP : Peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan							95,0			
<i>Pengembangan SDM bidang kebudayaan</i>	<i>Jumlah SDM bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/ atau sertifikasi</i>	450	450	450	450	450	75,0	Pusat		Kemendikbud
<i>Pengembangan SDM bidang kebudayaan</i>	<i>Jumlah profesi bidang kebudayaan yang terstandarisasi dan tercantum dalam KBJI/ KBLI</i>	5	5	5	5	5	20,0	Pusat		Kemendikbud
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan							150,0			
<i>Optimalisasi sarana dan prasarana publik menjadi ruang interaksi publik menjadi ruang interaksi budaya masyarakat</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya masyarakat</i>	126	135	135	135	135	150,0	Pusat		Kemendikbud
ProP : Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu							30,0			
<i>Pengembangan sistem pendataan kebudayaan</i>	<i>Jumlah pusat data milik pemerintah dan masyarakat yang tersambung dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu</i>	1	1	1	1	1	30,0	Pusat		Kemendikbud
ProP : Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan							90,0			
<i>Peningkatan kerja sama bidang kebudayaan</i>	<i>Persentase PPKD yang menjadi rujukan penyusunan RKP dan RPJMD</i>	50	50	50	50	50	50,0	Pusat		Kemendikbud
<i>Peningkatan kerja sama bidang kebudayaan</i>	<i>Jumlah kerjasama galeri di tingkat internasional</i>	4	4	4	4	4	40,0	Pusat		Kemendikbud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama						21.945,4			
KP : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama							6.931,6			
ProP : Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat							3.899,2			
<i>Tunjangan Penyuluh Honoror Konghucu</i>	<i>Penyuluh Honoror Konghucu yang dapat tunjangan</i>	145	145	145	145	145	10,2	34 Provinsi		Kemenag
<i>Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS</i>	<i>Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang dapat tunjangan</i>	45000	45000	45000	45000	45000	2.520,0	34 Provinsi		Kemenag
<i>Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas</i>	<i>Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas</i>	5148	5148	5148	5148	5148	278,9	Pusat dan Daerah		Kemenag
<i>Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan</i>	<i>Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan</i>	9000	9000	9000	9000	9000	490,5	34 Provinsi		Kemenag
<i>Pembinaan Penyuluh Agama Kristen</i>	<i>Penyuluh Agama Kristen yang terbina</i>	1370	2159	2159	2159	2159	94,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
<i>Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan</i>	<i>Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan</i>	4042	4042	4042	4042	4042	222,4	34 Provinsi		Kemenag
<i>Penyuluh Agama Katolik yang Terbina</i>	<i>Pembinaan bagi Penyuluh Agama Katolik Terbina</i>	45	45	45	45	45	6,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
<i>Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS</i>	<i>Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS yang mendapat tunjangan</i>	1700	1700	1700	1700	1700	102,0	34 Provinsi		Kemenag
<i>Kelompok Binaan Penyuluh Hindu</i>	<i>Kelompok Binaan Penyuluh Hindu yang ditingkatkan</i>	70	70	70	70	70	2,3	Daerah		Kemenag
<i>Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Hindu</i>	<i>Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensi</i>	2565	2565	2565	2565	2565	25,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
<i>Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan</i>	<i>Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan</i>	1182	1182	1182	1182	1182	121,7	34 Provinsi		Kemenag
<i>Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan</i>	<i>Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan</i>	100	100	100	100	100	1,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
<i>Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan</i>	<i>Diklat Alumni Tenaga Teknis Keagamaan</i>	30	30	30	30	30	0,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
<i>Alumni Diklat Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu</i>	<i>Diklat Alumni Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu</i>	30	30	30	30	30	0,5	Pusat dan Daerah		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Siaran Pendidikan Agama	Jumlah jam siar konten pendidikan agama	1318	1400	1485	1550	1600	22,5			LPP TVRI
ProP : Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru							1.538,3			
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (lokasi)	Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	35	35	35	35	35	35,2	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	234	234	234	234	234	102,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	40510	40510	40510	40510	40510	829,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	Guru/Dosen/Pengawas PAI yang ditingkatkan kualitasnya	100	100	100	100	100	14,7	Daerah		Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	133	133	133	133	133	14,7	Daerah		Kemenag
Dokumen Standar Nasional Pendidikan	Dokumen Standar Nasional Pendidikan	35	35	35	35	35	150,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
KKM/ KKG/ MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	KKM/ KKG/ MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	0	120	130	140	150	306,3	Daerah		Kemenag
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Siswa Beragama Hindu	0	34	34	34	34	9,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Peserta Didik yang mendapatkan Pembinaan Karakter	2160	2160	2160	2160	2160	48,9	Pusat dan Daerah		Kemenag
Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	0	10	10	10	10	12,8	Daerah		Kemenag
Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Jumlah Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	4000	4000	4000	4000	4000	15,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
ProP : Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan							469,9			
Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	500	500	500	500	500	29,3	Daerah		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu</i>	133	133	133	133	133	14,7	Daerah		Kemenag
<i>Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya</i>	<i>Jumlah Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya</i>	30	30	30	30	30	17,6	Daerah		Kemenag
<i>Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan</i>	<i>Jumlah Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan</i>	1000	1000	1000	1000	1000	8,8	Daerah		Kemenag
<i>Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu</i>	<i>Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu</i>	12	12	12	12	12	29,3	Daerah		Kemenag
<i>Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa</i>	<i>Jumlah Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa</i>	0	1000	1000	1000	1000	13,5	Daerah		Kemenag
<i>Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya</i>	<i>Jumlah Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya</i>	10	12	14	16	18	25,2	Daerah		Kemenag
<i>Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional</i>	<i>Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional</i>	4000	4000	4000	4000	4000	331,4	Daerah		Kemenag
ProP : Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran							912,2			
<i>Rumah Ibadah yang suci dan damai</i>	<i>Rumah Ibadah Agama Islam yang yang suci dan damai</i>	590	1500	1500	1500	1500	639,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
	<i>Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)</i>	280	280	280	280	280	82,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
	<i>Rumah Ibadah Agama Katolik yang yang suci dan damai</i>	62	62	62	62	62	17,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
	<i>Rumah Ibadah Hindu yang suci dan damai</i>	300	300	300	300	300	56,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
	<i>Rumah Ibadah Agama Buddha yang suci dan damai</i>	0	200	200	200	200	75,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
	<i>Rumah Ibadah Agama Khonghucu yang suci dan Damai</i>	2	2	2	2	2	41,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
ProP : Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa							112,1			
<i>Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing</i>	<i>Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing</i>	500	500	500	500	500	29,3	Pusat dan Daerah		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Siswa Madrasah yang Berdaya Sainq	Jumlah Siswa Madrasah yang Berdaya Sainq	250	250	250	250	250	58,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	1000	1000	1000	1000	1000	24,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
KP : Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama							621,4			
Prop : Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama							57,8			
Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan	546	546	546	546	546	19,9	Pusat dan Daerah		Kemenag
Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	1000	1000	1000	1000	1000	24,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
Desa Sadar Kerukunan	jumlah Desa Sadar Kerukunan	52	52	52	52	52	13,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Prop : Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa							433,5			
Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan	546	546	546	546	546	19,9	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Kerukunan Hidup Umat Beragama yang dikembangkan	1	1	1	1	1	45,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama yang dibina	1000	1000	1000	1000	1000	24,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu	Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu yang dikembangkan	0	19	19	19	19	0,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam yang dikembangkan	34	34	34	34	34	6,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen yang dikembangkan	23	23	23	23	23	23,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik yang dikembangkan	35	35	35	35	35	9,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu	Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu yang dikembangkan	100	115	115	115	115	11,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha yang dikembangkan	0	34	34	34	34	0,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Ormas dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan	100	100	100	100	100	292,9	Pusat dan Daerah		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong							130,1			
Operasional SEKBER FKUB Provinsi	SEKBER FKUB Provinsi yang dioperasionalkan	34	34	34	34	34	10,0			Kemenag
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/ Kota	SEKBER FKUB Kabupaten/ Kota yang dioperasionalkan	512	512	512	512	512	120,1			Kemenag
KP : Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya							565,8			
ProP : Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama							57,7			
Budaya Keagamaan Islam yang Terbina	Budaya Keagamaan Islam yang Terbina	1	1	1	1	1	0,4			Kemenag
Budaya Keagamaan Kristen yang Terbina	Budaya Keagamaan Kristen yang Terbina	1	1	1	1	1	0,4			Kemenag
Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	85	85	85	85	85	15,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pembinaan Paham Keagamaan	Jumlah Pembinaan Paham Keagamaan	500	500	500	500	500	41,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
ProP : Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama							190,2			
Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	1	1	1	1	1	3,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1	1	1	1	1	2,2	Pusat dan Daerah		Kemenag
Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	18	18	18	18	18	59,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Jumlah Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	16	16	16	16	16	93,8	Pusat dan Daerah		Kemenag
Bahan Bacaan Tafsir dan Literatur Ke-Al-Qur'an	Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	0	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	1	1	1	1	1	3,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Direktori Pustaka Islam	Jumlah Direktori Pustaka Islam	700	700	700	700	700	28,2	Pusat dan Daerah		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi							317,9			
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	Jumlah event Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	35	35	35	35	35	150,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pesparawi Nasional	jumlah event Pesparawi Nasional		1			1	57,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Internalisasi Dharma Gita	Internalisasi Dharma Gita	1	1	1	1	1	25,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	Jumlah Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	85	85	85	85	85	15,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Event Keagamaan Buddha yang terselenggara	Jumlah Event Keagamaan Buddha yang Terselenggara (Swayamvara Tripitaka Gatha/ STG)	1	1	1	1	1	25,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dakwah dan Hari Besar Islam	Dakwah dan Hari Besar Islam yang terselenggara	35	35	35	35	35	43,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pembinaan Sarati Banten	Jumlah Pembinaan Sarati Banten	1	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
KP : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama							13.440,3			
ProP : Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan							6.551,4			
Penghulu yang Terbina	Penghulu yang Terbina	3000	3000	3000	3000	3000	102,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	2500	3000	3500	4000	4500	3.637,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pembangunan Balai Nikah	Balai Nikah yang terbangun	228	128	128	128	128	2.090,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pengadaan Tanah KUA	Jumlah Pengadaan Tanah KUA	45	45	45	45	45	117,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Buku dan Kartu Nikah	Buku dan Kartu Nikah yang diedarkan	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	58,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Rehabilitasi KUA	Jumlah KUA yang terehabilitasi	100	100	100	100	100	88,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Sarana dan Prasarana KUA	Sarana dan Prasarana KUA yang ditingkatkan	750	1000	1000	1000	1000	75,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Layanan Syariah	Layanan Syariah	100	100	100	100	100	20,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Kitab Suci	Kitab Suci Agama Islam yang dicetak	650000	650000	650000	650000	650000	46,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pengelolaan Hisab Rukyat	Pengelolaan Hisab Rukyat	1000	1000	1000	1000	1000	37,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Gedung Pusat Observasi Bulan	Gedung Pusat Observasi Bulan yang ditingkatkan	1	1	1	1	1	32,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan	Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan	21	21	21	21	21	51,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	0	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Kitab Suci dan Buku Keagamaan Kristen lainnya	Kitab Suci dan Buku Keagamaan Kristen lainnya yang dicetak	14100	14100	14100	14100	14100	7,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	274	274	274	274	274	46,7	Pusat dan Daerah		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	45	45	45	45	45	3,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	41	41	41	41	41	0,2	Pusat dan Daerah		Kemenag
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	397	397	397	397	397	20,2	Pusat dan Daerah		Kemenag
Sarana Peribadatan Katolik yang Terfasilitasi	Jumlah Sarana Peribadatan Katolik yang terfasilitasi	0	2200	2200	2200	2200	4,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu	Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu yang ditingkatkan	1289	1289	1289	1289	1289	12,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu	Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang mendapatkan bantuan operasional	330	330	330	330	330	36,8	Pusat dan Daerah		Kemenag
Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan bantuan	44	44	44	44	44	57,2	Pusat dan Daerah		Kemenag
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	35	35	35	35	35	0,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	27	27	27	27	27	3,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Prop : Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga							678,1			
Keluarga Sakinah yang Terbina	Keluarga Sakinah yang Terbina	18000	18000	18000	18000	18000	91,8	Pusat dan Daerah		Kemenag
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	Jumlah pasangan yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	241000	353000	452000	577000	738000	534,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	Bimbingan bagi keluarga Kristiani	17	17	17	17	17	12,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	805	805	805	805	805	9,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga Sukinah yang mendapat bimbingan	1559	1559	1559	1559	1559	27,2	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	Keluarga Hittasukhaya yang mendapat pembinaan	100	138	190	263	363	3,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Prop : Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal							51,1			
Register Halal	Register Halal	88000	88000	88000	88000	88000	4,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Sertifikat Halal	Sertifikat Halal	220000	220000	220000	220000	220000	4,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	18	18	18	18	18	7,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
Naskah Standardisasi Halal	Naskah Standardisasi Halal	32	32	32	32	32	9,9	Pusat dan Daerah		Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	220000	220000	220000	220000	220000	8,7	Pusat dan Daerah		Kemenag
Stakeholder JPH Yang Terbina	Stakeholder JPH Yang Terbina	60	60	60	60	60	9,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
Stakeholder JPH Yang Terawasi	Stakeholder JPH Yang Terawasi	60	60	60	60	60	7,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Prop : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah							6.159,7			
Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina	30	100	100	100	100	25,4	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina	30	100	100	100	100	24,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	75	150	150	150	150	17,2	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	231000	231000	231000	231000	231000	123,6	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pengelolaan Asrama Haji	Pengelolaan Asrama Haji	1	1	1	1	1	16,1	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji yang terselenggara	Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji yang terselenggara	2	2	2	2	2	43,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang terselenggara	Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang terselenggara	10000	204000	204000	204000	204000	85,9	Pusat dan Daerah		Kemenag
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	Asrama Haji yang dikembangkan dan direvitalisasi	10	8	13	16	16	2.625,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang dibangun dan direvitalisasi	40	40	40	40	40	624,0	Pusat dan Daerah		Kemenag
Petugas haji yang profesional	Petugas haji yang ditingkatkan profesionalismenya	50	2288	2288	2288	2288	1.641,3	Pusat dan Daerah		Kemenag
Bimbingan Jemaah Haji	Bimbingan Jemaah Haji yang terselenggara	500	500	500	500	500	171,8	Pusat dan Daerah		Kemenag
Advokasi Haji	Advokasi Haji yang terselenggara	12	12	12	12	12	10,8	Pusat dan Daerah		Kemenag
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	12	12	12	12	12	124,5	Pusat dan Daerah		Kemenag
Petugas Haji di Arab Saudi	Terselenggaranya ibadah haji oleh Petugas Haji di Arab Saudi	1	1	1	1	1	594,6	Arab Saudi		Kemenag
Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi	Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	13,0	Arab Saudi		Kemenag
Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	10,0	Arab Saudi		Kemenag
Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	Jamaah haji yang mendapatkan Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	8,9	Arab Saudi		Kemenag
KP : Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan							386,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pemberdayaan dana sosial keagamaan							160,8			
<i>Pengamanan Aset Wakaf</i>	<i>Aset wakaf terlindungi</i>	200	250	300	350	400	66,6	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Legalitas Tanah Wakaf</i>	<i>Tanah wakaf tersertifikasi</i>	350	400	450	500	550	15,0	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Bantuan Operasional BWI</i>	<i>BWI yg memanfaatkan bantuan operasional</i>	35	35	35	35	35	44,2	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Bantuan Operasional BAZNAS</i>	<i>Baznas yg memanfaatkan bantuan operasional</i>	35	35	35	35	35	13,8	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Lembaga zakat yg terakreditasi</i>	<i>Lembaga zakat yg terakreditasi</i>	407	400	350	300	250	21,2	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
ProP : Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat							143,1			
<i>Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat</i>	<i>Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat</i>	816	850	900	950	1000	57,1	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Literasi Perekonomian dan Keuangan Syariah</i>	<i>Orang yang melek perekonomian dan keuangan syariah</i>	1500000	2000000	2500000	3000000	3500000	85,9	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
ProP : Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel							82,4			
<i>Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji</i>	<i>Jumlah Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji</i>	3	3	3	3	3	30,7	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
<i>Pengelolaan Keuangan Operasional Haji</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Keuangan Operasional Haji</i>	4	4	4	4	4	51,7	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemenag</i>
PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER							3.583,7			
KP : Peningkatan Budaya Literasi							2.835,0			
ProP : Pengembangan budaya kegemaran membaca							1.123,5			
<i>Pembinaan dan pengembangan perpustakaan</i>	<i>Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan</i>	900	900	900	900	900	500,4	<i>Daerah</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pengembangan budaya gemar membaca</i>	<i>Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca (Lokasi)</i>	100	100	100	100	100	132,7	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pengembangan budaya literasi melalui TBM</i>	<i>Perluasan Akses Sumber Belajar Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar</i>	320	320	320	320	320	6,4	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Pengembangan budaya literasi melalui TBM</i>	<i>Penguatan Kapasitas Fasilitator</i>	220	220	220	220	220	1,5	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Pengembangan budaya literasi melalui TBM</i>	<i>Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber</i>	200	200	200	200	200	2,0	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penguatan literasi dalam pembelajaran</i>	<i>Persentase jumlah siswa yang melakukan kegiatan membaca untuk kesenangan/ membaca buku nonteks pelajaran 60 menit sehari</i>	5	10	5	15	10	110,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Penguatan literasi dalam pembelajaran</i>	<i>Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran</i>	10	20	10	30	20	220,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Penguatan literasi dalam pembelajaran</i>	<i>Rasio minimal ketersediaan buku nonteks pelajaran terhadap jumlah siswa 1</i>	5	10	5	15	10	110,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Peningkatan indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah</i>	<i>Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah</i>	53,00	54,75	56,50	58,50	60,00	1,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Pengendalian Penggunaan Dana Desa</i>	<i>Jumlah regulasi penggunaan dan pengendalian Dana Desa</i>	33	33	33	33	33	39,1	<i>33 Provinsi</i>		<i>Kemendes, PDT & TRANS</i>
<i>Fasilitasi literasi digital bagi masyarakat</i>	<i>Jumlah peserta literasi digital bagi masyarakat (termasuk peserta online)</i>	10000	20000	30000	40000	50000	0,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemen Kominfo</i>
ProP : Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi							481,7			
<i>Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional</i>	<i>Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-jurnal yang dilanggan</i>	574139	631553	688967	746381	746381	277,0	<i>Pusat</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional</i>	<i>Jumlah koleksi CKKR yang terhimpun</i>	350000	355000	360000	365000	365000	46,0	<i>Pusat</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Penilaian dan Pengawasan Perbukuan</i>	<i>Jumlah Penilaian dan Pengawasan Perbukuan</i>	4010	4050	4100	4200	4300	102,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan</i>	112	150	160	170	180	56,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
ProP : Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial							1.229,8			
<i>Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial</i>	<i>Jumlah perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial (Daerah)</i>	681	1048	1267	1634	2248	1.121,9	<i>Daerah</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial</i>	<i>Jumlah layanan Perpusnas berbasis inklusi sosial di Perpusnas (Perpusnas Jakarta)</i>	13	15	17	19	21	65,4	<i>Pusat</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial</i>	<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (UPT Bung Karno Blitar)</i>	10	11	12	13	14	12,0	<i>Pusat</i>		<i>Perpusnas</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial</i>	<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (UPT Bung Hatta Bukittinggi)</i>	10	11	12	13	14	12,0	<i>Pusat</i>		<i>Perpusnas</i>
<i>Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra</i>	<i>Jumlah Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra (eksemplar)</i>	46000	48000	50000	52000	54000	18,5	<i>BLEBI Abiyoso (Jawa Barat)</i>		<i>Kemensos</i>
KP : Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra							289,3			
ProP : Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional							98,8			
<i>Lembaga Akses Diplomas Kebahasaan Terfasilitasi</i>	<i>Jumlah Lembaga Akses Diplomas Kebahasaan Terfasilitasi</i>	100	100	100	100	100	7,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Penugasan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri</i>	220	220	220	220	220	91,7	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>
ProP : Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas							190,4			
<i>Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra</i>	<i>Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra</i>	18710	19000	19000	19000	19000	144,5	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra</i>	<i>Jumlah Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra</i>	5000	5000	5000	5000	5000	45,9	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
<i>Perlindungan bahasa daerah yang terancam punah</i>	<i>Jumlah bahasa daerah terancam punah yang terlindungi</i>	72	112	152	192	232	0,0	<i>Pusat dan daerah</i>		<i>Kemendikbud</i>
KP : Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta							105,8			
ProP : Peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini							97,8			
<i>Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award (paket)</i>	<i>Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award (paket)</i>	1	1	1	1	1	27,1	<i>Pusat</i>		<i>LIPI</i>
<i>Pembinaan dan pengiriman Tim Nasional pada Kompetisi Matematika dan Sains Internasional</i>	<i>Jumlah medali dan/atau penghargaan yang diperoleh dari Kompetisi Matematika dan Sains Internasional</i>	1	1	1	1	1	4,8	<i>34 Provinsi</i>		<i>Kemen Ristek/BRIN</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendampingan peneliti remaja oleh fungsional peneliti</i>	<i>Produk riset dan produk inovasi sederhana yang dihasilkan oleh siswa pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan oleh fungsional peneliti</i>	0	200	200	200	200	40,0	34 Provinsi		Kemen Ristek/BRIN
<i>Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat</i>	<i>Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat</i>	2864	3000	3000	3000	3000	25,9	Pusat		Kemen Ristek/BRIN
ProP : Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi							8,0			
<i>Fasilitasi penguatan inovasi produksi di daerah yang berbasis sumber daya lokal</i>	<i>Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis sumber daya lokal yang dihasilkan</i>	0	10	10	10	10	4,0	34 Provinsi		Kemen Ristek/BRIN
<i>Dukungan perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa</i>	<i>Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang dikomersialisasikan</i>	0	10	10	10	10	4,0	34 Provinsi		Kemen Ristek/BRIN
KP : Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi							353,7			
ProP : Pengembangan mitra perpustakaan (library supporter)							141,9			
<i>Pengembangan Mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK</i>	<i>Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan</i>	500	500	500	500	500	40,4	Daerah		Perpusnas
<i>Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan</i>	<i>Jumlah tenaga Perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan</i>	1417	1500	1600	1700	1800	85,2	Pusat dan daerah		Perpusnas
<i>Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan</i>	<i>Jumlah pustakawan yang tersertifikasi</i>	440	700	700	700	700	12,5	Pusat dan daerah		Perpusnas
<i>Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan</i>	<i>Peningkatan Pelibatan Publik di TBM</i>	38	38	38	38	38	2,8	34 Provinsi		Kemendikbud
<i>Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan</i>	<i>Penguatan Tata Kelola TBM</i>	27	27	27	27	27	1,0	34 Provinsi		Kemendikbud
ProP : Pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi							211,8			
<i>Perluasan layanan perpustakaan berbasis digital</i>	<i>Jumlah Pojok Baca Digital (Lokasi)</i>	250	300	360	432	500	211,8	Provinsi/Kabupaten/Kota		Perpusnas
JUMLAH							36.143,8			

Keterangan :

Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	1.383.141,9			
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87				
	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60				
	Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)				
	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4%, BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1%, BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15				
	Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1				
	Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,16667	115942,7083	116142,7083	116342,7083	116342,7083				
	Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20				
	Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325				
	Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65				
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit)	48391	154310	164310	241415	261565	615.989,8			
	Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	157762	194763	253986	291403	355387				
	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPER (rumah tangga)	58460	85000	110000	135000	161540				
	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	112500	216154	200000	220000	220000				
	Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	219005	152510	152510	208765	212210				
	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48				
	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)	1221	5779	1000	1000	1000				
ProP : Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)	48391	154310	164310	241415	261565	431.169,5			
	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	157762	194763	253986	291403	355387				
	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) (persil)	0	10000	10000	10000	10000				
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Terbangun melalui Fasilitasi Pemerintah (Unit)	12750	2700	2700	4000	4000	1.500,0	34 Provinsi	KEMEN PU&PERA	
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Mendapat Bantuan (unit)	0	3000	3000	4500	4500	1.125,0	34 Provinsi	KEMEN PU&PERA	
Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya Mendukung KSPN	Jumlah pembangunan baru rumah swadaya mendukung KSPN (unit)	300	440	440	660	660	250,0	10 KSPN Super Prioritas	KEMEN PU&PERA	
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja, dan ASN	Jumlah Rumah Susun yang Terbangun (unit)	3341	4600	4600	6900	6900	13.300,1	34 Provinsi	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) KEMEN PU&PERA	
Pembangunan Rumah Susun Menggunakan Skema KPBU	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun Menggunakan Skema KPBU (unit)	0	0	0	5000	10000	0,0	6 Metropolitan	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) KPBU	
Pembangunan rumah ASN di ibu kota negara	Jumlah rumah yang dibangun (unit)	0	2000	2000	3000	3000	4.750,0	Ibu Kota Negara	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) KEMEN PU&PERA	
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN, termasuk Perumnas dan holding	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	20253	20253	42660	42660	67449	28.000,0	6 Metropolitan	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) BUMN	
Pembangunan Rumah Layak Huni oleh BUMN, termasuk Perumnas dan holding	Jumlah rumah yang terbangun (unit)	35125	70510	106326	142743	179938	20.000,0	34 Provinsi	BUMN	
Pembangunan hunian tetap in situ	Jumlah hunian tetap yang terbangun (unit)	100000	-	-	-	-	5.000,0	Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala	Pemerintah Daerah	
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun (unit)	2000	1570	1570	2355	2505	2.030,1	34 Provinsi	KEMEN PU&PERA	
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni secara	Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun (unit)	10000	10000	10000	10000	10000	2.887,5	34 Provinsi	DAK	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Fasilitasi Pelayanan Jasa (unit)	0	100000	100000	150000	150000	500,0	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Rumah Susun Sewa oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Rumah Susun Sewa yang dibangun (unit)	20000	30000	40000	60000	80000	109.250,0	34 Provinsi	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	Pemerintah Daerah
Pembangunan Rumah Susun oleh Swasta/Dunia Usaha	Jumlah Rumah Susun yang dibangun (unit)	100000	100000	100000	100000	100000	237.500,0	34 Provinsi	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	Swasta/Dunia Usaha
Pembangunan Rumah Susun Sewa oleh Masyarakat	Jumlah Rumah Susun Sewa yang dibangun (unit)	2384	4000	5000	6000	8000	5.076,8	34 Provinsi	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	Masyarakat
ProP : Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	102812	225842	200000	220000	220000	142.351,8			
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga)	58460	85000	110000	135000	161540				
Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui BP2BT, SBUM dan Penyelesaian SSB (rumah tangga)	312	68342	0	0	-	2.796,2	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA
Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga)	58460	85000	110000	135000	161540	10,2	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA
Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi	Jumlah rumah tangga yang terverifikasi untuk mendapatkan subsidi perumahan (rumah tangga)	102500	157500	200000	220000	220000	45,4	Pusat		KEMEN PU&PERA
Bantuan pembiayaan perumahan melalui TAPERA	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	50000	75000	100000	125000	150000	60.000,0	Pusat		TAPERA (Badan Hukum Milik Negara)
Fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT. SMF	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	8460	10000	10000	10000	11540	10.000,0	Pusat		PT. SMF (BUMN)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan FLPP (rumah tangga)	102500	157500	200000	220000	220000	69.500,0	34 Provinsi		SDI (Subsidi-Belanja Non KL)
ProP : Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (rumah tangga)	219005	152510	152510	208765	250910	27.708,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)	166000	72000	72000	108000	146700	13.470,2	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tangga miskin yg memperoleh bantuan rehab RTLH (unit)	14000	0	0	0	0	237,8	34 Provinsi		Kementerian Sosial
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Bantuan peningkatan kualitas (unit)	0	40000	40000	60000	60000	10.000,0	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung KSPN	Jumlah Rumah Swadaya di KSPN yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)	2450	510	510	765	765	250,1	10 KSPN Super Prioritas		KEMEN PU&PERA
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni secara	Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	36555	40000	40000	40000	43445	3.750,0	34 Provinsi		DAK
ProP : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan, termasuk PSU kawasan skala besar (unit)	22500	40000	50000	62500	75000	3.905,5			
Pembangunan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan PSU (unit)	22500	47970	47970	71950	71955	3.905,5	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA
ProP : Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (kabupaten/ kota)	48	48	48	48	48	512,0			
Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah NSPK terkait penataan bangunan dan lingkungan (NSPK)	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		KEMEN PU&PERA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	48	48	48	48	48	480,0	Kawasan Metropolitan		KEMEN PU&PERA
Fasilitasi Pengaturan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Kab/Kota)	48	48	48	48	48	12,0	Kawasan Metropolitan		Kemendagri
ProP : Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)	1221	5779	1000	1000	1000	10.342,9			
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah luasan kawasan permukiman yang dibangun dan dikembangkan (Hektar)	258	742	1000	1000	1000	5.459,6	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat</i>	<i>Jumlah luasan permukiman yang dibangun infrastruktur berbasis masyarakat (Hektar)</i>	963	5037	0	0	0	4.703,3	34 Provinsi		KEMEN PU&PERA
<i>Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi</i>	<i>Jumlah unit rumah (Unit)</i>	0	600	800	1000	1200	180,0	34 Provinsi		DAK
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	62352	62352	62352	62352	62352	333.278,1			
	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	303028,2607	284145,2607	284145,2607	284145,2607	284145,2607				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	1730314	1730314	1730314	1730314	1730314				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	39	56	74	74	76				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	223005,1183	255938,3636	316629,6299	376144,709	409077,9543				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	144127,6836	164717,3527	308845,0364	473562,3891	494152,0582				
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	87	87	87	88	88				
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	83	83	83	84	84				
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	15600000	17100000	19100000	21600000	24600000				
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	48309000	48808000	49309000	49813000	50465000				
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)	5030000	5858000	7100000	8772000	10892000				
	Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	67,2	75,4	83,6	91,8	100				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0				
ProP : Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pembangunan SPAM Regional (lpd)	2030	2030	2030	2030	2030	329.539,6			
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM (lpd)	4041,6	6062,4	8083,2	10104,0	12124,8				
	Perluasan SPAM (SR)	288711,7	433067,6	577423,5	721779,3	866135,2				
	Penurunan Non Revenue Water (NRW) PDAM (%)	31	30	28	27	25				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	21	28	28	28	28				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	82	168	168	168	168				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	24	50	74	113	113				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	39	56	74	74	76				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	78	108	113	116	116				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	12	13	25	37	37				
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota ,SPAM Regional, SPAM berbasis Masyarakat (lpd)	2214	2827	3440	4052	4665	25.411,3	Seluruh Provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	87560	131339	175119	218899	262679	8.028,9	Seluruh Provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan baru dan peningkatan SPAM bagi daerah yang belum memiliki layanan air	Jumlah Sambungan Rumah (Ipd)	1093	1639	2186	2732	3278	19.045,1	Seluruh Provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	DAK
Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	78065	117098	156130	195163	234196	7.158,4	Seluruh Provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	DAK
Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal (RT)	496464	498974	501484	503995	651729	22.547,5	Seluruh provinsi		DAK dan Pemerintah Daerah
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota ,SPAM Regional, SPAM berbasis Masyarakat (Ipd)	487	730	973	1217	1460	8.482,6	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pemerintah Daerah
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	34770	52155	69540	86925	104310	3.188,3	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pemerintah Daerah
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	43307	64960	86614	108267	129920	3.971,1	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pemerintah Daerah melalui hibah
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota ,SPAM Regional (Ipd)	2278	2896	3514	4133	4751	25.816,0	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KPBU, dana lainnya
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	45010	67516	90021	112526	135031	4.127,3	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KPBU, dana lainnya
SPALD-T Skala Kota/ Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	6270	6270	6270	6270	6270	18.682,0	28 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Kota/ Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	56082	56082	56082	56082	56082	1.283,0	28 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	APBD; Masyarakat Lainnya
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)	125000	106117	106117	106117	106117	8.241,0	168 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	21663	21663	21663	21663	21663	25.894,0	168 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	156365,4	156365,4	156365,4	156365,4	156365,4	6.346,0	168 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT)	2347304	2347304	2347304	2347304	2347304	59.396,0	Seluruh provinsi	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT)	593000	593000	593000	593000	593000	14.825,0	Seluruh provinsi	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	DAK
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	24	77	101	152	151	4.435,0	374 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	KEMEN PU&PERA
Truk Tinja	Jumlah truk tinja (unit)	86	86	173	259	259	383,0	374 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	DAK
Truk Tinja	Jumlah truk tinja (unit)	28	28	56	85	85	125,0	374 Kab/Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	39	46	46	46	47	25.391,0	224 kab/kota		KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		10	28	28	29	10.750,0	95 kab/kota		KPBU
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah kabupaten/kota yang menyediakan dukungan pembangunan TPA (kab/kota)	39	56	74	74	76	13.645,0	319 kab/kota		APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Truk Sampah	Jumlah truk sampah yang tersedia (unit)	1600	1600	1600	1601	1601	2.801,1	448 kab/kota		APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Alat Berat	Jumlah alat berat di TPA (unit)	39	46	46	46	47	1.120,0	224 kab/kota		KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Alat Berat	Jumlah alat berat di TPA (unit)		10	28	28	29	570,0	95 kab/kota		KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)</i>	<i>Jumlah kapasitas sampah yang dikelola unit TPS3R (ton/hari)</i>	283	283	565	848	848	1.036,1	120 kab/kota		DAK
<i>Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)</i>	<i>Jumlah kapasitas sampah yang dikelola unit TPS3R (ton/hari)</i>	189	189	377	565	565	691,0	120 kab/kota		KEMEN PU&PERA
<i>Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)</i>	<i>Jumlah kapasitas sampah yang dikelola unit TPS3R (ton/hari)</i>	83	83	166	250	250	304,9	Tersebar		APBD
<i>Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)</i>	<i>Jumlah TPST yang terbangun (unit)</i>	7	8	15	23	22	5.844,0	55 kab/kota		KEMEN PU&PERA
ProP : Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%)	5	25	45	65	100	3.023,6			
	Persentase PDAM dengan Tarif Full Cost Recovery (%)	50	63	75	88	100				
	Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll) (%)	20	40	60	80	100				
	Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (provinsi)	33	33	33	33	33				
	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik (provinsi)	33	33	33	33	33				
	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (%)	40	55	70	85	90				
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum di kabupaten/kota (kab/kota)</i>	509	509	509	509	509	1.055,0	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA
<i>Peningkatan Kerjasama Investasi Penyelenggara SPAM</i>	<i>Jumlah BUMN/ BUMD yang difasilitasi dalam rangka kerjasama investasi (BUMN/ BUMD)</i>	14	11	21	21	23	76,4	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA
<i>Peningkatan Kinerja BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM</i>	<i>Jumlah BUMN/ BUMD yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja (BUMN/ BUMD)</i>	30	32	32	32	30	261,3	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA
<i>Penyusunan Business Plan pada BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM</i>	<i>Jumlah BUMN/ BUMD yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Business Plan (BUMN/ BUMD)</i>	12	12	12	12	12	38,9	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	Jumlah PDAM yang melakukan penyusunan bussiness plan (PDAM)	30	124	76	77	77	13,4	Seluruh provinsi		Pemerintah Daerah
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen rencana daerah (provinsi)	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		Kemendagri
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen daerah dan kapasitas(provinsi)	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		Kemendagri
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam Dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan Daerah melalui Sistem Informasi(provinsi)	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		Kemendagri
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman (APBD	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan kebijakan nasional air minum dan sanitasi dalam dokumen perencanaan daerah (kab/kota)	0	514	514	514	514	61,6	514 kab/kota		Pemerintah Daerah
Implementasi Dokumen SSK (APBN)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)	66	66	62	62	52	308,0	Seluruh provinsi	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	KEMEN PU&PERA
Implementasi Dokumen SSK (APBD Provinsi)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)	66	66	62	62	52	77,0	308 kab/kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Pemerintah Provinsi
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)	87	87	87	88	88	218,5	437 kab/kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	KEMEN PU&PERA
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)	87	87	87	88	88	109,4	437 kab/kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Pemerintah Provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBN)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)	83	83	83	84	84	208,5	417 kab/kota		KEMEN PU&PERA
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBD Provinsi)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)	83	83	83	84	84	104,4	417 kab/kota		Pemerintah Provinsi
Fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi di daerah	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (provinsi)	34	34	34	34	34	34,0	34 Provinsi		Kemendagri
Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/keurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (%)	40	55	70	85	90	445,1	Seluruh provinsi	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Kementerian Kesehatan
ProP : Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi (provinsi)	34	34	34	34	34	344,2			
	Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun (NSPK)	4	4	4	4	4				
	Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun (NSPK)	3	4	4	3	2				
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum (Kab/Kota)	101	102	102	102	102				
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota)	101	102	102	102	102				
Penyusunan Rancangan NSPK	Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun (unit)	4	4	4	4	4	16,0	Pusat	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	KEMEN PU&PERA
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	66	66	64	58	54	15,4	Pusat	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	KEMEN PU&PERA
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Provinsi)	34	34	34	34	34	15,4	Pusat	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Kemendagri
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBD)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	66	66	64	58	54	154,0	Seluruh provinsi	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Peraturan pengembangan SPAM yang tersusun(NSPK)</i>	3	4	4	3	2	11,2	<i>Pusat</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota)</i>	101	102	102	102	102	66,1	<i>508 kab/kota untuk pemenuhan akses dasar air minum dan Provinsi DKI Jakarta</i>		<i>Pemerintah Daerah</i>
<i>Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada (Kab/Kota)</i>	101	102	102	102	102	66,1	<i>508 kab/kota untuk pemenuhan akses dasar air minum dan Provinsi DKI Jakarta</i>		<i>Pemerintah Daerah</i>
ProP : Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	101	102	102	102	102	370,7			
	Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota)	514	514	514	514	514				
	Jumlah kab/kota yang memiliki effluent IPAL, IPLT, dan leachate TPA yang memenuhi syarat (kab/kota)		33	40	60	60				
<i>Pengawasan Kualitas Air Minum</i>	<i>Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (%)</i>	60	64	68	72	76	291,2	<i>Seluruh provinsi</i>		<i>Kementerian Kesehatan</i>
<i>Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) (Kab/Kota)</i>	101	102	102	102	102	50,0	<i>509 Kab/Kota</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota)</i>	<i>Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)</i>	0	33	40	60	60	29,5	<i>Seluruh provinsi</i>		<i>Kemen LHK</i>
KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik)	4,27	11,43	11,43	11,43	11,43	38.748,0			
	Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)	0	5	17	21	21				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management) (unit)	0	7	8	9	10				
ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Tambahan penyediaan air baku (m3/detik)	4,27	11,43	11,43	11,43	11,43	37.938,7			
	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)	3	5	7	9	10				
	Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah (unit)	3	5	7	9	10				
<i>Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar</i>	<i>Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>360,2</i>	<i>Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)</i>	<i>Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)</i>	<i>0,5</i>	<i>4,2</i>	<i>4,1</i>	<i>5,1</i>	<i>3,7</i>	<i>5.783,8</i>	<i>Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	<i>KEMEN PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyediaan air baku di kawasan perkotaan</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)</i>	1,1	2,0	2,3	2,3	2,1	3.320,8	<i>Kawasan Metropolitan Banjarmasin, Denpasar, Manado, Palembang, Makassar, Perkotaan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kota Baru Sofji, Maja, Tanjungselor, Ibu Kota Negara</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	<i>KEMEN PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)</i>	0	0,58	0,64	0,70	0,72	856,7	<i>KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, DPP Danau Toba, DPP Padang-Bukittinggi, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KEK/DPP Tanjung Kelayang, KI Sadai, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, KI Tanggamus, KEK/DPP Tanjung Lesung, DPP Borobudur dsk, KI Madura, DPP Bali, KEK/DPP Mandalika, DPP Labuan Bajo, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong-Tanah Laut, DPP Derawan-Berau, KI Batulicin, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Tanah Kuning, DPP Wakatobi, KI/KEK Palu, DPP Manado-Likupang, KI/KEK Bitung, KEK/DPP Morotai, KI Teluk Weda, DPP Raja Ampat,</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	<i>KEMEN PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								KEK/DPP Singosari, KI Tenayan, KI Brebes, KEK Be Creative District Karawang, KEK Be Creative District Maja-Rangkas, KI Ladong, KI Katibung, KI Tanjung Buton, KI Sumbawa Barat, KI Pesawaran, KI Batanjung, KEK Kendal, KI Way Pisang, KI Takalar, DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih, DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh, DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya, DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya, DPP Baru Samba-Singkawang		
Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)	0	1,98	0,47	0	0	796,8	Kabupaten Cirebon, Pekalongan	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)	2,44	2,53	3,84	3,06	4,67	5.674,6	Tersebar	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	KEMEN PU&PERA
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	17.235,0	Wilayah Metropolitan Mebidangro, Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertasusila		KPBU
Rehabilitasi infrastruktur penyedia air baku	Jumlah unit infrastruktur penyedia air baku yang direhabilitasi (unit)	35	35	35	35	35	1.016,8	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah titik pembangunan sumur air tanah untuk air baku (unit)	1000	500	500	500	500	1.854,0	Kawasan 3T dan rawan air		Kemen ESDM
Pengawetan dan pengisian kembali air tanah	Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan recharge air tanah (unit)	0	7	8	9	10	340,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Pengembangan sistem penyediaan air baku terintegrasi (conjunctive use)	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)	0	7	8	9	10	510,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penegakan peraturan pengambilan air tanah</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas (Kab./ kota)</i>	19	19	19	19	19	190,0	<i>Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur</i>	<i>Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa</i>	<i>Kemen ESDM</i>
ProP : Penataan regulasi serta penguatan kelembagaan SDA	Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP)	0	2	2	0	0	136,3			
	Jumlah wilayah sungai yang memiliki kebijakan PSDA terpadu (wilayah sungai)	0	5	17	21	21				
<i>Penetapan peraturan pemerintah terkait SDA</i>	<i>Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP)</i>	0	2	2	0	0	4,0	<i>Pusat</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pembuatan dokumen pola dan rencana PSDA</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan PSDA wilayah sungai kewenangan pusat yang ditetapkan (dokumen)</i>	29	38	47	56	64	105,3	<i>Tersebar</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Penyusunan dokumen penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai</i>	<i>Jumlah pedoman penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai (dokumen)</i>	1	0	0	0	0	2,0	<i>Pusat</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai</i>	<i>Jumlah wilayah sungai yang dinilai kinerja pengelolaannya (wilayah sungai)</i>	0	2	2	3	3	15,0	<i>Tersebar</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air</i>	<i>Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air (provinsi)</i>	-	34	34	34	34	10,0	<i>Tersebar</i>		<i>Kemendagri</i>
ProP : Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan Sistem Informasi SDA (unit)	0	7	8	9	10	673,0			
	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (unit)	0	7	8	9	10				
<i>Pengembangan ICT (Information and Communication Technology)</i>	<i>Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan ICT pengelolaan infrastruktur SDA (unit)</i>	0	7	8	9	10	68,0	<i>Tersebar</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pengembangan GIS (Geographic Information System) dan Pemodelan Sumber Daya Air</i>	<i>Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan GIS dan pemodelan sumber daya air (unit)</i>	0	7	8	9	10	170,0	<i>Tersebar</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air (unit)	0	7	8	9	10	170,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Pengembangan sistem informasi air tanah	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi air tanah(unit)	0	7	8	9	10	170,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Pengembangan sistem informasi hidrogeologi	Jumlah CAT dengan sistem pengelolaan hidrogeologi terpadu(unit)	1	1	1	1	1	95,0	Tersebar		Kemen ESDM
KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi	a. Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19	41.541,7			
	b. Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio)	70	65	60	55	50				
	c. Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23				
	d. Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	30	29	29	28	28				
ProP : Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR							28.561,0			
Penyediaan fasilitas keselamatan jalan (marka jalan, rambu jalan, pagar pengaman, dan penerangan jalan umum, ATCS)	Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan (Provinsi)	33	33	33	33	33	7.500,0	Pusat		Kemenhub
Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) serta Sistem Informasi Terpadu di	Jumlah Kawasan yang Dibangun Sistem ATCS dan Sistem Informasi Terpadunya (kawasan)	1	1	1	1	1	255,4	Jawa Barat, DKI, Banten		Kemenhub
Pengembangan Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Perkotaan	Jumlah Kawasan yang Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasinya dikembangkan (kawasan)	1	1	1	1	1	234,5	Jawa Barat, DKI, Banten		Kemenhub
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraan bermotor (UPPKB) (Dukungan APBN)	Balai uji kelaikan kendaraan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)		295,0	Jawa Barat		Kemenhub
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraan bermotor (UPPKB) (Dukungan KPBU)	Balai uji kelaikan kendaraan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)		1.750,0	Jawa Barat		Kemenhub (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Lokasi yang ditangani dan disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	1	10	10	10	10	1.095,0	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara		Kemenuh
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (unit)	67	70	73	75	77	1.118,2	Pusat		Kemenuh
Penyediaan kapal navigasi	Jumlah kapal navigasi yang dibangun (unit)	10	14	18	22	25	1.000,0	Pusat		Kemenuh
Penyediaan Vessel Traffic Services Terintegrasi	Jumlah Vessel Traffic Services Terintegrasi yang disediakan (unit)	15	20	25	30	35	452,6	Pusat		Kemenuh
Pengadaan dan modernisasi sarana navigasi CNS/ATM	Jumlah sarana navigasi CNS/ATM disediakan dan dimodernisasi (Communication, Navigation, Surveillance/ air traffic management system) (unit)	-	1	1	1	1	335,3	Pusat		Kemenuh
Pengadaan Pesawat Udara Kalibrasi	Jumlah Pesawat Udara Kalibrasi yang dibangun (unit)	4	4	4	4	4	1.110,0	Pusat		Kemenuh
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan										
Pengadaan Peralatan SAR	Jumlah peralatan SAR yang disediakan (paket)	1	1	1	1	1	60,9	Pusat		Basarnas
Pembangunan Prasarana SAR	Jumlah Prasarana SAR yang disediakan (paket)	1	1	1	1	1	60,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra darat										
Penyediaan Rescue Truck Tipe I	Jumlah Rescue Truck Tipe I yang disediakan (unit)	6	20	20	20	20	161,3	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rescue Truck Tipe II	Jumlah Rescue Truck Tipe II SAR yang disediakan (unit)	32	34	34	34	34	126,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rescue CarTipe I	Jumlah Rescue CarTipe I yang disediakan (unit)	4	15	15	15	15	345,6	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rescue CarTipe II	Jumlah Rescue CarTipe II yang disediakan (unit)	31	33	33	33	33	307,1	Pusat		Basarnas
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra laut										
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1	Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.120,0	Pusat		Basarnas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2	Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1.960,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rescue Boat Kelas 1	Jumlah Rescue Boat Kelas 1 yang disediakan (unit)	1 (berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	3 (2 selesai dan 1 berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	2 (2 selesai)	1.880,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rescue Boat Kelas 2	Jumlah Rescue Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)	6	6	6	6	6	1.752,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1	Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 1 yang disediakan (unit)	12	15	15	15	15	354,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2	Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)	8	15	15	15	15	301,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Landing Craft	Jumlah Landing Craft yang disediakan (unit)	100	70	70	80	80	170,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Rafting Boat	Jumlah sRafting Boat yang disediakan (unit)	-	30	30	40	40	28,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra udara										
Penyediaan Pesawat Fixed Wing	Jumlah Pesawat Fixed Wing yang disediakan (unit)	-	-	-	1	1	1.800,0	Pusat		Basarnas
Penyediaan Medium Helicopter	Jumlah Medium Helicopter yang disediakan (unit)	1 (berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	3 (2 selesai dan 1 berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	2 (2 selesai)	1.880,0	Pusat		Basarnas
Pengelolaan Operasi SAR										
Pengelolaan Operasi SAR	Jumlah Dokumen Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (satker)	44	44	44	44	44	464,8	Pusat		Basarnas
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR										
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Jumlah sistem komunikasi SAR yang disediakan (paket)	4	6	6	8	8	160,0	Pusat		Basarnas
ProP : Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan							12.980,7			
Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah SDM transportasi yang berkompeten									
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat (orang)	5428	5289	5369	5463	5660	1.170,8	Sumsel, Jateng, Jatim, Jabar, Bali, Kalbar		Kemenuh
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat (orang)	4652	7746	9393	9673	9574	655,1	Sumsel, Jateng, Jatim, Jabar, Bali, Kalbar		Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024					
<i>Pembentukan Road Safety Center/ Sekretariat Keselamatan Jalan</i>	<i>Jumlah kelembagaan Keselamatan Jalan yang dibentuk oleh Pemda (pemda)</i>	20	20	20	20	20	25,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemenhub</i>	
Pembinaan Potensi SAR <i>Pengembangan SDM pencarian dan pertolongan yang kompeten</i>	<i>Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten (orang)</i>	10000	10000	10000	10000	10000	459,2	<i>Pusat</i>		<i>Basarnas</i>	
KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	20	20	20	20	20	100.435,9				
	Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	20	20	20	20	20					
ProP : Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menetapkan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana banjir (wilayah sungai)	10	10	10	10	10		1.211,1			
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami dan likuefaksi (kab./kota)	2	1	2	1	2					
	Jumlah kabupaten/Kota dengan peta risiko penurunan muka tanah (kab./kota)	2	2	2	2	2					
<i>Penyusunan pedoman rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana</i>	<i>Jumlah dokumen pedoman peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan (dokumen)</i>	0	4	0	0	0	4,0	<i>Terpusat</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir</i>	<i>Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)</i>	5	8	9	10	10	210,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu, Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Cilegon, Serang, Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Palopo, Konawe, Gorontalo, Sorong, Bandung,</i>		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir</i>	<i>Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)</i>	0	2	2	2	2	40,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu, Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Cilegon, Serang, Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Palopo, Konawe, Gorontalo, Sorong, Bandung,</i>		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami (kab./kota)	1	1	1	1	1	15,0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua		KEMEN PU&PERA
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi (kab./kota)	1		1		1	9,0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuefaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogya		KEMEN PU&PERA
Penyusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara jawa	Jumlah kawasan perkotaan pesisir utara jawa yang memiliki rencana pengelolaan pesisir terpadu(kawasan perkotaan)	0	1	1	1	1	40,0	Terpusat	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA
Penyusunan peta risiko dan rencana induk penurunan tanah	Jumlah peta risiko penurunan tanah di kawasan prioritas (unit)	2	2	2	2	2	2,1	Terpusat		Kemen ESDM
Peraturan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah peraturan penataan bangunan dan lingkungan (unit)	1	1	1	1	1	10,0	Terpusat		KEMEN PU&PERA
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	Jumlah kab/kota terselenggara pembinaan dan pengawasan bangunan gedung dan penataan lingkungan(kab./kota)	48	48	48	48	48	871,0	509 Kabupaten/ Kota		KEMEN PU&PERA
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan (provinsi)		34	34	34	34	10,0	Tersebar		Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir (wilayah sungai)	20	20	20	20	20	46.961,9			
	Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan bencana lumpur dan sedimen (wilayah sungai)	5	5	5	5	5				
	Jumlah provinsi yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir (provinsi)	21	21	21	21	21				
	Jumlah wilayah sungai yang ditingkatkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (wilayah sungai)	10	20	20	20	20				
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di WS kritis (Km)	23,7	13	15	15	18	2.991,5	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)	32,2	14	10	11	4	2.845,0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Prioritas lainnya (Km)	61,8	50	55	60	65	6.777,2	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir		KEMEN PU&PERA
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir	Panjang Infrastruktur pengendali banjir sungai kewenangan daerah yang dibangun (km)	14,4	20	25	30	35	746,4	Tersebar		Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/ kota)
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis (unit)	3	5	8	10	10	1.003,5	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)	3	4	4	10	10	866,0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)	Jumlah kota dengan peningkatan sistem drainase utama (kota)	20	20	20	20	20	3.870,0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai melintasi perkotaan yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir		KEMEN PU&PERA
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana bencana banjir	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (km)	5	8	8	10	10	3.480,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis (unit)	2	5	10	15	20	525,0	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)	12	10	10	15	20	700,0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir		KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai	Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan (unit)	14	15	15	15	15	1.145,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan tanggul penahan lumpur di wilayah terdampak bencana	Panjang tanggul dan infrastruktur penahan lumpur sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi (km)	28	10	8	7	5	130,0	Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)	12,8	14,1	14,5	15,3	15,2	641,5	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA
Pengaman pesisir pantai utara Jakarta	Pengaman pesisir pantai utara Jakarta dengan skema KPBU (km)	0	7,3	7,3	7,3	7,3	13.370,0	Provinsi DKI Jakarta	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya	Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)	8,8	10	15	20	20	7.656,8	Kawasan prioritas lainnya dan pulau pulau terluar		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Ketahanan kawasan pesisir dan pulau kecil terluar</i>	<i>Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kumulatif)</i>	20	20	20	20	20	124,0	<i>Kawasan pesisir dan pulau kecil terluar</i>		KKP
<i>Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana</i>	<i>Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan ketahanan infrastrukturnya terhadap risiko bencana (wilayah sungai)</i>	10	20	20	20	20	90,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis</i>		KEMEN PU&PERA
ProP : Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan penggunaan air tanah (kab./kota)	2	4	5	4	1	805,3			
	Jumlah daerah aliran sungai yang melakukan pengembangan peringatan dini bencana banjir (DAS)	5	5	5	5	5				
	Jumlah kawasan yang membangun sistem peringatan dini bencana longsor (kawasan)	7	7	7	7	7				
<i>Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (kab./kota)</i>	16	19	19	19	19	312,0	<i>Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur</i>	<i>Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa</i>	<i>Kemen ESDM</i>
<i>Pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (kab./kota)</i>	16	19	19	19	19	280,8	<i>Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur</i>	<i>Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa</i>	<i>Kemen ESDM</i>
<i>Pengembangan sistem peringatan dini banjir</i>	<i>Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai kritis (unit)</i>	4	4	4	4	4	50,0	<i>DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan</i>	<i>Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis</i>	KEMEN PU&PERA
<i>Pengembangan sistem peringatan dini banjir</i>	<i>Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai prioritas lainnya (unit)</i>	3	3	3	3	3	37,5	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir</i>		KEMEN PU&PERA
<i>Pemasangan sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor</i>	<i>Jumlah sistem peringatan dini bencana longsor yang dibangun (unit)</i>	25	25	25	25	25	125,0	<i>Tersebar</i>		<i>Kemen ESDM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Restorasi dan konservasi infrastruktur alami	Jumlah wilayah sungai prioritas yang dikonservasi (wilayah sungai)	4	4	4	4	4	51.457,6			
	Jumlah kawasan rawa dengan peningkatan tata kelola air (kawasan)	0	3	3	3	3				
Konservasi wilayah sungai	Jumlah wilayah sungai yang dikonservasi	4	4	4	4	4	60,0	Tersebar		Kemen LHK
Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa	Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya	0	3	3	3	3	180,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)	4442,8	4442,8	4442,8	4442,8	4442,8	5.090,7	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang tertayani IPAL Komunal (SR)	21103,5	21103,5	21103,5	21103,5	21103,5	1.589,9	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	DAK/PEMDA
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang tertayani IPAL Komunal (SR)	29989,1	29989,1	29989,1	29989,1	29989,1	1.128,4	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	APBD/Masyarakat /Badan Usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang tertayani IPAL Kota/Regional (SR)	2056,24	2056,24	2056,24	2056,24	2056,24	6.160,8	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang tertayani IPAL Kota/Regional (SR)	18506,2	18506,2	18506,2	18506,2	18506,2	423,4	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	APBD/Masyarakat /Badan Usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT)	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	797,4	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	DAK/PEMDA
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT)	637,9	637,9	637,9	637,9	637,9	3.189,6	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	APBD/Masyarakat /Badan Usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.34

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Jumlah TPA yang dibangun (unit)	4	4	4	4	5	5.954,2	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	167,5	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.35

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)	136,07	136,07	136,07	136,07	136,07	251,3	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	DAK/PEMDA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	73,9	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	APBD/Masyarakat /Badan Usaha
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang tertayani IPAL Komunal (SR)	4832	4832	4832	4832	4832	4.537,0	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.36

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang tertayani IPAL Komunal (SR)	22952	22952	22952	22952	22952	1.729,4	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	DAK/PEMDA
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang tertayani IPAL Kota/Regional (SR)	0	628,4	628,4	628,4	628,4	14.473,0	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT)	53147,8	53147,8	53147,8	53147,8	53147,8	884,6	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	DAK/PEMDA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Jumlah TPA yang dibangun (unit)	3	0	1	2	1	4.566,0	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	80,2	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	120,4	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	DAK/PEMDA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.37

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)	14,2	15,1	15,8	16,2	16,5	253.148,4			
	Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (Kumulatif)	14	17	28	40	50				
	Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	10	20	20	20	20				
	Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (persen) (kumulatif)	2	7	13	19	25				
	Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	229,2	7192,7	7392,7	7592,7	7592,7				
ProP : Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)	2	3	3	3	3	70,0			
<i>Perencanaan pembangunan bendungan baru dengan protokol berkelanjutan</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan bendungan protokol berkelanjutan (dokumen)</i>	1	1	1	1	1	25,0	Terpusat		KEMEN PU&PERA
<i>Perencanaan pembangunan bendungan dengan skema KPBU</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan bendungan dengan skema KPBU (dokumen)</i>	1	1	1	1	1	25,0	Terpusat		KEMEN PU&PERA
<i>Perencanaan pengembangan tampungan alami</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)</i>	0	1	1	1	1	20,0	Terpusat		KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	38	30	19	22	135.046,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.38

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Bendungan baru yang selesai dibangun</i>	<i>Jumlah pembangunan bendungan multiguna lanjutan (unit)</i>	<i>45 lanjutan 11 selesai</i>	<i>34 lanjutan 11 selesai</i>	<i>23 lanjutan 12 selesai</i>	<i>11 lanjutan 7 selesai</i>	<i>4 selesai</i>	<i>42.415,1</i>	<i>Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Tigadihadji, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Bener, Bendungan Sadawarna,</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.39

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Bulango Ulu, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Way Apu, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Beringin Sila, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang, Bendungan Tiu Suntut, Bendungan Jragung, Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Budong-Budong		
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (unit)	0	4 baru	3 baru 4 lanjutan	2 baru 7 lanjutan	2 baru 9 lanjutan	12.401,4	Bendungan Rongkong, Bendungan Matenggeng, Bendungan Mbay, Bendungan Pelosika, Bendungan Jenelata, Bendungan Digul, Bendungan Busuk, Bendungan Lambakkan, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Warsamson	18 Waduk Multiguna	KEMEN PU&PERA
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun dengan skema KPBU (unit)	0	0	0	0	5	20.000,0	Bendungan Merangin, Bendungan Muara Juloi, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Kusan	18 Waduk Multiguna	KPBU
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (unit)	0	0	0	0	2	60.000,0	Bendungan Kayan, Bendungan Mentarang	18 Waduk Multiguna	BUMN dan/ atau Suasta
Bendungan yang direhabilitasi	Jumlah bendungan yang direhabilitasi / ditingkatkan (unit)	2	1	1	1	0	230,0	Bendungan Wonogiri, Benanga, Bili-bili, Sutami		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.40

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (unit) (Kumulatif)	14	17	28	40	50	13.284,5			
	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya (unit)	8	9	11	11	16				
<i>Bendungan yang dimanfaatkan untuk PLTA</i>	<i>Jumlah energi listrik yang bersumber dari bendungan (MW)</i>	112,7	1,7	27,4	33,9	11,9	5.250,8	<i>Bendungan Bajulmati, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapir, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas,</i>	<i>BUMN dan/ atau Swasta</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.41

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Pamukkulu, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang		
Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku	Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik)	6,19	0,85	10,03	5,55	0,86	883,7	Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapir, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak,		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.42

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								<i>Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temej, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi</i>	<i>Luas lahan irigasi yang diairi dari bendungan (Ha)</i>	105461	14697	116375	53959	52057	5.771,0	<i>Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh,</i>		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.44

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Way Sekampung, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang		
Tampungan alami yang direvitalisasi	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi (unit) (kumulatif)	8	8	10	10	15	1.319,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya	Jumlah tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya (unit)	0	1	1	1	1	60,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
ProP : Peningkatan OP dan keamanan bendungan	Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun (unit)	10	20	20	20	20	1.000,0			
Peningkatan keamanan bendungan yang memiliki risiko tinggi	Jumlah bendungan dengan risiko tinggi yang dirurunkan indeks risikonya (unit)	10	20	20	20	20	450,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Konservasi daerah tangkapan air bendungan	Jumlah konservasi daerah tangkapan air bendungan (unit)	10	17	9	7	12	275,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Penyelesaian sertifikasi operasi bendungan	Jumlah bendungan yang memiliki sertifikat operasi (unit)	10	17	9	7	12	275,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare)	45000	113750	113750	113750	113750	101.833,1			
	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (Hektare)	874469,8	281382,5	281382,5	281382,5	281382,5				
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat	Luas jaringan irigasi permukaan dan irigasi rava kewenangan pusat yang dibangun (Hektare)	15000	79625	79625	79625	79625	50.925,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun (Hektare)	30000	34125	34125	34125	34125	11.655,0	Tersebar		Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.45

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi (Hektare)	80000,0	115403,3	115403,3	115403,3	115403,3	16.070,3	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi (Hektare)	783082,0	143826,2	143826,2	143826,2	143826,2	21.125,8	Tersebar		Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	Luas jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi (Hektare)	11387,8	22153,0	22153,0	22153,0	22153,0	2.056,9	Tersebar		KEMEN PU&PERA
ProP : Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	Daerah Irigasi yang melaksanakan modernisasi irigasi (kumulatif)	2	3	6	8	9	562,0			
Pengembangan sistem water accounting	Jumlah sistem data pemantau ketersediaan air yang dibangun (unit) (kumulatif)	0	1	1	1	1	60,0	Terpusat	18 Waduk Multiguna	KEMEN PU&PERA
Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)	Jumlah daerah irigasi dengan pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting) (daerah irigasi)	1	2	3	2	1	180,0	Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan	18 Waduk Multiguna	KEMEN PU&PERA
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi	Jumlah daerah irigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi (daerah irigasi)	5	10	10	10	11	322,0	Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan	18 Waduk Multiguna	KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare)	229,2	2192,7	2392,7	2592,7	2592,7	1.352,3			
Penyediaan air untuk komoditas perkebunan rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk perkebunan rakyat (unit)	0	1	1	2	2	24,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas peternakan rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk peternakan rakyat (unit)	0	2	2	2	2	32,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas hortikultura rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk hortikultura (unit)	0	2	3	3	3	44,0	Tersebar		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.46

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat</i>	<i>Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Hektare)</i>	229,2	1192,7	1192,7	1192,7	1192,7	1.252,3	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB		KEMEN PU&PERA
PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)						1.073.810,9			
	Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)									
	Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)									
	Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)									
KP : Konektivitas Jalan	a. Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)						758.029,5			
	b. Persentase kondisi mantap jalan nasional (97%)									
	c. Persentase kondisi mantap jalan provinsi (75%)									
	d. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (65%)									
ProP : Pembangunan Jalan Strategis	Panjang Jalan Lintas Utama Pulau dibangun						45.469,4			
<i>Jalan Akses pusat pertahanan Natuna</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	2	14,9	14,9	8,0	8,0	1.099,0	Kepulauan Riau		KEMEN PU&PERA
<i>Jembatan Klarik Cs</i>	<i>Jembatan yang dibangun (lokasi)</i>	1	-	-	-	-	107,3	Kepulauan Riau		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tq Berikat)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	10	12	80,0	Kepulauan Riau		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan lintas Bintan</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	25	-	250,0	Kepulauan Riau		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan perbatasan Kalbar</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	12	-	-	-	-	98,4	Kalimantan Barat		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan perbatasan Kaltara</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	47,4	70,2	36,4	19,0	19,0	1.933,3	Kalimantan Utara		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan perbatasan NTT</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	32,6	49,7	44,8	44,8	4,6	1.256,0	Nusa Tenggara Timur		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan Trans Kepulauan NTT</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	7	-	-	30,0	Nusa Tenggara Timur		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan Lintas Barat Aceh</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	10	100,0	Aceh		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan Lintas Barat Jambi</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	15	-	85,0	Jambi		KEMEN PU&PERA
<i>Jalan Lintas Pantura Banten</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	150	-	-	85,0	Banten		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.47

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Penggantian Jembatan Pantura Banten (cs)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	75,0	Banten		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas penghubung Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	29,0	57,2	57,2	57,2	2.330,7	Kalimantan Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Penghubung Sumsel	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	5	10	-	111,0	Sumatera Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Penghubung Sumut	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	10	10	6	6	475,6	Sumatera Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Selatan Kalsel	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	7	7,5	-	-	348,0	Kalimantan Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Tengah Aceh	Panjang jalan yang dibangun (km)	32,5	10,5	10,5	10,5	10,5	1.790,4	Aceh		KEMEN PU&PERA
Jembatan Sp. Uning - Takengon	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	140,0	Aceh		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Tengah Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	1,5	-	-	11,8	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Tengah Kalteng	Panjang jalan yang dibangun (km)	19,5478	13,0136	13,0136	5,8625	5,8625	562,6	Kalimantan Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Timur Riau	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	20	193,0	Riau		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Timur Sumatera	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	64,5	387,0	Lampung		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Utara Bali	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1083	1083	933	-	1.050,0	Bali		KEMEN PU&PERA
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	2,25	5	-	222,2	Bali		KEMEN PU&PERA
Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	80,0	Bali		KEMEN PU&PERA
Jalan Pansela Jawa Tengah	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	8	10	15	12,9	496,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Pansela Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun (km)	38	53,6	59,9	59,9	35,5	2.496,6	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Pansela Yogyakarta	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	17,6	6,0	6,0	-	495,1	Yogyakarta		KEMEN PU&PERA
Jalan Selingkar Wilis Ring 1 (APBD/ DAK)	Panjang jalan yang dibangun (km)	10	30	50	70	52	1.060,0	Jawa Timur		DAK/ PEMDA
Jalan Selingkar Wilis Ring 2 dan Radial (APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	19	48	75	75	45	786,0	Jawa Timur		KemenPUPR/ Pemd a
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)	786	-	-	-	-	1.218,7	Sulawesi Tengah		KEMEN PU&PERA
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	325,0	Sulawesi Tengah		KEMEN PU&PERA
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan dampak bencana Palu	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	23,2	Sulawesi Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Penghubung lintas timur dan barat Sumatera	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	7,5	15	-	200,0	Bengkulu		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR)	Panjang jalan yang dibangun (km)	15	20	25	15	5	856,0	Gorontalo		KEMEN PU&PERA
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Gorontalo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	20	20	-	-	960,0	Gorontalo		KEMEN PU&PERA
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Jabar	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	-	-	-	-	136,6	Jawa Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Perbatasan Kaltim	Panjang jalan yang dibangun (km)	62,6	54,7	32,3	5,9	5,9	1.580,3	Kalimantan Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	59	59	39	39	39	3.155,0	Papua	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Papua Barat	Panjang jalan yang dibangun (km)	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	2.768,6	Papua Barat	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.48

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jembatan di Jalan Trans Papua	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	3140	3230	2680	2325	2389	7.245,6	Papua	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	KEMEN PU&PERA
Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	887,4	967,4	967,4	887,4	887,4	2.206,5	Papua Barat	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	KEMEN PU&PERA
Jalan Perbatasan Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	6	6	6	6	200,0	Papua		KEMEN PU&PERA
Jembatan Pulau Lembeh (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	0,0	Sulawesi Utara		KemenPUPR (KPBU)
Jembatan Samota	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	150,0	Nusa Tenggara Barat		KEMEN PU&PERA
Jembatan Batam-Bintan (Potensi/ penyiapan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	10,0	Kepulauan Riau		KemenPUPR (KPBU)
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi/ penyiapan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	10,0	Sumatera Selatan		KemenPUPR (KPBU)
Jembatan Muna-Buton (Potensi/ Penyiapan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1	-	10,0	Sulawesi Tenggara		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses dan Jembatan Pulau Balang	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	549,3	Kalimantan Timur		KEMEN PU&PERA
Jembatan Pulau Laut (potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1	-	0	0,0	Kalimantan Selatan		KEMEN PU&PERA
Jembatan Lewamori	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	500,0	Nusa Tenggara Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Utara Papua (Jayapura - Sarmi)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	15	15	15	15	750,0	Papua		KEMEN PU&PERA
Jembatan Kapuas 3	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	300,0	Kalimantan Barat		KEMEN PU&PERA
Jembatan Srandaan	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	700,0	Yogyakarta		KEMEN PU&PERA
Jembatan Kahayan 2	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	300,0	Kalimantan Tengah		KEMEN PU&PERA
Jembatan Sambas Besar	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	1.860,0	Kalimantan Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan penghubung lintas (tapalang-mambi)	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	2	2	-	-	120,0	Sulawesi Barat		KEMEN PU&PERA
Konektivitas Fakfak (jalan SP. Moyana - Windesi)	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	-	5	5	-	120,0	Papua Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	4	5	5	-	135,0	Papua Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Bangka	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	10	12	16	12	350,0	Bangka Belitung		KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Belitung	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	8	10	7	210,0	Bangka Belitung		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Rembang - Lasem	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	5	5,5	5	5	249,9	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Tambakreja - Bantarsari (Lingkar Sidareja)(Pansela)	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	-	-	-	-	25,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jembatan Inari	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1	-	-	900,0	Papua Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan By Pass Balige	Panjang jalan yang dibangun (km)	7	6,5	-	-	-	135,0	Sumatera Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3,8	3,8	3,8	3,8	150,1	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	3,0	3,0	3,0	85,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.49

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh Pangarengan)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	2,9	2,9	-	50,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	3	-	-	45,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jembatan Ploso	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	200,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab. Purworejo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5,5	5,5	5,5	5,5	176,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Siantar By Pass	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3,6	3,6	3,6		96,0	Sumatera Utara		KEMEN PU&PERA
Koordinasi penerapan Rencana Aksi dan pembinaan pelaksanaan pengembangan infrastruktur di bidang	jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi dan pembinaan pelaksanaan di bidang transportasi (daerah)	-	167	323	479	633	18,5	Pusat		Kemendagri
Prop : Pembangunan Jalan Tol	Panjang jalan yang dibangun (2.500 km)						682.903,8			
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3.903,5	Tersebar (Jawa)		KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	125.858,0	Tersebar (Jawa)		KPBU
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	60	75	80	75,04	57,9	110.823,0	Jabodetabek		KPBU
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	30	50	60	50	57	43.309,0	Tersebar (Jawa)		KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan APBN)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	472	590	495	325	149	105.524,0	Tersebar (Sumatera)	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	472	590	495	325	149	203.026,0	Tersebar (Sumatera)	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	KPBU
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	2	2	2	2	2,13	2.661,8	Tersebar (Kalimantan)		KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	15	20	25	25	12,1	25.514,1	Tersebar (Kalimantan)		KPBU
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3.061,0	Tersebar (Sulawesi)		KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	10	15	20	20	11,2	15.153,5	Tersebar (Sulawesi)		KPBU
Jalan Tol Semarang - Demak (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	-	11,5	5.300,0	Jawa Tengah	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KPBU
Jalan Tol Semarang - Demak (Dukungan APBN)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	-	15,5	7.100,0	Jawa Tengah	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Samarinda - Bontang (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	-	5	2.970,0	Kalimantan Timur		KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.50

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	-	10	1.700,0	Jawa Timur		KPBU
Jalan Tol Bandara Juanda - Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	-	25	8.500,0	Jawa Timur		KPBU
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo - Tanjung Perak	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	-	8	3.500,0	Jawa Timur		KPBU
Jalan Tol Perkotaan Medan	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	-	-	10	20	15.000,0	Sumatera Utara		KPBU
ProP : Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	Panjang jalan yang dibangun (KM)						9.659,0			
Jalan Akses KEK Galang Batang	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1,8	-	-	-	11,8	Kepulauan Riau		KEMEN PU&PERA
Jalan Bypass BIL-Mandalika	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	17,4	10,2	11,2	12,6	1.392,0	Nusa Tenggara Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Seimangke	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	10	30,0	Sumatera Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KEK Sorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	6,8	6,8	6,8	6,8	444,1	Papua Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	8	7	5,5	249,9	Papua Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	4,5	6	2,13	-	120,0	Papua Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Gresik	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	5	60,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Madura	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	5	50,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	3	30,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Jorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	6	60,0	Kalimantan Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Batu Licin	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	6	60,0	Kalimantan Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Surya Borneo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	1	10,0	Kalimantan Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Ketapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	12	123,0	Kalimantan Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Kemingking	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	5	50,0	Jambi		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Tanggamus	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	2	20,0	Lampung		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI/KEK Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	7	60,0	Sulawesi Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KIPi Tanah Kuning	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	12,5	12,5	600,0	Kalimantan Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Borobudur	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	20	-	-	-	175,0	Yogyakarta		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,7	21,4	21,4	21,4	21,4	1.402,2	Nusa Tenggara Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	30	225,0	Sulawesi Tenggara		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	20	223,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Likupang (Dukungan KPBU)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	4	5	4,33	-	120,0	Sulawesi Utara		Kemenuh (KPBU)
Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	4,5	4	5	4,15	150,0	Nusa Tenggara Barat		Kemenuh (KPBU)
Jalan Akses wisata Samota (Dukungan DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	150	-	300,0	Nusa Tenggara Barat		Pemda/Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.51

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan akses KEK Arun	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	8	-	-	48,0	Aceh		KEMEN PU&PERA
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	10	10	-	165,0	Banten		KEMEN PU&PERA
Jalan akses KI Sadai	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	3,9	1	-	58,5	Bangka Belitung		KEMEN PU&PERA
Jembatan Nibung 1-2	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1	-	-	40,0	Bangka Belitung		KEMEN PU&PERA
Jalan akses KI Tanjung Enim	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	4	4,3	-	85,0	Sumatera Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	4	5,2	-	95,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal (Kecipir-Blangko - Kelampok), Kab. Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	5	3,0	-	95,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab.	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	-	5	5	-	80,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Danau Toba	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	16,5	12,5	12,5	12,5	1.333,0	Sumatera Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan akses KI Weda	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	25	275,0	Maluku Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Halmahera (Dukungan DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	6	8	12	745,8	Maluku Utara		Pemda/KemenPUP R
Jalan Lingkar Pulau Morotai	Panjang jalan yang dibangun (km)	14	9,7	9,7	9,7	-	422,8	Maluku Utara	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jembatan Kapota (Wakatobi)	Jembatan yang dibangun (km)	-	-	-	-	1	250,0	Sulawesi Tenggara		KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	Panjang jalan yang dibangun						3.700,8			
Jalan Akses Pelabuhan Seruyan (Teluk Sigintung)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	4	5	-	-	90,0	Kalimantan Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Bandara Bima	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	4	-	-	45,0	Nusa Tenggara Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Bandara Samsudin Noer	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	2	-	20,0	Kalimantan Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Bandara Tambelan (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	5	-	-	42,0	Kepulauan Riau		Pemda/KemenPUP R
Jalan Akses Bandara Waingapu	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	3	-	-	120,0	Nusa Tenggara Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Penajam Paser	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1	1	1	1	67,2	Kalimantan Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Depapre	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	3	-	-	72,0	Papua		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Gresik	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	5	-	60,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Kuala	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	4	-	40,0	Riau		KEMEN PU&PERA
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung Jabung	Panjang jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	400,0	Jambi		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses pelabuhan Kuala Tungkal	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2,5	2,5	2,5	2,5	240,0	Jambi		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Pancur	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	3,5	-	-	30,0	Kepulauan Riau		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.52

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses Pelabuhan Parlimbungan Ketek	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	5,625	5,625	5,625	5,625	636,0	Sumatera Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Patimban	Panjang jalan yang dibangun (km)	8					130,0	Jawa Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	5	-	50,0	Kalimantan Selatan		Pemda/KemenPUP R
Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan (dari PKN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	20	193,0	Riau		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Sangata	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	2	-	-	-	48,0	Kalimantan Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Sintete	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1,3	1,3	1,3	1,3	120,0	Kalimantan Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	8	80,0	Sumatera Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	8	8	8	8	816,0	Sumatera Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Stasiun Gede Bage	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	6,1	2,02	-	-	193,6	Jawa Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Terminal Tipe A	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	3	-	72,0	Sulawesi Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Terminal Tipe A	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	1,5	-	36,0	Sumatera Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	-	-	-	10,0	Kalimantan Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	3,8	-	-	30,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan akses pelabuhan Belang Belang	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	3	-	-	60,0	Sulawesi Barat		KEMEN PU&PERA
ProP : Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	Persentase mantap jalan nasional (97%)(persen)						423,0			
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep - Pamekasan	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3,8	-	-	-	30,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Bts. Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab. Blora	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	4	4	4,71	-	89,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer/ Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	6	-	-	-	30,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Akses Kaligua Gucci, Kab. Brebes dan Kab. Tegal	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	4,1	-	-	50,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	5	5,1	-	85,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	-	3,8	-	-	19,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Penghubung Lintas (Mamasa - Bts Sulsel)	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	5	5,3	-	120,0	Sulawesi Barat		KEMEN PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.53

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	Persentase mantap jalan provinsi, Kab/kota (persen)	70/59	71/60	72/62	73/63	75/65	13.154,1			
Penanganan jalan dan jembatan di Kab. Asmat	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	5	8	10	12	164,5	Papua		KEMEN PU&PERA
Penanganan jalan lingkaran Danau Anggi Giji dan Anggi Gida	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	4	4	-	-	60,0	Papua Barat		KEMEN PU&PERA
Penanganan Jalan lingkaran Numukan	Panjang Jalan lingkaran yang dibangun/ ditingkatkan (km)	-	-	10	-	-	80,0	Kalimantan Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan lingkaran Utara Lamongan (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	7	-	-	91,0	Jawa Timur		Pemda/KemenPUP R
Jalan Perkotaan (Imogiri - Sentolo)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2,3	2,3	-	-	30,0	Yogyakarta		KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Seram	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	5	5	5	5	250,0	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Mentawai (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	8,7	12,8	12,3	12,0	11,3	716,5	Sumatera Barat	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans Nias	Panjang jalan yang dibangun (km)	3,7	5,5	5,3	5,1	4,8	305,9	Sumatera Utara	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Buton (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	3,4	5,0	4,8	4,7	4,4	279,7	Sulawesi Tenggara	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans Pulau Muna	Panjang jalan yang dibangun (km)	5,3	7,8	7,5	7,3	6,9	436,8	Sulawesi Tenggara	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Simeleu (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5,8	8,5	8,2	8,0	7,5	476,0	Aceh	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans pulau Enggano	Panjang jalan yang dibangun (km)	5,3	7,8	7,5	7,3	6,9	436,8	Bengkulu	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Kei Besar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	15,5	22,8	21,9	21,3	20,1	1.274,2	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans Pulau Wetar	Panjang jalan yang dibangun (km)	11,7	17,2	16,5	16,0	15,1	960,2	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Moa (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,9	10,2	9,8	9,5	8,9	567,6	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.54

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Trans Pulau Selaru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,6	9,7	9,3	9,0	8,5	541,4	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans Pulau Aru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,1	9,0	8,6	8,4	7,9	502,2	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans Pulau Babar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,9	10,2	9,8	9,5	8,9	567,6	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans Pulau Buru	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,1	9,0	8,6	8,4	7,9	502,2	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Sumba (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	18,1	26,6	25,5	24,8	23,4	1.483,5	Nusa Tenggara Timur	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Trans Pulau Biak (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,9	18,9	18,2	17,6	16,6	1.054,4	Papua	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pemda/KemenPUP R
Jalan Penghubung Lintas (Salubatu - Bonehau - Batuisi - Jalan Trans Yapen)	Panjang jalan dibangun/ dipelihara (km)		6	7	7,6	5,8	250,8	Sulawesi Barat		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Pulau Weh	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	4	-	-	40,0	Aceh		KEMEN PU&PERA
Jalan akses wisata religi Cut Mutiah (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	21	-	-	148,0	Aceh		Pemda/KemenPUP R
Jalan Pulau Terluar Maluku	Panjang jalan yang dibangun (km)		25	25	25	25	1.680,0	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KEMEN PU&PERA
Jembatan Bian	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1	-	180,0	Papua		KEMEN PU&PERA
ProP : Pengembangan Wilayah Suramadu							2.719,4			
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	Luas lahan kawasan (ha)	50	50	25	25	25	384,8	Jawa Timur		BPWS
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	Panjang jalan dibangun/ dipelihara (km)	22,8	26,3	24,8	31,1	29,4	308,6	Jawa Timur		BPWS
Jalan akses menuju KKJSM yang terintegrasi dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	20	20	20	180,0	Jawa Timur		BPWS
KP : Konektivitas Kereta Api	Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) (km)						120.266,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.55

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index kategori 1 dan 2 (persen)	81,5	83	87	90	94				
	Panjang jalur KA yang beroperasi (km)									
	Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)									
ProP : Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota	Panjang Jalur Kereta Api yang dibangun (km)						85.834,1			
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhokseumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	13 (berlanjut)	13 (Selesai)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (Selesai)	458,5	Aceh	Kemhub	
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	35 (Selesai)	30 (berlanjut)	30 (berlanjut)	30 (berlanjut)	30 (Selesai)	1.050,0	Aceh	Kemhub	
Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	33 (Selesai)	25 (berlanjut)	25 (berlanjut)	25 (Selesai)	30 (berlanjut)	1.215,0	Sumatera Utara- Riau	Kemhub	
Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung -	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (Selesai)	20 (berlanjut)	550,0	Sumatera Selatan - Jambi	Kemhub	
Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	-	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	207,8	Bengkulu	Kemhub (KPBU)	
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	16.280,0	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung) Kemhub	
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	142 (berlanjut)	142 (berlanjut)	142 (Selesai)	-	-	42.000,0	Jakarta, Jawa Barat	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung) Kemhub (KPBU)	
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung -	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	38 (berlanjut)	17 Selesai	90 (berlanjut)	90 (berlanjut)	90 (berlanjut)	3.007,3	Jawa Barat	Kemhub	
Reaktivasi Jalur KA Pariaman-Naras - Sungai Limau	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (Selesai)	550,0	Sumatera Barat	Kemhub	
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung - Pandeglang-Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	17 (berlanjut)	17 (berlanjut)	Selesai	20 (berlanjut)	900,0	Banten	Kemhub	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.56

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	24 (berlanjut)	24 (berlanjut)	1.010,0	Jawa Barat		Kemenhub (KPBU)
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	24 (berlanjut)	24 (berlanjut)	1.010,0	Jawa Barat		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	6 (berlanjut)	6 (selesai)	12 (berlanjut)	12 (berlanjut)	12 (selesai)	2.638,7	Sulawesi Selatan	Kereta Api Makassar-Pare Pare	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	43 (selesai) 64 (berlanjut)	64 (selesai)	12 (berlanjut)	12 (berlanjut)	12 (selesai)	3.790,4	Sulawesi Selatan	Kereta Api Makassar-Pare Pare	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	23 (selesai)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	25 (berlanjut)	25 (selesai)	1.210,0	Jawa Timur		Kemenhub
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	325,0	Bali		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	2.770,0	Bali		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan KA Trans Kalimantan (Balikpapan - Banjarmasin)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	450,0	Kalimantan Timur		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Pemantang Stantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	305,0	Sumatera Utara		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Pemantang Stantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	1.105,0	Sumatera Utara		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (berlanjut)	96 (berlanjut)	96 (berlanjut)	96 (berlanjut)	96 (selesai)	3.001,4	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah		Kemenhub, Pemda, KPBU
Pembangunan Jalur Ganda KA Banjar - Kroya	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	500,0	Jawa Tengah, Jawa Barat		Kemenhub
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai); 15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	800,0	Banten		Kemenhub
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	8 (berlanjut)	8 (berlanjut)	8 (selesai)	700,0	Sumatera Selatan		Kemenhub (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.57

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Panjang Jalur Kereta Api yang ditingkatkan (km)						12.905,3			
	Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)									
<i>Peningkatan Jalur KA di Banten (Rangkasbitung-Merak)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan</i>	15	15	15	15	9	676,4	Banten		Kemenuhub
<i>Peningkatan Jalur KA di Sumatera Utara (Araskabu - Tebing Tinggi - Rantau Prapat dan Tebing Tinggi - Siantar)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan</i>	128	40	40	20	4	1.456,2	Sumatera Utara		Kemenuhub
<i>Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang- Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan</i>	14	5	20	20	10	1.017,1	Sumatera Barat		Kemenuhub
<i>Peningkatan Jalur KA di Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)</i>	8	20	20	20	6	438,8	Sumatera Selatan		Kemenuhub
<i>Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)</i>	100	56	-	-	-	209,6	Jawa Barat		Kemenuhub
<i>Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)</i>	91	20	20	30	53	699,0	Jawa Tengah		Kemenuhub
<i>Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-</i>	<i>Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)</i>	65	60	70	70	60	908,2	Jawa Timur		Kemenuhub
<i>Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api</i>	<i>Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)</i>	1	1	1	1	1	7.500,0	Pusat		Kemenuhub
ProP : Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara:	Terbangunnya KA akses Pelabuhan dan Bandara (km)						2.622,2			
<i>Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas</i>	<i>KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)</i>	2	-	-	-	-	7,5	Jawa Tengah		Kemenuhub
<i>Pembangunan KA akses Pelabuhan Teluk Lamong</i>	<i>KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)</i>	4	4	4	4		200,0	Jawa Timur		Kemenuhub
<i>Pembangunan KA akses Pelabuhan Tarahan (KPBU)</i>	<i>KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	5	5	500,0	Lampung		Kemenuhub (KPBU)
<i>Pembangunan KA akses Pelabuhan Garongkong</i>	<i>KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)</i>	-	-	5	5	-	500,0	Sulawesi Selatan		Kemenuhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.58

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	KA akses Bandara yang dibangun (km)	13 (berlanjut)	13 (berlanjut)	13 (selesai)	-	-	240,0	Jawa Tengah		Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Raden Intan	KA akses Bandara yang dibangun (km)	1,3	-	-	-	-	74,7	Lampung		Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	KA akses Bandara yang dibangun (km)	6 (berlanjut)	6 (selesai)	-	-	-	800,0	yogyakarta		Kemenhub
Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	KA akses Bandara yang dibangun (km)	-	-	-	10 (berlanjut)	10 (selesai)	300,0	Jawa Timur		Kemenhub
ProP : Penyediaan PSO dan Subsidi							18.904,9			
Penyediaan Kewajiban Pelayanan Publik Perkeretaapian (APBN Non Kemenhub)	Tersedianya Dana PSO Perkeretaapian (paket)	1	1	1	1	1	17.000,0	Pusat		Kemenhub, Kemenkeu
Penyediaan Subsidi Perintis KA	Tersedianya Layanan Subsidi Perkeretaapian (lintas)	7	9	9	10	10	1.904,9	Pusat		Kemenhub
KP : Konektivitas Laut	Jumlah pelabuhan pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (28 pelabuhan) (lokasi)	14	18	22	26	28	150.364,5			
	Jumlah trayek subsidi tol laut (25 trayek) (trayek)	21	22	23	24	25				
ProP : Pengembangan pelabuhan utama (hub)	Terselenggaranya standarisasi infrastruktur dan pengelolaan pelabuhan utama (hub)						113.000,0			
Pengembangan Pelabuhan Belawan/ Kuala Tanjung	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/ Kuala Tanjung (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	25.000,0	Sumatera Utara	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
Pengembangan Pelabuhan Kijing	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	12.500,0	Kalimantan Barat	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	5.000,0	DKI Jakarta	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	5.500,0	Jawa Timur	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta
Pengembangan Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	10.000,0	Sulawesi Selatan	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pengembangan Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	25.000,0	Sulawesi Utara	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.59

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Sorong	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30.000,0	Papua Barat	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	Terselenggaranya pengembangan pelabuhan laut						21.833,1			
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	10.000,0	Jawa Tengah		Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta
Pembangunan Pelabuhan Patimban	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	4.832,2	Jawa Barat		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Kendal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	90,0	Jawa Tengah		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Nabire	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	39,0	Papua		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan baru di NTT (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	400,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Pelabuhan Merauke	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	45,0	Papua		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan baru di Ambon (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	560,0	Maluku		Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajau	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	42,0	Sumatera Barat		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Mansalean	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	27,7	Sulawesi Tengah		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	36,3	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Gane Dalam	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	26,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pulau Bunju	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Kalimantan Utara		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Mesuji	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1	-	35,0	Lampung		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Sarmi	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	49,0	Papua		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tahuna	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	22,5	Sulawesi Utara		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Seba	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	110,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1	-	-	-	244,3	Sulawesi Tenggara		Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Wanci	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Sulawesi Tenggara		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.60

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Ba'a	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	33,8	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Soasio	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	37,5	Maluku Utara		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Saumlaki	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	67,5	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Sebuku	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	50,0	Kalimantan Selatan		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tual	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Namlea	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Kundur	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Laranuka	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Moor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	22,5	Papua		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Jampea	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,0	Sulawesi Selatan		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Geser	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Gorom	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	22,5	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Raijua	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	22,5	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Wini	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Moa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,0	Maluku		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Jambi		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pelaihari	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1	-	11,3	Kalimantan Selatan		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Maloy	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	40,5	Kalimantan Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Depapre	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	-	-	-	50,0	Papua		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Kepulauan Riau		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.61

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Karianqau (Balikpapan)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Kalimantan Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Palaran (Samarinda)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Kalimantan Timur		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Dompok	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Moco	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	75,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Serui	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	75,0	Papua		Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Kilo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Nusa Tenggara Barat		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Angre	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	259,6	Gorontalo		Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Belang-Belang	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Sulawesi Barat		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tobelo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Kaimana	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	90,0	Papua Barat		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pomako	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Papua		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Dobo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Banggai	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1	-	-	-	28,5	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub (KPBU)
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	812,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Donqala (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	130,5	Sulawesi Tengah		Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	101,5	Sulawesi Tengah		Kemenhub (PHLN)
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	600,0	Jawa Timur		Kemenhub, BPWS, KPBU
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.000,0	Sumatera Selatan		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	70,0	Kalimantan Utara		Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tegal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	140,0	Jawa Tengah		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.62

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Meranti	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	3,1	Riau		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Kedindi Reo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	15,5	Nusa Tenggara Timur		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Waikelo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	1,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Likupang	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	7,5	Sulawesi Utara		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Miangas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	24,5	Sulawesi Utara		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Kaledupa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,0	Sulawesi Tenggara		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Bajoe	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,0	Sulawesi Selatan		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Molu	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	16,9	Maluku		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Wasior	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,5	papua Barat		Kemenuh
ProP : Pelabuhan Mendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	Terbangunnya pelabuhan pendukung kawasan prioritas (kumulatif)						764,0			
Pengembangan Pelabuhan Benoa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	184,0	Bali		Kemenuh (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	150,0	Bali		Kemenuh (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Bali		Kemenuh
Pembangunan Pelabuhan Labuan Bajo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	90,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	150,0	Nusa Tenggara Barat		Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Bangka Belitung		Kemenuh
ProP : Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur mendukung Tol Laut (kumulatif)						8.935,4			
Subsidi Tol Laut	Jumlah rute angkutan tol laut tetap dan teratur (trayek)	21	22	23	24	25	2.398,0	Tersebar		Kemenuh, BUMN, Swasta
Subsidi Angkutan Laut Perintis	Jumlah rute angkutan laut perintis (trayek)	113	113	113	113	113	6.498,9	Tersebar		Kemenuh
Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Jumlah moda kapal ternak yang disediakan di Kabupaten Belu (rute)	1	1	1	1	1	38,5	Nusa Tenggara Timur		Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.63

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pegadaan sarana dan prasarana transportasi laut	Tersedianya sarana dan prasana transportasi laut						4.500,0			
<i>Pengadaan peralatan bongkar muat</i>	<i>jumlah pengadaan peralatan (unit)</i>	25	25	25	25	25	2.500,0	Pusat		Kemenuh, BUMN, Suxasta
<i>Penyelenggaraan pengerukan alur pelayaran</i>	<i>lokasi pengerukan alur pelayaran (lokasi)</i>	8	8	8	8	8	2.000,0	Tersebar		Kemenuh
ProP : Pengembangan teknologi informasi pelayaran	Tersedianya teknologi informasi pelayaran (kumulatif)						1.332,0			
<i>Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu</i>	<i>terlaksananya pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (lokasi)</i>	20	22	24	19	20	1.332,0	Tersebar		Kemenuh
KP : Konektivitas Udara	Jumlah rute jembatan udara (43 rute) (Rute)						36.652,2			
	Jumlah bandara baru yang dibangun (21 lokasi) (lokasi)									
	Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi) (lokasi)									
	Jumlah bandara perairan (waterbased airport) yang dibangun (5 lokasi) (lokasi)									
ProP : Jembatan udara							7.762,5			
<i>Pembangunan Jembatan Udara di Papua</i>							0,0	Tersebar		Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Elelim</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	397,5	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Wamena</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.367,2	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Tanah Merah</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.179,6	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Manggelum</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	31,1	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Korowai Batu</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	641,4	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Nop Goliath</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	525,8	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Korupun</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Mozes Kolanin</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	748,5	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh
<i>Pengembangan Bandara Oksibil</i>	<i>Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	290,3	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.64

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Ilaga	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	470,5	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenhub
Pengembangan Bandara Mulia	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	120,5	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenhub
Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM (rute)	35	35	35	35	35	1.940,1	Papua	Jembatan udara 37 rute di Papua	Kemenhub
ProP : Pembangunan bandara baru	Jumlah bandara baru yang dibangun						11.798,9			
Pembangunan Bandara Buntu	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1	0	0	0	0	131,1	Sulawesi Selatan		Kemenhub
Pembangunan Bandara Nabire Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	941,2	Papua		Kemenhub
Pembangunan Bandara Siboru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	1.138,5	Papua Barat		Kemenhub
Pembangunan Bandara Bukit Malintang	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Sumatera Utara		Kemenhub
Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	463,1	Sulawesi Utara		Kemenhub
Pembangunan Bandara Banggai Laut	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (lanjutan)	510,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub
Pembangunan Bandara Sobaham	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	380,0	Papua		Kemenhub
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.000,0	Kalimantan Barat		Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Bandara Ngloram-Cepu	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	352,6	Jawa Tengah		Kemenhub
Pembangunan Bandara Pahuwato	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	265,0	Gorontalo		Kemenhub
Pembangunan Bandara Weda	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	220,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pembangunan Bandara Kediri-Jatim	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	600,0	Jawa Timur		Kemenhub, Swasta
Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Bali		Kemenhub
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Bandara Murung Raya-Kalteng	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	297,4	Kalimantan Tengah		Kemenhub
Pembangunan Bandara Wasior Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	600,0	Papua Barat		Kemenhub
Pembangunan Bandara Manokwari Selatan	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	600,0	Papua		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.65

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Bandara Gorom	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	550,0	Maluku		Kemenhub
Pembangunan Bandara Labuan Batu	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	700,0	Sumatera Utara		Kemenhub
Pembangunan Bandara Sukabumi	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	400,0	Jawa Barat		Kemenhub
Pembangunan Bandara Kolaka Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	650,0	Sulawesi Tenggara		Kemenhub
ProP : Pengembangan Bandara Hub Primer							16.950,7			
Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	6.500,0	Banten		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Kulon Progo	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	200,0	Yogyakarta		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	200,0	Kalimantan Timur		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	900,0	Bali		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	250,0	Kota Makassar-Sulawesi Selatan		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Sentani	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	400,0	Papua		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Juanda	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	250,0	Jawa Timur		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Kualanamu	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	200,0	Sumatera Utara		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Patimura	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	200,0	Maluku		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	180,0	Papua Barat		Kemenhub
Pengembangan bandara yang mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI)										
Pengembangan Bandara Lombok	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	350,0	Nusa Tenggara Barat		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Kalimarau	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	28,4	Kalimantan Timur		Kemenhub
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	47,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	288,2	Sulawesi Tenggara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Labuhan Bajo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.200,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.66

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Silangit	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	100,0	Sumatera Utara		Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	124,2	Sumatera Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	115,0	Kalimantan Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	45,0	Kalimantan Selatan		Kemenhub
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	245,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub
Pengembangan Bandara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	38,1	Papua Barat		Kemenhub
Pengembangan Bandara Bintuni	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	45,0	Papua Barat		Kemenhub
Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	0,8	Papua Barat		Kemenhub
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	300,0	Jawa Tengah		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	120,0	Bangka Belitung		Kemenhub, BUMN
Pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana	Jumlah bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)									
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	60,0	Aceh		Kemenhub
Pengembangan Bandara Lasikin	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	85,0	Aceh		Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Binaka	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	90,0	Sumatera Utara		Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Lasondre	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	55,0	Sumatera Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Rokot	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	465,0	Sumatera Barat		Kemenhub
Pengembangan Bandara Enggano	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	75,0	Bengkulu		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.67

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Tambelan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	62,0	Kepulauan Riau		Kemenuh
Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	85,0	Kepulauan Riau		Kemenuh
Pengembangan Bandara Letung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	50,0	Kepulauan Riau		Kemenuh
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	49,0	Kepulauan Riau		Kemenuh
Pengembangan Bandara Pangsuma	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	61,5	Kalimantan Barat		Kemenuh
Pengembangan Bandara Data Dawai	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	54,1	Kalimantan Timur		Kemenuh
Pengembangan Bandara Long Apung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	48,4	Kalimantan Utara		Kemenuh
Pengembangan Bandara Yuwai Semaring	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	45,0	Kalimantan Utara		Kemenuh
Pengembangan Bandara Maratua	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	75,0	Kalimantan Timur		Kemenuh
Pengembangan Bandara Harun Thohir	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	65,0	Jawa Timur		Kemenuh
Rehabilitasi/ Pengembangan Bandara Naha	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	60,0	Sulawesi Utara		Kemenuh
Rehabilitasi/ Pengembangan Bandara Melongguane	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	40,0	Sulawesi Utara		Kemenuh
Rehabilitasi/ Pengembangan Bandara Miangas	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	45,0	Sulawesi Utara		Kemenuh
Rehabilitasi/ Pengembangan Bandara Gebe	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	35,0	Maluku Utara		Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.68

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Rampi	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	80,0	Sulawesi Selatan		Kemenuh
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Seko	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	50,0	Sulawesi Selatan		Kemenuh
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Tardamu	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	65,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenuh
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara D.C. Saundale	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	64,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenuh
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Inanwatan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	72,0	Papua Barat		Kemenuh
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Enarotali	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	86,0	Papua		Kemenuh
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Mindiptana	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	35,0	Papua		Kemenuh
Pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	68,0	Maluku		Kemenuh
Pengembangan Bandara Muko Muko	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,8	Bengkulu		Kemenuh
Peningkatan kapasitas bandara	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan									
Pengembangan Bandara Tampa Padang	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	77,6	Sulawesi Barat		Kemenuh
Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	13,2	Jawa Tengah		Kemenuh
Pengembangan Bandara Pangsuma-Putussibau	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	1,5	Kalimantan Barat		Kemenuh
Pengembangan Bandara Namrole	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku		Kemenuh
Pengembangan Bandara Dobo	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	25,0	Maluku		Kemenuh
Pengembangan Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	6,2	Maluku		Kemenuh
Pengembangan Bandara Dumatubun-Langgur (Karel Sadsuitubun - Langgur)	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Maluku		Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.69

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara M. Salahuddin-Bima	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	124,6	Nusa Tenggara Barat		Kemenhub
Pengembangan Bandara Mau-Alor	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	41,2	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Bandara Soa-Bajawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	43,5	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	6,4	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pengembangan Bandara Bandanaira	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	99,0	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Bandara Oesman Sadik-Labuha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	27,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Buli-Maba	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Sanana	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pengembangan Bandara Rendani	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Papua Barat		Kemenhub
Pengembangan Bandara Kuffar	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Bandara Kepi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	0	0	20,0	Papua		Kemenhub
Pengembangan Bandara Mopah	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	48,1	Papua		Kemenhub
Pengembangan Bandara Moa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	64,9	Maluku		Kemenhub
Pengembangan Bandar Udara Tiom	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Papua		Kemenhub
Pembangunan Bandara Anggi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Papua Barat		Kemenhub
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Aceh		Kemenhub
Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Jambi		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Tanjung Bara	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Kalimantan Timur		Kemenhub
Pengembangan Bandara Internasional Juwata	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	150,0	Kalimantan Utara		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara JB Soedirman, Kab. Purbalingga	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	500,0	Jawa Tengah		Kemenhub, BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.70

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pembangunan bandara perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)						140,0			
<i>Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat</i>	<i>Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)</i>	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	30,0	Papua Barat		Kemenhub
<i>Pembangunan Bandara Perairan Pulau Bawah</i>	<i>Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)</i>	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	0	30,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
<i>Pembangunan Bandara Perairan Gili Iyung</i>	<i>Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)</i>	0	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	0	25,0	Jawa Timur		Kemenhub
<i>Pembangunan Bandara Perairan Pulau Senua</i>	<i>Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)</i>	0	0	0	1 (berlanjut)	1 (selesai)	35,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
<i>Pembangunan Bandara Perairan Pulau Widi</i>	<i>Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)</i>	0	0	0	0	1	20,0	Maluku Utara		Kemenhub
KP : Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (36 lokasi) (lokasi)						8.498,2			
ProP : Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	Pelabuhan penyeberangan pada jalur logistik yang dibangun (lokasi)						3.671,3			
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sumatera Utara		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bali		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampelan</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bali		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Utara		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Utara		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Maluku		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>		1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sikabulan</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sumatera Barat		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dolong</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Maluku		Kemenhub
<i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Makalehi</i>	<i>jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)</i>	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Utara		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.71

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Maluku		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Merauke	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pangkalaseang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Burung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dakal	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Papua		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Sulawesi Utara		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Talise	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasokan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Tengah		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Waren	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Papua		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sumatera Barat		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Bangka Belitung		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.72

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Riau		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wairiang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawio	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Utara		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Seliu	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Bangka Belitung		Kemenhub
Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	7 (berlanjut)	7 (selesai)	-	-	-	295,3	Sumatera Utara		Kemenhub
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bangka Belitung		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Tenggara		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Tenggara		Kemenhub
Pembangunan Dermaga 3 Pelabuhan Padangbai	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	255,0	Bali		Kemenhub, BUMN
Pengembangan Dermaga di Danau Batur	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	45,0	Bali		Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sungai	Pelabuhan penyeberangan sungai dibangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	36,0	Papua		Kemenhub
ProP : Pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	0	0	1	0	0	351,9			
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	-	-	1	-	-	76,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Terminal Nanga Badau	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	60,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Terminal Jagoibabang	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan Terminal Motaain	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	17,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pembangunan Terminal Motamasin	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	50,0	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pembangunan Terminal Wini	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,2	Nusa Tenggara Timur		Kemenhub
Pembangunan Terminal Skouw	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	23,8	Papua		Kemenhub
ProP : Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)					0	780,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.73

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sulawesi Tenggara		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sulawesi Tenggara		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tq Uban-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Riau		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sri	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sumatera Selatan		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk.	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Sumatera Utara		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sei Asam-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Kepulauan Riau		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patani-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk. Dalam- Gn. Sitoli-P. Pulau Batu	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Sumatera Utara		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Maluku		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bastiong-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Jawa Timur		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep.	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Sumatera Barat		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Maluku		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Tersebar		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patumbukan-P. Tanah Jampea	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Sulawesi Selatan		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku Utara		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Teor-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Kalimantan Barat		Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Sulawesi Selatan - Kalimantan Timur		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.75

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBN)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	1.670,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan KPBU)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	26.150,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBD)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	29.800,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBN)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	350,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBD)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	4.050,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.76

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
c. Perkeretaapian Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	17 (berlanjut)	17 (selesai)	33 (berlanjut)	33 (berlanjut)	33 (selesai)	2.040,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh
d. Elevated Loopline (Dukungan KPBU)	Panjang jalur yang dibangun (km)	-	-	8 (berlanjut)	8 (berlanjut)	8 (selesai)	4.140,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU
d. Elevated Loopline (Dukungan APBD)	Panjang jalur yang dibangun (km)	-	-	8 (berlanjut)	8 (berlanjut)	8 (selesai)	23.460,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU
e. KA Outer Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	-	-	10 (berlanjut)	10 (berlanjut)	10 (selesai)	500,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh
Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) di Jabodetabek	Jumlah Kawasan yang menerapkan Sistem ERP dan atau Pembatasan Sepeda Motor (kawasan)	-	1	1	1	1	120,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh
Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Jabodetabek yang ramah lingkungan	Jumlah Rute Angkutan Pemadu Moda yang ramah lingkungan yang Dibangun dan Dikembangkan (rute)	-	7	7	7	7	210,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.78

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.710,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	336,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	100,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	670,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	500,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
c. Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila	Panjang jalur KA yang dibangun (km)	-	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	1.000,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.79

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Metropolitan Medan	Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)									
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (Dukungan APBN)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	3.000,0	Sumatera Utara	<i>Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar</i>	<i>Kemenhub, Pemda, KPBU</i>
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (Dukungan KPBU)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	670,0	Sumatera Utara	<i>Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar</i>	<i>Kemenhub, Pemda, KPBU</i>
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (Dukungan APBD)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	1.330,0	Sumatera Utara	<i>Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar</i>	<i>Kemenhub, Pemda, KPBU</i>
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan APBN)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	125,0	Sumatera Utara	<i>Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar</i>	<i>Kemenhub</i>
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan KPBU)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	500,0	Sumatera Utara	<i>Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar</i>	<i>Kemenhub, Pemda, KPBU</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.80

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan APBD)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	500,0	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
<i>c. Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang)</i>	<i>Panjang jalur KA yang dibangun/ditingkatkan (km)</i>	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	-	-	244,3	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub
Metropolitan Bandung	Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)			0						
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (APBN)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	3.390,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (KPBU)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	669,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (APBD)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.329,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.81

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	1	1	1	1	1	60,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (KPBU)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	720,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU
<i>b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU
<i>c. Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka</i>	<i>Panjang jalur yang dibangun (km)</i>	-	27 (berlanjut)	27 (berlanjut)	27 (berlanjut)	27 (selesai)	1.000,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh
Metropolitan Semarang	Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)									
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
<i>a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBN)</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.82

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	310,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	150,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	510,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU
Metropolitan Makassar	Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)									
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.000,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenuh, Pemda, KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.83

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.000,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	150,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	510,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub, Pemda, KPBU
ProP : Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi							8.470,0			
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)	-	4 (berlanjut)	4 (berlanjut)	4 (berlanjut)	4 (selesai)	8.000,0	Jawa Barat, DKI, Banten		Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	-	4 (berlanjut)	4 (berlanjut)	4 (berlanjut)	4 (selesai)	400,0	Jawa Barat, DKI, Banten		Kemenhub
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	-	2 (berlanjut)	2 (berlanjut)	2 (berlanjut)	2 (selesai)	70,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.84

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)						2.154,7			
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
<i>Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis rel di Ibu Kota Negara</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>454,7</i>	<i>Kalimantan Timur</i>		<i>Kemenuh</i>
<i>Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan</i>	<i>Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>500,0</i>	<i>Tersebar</i>		<i>Kemenuh</i>
<i>Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Palembang berbasis jalan</i>	<i>Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,0</i>	<i>Sumatera Selatan</i>		<i>Kemenuh</i>
<i>Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan</i>	<i>Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,0</i>	<i>Bali</i>		<i>Kemenuh</i>
<i>Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Kota Lainnya</i>	<i>Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota) (perkotaan)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>500,0</i>	<i>Tersebar</i>		<i>Kemenuh, Pemda, KPBU</i>
<i>Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo</i>	<i>Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (km)</i>	<i>60</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>600,0</i>	<i>Jawa Tengah, Yogyakarta</i>		<i>Kemenuh</i>
ProP : Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan							6.250,3			
<i>Pembangunan Fly Over Kemang dan Duplikasi Overpass</i>	<i>Panjang Fly Over terbangun (lokasi)</i>			<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>200,0</i>	<i>Banten</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pembangunan Fly Over Bitung</i>	<i>Panjang Fly Over terbangun (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>175,0</i>	<i>Banten</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pembangunan Fly Over Cangkuk</i>	<i>Panjang Fly Over terbangun (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>53,9</i>	<i>Jawa Tengah</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pembangunan Fly Over Madiun (Yos Sudarso)</i>	<i>Panjang Fly Over terbangun (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>75,0</i>	<i>Jawa Timur</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pembangunan Fly Over Gatot Subroto</i>	<i>Panjang Fly Over terbangun (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>148,8</i>	<i>Sumatera Utara</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pembangunan Fly Over Pinang Baris</i>	<i>Panjang Fly Over terbangun (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (selesai)</i>	<i>-</i>	<i>151,6</i>	<i>Sumatera Utara</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
<i>Pembangunan Fly Over/Underpass Mendukung Major Project KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Fase 1 Jakarta</i>	<i>Panjang Fly Over terbangun (lokasi)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>1 (berlanjut)</i>	<i>5.346,0</i>	<i>Jawa Barat, Jawa Tengah</i>	<i>KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)</i>	<i>KEMEN PU&PERA</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.85

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada Ruas Pejagan - Ketanggungan, Kab. Brebes	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan jalan perkotaan	Panjang jalan yang terbangun						5.784,2			
Jalan Lingkar Luar Selatan	Panjang jalan yang dibangun (km)		5	5	6	9	300,0	Sumatera Utara		KEMEN PU&PERA
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	30,0	30,0	18,5	17,5	2.530,2	Sulawesi Selatan		KEMEN PU&PERA
Jalan lingkar perkotaan Jawa	Panjang jalan yang dibangun (km)	7	-	15,6	-	-	350,1	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Pekalongan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	5	6	4	180,0	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Jalan Lingkar Temanggung - Parakan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	5	4,4	-	98,8	Jawa Tengah		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Samarinda	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3,9	3,9	3,9	3,9	373,0	Kalimantan Timur		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Jalan Lingkar	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	5	5	5	220,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Kopo	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	381,2	Jawa Barat		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	379,0	Kepulauan Riau		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Gamping	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	215,5	Yogyakarta		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Underpass Bulak Kapal	Panjang Underpass terbangun (lokasi)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	122,9	Jawa Barat		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Aloha	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	100	180,0	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Pembangunan Frontage Road (FR) Waru - Gedangan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	4	5	2,1	94,4	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	5	8,1	-	210,1	Jawa Timur		KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Kuningan	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	5	5,2	-	-	149,1	Jawa Barat		KEMEN PU&PERA
ProP : Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)						1.500,0			
subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)	6	8	10	12	14	1.500,0	Tersebar		Kemenuh
KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen)(kumulatif)	13,3	16,3	21	25,4	30,00	41,0			
ProP : Pengembangan TIK Perkotaan	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen) (kumulatif)	13,3	16,3	21	25,4	30,00	41,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.86

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Jumlah kab/kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kab./kota)(kumulatif)</i>	40	70	100	125	150				
<i>Penetrasi fixed broadband</i>	<i>Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen) (kumulatif)</i>	13,3	16,3	21	25,4	30	26,0	<i>Pusat</i>	<i>Kemenkominfo</i>	
<i>Gerakan menuju Smart City</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kumulatif)</i>	40	70	100	125	150	15,0	<i>Tersebar</i>	<i>Kemenkominfo</i>	
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/Kota)	6	7	7	7	7	56,2			
ProP : Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	6	7	7	7	7	56,2			
	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management	3	3	3	3	3				
	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan air minum dan air limbah yang terintegrasi (kab/kota/kawasan)	0	0	1	1	1				
	Jumlah NSPK terkait layanan air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)	1	1	0	0	0				
<i>Peningkatan Kinerja BUMN/ BUMD Penyelenggara</i>	<i>Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management (PDAM)</i>	3	3	3	3	3	12,0	<i>15 PDAM</i>	<i>Pemerintah Daerah, PDAM</i>	
<i>Peningkatan Kinerja BUMN/ BUMD Penyelenggara</i>	<i>Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)</i>	6	7	7	7	7	27,2	<i>34 PDAM</i>	<i>Pemerintah Daerah, PDAM</i>	
<i>Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi</i>	<i>Jumlah kab/ kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/ kota)</i>	0	0	1	1	1	15,0	<i>Kota Malang, Kota Palembang, dan DKI/ Kota Bogor</i>	<i>Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</i> <i>KEMEN PU&PERA</i>	
<i>NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi</i>	<i>Jumlah NSPK yang tersusun (unit)</i>	1	1	0	0	0	2,0	<i>Pusat</i>	<i>Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</i> <i>KEMEN PU&PERA</i>	
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui permajaan (kawasan)	0	4	6	8	10	280,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.87

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	4	6	8	10	280,0			
<i>Penyediaan Infrastruktur Permukiman dalam Rangka Peremajaan</i>	<i>Jumlah kawasan yang disediakan infrastruktur permukiman dalam rangka peremajaan (kawasan)</i>	0	4	6	8	10	280,0	<i>Kawasan Perkotaan</i>		<i>KEMEN PU&PERA</i>
PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN							1.837.712,0			
	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100				
	Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408				
	Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07				
KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan							168.646,9			
	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8				
	Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%)	0,15	0,15	0,16	0,17	0,2				
ProP : Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	Kapasitas Terpasang EBT Tambahan (MW)	686,5	1001,1	1921,8	1778,2	3662,7	168.646,9			
	Susut jaringan (%)	9,2	9,01	8,93	8,78	8,6				
<i>Peningkatan standarisasi dan labelling</i>	<i>Jumlah Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi (Peralatan)</i>	3	2	1	3	3	3,5	<i>Tersebar</i>		<i>Kemen ESDM</i>
<i>Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (rekomendasi)</i>	<i>Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (rekomendasi)</i>	1	1	1	1	1	9,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemen ESDM</i>
<i>Pembangunan SPKLU</i>	<i>Jumlah Penambahan SPKLU (Unit) (akumulasi)</i>	168	390	693	1030	1558	7,5	<i>Tersebar</i>		<i>Badan Usaha</i>
<i>Pengembangan smart grid</i>	<i>Jumlah pengembangan smart grid (lokasi)</i>	5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali	5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali	5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali	5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali	5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali	7,2	<i>Sistem Jamali</i>		<i>Badan Usaha</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.88

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan PLTP</i>	<i>Jumlah kapasitas terpasang PLTP (MW)-kumulatif</i>	140	80	132	300	375	42.270,0	<i>Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara</i>	<i>Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA</i>	<i>Badan Usaha</i>
<i>Pembangunan PLTM, PLTA, PLTMH</i>	<i>Kapasitas terpasang PLTM, PLTA, dan PLTMH (MW)-kumulatif</i>	165,2	440,3	955,9	397	1951,4	74.996,0	<i>Tersebar</i>	<i>Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA</i>	<i>Badan Usaha</i>
<i>Pembangunan PLT Bioenergi</i>	<i>Jumlah kapasitas terpasang dari PLT Bioenergi (MW) - kumulatif</i>	246,7	152	484,8	159	252,6	24.655,0	<i>Tersebar</i>	<i>Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA</i>	<i>Badan Usaha</i>
<i>Pembangunan PLT Surya (PLTS)</i>	<i>Jumlah kapasitas terpasang PLT Surya (MW) - kumulatif</i>	134,6	328,8	339,1	643,2	643,7	17.933,0	<i>Tersebar</i>	<i>Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA</i>	<i>Badan Usaha</i>
<i>Pembangunan PLT Bayu (PLTB)</i>	<i>Jumlah kapasitas terpasang PLT Bayu (MW) - kumulatif</i>	-	-	10	279	440	5.798,0	<i>Tersebar</i>	<i>Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA</i>	<i>Badan Usaha</i>
<i>PLTS Rooftop</i>	<i>Pembangunan PLTS Rooftop (MW)</i>	34,6	35,9	38,5	47,4	51,8	1.203,2	<i>Kota Medan, Kota Palembang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Manado, Kota Makassar</i>		<i>Kemen ESDM</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.89

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	15	15	15	15	15	1.760,0	DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, Kota Manado, Kab. Bantul, Kab. Tuban, Kab. Banyumas		Pemda
Penertiban pemakaian listrik ilegal	Jumlah penertiban pemakaian listrik ilegal (regional)	3	4	5	6	7	4,5	Regional Sumatera, Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua		Kemen ESDM
Peningkatan kualitas jaringan distribusi dan penambahan trafo distribusi sisipan baru	Jumlah penambahan trafo distribusi sisipan baru (unit)						0,0	Tersebar		Badan Usaha
KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	SAIDI menjadi (jam/pelanggan)	15	10	5	3	1	288.384,4			
ProP : Perluasan Jaringan Gas Kota	Penyediaan gas (SBM)	176637	185530	194869	204680	214983				
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (SR) (Kumulatif)	876515	1610445	2410445	3210445	4010445	38.494,3			
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui APBN	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (SR) (APBN)	266070	100000	0	0	0	4.096,0	Tersebar	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	Kemen ESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (SR) (KPBU)	0	50000	839555	800000	800000	27.385,1	Provinsi: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui BUMN (Konstruksi)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (BUMN) (SR)	50000	583930	0	0	0	6.973,2	Tersebar	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.90

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Jumlah Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (lokasi)	8	8	8	8	8	40,0	Pusat		Kemen ESDM
ProP : Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan)	77107	79187	81217	83219	85216	249.890,2			
	Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)	83	76	72	56	43				
Peningkatan kehandalan sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB)	Durasi pemadaman Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	47,99	2.440,0	Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Kalsel & Kaltim	Durasi pemadaman Sistem Kalsel & Kaltim (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	14,29	815,0	Sistem Kalsel & Kaltim	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar	Durasi pemadaman Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	16,36	1.460,0	Sistem Sulsel, Sultra, Sulbar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Papua	Durasi pemadaman Sistem Papua (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	26,41	384,0	Sistem Papua	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Penambahan Jaringan Distribusi	Jumlah Penambahan Jaringan Distribusi (kms)	46412	42714	50657	43065	43113	101.300,0	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Penambahan Jaringan Gardu Distribusi	Jumlah Penambahan Gardu Distribusi (MVA)	3212	3022	3615	3206	3119	141.820,0	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi (rekomendasi)	1	1	1	1	1	10,9	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Kemen ESDM
Rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat	Jumlah rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat	1	1	1	1	1	29,8	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.91

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3	Jumlah paket konversi mitan ke LPG (unit)	522616	250397	117289	50000	50000	509,3	Tersebar		Kemen ESDM
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	Jumlah Layanan Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga (layanan)	1	1	1	1	1	30,5	Tersebar		Kemen ESDM
Penambahan Penyalur BBM Satu Harga	Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)	83	76	72	56	43	0,0	Tersebar		Badan Usaha
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kawasan 4T	Jumlah PLTS Terpusat (Unit)	0	0	5	5	5	1.050,0	Tersebar		Kemen ESDM
Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik	Jumlah Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik (rekomendasi)	2	2	2	2	2	17,3	Tersebar		Kemen ESDM
Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran(Regulasi/ Kebijakan)	1	1	1	1	1	10,5	Pusat		KESDM
Pengembangan Kebijakan Subsidi Energi	Jumlah Pengembangan Kebijakan Subsidi Energi (Regulasi/ Kebijakan)	1	1	1	1	1	12,9	Pusat		Kemen ESDM
KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	Produksi tenaga listrik (TWh)	339082,7	359946,1	382696,1	406325,0	431281,2	1.380.680,7			
	Cadangan operasional BBM (hari)	23	23	23	23	23				
ProP : Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit (GW)	5453	6446	3443	6209	5728	707.270,0			
	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/ Rekomendasi)	1	1	1	1	1				
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU	Jumlah Penambahan PLTU (MW)	1194,5	855,5	576	471	65	63.240,0	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU USC	Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	1950	2950	-	1000	2000	197.500,0	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU MT	Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	0	840	600	900		46.800,0	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Penambahan kapasitas pembangkit PLTG/ GU/ MG	Jumlah Penambahan PLTG/ GU/ MG (MW)	2384	370	990	880	70	93.880,0	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.92

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Jaringan Transmisi	Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi (kms)	4459,6	4765,9	4632,1	3519,5	1692	132.855,5	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Pengembangan Gardu Induk	Jumlah penambahan gardu induk (MVA)	14247	8460	7510	3900	4490	172.752,8	Tersebar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Badan Usaha
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik (Rekomendasi)	1	1	1	1	1	24,7	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Kemen ESDM
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk (Rekomendasi)	1	1	1	1	1	24,3	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Kemen ESDM
Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/ Rekomendasi)	3	3	3	3	3	6,7	Pusat		Kemen ESDM
Peningkatan kebijakan harga	Jumlah Kebijakan harga energi dan tarif (rekomendasi)	1	1	1	1	1	10,0	Pusat		Kemen ESDM
Pemetaan potensi PLTBayu	Jumlah potensi terukur PLTBayu (MW)	-	200	200	200	200	32,0	Pusat		Kemen ESDM
Pemetaan potensi PLTA/Mini/Mikro	Jumlah potensi terukur PLTA/Mini/Mikro (MW)	-	120	120	120	120	28,8	Pusat		Kemen ESDM
Pemetaan potensi PLTBio	Jumlah potensi terukur PLTBio (MW)	-	60	60	60	60	14,4	Pusat		Kemen ESDM
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider (dokumen)	-	Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Nusa Lembongan	Pra FS di Nusa Lembongan	FS di Nusa Lembongan	Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Sumatera Barat dan Jawa Barat	8,0	Bali dan NTT		Kemen ESDM
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider (dokumen)	-	Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Selat Alas	Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Selat Sape	Pra FS di Selat Alas/ Selat Sape/ Selat Pantar	FS di Selat Alas/ Selat Sape/ Selat Pantar	7,0	Selat Sunda dan NTT		Kemen ESDM
Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan (wilayah)	2	2	2	2	2	2,6	Kab. Bangli, Kab. Maluku Tengah		Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.93

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan (Wilayah)	5	5	5	4	3	4,3	Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan, Kab. Tegal, Kab. Manggarai Barat, Kab. Buru		Kemen ESDM
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi (Rekomendasi)	8	10	10	10	10	55,6	Pusat		Kemen ESDM
Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi (Wilayah)	3	3	3	3	3	1,9	Pusat		Kemen ESDM
Rekomendasi Wilayah Kerja Geologi Migas	Jumlah Rekomendasi Keprospekan Wilayah Kerja Geologi Migas (Rekomendasi)	4	4	4	4	4	21,5	Tersebar		Kemen ESDM
ProP : Pembangunan Kilang Minyak Bumi	Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif) (ribu BOPD)	1151	1151	1176	1276	1276	637.000,0			
Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi RDMP	Jumlah RDMP (Balikpapan, Cilacap, Balongan dan Dumai) (Unit)	On going	On going	1 (Stage-I Balongan 25 Ribu BCPD)	1 (Stage-II Balikpapan 100 Ribu BCPD)	on going	203.000,0	Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	Badan Usaha
Peningkatan infrastruktur kilang minyak GRR Tuban	Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR) Tuban (Unit)	Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat General Engineering Design, Site Development	Financing dan EPC	Financing dan EPC	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	224.000,0	Tuban	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	Badan Usaha
Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi GRR Bontang	Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR)	Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development	AMDAL, BED-FEED	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	210.000,0	Bontang	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	Badan Usaha
ProP : Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalimantan (kms)					2219	36.410,7			
Pembangunan Pipa gas Bumi Kaltim - Kalsel	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)					208,8	36.400,0	Bontang-Banjarmasin	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)	Badan Usaha
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalsel-Kalteng	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)					76,8	0,0	Banjarmasin-Palangkaarya	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)	Badan Usaha
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)					407,2	0,0	Palangkaraya-Pontianak	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)	Badan Usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.94

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi(km)	15300	15800	16300	16800	17300	10,7	Tersebar	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)	Kemen ESDM
PP : TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	444.613,3			
	Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3				
	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pital lebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100				
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7				
KP : Penuntasan Infrastruktur TIK	Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband	98	98,5	99	99,5	100	443.829,2			
	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	36,4	37,2	42,9	50	60				
	Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	11	10	9	8	7				
	Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25				
	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	53	60	70	75	80				
	Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	90	91	93	94	95				
ProP : Pengembangan infrastruktur pital lebar	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60	441.850,0			
	Persentase desa yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband	91,95	92,5	93	94	95				
Penggelaran jaringan tetap pital lebar	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (persen)(kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60	55,3	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.95

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penggelaran jaringan tetap pitalebar	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (persen)(kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60	428.000,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	Badan usaha
BAKTI Palapa Ring	Persentase pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95% (persen)	Barat : 35% Tengah : 10% Timur : 5%	Barat : 40% Tengah : 15% Timur : 10%	Barat : 45% Tengah : 20% Timur : 15%	Barat : 50% Tengah : 30% Timur : 20%	Barat : 60% Tengah : 40% Timur : 25%	2.545,0	Tersebar		Kemenkominfo
Fasilitasi Ducting bersama	Jumlah kabupaten/kota yang memanfaatkan ducting bersama (kab/kota)	2	3	5	7	8	9,0	Tersebar		Kemenkominfo
BAKTI Sinyal/ Last mile	Desa non komersial yang mendapatkan jaringan bergerak seluler (4G) (kumulatif) (desa)	5052	5052	5052	5052	5052	2.615,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	Kemenkominfo
BAKTI Satria Satelit Republik Indonesia	Kapasitas penyediaan satelit multi fungsi SATRIA (Gbps)	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	150	150	2.802,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	Kemenkominfo
Bakti Akses Internet	Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (Lokasi)(kumulatif)	12000	27000	42000	61000	91000	5.231,0	Tersebar		Kemenkominfo
	Penyediaan perangkat komputer/laptop di sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan lain-lain (unit)						0,0	Tersebar		Kemenkes, Kemendiknas, Kemendagri, Kemenhan, Polri, Pemda
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	Penambahan spektrum Frekuensi Radio untuk broadband (MHz)(Kumulatif)	30 MHz (2.3%)	50 MHz (3.8%)	1050 MHz (80%)	1120 MHz (85.5%)	1310 MHz (100%)	136,5	Pusat		Kemenkominfo
Pengembangan infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	Jumlah penyediaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio (unit) - SMFR transportable: 75 site - Stasiun bergerak: 6 unit - Perangkat portable: 47 unit	25	27	27	26	23	336,2	Tersebar		Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.96

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penataan bidang telekomunikasi untuk mendukung ekonomi digital	Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turannya (kebijakan): 1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. RUU Telekomunikasi (UU 36 Tahun 1999) 3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009) 4. RUU OMNIBUSLAW 5. Aturan Turunan	1. Pengesahan RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. Naskah akademik RUU OMNIBUSLAW (Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran) 3. Naskah akademik RUU Telekomunikasi 4. Naskah akademik RUU Pos	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Naskah aturan turunan UU Penyiaran	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Pengesahan aturan turunan UU Penyiaran	1. Pengesahan RUU Telekomunikasi 2. Pengesahan RUU Pos	1. Naskah aturan turunan UU Telekomunikasi 2. Naskah aturan turunan UU Pos	120,0	Pusat		Kemenkominfo
ProP : Pengembangan infrastruktur penyiaran	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	53	60	70	75	80	1.603,2			
Sistem infrastruktur penyiaran digital	Jumlah lokasi infrastruktur penyiaran TV digital (lokasi)	44 lokasi satuan transmisi	50 lokasi satuan transmisi	60 lokasi satuan transmisi	74 lokasi satuan transmisi	55 lokasi satuan transmisi	487,8	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	Kemenkominfo
Implementasi sistem penyiaran digital	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital (persen)	53	60	70	75	80	105,9	Tersebar		Kemenkominfo
Masterplan penyiaran radio digital	Tersedianya masterplan penyiaran radio digital (RPM)	1 Masterplan pita frekuensi radio Medium Frequency (MF) dan 1 masterplan pita frekuensi radio Very High Frequency (VHF) Band 2	1 masterplan pita frekuensi radio VHF Band 3	Implementasi digital sound broadcasting di pita frekuensi radio MF dan VHF Band 2	Implementasi digital broadcasting di pita frekuensi radio VHF Band 3	1 masterplan pita frekuensi radio HF	25,8	Tersebar		Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.97

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	Pelaksanaan optimalisasi pita spektrum frekuensi radio untuk penyiaran digital (layanan)	1	1	1	1	1	25,7	Pusat		Kemenkominfo
Sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran TV publik	Jumlah unit infrastruktur penyiaran TV publik (unit)	70	80	90	100	100	858,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	LPP TVRI
Sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran Radio	Jumlah pengembangan infrastruktur stasiun radio publik (stasiun)	15	15	15	15	15	100,0	Tersebar		LPP RRI
ProP : Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network)	K/L:30% Pemprov/kab /kot:30%	K/L:50% Pemprov/kab /kot:50%	K/L:80% Pemprov/kab /kot:80%	K/L:100% Pemprov/kab /kot:100%	K/L:100% Pemprov/kab /kot:100%	376,0			
Penyelenggaraan pusat data nasional	Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/ Government Network) (persen)	K/L:30% Pemprov/ kab/ kot:30%	K/L:50% Pemprov/ kab/ kot:50%	K/L:80% Pemprov/ kab/ kot:80%	K/L:100% Pemprov/ kab/ kot:100%	K/L:100% Pemprov/ kab/ kot:100%	376,0	Pusat	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	Kemenkominfo
KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	289,6			
	Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	40	60	80	90	100				
ProP : Pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	40	60	80	90	100	78,0			
	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform	8	10	12	14	16				
Penyelenggaraan layanan e-government (SPBE) Nasional	Persentase layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE (persen)	20	40	60	80	100	58,0	Pusat		Kemenkominfo
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform (aplikasi) (kumulatif)	8	10	12	14	16	20,0	Pusat		Kemenkominfo
ProP : Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)	0	0	1	2	3	211,6			
	Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7				
Fasilitasi startup menjadi unicorn	Jumlah penambahan unicorn baru (unicorn) (kumulatif)	0	0	1	2	3	6,1	Tersebar		Kemenkominfo
Digital technopreneur	Jumlah startup aktif yang terbentuk (start-up)	30	60	90	120	150	140,5	Tersebar		Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.98

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan teknologi digital pada kawasan prioritas(kumulatif)</i>	<i>Persentase fasilitasi adopsi teknologi digital di Kawasan Prioritas (persen): a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 kawasan pariwisata d. 30 kawasan IKM</i>	<i>Kajian pemetaan teknologi dan penyedia platform teknologi digital</i>	50	100	100	100	65,0	Tersebar		Kemenkominfo
<i>Fasilitasi scaling up UMKM</i>	<i>Jumlah UMKM (produsen) yang naik kelas dari UMK menjadi usaha menengah (dari total 4.4 juta UMKM bidang pengolahan) (UMKM)</i>	<i>Kajian pemetaan UMKM dan kebutuhan teknologi digital</i>	11000	22000	33000	44000	0,0	Tersebar		Kemenkominfo
KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital		50000	50000	50000	50000	494,5			
ProP : Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi							354,9			
<i>Pengendalian konten negatif</i>	<i>Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun(konten)</i>		120000	150000	175000	210000	250000	354,9	Pusat	Kemenkominfo
ProP : Pengembangan literasi dan keahlian TIK							34,6			
<i>Fasilitasi literasi digital bagi masyarakat</i>	<i>Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi Masyarakat (peserta) (termasuk peserta online)</i>		10000000	20000000	30000000	40000000	50000000	34,6	Tersebar	Kemenkominfo
<i>Pelatihan SDM bidang TIK</i>	<i>Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (peserta)</i>		50000	50000	50000	50000	50000	0,0	Tersebar	Kemenkominfo
ProP : Pengembangan dan fasilitasi industri TIK							105,0			
<i>Pelaksanaan pengujian perangkat TIK</i>	<i>Tahap penyelesaian laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional (tahapan)</i>	<i>Perencanaan</i>	<i>Penyiapan konstruksi</i>	<i>Transaksi dan penanda tanganan</i>	<i>Konstruksi</i>	<i>Balai Uji Rujukan Nasional</i>	105,0	Pusat		Kemenkominfo
JUMLAH							4.882.575,0			

Keterangan :

Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	32.352,9			
	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50				
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50				
KP : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	1.139	1.141	1.141	1.141	1.141	14.513,0			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan)	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750				
	Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	70	70	70	70	70				
	Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap baseline rerata luas karhutla tahun 2015 s.d. 2019 (persen)	2	2	2	2	2				
	Luas kawasan konservasi (juta ha)	27	27	27	27	27				
	Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)	23,40	24,20	25,10	26,00	26,90				
	Akurasi informasi meteorologi (persen)	75,7	76,7	77,7	78,7	79,7				
	Akurasi informasi klimatologi (persen)	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0				
ProP : Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	Jumlah stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)	111	188	197	153	130	1.807,2			
	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)	15	30	31	31	32				
	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya (provinsi)	34	34	34	34	34				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS (unit)	10	25	26	26	27	249,1	Tersebar	Penguatan sistem peringatan dini bencana	KEMEN LHK
Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)	71	148	157	113	90	889,6	15 DAS prioritas pemulihan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	KEMEN LHK
Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya (provinsi)	34	34	34	34	34	90,0	34 provinsi		KEMEN LHK
Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan	Jumlah Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang Dibangun (unit)	1	0	0	0	0	74,0	Provinsi Banten	Penguatan sistem peringatan dini bencana	KEMEN LHK
Sertifikasi laboratorium lingkungan hidup	Jumlah sertifikasi laboratorium lingkungan hidup daerah yang diterbitkan (sertifikat)	-	6	6	6	6	12,0	6 wilayah pulau		KEMEN LHK
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat pemantauan kualitas udara otomatis)	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS (unit)	5	5	5	5	5	47,4	Tersebar	Penguatan sistem peringatan dini bencana	DAK LH
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat pemantauan kualitas air otomatis)	Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)	40	40	40	40	40	307,8	15 DAS prioritas pemulihan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	DAK LH
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat laboratorium uji kualitas air dan merkuri)	Jumlah kab/kota yang memperoleh penambahan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri (kab/kota)	37	37	37	37	37	137,3	Seluruh Indonesia	Penguatan sistem peringatan dini bencana	DAK LH
Prop : Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi (unit usaha/kegiatan)	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750	153,9			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (unit usaha/kegiatan)	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750				
	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (pelabuhan)	20	25	30	40	50				
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (unit usaha/kegiatan)	80	85	90	110	113				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (unit usaha/kegiatan)	300	350	400	450	500				
<i>Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi</i>	<i>Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi (unit usaha/kegiatan)</i>	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750	20,5	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah</i>	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (unit usaha/kegiatan)</i>	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750	75,8	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut</i>	<i>Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (pelabuhan)</i>	20	25	30	40	50	10,2	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang</i>	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (unit usaha/kegiatan)</i>	80	85	90	110	113	11,4	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut</i>	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (unit usaha/kegiatan)</i>	300	350	400	450	500	6,5	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA</i>	<i>Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)</i>	-	33	40	60	60	29,5	Seluruh provinsi		KEMEN LHK
Prop : Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	Persentase Informasi Meteorologi yang Berkualitas (persen)	80	81	82	82	83	2.606,4			
	Persentase Informasi Klimatologi yang Berkualitas (persen)	76	77	79	80	82				
<i>Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II</i>	<i>Jumlah stasiun yang menyediakan layanan informasi cuaca digital skala desa/kelurahan dengan scaling up wheather capacity II (stasiun)</i>	-	1	10	34	-	346,2	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BMKG
<i>Informasi meteorologi maritim melalui Strengthening of Marine Meteorology</i>	<i>Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim (pelabuhan)</i>	20	20	20	20	20	1.792,3	100 pelabuhan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BMKG
<i>Informasi peringatan dini windshear</i>	<i>Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear (bandara)</i>	4	3	2	2	3	278,5	14 bandara	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BMKG
<i>Informasi Iklim Terapan di pusat</i>	<i>Jumlah Informasi Iklim Terapan di pusat (informasi)</i>	6	6	6	6	6	189,5	pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BMKG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.357,3			
	Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/ neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG (KHG)	100	125	150	200	300				
<i>Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	<i>Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla (desa)</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>865,5</i>	<i>24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan</i>	<i>KEMEN LHK</i>	
	<i>Jumlah Provinsi Rawan Karhutla yang ditingkatkan Dukungan Sarana Prasarana Penanganan karhutla (provinsi)</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>0,0</i>	<i>24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan</i>	<i>KEMEN LHK</i>	
	<i>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Dalkarhutla di Provinsi Rawan Karhutla (orang)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan</i>	<i>KEMEN LHK</i>	
<i>Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	<i>Jumlah pelaksanaan pemadaman udara /pemantauan dari udara (sorti)</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>179,0</i>	<i>34 provinsi</i>	<i>KEMEN LHK</i>	
<i>Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut</i>	<i>Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi gambut (desa)</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>18,4</i>	<i>Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.</i>	<i>KEMEN LHK</i>	
<i>Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi</i>	<i>Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi (desa)</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>14,7</i>	<i>Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat</i>	<i>KEMEN LHK</i>	
<i>Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun</i>	<i>Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun (ha)</i>	<i>1.245</i>	<i>1.245</i>	<i>1.245</i>	<i>1.245</i>	<i>1.245</i>	<i>84,7</i>	<i>15 Provinsi</i>	<i>Kementan</i>	
<i>Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa</i>	<i>Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya (wilayah sungai)</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>180,0</i>	<i>Tersebar</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>	
<i>Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot</i>	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot (sistem)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>15,0</i>	<i>pusat</i>	<i>LAPAN</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)	518	730	840	960	1.080	682,4			
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (produk)	5	10	15	20	25				
<i>Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH</i>	<i>Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)</i>	518	730	840	960	1.080	140,0	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)</i>	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) (dokumen)</i>	20	20	20	20	20	11,4	pusat		KEMEN LHK
<i>Dokumen Penerapan Standar</i>	<i>Jumlah Dokumen Penerapan Standar (dokumen)</i>	25	25	25	25	25	9,9	pusat		KEMEN LHK
<i>Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen)</i>	5	10	15	20	25	7,6	pusat		KEMEN LHK
<i>Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)</i>	<i>Jumlah Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (dokumen)</i>	2	2	2	2	2	1,0	pusat		KEMEN LHK
<i>Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon</i>	<i>Persentase penurunan tingkat konsumsi bahan perusak ozon dari baseline (persen)</i>	23,56	23,56	23,58	25,24	25,25	51,3	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Peningkatan Kapasitas Lembaga/ Forum Peduli DAS</i>	<i>Jumlah Lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya (lembaga/forum)</i>	34	34	34	34	34	340,0	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat</i>	<i>Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimanfaatkan (produk)</i>	33	65	65	65	65	121,1	Pusat		KEMEN LHK
ProP : Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)	65	65	65	65	65	5.086,9			
	Luas kawasan konservasi (juta ha)	27	27	27	27	27				
	Jumlah Kawasan Konservasi Laut yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha)	10	14,5	17,5	19	20				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6	10	14	18	20				
	Jumlah unit konservasi insitu yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem (unit)	17	28	39	50	61				
	Jumlah Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan (unit)	2	2	2	2	2				
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)	65	65	65	65	65	61,0	34 Provinsi		KEMEN LHK
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif (provinsi)	7	10	8	6	3	88,4	34 Provinsi		KEMEN LHK
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	552	552	552	552	552	122,1			KEMEN LHK
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)	500	1500	2500	3500	4.500	2.651,3			KEMEN LHK
Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi (unit KEE)	11	22	33	44	55	54,9			KEMEN LHK
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (juta ha)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	950,0			KEMEN LHK
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)	1	1,6	1	0	0	260,0			KEMEN LHK
Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luasan kawasan konservasi baru (ha)	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000	39,9	9 Provinsi		KKP
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Luas Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif ha)	10.000.000	14.500.000	17.500.000	19.000.000	20.000.000	307,7	46 Lokasi		KKP
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (kerjasama)	5	5	5	5	5	60,0	Pusat		KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut (kelompok)</i>	20	5	5	5	5	0,0			KKP
<i>Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan</i>	<i>Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis)</i>	6	10	14	18	20	30,8	Pusat		KKP
<i>Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya</i>	<i>Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)</i>	35	40	45	50	55	18,8	Daerah		KKP
<i>Kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbunan, dan kawasan cagar alam geologi</i>	<i>Jumlah kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbunan, dan kawasan cagar alam geologi (unit)</i>	4	4	4	4	4	5,8	Tersebar		KEMEN ESDM
<i>Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan</i>	<i>Jumlah Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan (unit)</i>	2	2	2	2	2	86,2	Pusat		LIPi
<i>Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</i>	<i>Jumlah kawasan konservasi yang dibangun sarana dan prasarana (unit)</i>	30	40	45	50	55	350,0	34 provinsi		Pemda/DAK
ProP : Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya data & informasi Sumber Daya Alam (SDA), Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan Neraca SDA (NSDA)	14	24	24	28	28	2.818,9			
	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	70	70	70	70	70				
<i>Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif</i>	<i>Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)</i>	70	70	70	70	70	1.731,3	Pusat dan Daerah		KEMEN LHK
<i>Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati</i>	<i>Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (simpul data)</i>	4	4	4	5	5	5,0	Pusat		KEMEN LHK
<i>Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati</i>	<i>Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (sistem)</i>	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		KEMEN LHK
<i>Pusat Informasi Geopark</i>	<i>Jumlah pusat informasi geopark/geologi (unit)</i>	2	2	2	2	2	49,2	Tersebar		KEMEN ESDM
<i>Rekomendasi Penetapan Geoheritage</i>	<i>Jumlah rekomendasi penetapan geoheritage (rekomendasi)</i>	-	4	4	4	4	10,2	Tersebar		KEMEN ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi (aksesi)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	4,3			Kementan
Sumberdaya Genetik yang Terkarakterisasi	Sumberdaya Genetik yang Terkarakterisasi (aksesi)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	3,7			Kementan
Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA	Sistem penginderaan jauh yang terbangun (sistem)	1	2	2	2	1	35,0			LAPAN
Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual	Jumlah Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual (unit)	1	1	1			496,5	Kab. Bogor (Cibinong STP)		LIPI
Infrastruktur Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi	Jumlah Infrastruktur Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi (unit)	1	1	0	0	0	259,0	Kab. Bogor (Cibinong STP)		LIPI
Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara	Jumlah Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara (hasil riset)	21	4	5	5	7	107,5	Provinsi Jawa Barat		LIPI
Penguatan Riset Samudra Nasional	Jumlah hasil riset (hasil riset)	1	1	1	1	0	102,2	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
KP : Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton)	64,80	67,10	68,51	69,20	69,80	8.516,9			
	Persentase penurunan sampah yang terbangun ke laut dari baseline (persen)	20	30	40	50	60				
	Jumlah limbah B3 yang dikelola (juta ton)	89,44	98,68	107,99	117,22	126,49				
	Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (persen)	0,025	0,032	0,039	0,046	0,053				
Prop : Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya (lokasi)	42	52	62	72	82	761,7			
	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun (unit)	53	60	70	70	70				
Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum (unit)	4	10	20	20	20	124,6	Sungai Citarum		KEMEN LHK
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air (unit)	49	50	50	50	50	265,5	14 DAS Prioritas		KEMEN LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pemantauan Sampah Laut dan Coastal Clean Up</i>	<i>Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up (lokasi)</i>	40	50	60	70	80	25,2	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut</i>	<i>Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut (lokasi)</i>	2	2	2	2	2	5,5	Batam, Bintan		KEMEN LHK
<i>Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran</i>	<i>Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)</i>	8	6	6	5	5	35,8	27 Lokasi		KKP
<i>Core Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project</i>	<i>Jumlah data status sumber daya pesisir yang disediakan (jumlah data)</i>	5	5		0	0	263,1	Provinsi DKI Jakarta		LIPI
<i>Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)</i>	<i>Jumlah teknologi yang dihasilkan (produk/temuan)</i>		1	1	1	1	42,0	Provinsi Jawa Barat		LIPI
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	14,00	16,40	17,99	18,90	19,70	3.042,9			
	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	50,80	50,70	50,52	50,30	50,10				
<i>Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional</i>	<i>Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)</i>	5,65	6,23	6,81	7,14	7,48	100,9	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Pengurangan Timbulan Sampah Nasional</i>	<i>Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)</i>	8,35	10,17	11,18	11,76	12,22	162,7	34 provinsi		Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
<i>Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional</i>	<i>Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)</i>	19,26	19,19	19,12	19,05	18,97	673,9	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Penanganan Timbulan Sampah Nasional</i>	<i>Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)</i>	31,54	31,51	31,40	31,25	31,13	1.105,4	34 provinsi		Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/ Refuse Derived Fuel (RDF)</i>	<i>Jumlah fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/ Refuse Derived Fuel (RDF) yang terbangun(unit)</i>	0	1	1	1	1	1.000,0	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)		KEMEN LHK
ProP : Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri (persen)	10% (5 ton)	10% (5 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)	70,1			
	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin (unit)	5	5	5	5	5				
<i>Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK</i>	<i>Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin (unit)</i>	5	5	5	5	5	70,1	24 provinsi		KEMEN LHK
ProP : Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun (unit)	2	-	2	-	-	4.642,2			
	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (unit)	5	6	7	7	7				
<i>Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan</i>	<i>Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (unit)</i>	5	6	7	7	7	549,2	32 provinsi (diutamakan kota ibukota provinsi)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	KEMEN LHK
<i>Pengelolaan limbah medis</i>	<i>Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medise sesuai standar</i>	2.600	3.000	4.850	6.250	8.800	88,9	34 Provinsi	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Kemendes
<i>Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera</i>	<i>Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (1 unit)</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>operasi</i>	<i>operasi</i>	<i>operasi</i>	1.000,0	Sumatera Utara (Kab. Batubara/ Kab. Simalungun) / Sulawesi Selatan / Jambi	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	KPBU
<i>Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumapua</i>	<i>Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua / Sumapapua (1 unit)</i>	<i>Studi/ Kajian (OBC dan FBC)</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>operasi</i>	<i>operasi</i>	1.001,0	Sulawesi Selatan (Kab. Barru/ Kab. Pangkajene Kepulauan/ Kab. Bantaeng/ Kab. Gowa)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	KPBU
<i>Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan</i>	<i>Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (1 unit)</i>	<i>Studi/ Kajian (OBC dan FBC)</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>operasi</i>	<i>operasi</i>	1.001,0	Kalimantan Timur (Kab. Kutai Timur/ Kab. Kutai Kartanegara)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur</i>	<i>Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Jawa Timur (1 unit)</i>	<i>Studi/ Kajian (SP)</i>	<i>Studi/ Kajian (OBC dan FBC)</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>pembangunan fisik</i>	<i>operasi</i>	1.002,0	<i>Jawa Timur (Kab. Lamongan)</i>	<i>Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3</i>	SWASTA
KP : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	301.800	318.200	325.000	325.000	330.000	5.694,9			
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton)	260.000	220.000	270.000	220.000	230.000				
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	20	21	22	24	26				
	Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)	25	25	25	25	25				
ProP : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.993,7			
	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	1.800,0	18.200,0	25.000,0	25.000,0	30.000,0				
<i>Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan</i>	<i>Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	1.858,7	<i>7 provinsi</i>		KEMEN LHK
<i>Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi</i>	<i>Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)</i>	<i>1.800</i>	<i>18.200</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	1.135,1	<i>12 provinsi</i>		KEMEN LHK
ProP : Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional (ha)	7.077,5	7.105,0	7.140,0	7.165,0	7.190,0	1.029,3			
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan (ton)	250.000	200.000	250.000	200.000	200.000				
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan (ton)	10.000	20.000	20.000	20.000	30.000				
<i>Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan</i>	<i>Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya (ha)</i>	<i>77,5</i>	<i>80,0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	381,1	<i>4 provinsi</i>		KEMEN LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lahan reklamasi pertambangan	Luas lahan reklamasi pertambangan (ha)	7.000	7.025	7.050	7.075	7.100	50,0	17 provinsi		KEMEN ESDM
Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 non-institusi yang terpulihkan (ton)	10.000	20.000	20.000	20.000	30.000	560,0			KEMEN LHK
Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan (ton)	250.000	200.000	250.000	200.000	200.000	33,2			KEMEN LHK
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan (teknologi)	2	2	2	2	2	5,0	1 Provinsi		Kementan
ProP : Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali (lokasi)	20	21	22	24	26	37,9			
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)	16 (termasuk 200 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	0,0	60 Lokasi		KKP
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)	4	5	6	8	10	37,9	34 provinsi		KEMEN LHK
ProP : Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya (juta ha)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	950,0			
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (juta ha)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	950,0			KEMEN LHK
ProP : Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (juta ha)	10	10	10	10	10	684,0			
Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (juta ha)	10	10	10	10	10	493,2	Pusat dan Daerah		KEMEN LHK
Pengembangan entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6,8	Pusat		KEMEN LHK
Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (unit)	5	5	5	5	5	100,0	Medan, Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Ambon, Manado, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Jayapura		KEMEN LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary</i>	<i>Jumlah Unit Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia (unit)</i>		2	2	2	2	84,0			LPI
KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	50	60	65	68	70	3.628,1			
	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	219	387	427	472	540				
	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)	1.700.000	1.900.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000				
	Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)	5	7	7	8	7				
ProP : Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung (kajian)	30	30	30	35	35	28,1			
<i>Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (provinsi)</i>	5	7	7	8	7	23,1	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya tampung</i>	<i>Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya tampung (KLHS)</i>	30	30	30	30	30	5,0	34 provinsi		KEMEN LHK
ProP : Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK (perusahaan)	1.000	1.500	1.700	1.950	2.100	2.374,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Mampu Menerapkan Sistem Izin Lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka Mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS (provinsi/kab/ kota)	20	50	100	100	100				
	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan operasi peredaran hasil hutan ilegal (operasi)	210	380	440	540	580				
<i>Operasi pengamanan kawasan hutan</i>	<i>Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan</i>	100	130	140	160	180	548,4	33 provinsi		KEMEN LHK
<i>Operasi peredaran hasil hutan ilegal</i>	<i>Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan & satwa liar (operasi)</i>	110	250	300	380	400	1.028,6	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK</i>	<i>Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK (perusahaan)</i>	1.000	1.500	1.700	1.950	2.100	489,2	Pusat		KEMEN LHK
<i>PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	<i>Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)</i>	200	550	700	800	900	178,5	Pusat		KEMEN LHK
<i>Penguatan Sistem Kajian Dampak Lingkungan serta Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</i>	<i>Pengembangan dan penerapan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan (sistem), Penguatan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja sistem kajian dampak lingkungan (Prov) (laporan)</i>	3	3	3	3	3	46,7	34 provinsi		KEMEN LHK
<i>Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK</i>	<i>Jumlah data spesies kayu pada aplikasi AIKO KLHK (jenis)</i>	0	1.050	1.150	1.250	1.350	50,0	Pusat		KEMEN LHK
<i>Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>	<i>Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (kelompok)</i>	1.010	1.050	1.100	1.150	1.200	32,8	Pusat dan Daerah		KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terselesaikannya kasus pidana LHK sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (kasus)	173	285	315	350	400	1.226,0			
	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (kasus)	46	102	112	122	140				
<i>Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21</i>	<i>Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (kasus)</i>	173	285	315	350	400	583,6	Pusat		KEMEN LHK
<i>Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan</i>	<i>Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (kasus)</i>	46	102	112	122	140	330,6	Pusat		KEMEN LHK
<i>PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	<i>jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)</i>	210	500	600	750	1.000	311,7	Pusat		KEMEN LHK
PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	63.375,1			
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15				
	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0				
KP : Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio)	0,36	0,47	0,77	1,06	1,36	19.925,9			
	Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis (persen)	90,00	92,00	94,00	96,00	100,00				
ProP : Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat (layanan)	5	5	5	5	5	278,0			
	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan (kegiatan)	15	15	15	15	15				
	Jumlah Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (kegiatan)	100	100	100	100	100				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri</i>	<i>Jumlah peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri (peta)</i>	2	2	2	2	2	2,1	Pusat	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	KEMEN ESDM
<i>Peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri</i>	<i>Jumlah peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri (peta)</i>	2	2	2	2	2	2,1	Pusat	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	KEMEN ESDM
<i>Penguatan Data Pemetaan Bencana Geologi</i>	<i>Jumlah Peta Geologi Bersistem dan Bertema (peta)</i>	12	12	12	12	12	19,5	Pusat	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	KEMEN ESDM
<i>Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi</i>	<i>Jumlah kabupaten/ wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi (wilayah)</i>	11	29	29	29	29	15,3	Pusat dan daerah	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	KEMEN ESDM
<i>Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan</i>	<i>Jumlah daerah yang mendapat prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi (lokasi)</i>	10	10	10	10	10	58,0	34 Provinsi	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BNPB
<i>Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Penilaian Ketangguhan Desa/ Kelurahan</i>	<i>Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (lokasi)</i>	2	2	2	2	2	2,4	34 Provinsi		BNPB
<i>Budaya Sadar bencana</i>	<i>Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana (lokasi)</i>	81	81	81	81	81	12,2	34 Provinsi		BNPB
<i>Kajian Teknis, Riset dan Dukungan Teknis Pengembangan Strategi PB</i>	<i>Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan (kegiatan)</i>	18	18	18	18	18	37,9	Pusat	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BNPB
<i>Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Simulasi PB di Daerah</i>	<i>Jumlah lokasi pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah (kab/kota)</i>	19	19	19	19	19	54,9	34 Provinsi		BNPB
<i>Masyarakat Dan Aparatur Pemda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal</i>	<i>Jumlah Masyarakat Dan Aparatur Pemda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal (orang)</i>	390	390	390	390	390	8,3	34 Provinsi		KEMENDES, PDT & TRANS
<i>Pengurangan risiko krisis kesehatan</i>	<i>Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan (daerah)</i>	117	123	124	124	124	65,2	6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten		Kemendes
ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana (kajian)	14	14	14	14	14	335,9			
	Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan (sistem)	3	3	3	3	3				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah (provinsi)	34	34	34	34	34	6,6	34 Provinsi		Kemendagri
Sistem dan dukungan teknis sistem penanggulangan bencana	Jumlah sistem yang dikembangkan (sistem)	13	13	13	13	13	29,0	Pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BNPB
Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana (kegiatan)	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana (kegiatan)	5	5	5	5	5	9,1	34 Provinsi		Kemendagri
Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (daerah)	34	34	34	34	34	5,4	34 Provinsi		Kemendagri
Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara	Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara (peralatan)	828	828	828	828	828	272,5	Pusat		Kemen PU&PERA
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi (kab/kota)	1		1		1	9,0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuefaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogya		Kemen PU&PERA
Rekomendasi Strategi Pengembangan Sistem Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Mitigasi Risiko Bencana (paket rekomendasi)	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	4,3	34 Provinsi		Kemenko Perekonomian
ProP : Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	jumlah kab/kota yang memiliki Standar Minimal Peralatan dan logistik kebencanaan (kab/kota)	200	225	250	275	300	7.938,1			
	Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai (persen)	65	70	75	80	85				
Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan Logistik dan Peralatan PB (kab/kota)	144	136	135	134	134	269,9	34 Provinsi		BNPB
Distribusi Logistik dan Peralatan PB	Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB (kegiatan)	5	5	5	5	5	52,2	34 Provinsi		BNPB
Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihan Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana (jiwa)	500	2.000	2.000	2.000	2.000	56,0	Pusat		KEMENSOS
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana bencana banjir	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (km)	5	8	8	10	10	3.480,0	Tersebar		Kemen PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai prioritas</i>	<i>Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan (unit)</i>	14	15	15	15	15	1.145,0	Tersebar		Kemen PU&PERA
<i>Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana</i>	<i>Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana (wilayah sungai)</i>	10	20	20	20	20	90,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis</i>		Kemen PU&PERA
<i>Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai</i>	<i>Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)</i>	32	14	10	11	4	2.845,0	<i>Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur</i>		Kemen PU&PERA
ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian)	50	50	50	50	50	104,6			
	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana (dokumen)	55	55	55	55	55				
<i>Master Plan Kawasan Rawan Bencana</i>	<i>jumlah rekomendasi teknis kawasan rawan bencana yang disusun (rekomendasi teknis)</i>	2	2	2	2	2	20,1	Pusat		KEMEN ATR/ BPN
<i>Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana</i>	<i>Jumlah kajian pemetaan dan analisis risiko bencana tersusun (dokumen)</i>	5	5	5	5	5	26,3	Pusat		BNPB
<i>Penguatan data pemetaan kawasan rawan bencana geologi</i>	<i>Jumlah peta geologi gunung api dan peta kawasan rawan bencana geologi (peta)</i>	8	20	20	20	20	13,2			KEMEN ESDM
<i>Penegakkan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang</i>	<i>Jumlah rekomendasi geologi terpadu untuk daerah perkotaan (kawasan)</i>	4	4	4	4	4	45,0	20 kota		KEMEN ESDM
ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa (jiwa)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2.503,3			
	Persentase waktu Respon penanganan darurat kurang dari 24 jam (persen)	100	100	100	100	100				
<i>Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR</i>	<i>Jumlah Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (paket)</i>	40	40	40	40	40	0,0	34 provinsi		BASARNAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengelola Infrastruktur Darurat</i>	<i>Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya (personil)</i>	100	100	100	100	100	6,1	34 provinsi		BNPB
<i>Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan keposkoan</i>	<i>Jumlah personil yang mendapat pendampingan SKPDB dan keposkoan (personil)</i>	105	105	105	105	105	8,2	Pusat		BNPB
<i>Penanggulangan Krisis Kesehatan</i>	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan (kab/kota)</i>	35	35	35	35	35	34,7	Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK		Kemendes
<i>Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar</i>	<i>Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa)</i>	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	503,9	34 Provinsi		KEMENSOS
<i>Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi</i>	<i>Jumlah penduduk di lokasi rawan bencana yang memperoleh pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi (orang)</i>	214.952	214.952	214.952	214.952	214.952	838,0	34 Provinsi		KEMENSOS
<i>Pengelolaan Operasi SAR</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (dokumen laporan)</i>	39	39	39	39	39	0,0	34 provinsi		BASARNAS
<i>Pengelolaan dana bantuan kedaruratan</i>	<i>jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan (kegiatan)</i>	10	10	10	10	10	1.056,4	34 provinsi		BNPB
<i>Pendamping penanganan korban dan pengungsi</i>	<i>Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi (orang)</i>	490 orang	490 orang	490 orang	490 orang	490 orang	56,0	34 provinsi		BNPB
ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	50	75	90	100	100	210,3			
	Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana (persen)	5	5	5	5	5				
<i>Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik</i>	<i>Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (lokasi)</i>	4	4	4	4	4	8,5	34 provinsi		BNPB
<i>Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi</i>	<i>Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi (lokasi)</i>	8	8	8	8	8	25,2	34 provinsi		BNPB
<i>Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</i>	<i>Jumlah personil yang didampingi (personil)</i>	120	120	120	120	120	7,9	Pusat		BNPB
<i>Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca</i>	<i>Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana (unit)</i>	20	21	22	23	24	110,1	34 provinsi		KEMEN KUKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam</i>	<i>Jumlah penanganan dampak perubahan iklim (ha)</i>	20	20	20	20	20	5,5	34 Provinsi		KEMANTAN
<i>Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial</i>	<i>Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (sekolah)</i>	30	30	30	30	30	25,4	34 Provinsi		KEMENDIKBUD
<i>Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihan Sosial</i>	<i>Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana (jiwa)</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27,6	34 provinsi		KEMENSOS
ProP : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Jumlah sistem mitigasi multi ancaman bencana (MHEWS) terpadu (sistem)	1	1	1	1	1	8.555,6			
	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana (kelompok)	200	200	200	200	200				
	Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multi ancaman bencana (kab/kota)	514	514	514	514	514				
	Kenaikan indeks kesiapsiagaan bencana (indeks)	0,0040	0,0044	0,0048	0,0053	0,0059				
<i>Informasi Gempabumi dan Tsunami dengan pemasangan seismograf</i>	<i>Jumlah penambahan peralatan seismograf untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami (unit)</i>	117	56	55	55	55	889,1	34 Provinsi	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BMKG
<i>Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas</i>	<i>Jumlah Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas (sistem)</i>	300	50	50	50	50	1.441,3	34 Provinsi	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BMKG
<i>Sekolah Lapang Geofisika untuk pemahaman masyarakat terhadap informasi gempabumi dan tsunami melalui sekolah lapang geofisika (orang)</i>	<i>Jumlah peserta yang meningkat pemahaman masyarakat terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami melalui sekolah lapang geofisika (orang)</i>	300	900	900	900	900	24,4	34 Provinsi	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BMKG
<i>Informasi Kerentanan Seismik di Kota Besar</i>	<i>Jumlah kota besar yang dilakukan studi informasi kerentanan seismik (kota)</i>	5	2	2	2	2	11,8	13 kota	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BMKG
<i>Operasional Aloptama MKG yang Prima</i>	<i>Persentase alat operasional utama MKG yang laik operasi (persen)</i>	90	91	92	93	94	1.681,0	34 provinsi	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BMKG
<i>Jaringan komunikasi yang handal</i>	<i>Peningkatan persentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi (persen)</i>	92	93	94	95	96	812,5	34 provinsi	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BMKG
<i>Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II</i>	<i>Jumlah stasiun yang menyediakan layanan informasi cuaca digital skala desa/kelurahan dengan scalling up wheather capacity II (stasiun)</i>	-	1	10	34	-	346,2	34 provinsi	<i>Penguatan sistem peringatan dini bencana</i>	BMKG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Informasi meteorologi maritim melalui Strengthening of Marine Meteorology	Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim (pelabuhan)	20	20	20	20	20	1.792,3	100 pelabuhan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BMKG
Informasi peringatan dini windshear	Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear (bandara)	4	3	2	2	3	278,5	14 bandara	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BMKG
Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi	jumlah pos pengamatan gunungapi yang dikembangkan (unit)	10	13	13	13	14	141,8	Pusat dan Daerah	Penguatan sistem peringatan dini bencana	KEMEN ESDM
Penguatan sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	Jumlah Lokasi sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan (lokasi)	8	17	17	17	17	303,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	KEMEN ESDM
Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)	Jumlah Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (lokasi)	3		16	16	16	26,5	Provinsi Jawa Barat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	LIPI
Sistem Peringatan Dini	jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini yang dimanfaatkan (sistem)	6	6	6	6	6	22,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BNPB
Desa Tangguh Bencana	jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan (desa)	120	120	120	120	120	47,1	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BNPB
Satuan Pendidikan Aman Bencana	jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (lokasi)	8	8	8	8	8	19,5	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BNPB
Stasiun InaCORS yang Terbangun	Jumlah Stasiun CORS Pemetaan Skala Besar dan Geodinamika yang dibangun dalam Rangka Mendukung Mitigasi Bencana (InaTEWS) (titik)	30	45	45	45	45	242,5	Seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan peta sebaran multi bencana BMKG	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BIG
Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun	Jumlah Stasiun Pasang Surut yang dibangun untuk pemetaan skala besar, serta dalam rangka mendukung program mitigasi bencana (InaTEWS) (titik)	26	31	31	31	31	136,6	Seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan peta sebaran multi bencana BMKG	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BIG
Titik Pantau Geodinamika yang terkelola	Jumlah stasiun CORS yang beroperasi di lokasi sebaran sesar gempa (titik)	90	90	90	90	90	8,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	BIG
Inovasi Sistem dan Teknologi InaTEWS	Jumlah Inovasi Sistem dan Teknologi InaTEWS (inovasi)	1	1	1	1	1	215,9	DKI Jakarta, Mentawai dan Selat Sunda	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	BPPT
Radio Tanggap Bencana	Jumlah lokasi Radio Early Warning System (EWS) (lokasi)	5	10	15	20	25	28,2	Pusat	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	LPP RRI
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai kritis (unit)	4	4	4	4	4	50,0	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	Kemen PU&PERA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan sistem peringatan dini banjir</i>	<i>Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai prioritas lainnya (unit)</i>	3	3	3	3	3	37,5	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir</i>	<i>Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana</i>	<i>Kemen PU&PERA</i>
KP : Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen)	0,256	0,412	0,543	0,650	0,732	43.449,3			
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (persen)	0,009	0,028	0,045	0,060	0,072				
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen)	0,054	0,107	0,156	0,207	0,251				
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen)	0,024	0,044	0,062	0,078	0,093				
ProP : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	12	12	12	12	12	24.346,5			
	Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen (pelabuhan)	20	20	20	20	20				
	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan (km)	22	31	37	43	42				
<i>Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim</i>	<i>Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)</i>	12	12	12	12	12	130,0	<i>Daerah</i>		<i>KKP</i>
<i>Data dan/ atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir</i>	<i>Jumlah Data dan/ atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir (kawasan)</i>	10	10	12	12	13	25,0	<i>34 provinsi</i>		<i>KKP</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data dan/ atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	Jumlah Data dan/ atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP (paket)	2	2	3	4	4	10,0	11 WPP		KKP
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	Jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (lokasi)	4	5	5	5	5	17,9	Daerah		KKP
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)	16 (termasuk 200 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)	187,4	60 Lokasi		KKP
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)	12,75	14,1	14,5	15,3	15,2	641,5	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur		Kemen PU&PERA
Pengaman pesisir pantai utara Jakarta	Pengaman pesisir pantai utara Jakarta dengan skema KPBU (km)	0	7,25	7,25	7,25	7,25	13.370,0	Provinsi DKI Jakarta		Kemen PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)	8,75	10	15	20	20	7.656,8	Kawasan prioritas lainnya dan pulau pulau tertuar		Kemen PU&PERA
Rehabilitasi Hutan Mangrove	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)	5.000	11.250	11.250	11.250	11.250	1.000,0	tersebar		KEMEN LHK, KKP, Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	Jumlah kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya (provinsi)	34	34	34	34	34	122,1			KEMEN LHK
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)	4	5	6	8	10	37,9	34 provinsi		KEMEN LHK
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Meteorologi Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)	Jumlah nelayan yang meningkat pemahamannya terhadap informasi cuaca maritim dan peringatan dini cuaca melalui sekolah lapang nelayan/ SLN (orang)	500	1.360	1.360	1.360	1.360	29,7	34 provinsi		BMKG
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (unit)	67	70	73	75	77	1.118,2	Pusat		Kemenhub
ProP : Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)	2	3	4	3	5	17.850,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah wilayah sungai yang ditingkatkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (wilayah sungai)	10	20	20	20	20				
<i>Pengembangan Sistem Data dan Informasi DAS Realtime</i>	<i>Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS Realtime yang dikembangkan (sistem)</i>	1	1	1	1	1	194,0		KEMEN LHK	
<i>Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif</i>	<i>Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)</i>	56.000	40.000	30.000	25.000	20.000	5.740,5	33 provinsi	KEMEN LHK	
<i>Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis</i>	<i>Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (unit)</i>	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	502,0		KEMEN LHK	
<i>Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)</i>	2,44	2,53	3,84	3,06	4,67	5.674,6	Tersebar	Kemen PU&PERA	
<i>Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir</i>	<i>Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis</i>	3	5	8	10	10	1.003,5	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Kemen PU&PERA	
<i>Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir</i>	<i>Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas</i>	3	4	4	10	10	866,0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kemen PU&PERA	
<i>Pembangunan Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)</i>	<i>Jumlah kota dengan peningkatan sistem drainase utama (kota)</i>	20	20	20	20	20	3.870,0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai melintasi perkotaan yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kemen PU&PERA	
Prop : Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (unit)	200	200	200	200	200	637,8			
	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	1.000	1.275	1.450	1.650	1.650				
<i>Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun</i>	<i>Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun (ha)</i>	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	84,7	15 Provinsi	Kementan	
<i>Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim</i>	<i>Jumlah Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim (ha)</i>	75	75	75	75	75	11,0	31 Provinsi	Kementan	
<i>Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim</i>	<i>Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (unit)</i>	200	200	200	200	200	134,2	Pusat dan 22 provinsi	Kementan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi Adaptasi Perubahan iklim	Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim (teknologi)	1	1	1	1	1	3,1	1 Provinsi		Kemantan
Penerapan Penanganan DPI	Terlaksananya Penerapan Penanganan DPI (ha)	550	560	570	580	590	19,9	22 Provinsi		Kemantan
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI (lokasi)	5000	5000	5000	5000	5000	335,8	Pusat		Kemantan
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Iklim Terapan (Sekolah Lapang	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	1.000	1.275	1.450	1.650	1.650	49,1	281 lokasi		BMKG
ProP : Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS) (kab/kota)	110	220	280	380	420	614,4			
Pengendalian Penyakit Arbovirosis	Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBDs49/100.000 penduduk (persen)	70	75	80	85	90	35,4	34 provinsi		Kemendes
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS) (kab/kota)	110	220	280	380	420	76,0	34 Provinsi		Kemendes
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) (kab./kota)	60	65	70	75	80	260,9	34 Provinsi		Kemendes
Kewaspadaan dini kejadian penyakit	Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan (persen)	80	85	90	95	100	242,1	10 BTKLPP		Kemendes
PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	252.934,2			
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3				
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4				
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9				
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	171.735,2			
	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	139,5	138,0	136,6	135,2	133,8				
	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80				
ProP : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT (MW)	686,5	1.001,1	1.921,8	1.778,2	3.662,7	167.774,1			
	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (juta kilo liter)	10,00	10,20	14,15	14,55	17,35				
PLTA	Kapasitas terpasang tambahan (MW)	165,2	440,3	955,9	397,0	1.951,4	74.996,7			KESDM, BUMN, Swasta
PLT Panas Bumi (PLTP)	Kapasitas terpasang tambahan (MW)	140,0	80,0	132,0	300,0	375,0	42.270,0			KESDM, BUMN, Swasta
PLT Bioenergi	Kapasitas terpasang tambahan (MW)	246,7	152,0	484,8	159,0	252,6	24.656,0			KESDM, BUMN, Swasta
PLT Surya (PLTS)	Kapasitas terpasang tambahan (MW)	134,6	328,8	339,1	643,2	643,7	17.931,6			KESDM, BUMN, Swasta
PLT Bayu (PLTB)	Kapasitas terpasang tambahan (MW)	0,0	0,0	10,0	279,0	440,0	7.919,8			KESDM, BUMN, Swasta
Pembangunan kilang BBN (Untuk perkiraan Capex 650 sd 850 Juta USD)	Tahapan Pembangunan Green Refinery Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per Day di RUIII Plaju (tahapan)	Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition)	Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision)	EPC	EPC	Start Up dan On Stream (Mid 2024)	0,0			KESDM, BUMN, Swasta
ProP : Efisiensi dan Konservasi Energi	Peningkatan Implementasi SKEM (peralatan)	3	2	1	0	0	3.961,1			
Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum	Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya (peralatan)	3	2	1	-	-	2,1	Pusat		KEMEN ESDM
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (rekomendasi)	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (rekomendasi)	1	1	1	1	1	9,0	Pusat		KEMEN ESDM
Pembangunan SPKLU	Jumlah Penambahan SPKLU (unit akumulasi)	168	390	693	1.030	1.558	0,0	Tersebar		Badan Usaha
Pengembangan smart grid	Jumlah pengembangan smart grid (lokasi)	5 di Bali	Beberapa Distribusi di P. Jawa	Beberapa Distribusi di P. Jawa	Beberapa Distribusi di P. Jawa	Interkoneksi Smart Grid di Jamali	1.450,0	Sistem Jamali		Badan Usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan</i>	<i>Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)</i>	5	5	5	5	6	500,0	Tersebar		Kemenuh
<i>Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kota Lainnya</i>	<i>Terbanggunya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota) (perkotaan)</i>	1	1	1	1	1	500,0	Tersebar		Kemenuh, Pemda, KPBU
<i>Subsidi angkutan umum massal perkotaan</i>	<i>Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)</i>	6	8	10	12	14	1.500,0	Tersebar		KEMENHUB
KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	301.800	318.200	325.000	325.000	330.000	18.998,4			
	Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	366.000	370.000	400.000	425.000	420.000				
	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen)	60	70	80	90	100				
ProP : Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.993,7			
	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	1.800	18.200	25.000	25.000	30.000				
<i>Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan</i>	<i>Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)</i>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.858,7	7 provinsi		KEMEN LHK
<i>Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi</i>	<i>Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)</i>	1.800	18.200	25.000	25.000	30.000	1.135,1	12 provinsi		KEMEN LHK
ProP : Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	366.000	370.000	400.000	425.000	420.000	6.288,5			
<i>Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif</i>	<i>Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)</i>	56.000	40.000	30.000	25.000	20.000	5.740,5	33 provinsi		KEMEN LHK
<i>Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis</i>	<i>Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (unit)</i>	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	502,0			KEMEN LHK
<i>Penanaman / pengkayaan pada hutan produksi</i>	<i>Luas penanaman di hutan produksi (ha)</i>	310.000	378.000	403.000	428.000	453.000	46,0			KEMEN LHK
ProP : Pengurangan Laju Deforestasi	Laju Deforestasi (ha/tahun)	480.000	430.000	380.000	330.000	310.000	5.622,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)	65	65	65	65	65	61,0			KEMEN LHK
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif	7	10	8	6	3	88,4			KEMEN LHK
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	552	552	552	552	552	122,1			KEMEN LHK
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)	500	1500	2500	3500	4500	2.667,3			KEMEN LHK
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (unit KEE)	11	22	33	44	55	54,9			KEMEN LHK
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (juta ha)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	950,0			KEMEN LHK
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)	1	1,6	1	0	0	260,0			KEMEN LHK
Operasi pengamanan kawasan hutan	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan	100	130	140	160	180	548,4	33 provinsi		KEMEN LHK
KPH yang masuk kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk kategori Maju (unit)	10	20	30	40	50	90,0			KEMEN LHK
Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)	4	8,5	9	9	3	780,0			KEMEN LHK
ProP : Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Jumlah Optimasi Lahan pertanian (ha)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	4.094,2			
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim (teknologi)	1	1	1	1	1	1,8	1 Provinsi		KEMENTAN
Optimasi Lahan	Jumlah optimasi Lahan pertanian (ha)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.655,4	15 provinsi		Kementan
Hijauan Pakan Ternak	Jumlah penanaman hijauan pakan ternak (ha)	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	247,9			Kementan
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Organik/UPPO (unit)	500	500	500	500	500	716,7	Pusat		Kementan
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (desa)	69	69	69	69	69	63,0	15 Provinsi		Kementan
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Luas terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (ha)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	265,5	Pusat		Kementan
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian (rekomendasi)	17	17	17	17	17	143,9	Pusat dan 25 provinsi		Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	64,80	67,10	68,51	69,20	69,80	60.800,9			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	3.885.755	3.885.755	3.885.755	3.885.755	3.885.755				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	223.005	255.938	316.630	376.145	409.078				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	144.128	164.717	308.845	473.562	494.152				
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	14,00	16,40	17,99	18,90	19,70	60.800,9			
	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	50,80	50,70	50,52	50,30	50,10				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	39	33	67	101	97				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (lokasi)	78	108	113	116	116				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPST (provinsi)	12	13	25	37	37				
Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)	5,65	6,23	6,81	7,14	7,48	100,9	34 provinsi		KEMEN LHK
Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)	8,35	10,17	11,18	11,76	12,22	162,7	34 provinsi		Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)	19,26	19,19	19,12	19,05	18,97	673,9	34 provinsi		KEMEN LHK
Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)	31,54	31,51	31,40	31,25	31,13	1.105,4	34 provinsi		Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	Jumlah fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) yang terbangun(unit)	0	1	1	1	1	1.000,0	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)		KEMEN LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	39	46	46	46	47	25.391,0	224 kab/kota		Kemen PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		10	28	28	29	10.750,0	95 kab/kota		KPBU
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah kabupaten/kota yang menyediakan dukungan pembangunan TPA (kab/kota)	39	56	74	74	76	13.645,0	319 kab/kota		APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah kapasitas sampah yang dikelola unit TPS3R (ton/hari)	283	283	565	848	848	1.036,0	120 kab/kota		DAK
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah kapasitas sampah yang dikelola unit TPS3R (ton/hari)	189	189	377	565	565	691,0	120 kab/kota		Kemen PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah kapasitas sampah yang dikelola unit TPS3R (ton/hari)	83	83	166	250	250	305,0			APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)	7	8	15	23	22	5.940,0	55 kab/kota		Kemen PU&PERA
KP : Pengembangan Industri Hijau	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)	9	9	9	10	10	52,4			
ProP : Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	Jumlah rancangan standar penurunan emisi GRK dan limbah B3 sektor industri (akumulasi rancangan standar)	9	8	24	32	40	52,4			
Penyusunan dan Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)	9	9	9	10	10	24,2			Kemenperin
Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	Jumlah Rancangan Standar (Rancangan Standar)	5	4	12	16	20	11,4			Kemenperin
Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri	Jumlah Rancangan Standar (Rancangan Standar)	4	4	12	16	20	16,8			Kemenperin
KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)	5.000	11.250	11.250	11.250	11.250	1.347,4			
ProP : Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	Jumlah lokasi pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai (lokasi)	20	21	22	24	26	1.347,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Rehabilitasi Hutan Mangrove</i>	<i>Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)</i>	5.000	11.250	11.250	11.250	11.250	1.000,0	<i>tersebar</i>		<i>KEMEN LHK, KKP, Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya</i>
<i>Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi</i>	<i>Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)</i>	<i>16 (termasuk 200 ha rehabilitasi mangrove)</i>	<i>16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)</i>	<i>16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)</i>	<i>16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)</i>	<i>16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)</i>	187,4	<i>60 Lokasi</i>		<i>KKP</i>
<i>Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove</i>	<i>Jumlah kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya (provinsi)</i>	34	34	34	34	34	122,1			<i>KEMEN LHK</i>
<i>Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya</i>	<i>Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)</i>	4	5	6	8	10	37,9	<i>34 provinsi</i>		<i>KEMEN LHK</i>
JUMLAH							348.662,2			

Keterangan :

Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI							17.049,8			
KP : Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,30	75,35	75,40	75,45	75,50	14.100,7			
Prop : Penguatan Penyelenggara Pemilu	Terwujudnya penguatan penyelenggara Pemilu di Seluruh Provinsi/ Kabupaten/ Kota	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	6.385,8			
<i>Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu</i>	<i>Jumlah Badan Adhok yang terbentuk</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	2.235,0	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>		<i>KPU</i>
<i>Ketersediaan Logistik Pemilu</i>	<i>Persentase penyediaan logistik Pemilu</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	638,6	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>		<i>KPU</i>
<i>Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</i>	<i>Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	319,3	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>		<i>KPU</i>
<i>Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	638,6	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>		<i>KPU</i>
<i>Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Parwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/ Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	1.277,2	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>		<i>Bawaslu</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu</i>	<i>Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang disesuaikan dengan regulasi</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	1.277,2	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>		<i>Bawaslu</i>
ProP : Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	Tersusunnya UU Bidang Politik yang lebih komprehensif	2	2	2	N/A	N/A	6,0			
<i>Kebijakan Politik Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik</i>	<i>2 kebijakan/ per aturan</i>	<i>2 kebijakan/ per aturan</i>	<i>2 kebijakan/ per aturan</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	6,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
ProP : Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	126.376.418 suara sah	126.376.418 suara sah	126.376.418 suara sah	126.376.418 suara sah	126.376.418 suara sah	7.679,9			
<i>Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</i>	<i>Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR</i>	<i>126376418 suara sah</i>	<i>126376418 suara sah</i>	<i>126376418 suara sah</i>	<i>126376418 suara sah</i>	<i>126376418 suara sah</i>	7.679,9	<i>Pusat</i>		<i>Kemendagri</i>
ProP : Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	Terlaksananya peningkatan kualitas demokrasi internal partai politik	100 orang	200 orang	500 orang	700 orang	800 orang	11,5			
<i>Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik</i>	<i>Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik</i>	<i>100 orang</i>	<i>200 orang</i>	<i>500 orang</i>	<i>700 orang</i>	<i>800 orang</i>	11,5	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemendagri</i>
ProP : Penguatan Demokrasi di Daerah	Terlaksananya penguatan demokrasi di 34 provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	17,5			
<i>Penguatan Demokrasi di Daerah</i>	<i>Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi</i>	<i>34 Provinsi</i>	<i>34 Provinsi</i>	<i>34 Provinsi</i>	<i>34 Provinsi</i>	<i>34 Provinsi</i>	17,5	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>		<i>Kemendagri</i>
KP : Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	795,3			
	Skor IDI Variabel Kesetaraan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	76,89	77,90	78,82	79,67	80,47				
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	45	43	41	39				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	N/A	N/A	N/A	22,52%				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	20%				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	17%				
ProP : Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu dan Pusat Pengawasan Partisipatif di 549 satker (Nasional, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota)	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah	447,9			
<i>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</i>	<i>Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	106,4	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>	<i>KPU</i>	
<i>Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum</i>	<i>Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	21,3	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>	<i>KPU</i>	
<i>Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas</i>	<i>Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	63,8	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>	<i>KPU</i>	
<i>Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana</i>	<i>Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	85,1	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>	<i>KPU</i>	
<i>Pendidikan Pengawasan Partisipatif</i>	<i>Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Pamwas Kab/ Kota/ Kecamatan, dan OMS</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	<i>549 Saker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>	42,6	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>	<i>Bawaslu</i>	
<i>Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif</i>	<i>Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif</i>	<i>Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah</i>	<i>Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah</i>	<i>Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah</i>	<i>Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah</i>	<i>Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah</i>	63,8	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/ Kota)</i>	<i>Bawaslu</i>	
<i>Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting</i>	<i>Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu</i>	<i>19 Daerah</i>	<i>34 Daerah</i>	<i>34 Daerah</i>	<i>34 Daerah</i>	<i>34 Daerah</i>	42,6		<i>Bawaslu</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah</i>	<i>Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik</i>	3000 orang	5000 orang	6000 orang	8000 orang	10000 orang	11,2	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>Kemendagri</i>
<i>Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan Penggerak Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan bagi perempuan penggerak pembangunan desa</i>	10 Provinsi	8 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	11,1	<i>Provinsi</i>		<i>Kemen PPPA</i>
ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	Terlaksananya pemilu yang akuntabel dan sinergis	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	283,9			
<i>Penguatan Pengawasan Netralitas ASN</i>	<i>Jumlah kementerian/ lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	85,2	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>Bawaslu</i>
<i>Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)</i>	<i>Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	71,0	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>KPU</i>
<i>Peningkatan kompetensi SDM KPU</i>	<i>Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	<i>Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota</i>	127,8	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>KPU</i>
ProP : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	400 orang	1800 orang	3000 orang	3300 orang	4200 orang	63,5			
<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik</i>	400 orang	1800 orang	3000 orang	3300 orang	4200 orang	63,5	<i>Pusat dan Daerah</i>		<i>Kemdagri</i>
KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	70	71	71	72	72	2.153,7			
	Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas	80	83	85	90	95				
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	50000 orang	50000 orang	50000 orang	50000 orang	50000 orang				
ProP : Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	Terintegrasinya tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	93,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penata Kelola Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	13,8	<i>Pusat</i>		<i>Ditjen IKP, Kemkominfo</i>
<i>Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional</i>	<i>Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	65	70	75	85	90	0,5	<i>Pusat</i>		<i>Ditjen IKP, Kemkominfo</i>
	<i>Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM, Media Tradisional, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bako Humas, Petugas Informasi Publik/PIP, dan lain-lain) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional</i>	65	70	75	80	85	29,4	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>Ditjen IKP, Kemkominfo</i>
<i>Peyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 (*)</i>	<i>Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan</i>	72	80	90	100	110	8,3	<i>Pusat</i>		<i>Komisi Informasi Pusat</i>
	<i>(16.10.2 b)</i>									
<i>Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (**)</i>	<i>Jumlah Badan Publik yang Informatif</i>	35	40	45	55	60	13,7	<i>Pusat</i>		<i>Komisi Informasi Pusat</i>
	<i>(16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)</i>									
<i>Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik</i>	<i>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</i>	<i>1 Dokumen</i>	35	40	45	50	27,4	<i>Pusat</i>		<i>Komisi Informasi Pusat</i>
ProP : Penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	60	63	65	68	70	17,7			
<i>Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik</i>	<i>Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik</i>	500	550	600	650	700	1,1	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>Ditjen IKP, Kemkominfo</i>
<i>Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka dan</i>	<i>Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T yang mendapat akses informasi publik</i>	65	68	70	73	75	16,6	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>Ditjen IKP, Kemkominfo</i>
	<i>Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap konten informasi publik</i>	55	58	60	63	65	0,0	<i>Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)</i>		<i>Ditjen IKP, Kemkominfo</i>
ProP : Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.851,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Profesional	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang memperoleh Pelatihan dan Sertifikasi (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.687,7	Pusat		Balibang, Kemkominfo
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) penerima beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95	164,2	Pusat		Balibang, Kemkominfo
ProP : Peningkatan literasi TIK masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	2.000	2.200	2.500	3.000	3.500	8,3			
Pengenalan TIK kepada masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	2.000	2.200	2.500	3.000	3.500	8,3	Pusat		Balibang, Kemkominfo
ProP : Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	7,0			
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big Data Pemerintah	Jumlah Kajian Strategis Penerapan Big Data Pemerintah	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	7,0	Pusat		Balibang, Kemkominfo
ProP : Penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	Indeks Kemerdekaan Pers	74	74,3	74,6	74,9	75	66,9			
Pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	Persentase (%) pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	85	85	90	90	90	3,5	Pusat		Dewan Pers
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	Persentase (%) provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	78	80	83	85	90	28,4	Pusat		Dewan Pers
Pendataan dan verifikasi perusahaan pers	Jumlah perusahaan pers yang diverifikasi secara faktual	250	500	500	600	700	4,3	Pusat		Dewan Pers
	Persentase (%) perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual	80	80	80	80	80	0,0			Dewan Pers
Sertifikasi Jurnalis	Jumlah wartawan yang tersertifikasi jurnalis	490 orang	1500 orang	1500 orang	1500 orang	1500 orang	30,7	Pusat		Dewan Pers
Pelatihan Jurnalis	Jumlah wartawan yang mendapat pelatihan jurnalistik	500 orang	1650 orang	1650 orang	1650 orang	1650 orang	0,0	Pusat		Dewan Pers
	Persentase (%) jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers	98	98	98	98	98	0,0	Pusat		Dewan Pers
ProP : Peningkatan kualitas lembaga penyiaran	Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	23	57	58	59	59	108,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang Memenuhi Standar Peraturan Perundangan Bidang Penyiaran	Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan (Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)	23	57	58	59	59	74,9	Pusat		Komisi Penyiaran Indonesia
Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	7	9	11	13	15	30,4	Pusat		Komisi Penyiaran Indonesia
Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio	Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan	96	97	98	99	99	3,5	Pusat		Komisi Penyiaran Indonesia
PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67	4.389,7			
KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	43,2	46,8	50,5	56,3	57,8	1.722,1			
	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0				
ProP : Peningkatan dan Intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	43,2	46,8	50,5	56,3	57,8	124,4			
Perundingan batas dan Kerja Sama Kelautan Maritim INA dgn 9 negara tetangga	Persentase perundingan batas dan kerja sama perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga	100%	100%	100%	100%	100%	15,6	Pusat		Kemenlu
Perundingan Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas	Persentase penetapan batas dan kerja sama perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga	100%	100%	100%	100%	100%	22,5	Pusat		Kemenlu
Kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	5	5	5	5	5	26,5	Pusat		Kemendagri
Tanda batas negara	jumlah tanda batas negara	120	225	200	200	200	31,5	Pusat		BIG
Peta batas negara	jumlah peta batas negara	32	20	20	20	20	2,5	Pusat		BIG
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	6	20	20	17	15	1,4	Pusat		BIG
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	3	20	20	20	20	2,5	Pusat		BIG
Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum, dan Perjanjian Maritim	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	9	10	10	10	10	21,9	Pusat		Kemenko Marin
ProP : Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	34,40	34,80	35,20	35,60	36,00	1.597,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50				
	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	21,50	21,75	22,00	22,25	22,50				
	Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	17,20	17,40	17,60	17,80	18,00				
<i>Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar</i>	<i>Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan</i>	55,9%	56,6%	57,2%	57,9%	50,9%	332,8	<i>Pusat</i>	<i>Kemenlu</i>	
	<i>Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan</i>	30,1%	30,5%	30,8%	31,2%	27,7%	0,0		<i>Kemenlu</i>	
	<i>Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri</i>	30,1%	30,5%	30,8%	31,2%	31,5%	0,0		<i>Kemenlu</i>	
	<i>Tingkat pengembangan sistem informasi.</i>	34,4%	34,8%	35,2%	35,6%	36,0%	0,0		<i>Kemenlu</i>	
	<i>Tingkat kepuasan pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel.</i>	17,2%	17,4%	17,6%	17,8%	18,0%	0,0		<i>Kemenlu</i>	
	<i>Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri</i>	4,3%	4,4%	4,4%	4,5%	4,5%	0,0		<i>Kemenlu</i>	
	<i>Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Ditandatangani</i>	21,5%	21,8%	22,0%	22,3%	22,5%	0,0		<i>Kemenlu</i>	
	<i>Persentase Standar / Panduan Teknis di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterapkan</i>	17,2%	17,4%	17,6%	17,8%	18,0%	0,0		<i>Kemenlu</i>	
	<i>Persentase Produk Hukum Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Disahkan</i>	21,5%	21,8%	22,0%	22,3%	22,5%	0,0		<i>Kemenlu</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Persentase SDM K/L/I/Perwakilan RI yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri</i>	17,2%	17,4%	17,6%	17,8%	18,0%	0,0			Kemenlu
	<i>Persentase Kertas Kerja Analisa Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Dihasilkan</i>	8,6%	8,7%	8,8%	8,9%	9,0%	0,0			Kemenlu
	<i>Persentase Rekomendasi Kemenlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan Internasional</i>	30,1%	30,5%	30,8%	31,2%	31,5%	0,0			Kemenlu
	<i>Persentase Rekomendasi Kemenlu yang Diterima dalam Kebijakan / Regulasi Nasional terkait Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri</i>	30,1%	30,5%	30,8%	31,2%	31,5%	0,0			Kemenlu
	<i>Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri</i>	25,8%	26,1%	26,4%	26,7%	27,0%	0,0			Kemenlu
<i>Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Pelindungan WNI dan BHI</i>	<i>Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Pelindungan WNI dan BHI</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,0	Pusat		Kemenlu
<i>Pelindungan dan Pelayanan Konsuler WNI/ BHI (Perwakilan RI)</i>	<i>Jumlah WNI/ BHI yang Mendapat Pelindungan (orang)</i>	230000	241500	253575	266254	279566	726,9	Perwakilan RI		Kemenlu
<i>Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Atase di 12 negara</i>	<i>Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri secara prosedural</i>	250000	260000	270000	280000	300000	170,0	UEA, Brunei, Hong kong, Jeddah, Jordan, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Riyadh, Singapura, Taiwan		Kemenaker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural</i>	<i>Pelaksanaan pembekalan akhir keberangkatan</i>	179.860 <i>CTKI/TKI</i>	200.000 <i>CTKI/TKI</i>	230.000 <i>CTKI/TKI</i>	260.000 <i>CTKI/TKI</i>	300.000 <i>CTKI/TKI</i>	190,0	<i>Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta</i>		<i>BNP2TKI</i>
<i>CTKI/TKI yang terlindungi</i>	<i>Penanganan/pemulangan RKI Bermasalah</i>	18.000 TKI	17.000 TKI	15.000 TKI	13.000 TKI	10.500 TKI	175,0	<i>Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta</i>		<i>BNP2TKI</i>
KP : Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular	86	100	115	133	152	642,6			
Prop : Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerjasama pembangunan internasional	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (Rp Miliar)	123,5	138,1	154,0	171,4	190,0	599,5			
	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular	86	100	115	133	152				
<i>Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang</i>	<i>Jumlah Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang</i>	560	560	560	560	560	135,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemen Ristek/BRIN</i>
<i>Bantuan Kerja sama Teknis Indonesia</i>	<i>Jumlah Kegiatan Bantuan teknis Indonesia</i>	23	24	25	26	27	95,7	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
<i>Beasiswa Dharmasiswa</i>	<i>Jumlah orang penerima beasiswa</i>	650 orang	650 orang	650 orang	650 orang	650 orang	211,2	<i>Pusat</i>		<i>Kemendikbud</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri</i>	<i>Jumlah penugasan pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri</i>	220 penugasan	220 penugasan	220 penugasan	220 penugasan	220 penugasan	91,7	Pusat		Kemendikbud
<i>Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pekerjaan Umum</i>	<i>Jumlah kegiatan KSST Bidang Pekerjaan Umum</i>	2	2	3	3	4	14,0	Pusat		Kemen PU&PERA
<i>Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pengawasan Obat dan Makanan</i>	<i>Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan dibidang Obat dan Makanan dalam skema KSST</i>	2	2	2	2	2	5,3	Pusat		BPOM
<i>Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	<i>Jumlah kegiatan KSST Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	2	2	2	2	2	8,3	Pusat		KKP
<i>Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pertanian</i>	<i>Jumlah kegiatan KSST Bidang Pertanian</i>	1	1	1	1	1	2,9	Pusat		Kementan
<i>KSST Bidang Peningkatan Kapasitas</i>	<i>Jumlah Kegiatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri</i>	8	10	11	12	13	21,0	Pusat		Setneg
<i>Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular</i>	<i>Jumlah Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular</i>	1	1	1	1	1	13,5	Pusat		Kemen PPN/Bappenas
<i>Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Keuangan</i>	<i>Jumlah kegiatan KSST Bidang Keuangan</i>	1	0	0	0	0	0,9	Pusat		Kemenkeu
Prop : Penciptaan lingkungan yang mendukung (enabling environment) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Tingkat Partisipasi Aktor Non Pemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	2,2-2,38%	2,48-2,55%	2,65-2,74%	2,84-2,96%	2,96-3,16%	43,1			
<i>Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan</i>	<i>Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral</i>	90	90	90	90	90	2,8			Kemenlu
	<i>Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan</i>	70	70	70	70	70	0,0			Kemenlu
<i>Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup</i>	<i>Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi dan sosial di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral</i>	90	90	90	90	90	23,2			Kemenlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Presentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	90	90	90	90	90	17,1			Kemenlu
	Indeks respon positif stakeholders terhadap informasi database kebijakan perdagangan	4	4	4	4	4	0,0			Kemenlu
	Peningkatan kemampuan melalui capacity building diplomasi ekonomi multilateral	80	80	80	80	80	0,0			Kemenlu
KP : Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3,8	3,836	3,882	3,942	4	282,9			
ProP : Penyusunan kebijakan diplomasi publik dan turunannya	Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3,8	3,836	3,882	3,942	4	282,9			
Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia Terpromosikan dengan Baik dan Tepat Sasaran	Persentase Dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia	95	95	96	97	97	213,6			Kemenlu
	Persentase kehadiran konstituen domestik/internasional dan negara sahabat dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia	95	95	95	95	95	0,0			
Diplomasi Digital dan Informasi hubungan luar negeri yang kuat	Persentase peningkatan jumlah pengunjung portal situs Kemenlu	25	25	25	25	25	42,9			Kemenlu
	Persentase peningkatan impresi dan engagement pada media sosial Kemenlu	20	20	20	20	20	0,0			
	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	91	92	93	94	95	0,0			
	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	85	85	86	86	86	0,0			
	Nilai keterbukaan informasi publik	80,5	81	81,5	82	82,5	0,0			
Rekomendasi terkait pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi strategis dan personil	Persentase Penyusunan Laporan Keamanan Informasi, Personal, dan Kerja Sama Keamanan Diplomatik sesuai target	85	85	85	85	85	26,4			Kemenlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Penyusunan rekomendasi keamanan informasi, personal, dan kerja sama keamanan diplomatik sesuai target</i>	85	85	85	85	85	0,0			
	<i>Persentase tindak lanjut rekomendasi Keamanan Informasi, Personil, dan Kerja Sama Keamanan Diplomatik</i>	75	76	77	78	79	0,0			
KP : Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	10	11	13	14	16	1.742,1			
ProP : Peningkatan inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	10	11	13	14	16	1.691,3			
<i>Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan</i>	<i>Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan</i>	90	90	90	90	90	37,3	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
	<i>Jumlah sidang/ pertemuan internasional di bidang hak asasi manusia dan kemanusiaan yang diprakarsai oleh Indonesia di forum multilateral</i>	5	5	5	5	5	0,0			
<i>Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan</i>	<i>Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral</i>	80	80	80	80	80	6,4	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
	<i>Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan multilateral</i>	70	70	70	70	70	0,0			
<i>Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan</i>	<i>Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional</i>	80	80	80	80	80	4,6	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
<i>Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata</i>	<i>Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata</i>	95	95	95	95	95	16,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	<i>Jumlah sidang / pertemuan Internasional dibidang Keamanan Internasional dan perlucutan Senjata yang diprakarsai oleh Indonesia di Forum Multilateral</i>	8	8	8	8	8	0,0			
<i>Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata</i>	<i>Persentase Rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara</i>	93	93	93	93	93	2,6	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
<i>Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata</i>	<i>Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di forum multilateral</i>	93	93	93	93	93	15,0	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
	<i>Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata</i>	80	80	81	81	81	0,0			
<i>Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup</i>	<i>Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup</i>	90	90	90	90	90	0,4	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
<i>Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup</i>	<i>Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional</i>	90	90	90	90	90	5,7	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>
<i>Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup</i>	<i>Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Diplomasi Maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup</i>	90	90	90	90	90	1,8	<i>Pusay</i>		<i>Kemenlu</i>
<i>kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan</i>	<i>Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual</i>	90	90	90	90	90	3,5	<i>Pusat</i>		<i>Kemenlu</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan</i>	<i>Presentase Rekomendasi dari forum kerjasama multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional</i>	90	90	90	90	90	5,3	Pusat		Kemenlu
<i>Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual</i>	<i>Presentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual</i>	90	90	90	90	90	2,4	Pusat		Kemenlu
<i>Kepemimpinan dan Peran Aktif Indonesia pada Berbagai Forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang</i>	<i>Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang</i>	87	87	88	90	90	30,2	Pusat		Kemenlu
<i>Diplomasi maritim yang kuat di forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang</i>	<i>Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang</i>	90	90	91	92	92	0,5	Pusat		Kemenlu
<i>Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang</i>	<i>Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Sosial Budaya yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional</i>	72	73	74	75	76	10,4	Pusat		Kemenlu
	<i>Persentase penyelesaian permohonan registrasi Organisasi Kemasyarakatan Asing</i>	70	71	72	73	74	0,0			
<i>Pemenangan Indonesia di Berbagai Pencalonan yang Pemilihannya dilakukan di Tahun 2020</i>	<i>Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral</i>	75	75	75	75	75	7,9	Pusat		Kemenlu
<i>Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN</i>	<i>Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN</i>	64	94	94	95	94	24,5	Pusat		Kemenlu
<i>Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN</i>	<i>Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN</i>	37	44	97	51	50	26,9	Pusat		Kemenlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/ Internasional</i>	130	135	140	146	151	36,1	Pusat		Kemenlu
<i>Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/ Internasional</i>	<i>Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan</i>	140	178	180	191	190	87,3	Pusat		Kemenlu
<i>Layanan Setnas ASEAN Indonesia</i>	<i>Dukungan Layanan Setnas ASEAN Indonesia</i>	1	1	1	1	1	26,7	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan Kerjasama di kawasan Sub Sahara Afrika</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Sub Sahara Afrika</i>	22	23	22	22	22	54,8	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah</i>	29	29	29	29	29	32,4	Pusat		Kemenlu
<i>Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik</i>	<i>Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik</i>	31	33	34	36	36	50,7	Pusat		Kemenlu
<i>Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intra kawasan Asia Pasifik dan Afrika</i>	<i>Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika</i>	39	39	39	39	39	31,6	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Timur Tengah</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Timur Tengah</i>	11	12	13	14	15	37,7	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Tenggara</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara</i>	25	25	25	25	25	30,0	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II</i>	15	15	15	15	15	19,6	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I</i>	24	29	29	29	29	26,2	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I</i>	17	17	17	17	17	21,9	Pusat		Kemenlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II</i>	19	20	21	22	23	33,0	Pusat		Kemenlu
<i>Prakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa</i>	<i>JumlahPrakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa</i>	26	26	26	26	26	24,4	Pusat		Kemenlu
<i>Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III</i>	<i>Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III</i>	34	35	35	35	35	33,2	Pusat		Kemenlu
<i>Kerjasama Bilateral/ Regional/ Multilateral</i>	<i>Jumlah kerjasama yang dilaksanakan</i>	4751	4851	4951	5051	5151	944,3	Perwakilan RI		Kemenlu
ProP : Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB	Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral	95	-	-	-	-	38,0			
<i>Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB</i>	<i>Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral</i>	95	-	-	-	-	38,0	Pusat/ Perwakilan		Kemenlu
ProP : Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	12,8			
<i>Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB</i>	<i>Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia</i>	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	12,8			Kemenlu
PP : PENEKAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	1.633,3			
KP : Penataan Regulasi	Persentase judicial review yang dikabulkan MK dan MA	12,15% dan 11,05%	11,15% dan 10,05%	10,15% dan 9,05%	9,15% dan 8,05%	8,15% dan 7,05%	38,8			
ProP : Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	20,9			
<i>Tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum</i>	<i>Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum</i>	1 Dokumen					0,1	Pusat		Kemenkumham
<i>Pedoman konsultasi publik</i>	<i>Penyusunan pedoman konsultasi publik</i>	1 Dokumen					0,2	Pusat		Kemenkumham
<i>Penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi</i>	<i>Aplikasi penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi</i>	1 Paket					0,1	Pusat		Kemenkumham
<i>Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi</i>	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4,0	Pusat		MK RI
<i>Anotasi UU berdasarkan Putusan MK</i>	<i>Penyusunan Anotasi UU berdasarkan Putusan MK</i>	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	1,5	Pusat		MK RI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	15,0	Pusat		Komnas Perempuan
ProP : Pembaruan Substansi Hukum	Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	1 UU (KUHP)	1 UU (Kepailitan)	1 UU (Fidusia)	1 UU (Badan Usaha)	1 (Hukum Acara Perdata)	17,9			
<i>RUU KUHP/KUHAP</i>	<i>RUU KUHP/KUHAP yang diundangkan</i>	<i>1 Dokumen</i>					<i>1,8</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkumham</i>
<i>RUU Hukum Acara Perdata</i>	<i>RUU Hukum Acara Perdata</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>9,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkumham</i>
<i>RUU Badan Usaha</i>	<i>Kebijakan pendukung penyusunan NA RUU Badan Usaha</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>				<i>5,2</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkumham</i>
<i>RUU Badan Usaha</i>	<i>Penyusunan NA RUU Badan Usaha</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>			<i>0,5</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkumham</i>
<i>RUU Jaminan Fidusia</i>	<i>RUU Jaminan Fidusia</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>			<i>0,9</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkumham</i>
<i>RUU Kepailitan</i>	<i>RUU Kepailitan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>				<i>0,6</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkumham</i>
KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	1. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek enforcing contracts 2. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek resolving insolvency 3. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek getting credits 4. Persentase Pelaku Residivis	1. Peringkat 120 2. Peringkat 30 3. Peringkat 30 4. 8,56%	1. Peringkat 110 2. Peringkat 28 3. Peringkat 28 4. 8,06%	1. Peringkat 100 2. Peringkat 26 3. Peringkat 26 4. 7,56%	1. Peringkat 80 2. Peringkat 24 3. Peringkat 24 4. 7,06%	1. Peringkat 70 2. Peringkat 20 3. Peringkat 20 4. 6,56%	817,9			
ProP : Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	Persentase eksekusi putusan perdata	15%	15%	15%	15%	15%	10,2			
<i>Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita</i>	<i>Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>4,4</i>	<i>Pusat</i>		<i>MA</i>
<i>Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha</i>	<i>Jumlah Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>5,8</i>	<i>Pusat</i>		<i>MA</i>
ProP : Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif	Persentase peneanaan alternatif pemidanaan	15%	15%	15%	15%	15%	40,0			
<i>Implementasi Keadilan Restoratif</i>	<i>Penyusunan Juknis Implementasi Keadilan Restoratif</i>	<i>1 Juknis</i>					<i>0,3</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kejagung</i>
<i>Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif</i>	<i>Jumlah Laporan Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>6,9</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kejagung</i>
<i>Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasayarakatan</i>	<i>Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasayarakatan</i>	<i>320 Orang</i>	<i>320 Orang</i>	<i>320 Orang</i>	<i>320 Orang</i>	<i>320 Orang</i>	<i>16,4</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemenkumham</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat	35 pokmas	40 pokmas	30 pokmas	35 pokmas	35 pokmas	8,9	Wilayah		Kemenkumham
Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Jumlah Surat Keterangan Korban Penanganan pelanggaran HAM yang berat	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	7,5	Pusat		Komnas HAM
ProP : Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	109 Wilayah Kerja	TBD	TBD	TBD	TBD	767,8			
Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	156 Satker	156 Satker	156 Satker	156 Satker	156 Satker	410,2	Daerah		Kejagung
Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	Jumlah Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	45,8	Daerah		Kejagung
Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	Jumlah Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	460 Satker	460 Satker	460 Satker	460 Satker	460 Satker	124,1	Daerah		Kejagung
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	Jumlah Wilayah yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	2,0	Daerah		Kemenkumham
Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	Jumlah wilayah pelaksanaan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	2,0	Daerah		Kemenkumham
Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	Jumlah Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	5,1	Daerah		MA
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	4 Desain	4 Desain	4 Desain	4 Desain	4 Desain	3,8	Pusat		Kemen Kominfo
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	16,7	Pusat		Kemenko Polhukam
Sistem Aplikasi e Manajemen Penyidikan	Jumlah Unit Sistem Aplikasi e Manajemen Penyidikan	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	145,7	Pusat		POLRI
Karakterisasi putusan	Jumlah Putusan yang dilakukan Karakterisasi	35 putusan	35 putusan	35 putusan	35 putusan	35 putusan	12,5	Pusat		KY RI
KP : Penguatan Sistem Anti Korupsi	IPAK	4,00	4,03	4,06	4,09	4,14	203,0			
ProP : Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Survey Penilaian Integritas	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	144,3			
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah I	Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,3	Daerah		Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah II	Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	0,9	Daerah		Kemenkumham



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah III	Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	3,7	Daerah		Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah IV	Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,3	Daerah		Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah V	Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,3	Daerah		Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah VI	Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,3	Daerah		Kemenkumham
Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	Jumlah Laporan Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13,5	Pusat		Kemenkumham
Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	Jumlah Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	4,0	Pusat		Kejagung
Peningkatan Zona Integritas Wilayah	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	9,2	Daerah		MA
Peningkatan Zona Integritas Wilayah	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	6,1	Daerah		MA
Peningkatan Zona Integritas Wilayah	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	10,8	Daerah		MA
Peningkatan Zona Integritas Wilayah	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	6,8	Daerah		MA
Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0,5	Pusat		MK RI
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	Jumlah Satker yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	9,0	Daerah		Kejagung
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Jumlah Instansi yang dilakukan Survei Penilaian Integritas	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	28,8	Pusat		KPK
Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	45,7	Pusat		KPK
Prop : Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	Jumlah Aparat Penegak Hukum yang mengikuti Diklat Pemulihan Aset	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	58,7			
Diklat Pemulihan Aset	Jumlah Angkatan Diklat Pemulihan Aset	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	9,5	Pusat		Kejagung
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	49,1	Pusat		Kejagung
KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70%	65-70%	71-80%	71-80%	71-80%	573,6			
Prop : Penguatan layanan keadilan	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70%	65-70%	71-80%	71-80%	71-80%	567,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	55,8	Pusat		MA
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	26,4	Pusat		MA
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	0,4	Pusat		MA
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	20,4	Pusat		MA
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	58,7	Pusat		MA
Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	Jumlah Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	58,2	Pusat		MA
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3,6	Pusat		MA
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	0,1	Pusat		MA
Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	4,8	Pusat		MA
Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Jumlah Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2,5	Pusat		Komnas Perempuan
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah Orang Penerima Bantuan Hukum Litigasi	5699 orang	7025 orang	7025 orang	7025 orang	9169 orang	286,6	Daerah		Kemenkumham
Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	758 Kegiatan	938 Kegiatan	938 Kegiatan	938 Kegiatan	1221 Kegiatan	50,1	Daerah		Kemenkumham
ProP : Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70%	65-70%	71-80%	71-80%	71-80%	6,0			
Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	Jumlah Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	6,0	Pusat		Komnas HAM
PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	14.765,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70				
KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	90	100	100	100	100	264,4			
	Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	65	80	95	100	100				
	Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	37	49	61	73	85				
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	10	15	20	25	30				
ProP : Manajemen Talenta Nasional ASN	Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN	-	-	-	87 K/L	34 Provinsi 100 Kab/Kota		146,9		
<i>Data ASN yang Akurat dan Komprehensif</i>	<i>Jumlah Data ASN Terpilah</i>	<i>1 Database</i>	-	-	-	-	10,5	Pusat	BKN	
<i>Gap analysis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan</i>	<i>Jumlah dokumen gap analysis</i>	<i>1 dokumen</i>	-	-	-	-	5,0	Pusat	LAN	
<i>Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional</i>	<i>Jumlah Kebijakan Penetapan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional</i>	-	<i>1 Dokumen</i>	-	-	-	5,0	Pusat	KEMEN PAN DAN RB	
<i>Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional</i>	-	-	<i>1 Dokumen</i>	-	-	5,0	Pusat	LAN	
<i>Sistem Talent Pool ASN Nasional</i>	<i>Jumlah Sistem Talent Pool JPT Nasional</i>	-	-	-	<i>1 Upgrade Sistem</i>	-	3,0	Pusat	BKN	
<i>Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)</i>	<i>Jumlah Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)</i>	<i>1 Sistem</i>	-	-	-	-	1,5	Pusat	LAN	
<i>Pemetaan kompetensi ASN melalui Assesment Center</i>	<i>Jumlah ASN (JPT dan JA) yang terpetakan kompetensinya melalui assesment center</i>	<i>2000 Orang</i>	<i>100% jumlah JPT dan JA terpetakan kompetensinya</i>	-	-	-	8,8	Pusat/Daerah	BKN	
<i>Penerapan sekolah kader ASN</i>	<i>Jumlah lulusan sekolah kader ASN</i>	-	<i>100 Peserta</i>	<i>100 Peserta</i>	<i>100 Peserta</i>	<i>100 Peserta</i>	83,1	Pusat	LAN	
<i>Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir Nasional</i>	<i>Jumlah Instansi Pemerintah</i>	3	30,0	30,0	30,0	30,0	18,0	Pusat	KEMEN PAN DAN RB	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penerapan Manajemen Talenta ASN</i>	<i>Jumlah K/L/D yang menerapkan manajemen talenta ASN</i>	-	-	-	89 K/L	34 Provinsi 100 Kab/Kota	7,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
ProP : Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	54 IP	108 IP	162 IP	216 IP	270 IP	117,5			
<i>Skenario model kesejahteraan ASN (insentif untuk ASN High Performance, insentif untuk ASN di daerah 3T dan risiko tinggi)</i>	<i>Laporan rekomendasi kebijakan</i>	3 Kajian	-	-	-	-	1,2	Pusat		LAN
<i>Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah</i>	<i>Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir instansi</i>	72 IP	137 IP	137 IP	137 IP	138 IP	15,3	Pusat		BKN
<i>Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas</i>	<i>Jumlah kebijakan</i>	-	1 kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Kebijakan/peraturanpelaksanaan PP pensiun ASN</i>	<i>Jumlah kebijakan</i>	-	1 kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Kebijakan insentif untuk ASN High Performance, di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi</i>	<i>Jumlah kebijakan insentif untuk ASN di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi</i>	-	-	1 Kebijakan	-	-	1,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah</i>	<i>Jumlah IP yang dilakukan Penilaian Penerapan Sistem Merit</i>	73 IP	637 IP	637 IP	637 IP	637 IP	28,8	Pusat/Daerah		KASN
<i>Pembinaan Penerapan Sistem Merit</i>	<i>Jumlah IP yang dilakukan pembinaan penerapan sistem merit</i>	67 IP	70 IP	70 IP	70 IP	70 IP	7,3	Pusat/Daerah		KASN
<i>Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah</i>	1500 Rekomendasi	1750 Rekomendasi	2000 Rekomendasi	2250 Rekomendasi	2500 Rekomendasi	11,0	Pusat/Daerah		KASN
<i>Penyusunan kebijakan pelaksanaan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS</i>	<i>Jumlah kebijakan</i>	4 Kebijakan	-	-	-	-	0,6	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Piloting penerapan sistem manajemen kinerja</i>	<i>Jumlah IP yang di-ujicoba penerapan sistem manajemen kinerja</i>	7 IP Pusat 10 IP Daerah	-	-	-	-	0,9	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penerapan Sistem informasi Manajemen Kinerja ASN</i>	<i>Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja ASN sesuai PP 30/2019 menggunakan sistem informasi kinerja</i>	25 IP	204 IP	204 IP	202 IP	-	15,0	Pusat/Daerah		BKN
<i>Kebijakan penataan jabatan fungsional</i>	<i>Jumlah kebijakan</i>	1 kebijakan	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan ASN</i>	<i>Jumlah Rekomendasi</i>	1 Rekomendasi	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		LAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance</i>	<i>Jumlah Kebijakan/modul/pedoman</i>	-	2 kebijakan/ modul/ pedoman	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		LAN
<i>Kebijakan Smart Office</i>	<i>Jumlah Kebijakan</i>	1 Kebijakan	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Pemetaan Integritas ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang mengisi survey integritas</i>	428000	-	-	-	428000	2,0	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penyusunan kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku</i>	<i>Jumlah kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku</i>	1 Peraturan Pemerintah	-	-	-	-	1,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN</i>	<i>Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN</i>	1 Permenpan	-	-	-	-	0,3	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penyusunan kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN</i>	<i>Jumlah kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN</i>	1 Perpres	-	-	-	-	0,3	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Pengembangan Model Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart</i>	<i>Jumlah Kebijakan/modul/pedoman</i>	-	1 kebijakan/ modul/ pedoman	-	-	-	1,0	Pusat		LAN
<i>Kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN</i>	<i>Jumlah Kebijakan</i>	-	1 Perpres	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku</i>	<i>Jumlah IP yang patuh dalam pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku</i>	270 IP	390 IP	510 IP	630 IP	719 IP	19,3	Pusat		KASN
<i>Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN</i>	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	5,5	Daerah		KASN
KP : Transformasi pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	135	142	150	157	164	166,7			
Prop : Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	1. Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Pusat 2. Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	2 Portal	11,0			
<i>Review dan pemetaan sektor pelayanan strategis (dasar dan perizinan)</i>	<i>Jumlah sektor layanan strategis yang direview/dipetakan</i>	-	2 sektor layanan strategis	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)</i>	<i>Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP</i>	-	2 sektor pelayanan (dasar dan perizinan)	-	-	-	2,0	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Integrasi proses bisnis pelayanan publik tingkat pusat</i>	<i>Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang distandarisasi proses bisnisnya</i>	-	1 PermenPAN RB tentang Standar Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	1 sektor pelayanan	1 sektor pelayanan	-	3,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Pembangunan portal pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah portal pelayanan publik</i>	-	-	-	-	2 portal	5,0	Pusat/Daerah		Kemen Kominfo
Prop : Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	135	142,0	150,0	157,0	164,0	103,1			
<i>Pemantauan dan Evaluasi Tindakan lanjut Pengaduan dalam LAPOR-SP4N</i>	<i>Prosentase laporan pengaduan yang diselesaikan</i>	90%	90%	90%	90%	90%	8,3	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (external complaint handling)</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan</i>	6000	6300	6600	6800	7000	90,8	Pusat/Daerah		OMBUDSMAN RI
<i>Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik</i>	<i>Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional</i>	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	4,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
Prop : Penguatan ekosistem inovasi	Jumlah unit pelayanan publik (UPP) yang mereplikasi inovasi	500	500	500	500	500	36,6			
<i>Pembangunan hub (pusat pengetahuan) inovasi pelayanan publik</i>	<i>Jumlah inovasi pelayanan publik yang direplikasi</i>	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	5,0	Daerah		KEMEN PAN DAN RB
<i>Pengembangan Jejaring Inovasi Daerah</i>	<i>Fasilitasi dan pendampingan daerah dalam penerapan replikasi inovasi daerah</i>	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	25,0	Daerah		Kemendagri
<i>Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik</i>	<i>Jumlah lab inovasi pelayanan publik</i>	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	6,6	Daerah		LAN
Prop : Penguatan pelayanan terpadu	Jumlah Mal Pelayanan Publik di Kota Besar/Sedang/KEK	9 MPP	9 MPP	9 MPP	9 MPP	9 MPP	16,0			
<i>Penyusunan Kebijakan Pengembangan Integrasi Data, Proses, dan Standar Pelayanan MPP</i>	<i>Jumlah kebijakan integrasi data, proses, dan standar pelayanan MPP</i>	1 Perpres	-	-	-	-	1,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik</i>	<i>Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK</i>	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	15,0	Daerah		KEMEN PAN DAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	70		80		100	13.659,9			
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	50		60		80				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	20		30		50				
Prop : Penataan kelembagaan	Jumlah instansi pemerintah yang tata kelebagaannya	23	21	21	21	21	75,9			
<i>Kebijakan penataan eselonisasi</i>	<i>Jumlah kebijakan penataan eselonisasi</i>	1 PermenPAN	-	-	-	-	0,3	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penataan kelembagaan bidang polhukam</i>	<i>Jumlah K/L yang ditata</i>	8 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	19,6	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penataan kelembagaan bidang perekonomian dan kemaritiman</i>	<i>Jumlah K/L yang ditata</i>	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	22,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penataan kelembagaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</i>	<i>Jumlah K/L yang ditata</i>	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	16,5	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang polhukam</i>	<i>Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis</i>	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4,9	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman</i>	<i>Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis</i>	18 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5,4	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</i>	<i>Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis</i>	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4,7	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Arsitektur Kelembagaan Pemerintah</i>	<i>Jumlah rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah</i>	-	-	-	1 rancangan arsitektur	1 arsitektur	2,5	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
Prop : Penerapan SPBE terintegrasi	- Integrasi portal pelayanan publik - Integrasi portal administrasi pemerintahan					1 portal	13.584,0			
<i>Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional</i>	<i>Jumlah Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional</i>	1 Perpres	-	-	-	-	1,8	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Pembangunan Portal Arsitektur SPBE</i>	<i>Jumlah Portal arsitektur SPBE</i>	-	1 Portal	-	-	-	5,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penyusunan Undang-Undang SPBE</i>	<i>Jumlah UU SPBE</i>	-	1 NA	1 RUU	1 RUU	1 UU	11,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan kebijakan tatakelola pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PAN	1. PermenPAN RB tentang Peta Rencana SPBE Nasional 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Evaluasi SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Penyusunan Arsitektur SPBE 2. PermenPAN RB tentang Pedoman SDM SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Manajemen Perubahan 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Proses Bisnis	-	-	4,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
Penyusunan kebijakan manajemen data dan informasi implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PPN	1 Permen PPN tentang Manajemen Data dan Informasi	-	-	-	-	1,0	Pusat		Kemen PPN/Bappenas
Penyusunan kebijakan infrastruktur dan aplikasi SPBE	Jumlah Peraturan Menteri Kominfo yang mendukung implementasi SPBE	8	8	8	8	8	20,0	Pusat		Kemen Kominfo
Penyusunan kebijakan Manajemen Pengetahuan implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Perka BPPT	3 Perka	-	-	-	-	1,0	Pusat		BPPT
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Pemantauan dan Evaluasi di Pusat dan Daerah	Jumlah Sistem Terintegrasi	Tersedianya aplikasi umum Perencanaan dan Penganggaran	Integrasi internal pemerintah daerah	Integrasi antara Kab/Kota dengan provinsi	Integrasi desa dengan kab/kota	Integrasi sistem tingkat pusat	10,0	Pusat		Kemen Kominfo
Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi ASN Terintegrasi	1 Sistem	-	-	-	-	10,7	Pusat		BPPT
Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	75 Instansi	167 Instansi	171 Instansi	168 Instansi	122 Instansi	25,9	Pusat/Daerah		Arsip Nasional
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	Jumlah penyediaan data center nasional	1 paket sewa cloud dan persiapan lahan	konstruksi	2 data center	konstruksi tambahan 2 data center	4 data center (kumulatif)	6.996,0	Pusat		Kemen Kominfo
Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Perencanaan Pengadaan	Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Perencanaan Pengadaan	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	17,5	Pusat		LKPP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Movev Pengadaan</i>	<i>Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Movev Pengadaan</i>	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	15,7	Pusat		LKPP
<i>Pengembangan SPSE Terpusat</i>	<i>Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi terpusat</i>	10 LPSE	150 LPSE	300 LPSE	450 LPSE	600 LPSE	465,3	Pusat dan Daerah		LKPP
	<i>Terselenggaranya jalur komunikasi yang berkualitas dan aman dalam penyelenggaraan layanan SPBE</i>	<i>Akses yang memadai bagi penyelenggaraan an aplikasi umum</i>	<i>Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 100.000 ASN</i>	<i>Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 500 ribu ASN</i>	<i>Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 1 juta ASN</i>	<i>Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 4 juta ASN</i>	5.930,0	Pusat		Kemen Kominfo
<i>Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	<i>Persentase terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE</i>	100	100	100	100	100	20,0	Pusat		Kemen Kominfo
<i>Pembangunan Portal Data Nasional</i>	<i>Terbangunnya integrasi data dan pengelolaan portal data nasional</i>	-	-	-	1 Data Terintegrasi	1 Data Terintegrasi	5,1	Pusat		KEMEN PPN/ BAPPENAS
<i>Audit Infrastruktur SPBE</i>	<i>Terlaksanakannya audit infrastruktur nasional SPBE</i>	1 Perangkat alat bantu/tools audit aplikasi	1 Perangkat alat bantu/tools audit infrastuktur	1 Audit Infrastruktur Nasional	1 Audit Infrastruktur Nasional	1 Audit Infrastruktur Nasional	44,0	Pusat		BPPT
<i>Audit Aplikasi Umum SPBE</i>	<i>Terlaksanakannya audit aplikasi umum SPBE</i>	-	4 Audit Aplikasi Umum	4 Audit Aplikasi Umum	4 Audit Aplikasi Umum	4 Audit Aplikasi Umum	0,0	Pusat		BPPT
KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95	674,8			
	Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95				
	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	77	80	82	83	85				
	Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95				
	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	94	96	98	100	100				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	85	87	90	100	100				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	50	55	65	75	80				
Prop : Perluasan implementasi sistem integritas	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	100 WBK/WBBM	100 WBK/WBBM	120 WBK/WBBM	140 WBK/WBBM	160 WBK/WBBM	39,8			
<i>Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis</i>	<i>Jumlah unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM</i>	495 Unit Kerja	1000 Unit Kerja	1200 Unit Kerja	1400 Unit Kerja	1600 Unit Kerja	39,8	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
Prop : Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	Persentase Intansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	- K/L = 20,69% - Prov = 5% - Kab/Kota = 5%	-K/L = 42,53% - Prov = 15% - Kab/Kota = 10%	- K/L = 56,32% - Prov = 30% - Kab/Kota = 15%	- K/L = 68,97% - Prov = 40% - Kab/Kota = 25%	- K/L = 79,31% - Prov = 62% - Kab/Kota = 39%	602,0			
	Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	35%	40%	45%	50%	55%				
	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor SAKIP B Ke atas	94	96	98	100	100				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor SAKIP B Ke atas	85	87	90	100	100				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor SAKIP B Ke atas	50	55	65	75	80				
<i>Penguatan tim pengelola RB Nasional</i>	<i>Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas</i>	9	9	9	9	9	12,8	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Penguatan tim pengelola RB Daerah</i>	<i>Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah</i>	-	34	34	34	34	49,0	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
<i>Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko</i>	<i>Jumlah kebijakan/pedoman pelaksanaan manajemen resiko</i>	1 Kebijakan	-	-	-	-	2,3	Pusat		BPKP
<i>Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian/Lembaga</i>	<i>Jumlah Kementerian/Lembaga dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5</i>	K/L = 18 IP (20,69%)	K/L = 37 IP (42,53%)	K/L = 49 IP (56,32%)	K/L = 60 IP (66,97%)	K/L = 69 IP (79,31%)	60,8	Pusat		BPKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Manajemen Risiko di Provinsi	Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5	Provinsi = 2 IP (5%)	Provinsi = 6 IP (15%)	Provinsi = 10 IP (30%)	Provinsi = 14 IP (40%)	Provinsi = 23 IP (62%)	15,6	Daerah		BPKP
Penerapan Manajemen Risiko di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5	Kab/kota = 25 IP (5%)	Kab/Kota = 51 IP (10%)	Kab/Kota = 76 IP (15%)	Kab/Kota = 127 IP (25%)	Kab/Kota = 200 IP (39%)	132,9	Daerah		BPKP
Penerapan Manajemen Risiko di Badan Usaha (BUMN/D, BLU/D)	Jumlah Badan Usaha dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5	355 BU (16.74%)	419 BU (19.75%)	524 BU (24.71%)	622 BU (29.33%)	741 BU (34.94%)	182,4	Pusat dan Daerah		BPKP
Monitoring UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3	Jumlah UKPBJ yang mencapai maturitas Level 3	100 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	11,1	Pusat/Daerah		LKPP
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	616 IP	275 IP	245 IP	195 IP	135 IP	10,2	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	616 IP	625 IP	625 IP	625 IP	625 IP	40,0	Pusat/Daerah		KEMEN PAN DAN RB
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah yang diriviu Perencanaan Kinerjanya	-	12 IP	30 IP	30 IP	30 IP	1,8	Pusat		KEMEN PAN DAN RB
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	K/L = 32 Instansi Daerah = 38 Prou/ Kab/ Kota	K/L = 7 Instansi Daerah = 32 Prou/ Kab/ Kota	K/L = 14 Instansi Daerah = 27 Prou/ Kab/ Kota	K/L = 16 Instansi Daerah = 32 Prou/ Kab/ Kota	K/L = 8 Instansi Daerah = 32 Prou/ Kab/ Kota	76,0	Pusat		Arsip Nasional
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	75 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	122 Rekomendasi	7,2	Pusat		Arsip Nasional
Prop : Penguatan perencanaan dan penganggaran	Persentase Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pamantauan, Evaluasi, dan Audit	20	40,0	60,0	80,0	100,0	33,0			
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat	75	100	-	-	-	21,0	Pusat		Kemen PPN/ Bappenas
	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	50	75	100	-	-	0,0	Daerah		Kemen PPN/ Bappenas
	Persentase Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah	25	50	75	100	-	0,0	Pusat dan Daerah		Kemen PPN/ Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Reviu dan Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran</i>	<i>Jumlah Fitur yang diperbaiki, disempurnakan, atau ditambahkan</i>	3	3	3	3	3	12,0	Pusat		Kemen PPN/Bappenas
PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	292.853,8			
	Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24				
	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendiri	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%				
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4				
KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38.24	38.14	38.00	37.90	37.80	11.169,5			
	Indeks Risiko Terorisme (Target)	54,46	54.36	54.26	54.16	54.00				
	Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	300	<300	<250	<200	<150				
	Angka Kejadian Konflik	55 Kejadian	50 Kejadian	45 Kejadian	40 Kejadian	35 Kejadian				
	Angka Korban Pengungsi Internal	≤16.000 Orang	≤15.500 Orang	≤15.000 Orang	≤14.500 Orang	≤14.000 Orang				
Prop : Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	Clearance Rate Terorisme	75%	75%	77%	79%	80%	3.241,6			
	Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.		187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan				
	Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme		134 Kegiatan	139 Kegiatan	141 Kegiatan	144 Kegiatan				
	Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanggulangan terorisme	38 Institusi	40 Institusi	44 Institusi	48 Institusi	50 Institusi				
<i>Penanganan Kasus Terorisme</i>	<i>Jumlah Kasus Terorisme yang Ditangani</i>	-	<i>17 Kasus</i>	<i>20 Kasus</i>	<i>22 Kasus</i>	<i>25 Kasus</i>	2.147,4	Pusat		POLRI
<i>Identifikasi dan Sosialisasi Tindak Pidana Terorisme</i>	<i>Jumlah kegiatan identifikasi dan sosialisasi Tindak Pidana Terorisme</i>	-	<i>157 Kegiatan</i>	<i>160 Kegiatan</i>	<i>162 Kegiatan</i>	<i>165 Kegiatan</i>	102,0	Pusat		POLRI
<i>Pencegahan Terorisme</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pencegahan Terorisme</i>	-	<i>50 Kegiatan</i>	<i>55 Kegiatan</i>	<i>57 Kegiatan</i>	<i>60 Kegiatan</i>	102,0	Pusat		POLRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.	-	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	196,5	Pusat		BNPT
Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	Jumlah Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	-	90 Koordinasi	93 Koordinasi	95 Koordinasi	97 Koordinasi	49,6	Pusat		BNPT
Kegiatan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Jumlah Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	-	32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	132,3	Pusat		BNPT
Wilayah Prioritas kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	Jumlah Wilayah prioritas Kegiatan Pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi	-	3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	44,7	Pusat		BNPT
Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	Jumlah Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	30,4	Pusat		BNPT
Kegiatan Kontra Radikalisasi	Jumlah Kegiatan Kontra Radikalisasi	-	48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	192,6	Pusat		BNPT
Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	Jumlah Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6,5	Pusat		BNPT
Operasi Intelijen Kontra Terorisme	Jumlah operasi intelijen terorisme	3670 Laporan	2898 Laporan	2999 Laporan	3104 Laporan	3104 Laporan	101,5	Pusat		BIN
Operasi intelijen separatisme	Jumlah operasi intelijen separatisme	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	76,5	Pusat		BIN
Bekas Warga Binaan Pemasarakat Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasarakat Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	50 Jiwa	50 Jiwa	50 Jiwa	50 Jiwa	50 Jiwa	5,6	34 Provinsi		Kemensos
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme (Jiwa)	10000 Jiwa	10000 Jiwa	10000 Jiwa	10000 Jiwa	10000 Jiwa	54,0	34 Provinsi		Kemensos
ProP : Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	Jumlah Obyek Vital dan Target Rentan yang mendapat Pengamanan	-	2229	2179	2129	2079	2.808,0			
Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	Jumlah Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	-	861 Obyek Vital	911 Obyek Vital	961 Obyek Vital	1011 Obyek Vital	1.404,0	Pusat dan daerah		POLRI
Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	Jumlah Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	-	234 Target Rentan	234 Target Rentan	234 Target Rentan	234 Target Rentan	1.404,0	Pusat dan daerah		POLRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Jumlah Pos Pamtas, Posal, Pos Pol SubSektor dan PLBN yang dibangun	PLBN : 18 Unit Pos Pamtas: 12 Pos Pos AL: 15 Pos	Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 20 Unit Pos Pamtas: 8 Pos Pos AL: 16 Pos	Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 22 Unit Pos Pamtas: 9 Pos Pos AL: 16 Pos	Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 24 Unit Pos Pamtas: 7 Pos Pos AL: 16 Pos	Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 26 Unit Pos Pamtas: 7 Pos Pos AL: 16 Pos	4.165,3			
	Panjang Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan	200 Km	200 Km	200 Km	200 Km	200 Km				
	Jumlah Penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem Hankam	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang				
	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan Sarana Prasarana Pertahanan dan Keamanannya	36 PPKT	41 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	49 PPKT				
Pembangunan Pos Pamtas	Jumlah Pos Pamtas yang dibangun	12 Pos	8 Pos	9 Pos	7 Pos	7 Pos	110,0	Pusat	Kemenhan	
Pembangunan Pos AL	Jumlah pos AL yang dibangun	15 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	300,0	Pusat	Kemenhan	
Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan	Jumlah Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan yan dibangun	-	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	28,8	Daerah	POLRI	
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun	Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.700,0		Kemen PU&PERA	
Pembangunan JIPP	Panjang JIPP	200 Km	200 Km	200 Km	200 Km	200 Km	1.016,0	Pusat	Kemenhan	
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam yang difasilitasi pemberdayaan	Jumlah Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam yang difasilitasi pemberdayaan	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	5,5	Pusat	BNPP	
Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	Jumlah PPKT yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	36 PPKT	41 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	5,0	Pusat	BNPP	
ProP : Penanganan Konflik Secara Humanis	Tertangulangnya Potensi Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten	27 Kasus	25 Kasus	23 Kasus	21 Kasus	19 Kasus	411,2			
	Jumlah Anggota Satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	-	15.338 Orang	15.846 Orang	16.379 Orang	16.885 Orang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.34

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Brigade Mobil</i>	<i>Jumlah anggota satuan Brigade Mobil yang mendapatkan pelatihan Harkatpuan dalam Penanganan Konflik Secara Humanis</i>	-	10.168 Orang	10.676 Orang	11.209 Orang	11.715 Orang	42,7	Pusat dan Daerah		POLRI
<i>Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Samapta Baharkam</i>	<i>Jumlah anggota Satuan Samapta yang mendapatkan Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis</i>	-	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang	5,2	Pusat dan Daerah		POLRI
<i>Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Binmas</i>	<i>Jumlah anggota Satuan Binmas yang mendapatkan Peningkatan kemampuan personel Korbinmas</i>	-	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	20,0	Pusat dan Daerah		POLRI
<i>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif</i>	61%	62%	63%	64%	65%	33,8	Pusat dan Daerah		Kemendagri
<i>Deteksi Dini oleh Aparat Pusat dan Daerah</i>	<i>Jumlah aparat pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar</i>	200 Orang	220 Orang	240 Orang	260 Orang	280 Orang	8,5	Pusat dan Daerah		Kemendagri
<i>Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial</i>	<i>Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial</i>	43018 Jiwa	44000 Jiwa	44000 Jiwa	44000 Jiwa	44000 Jiwa	301,0	34 Provinsi		Kemensos
Prop : Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Diselamatkan	120.000 Orang	120.000 Orang	120.000 Orang	120.000 Orang	120.000 Orang	543,4			
<i>Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana</i>	<i>Jumlah Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana</i>	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	375,0	Pusat		Kemenhan
<i>Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh</i>	<i>Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana</i>	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		POLRI
<i>Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korpolaair</i>	<i>Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana</i>	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		POLRI
<i>Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh</i>	<i>Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana</i>	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		POLRI
<i>Korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar</i>	<i>Jumlah korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar</i>	120000 Jiwa	121000 Jiwa	121000 Jiwa	121000 Jiwa	121000 Jiwa	153,8	34 Provinsi		Kemensos
KP : Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	Pemenuhan MEF	72%	79%	86%	93%	100%	186.623,3			
	Persentase Kontribusi Industri Pertahanan	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%				
Prop : Pengadaan Alutsista	Jenis Alutsista yang diadakan	30 Jenis	60 Jenis	59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis	105.713,7			
<i>Alutsista Strategis Luar Negeri</i>	<i>Jenis Alutsista Strategis Luar Negeri yang diadakan</i>	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	66.273,8	Pusat		Kemenhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.35

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista Strategis Luar Negeri untuk Pertahanan Laut Natuna	Jenis Alutsista Pertahanan Laut Natuna yang diadakan		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	8.264,4	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	Kemenhan
Alutsista Mabes TNI	Jenis Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	797,9	Pusat		Kemenhan
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber kecil Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	506,9	Pusat		Kemenhan
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi khusus Mabes TNI yang diadakan		1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	51,4	Pusat		Kemenhan
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber besar Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	428,8	Pusat		Kemenhan
Alutsista Mabes TNI	Jenis senjata Mabes TNI yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	366,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.567,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.219,5	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AD	Jenis senjata TNI AD yang diadakan		9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.100,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AL	Jenis senlek dan amunisi TNI AL yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	3.497,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AL	Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL yang diadakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	15.400,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL yang diadakan	-	4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1.841,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara/pendukungnya TNI AU yang diadakan	-	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AU	Jenis Radar, Psu dan Alat Komlek TNI AU yang diadakan	-	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AU	Jenis Senri/Senrat TNI AU yang diadakan	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	2.000,0	Pusat		Kemenhan
Prop : Pemeliharaan dan perawatan alutsista	Jenis Alutsista dengan Persentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	41 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	49.225,5			
Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.175,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	826,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AD	Jenis senjata dan munisi/alpal TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.824,5	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AL	Jenis senlek dan amunisi TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%		8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	166,0	Pusat		Kemenhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.36

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista TNI AL	Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	16.000,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	950,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara, senjata, dan almatsus TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	25.000,0	Pusat		Kemenhan
Alutsista TNI AU	Jenis radar, PSU, dan alat komplek TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3.284,0	Pusat		Kemenhan
ProP : Pembangunan sarana-prasarana pertahanan	Jumlah M2 pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan	88000	118000	121000	126000	129000	8.431,0			
Pembangunan Sarpras Mabes TNI	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras Mabes TNI		10000	10000	10000	10000	425,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan Sarpras TNI AD	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AD	68000	88000	91000	96000	99000	4.000,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan Sarpras TNI AL	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AL	10000	10000	10000	10000	10000	1.793,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna	Jumlah Paket Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	226,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	Kemenhan
Pembangunan Sarpras TNI AU	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AU	10000	10000	10000	10000	10000	1.987,0	Pusat		Kemenhan
ProP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	Unit Rumah Dinas	1055 unit	2410 unit	3030 unit	3645 unit	3796 unit	8.093,0			
	Jumlah Rumah Sakit meningkat Akreditasinya		9 Unit	9 Unit	9 Unit	5 Unit				
Pembangunan Rumah Negara Mabes TNI	Jumlah Negara Rumah Negara Mabes TNI yang dibangun	-	22	40	55	56	90,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AD	Jumlah Negara Rumah Negara TNI AD yang dibangun	693	1938	2090	2240	2390	5.729,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AL	Jumlah Negara Rumah Negara TNI AL yang dibangun	215	300	600	900	900	640,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AU	Jumlah Negara Rumah Negara TNI AU yang dibangun	147	150	300	450	450	334,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AD	Jumlah RS TNI AD yang di-Upgrade	-	5 Unit (Tahap 1)	5 Unit (Tahap 2)	5 Unit (Tahap 3)	5 Unit (Tahap 4)	600,0	Pusat		Kemenhan
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AL	Jumlah RS TNI AL yang di-Upgrade	-	2 Unit (Tahap 1)	2 Unit (Tahap 2)	2 Unit (Tahap 3)	-	350,0	Pusat		Kemenhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.37

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan dan Upgrade RS TNI AU</i>	<i>Jumlah RS TNI AU yang di-Upgrade</i>	-	2 Unit (Tahap 1)	2 Unit (Tahap 2)	2 Unit (Tahap 3)	-	350,0	Pusat		Kemenhan
Prop : Pembangunan Pertahanan Siber	Jumlah Sistem Siber Pertahanan Siber	-	5 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	2.361,0			
<i>Pengembangan Sistem Pertahanan Siber</i>	<i>Jumlah sistem pertahanan siber yang dikembangkan</i>	-	6 sistem	3 sistem	2 sistem	3 sistem	55,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Revitalisasi infrastruktur dan jaringan siber Pushansiber</i>	<i>presentase peningkatan kualitas jaringan</i>	-	100%	-	-	-	65,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Sistem Pengamanan Pangkalan (Smart Building Pushansiber)</i>	<i>Jumlah pangkalan yang diberikan sistem pengamanan</i>	-	1 pangkalan	-	-	1 pangkalan	64,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Peningkatan 11 unit Server Data Center Pushansiber</i>	<i>Jumlah sub sistem dari Server Data Center</i>	-	11 unit	-	-	-	2,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pembangunan Sistem Cyber Intelegent Analytica Pushansiber</i>	<i>waktu analisa ancaman/ serangan siber</i>	-	15 menit	-	-	-	125,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pengembangan Laboratorium Offensive dan Defensive Pushansiber</i>	<i>Jumlah peralatan Laboratorium Offensive dan Defensive</i>	-	20 offensive dan 12 defensive	-	-	-	100,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Tim CERT Pushansiber</i>	<i>Jumlah Peralatan dan kapasitas Tim CERT</i>	-	3 paket	-	-	-	40,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pengadaan Anti Drone</i>	<i>Jumlah Peralatan Anti Drone</i>	-	-	1 paket	-	-	2,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pendidikan dan Pelatihan TIK di Bidang Siber</i>	<i>Jumlah SDM TIK Bidang Siber</i>	-	100 lulusan	100 lulusan	100 lulusan	100 lulusan	52,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pembangunan Pertahanan Siber Mabes TNI</i>	<i>Jumlah Sistem Pertahanan Siber Mabes TNI</i>	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pembangunan Pertahanan Siber TNI AD</i>	<i>Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AD</i>	-	1 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	655,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pembangunan Pertahanan Siber TNI AL</i>	<i>Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AL</i>	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan
<i>Pembangunan Pertahanan Siber TNI AU</i>	<i>Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AU</i>	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Kemenhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.38

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Prop : Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	Jenis Alpalhankam yang dikembangkan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	12.799,1			
<i>Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan</i>	<i>Jenis Alpalhan yang diadakan</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>7.709,1</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemengan</i>
<i>Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan untuk Pertahanan Laut Natuna</i>	<i>Jenis Alpalhan yang diadakan untuk Pertahanan Laut Natuna</i>		<i>2 Jenis</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>2.760,0</i>	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan Keamanan Laut di Natuna</i>	<i>Kemengan</i>
<i>Propelan</i>	<i>Terbangunnya Sarana Produksi Propelan</i>	<i>Tahap 1</i>	<i>Tahap 2</i>	<i>Tahap 3</i>	<i>Tahap 4</i>	<i>Tahap 5</i>	<i>2.150,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemengan</i>
<i>IPTEKHAN bidang daya tempur</i>	<i>Prototipe</i>	<i>-</i>	<i>Tahap 2</i>	<i>Tahap 3</i>	<i>Tahap 4</i>	<i>Tahap 5</i>	<i>180,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemengan</i>
KP : Penguatan Keamanan Laut	Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut	285 Kasus	265 Kasus	246 Kasus	224Kasus	202 Kasus	11.647,6			
Prop : Penguatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Terpadu	Relay Time	300 menit	240 menit	180 menit	120 menit	60 menit	480,0			
<i>Pembelian data AIS satelit</i>	<i>Jumlah data AIS satelit yang dibeli</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>20,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Sistem peringatan dini terpadu untuk wilayah Natuna</i>	<i>Jumlah sistem peringatan dini</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>460,0</i>	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan Keamanan Laut di Natuna</i>	<i>Bakamla</i>
Prop : Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	Persentase Cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing	54%	60%	65%	70%	75%	10.023,6			
<i>Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Matra Laut</i>	<i>Jumlah operasi</i>	<i>-</i>	<i>20 operasi</i>	<i>20 operasi</i>	<i>20 operasi</i>	<i>20 operasi</i>	<i>1.200,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Kemengan</i>
<i>Pengadaan Kapal Patroli Keamanan Laut</i>	<i>Jumlah kapal Patroli Keamanan Laut</i>	<i>-</i>	<i>2 Unit (Tahap 1)</i>	<i>2 Unit (Tahap 2)</i>	<i>2 Unit (tahap 3)</i>	<i>-</i>	<i>500,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut</i>	<i>Jumlah senjata yang Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut</i>	<i>332 Pucuk</i>	<i>51 Pucuk</i>	<i>51 Pucuk</i>	<i>51 Pucuk</i>	<i>51 Pucuk</i>	<i>568,4</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Pengadaan Amunisi</i>	<i>Jumlah Amunisi yang Diadakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>-</i>	<i>1 Paket</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Pengadaan Boat Stopper</i>	<i>Jumlah Boat Stopper yang diadakan</i>	<i>-</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3 Unit</i>	<i>27,5</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Pengadaan Sarana Prasarana operasi</i>	<i>Jumlah sarana prasarana operasi yang diadakan</i>	<i>-</i>	<i>77 Unit</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15,2</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut</i>	<i>Jumlah hari operasi keamanan dan keselamatan laut</i>	<i>16 Hari Operasi</i>	<i>90 Hari Operasi</i>	<i>90 Hari Operasi</i>	<i>90 Hari Operasi</i>	<i>90 Hari Operasi</i>	<i>330,8</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Operasi Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral</i>	<i>jumlah kegiatan operasi laut bersama terkoordinasi bilateral</i>	<i>5 Operasi</i>	<i>6 Operasi</i>	<i>6 Operasi</i>	<i>6 Operasi</i>	<i>6 Operasi</i>	<i>76,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral</i>	<i>Jumlah kegiatan operasi udara bersama terkoordinasi bilateral</i>	<i>4 Operasi</i>	<i>4 Operasi</i>	<i>4 Operasi</i>	<i>4 Operasi</i>	<i>4 Operasi</i>	<i>58,7</i>	<i>Pusat</i>		<i>Bakamla</i>
<i>Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi</i>	<i>Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>1 Sistem</i>	<i>69,0</i>	<i>Pusat</i>		<i>KKP</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.39

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Operasional Kapal Pengawas	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	2.470,4	Pusat		KKP
Operasional Pesawat Patroli	Jumlah hari operasi pesawat patroli	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180,7	Pusat		KKP
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah hari operasional speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	279,8	Pusat dan Daerah		KKP
Kapal pengawas yang dibangun	Jumlah kapal pengawas yang dibangun	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	846,7	Pusat		KKP
Speed Boat Pengawas yang dibangun	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun	11 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	175,4	Pusat		KKP
Armada Pengawasan yang siap operasi	Jumlah armada pengawasan yang siap operasional	103 Unit	116 Unit	129 Unit	142 Unit	155 Unit	575,0	Pusat dan Daerah		KKP
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	Jumlah bangunan/ pos pengawasan yang tersedia	18 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	259,0	Pusat		KKP
Patroli Wilayah Perbatasan Laut	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Perbatasan	-	366 Jam	380 Jam	394 Jam	408 Jam	886,8	Pusat dan Daerah		POLRI
Patroli Wilayah Selat Malaka	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Selat Malaka	-	1.088 Jam	1.123 Jam	1.158 Jam	1.193 Jam	868,8	Pusat dan Daerah		POLRI
Operasi Keamanan Perairan	Jumlah Operasi Keamanan Perairan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90,4	Pusat dan Daerah		POLRI
Pengadaan Kapal 110 M untuk wilayah Natuna	Jumlah Kapal			1 unit (20%)	1 unit (60%)	1 unit (100%)	450,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	Bakamla
Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna	Jumlah UAV		4 unit (tahap 1)	4 unit (tahap 2)	4 unit (tahap 3)	4 unit (tahap 4)	25,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	Bakamla
Prop : Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	Clearance Rate Tindak Pidana Laut	75%	75%	80%	80%	80%	1.144,0			
Penyelesaian Tindak Pidana di laut	Jumlah Kasus Keamanan Laut yang Ditangani	-	119 Kasus	131 Kasus	144 Kasus	158 Kasus	572,0	Pusat dan Daerah		POLRI
Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing	Jumlah Tindak Pidana Illegal Fishing yang Ditangani	-	156 Kasus	159 Kasus	164 Kasus	166 Kasus	572,0	Pusat dan Daerah		POLRI
KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,86%	1,86%	1,86%	1,69%	1,69%	77.698,4			
	Crime Rate	129 orang / 100.000 penduduk	112 orang / 100.000 penduduk	112 orang / 100.000 penduduk	111 orang / 100.000 penduduk	111 orang / 100.000 penduduk				
	Pelayanan Publik Polri yang Prima	62%	63%	64%	64%	65%				
Prop : Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika	85%	86%	87%	88%	89%	564,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.40

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Kawasan yang Pulih dari Tanaman Terlarang	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan				
Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika	Jumlah laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	2,0	Pusat	BNN	
Laporan hasil Kajian Desain Strategi Active Defense Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi "Active Defense" dalam pencegahan peredaran gelap narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	4,0	Pusat	BNN	
Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan	Jumlah Laporan Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	4,0	Pusat	BNN	
Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun	Jumlah Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun	-	1 Sistem	1 Sistem	-	-	100,0	Pusat	BNN	
Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	Jumlah Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	-	1 Laboratorium	1 Laboratorium	1 Laboratorium	1 Laboratorium	182,7	Pusat dan Daerah	BNN	
Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika Dari Luar Negeri	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	4,0	Pusat	BNN	
Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun	Jumlah Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun	-	-	-	1 Sistem	1 Sistem	100,0	Pusat	BNN	
Operasionalisasi Pos Interdiksi	Jumlah Pos Interdiksi yang Operasional	-	7 Pos	9 Pos	11 Pos	13 Pos	58,0	Daerah	BNN	
Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program Alternative Development	Jumlah Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program Alternative Development	6 Kawasan	-	-	-	-	6,3	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar	BNN	
Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang Diintervensi Program Alternative Development	Jumlah Kawasan yang Beralih ke Tanaman Pengganti (Alternative Development)	-	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	16,0	Daerah	BNN	
Titik lokasi lahan tanaman narkotika yang dimusnahkan	Jumlah Titik lokasi lahan tanaman narkotika yang dimusnahkan	-	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	29,0	Daerah	BNN	
Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	Jumlah Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,0	Daerah	BNN	
Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	-	2,6 Ton	2,5 Ton	2,4 Ton	2,3 Ton	9,3	Pusat dan Daerah	POLRI	
Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika	Jumlah Jaringan Sindikat Narkotika yang Terungkap	-	77 Jaringan	76 Jaringan	75 Jaringan	74 Jaringan	9,3	Pusat dan Daerah	POLRI	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.41

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024					
Penanganan Kasus Kejahatan Narkotika	Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika yang Ditangani	-	38.000 Kasus	37.000 Kasus	36.000 Kasus	35.000 Kasus	5,1	Pusat dan Daerah		POLRI	
Penanganan Kasus TPPU Terkait Narkotika yang Ditangani	Jumlah Kasus TPPU terkait Narkotika yang ditangani	-	8 Kasus	9 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	9,3	Pusat dan Daerah		POLRI	
ProP : Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja	50,03	51	52	53	53,51	1.999,7				
	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika										
	a. Aspek Fisik	6,0%	6,5%	7,0%	7,5%	8,00%					
	b. Aspek Psikologis	6,0%	6,5%	7,0%	7,5%	8,00%					
	c. Aspek Hubungan Sosial	5,0%	5,5%	6,0%	6,5%	7,00%					
	d. Aspek Sumber Daya Lingkungan	4,0%	4,5%	5,0%	5,5%	6,00%					
	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	3,07	3,1	3,13	3,16	3,2					
Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi SPM	10 Fasilitas	-	-	-	-	1,7	Pusat dan Daerah		BNN	
Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	-	-	-	-	2,4	Pusat dan Daerah		BNN	
Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	21714 Jiwa	25000 Jiwa	27000 Jiwa	28000 Jiwa	30000 Jiwa	1.192,6	34 Provinsi		Kemensos	
Pelayanan rehabilitasi medis bagi pengguna napza	Jumlah Penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	9500	10000	10500	11000	11500	108,6	34 Provinsi		Kemendes	
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Pemkab/Pemkot yang diadvokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	-	75 Kabupaten/ Kota	100 Kabupaten/ Kota	125 Kabupaten/ Kota	150 Kabupaten/ Kota	383,0	Pusat dan Daerah		BNN	
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa "Remaja Teman Sebaya" Anti Narkotika yang Terbentuk	Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa	173 Desa	346 Desa	346 Desa	346 Desa	346 Desa	33,6	Daerah		BNN	
Pelatihan Pengembangan Soft Skill Bagi SMP & SMU Sederajat	Jumlah SMP & SMU sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill	-	34 Sekolah	34 Sekolah	34 Sekolah	34 Sekolah	86,2	Pusat dan Daerah		BNN	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.42

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	13,2	Pusat dan Daerah		BNN
Pelatihan Kompetensi Teknis Rehabilitasi Bagi Agen Pemulihan	Jumlah Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	-	225 Orang	250 Orang	275 Orang	300 Orang	12,6	Pusat dan Daerah		BNN
Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	-	45 Unit	50 Unit	55 Unit	60 Unit	8,4	Pusat dan Daerah		BNN
Fasilitasi Pemuda kader dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif	1500	1500	1500	1500	1500	28,2	Pusat		Kemempora
ProP : Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Clearance Rate Tindak Pidana TPPO serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan	83%	83%	84%	84%	85%	129,0			
Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Jumlah RPK Sesuai SPM yang Dibangun	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	69,0	Daerah		POLRI
Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Penyelesaian Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya yang Ditangani	-	83%	84%	84%	85%	60,0	Pusat dan Daerah		POLRI
ProP : Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	3.677,3			
	Clearance Rate	64%	64%	65%	66%	67%				
	Clearance Rate Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan TPPU	57%	58%	59%	59%	60%				
Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	-	2 Polres	2 Polres	2 Polres	2 Polres	24,0	Pusat dan Daerah		POLRI
Pembangunan SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	Jumlah SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	-	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	24,0	Pusat dan Daerah		POLRI
Pembangunan SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online (Gedung BPKB Prototype)		5 Polda	5 Polda	5 Polda	5 Polda	495,6	Pusat dan Daerah		POLRI
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	Jumlah M2 Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	-	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	48,0	Pusat dan Daerah		POLRI
Penanganan Tindak Pidana Umum	Penyelesaian Tindak Pidana Umum	-	0,64	0,65	0,66	0,67	14,5	Pusat dan Daerah		POLRI
Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU	Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan dan TPPU	-	0,58	0,59	0,59	0,6	9,3	Pusat dan Daerah		POLRI
Pembangunan Command Centre	Jumlah Command Center yang dibangun	5 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	1.287,0	Daerah		POLRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimalisasi Perangkat Data Center	Jumlah Perangkat Data Center yang dioptimalisasikan	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	213,1	Daerah		POLRI
Pembangunan Aplikasi E-Manajemen	Jumlah Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	145,7	Daerah		POLRI
Pembangunan SKCK Online	Jumlah SKCK Online yang dibangun dan di upgrade	100 Unit dan 928 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	61,2	Daerah		POLRI
Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	Jumlah Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	-	5 Polda	5 Polda	5 Polda	5 Polda	304,8	Daerah		POLRI
Pembangunan Big Data Polri	Sistem Single Data Entry Polri	-	Tahap 1 (1paket)	Tahap 2 (1paket)	Tahap 3 (1 paket)	Tahap 4 (1 Paket)	1.050,0	Daerah		POLRI
Prop : Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Kepolisian	-	41 Paket	41 Paket	41 Paket	37 Paket	68.561,4			
	Persentase Almatsus dan Alpalkam Kontribusi Industri Pertahanan	-	25%	30%	35%	40%				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	-	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	94,9	Pusat		POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	-	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	50.936,0	Pusat		POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	-	10 Paket	10 Paket	10 Paket	6 Paket	1.374,9	Pusat		POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam TIK	Jumlah Almatsus dan Alpalkam TIK	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	792,0	Pusat		POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44,7	Pusat		POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	-	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	13.944,0	Pusat		POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1.374,9	Pusat		POLRI
Prop P : Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota POLRI	Jumlah Personel yang Tersertifikasi Diklat Profesional	-	8.157 Personel	9.517 Personel	10.876 Personel	12.236 Personel	2.767,0			
	Jumlah Unit Pemenuhan Rumah Negara	16 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit				
	Jumlah Rumah Sakit yang Dibangun/Meningkat Akreditasinya	-	4 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit				
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	76%	77%	78%	79%	80%				
Sertifikasi Profesi Anggota Polri	Jumlah Anggota yang memiliki Sertifikat Profesi	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	567,0	Pusat		POLRI
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	16 Unit	-	-	-	-	162,9	Daerah		POLRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.44

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Rumah Negara Polri	Jumlah Unit Rumah Negara Polri	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.086,0	Daerah		POLRI
Pemenuhan Rumah Sakit Polri	Jumlah Rumah Sakit Polri yang Dibangun dan di Upgrade	-	Dibangun : 2 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	800,0	Pusat		POLRI
Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	-	77%	78%	79%	80%	151,1	Pusat dan Daerah		POLRI
KP : Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Skor Global Cyber Security Index	0,792	0,792	0,826	0,826	0,838	5.715,0			
Prop : Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber	Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0,159	0,159	0,171	0,171	0,175	5.001,9			
	Skor Pilar Organizational pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0,13	0,13	0,133	0,133	0,136				
Perluasan Cakupan Area National Cybersecurity Operation Center	Jumlah Cakupan Perluasan Area National Cybersecurity Operation Center	4 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	1.500,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
Pembangunan kapasitas National Computer Security Incident Response Team (Nat-CSIRT)	Jumlah sistem simulasi incident response	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	-	743,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
Pembangunan Sistem Monitoring Pengendalian Informasi	Jumlah sistem monitoring pengendalian informasi	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	450,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
Penguatan National Data Center	Pusat data nasional berstandar internasional	-	1 DC berstandar Internasional (Tahap 1)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 2)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 3)	-	600,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
Pembangunan Infrastruktur Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	Jumlah sistem VVDP	-	1 Sistem	-	-	-	50,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
Pembangunan Information Sharing and Analysis Center (ISAC)	Jumlah sistem ISAC	-	1 Sistem	-	-	-	50,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
Penyusunan Regulasi Manajemen Krisis Keamanan Siber Nasional	Regulasi manajemen krisis siber	1 Regulasi	-	-	-	-	8,0	Pusat		BSSN
Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber	Nilai budaya keamanan siber masyarakat	4 Nilai	-	-	-	-	8,2	Pusat		BSSN
Penerapan Standar Kriptografi pada Sektor Ekonomi Digital yang bersifat interoperabilitas	Jumlah PSE yang sudah menerapkan standar kriptografi	100 PSE	-	-	-	-	1,4	Pusat		BSSN
Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)	Jumlah sistem CIA	7 sistem	7 sistem	7 sistem	7 sistem	7 sistem	1.500,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.45

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembuatan Matriks Keamanan Siber</i>	<i>Standar Matriks Keamanan Siber</i>	<i>1 Standar</i>	-	-	-	-	8,9	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah</i>	<i>Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah</i>	<i>1 Regulasi</i>	-	-	-	-	4,7	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Tuan Rumah Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020</i>	<i>Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020</i>	<i>1 Kegiatan</i>	-	-	-	-	5,0	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Penyusunan Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)</i>	<i>Jumlah Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)</i>	<i>1 Regulasi</i>	-	-	-	-	7,0	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Penyusunan Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IKN</i>	<i>Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IKN</i>	<i>1 Regulasi</i>	-	-	-	-	3,0	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber</i>	<i>Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber</i>	<i>1 Regulasi</i>	-	-	-	-	0,5	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Pembuatan Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi</i>	<i>Jumlah Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi</i>	<i>1 Regulasi</i>	-	-	-	-	4,2	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Pengadaan Peralatan Laboratorium Forensik</i>	<i>Jumlah Peralatan Laboratorium Forensik yang diadakan</i>	-	-	<i>1 Paket</i>	-	<i>1 Paket</i>	58,0	<i>Pusat dan Bidlabfor Polda</i>	<i>Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</i>	<i>POLRI</i>
Prop : Pembangunan dan Penguatan CERT (ComputerEmergency Response Team)	Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0,159	0,159	0,171	0,171	0,175	74,9			
<i>Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah</i>	<i>Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah</i>	<i>15 K/L/D</i>	<i>25 K/L/D</i>	<i>27 K/L/D</i>	<i>27 K/L/D</i>	<i>27 K/L/D</i>	31,6	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</i>	<i>BSSN</i>
<i>Pembentukan CSIRT pada Sektor IKN</i>	<i>Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor IKN</i>	-	<i>1 Entitas</i>	<i>1 Entitas</i>	-	-	7,5	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Membangun Kemampuan penanganan insiden di sektor ekodig (manajemen krisis siber). PGP dan Sertifikat Digital (penguatan insiden siber. capacity)</i>	<i>Jumlah PSE yang memiliki kemampuan menangani insiden respon</i>	<i>100 PSE</i>	<i>100 PSE</i>	<i>100 PSE</i>	<i>100 PSE</i>	<i>100 PSE</i>	4,5	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Penyusunan Regulasi Pembentukan CERT</i>	<i>Jumlah Regulasi Pembentukan CERT</i>	<i>1 Regulasi</i>	-	-	-	-	3,3	<i>Pusat</i>		<i>BSSN</i>
<i>Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber</i>	<i>Jumlah tim respon ancaman intelijen siber yang dibentuk</i>	-	<i>1 tim</i>	<i>1 tim</i>	<i>1 tim</i>	<i>1 tim</i>	28,0	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</i>	<i>BIN</i>
Prop : Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	Skor Pilar Cooperation pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0,12	0,12	0,139	0,139	0,144	120,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.46

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Kerjasama Regional, Bilateral dan Multilateral Bidang Keamanan Siber</i>	<i>Jumlah kegiatan kerjasama bidang keamanan siber</i>		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
<i>Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia</i>	<i>Jumlah kegiatan kerjasama intelijen keamanan siber</i>	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	8,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BIN
<i>Penguatan Operasi Intelijen Siber</i>	<i>Jumlah kegiatan operasi intelijen siber</i>	550 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	52,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BIN
ProP : Penguatan Kapasitas SDM Keamanan Siber	Skor Pilar Capacity Building pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	195,2			
<i>Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D</i>	<i>Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk K/L/D</i>	200 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	14,6	Jakarta	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
<i>Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber</i>	<i>Jumlah Lulusan Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D</i>	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	37,7	Jakarta	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
<i>Penyelenggaraan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN</i>	<i>Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN yang mengikuti Program Born to Defence</i>	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	31,8	Jakarta	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
<i>National Cyber Exercise Drill Test</i>	<i>Jumlah peserta yang mengikuti National Cyber Excercise Drill Test</i>	1230 Orang	1250 Orang	1300 Orang	1400 Orang	1450 Orang	60,7	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BSSN
<i>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang Digital Forensik</i>	<i>Jumlah CHFI dan ECIH yang terbentuk di Puslabfor, Bid Labfor Polda, Dittipidsiber Bareskrim dan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda</i>	57 lulusan	57 lulusan	57 lulusan	57 lulusan	57 lulusan	8,6	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	POLRI
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Siber Polri</i>	<i>Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi, pelatihan, dan capacity building siber</i>	269 lulusan	269 lulusan	269 lulusan	269 lulusan	269 lulusan	21,9	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	POLRI
<i>Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber</i>	<i>Jumlah personel yang mendapatkan peningkatan kompetensi SDM intelijen siber</i>	-	50 Personel	50 Personel	50 Personel	50 Personel	20,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	BIN
ProP : Penyelesaian Kejahatan Siber	Clearance Rate Tindak Pidana Siber	61%	62%	63%	64%	65%	322,9			
<i>Penanganan Tindak Pidana Siber</i>	<i>Jumlah penanganan tindak pidana siber</i>	1,247 Kasus	1,247 Kasus	1,247 Kasus	1,247 Kasus	1,247 Kasus	230,9	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	POLRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.47

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyelidikan Online Dittipidsiber</i>	<i>Penyelidikan Online Dittipidsiber : 1080 Laporan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda : 48 Laporan</i>	<i>2712 laporan</i>	<i>2712 laporan</i>	<i>2712 laporan</i>	<i>2712 laporan</i>	<i>2712 laporan</i>	92,0	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</i>	<i>POLRI</i>
JUMLAH							330.692,4			

Keterangan :

Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

001.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	205,4
Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	2.332,2
JUMLAH	2.537,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

002.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	5.317,2
Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	11.183,0
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	2.279,4
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	201,0
JUMLAH	18.980,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

004.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.215,0
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	4.412,2
JUMLAH	5.627,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	796,2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	6.855,5
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	177,1
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	728,7
Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	100,6
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	629,6
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	299,4
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	80,3
JUMLAH	9.667,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung							10,9			
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan							10,9			
Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha	Jumlah Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	5,8	Pusat		07
Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	Jumlah Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	5,1	Daerah		07
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI							32,8			
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I							9,2			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	9,2	Daerah		07
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II							6,1			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	6,1	Daerah		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III							10,8			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	10,8	Daerah		07
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV							6,8			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	6,8	Daerah		07
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung							14,4			
Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan							10,0			
Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	Jumlah Peserta Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	160	-	-	-	-	2,1	Pusat		03
Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	Jumlah Peserta Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	80 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	7,9	Pusat		06
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan							4,4			
Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,4	Pusat		07
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							82,6			
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							82,6			
Layanan Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	55,8	Pusat		07
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	26,4	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	0,4	Pusat		07
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							140,9			
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							140,9			
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	20,4	Pusat		07
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	58,7	Pusat		07
Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	Jumlah Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	58,2	Pusat		07
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3,6	Pusat		07
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)							4,9			
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							4,9			
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	0,1	Pusat		07
Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	4,8	Pusat		07
JUMLAH							286,5			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	1.664,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	8.429,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	122,1
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	776,9
Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	616,7
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	1.697,6
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	1.061,1
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	64,5
JUMLAH	14.432,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI							638,2			
Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian							9,0			
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	Jumlah Satker yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	9,0	Daerah		07
Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi							580,0			
Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	156 Satker	156 Satker	156 Satker	156 Satker	156 Satker	410,2	Daerah		07
Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	Jumlah Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	45,8	Daerah		07
Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	Jumlah Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	460 Satker	460 Satker	460 Satker	460 Satker	460 Satker	124,1	Daerah		07
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara							49,1			
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	49,1	Pusat		07
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan							33,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional							33,2			
Diklat Pemulihan Aset	Jumlah Angkatan Diklat Pemulihan Aset	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	9,5	Pusat		07
Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan	Jumlah Angkatan Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan	8 Angkatan	-	-	-	-	3,0	Pusat		03
Diklat Illegal Fishing	Jumlah Angkatan Diklat Illegal Fishing	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	6,9	Pusat		06
Diklat Mineral Batubara	Jumlah Angkatan Diklat Mineral Batubara	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	6,9	Pusat		06
Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Angkatan Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	6,9	Pusat		06
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum							7,2			
Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya							0,3			
Implementasi Keadilan Restoratif	Penyusunan Juknis Implementasi Keadilan Restoratif	1 Juknis					0,3	Pusat		07
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri							6,9			
Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Laporan Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,9	Pusat		07
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi							4,0			
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung RI							4,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	Jumlah Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	4,0	Pusat		07
JUMLAH							682,6			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

007.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	4.586,4
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	2.182,4
JUMLAH	6.768,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

007.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden							21,0			
Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri							21,0			
KSST Bidang Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kegiatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri	8	10	11	12	13	21,0	Pusat	07	
JUMLAH							21,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	1.057,5
Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	183,2
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	97,4
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	382,1
Program Bina Pembangunan Daerah	937,0
Program Bina Otonomi Daerah	215,0
Program Bina Administrasi Kewilayahan	1.043,7
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	216,7
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.804,2
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.053,8
Program Pendidikan Kepamongprajaan	923,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Bina Pemerintahan Desa	874,8
JUMLAH	10.788,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri							42,5			
Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah							42,5			
Kebijakan pemberian insentif bagi pelaksanaan inovasi daerah (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, dan Kemenkeu)		1	1	1	1	1	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	10	10	10	10	10	2,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	6	6	6	6	6	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	2	2	2	2	2	1,7	Provinsi Nusa Tenggara Timur		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	5	5	5	5	5	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	7	7	7	7	7	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	2	2	2	2	2	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	2	2	2	2	2	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	3	3	2	-	-	4,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	4	1	3,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	2	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	2	-	-	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	2	1	-	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	1	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Aplikasi Umum Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Aplikasi Umum Pusat Jejaring Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	3	2	3	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (Alokasi Kemendagri)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (Alokasi Kemendagri)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	4	2	3	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	3	2	3	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	165	165	165	165	165	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	89	89	89	89	89	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	24	24	24	24	24	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	129	129	129	129	129	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	34	34	34	34	34	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	61	61	61	61	61	1,4	Pusat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	44	44	44	44	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							51,3			
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri							51,3			
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	60	60	60	60	60	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	30	30	30	30	30	0,4	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	36	36	36	36	36	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	42	42	42	42	42	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	40	50	60	68	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	40	50	60	68	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	320	320	320	320	320	4,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	192	192	192	192	192	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	64	64	64	64	64	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	106	120	135	150	166	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	39	41	43	43	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	160	160	160	160	160	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	64	64	64	64	64	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	46	47	48	49	50	4,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	24	24	24	24	24	2,1	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	36	36	36	36	36	3,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	34	35	36	37	38	3,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	1,1	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	24	24	24	24	24	2,1	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	8	8	8	8	8	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	40	40	40	40	40	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	28	28	28	28	28	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	24	24	24	24	24	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	8	8	8	8	8	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	20	20	20	20	20	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	8	8	8	8	8	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	20	20	20	20	20	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	14	14	14	14	14	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	12	12	12	12	12	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	4	4	4	4	4	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	10	10	10	10	10	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	4	4	4	4	4	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	4	4	4	4	4	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	80	80	80	80	80	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	56	56	56	56	56	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	48	48	48	48	48	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	16	16	16	16	16	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	40	40	40	40	40	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	16	16	16	16	16	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	16	16	16	16	16	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Bina Pembangunan Daerah							206,5			
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I							15,7			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	6	10	4	0	0	4,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	8	1	3	0	0,2	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	2	0	1	0	0	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	2	7	0	0	0	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	3	3	0	0	0	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	1	2	0	0	0	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	3	0	0	0	0	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	-	6	12	18	25	2,0	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Kelembagaan perhutanan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan perhutanan sosial	4	8	12	15	20	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III							37,0			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	34	34	34	34	34	9,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	129	129	129	129	129	6,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	34	34	34	34	34	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	61	61	61	61	61	4,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	87	87	87	87	87	5,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	23	23	23	23	23	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	44	44	44	44	44	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11	11	19	19	34	2,0	Pusat (alokasi Kementerian)		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian inflasi daerah	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah			10	20	34	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penilaian kinerja penanganan stunting	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	160	260	360	460	514	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II							104,4			
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	34	34	34	34	34	6,1			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	129	129	129	129	129	4,2			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	34	34	34	34	34	1,2			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	61	61	61	61	61	3,0			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	87	87	87	87	87	3,6			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	23	23	23	23	23	1,2			02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	44	44	44	44	44	1,2			02
Sinkronisasi antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	5	10	20	30	34	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen perencanaan daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		05
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen perencanaan daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		05
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen perencanaan daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		05
Fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi di daerah	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (kab/kota)	34	34	34	34	34	34,0	Seluruh provinsi		05
Pengaturan penyelenggaraan bidang sanitasi di daerah	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	34	34	34	34	34	15,4	Pusat		05
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	0	34	34	34	34	10,0	Seluruh provinsi		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	0	34	34	34	34	10,0	Seluruh provinsi		05
Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah							18,2			
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	10	10	10	10	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	7	7	7	7	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	5	5	5	5	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	6	6	6	6	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	10	10	10	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	7	7	7	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	5	5	5	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	6	6	6	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	10	10	10	10	10	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	7	7	7	7	7	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	2	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	5	5	5	5	5	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	6	6	6	6	6	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	2	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	2	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV							31,2			
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	34	34	34	34	34	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	129	129	129	129	129	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	34	34	34	34	34	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	61	61	61	61	61	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	87	87	87	87	87	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	23	23	23	23	23	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	44	44	44	44	44	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penetapan dan implementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	Jumlah daerah yang diimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	6	7	7	7	7	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas kelembagaan UKS/M di daerah	jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	7	7	7	7	7	2,0	Pusat		03
Peningkatan indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	53,00	54,75	56,50	58,50	60,00	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		04
Integrasi rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	-	50	55	60	70	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Fasilitasi integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	-	22	24	28	34	4,6	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	-	20	22	26	32	4,3	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	-	22	24	28	34	4,0	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Koordinasi penerapan RAD penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan	-	18	24	30	34	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Program Bina Otonomi Daerah							148,7			
Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD							118,1			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	4	4	5	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	8	8	8	8	8	10,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	50	59	68	68	68	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	7	7	7	7	9,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	35	41	47	47	47	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	32	38	44	44	44	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	10	12	14	14	14	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	25	29	33	33	33	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	10	12	14	14	14	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	10	12	14	14	14	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	2	2	2	2	2	2,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	36	68	98	131	163	16,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	5	7	9	11	14	9,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	10	10				0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	3	4	4	5	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	3	5	7	7	4,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	4	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	2	2	2	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	2	3	3	4	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus	4	4	4	4	4	5,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	1	1	1	1	7,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	2	2	2	2	2	15,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	-	2	2	2	2	13,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa	2	2	-	-	-	4,2	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri		02
Revisi UU 21 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua	Terfasilitasi dan tersusunnya perubahan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	1					1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah							30,6			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	5	7	39	43	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	2	2	2	2	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	3	3	5	5	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	82	102	122	138	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	-	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	0	0	0	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	9	9	9	9	9	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	4	5	5	5	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	5	5	5	5	5	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	6	6	6	6	6	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	6	6	6	6	6	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	23	23	23	23	23	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	5	5				0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	2	2	0	0	0	0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Bina Administrasi Kewilayahan							893,0			
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							785,6			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	13,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.31

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.32

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.33

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.34

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.35

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	17,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.36

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.37

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	14,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.38

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.39

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	13,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.40

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.41

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	2,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	17,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.42

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	2,573	2,573	2,573	2,573	12,865	13,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	12,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	17,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.43

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	14,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	14,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	84	116	148	148	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	46	62	82	82	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	10	14	18	22	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	72	99	128	129	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.44

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	39	49	61	61	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	25	34	44	44	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Denpasar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.45

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Banjarmasin	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Semarang		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Manado		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Bandung		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Jakarta		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Palembang	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Medan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.46

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Makassar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Surabaya		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	10	-	-	-	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	2	-	-	-	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	5	-	-	-	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	6	-	-	-	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	2	-	-	-	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.47

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	2	-	-	-	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	7	2	2	2	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	10	28	23	22	21	5,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	7	16	19	23	23	3,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	8	9	11	11	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	9	9	6	6	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	6	10	10	10	11	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	2	2	2	2	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	2	2	2	2	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.48

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	2,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	12	22	25	36	38	5,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	2	2	4	4	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.49

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	6	6	10	10	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	7	7	12	12	3,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	2	2	3	4	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	2	2	4	4	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	7	7	14	14	4,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	10,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	2	2	2	2	2,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	5	5	5	5	5,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.50

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	6,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	2,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	7	7	7	7	5,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	2,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	2	-	-	-	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	1	-	-	-	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	84	84	90	27,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.51

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	2	4	6	8	5,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	4	8	17	21	12,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	4	12	16	23	13,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	2	4	6	8	5,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	30	30	30	13,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.52

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	4	12	27	31	16,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	2	-	-	-	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	1	-	-	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	3,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara							26,5			
Kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	5	5	5	5	5	26,5	Pusat		07
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat							14,8			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	30	61	96	130	164	4,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	18	36	51	66	87	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	10	15	19	23	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	21	47	73	101	129	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.53

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	15	27	39	49	61	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	16	25	34	44	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran							66,2			
Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5	5	5	5	5	9,1	34 Provinsi		06
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	61	61	61	61	61	8,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	44	44	44	44	44	3,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34	34	34	34	34	6,6	34 Provinsi		06
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	30	61	96	130	164	4,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	18	36	51	66	87	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	10	15	19	23	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	107	119	130	143	155	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	15	27	39	49	61	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	16	25	34	44	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	13	19	27	34	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.54

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	30	61	96	130	164	5,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	18	36	51	66	87	3,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	10	15	19	23	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	23	34	47	59	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	15	27	39	49	61	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	16	25	34	44	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	7	9	11	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	13	19	27	34	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	34	34	34	34	34	5,4	34 Provinsi		06
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah							93,6			
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah							24,7			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanjanya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	32	32	32	32	32	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.55

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	30	61	96	130	164	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	18	36	51	66	87	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	10	15	19	23	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	17	48	75	102	129	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	15	27	39	49	61	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	16	25	34	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	33	49	108	125	142	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	30	61	96	130	164	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.56

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	21	47	73	101	129	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	18	36	51	66	87	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	15	27	39	49	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	13	19	27	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	16	25	34	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	30	61	96	130	164	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.57

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	21	47	73	101	129	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	18	36	51	66	87	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	13	19	27	34	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	15	27	39	49	61	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	16	25	34	44	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah							25,0			
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	7	13	19	24	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.58

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	6	13	19	27	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	15	27	39	49	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	18	36	51	66	87	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	30	61	96	130	164	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	18	36	51	66	87	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.59

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	14	31	48	66	83	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	15	27	39	49	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	13	19	27	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	16	25	34	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	82	96	111	125	154	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	73	83	94	104	122	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	48	54	62	68	81	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.60

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	15	17	19	21	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	31	37	43	49	56	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	17	20	23	26	32	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	19	23	27	31	42	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	9	9	10	10	10	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	6	6	6	6	6	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	5	5	5	6	6	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	2	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.61

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	5	5	5	5	5	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah							8,2			
Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	Jumlah daerah yang memperoleh fasilitasi dalam pengelolaan pinjaman daerah dan obligasi daerah	50	55	60	65	70	6,1	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	0	0	1	1	0	2,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah							17,6			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	75	99	123	143	164	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.62

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	33	47	62	75	87	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	4	9	14	19	23	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	27	36	46	52	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	17	21	26	30	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.63

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	2	13	23	34	44	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	10	10	10	10	10	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	6	6	6	6	6	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	6	6	6	6	6	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	2	2	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	5	5	5	5	5	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	2	2	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	2	2	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	10	10	10	10	10	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	6	6	6	6	6	2,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	2	2	2	2	2	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	7	7	7	7	7	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	5	5	5	5	5	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	2	2	2	2	2	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	2	2	2	2	2	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.64

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD Dan Barang Milik Daerah							18,0			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	93	110,75	128,5	146,25	164	5,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	37	49,5	62	74,5	87	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	2	7,25	12,5	17,75	23	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	74	85,25	96,5	107,75	119	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	45	49	53	57	61	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	24	26,5	29	31,5	34	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	2	12,5	23	33,5	44	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							245,0			
Pengelolaan Informasi Kependudukan							35,0			
Penyediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	3	5	10	15	20	35,0	34 Provinsi		03
Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil							140,0			
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	90	95	97	98	100	35,0	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.65

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (16.9.1*)	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	0,0	34 Provinsi		03
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	20	40	60	80	100	35,0	34 Provinsi		03
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	20	40	60	80	100	35,0	34 Provinsi		03
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	70	100	100	100	100	35,0	34 Provinsi		03
Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk							35,0			
Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	112	112	112	112	112	35,0	23 Provinsi		03
Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan							35,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.66

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan integrasi data administrasi kependudukan melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	Jumlah instansi yang mengintegrasikan data melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	6	10	16	20	22	35,0	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum							193,7			
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan							63,5			
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	400	1800	3000	3300	4200	63,5	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Fasilitasi Politik Dalam Negeri							46,2			
Penguatan Demokrasi di Daerah	Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	34	34	34	34	34	17,5	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Kebijakan Politik Dalam Negeri	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	2	2	2	N/A	N/A	6,0	Pusat		07
Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	100	200	500	700	800	11,5	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	3000	5000	6000	8000	10000	11,2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							9,4			
Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	Daerah yang Kerukunan Umat Beragamanya meningkat	34	34	34	34	34	9,4	Daerah		04
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional							54,1			
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61	62	63	64	65	32,0	Pusat dan Daerah		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.67

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Deteksi Dini oleh Aparat Pusat dan Daerah	Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar	600	2000	2200	2400	3000	22,1	Pusat dan Daerah		07
Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan							20,5			
Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	34	34	34	34	34	12,5	Pusat dan Daerah		04
Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	15	16	17	18	19	8,0	Daerah		04
Program Bina Pemerintahan Desa							75,9			
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional							38,9			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga masyarakat desa lingkup regional yang dilatih	440	700	730	750	676	12,5			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga masyarakat desa lingkup regional yang dilatih	265	420	442	450	408	7,5			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga masyarakat desa lingkup regional yang dilatih	90	140	148	152	136	2,5			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga masyarakat desa lingkup regional yang dilatih	225	350	370	375	340	6,3			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga masyarakat desa lingkup regional yang dilatih	270	420	444	450	408	7,6			02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.68

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	90	140	148	152	136	2,5	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa							18,2			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	20	30	32	35	30	4,8			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	12	20	24	24	18	3,2			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	4	8	8	8	6	1,1			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	10	20	20	20	20	2,9			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	17	24	24	24	24	3,7			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	6	8	8	8	8	1,2			02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.69

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	6	8	8	8	8	1,2	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa							18,8			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	10	10	10	10	10	5,1			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	6	6	6	6	6	3,0			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	2	2	2	2	2	1,0			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	5	5	5	5	5	4,6			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	6	6	6	6	6	3,0			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	2	2	2	2	2	1,0			02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.70

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	2	2	2	2	2	1,0	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
JUMLAH							1.950,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	2.515,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	5.974,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	70,5
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	240,2
Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	3.862,7
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	287,2
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	100,1
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	181,1
Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	84,9
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	458,4
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	386,2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	4.684,4
JUMLAH	18.846,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN							204,5			
Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi							27,5			
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN	64	94	94	95	94	27,5	Pusat		07
Kerja Sama ASEAN Bidang Sosial Budaya							26,9			
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN	37	44	97	51	50	26,9	Pusat		07
Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional							36,1			
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	130	135	140	146	151	36,1	Pusat		07
Kerja Sama ASEAN Bidang Politik dan Keamanan							87,3			
Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan	140	178	180	191	190	87,3	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama ASEAN							26,7			
Layanan Setnas ASEAN-Indonesia		1	1	1	1	1	26,7	Pusat		07
Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral							281,5			
Kerja Sama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan							52,9			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	90	90	90	90	90	37,2	Pusat		07
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	80	80	80	80	80	6,4	Pusat		07
Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	90	90	90	90	90	4,7	Pusat		07
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	80	80	80	80	80	4,5	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme							101,6			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	95	95	95	95	95	33,1	Pusat/ Perwakilan		07
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di forum multilateral	93	93	93	93	93	15,0	Pusat		07
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	80	80	81	81	81	0,0	Pusat		07
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB (ProPN)	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	15,5	Pusat		07
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral	95	95	95	95	95	38,0	Pusat		07
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup							34,7			
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup	90	90	90	90	90	0,5	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	90	90	90	90	90	5,7	Pusat		07
Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Diplomasi Maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	90	90	90	90	90	1,7	Pusat		07
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi dan sosial di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral	90	90	90	90	90	26,8	Pusat		07
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (PKKI)							30,4			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	90	90	90	90	90	3,5	Pusat		07
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Persentase rekomendasi dari forum kerja sama multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	90	90	90	90	90	5,3	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diplomasi Maritim yang kuat di forum multilateral bidang perdagangan, komoditas, dan kekayaan intelektual	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral	90	90	90	90	90	2,5	Pusat		07
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang perdagangan, komoditas dan kekayaan intelektual	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral	90	90	90	90	90	19,1	Pusat		07
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang							54,2			
Kepemimpinan dan Peran Aktif Indonesia pada Berbagai Forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	87	87	88	90	90	30,2	Pusat		07
Diplomasi maritim yang kuat di forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	90	90	91	92	92	0,6	Pusat		07
Diplomasi sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi sosial dan budaya di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang di forum multilateral	87	87	88	89	90	12,9	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Sosial Budaya yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	72	73	74	75	76	10,4	Pusat		07
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Persentase penyelesaian permohonan registrasi Organisasi Kemasyarakatan Asing	70	71	72	73	74	0,0	Pusat		07
Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dan Dukungan Manajemen/Teknis pada Ditjen Kerja Sama Multilateral							7,9			
Pemenangan Indonesia di Berbagai Pencalonan yang Pemilihannya dilakukan di Tahun 2020	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral	75	75	75	75	75	7,9	Pusat		07
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							237,2			
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika							54,8			
Kesepakatan Kerjasama di kawasan Sub Sahara Afrika	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Sub Sahara Afrika	22	23	22	22	22	54,8	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah							32,4			
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	29	29	29	29	29	32,4	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik							50,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	31	33	34	36	36	50,7	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							31,6			
Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intra kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	39	39	39	39	39	31,6	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah							37,7			
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Timur Tengah	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Timur Tengah	11	12	13	14	15	37,7	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Tenggara							30,0			
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Tenggara	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	25	25	25	25	25	30,0	Pusat		07
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional							38,1			
Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan							38,1			
Perundingan batas dan Kerja Sama Kelautan Maritim INA dgn 9 negara tetangga	Persentase perundingan batas dan kerja sama perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga	8	8	8	8	8	15,6	Pusat		07
Perundingan Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas	Persentase penetapan batas dan kerja sama perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga	31	31	31	31	31	22,5	Pusat		07
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa							158,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia Timur							19,6			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II	15	15	15	15	15	19,6	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah serta Karibia Barat							26,2			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I	24	29	29	29	29	26,2	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat dan Selatan							21,9			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I	17	17	17	17	17	21,9	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Utara dan Tengah							33,0			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II	19	20	21	22	23	33,0	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa							24,4			
Prakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	JumlahPrakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	26	26	26	26	26	24,4	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Timur dan Tenggara							33,2			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III	34	35	35	35	35	33,2	Pusat		07
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran							335,8			
Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri							335,8			
Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri							332,8	Pusat		07
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI	1	1	1	1	1	3,0	Pusat		07
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik							293,8			
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik							213,6			
Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia Terpromosikan dengan Baik dan Tepat Sasaran	Persentase Dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia	95	95	96	97	97	213,6	Pusat		07
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Informasi dan Pelayanan Media							43,0			
Diplomasi Digital dan Informasi hubungan luar negeri yang kuat	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	91	92	93	94	95	43,0	Pusat		07
Pembentukan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi isu-isu strategis, dan personil							26,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rekomendasi terkait pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi strategis dan personil	Indeks citra positif Indonesia di dunia internasional	4	4	4	4	4	26,2	Pusat		07
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Pemberian Bantuan Kerja Sama Teknik yang Berkualitas							11,0			
Bantuan Kerja sama Teknis Indonesia	Jumlah Kegiatan Bantuan teknis Indonesia	8	8	8	8	8	11,0	Pusat		07
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri							1.675,6			
Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional							1.675,6			
Kerjasama Bilateral/Regional/Multilateral	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	4751	4851	4951	5051	5151	944,3	Prawakilan RI		07
Perlindungan WNI/BHI	Jumlah WNI/BHI yang Mendapat Perlindungan (orang)	230000	241500	253575	266253,75	279566,438	726,9	Prawakilan RI		07
Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB 2020	Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh dalam forum DK PBB	54	-	-	-	-	4,5	Prawakilan RI		07
JUMLAH							3.225,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	11.059,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	81.078,5
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	103,7
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	2.525,3
Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	530,3
Program Strategi Pertahanan	175,6
Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	83,0
Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	10.595,8
Program Potensi Pertahanan	907,7
Program Kekuatan Pertahanan	176,2
Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	14.718,6
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	7.071,1
Program Profesionalisme Prajurit Integratif	3.008,5
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	18.556,8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	35.308,6
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	12.204,5
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	23.480,6
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	27.644,7
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	4.028,1
Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	30.798,8
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	16.404,3
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	4.783,9
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.727,9
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	40.970,7
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	16.279,5
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	11.872,2
Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan	553,8
JUMLAH	379.648,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan							76.854,2			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan							1.016,0			
Pembangunan JIPP	Panjang JIPP	200 km	200 km	200 km	200 km	200 km	1.016,0	Pusat		07
Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan							75.838,2			
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AD	Jumlah RS TNI AD yang di-Upgrade		5 unit (Tahap 1)	5 unit (Tahap 2)	5 unit (Tahap 3)	5 unit (Tahap 4)	600,0	Pusat		07
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AL	Jumlah RS TNI AL yang di-Upgrade		2 unit (Tahap 1)	2 unit (Tahap 2)	2 unit (Tahap 3)		350,0	Pusat		07
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AU	Jumlah RS TNI AU yang di-Upgrade		2 unit (Tahap 1)	2 unit (Tahap 2)	2 unit (Tahap 3)		350,0	Pusat		07
Alutsista Strategis Luar Negeri	Jenis Alutsista Strategis Luar Negeri yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	66.273,8	Pusat		07
Alutsista Strategis Luar Negeri untuk Pertahanan Laut Natuna	Jenis Alutsista Pertahanan Laut Natuna yang diadakan		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	8.264,4	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan							2.330,0			
Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan							180,0			
IPTEKHAN bidang daya tempur	Tahap Prototipe		Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	180,0	Pusat		07
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan							2.150,0			
Propelan	Terbangunnya Sarana Produksi Propelan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	2.150,0	Pusat		07
Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan							10.469,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan							10.469,1			
Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan	Jenis Alpalhan yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	7.709,1	Pusat		07
Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan untuk Pertahanan Laut Natuna	Jenis Alpalhan yang diadakan untuk Pertahanan Laut Natuna		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2.760,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Program Potensi Pertahanan							181,7			
Pembinaan Kesadaran Bela Negara							181,7			
Pengembangan bela negara	Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki Nilai-Nilai Bela Negara	42700	43000	43000	43000	43000	181,7	Pusat		04
Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif							375,0			
Operasi Militer Selain Perang (OMSP)							375,0			
Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana	Jumlah Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	375,0	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif							2.951,0			
Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis							797,9			
Alutsista Mabes TNI	Jenis Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	797,9	Pusat		07
Pengadaan non-Alutsista/senjata							400,0			
Pembangunan Pertahanan Siber Mabes TNI	Jumlah Sistem Pertahanan Siber Mabes TNI		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengadaan munisi kaliber kecil							506,9			
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber kecil Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	506,9	Pusat		07
Pengadaan munisi khusus							51,4			
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi khusus Mabes TNI yang diadakan		1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	51,4	Pusat		07
Pengadaan munisi kaliber besar							428,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber besar Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	428,8	Pusat		07
Pengadaan senjata							366,0			
Alutsista Mabes TNI	Jenis senjata Mabes TNI yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	366,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras pendukung							400,0			
Pembangunan Sarpras Mabes TNI	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras Mabes TNI		10000	10000	10000	10000	400,0	Pusat		07
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat							3.825,5			
Pemeliharaan/Perawatan Ranpur							1.175,0			
Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.175,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang							826,0			
Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	826,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal							1.824,5			
Alutsista TNI AD	Jenis senjata dan munisi/alpal TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.824,5	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat							8.651,5			
Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur							1.567,0			
Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.567,0	Pusat		07
Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)							1.219,5			
Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.219,5	Pusat		07
Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi							1.100,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista TNI AD	Jenis senjata TNI AD yang diadakan		9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.100,0	Pusat		07
Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista							655,0			
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AD	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AD		1 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	655,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat							4.110,0			
Pembangunan Pos Pamtas	Jumlah Pos Pamtas yang dibangun	12 Pos	8 Pos	9 Pos	7 Pos	7 Pos	110,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras TNI AD	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AD	68000	88000	91000	96000	99000	4.000,0	Pusat		07
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut							18.316,0			
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senak dan Amunisi Matra Laut							166,0			
Alutsista TNI AL	Jenis senak dan amunisi TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%		8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	166,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis							16.000,0			
Alutsista TNI AL	Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	16.000,0	Pusat		07
Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional							1.200,0			
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Matra Laut	Jumlah operasi		20 operasi	20 operasi	20 operasi	20 operasi	1.200,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Pesud							950,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	950,0	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut							23.457,0			
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut							2.319,0			
Pembangunan Pos AL	Jumlah pos AL yang dibangun	15 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	300,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras TNI AL	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AL	10000	10000	10000	10000	10000	1.793,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna	Jumlah Paket Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	226,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek Matra Laut							400,0			
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AL	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AL		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amonisi Matra Laut							3.497,0			
Alutsista TNI AL	Jenis senlek dan amonisi TNI AL yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	3.497,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut							15.400,0			
Alutsista TNI AL	Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL yang diadakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	15.400,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut							1.841,0			
Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL yang diadakan		4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1.841,0	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Kesiapan Matra Udara							28.284,0			
Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya							25.000,0			
Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara, senjata, dan almatsus TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	25.000,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya							3.284,0			
Alutsista TNI AU	Jenis radar, PSU, dan alat komlek TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3.284,0	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara							6.787,0			
Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara							1.200,0			
Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara/pendukungnya TNI AU yang diadakan		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0	Pusat		07
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara							1.987,0			
Pembangunan Sarpras TNI AU	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AU	10000	10000	10000	10000	10000	1.987,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Alat Komlek Lainnya							1.200,0			
Alutsista TNI AU	Jenis Radar, Psu dan Alat Komlek TNI AU yang diadakan		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat							2.000,0			
Alutsista TNI AU	Jenis Senri/Senrat TNI AU yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	2.000,0	Pusat		07
Pengadaan Peralatan Non Alutsista							400,0			
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AU	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AU		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan							506,0			
Pengelolaan Pertahanan Siber							506,0			
Pengembangan Sistem Pertahanan Siber	Jumlah sistem pertahanan siber yang dikembangkan		6 sistem	3 sistem	2 sistem	3 sistem	55,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Revitalisasi infrastruktur dan jaringan siber Pushansiber	presentase peningkatan kualitas jaringan		1				65,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Sistem Pengamanan Pangkalan (Smart Building Pushansiber)	Jumlah pangkalan yang diberikan sistem pengamanan		1 pangkalan	-	-	1 pangkalan	64,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peningkatan 11 unit Server Data Center Pushansiber	Jumlah sub sistem dari Server Data Center		11 unit	-	-	-	2,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pembangunan Sistem Cyber Intelegent Analytica Pushansiber	waktu analisa ancaman/ serangan siber		15 menit	-	-	-	125,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan Laboratorium Offensive dan Defensive Pushansiber	Jumlah peralatan Laboratorium Offensive dan Defensive	-	20 offensive dan 12 defensive	-	-	-	100,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Tim CERT Pushansiber	Jumlah Peralatan dan kapasitas Tim CERT	-	3 paket	-	-	-	40,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengadaan Anti Drone	Jumlah Peralatan Anti Drone	-	-	1 paket	-	-	2,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan dan Pelatihan TIK di Bidang Siber	Jumlah SDM TIK Bidang Siber		100 lulusan	100 lulusan	100 lulusan	100 lulusan	52,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
JUMLAH							182.988,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	1.814,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	113,2
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	102,4
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	2.149,6
Program Pembentukan Hukum	116,9
Program Administrasi Hukum Umum	3.032,1
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	14.217,2
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	771,8
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	7.110,5
Program Pemajuan HAM	127,3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pembinaan Hukum Nasional	499,4
JUMLAH	30.055,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM							10,5			
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II							1,0			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,0	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III							3,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	3,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM							13,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan							13,5			
Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	Jumlah Laporan Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13,5	Pusat		07
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM							19,1			
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM							16,4			
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Masyarakat	Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Masyarakat	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	16,4	Pusat		07
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan							2,7			
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Jumlah APH yang Mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA	270	-	-	-	-	2,7			03
Program Pembentukan Hukum							12,6			
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan							12,5			
RUU Hukum Acara Perdata	RUU Hukum Acara Perdata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,0	Pusat		07
RUU Jaminan Fidusia	RUU Jaminan Fidusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			0,9	Pusat		07
RUU Kepailitan	RUU Kepailitan	1 Dokumen	1 Dokumen				0,6	Pusat		07
RUU KUHP/KUHAP	RUU KUHP/KUHAP yang diundangkan	1 Dokumen					1,8	Pusat		07
Pedoman konsultasi publik	Penyusunan pedoman konsultasi publik	1 Dokumen					0,2	Pusat		07
Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan							0,1			
Penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi	Aplikasi penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi	1 Paket					0,1	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Administrasi Hukum Umum							5,2			
Administrasi Hukum Perdata							5,2			
RUU Badan Usaha	Kebijakan pendukung penyusunan NA RUU Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen				5,2	Pusat	07	
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan							165,9			
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak							159,9			
Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat	35 pokmas	40 pokmas	30 pokmas	35 pokmas	35 pokmas	8,9	Wilayah	07	
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	60	70	80	90	100	86,5	Wilayah	03	
Pemenuhan Hak Pendidikan klien Anak di Luar Lembaga	Persentase klien pemsarakatan yang melanjutkan pendidikan di luar lembaga	20	25	30	35	40	64,5	Wilayah	03	
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama							4,0			
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	Jumlah Wilayah yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	2,0	Daerah	07	
Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	Jumlah Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	2,0	Daerah	07	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							2,0			
Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA	Jumlah Wilayah yang Mendapat Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA	19	-	-	-	-	2,0		03	
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual							5,0			
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual							5,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan sistem dan data kekayaan intelektual komunal	Jumlah data KI komunal	120	120	120	120	120	5,0	Pusat		04
Program Pembinaan Hukum Nasional							337,2			
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional							0,1			
Tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	1 Dokumen					0,1	Pusat		07
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional							0,5			
NA RUU Badan Usaha	Penyusunan NA RUU Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			0,5	Pusat		07
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							336,7			
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah Orang Penerima Bantuan Hukum Litigasi	5699 orang	7025 orang	7025 orang	7025 orang	9169 orang	286,6	Daerah		07
Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	758 Kegiatan	938 Kegiatan	938 Kegiatan	938 Kegiatan	1221 Kegiatan	50,1	Daerah		07
JUMLAH							569,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	15.632,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	213,5
Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	3.221,1
Program Pengelolaan Anggaran Negara	272,8
Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	288,8
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	38.698,8
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	1.420,8
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	397,8
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	15.928,9
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	9.019,9
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	307,6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Integrasi Layanan Indonesia National Single Window (INSW)	469,7
JUMLAH	85.872,5

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara							331,3			
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman							35,0			
Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana (PIP)	334	334	334	334	334	35,0	34 Provinsi		03
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro							296,3			
Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Jumlah Kelompok yang Memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro	1641000	2800000	3500000	4200000	4900000	296,3	34 Provinsi		03
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							1,6			
Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan							0,7			
Kajian mengenai Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Pendalaman Pasar Keuangan	Rekomendasi kebijakan terkait dampak dan kontribusi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) terhadap pendalaman pasar keuangan	1	0	0	0	0	0,7	Pusat		01
Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral							0,9			
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Keuangan	Jumlah kegiatan KSS2 Bidang Keuangan	1	0	0	0	0	0,9	Pusat		07
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak							2.580,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpajakan							2.580,4			
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)		1,5	9,52	52,38	100	Selesai	2.580,4	Pusat		01
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai							0,6			
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan							0,6			
Peningkatan kelancaran logistik dan perdagangan di perbatasan serta percepatan pelayanan e-commerce dan transshipment		9	0	0	0	0	0,6	Pusat		01
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko							0,6			
Pengelolaan Pembiayaan Syariah							0,6			
Pengembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN dengan Skema Investasi Pemerintah	Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah	1	0	0	0	0	0,6	Pusat		01
JUMLAH							2.914,5			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	2.275,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	385,0
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	33.266,4
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	6.045,7
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	7.515,2
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	8.322,6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	18.899,8
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	5.952,4
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	5.288,3
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.717,3
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	2.675,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pendidikan Pertanian	3.362,6
JUMLAH	97.705,9

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan							30.670,6			
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi							4.079,1			
Kawasan Kedelai	Jumlah Kawasan Kedelai	500000	517500	535613	554359	573267	3.053,3	26 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Ubi Kayu	Jumlah Kawasan Ubi Kayu	20000	20700	21425	22174	22950	136,8	18 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Ubi Jalar	Jumlah Kawasan Ubi Jalar	2500	2588	2678	2772	2869	89,2	4 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Kacang Tanah	Jumlah Kawasan Kacang Tanah	30000	31050	32137	33262	34426	645,2	24 Provinsi		01
Kawasan Kacang Hijau	Jumlah Kawasan Kacang Hijau	20000	20700	21425	22174	22950	118,3	16 Provinsi		01
Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya	500	518	536	554	573	5,9	Jawa Barat, Banten		01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	25	25	25	25	25	30,4	Pusat		01
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia							7.980,2			
Kawasan Padi	Jumlah Kawasan Padi	791000	791000	791000	791000	791000	6.766,1	Pusat, 32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan jagung	Jumlah kawasan jagung	50000	50000	50000	50000	50000	476,9	27 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Jumlah Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	10000	50000	100000	150000	200000	707,4	Sentra padi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Serealia Lainnya	Jumlah Kawasan Serealia Lainnya	5000	5000	5000	5000	5000	29,8	20 Provinsi		01
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan							10.854,6			
Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	Jumlah areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	2120000	2120000	2120000	2120000	2120000	3.000,4	Pusat, 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Benih Sumber Padi	Jumlah benih Sumber Padi	1044000	1044000	1044000	1044000	1044000	60,2	31 Provinsi		01
Benih Sumber Jagung	Jumlah Benih Sumber Jagung	71000	71000	71000	71000	71000	6,1	16 Provinsi		01
Benih Sumber Kedelai	Jumlah Benih Sumber Kedelai	192600	192600	192600	192600	192600	14,4	25 Provinsi		01
Produsen Benih Padi	Terlaksananya pemberdayaan produsen benih padi	5560	5560	5560	5560	5560	70,2	Pusat, 4 Provinsi		01
Produsen Benih Jagung	Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Jagung	2000	2000	2000	2000	2000	59,7	Pusat		01
Benih sumber aneka umbi	Jumlah Benih sumber aneka umbi	170000	170000	170000	170000	170000	2,2	4 Provinsi		01
Benih sumber aneka kacang dan serea lain	Jumlah benih sumber aneka kacang dan serea lain	65000	65000	65000	65000	65000	5,0	17 Provinsi		01
Areal sertifikat benih	Jumlah areal sertifikat benih	124500	124500	124500	124500	124500	221,6	31 Provinsi		01
Area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	Jumlah area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	7.260,7	Pusat, 31 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Produsen Benih Kedelai	Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Kedelai	1050	1050	1050	1050	1050	32,6	Pusat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara		01
Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya	Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya	150000	150000	150000	150000	150000	95,0	31 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6	6	6	6	6	26,5	Pusat		01
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI							2.132,2			
Areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT	Jumlah areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT	44180	50000	51000	52000	53000	370,0	Pusat, 32 provinsi		01
Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	Jumlah sertifikat/LHP Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	2450	2450	2485	2485	2485	50,2	Pusat		01
Penerapan Penanganan DPI	Terlaksananya Penerapan Penanganan DPI	550	560	570	580	590	17,8	22 Provinsi		01
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT	Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT	100000	100000	100000	100000	100000	1.353,8	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	5000	5000	5000	5000	5000	303,9	Pusat		01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	34	34	34	34	34	36,5	Pusat		01
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan							979,7			
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	34	34	34	34	34	979,7	34 Provinsi		01
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih							23,2			
Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	Terlaksananya Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	10	10	10	10	10	23,2	Pusat		01
Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan							113,8			
Model Peramalan OPT	Jumlah Model Peramalan OPT	10	10	10	10	10	24,3	Jawa Barat		01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9	9	9	9	9	6,6	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Model Percontohan Pertanian Modern	Jumlah Model Percontohan Pertanian Modern	1	1	1	1	1	82,9	Jawa Barat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan							4.507,9			
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	6191	7245	8245	9344	10454	4.300,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	168	168	168	168	168	98,4	23 Provinsi		01
Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	60	60	60	60	60	14,9	24 Provinsi		01
Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	100	100	100	100	100	85,1	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6	6	6	6	6	9,4	Pusat		01
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura							4.621,0			
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat							3.108,7			
Kawasan Bawang Merah	Kawasan Bawang Merah	5704	5704	5704	5704	5704	925,5	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Aneka Cabai	Luas Kawasan Aneka Cabai	13328	13328	13328	13328	13328	489,6	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
GAP Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah GAP Sayuran dan Tanaman Obat	25	25	25	25	25	6,7	5 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Tanaman Obat	Luas Kawasan Tanaman Obat	600	600	600	600	600	47,6	11 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Bawang putih	Luas Kawasan Bawang putih	8353	5000	5000	5000	5000	1.639,2	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura							589,8			
Sertifikasi Benih Hortikultura	Jumlah Sertifikasi Benih Hortikultura	1570000	1570000	1570000	1570000	1570000	106,8	31 Provinsi		01
Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Jumlah Sarana Prasarana Benih Hortikultura	4808000	4808000	4808000	4808000	4808000	188,0	33 Provinsi		01
Benih Umbi	Luas Produksi Benih Umbi	1570000	1570000	1570000	1570000	1570000	106,8	31 Provinsi		01
Benih Batang	Luas Produksi Benih Batang	4808000	4808000	4808000	4808000	4808000	188,0	33 Provinsi		01
Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura							26,9			
Sarana Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Jumlah Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	250	250	250	250	250	26,9		Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura							895,6			
Kawasan Buah Lainnya	Luas Kawasan Buah Lainnya	1351	1351	1351	1351	1351	93,4	5 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Jeruk	Luas Kawasan Jeruk	1000	1000	1000	1000	1000	48,8	9 Provinsi		01
Kawasan Florikultura	Luas Kawasan Florikultura	300000	300000	300000	300000	300000	274,7	12 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Mangga	Luas Kawasan Mangga	1375	1375	1375	1375	1375	67,8	7 Provinsi		01
Kawasan Manggis	Luas Kawasan Manggis	1600	1600	1600	1600	1600	109,9	6 Provinsi		01
Kawasan Pisang	Luas Kawasan Pisang	1500	1500	1500	1500	1500	213,1	6 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Durian	Luas Kawasan Durian	1800	1800	1800	1800	1800	87,9	10 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							0,0			
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan							4.416,7			
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar							478,8			
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi	11750	11750	11750	11750	11750	87,7	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao	10150	10150	10150	10150	10150	139,3	11 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Karet	Kawasan Karet	8300	8300	8300	8300	8300	153,8	9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Kelapa	Kawasan Kelapa	13005	13005	13005	13005	13005	89,2	12 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Area Tanaman Sagu	Area Tanaman Sagu	400	400	400	400	400	8,7	2 Provinsi		01
Dukungan Perlindungan Perkebunan							153,9			
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	1245	1245	1245	1245	1245	84,7	15 Provinsi		01
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	69	69	69	69	69	63,0	15 Provinsi		01
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	15	15	15	15	15	6,2	13 Provinsi	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	01
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah							679,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	32030	32030	32030	32030	32030	219,5	25 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	11425	11425	11425	11425	11425	459,7	13 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan							843,5			
Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	184	184	184	184	184	361,9	27 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	251	251	251	251	251	440,8	28 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan	7400	7400	7400	7400	7400	40,8	14 Provinsi	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	01
Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan							2.261,2			
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	41195600	41195600	41195600	41195600	41195600	2.261,2	32 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat							6.531,8			
Peningkatan Produksi Pakan Ternak							584,9			
Hijauan Pakan Ternak		2341	2341	2341	2341	2341	247,9	25 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Produksi bahan pakan/pakan	8000	8500	9000	9500	10000	271,1	9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Mutu dan Keamanan Pakan	Pengawasan mutu dan keamanan bahan pakan/pakan	5000	6000	7000	8000	9000	65,9	24 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan							1.367,6			
Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Surveilans Penyakit Hewan	190000	325296	325296	325296	325296	398,0	Pusat, 9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengamanan PHMS	5167450	5167450	5167450	5167450	5167450	591,2	Pusat, 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Obat Hewan dan Bahan Biologik	Penyediaan vaksin dan bahan biologik	6030325	5471100	5471100	5471100	5471100	125,8	Pusat, 1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Surveilans Obat Hewan	1610	1610	1610	1610	1610	43,3	1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kelembagaan Veteriner	Penguatan Kelembagaan Veteriner	10	10	10	10	10	209,3	Pusat, 9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak							4.428,0			
Optimalisasi Reproduksi	Jumlah Akseptor IB, PKB, ATR dan Sinkronisasi	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	2.604,5	Pusat, 34 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Benih Ternak Unggul	Penyediaan Semen Beku dan Embrio Ternak	5450945	5450945	5450945	5450945	5450945	242,0	2 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Bibit Ternak Unggul	Jumlah produksi bibit ternak unggul (Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau, Babi, Ayam dan Itik)	956054	956054	956054	956054	956054	359,0	Pusat, 8 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan ternak ruminansia potong	Pengembangan ternak ruminansia potong (Sapi Potong, Kerbau, Kambing/Domba)	16500	5000	5000	5000	5000	873,8	Pusat, 8 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan ternak ruminansia perah	Pengembangan ternak ruminansia perah (Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah)	400	500	500	700	700	44,8	Pusat, 13 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan unggas dan aneka ternak	Pengembangan unggas dan aneka ternak	501000	501000	501000	501000	501000	303,9	Pusat, 1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak							151,3			
Pengembangan Pemasaran Peternakan	Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Peternakan	6	10	10	10	10	14,1	6 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Terlaksananya kelembagaan dan usaha peternakan	112	115	117	120	120	87,3	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengelolaan Informasi Pemasaran	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pemasaran	35	35	35	35	35	23,2	Pusat, 34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Terlaksananya Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	17	20	20	20	20	26,7	13 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian							15.026,0			
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian							2.757,6			
Jaringan Irigasi Tersier	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	135600	269884	269884	269884	269884	1.536,0	32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Irigasi Perpompaan	Jumlah pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanam tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	1000	1100	1100	1100	1100	716,4	32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Embung Pertanian	Jumlah unit embung pertanian untuk penambahan areal pertanian	400	400	400	400	400	254,8	31 Provinsi		01
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	200	200	200	200	200	134,2	Pusat dan 22 provinsi		01
Irigasi Perpipaan	Jumlah unit irigasi perpipaan mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	138	138	138	138	138	84,3	21 provinsi		01
Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain irigasi pertanian yang tersedia	10	10	10	10	10	31,9	10 provinsi		01
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian							3.950,1			
Cetak Sawah	Jumlah perluasan areal pertanian	10000	10000	10000	10000	10000	1.021,7	21 provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimasi Lahan	Jumlah lahan pertanian yang dioptimasi	100000	100000	100000	100000	100000	2.309,2	15 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain cetak sawah yang tersedia	10	10	10	10	10	95,2	10 Provinsi		01
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	20000	20000	20000	20000	20000	265,5	Pusat		01
Data Lahan Pertanian	Jumlah peta geospasial lahan cetak sawah yang tersedia	7	7	7	7	7	114,6	Pusat dan 7 provinsi		01
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	17	17	17	17	17	143,9	Pusat dan 25 provinsi		01
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian							5.037,8			
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia	23440	25800	27000	28500	29500	4.969,3	Pusat dan 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Perbengkelan Alsintan	Jumlah perbengkelan Alsintan yang tersedia	18	18	18	18	18	68,5	Pusat		01
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida							2.339,8			
e-RDCK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan Kartu Tani	Jumlah lokasi (Provinsi/Kabupaten) dalam rangka penyusunan e-RDCK mendukung penerapan Kartu Tani	521	521	521	521	521	1.623,0	Pusat dan 33 provinsi		01
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Jumlah unit pengolah pupuk organik yang tersedia	500	500	500	500	500	716,7	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian							940,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asuransi Pertanian	Jumlah luas pertanaman pertanian yang terlindungi asuransi	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	779,8	Pusat dan 24 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Asuransi Usaha Ternak (AUT)	Jumlah ternak yang terlindungi asuransi	120000	150000	175000	200000	225000	161,0	Pusat dan 20 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan							3.024,6			
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian							53,7			
Galur Harapan Unggul Tanaman	Galur Harapan Unggul Tanaman	17	17	17	17	17	25,6	1 Provinsi		01
Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG	Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG	5	5	5	5	5	9,2	1 Provinsi		01
Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3	3	3	3	3	18,9	1 provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian							131,3			
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pertanian Yang Dihasilkan	17	18	19	20	21	39,7	1 Provinsi		01
Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	1	1	1	1	1	91,6	1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian							337,6			
Peta Sumberdaya Lahan Pertanian	Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian	50	50	50	50	50	31,7	1 Provinsi		01
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian)	16	16	16	16	16	199,0	3 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diseminasi Teknologi Pertanian	Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian	9	9	9	9	9	97,1	3 Provinsi		01
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan	2	2	2	2	2	4,9	1 Provinsi		01
Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	3,1	1 Provinsi		01
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1,8	1 Provinsi		01
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian							635,7			
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	46	46	46	46	46	134,9	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	8	8	8	8	8	296,7	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)	3	3	3	3	3	0,0	3 Provinsi		01
Benih Padi	Benih Padi	700	700	700	700	700	49,6	32 Provinsi		01
Benih Jagung	Benih Jagung	158	158	158	158	158	22,6	10 Provinsi		01
Benih Kedelai	Benih Kedelai	656	656	656	656	656	84,9	13 Provinsi		01
Benih bawang dan cabai	Jumlah Produksi Benih Bawang dan Cabai	39744	39744	39744	39744	39744	26,3	20 Provinsi		01
Benih Tebu	Jumlah benih tebu yang dihasilkan	540	540	540	540	540	1,8	4Provinsi		01
Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	19000	19000	19000	19000	19000	4,9	2 Provinsi		01
Benih Tanaman Palma	Jumlah benih tanaman palma yang dihasilkan	196420	196420	196420	196420	196420	14,0	27 Provinsi		01
Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian							53,1			
Teknologi Mekanisasi Pertanian	Teknologi Mekanisasi Pertanian	8	8	8	8	8	36,0	1 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diseminasi Teknologi Mektan	Diseminasi Teknologi Mektan	3	3	3	3	3	17,1	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura							795,5			
Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura	Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura	17	20	23	25	27	26,9	3 Provinsi		01
Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	10	10	11	11	12	44,6	3 Provinsi		01
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Hortikultura	Diseminasi, Inovasi, Teknologi Komoditas Hortikultura	12	12	12	12	12	63,5	3 Provinsi		01
VUB Bawang Merah dan Cabai	Jumlah VUB Bawang Merah dan Cabai	2	2	2	2	2	6,1	1 Provinsi		01
Benih Cabai	Jumlah produksi benih cabai	100	110	120	130	140	0,0	1 Provinsi		01
Benih Bawang merah	Jumlah Benih Sumber dan Sebar Bawang Merah	34400	35890	37380	38870	40360	0,0	1 Provinsi		01
Teknologi Produksi Bawang Merah dan Cabai	Jumlah Teknologi Budidaya Bawang Merah dan Cabai	2	2	2	2	2	5,5	1 Provinsi		01
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	125	190	190	190	190	630,7	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Benih bawang dan cabai	Jumlah Benih Bawang Merah dan Cabai	34500	36000	37500	39000	40500	18,3	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan							308,9			
VUB Bibit Tebu (Budset)	Jumlah VUB Bibit Tebu	3370000	3400000	3450000	3500000	4000000	5,5	2 Provinsi		01
Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	8	6	6	6	6	25,6	3 Provinsi		01
Teknologi Tanaman Perkebunan	Teknologi Tanaman Perkebunan	22	22	22	22	22	50,7	3 Provinsi		01
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	3	3	3	3	3	93,4	2 Provinsi		01
Benih Unggul Tebu Mendukung Kemandirian Benih	Jumlah Benih Unggul Tebu	0	0	0	0	0	0,0	2 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	14	14	14	14	14	28,7	3 Provinsi		01
Benih komoditas perkebunan non strategis	Benih komoditas perkebunan non strategis	1148520	1148520	1148520	1148520	1148520	54,9	27 Provinsi		01
Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	1	1	1	1	1	37,2	3 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu	Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu	1	1	1	1	1	12,8	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Peternakan							189,9			
Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	21	21	21	21	21	34,8	3 Provinsi		01
Teknologi peternakan dan veteriner	Teknologi peternakan dan veteriner	31	31	31	31	31	57,4	3 Provinsi		01
Bibit sumber ternak	Bibit Sumber Ternak	45250	45250	45250	45250	45250	55,6	3 Provinsi		01
Diseminasi teknologi	Diseminasi dan penyiapan teknologi peternakan dan veteriner untuk dimanfaatkan pengguna	5	5	5	5	5	38,5	3 Provinsi		01
Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	82990	82990	82990	82990	82990	3,7	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan							144,1			
Varietas Unggul Padi	Varietas Unggul Padi	2	3	3	3	3	15,3	1 Provinsi		01
Varietas Unggul Jagung	Varietas Unggul Jagung	2	2	2	2	2	16,5	1 Provinsi		01
Teknologi produksi padi	Teknologi produksi padi	7	7	7	7	7	22,0	2 Provinsi		01
Teknologi Budidaya Jagung	Teknologi Budidaya Jagung	3	2	2	2	2	9,8	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	1	1	1	1	1	18,3	1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	8	8	8	8	8	62,3			01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian							374,9			
Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	80	80	80	80	80	164,2	1 Provinsi		01
Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengembangan Sumberdaya Manusia	1200	1200	1200	1200	1200	186,2	1 Provinsi		01
Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	45	45	45	45	45	9,8	1 Provinsi		01
Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan	Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan	10	10	10	10	10	14,7	1 Provinsi		01
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian							3.799,3			
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian							795,6			
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial	2750	2750	2750	2750	2750	45,3	Pusat, 7 Provinsi		01
Penumbuhan dan penguatan P4S	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S dalam penumbuhan pengusaha pertanian milenial	240	240	240	240	240	29,9	Pusat, 7 Provinsi		01
Tenaga Kediklatan Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kediklatan yang Meningkatkan Kompetensinya	196	196	196	196	196	22,6	Pusat, 7 Provinsi		01
Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani dan penumbuhan pengusaha pertanian milenial	2394	2394	2394	2394	2394	122,1	Pusat		01
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program KOSTRATANI	35322	35322	35322	35322	35322	575,7	Pusat, 7 Provinsi		01
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian							3.003,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan	Kinerja Penyuluh di KOSTRATANI yang ditingkatkan	43150	43150	43150	43150	43150	2.512,2	34 Provinsi		01
Kelembagaan penyuluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Balai Penyuluhan Pertanian yang melaksanakan KOSTRATANI	3054	5646	5646	5646	5646	69,6	34 Provinsi		01
Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	Tumbuh dan Berkembangnya Pengusaha pertanian milenial melalui Korporasi Petani	100	100	100	100	100	61,1	34 Provinsi		01
Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian	Penguatan Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian mendukung KOSTRATANI	68	102	102	102	102	28,6	34 Provinsi		01
SL Petani Mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian	SL Petani Mendukung Program KOSTRATANI	23250	45000	45000	75000	75000	332,1	34 Provinsi		01
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							3.327,4			
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan							713,7			
Lumbung Pangan Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	300	220	220	220	225	109,9	28 provinsi		01
Lembaga Distribusi Pangan	Terbinanya lembaga Distribusi Pangan	962	1000	1000	1000	1000	603,8	22 provinsi		01
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan							1.286,9			
Pengembangan Korporasi UsahaTani	Terbentuknya korporasi usahatani	13	0	0	0	0	4,9	12 Provinsi		01
Pengembangan Pertanian Keluarga/Family Farming	Terbentuknya pertanian keluarga/family farming	727	646	565	485	404	992,3	17 provinsi		01
Pertanian Masuk Sekolah	Terbentuknya pertanian masuk sekolah	340	340	340	340	340	129,4	34 provinsi		01
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	389	135	135	135	135	160,2	Pusat, 34 provinsi		01
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan							1.326,8			
Pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM	Teroptimalkanya pangan lokal	34	34	34	34	34	122,1	34 Provinsi		01
Pekarangan Pangan Lestari	Terbinanya kelompok pemanfaatan pekarangan	2231	2000	2000	2500	2500	667,6	34 provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pekarangan Pangan Lestari Stunting	Terlaksananya intervensi stunting	1369	1000	1000	500	500	396,7	260 Kab/Kota		01
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	35	35	35	35	35	140,4	Pusat, 34 provinsi		01
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							1.081,8			
Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan							56,8			
Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan	Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan	4	4	4	4	4	24,4	Pusat		01
Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	4	4	4	4	4	13,4	Pusat		01
Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional	Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional	4	4	4	4	4	18,9	Pusat		01
Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani							56,8			
Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	41	41	41	41	41	56,8	Pusat		01
Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati							66,5			
Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	43	43	43	43	43	66,5	Pusat		01
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian							112,9			
Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	4	4	4	4	4	9,8	1 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	8	8	8	8	8	32,4	1 Provinsi		01
Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	10	10	10	10	10	70,8	1 Provinsi		01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							788,8			
Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	589,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengawasan dan Penindakan	Pengawasan dan Penindakan	20	20	20	20	20	54,9	33 Provinsi		01
Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	Prasarana wilker sentra produksi, distribusi, dan importasi/pengembangan sapi/lainnya	750	750	750	750	750	52,5	3 Provinsi		01
Sarana PLBN	Sarana PLBN	100	100	100	100	100	34,2	4 Provinsi		01
Prasarana infrastruktur PLBN	Prasarana infrastruktur PLBN	400	400	400	400	400	58,0	3 Provinsi		01
Program Pendidikan Pertanian							2.293,0			
Pendidikan Pertanian							2.293,0			
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Jumlah Dosen, Guru dan Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal S2 dan S3	300	300	300	300	300	127,0	Pusat		01
Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Terjalannya Kemitraan dengan Mahasiswa/Alumni dari Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian dan KOSTRATANI	1215	1300	1400	1500	1600	354,4	Pusat, 8 Provinsi		01
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Jumlah Wirausahawan Muda Pertanian yang ditumbuhkan sebagai pengusaha pertanian milenial	2090	2100	2110	2120	2130	423,6	Pusat, 11 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	22427	22427	22427	22427	22427	190,5	Pusat, 5 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	12	12	12	12	12	1.097,1	Pusat, 11 Provinsi		01
Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling)	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling) mendukung pengusaha pertanian milenial	250	300	350	400	450	37,3	Pusat		01
Tenaga Pendidik, dan Tenaga kependidikan vokasi Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi yang Ditingkatkan Kualitasnya	315	350	400	450	500	63,1	Pusat, 11 Provinsi		01
JUMLAH							74.792,1			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.728,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	157,4
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	546,8
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	428,8
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	535,5
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.466,9
Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional	444,6
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	2.036,4
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	5.225,1
JUMLAH	12.569,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian							981,1			
Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum							10,0			
Layanan fasilitasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	Terciptanya layanan penyusunan RUU LPPI	1	1	1	1		10,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional							825,0			
Alokasi Availability Payment KPB Teluk Bintuni	Jumlah Industri yang terbangun			1	1	1	825,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan							89,7			
Rencana Implementasi Making Indonesia 4.0	Tersusunnya dokumen perencanaan implementasi Making Indonesia 4.0	6	7	7	7	6	89,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal							28,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data dan Informasi Industri 4.0	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	1	1	1	1	1	25,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Keamanan Sistem Informasi	Tersedianya dokumen keamanan sistem informasi industri	1	1	1	1	1	3,3	Pusat		01
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							27,7			
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Rekomendasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	1 Rekomendasi dan fasilitasi 250 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 850 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 950 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 1150 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 1200 sertifikat	27,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil							328,5			
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki							96,1			
Perusahaan Restrukturisasi Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	Perusahaan Industri TPT yang difasilitasi/didampingi/diberikan insentif (SDM, Teknologi, Manajemen/organisasi) dalam rangka penerapan industri 4.0	25	300	300	300	300	96,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi							84,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Industri daur ulang sampah plastik	Rasio impor bahan baku sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi terhadap PDB sektor industri non migas	1	2,06	2,04	2,02	1,99	36,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pilot Project Produk Karet dalam rangka peningkatan utilisasi	Jumlah Perusahaan Pilot Project	0	2	2	2	2	19,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pilot Project Industri 4.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi	Perusahaan yang melakukan transformasi IR 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	0	2	2	2	2	27,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu							76,2			
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat	Peningkatan Kapasitas produksi sektor Industri Kimia Hulu	2,5	3,5	4,5	6	7	46,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	Jumlah Industri yang Terbangun	2	2	2	2	2	29,7	Pusat - Papua Barat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil							17,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Limbah Sebagai Bahan Baku Industri Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persentase Pemanfaatan Limbah sebagai Bahan Baku Industri Barang Galian Non Logam	20	22,5	25	27,5	30	17,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam							54,4			
Fasilitasi Investasi pada Sektor Industri Barang Galian Non Logam	Jumlah	2	2	2	2	2	17,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Transformasi 4.0 pada Sektor Industri Barang Galian Non-Logam	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Transformasi 4.0	0	3	3	3	3	36,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro							238,8			
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan							41,4			
Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Persentase Rekomendasi yang Ditindak lanjuti	3	3	4	4	4	18,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Dokumen Business Plan Green Gasoline Stand Alone Berbahan Baku Minyak Kelapa Sawit	Tersusunnya dokumen business plan	1					1,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Studi Kelayakan industri IVO/ILO	Tersusunnya dokumen business plan		1				1,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) industri IVO/ILO	Tersusunnya dokumen business plan			1			1,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional	Rekomendasi dokumen dalam perundingan kerjasama internasional	3	3	3	3	3	18,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar							55,4			
Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya	Terciptanya posisi perundingan dalam kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama lain	4	6	6	6	6	11,9	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti	7	7	7	7	7	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kenitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak dalam rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri	Terjalannya kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak	3					3,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengoptimalan supply chain melalui transformasi industri 4.0 di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah perusahaan yang teroptimalisasi supply chain di Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		3	3	3	3	7,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah industri antara sektro minuman, hasil tembakau dan bahany penyegar yang berkembang		1	1	1	1	7,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan							63,4			
Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan	Terverifikasinya kebutuhan bahan baku industri pangan	4	4	4	4	4	25,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Tersusunnya dokumen profil investasi industri	3	3	3	3	3	14,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Sampung Perikanan	Berkembangnya industri antara baha baku hasil sampung perikanan	1	1	1	1	1	22,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Agro							78,7			
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional	Terfasilitasinya Industri Agro dalam temu bisnis dan promosi dalam skala internasional	60	60	65	65	65	28,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan Ekspor bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro	Jumlah SDM industri agri yang dilatih	180	185	190	190	190	50,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							292,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan							84,1			
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pendampingan dan Center of Excellence	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)	15	15	15	15	15	23,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pilot Project	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dengan Nilai INDI 3 (Kumulatif)	6	7	8	9	10	11,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan kemampuan industri kedirgantaraan (komponen pesawat terbang) melalui Bimbingan Teknis sertifikasi	Jumlah industri yang mendapatkan bimbingan teknis sertifikasi	20	20	20	20	20	27,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan	1	2	2	2	2	3,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penyusunan Profil Investasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	Tersedianya Profil Investasi	3					12,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi Pilot Project Pengembangan AMMDES	Jumlah pilot project yang dikembangkan	1					6,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika							68,5			
Penguatan Struktur Industri Elektronika dan Telematika	Industri Komponen yang difasilitasi	5	7	7	8	8	27,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri	Industri Yang Mendapatkan Pendampingan	10	10	13	15	15	12,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perluasan Akses Technopark ke Industri Elektronika	Jumlah tenant yang terfasilitasi	3					2,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Elektronika	Industri Elektronika dan Telematika yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)	5	8	9	9	10	26,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							14,0			
Quick Wins Peningkatan Ekspor Produk (Komoditas) Prioritas Sektor ILMATE	Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan	2					2,0	Pusat		01
Kerja Sama Akselerasi Penerapan Industri 4.0 Dengan National Research Council (NRC) Korea	Tersedianya rencana aksi dan kerjasama dengan NRC Korea	1	1	1	1	1	12,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian							62,4			
Penyusunan Profil Investasi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Tersedianya jumlah profil investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian	4	3	3	2	2	17,9	Pusat		01
Fasilitasi Industri permesinan dan alat mesin pertanian yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor	Jumlah industri yang difasilitasi ekspor		5	7	8	8	19,8	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi industri komponen	Jumlah industri komponen yang difasilitasi	1	2	2	2	2	15,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan	2					3,0	Pusat		01
Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah dokumen peta jalan	2					6,0	Pusat		01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam							63,5			
Penyusunan Profil Investasi Industri Logam Dasar Non-Besi	Industri Logam yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor dan substitusi impor	1	1	1	1	1	19,3	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - 2024)	Tingkat utilisasi kapasitas produksi	75	80	85	90	95	25,3	Pusat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Pengembangan Industri dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Logam	Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan	3	10	10	10	10	3,9	Pusat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Fasilitasi Inovasi Produk Tanah Jarang	Produk inovasi	1	1	1	1	1	15,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							952,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur							177,7			
Pengembangan IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	6	20	30	50	80	33,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Dalam Negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	37,704096	38,4581779	39,2273415	40,0118883	40,8121261	15,1	Pusat		01
Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang	15	15	15	15	15	24,8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	810	2800	4200	5600	7000	79,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	20	30	30	30	30	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka							177,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	8	20	40	60	100	33,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Dalam Negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	37,704096	38,4581779	39,2273415	40,0118883	40,8121261	15,1	Pusat		01
Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang	20	60	90	125	165	24,8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	1400	2800	4200	5600	7000	79,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKMKimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	20	30	40	40	40	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut							172,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	6	20	30	50	80	28,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Dalam Negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	37,704096	38,4581779	39,2273415	40,0118883	40,8121261	15,1	Pusat		01
Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang	20	40	60	80	100	24,8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	1200	2400	3600	4800	6000	79,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	20	20	20	20	20	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							424,2			
Pengembangan Layanan IKM Persepatuan melalui BPIPI	Layanan BPIPI	1	1	1	1	1	46,5	Sidoarjo, Jawa Timur		01
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah provinsi yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	34	34	34	34	34	370,3	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan mendukung Pengembangan IKM Ekspor, Kemitraan Usaha, dan Penerapan Making Indonesia 4.0	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	7,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional							304,3			
Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri							41,4			
Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri	7	10	10	11	12	16,1	Pusat		01
Fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	Industri Dalam Negeri (IDN) yang didampingi	12	12	13	14	15	13,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Harmonisasi Kebijakan untuk Mendorong Ekspor dan Investasi	Jumlah Kebijakan yang Diharmonisasikan	-	2	3	3	4	11,9	Pusat		01
Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional							116,6			
Fasilitasi investasi dalam Global Value Chain	Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	10	2	2	2	2	91,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pendampingan investasi perusahaan Multinasional	Jumlah perusahaan multinasional	2	3	3	4	5	12,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain	Jumlah Industri yang difasilitasi	0	10	10	10	10	11,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Akses Industri Internasional							32,6			
Peningkatan utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	Utilisasi Tarif Preferensi FTA/PTA/EPA	30	35	40	45	50	32,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri Serta Pengembangan Akses Industri Internasional							46,5			
Pengembangan Market Intelligence	Rekomendasi Industrial dan Market Intelligence	6	8	10	10	12	34,7	Pusat		01
Pengembangan Helpdesk Industri	Helpdesk Industry	-	1	6	8	10	11,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan Wilayah Industri							67,3			
Fasilitasi Perizinan Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi	3	27	27	27	27	21,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi	3	27	27	27	27	41,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Fasilitasi Kawasan Industri Tematik	Kawasan Industri yang difasilitasi		3	3	3	3	4,0			01
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri							1.117,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri							214,6			
Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	100	100	100	100	100	14,4	Pusat		01
Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Peningkatan Kapasitas Lab Uji	13	205	128	104	148	181,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Regulasi Teknis Standardisasi Industri	Rancangan Regulasi Teknis	21	23	23	23	23	19,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau							52,4			
Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	Rancangan Standar	5	4	12	16	20	11,4	Pusat		06
Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri berkelanjutan	Rancangan Standar	4	4	12	16	20	16,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	06
Penyusunan dan Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	9	9	9	10	10	24,2	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	06
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas							120,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan lahan BBPK	Pengadaan lahan	0	0	0	10000	10000	85,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pembangunan gedung BBPK	Pengadaan gedung	0	300	4471	3500	300	35,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik							30,0			
Pembangunan gedung BBK dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	Pengadaan gedung	0	400	4000	3000	200	30,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik							28,5			
Pembangunan gedung B4T dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	Pengadaan gedung	0	300	4000	3000	200	28,5	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri							35,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan lahan BBTPI	Pengadaan lahan	0	0	0	1568	1568	35,0	Semarang, Jawa Tengah	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Riset dan Standardisasi Bidang Industri							98,8			
Renovasi gedung kantor, lab, layanan teknis	Renovasi gedung	0	19775,2	5368,3	5664,4	1773,9	98,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Industri Agro							189,7			
Litbang Prioritas Riset Nasional (PRN) Industri Agro	Litbang PRN Agro	1	1	1	1	1	51,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri Agro	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	6	15	16	19	20	30,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri Agro	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	10	10	10	10	9	67,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri agro 4.0	Pengadaan alat litbang	0	25	25	24	22	40,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika							348,8			
Fasilitasi Inkubasi dan Konsultasi Teknologi Industri KFTLMATE	Paket Teknologi Industri KFTLMATE		25	40	55	70	9,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Litbang PRN: Antioksidan, anti-aging dan fragrance untuk industri kosmetik berbasis minyak atsiri	Litbang PRN		1	1	1	1	49,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Litbang PRN: Pengembangan Collaborative Robot Machine pada industri makanan/minuman dan farmasi/kesehatan	Litbang PRN		1	1	1	1	49,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Litbang PRN: Material Serat, Tekstil dengan Fungsi Khusus dan Tekstil Hijau Berbahan Baku Ramie yang ramah Lingkungan (RM-SDA)	Litbang PRN		1	1	1	1	49,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Kebijakan Ekosistem Inovasi Industri KFTLMATE untuk mendukung Industri 4.0	Kebijakan teknis terkait Teknologi Industri KFTLMATE	2	1	2	2	2	9,5	Pusat		01
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri KFTLMATE	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	7	20	20	20	20	33,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	11	13	15	16	20	88,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri KFTLMATE 4.0	Pengadaan alat litbang	0	35	25	24	23	58,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							3.366,5			
Peningkatan Kualitas SDM Industri							1.070,3			
Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri	Tenaga kerja industri yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi	20000	20000	20000	20000	20000	49,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri	Renovasi Gedung Pendidikan Non-Formal	0	2	2	2	1	79,0	Pusat		03
Pengadaan Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	0	2	2	2	1	59,3	Pusat		03
Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan)	Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri	32000	39000	42000	44000	46000	840,9	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
SKKNI dan KKNi berbasis okupasi dan KKNi yang disusun	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	20	20	20	20	20	31,7	Pusat		03
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	20	20	20	20	20	9,9	Pusat		03
Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem							1.673,5			
Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten	13000	2600	2800	2900	3000	411,4	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Industri melalui Renovasi gedung pendidikan satuan kerja	Renovasi Gedung Pendidikan Tinggi Industri	0	3	3	3	3	177,8	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan Peralatan Pendidikan Tinggi Industri	Peralatan Pendidikan Tinggi Industri	0	2	2	2	3	138,3	Pusat		03
Mahasiswa dan Lulusan Program D1 Berbasis Kompetensi dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis kompetensi	Tenaga kerja industri lulusan D1 industri yang kompeten	500	800	900	1000	1100	95,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project Learning Factory 4.0	9	12	17	22	27	76,9	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan Industri 4.0	Pilot Project Learning Factory 4.0	0,3	0,5	0,7	0,9	0,95	313,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI	1	4	7	10	13	460,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	03
Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem							622,7			
Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan	Tenaga kerja industri terampil yang kompeten	7000	2100	2200	2400	2600	189,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Menengah Industri	Renovasi Gedung Pendidikan Menengah	0	2	2	2	3	138,3	Pusat		03
Pengadaan Peralatan Pendidikan Menengah Industri	Peralatan Pendidikan Menengah Industri	0	2	2	2	3	138,3	Pusat		03
Pilot Project Learning Factory 4.0	Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi	25	32	38	44	50	156,4	Pusat		03
JUMLAH							7.581,7			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	1.404,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	895,6
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	2.562,3
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	3.897,7
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	17.099,9
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	377,9
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	2.733,6
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	4.889,1
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1.053,8
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	146,4
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	8.049,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengelolaan MIGAS Aceh	114,2
JUMLAH	43.223,9

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM							25,0			
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan							25,0			
Penyiapan Pembangunan PLTN Komersial (Tambah Baru)	Penyiapan PLTN Komersial yang Dibangun	Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan	Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia	Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN	Melakukan analisis multikriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder.	Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional.	25,0	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM							174,5			
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi							90,2			
Pemetaan potensi PLTBayu	Jumlah potensi terukur PLTBayu		200	200	200	200	32,0	Tersebar		05
Pemetaan potensi PLTA/Mini/Mikro	Jumlah potensi terukur PLTA/Mini/Mikro		120	120	120	120	28,8	Tersebar		05
Pemetaan potensi PLTBio	Jumlah potensi terukur PLTBio		60	60	60	60	14,4	Tersebar		05
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider	0	Studi site selection dan akuisisi data di perairan Nusa Lembongan	Pra FS di Nusa Lembongan	FS di Nusa Lembongan	Studi Site Selection dan akuisisi data di perairan Sumatera Barat dan Jawa Barat	8,0	Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat		05
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider	0	Studi site selection dan akuisisi data di perairan Selat Alas	Studi site selection dan akuisisi data di perairan Selat Sape	Pra FS di Selat Alas/Selat Sape/Selat Pantar	FS di Selat Alas/Selat Sape/Selat Pantar	7,0	NTB, NTT		05
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara							34,3			
Pengembangan Teknologi pembuatan logam neodmyium (logam tanah jarang) dari monazite untuk bahan permanen magnet	Pengembangan dan penelitian pembuatan strong magnet dari bahan baku monazite hingga rancangan skala komersial	-	Penelitian Teknologi solvent ekstraksi pembuatan neodmyium oksida	Pengembangan teknologi garam lebur dalam pembuatan logam neodmyium	Penelitian pencampuran logam neodmyium dengan boron dan besi untuk menjadi strong magnet permanen	Rancangan DED pembuatan strong magnet dari monazite skala komersial	11,0	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi pirolisis batubara untuk produksi syncrude oil ,COG dan batubara kualitas tinggi	Pembangunan dan pengembangan pilot plant teknologi pirolisis batubara hingga desain skala komersial	-	Pengadaan, perakitan, dan commisioning pilot plant pirolisis batubara di palimanan dengan kapasitas 25kg/jam	ujicoba formula produksi syncrude oil	ujicoba syncrude skala lab di Pertamina sebagai umpan kilang mini	desain scale up pirolisis batubara skala komersial dan pemanfaatan syncrude pada kilang pertamina (satu rancang bangun, 2 usulan paten)	9,8	Pusat		01
Pengembangan katalis sintetik untuk proses konversi syngas batubara menjadi DME	Pembuatan dan pengembangan katalis sintetik	-	Pembuatan dan uji aktifitas Katalis	Optimalisasi Pembuatan dan uji aktifitas Katalis terpilih	scale up pemanfaatan katalis	-	8,5	Pusat		01
Percepatan hilirisasi mineral skala kecil	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Smelter	32	39	51	42	41	5,0	Pusat		01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi							50,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Teknologi FCC untuk Pembuatan Green Gasoline Berbasis CPO 100%	Penelitian dan Pengembangan Teknologi FCC untuk Green Gasoline berbasis CPO 100% hingga Pembuatan Desain Skala Komersial	0	1 (Penyempurnaan Pilot Plant (alat kontrol dan alat ukur))	1 (Simulasi menggunakan bahan baku Olein (Co-Product CPO))	1 (Simulasi menggunakan bahan baku RBDPO (refine, bleached, deodorized, palm oil) (Main Product CPO))	1 (FS dan DED skala komersial dan simulasi konversi minyak nabati menjadi green gasoline)	50,0	Pusat		01
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM							1.003,8			
Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral							136,0			
Politeknik Bidang Energi dan Mineral	Jumlah Mahasiswa Politeknik Bidang Akamigas	998	1058	1118	1178	1178	136,0	Cepu		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur							306,1			
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Aparatur Sipil Negara sektor ESDM	Jumlah peserta pelatihan Aparatur Sipil Negara sektor ESDM	3827	6580	6796	6985	7302	306,1	Pusat		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi							74,8			
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	3768	4522	5426	6511	7813	38,8	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor KEBTKE	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri KEBTKE	1722	2066	2479	2975	357	26,1	Pusat		03
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor KEBTKE	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor KEBTKE	160	192	230	276	332	9,9	Pusat		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi							208,4			
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	16219	19463	23356	28027	33632	51,3	Pusat		03
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Migas	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Migas	5245	6294	7552	9063	10876	134,5	Pusat		03
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Migas	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Migas	300	360	432	518	622	22,6	Pusat		03
Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah							16,1			
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor BDTBT	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor BDTBT	154	185	222	266	319	16,1	Pusat		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara							156,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	2888	3466	4159	4991	5989	33,6	Pusat		03
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Gominerba	5103	6123	7348	8817	10581	107,1	Pusat		03
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Geominerba	120	144	173	207	249	15,4	Pusat		03
Pendidikan Tinggi Energi dan Pertambangan							106,4			
Politeknik Bidang Energi dan Pertambangan	Jumlah Mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan	262	532	720	840	900	106,4	Bandung, Prabumulih, Bali		03
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi							12.180,7			
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi							333,7			
Penyediaan Alokasi Elpiji 3 kg untuk Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Jumlah Alokasi Elpiji 3 kg untuk Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	7000	7.364 - 7.399	7.754 - 7.836	8.165 - 8.321	8.614 - 8.870	333,7	Pusat		03
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi							32,3			
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik	Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik	64	65	66	67	68	15,5	Pusat		01
Produksi Gas Bumi	Produksi Gas Bumi	1191	1234	1241	1199	1163	16,8	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi							11.814,7			
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN) - penambahan	266070	100000	0	0	0	4.096,0	Provinsi: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Brat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	02, 05
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN) - AP	0	50000	839555	800000	800000	3.938,5	Provinsi: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Brat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	05
	PMC pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga	1	1	1	1	1	815,2	Pusat		05
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Jumlah Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (dokumen)	15	10	10	0	0	24,0	Pusat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (unit)	Progres Pembangunan RDMP	on going	on going	1 (Stage-I Balongan 25 Ribu BCPD)	1 (Stage-II Balikpapan 100 Ribu BCPD)	on going	15,0	Balikipapan, Cilacap , Balongan, Dumai		05
	Progres Pembangunan Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR)	Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat General Engineering Design, Site Development	Financing dan EPC	Financing dan EPC	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	15,0	Tuban		05
	Progres Pembangunan Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR)	Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development	AMDAL, BED-FEED	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	15,0	Bontang		05
Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg	Jumlah paket konversi mitan ke LPG	522616	0	0	0	0	266,5	Tersebar		02, 05
Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Jumlah paket konverter kit	40000	40000	40000	40000	40000	2.136,8	Tersebar		02
Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Jumlah paket konverter kit	10000	10000	10000	10000	10000	492,7	Tersebar		02
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan							160,4			
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik							33,2			
Peningkatan Kebijakan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah rekomendasi peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	4	4	4	4	4	9,8	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1	1	1	1	1	10,5	Pusat		05
Penyediaan listrik yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan	Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik	60079,83	64257,8	68894,4	73608,75	78190,61	12,9	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan							89,7			
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik	1	1	1	1	1	24,7	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat	Jumlah rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat	1	1	1	1	1	29,8	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi	1	1	1	1	1	10,9	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk	1	1	1	1	1	24,3	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik							37,5			
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1	1	1	1	1	9,0	Pusat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	3	3	3	3	3	6,7	Pusat		05
Penyusunan Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik	Jumlah Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik	2	2	2	2	2	17,3	Pusat		05
Penertiban pemakaian listrik ilegal	Jumlah penertiban pemakaian listrik ilegal	3	4	5	6	7	4,5	Pusat		05
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara							198,0			
Pembinaan Ketechnikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara							50,0			
Lahan reklamasi pertambangan	Luas lahan reklamasi pertambangan	7000	7025	7050	7075	7100	50,0	17 provinsi		06
Pembinaan dan Pengusahaan Batubara							5,0			
DMO Batubara	DMO Batubara	155	168	177	184	187	5,0	34 Provinsi		01
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral							143,0			
Layanan Data dan Informasi Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral	Jumlah data dan informasi kegiatan pengusahaan dan pertambangan mineral	16	16	16	16	16	119,5	34 Provinsi		02
Percepatan pembangunan smelter	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Smelter (kumulatif)	4	30	31	31	31	23,5	Tersebar	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi							3.350,5			
Penelitian, Penyelidikan, Perencanaan dan Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan							1.953,3			
Sumur air tanah untuk air baku	Jumlah titik pembangunan sumur air tanah untuk air baku (Titik)	1000	500	500	500	500	1.854,0	Tersebar		05
Pembangunan sistem pengelolaan hidrogeologi terpadu	Jumlah Cekungan Air Tanah dengan pengelolaan sistem hidrogeologi yang terpadu (Cekungan)	1	1	1	1	1	95,0	Pusat		05
Peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	Jumlah peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	2	2	2	2	2	2,1	Pusat		05
Peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	Jumlah peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	2	2	2	2	2	2,1	Pusat		05
Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi							156,9			
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi (Rekomendasi)	8	10	10	10	10	55,6	Pusat		06
Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi (Wilayah)	3	3	3	3	3	1,8	Pusat		06
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Mineral	Jumlah rekomendasi wilayah keprospekan mineral	14	16	16	16	16	40,8	Pusat		06
Rekomendasi Sumber Daya Potensi Batubara	Jumlah rekomendasi Sumber Daya batubara	9	10	10	10	10	54,6	Pusat		06
Dokumen Studi Kelayakan Mineral untuk mendukung Kawasan Industri	Jumlah dokumen studi kelayakan mineral untuk mendukung kawasan industri	4	4	4	4	4	4,0	Pusat		06
Survei dan Pelayanan Geologi							88,4			
Layanan Pusat Informasi Terpadu Kegeologian	Jumlah pusat informasi geopark/geologi	2	3	4	3	3	50,9	Tersebar		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Survei pengembangan geoheritage	Jumlah rekomendasi penetapan geoheritage	-	4	4	4	4	10,2	Tersebar		06
Kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi	Jumlah kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi	4	4	4	4	4	5,8	Tersebar		06
Rekomendasi wilayah kerja geologi migas	Jumlah rekomendasi wilayah kerja geologi migas	4	4	4	4	4	21,5	Pusat		06
Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi							1.147,2			
Peta Geologi Bersistem dan bertema	Jumlah Peta Geologi Bersistem dan Bertema	12	12	12	12	12	13,0	Pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi	Jumlah kabupaten/wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi	11	29	29	29	29	15,3	Pusat dan daerah	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi	jumlah pos pengamatan gunungapi yang dikembangkan	10	13	13	13	14	141,8	Pusat dan Daerah	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Penguatan data pemetaan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah peta geologi gunung api dan peta kawasan rawan bencana geologi	8	20	20	20	20	0,0	Pusat		06
Penegakkan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi geologi terpadu untuk daerah perkotaan	4	4	4	4	4	45,0	Pusat		06
Penguatan sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	Jumlah Lokasi sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	8	17	17	17	17	303,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	16	19	19	19	19	312,0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	05
Pemasangan sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor	Jumlah sistem peringatan dini bencana longsor yang dibangun	25	25	25	25	25	125,0	Tersebar	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	05
Penyusunan peta risiko dan rencana induk penurunan tanah	Jumlah peta risiko penurunan tanah di kawasan prioritas	2	2	2	2	2	2,1	Pusat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas	19	19	19	19	19	190,0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	05
Penyelidikan dan Konservasi Air Tanah							4,8			
Pemantauan penurunan tanah	Jumlah titik pemantauan penurunan tanah (Titik)	200	200	200	200	200	4,8	Pusat		05
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa							41,2			
Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm							30,5			
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	Jumlah Layanan Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	1	1	1	1	1	30,5	Pusat		05
Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa							10,7			
Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi(km)	15300	15800	16300	16800	17300	10,7	Trans Kalimantan	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)	05
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi							3.452,1			
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi							6,5			
Layanan Dukungan Pengembangan Industri EBT	TKDN Pembangkit PLT Bioenergi	40	40	40	40	40	6,5	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan							29,5			
Peningkatan kebijakan harga	Jumlah Kebijakan harga energi dan tarif (rekomendasi)	1	1	1	1	1	10,0	Pusat		06
Layanan Dukungan Pengembangan Industri EBT	TKDN Pembangkit PLT Bayu	40	40	40	40	40	6,5	Pusat		01
	TKDN Pembangkit PLT Surya	40	40	40	40	40	6,5	Pusat		01
	TKDN Pembangkit PLT Air	70	70	70	70	70	6,5	Pusat		01
Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi							2,1			
Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum	Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya	3	2	1	-	-	2,1	Pusat		06
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi							13,4			
Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan (Wilayah)	5	5	5	4	3	4,3	Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan, Kab. Tegal, Kab. Manggarai Barat, Kab. Buru		05
Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan (wilayah)	2	2	2	2	2	2,6	Kab. Bangli, Kab. Maluku Tengah		05
Layanan Dukungan Pengembangan Industri EBT	TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi	30	30	33	33	35	6,5	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi							3.400,6			
Layanan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	Jumlah layanan pembangunan infrastruktur EBT	13	13	13	13	13	297,5	Pusat		05
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop	34,63	35,88	38,53	47,37	51,78	1.203,1	Kota Medan, Kota Palembang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Manado, Kota Makassar		05
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kawasan 4T	Jumlah PLTS Terpusat	0	0	5	5	5	1.050,0	Tersebar		05
Infrastruktur EBT	Jumlah Infrastruktur EBT yang terbangun	97	50	50	50	50	850,0	Pusat		05
JUMLAH							20.586,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	2.836,0
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	500,0
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	619,3
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	19.958,1
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	30.705,7
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	77.802,8
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	47.472,9
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	45.264,6
Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	2.213,0
JUMLAH	227.372,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan							12.980,7			
Pendidikan Perhubungan Darat							2.971,8			
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat (orang)	5428	5289	5369	5463	5660	1.170,8	Sumsel, Jateng, Jatim, Jabar, Bali, Kalbar		03
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat (orang)	4652	7746	9393	9673	9574	655,1	Sumsel, Jateng, Jatim, Jabar, Bali, Kalbar		03
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat (orang)	19510	27731	27831	28361	29071	746,4	Sumsel, Jateng, Jatim, Jabar, Bali, Kalbar		05
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (paket)	6	6	6	6	6	399,5	Sumsel, Jateng, Jatim, Jabar, Bali, Kalbar		03
Pendidikan Perhubungan Laut							6.701,0			
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut (orang)	16038	16983	17416	17981	18822	2.710,7	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		03
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut (orang)	168637	171523	173228	173570	179545	2.248,1	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		03
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut	Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut (orang)	82392	71573	73912	73572	73942	1.311,2	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (paket)	-	12	12	12	12	431,0	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		03
Pendidikan Perhubungan Udara							3.307,8			
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara (orang)	4873	5434	5674	5626	5883	1.164,8	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		03
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara (orang)	7145	7169	7906	8017	8303	1.672,5	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		03
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara	Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara (orang)	12495	8222	8287	8317	8452	255,1	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		05
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (paket)	8	8	8	8	8	215,5	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		03
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat							19.098,2			
Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan							7.525,0			
Penyediaan fasilitas keselamatan jalan (marka jalan, rambu jalan, pagar pengaman, dan penerangan jalan umum, ATCS)	Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	33	33	33	33	33	7.500,0	Pusat		05
Pembentukan Road Safety Center/Sekretariat Keselamatan Jalan	Jumlah kelembagaan Keselamatan Jalan yang dibentuk oleh Pemda (pemda)	20	20	20	20	20	25,0	Pusat		05
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan							3.400,0			
Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan	Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani (lintas)	307	375	450	500	550	965,0	Tersebar		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	350,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	100,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	125,0	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	60,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	150,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	150,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)	6	8	10	12	14	1.500,0	Tersebar		05
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan							1.246,9			
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraan bermotor (UPPKB) (Dukungan APBN)	Balai uji kelaikan kendaraan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)		295,0	Jawa Barat		05
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	-	-	1	-	-	76,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Terminal Nanga Badau	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	60,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Kalimantan Barat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Terminal Jagoibabang	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Terminal Motaain	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	17,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Terminal Motamasin	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	50,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Terminal Wini	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,2	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Terminal Skouw	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	23,8	Papua		05
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)	5	5	5	5	6	500,0	Tersebar	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Palembang berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)	-	1	-	-	-	50,0	Sumatera Selatan		05
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)	-	1	-	-	-	50,0	Bali		05
Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan							6.926,3			
Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)	234	300	315	325	335	2.650,0	Tersebar		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampelan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sikabaluan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sumatera Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dolong	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Makalehi	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Merauke	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pangkalaseang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Burung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dakal	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Papua		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Talise	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasokan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Waren	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Papua		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sumatera Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Bangka Belitung		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wairiang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawio	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Seliu	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Bangka Belitung		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan KSPN Danau Toba	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	7(berlanjut)	7(selesai)	-	-	-	295,3	Sumatera Utara		05
Pembangunan Ppelabuhan Penyeberangan Tj. Kelayang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bangka Belitung		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Tenggara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Dermaga di Danau Batur	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	45,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sungai Sawaerma	Pelabuhan penyeberangan sungai dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	36,0	Papua		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sulawesi Tenggara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bombana-Tg Phising	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sulawesi Tenggara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tg Uban-Matak-Penagi	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Riau		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sri Menanti-Krg Baru	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sumatera Selatan		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk. Dalam-Tk Bungus	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sei Asam-Sunyat	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patani-Gebe	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk.Dalam-Gn.Sitoli-P.Pulau Batu	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-Moa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Maluku		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bastiong-Moti	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi-Kangean	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Jawa Timur		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep. Mentawai	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Sumatera Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-Lamerang	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Maluku		05
Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KBI	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Tersebar		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patumbukan-P.Tanah Jampea	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Sulawesi Selatan		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Teor-Kesui	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-Sintete	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Garongkong-Kariangau	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Sulawesi Selatan - Kalimantan Timur		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaimana-Pomako	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Babang-P.Mandioli	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Pamana-Kewapante	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Manokwari-Serui	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Wahai-Foley-Arar	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KTI	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Tersebar		05
Pelayanan Long Distance Ferry Jangkar - Lembar - NTT	Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)	1	1	1	1	1	80,0	Jawa Timur		05
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian							68.537,6			
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api							1.904,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Subsidi Perintis KA	Tersedianya Layanan Subsidi Perkeretaapian (lintas)	7	9	9	10	10	1.904,9	Pusat		05
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api							66.632,7			
Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Lokasi yang ditangani dan disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	1	10	10	10	10	1.095,0	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhokseumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	13 (berlanjut)	13 (Selesai)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (Selesai)	458,5	Aceh		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhokseumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	35 (Selesai)	30 (berlanjut)	30 (berlanjut)	30 (berlanjut)	30 (Selesai)	1.050,0	Aceh		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	33 (Selesai)	25 (berlanjut)	25 (berlanjut)	25 (Selesai)	30 (berlanjut)	1.215,0	Sumatera Utara- Riau		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung - Jambi)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (Selesai)	20 (berlanjut)	550,0	Sumatera Selatan - Jambi		05
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	16.280,0	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	05
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	38 (berlanjut)	17 Selesai	90 (berlanjut)	90 (berlanjut)	90 (berlanjut)	3.007,3	Jawa Barat		05
Reaktivasi Jalur KA Pariaman-Naras - Sungai Limau	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (lselesai)	550,0	Sumatera Barat		05
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung - Pandeglang- Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	17 (berlanjut)	17 (berlanjut)	17 Selesai	20 (berlanjut)	900,0	Banten		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) APBN	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	24 (berlanjut)	24 (berlanjut)	1.010,0	Jawa Barat		05
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	64 (selesai)	64 (selesai)	12 (berlanjut)	12 (berlanjut)	12 (selesai)	3.790,4	Sulawesi Selatan	Kereta Api Makassar-Pare Pare	05
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	23 (selesai)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	25 (berlanjut)	25 (selesai)	1.210,0	Jawa Timur		05
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	325,0	Bali		05
Pembangunan KA Trans Kalimantan (Balik papan - Samarinda)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	450,0	Kalimantan Timur		05
Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	15(berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	305,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan Jalur Ganda KA Banjar Kroya	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	20(berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	500,0	Jawa Tengah		05
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	800,0	Banten		05
Peningkatan Jalur KA di Banten (Rangkasbitung-Merak)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	15	15	15	15	9	676,4	Banten		05
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Utara (Araskabu - Tebing Tinggi - Rantau Prapat dan Tebing Tinggi - Siantar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	128	40	40	20	4	1.456,2	Sumatera Utara		05
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang-Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	14	5	20	20	10	1.017,1	Sumatera Barat		05
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk Linggau)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	8	20	20	20	6	438,8	Sumatera Selatan		05
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	100	56	-	-	-	209,6	Jawa Barat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	91	20	20	30	53	699,0	Jawa Tengah		05
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	65	60	70	70	60	908,2	Jawa Timur		05
Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Terseleenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)	1	1	1	1	1	7.500,0	Pusat		05
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)	2	-	-	-	-	7,5	Jawa Tengah		05
Pembangunan KA akses Pelabuhan Teluk Lamong	KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4(selesai)		200,0	Jawa Timur		05
Pembangunan KA akses Pelabuhan Garongkong	KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)	-	-	5(berlanjut)	5(selesai)	-	500,0	Sulawesi Selatan		05
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	KA akses Bandara yang dibangun (km)	13(berlanjut)	13(berlanjut)	13(selesai)	-	-	240,0	Jawa Tengah		05
Pembangunan KA akses Bandara Raden Intan	KA akses Bandara yang dibangun (km)	1,3	-	-	-	-	74,7	Lampung		05
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	KA akses Bandara yang dibangun (km)	6(berlanjut)	6(selesai)	-	-	-	800,0	yogyakarta		05
Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	KA akses Bandara yang dibangun (km)	-	-	-	10(berlanjut)	10(selesai)	300,0	Jawa Timur		05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.670,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perkeretaapian Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	17(berlanjut)	17(selesai)	33(berlanjut)	33(berlanjut)	33(selesai)	2.040,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
KA Outer Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	-	-	10(berlanjut)	10(berlanjut)	10(selesai)	500,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.710,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila	Panjang jalur KA yang dibangun (km)	-	-	20(berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	1.000,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	3.000,0	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang)	Panjang jalur KA yang dibangun/ditingkatkan (km)	20(berlanjut)	20(berlanjut)	20 (selesai)	-	-	244,3	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	3.390,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	Panjang jalur yang dibangun (km)	-	27(berlanjut)	27(berlanjut)	27(berlanjut)	27(selesai)	1.000,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.000,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (km)	60	-	-	-	-	600,0	Jawa Tengah, Yogyakarta		05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis rel di Ibu Kota Negara	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	454,7	Kalimantan Timur		05
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut							25.320,9			
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian							2.570,8			
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (unit)	67	70	73	75	77	1.118,2	Pusat		05
Penyediaan kapal navigasi	Jumlah kapal navigasi yang dibangun (unit)	10	14	18	22	25	1.000,0	Pusat		05
Penyediaan Vessel Traffic Services Terintegrasi	Jumlah Vessel Traffic Services Terintegrasi yang disediakan (unit)	15	20	25	30	35	452,6	Pusat		05
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut							10.267,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Subsidi Tol Laut	Jumlah rute angkutan tol laut tetap dan teratur (trayek)	21	22	23	24	25	2.398,0	tersebar		05
Subsidi Angkutan Laut Perintis	Jumlah rute angkutan laut perintis (trayek)	113	113	113	113	113	6.498,9	tersebar		05
Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu	terlaksananya pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (lokasi)	20	22	24	19	20	1.332,0	tersebar		05
Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Jumlah moda kapal ternak yang disediakan di Kabupaten Belu (rute)	1	1	1	1	1	38,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan							12.482,7			
Pembangunan Pelabuhan Patimban (PHLN)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	4.832,2	Jawa Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Kendal	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	90,0	Jawa Tengah		05
Pengembangan Pelabuhan Nabire	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	-	-	-	-	39,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Merauke	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	45,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajau	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	42,0	Sumatera Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Mansalean	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	27,7	Sulawesi Tengah		05
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	36,3	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Gane Dalam	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	26,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Pulau Bunyu	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Mesuji	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Lampung		05
Pengembangan Pelabuhan Sarmi	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	49,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Tahuna	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	22,5	Sulawesi Utara		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Seba	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	110,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Wanci	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Pelabuhan Ba'a	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	33,8	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Soasio	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	37,5	Maluku Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Saumlaki	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	67,5	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Sebuku	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	50,0	Kalimantan Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Tual	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Namlea	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Kundur	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Larantuka	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Moor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	22,5	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Jampea	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,0	Sulawesi Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Geser	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Gorom	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	22,5	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Rajjua	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	22,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Wini	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Moa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Jambi		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Pelaihari	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1	-	11,3	Kalimantan Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Maloy	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	40,5	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Depapre	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(selesai)				50,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Kariangau (Balikpapan)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Palaran (Samarinda)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Dompok	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Moco	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	75,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Kilo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Nusa Tenggara Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Belang-Belang	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Sulawesi Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Tobelo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Kaimana	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	90,0	Papua Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Pomako	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Dobo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Banggai	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Sulawesi Tengah		05
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	812,0	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah		05
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	130,5	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	101,5	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	70,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Tegal, Kota Tegal	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	140,0	Jawa Tengah		05
Pengembangan Pelabuhan Meranti	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	3,1	Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Kedindi Reo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	15,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Waikelo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	1,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Likupang	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	7,5	Sulawesi Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Miangas	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	24,5	Sulawesi Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Kaledupa	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Pelabuhan Bajoe	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,0	Sulawesi Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Molu	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	16,9	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Wasior	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,5	papua Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Labuan Bajo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	90,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	150,0	Nusa Tenggara Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Bangka Belitung		05
Pengadaan peralatan bongkar muat	lokasi pengerukan alur pelayaran (lokasi)	8	8	8	8	8	2.000,0	Pusat		05
Penyelenggaraan pengerukan alur pelayaran	terlaksananya pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (lokasi)	20	22	24	19	20	1.332,0	tersebar		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara							25.777,5			
Pelayanan Angkutan Udara							1.940,1			
Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM (rute)	35	35	35	35	35	1.940,1	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara							22.392,1			
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Elelim	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	397,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Wamena	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	1.367,2	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Tanah Merah	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.179,6	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Magellum	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	31,1	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Korowai Batu	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	641,4	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Nop Goliath	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	525,8	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Korupun	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mozes Kolangin	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	748,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Oksibil	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	290,3	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Ilaga	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	470,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mulia	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	120,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Bandara Buntu Kunik	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1	0	0	0	0	131,1	Sulawesi Selatan		05
Pembangunan Bandara Nabire Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	941,2	Papua		05
Pembangunan Bandara Siboru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	1.138,5	Papua Barat		05
Pembangunan Bandara Bukit Malintang	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	463,1	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Bandara Banggai Laut	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (lanjutan)	510,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Bandara Sobaham	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	380,0	Papua		05
Pembangunan Bandara Ngloram-Cepu	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	352,6	Jawa Tengah		05
Pembangunan Bandara Pahuwato	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	265,0	Gorontalo		05
Pembangunan Bandara Weda	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	220,0	Maluku Utara		05
Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Bali		05
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Bandara Murung Raya-Kalteng	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	297,4	Kalimantan Tengah		05
Pembangunan Bandara Wasior Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	600,0	Papua Barat		05
Pembangunan Bandara Manokwari Selatan	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	600,0	Papua		05
Pembangunan Bandara Gorom	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	550,0	Maluku		05
Pembangunan Bandara Labuan Batu	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	700,0	Sumatera Utara		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Bandara Sukabumi	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	400,0	Jawa Barat		05
Pembangunan Bandara Kolaka Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	650,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	180,0	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Kalimarau	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	28,4	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	47,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	288,2	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Bandara Labuhan Bajo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.200,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	124,2	Sumatera Utara		05
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	115,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	45,0	Kalimantan Selatan		05
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	245,0	Sulawesi Tengah		05
Pengembangan Bandara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	38,1	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Bintuni	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	45,0	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	0,8	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	60,0	Aceh		05
Pengembangan Bandara Lasikin	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	85,0	Aceh		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Binaka	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	90,0	Sumatera Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Lasondre	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	55,0	Sumatera Utara		05
Pengembangan Bandara Rokot	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	465,0	Sumatera Barat		05
Pengembangan Bandara Enggano	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	75,0	Bengkulu		05
Pengembangan Bandara Tambelan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	62,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	85,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Letung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	50,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	49,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Pangsuma	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	61,5	Kalimantan Barat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Data Dawai	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	54,1	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Bandara Long Apung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	48,4	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Bandara Yuwai Semaring	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	45,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Bandara Maratua	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	75,0	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Bandara Harun Thohir	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	65,0	Jawa Timur		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Naha	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	60,0	Sulawesi Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Melongguane	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	40,0	Sulawesi Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Miangas	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	45,0	Sulawesi Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Gebe	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	35,0	Maluku Utara		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Rampi	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	80,0	Sulawesi Selatan		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Seko	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	50,0	Sulawesi Selatan		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Tardamu	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	65,0	Nusa Tenggara Timur		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara D.C. Saundale	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	64,0	Nusa Tenggara Timur		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Inanwatan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	72,0	Papua Barat		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Enarotali	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0		86,0	Papua		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Mindiptana	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	35,0	Papua		05
Pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	68,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Muko Muko	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,8	Bengkulu		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Tumpa Padang	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	77,6	Sulawesi Barat		05
Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	13,2	Jawa Tengah		05
Pengembangan Bandara Pangsuma-Putussibau	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	1,5	Kalimantan Barat		05
Pengembangan Bandara Namrole	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Dobo	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	25,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	6,2	Maluku		05
Pengembangan Bandara Dumatubun-Langgur (Karel Sadsuitubun - Langgur)	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara M. Salahuddin-Bima	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	124,6	Nusa Tenggara Barat		05
Pengembangan Bandara Mali-Alor	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	41,2	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Soa-Bajawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	43,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	6,4	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Bandanaira	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	99,0	Maluku		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Oesman Sadik-Labuha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	27,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Buli-Maba	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Sanana	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Rendani	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Kuffar	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Kepi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	0	0	0	20,0	Papua		05
Pengembangan Bandara Mopah	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	48,1	Papua		05
Pengembangan Bandara Moa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	64,9	Maluku		05
Pengembangan Bandar Udara Tiom	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Papua		05
Pembangunan Bandara Anggi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Papua Barat		05
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Aceh		05
Pengembangan Bandara Tanjung Bara	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Kalimantan Timur		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Bawah	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	30,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Bandara Perairan Gili Iyang	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	25,0	Jawa Timur		05
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Senua	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	35,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Widi	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	0	0	0	1	20,0	Maluku Utara		05
Pengawasan dan Pembinaan Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara							1.110,0			
Pengadaan Pesawat Udara Kalibrasi	Jumlah Pesawat Udara Kalibrasi yang dibangun (unit)	4	4	4	4	4	1.110,0	Pusat		05
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan							335,3			
Pengadaan dan modernisasi sarana navigasi CNS/ATM	Jumlah sarana navigasi CNS/ATM disediakan dan dimodernisasi (Communication, Navigation, Surveillance/air traffic management system) (unit)	-	1	1	1	1	335,3	Pusat		05
Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek							1.497,1			
Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek							609,9			
Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) serta Sistem Informasi Terpadu di Jabodetabek	Jumlah Kawasan yang Dibangun Sistem ATCS dan Sistem Informasi Terpadunya (kawasan)	1	1	1	1	1	255,4	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Pengembangan Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Perkotaan	Jumlah Kawasan yang Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasinya dikembangkan (kawasan)	1	1	1	1	1	234,5	Jawa Barat, DKI, Banten		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) di Jabodetabek	Jumlah Kawasan yang menerapkan Sistem ERP dan atau Pembatasan Sepeda Motor (kawasan)	-	1	1	1	1	120,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek							210,0			
Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Jabodetabek yang ramah lingkungan	Jumlah Rute Angkutan Pemandu Moda yang ramah lingkungan yang Dibangun dan Dikembangkan (rute)	-	7	7	7	7	210,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek							677,2			
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	-	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4 (selesai)	400,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pembangunan Terminal Type A Jatijajar	Jumlah Terminal Type A yang di bangun (terminal)	1	-	-	-	-	14,1	Jawa Barat		05
Pengembangan Terminal Type A Pondok Cabe	Jumlah Terminal Type A yang di kembangkan (terminal)	1	-	-	-	-	48,1	Banten		05
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan di Jabodetabek	Jumlah Sentra Logistik (Terminal Barang) Terintegrasi Angkutan Logistik Berbasis Jalan Rel dan Kanal yang dikembangkan di kawasan peri-peri Jabodetabek (terminal)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	75,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Pengembangan Inland Waterways sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah Kanal yang Dikembangkan Sebagai Alur Angkutan (paket)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	70,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	-	-	1	-	1	70,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
JUMLAH							153.212,1			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12.159,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	458,9
Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.932,4
Program Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah	81.199,1
Program Pendidikan Tinggi	116.913,9
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.752,2
Program Pelestarian Budaya	5.483,0
Program Guru dan Tenaga Kependidikan	53.379,5
Program Pendidikan Vokasi	61.736,7
JUMLAH	339.015,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							961,7			
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri							407,6			
Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan	0	34	34	34	34	71,8	Pusat		03
Layanan Perencanaan	Jumlah Layanan Perencanaan	1	1	1	1	1	124,5	Pusat		03
Beasiswa Dharmasiswa	Jumlah orang penerima beasiswa	650	650	650	650	650	211,2	Pusat		07
Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan							119,5			
Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah SKPD yang Menyediakan Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	548	548	548	548	548	119,5	Pusat dan Daerah		03
Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan							434,6			
Satuan Pendidikan Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	9460	10000	10500	11000	11500	117,4	Pusat dan Daerah		03
Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	Jumlah Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	6150	6150	6150	6150	6150	180,0	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Model Media Pendidikan Berbasis TIK	Jumlah Model Media Pendidikan Berbasis TIK	11	11	11	11	11	21,0	Pusat		03
Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	Jumlah Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	300	500	600	700	800	116,2	Pusat dan Daerah 3T		03
Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							4.322,3			
Penyempurnaan Kurikulum dan Sistem Pembelajaran							52,0			
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	Jumlah Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	106	106	106	106	106	52,0	Pusat		02, 03
Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan							319,8			
Soal yang dikembangkan	Jumlah Soal yang dikembangkan	66280	66280	66280	66280	66280	100,6	Pusat		03
Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	90000	105000	120000	135000	150000	86,8	Pusat dan Daerah		03
Model Penilaian Pendidikan	Jumlah Model Penilaian Pendidikan	9	9	9	9	9	49,3	Pusat		03
Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	Jumlah Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	7	7	7	7	7	83,1	Pusat		03
Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi							3.791,9			
Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang Diakreditasi	50000	50000	50000	50000	50000	1.525,1	Pusat		03
Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang Diakreditasi	35000	35000	35000	35000	35000	1.185,1	Pusat		03
Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Jumlah Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	8	8	8	8	8	78,6	Pusat		03
Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	Jumlah Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	8424500	8424500	8424500	8424500	8424500	1.003,2	Pusat dan Daerah		03
Pengembangan dan Pengendalian Sistem Perbukuan							158,7			
Penilaian dan Pengawasan Perbukuan	Jumlah Penilaian dan Pengawasan Perbukuan	4010	4050	4100	4200	4300	102,3	Pusat		04
Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan	112	150	160	170	180	56,3	Pusat		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah							61.104,5			
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama							16.879,9			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	4369968	4369968	4369968	4369968	4369968	15.065,5	Seluruh Indonesia		02, 03
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	20	20	20	20	20	316,2	Pusat dan Daerah		02, 03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	20	20	20	20	20	59,4	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	1120	1120	1120	1120	1120	380,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMP Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	39423	39423	39423	39423	39423	77,3	Pusat dan Daerah		04
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	2303	2303	2303	2303	2303	38,2	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	3294	4056	4056	4056	4056	384,1	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	200	200	200	200	200	85,9	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	400	400	400	400	400	20,7	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Berbasis Komunitas	Jumlah Sekolah Berbasis Komunitas	0	425	425	425	425	112,0	Pusat dan Daerah		03
SD-SMP Satu Atap yang dibangun	Jumlah SD-SMP Satu Atap yang dibangun	0	15	15	15	15	75,8	Pusat dan Daerah		03
SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	Jumlah SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	0	500	500	500	500	84,8	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	245	245	245	245	245	179,4	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Sekolah Dasar							24.648,8			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10360614	10360614	10360614	10360614	10360614	23.320,8	Seluruh Indonesia		02, 03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	131,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	58	58	58	58	58	459,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	514	514	514	514	514	59,4	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	540	540	540	540	540	174,4	Pusat dan Daerah		04
Sekolah yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	1800	1800	1800	1800	1800	27,9	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	4842	4842	4842	4842	4842	238,6	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	514	514	514	514	514	83,6	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	148805	148805	148805	148805	148805	154,1	Pusat dan Daerah		03
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah							262,3			
Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	386	386	386	386	386	143,1	Pusat dan Daerah		04
Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	34	34	34	34	34	119,2	34 Provinsi		03
Penyediaan Layanan PAUD							1.477,1			
Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	Jumlah Anak Usia Dini yang Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	0	6500	6500	6500	6500	52,5	Pusat dan Daerah		03
Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	Jumlah Lembaga PAUD yang Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	8000	10000	10000	10000	10000	245,1	Pusat dan Daerah		03
Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga/Mitra PAUD yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas	1040	1040	1040	1040	1040	120,2	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	35	35	35	35	35	44,3	Pusat		03
Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/Direvitalisasi	250	300	350	400	450	273,5	Pusat dan Daerah		03
Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/Direvitalisasi	0	25	25	25	25	135,9	Pusat dan Daerah		03
Kabupaten/Kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	0	514	514	514	514	521,9	Pusat dan Daerah		03
Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif	Jumlah Lembaga PAUD yang Menyelenggarakan Holistik Integratif	0	1200	1200	1200	1200	83,7	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan							1.389,8			
Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Orang Dewasa yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	0	100000	100000	100000	100000	866,1	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	350	350	350	350	350	97,1	Pusat dan Daerah		03
Lembaga Masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Berkelanjutan dan Penguatan Budaya Baca	Jumlah Lembaga Masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Berkelanjutan dan Penguatan Budaya Baca	471	471	471	471	471	150,1	Pusat dan Daerah		04
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	192	192	192	192	192	43,4	Pusat		03
Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	Jumlah Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	0	4212	4212	4212	4212	82,8	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	0	500	500	500	500	150,2	Pusat dan Daerah		03
Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas							761,0			
Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	Jumlah Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	171	171	171	171	171	195,7	Pusat		03
Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional	Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional	17083	17083	17083	17083	17083	419,2	Pusat dan Daerah		03
SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Jumlah SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	10795	10795	10795	10795	10795	146,0	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus							2.835,5			
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	6	6	6	6	6	148,4	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	5	5	5	5	5	49,8	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5168	5168	5168	5168	5168	280,9	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	2259	2259	2259	2259	2259	174,6	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	40	40	40	40	40	48,9	34 Provinsi		06
Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	Jumlah Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	135581	135581	135581	135581	135581	1.373,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	2895	2895	2895	2895	2895	440,2	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	0	549	549	549	549	52,2	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	Jumlah Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	0	30	30	30	30	80,5	Daerah Afirmasi		03
Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	500	500	500	500	500	36,8	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	0	200	200	200	200	28,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Siswa Pendidikan dan Layanan Khusus Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	816	850	850	850	850	54,8	Pusat dan Daerah		04
Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	Jumlah Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	0	280	280	280	280	66,0	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Sekolah Menengah Atas							8.601,5			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1368243	1368243	1368243	1368243	1368243	6.558,7	Seluruh Indonesia		02, 03
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	209,2	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	132	132	132	132	132	373,9	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	650	650	650	650	650	409,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMA yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	5612	5612	5612	5612	5612	136,3	Pusat dan Daerah		04
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	3078	3078	3078	3078	3078	60,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5683	5683	5683	5683	5683	443,1	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	9871	9871	9871	9871	9871	198,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	15383	15383	15383	15383	15383	184,7	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	7	7	7	7	7	27,6	Pusat dan Daerah		03
Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan							3.872,4			
Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	216924	216924	216924	216924	216924	106,7	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	214312	214312	214312	214312	214312	959,2	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	15943	15943	15943	15943	15943	2.155,0	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	216974	216974	216974	216974	216974	651,5	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga							376,2			
Keluarga Mengikuti Peningkatan Pengetahuan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	35000	51000	65000	75000	51000	280,5	34 Provinsi		03
Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	Anak Remaja Mengikuti Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	20000	20000	20000	20000	20000	95,7	Pusat dan Daerah		04
Program Pendidikan Tinggi							59.944,3			
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi							11.122,7			
Buku Pustaka (BOPTN)	Jumlah Buku yang diserahkan kepada PTN sebagai bantuan dari BOPTN	5137	5137	5137	5137	5137	239,4	34 Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	Jumlah Laporan Kegiatan Mahasiswa PTN dengan bantuan dari BOPTN yang Dilaporkan	745	745	745	745	745	889,9	34 Provinsi		03
Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Jumlah Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM yang Dikembangkan dengan bantuan dari BOPTN	192	192	192	192	192	372,1	34 Provinsi		03
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	Jumlah PTN yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran melalui BOPTN	2382	2382	2382	2382	2382	854,8	34 Provinsi		03
Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	Jumlah Bulan Rumah Sakit Pendidikan yang mendapat layanan bantuan operasional dari BOPTN	12	12	12	12	12	400,0	34 Provinsi		03
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH)	Jumlah PTN BH yang Mendapat Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH)	11	11	11	11	11	8.366,5	Pusat		03
Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan							31.254,3			
Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	2864	3000	3000	3000	3000	25,9	Pusat		04
Penguatan penyelenggaraan KKN Revolusi Mental	Mahasiswa Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	300	300	300	300	300	4,0	Pusat		04
Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	150000	200000	250000	300000	350000	150,0	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	365380	289854	208624	113572	0	9.239,3	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	5148	7798	8198	8898	9148	658,4	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	297	400	500	600	700	7,6	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	400000	400000	400000	400000	400000	21.080,0	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	375	410	450	500	550	9,2	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Program Studi Dibina Menjadi Prodi Unggul	Jumlah Program Studi Dibina yang Menjadi Prodi Unggul	2000	2000	2000	2000	2000	51,6	Pusat		03
Perguruan Tinggi Menerapkan SNDIKTI	Jumlah Perguruan Tinggi yang Menerapkan SNDIKTI	900	1000	1000	1000	1000	28,3	Pusat		03
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan							2.195,3			
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Jumlah Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	560	560	560	560	560	135,0	Pusat		07
Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)	Jumlah Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)	2500	5000	5000	5000	5000	820,4	Pusat		03
Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	Jumlah Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	360	400	400	400	400	780,4	Pusat		03
Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	Jumlah Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	5	11	14	14	14	303,7	Pusat		03
LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)	Jumlah LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)	41	41	41	41	41	89,6	Pusat		03
Program Studi Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	Jumlah Program Studi yang Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	600	700	800	900	1000	58,2	Pusat		03
Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	Jumlah Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	200	250	300	350	400	8,0	Pusat		03
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya							15.372,1			
SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	915	1000	1100	1200	1300	155,8	Pusat		03
SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar	Jumlah SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar	380	500	600	700	800	22,9	Pusat		03
SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen	8000	9000	10000	11000	12000	62,5	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit	Jumlah SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit	3000	3000	3000	3000	3000	49,4	Pusat		03
Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	Jumlah Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	80	50	50	50	50	5.086,9	Pusat		03
Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	Jumlah Item Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	12	8	2	2	2	1.830,7	Pusat		03
SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Jumlah SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	6034	16514	20739	26242	30715	8.163,9	Pusat		03
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa							339,3			
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra							22,1			
Bahasa Terlindungi	Jumlah Bahasa Terlindungi	30	30	30	30	30	22,1	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Bahasa dan Sastra							73,9			
Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Memperoleh Pembinaan Kemahiran Berbahasa Indonesia	1000	1000	1000	1000	1000	27,9	Pusat dan Daerah		03
Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	5000	5000	5000	5000	5000	45,9	Pusat dan Daerah		04
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan							98,8			
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	Jumlah Penugasan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	220	220	220	220	220	91,7	Pusat		04, 07
Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan Terfasilitasi	Jumlah Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan Terfasilitasi	100	100	100	100	100	7,2	Pusat dan Daerah		04
Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah							144,5			
Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	18710	19000	19000	19000	19000	144,5	Pusat dan Daerah		04
Program Pelestarian Budaya							4.093,8			
Pengembangan Galeri Nasional							75,0			
Peningkatan kualitas layanan galeri	Jumlah kunjungan galeri	1200472	1200472	1200472	1200472	1200472	75,0	Pusat		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan Permuseuman							245,6			
Peningkatan kualitas pengelolaan koleksi museum	Persentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)	45	49	52	53	57	75,6	Pusat		04
Peningkatan kualitas layanan museum	Jumlah kunjungan museum	1861792	1861792	1861792	1861792	1861792	170,0	Pusat		04
Pelestarian Nilai Budaya							40,0			
Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya maritim	Jumlah kekayaan budaya maritim yang dikembangkan atau dimanfaatkan	5	5	5	5	5	40,0	Pusat dan Daerah		04
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan							1.690,0			
Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	Jumlah pengelolaan dana perwalian kebudayaan	1	1	1	1	1	1.070,0	Pusat		04
Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	Jumlah fasilitasi yang diberikan melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	189	189	189	189	189	255,0	Pusat		04
Peningkatan kualitas SDM kebudayaan	Jumlah SDM bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi	450	450	450	450	450	75,0	Pusat		04
Peningkatan kualitas SDM kebudayaan	Jumlah profesi bidang kebudayaan yang terstandarisasi dan tercantum dalam KBJI/KBLI	5	5	5	5	5	20,0	Pusat		04
Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya masyarakat	126	135	135	135	135	150,0	Pusat		04
Pengembangan sistem pendataan kebudayaan	Pengembangan pusat data milik pemerintah dan masyarakat yang tersambung dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	1	1	1	1	1	30,0	Pusat		04
Pengembangan kerja sama bidang pemajuan kebudayaan	Persentase PPKD yang menjadi rujukan penyusunan RKP dan RPJMD	50	50	50	50	50	50,0	Pusat		04
Pengembangan kerja sama bidang pemajuan kebudayaan	Jumlah kerja sama galeri di tingkat internasional	4	4	4	4	4	40,0	Pusat		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala							187,4			
Peningkatan akses masyarakat terhadap cagar budaya	Jumlah Kunjungan Cagar budaya	987000	987000	987000	987000	987000	140,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan dukungan pemanfaatan ekonomi objek pemajuan kebudayaan	Persentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang didukung	45	47	49	50	51	47,4	Pusat dan Daerah		04
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman							392,8			
Peningkatan penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (terhadap yang terdaftar)	3,91	4,65	5,39	6,13	6,9	69,5	Pusat		04
Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan (terhadap yang dilindungi)	34	37	40	43	45	217,7	Pusat		04
Peningkatan pemberian izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan CB	Persentase izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang diterbitkan	30	33	35	37	39	46,5	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan standarisasi museum	Persentase museum yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	75	76	77	78	79	59,1	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Kesenian							888,5			
Penguatan integrasikan Kebudayaan pada proses pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran	30,5	31	33	34,6	37	234,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan produksi film, musik dan media baru	Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung	30	35	40	45	50	378,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan penyelenggaraan festival budaya	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	218	230	231	239	238	276,5	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi							264,5			
Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	30	40	45	48	52	114,5	Pusat dan Daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan dukungan terhadap komunitas adat dan penghayat kepercayaan	Persentase komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	40	45	49	53	56	100,0	Pusat dan Daerah		04
Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya	Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi	48	52	55	56	57	50,0	Pusat dan Daerah		04
Pengembangan Sejarah							125,0			
Peningkatan kajian dan pemetaan objek pemajuan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikaji dan dipetakan	20	23	25	27	29	40,0	Pusat dan Daerah		04
Pemanfaatan dan inventarisasi manuskrip	Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan	347	347	347	347	347	85,0	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya							185,0			
Penguatan misi dan karavan budaya	Jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia yang dikirim	300	300	300	300	300	85,0	Pusat		04
Penguatan peran Indonesia dalam forum internasional kebudayaan	Jumlah forum kebudayaan internasional yang diintervensi	10	10	10	10	10	30,0	Pusat		04
Penguatan peran diaspora Indonesia di luar negeri	Jumlah diaspora Indonesia yang terlibat dalam kegiatan budaya Indonesia di Luar Negeri	60	60	60	60	60	50,0	Pusat		04
Peningkatan peran Rumah Budaya Indonesia di luar negeri	Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang memiliki program kebudayaan dan dikelola secara berkelanjutan	8	8	8	8	8	20,0	Pusat		04
Program Guru dan Tenaga Kependidikan							9.844,7			
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan							3.510,2			
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	743	743	743	743	743	91,3	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	3388	3388	3388	3388	3388	135,8	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	3432	3432	3432	3432	3432	125,1	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	3377	3377	3377	3377	3377	150,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	0	2000	2000	2000	2000	265,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	3377	3377	3377	3377	3377	136,5	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	3069	3069	3069	3069	3069	116,3	Pusat dan Daerah		03
Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	39564	39564	39564	39564	39564	1.022,1	Pusat dan Daerah		03
Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14	14	14	14	14	58,1	Pusat		03
Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	0	900	900	900	900	27,2	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	1856	1856	1856	1856	1856	105,2	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	556	556	556	556	556	94,6	Pusat dan Daerah		03
Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	Jumlah Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	21219	21219	21219	21219	21219	499,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	1908	1908	1908	1908	1908	157,0	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa	3377	3377	3377	3377	3377	138,9	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	1997	1997	1997	1997	1997	145,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	3388	3388	3388	3388	3388	133,3	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	1022	1022	1022	1022	1022	106,5	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas							759,1			
Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	893	893	893	893	893	94,4	Pusat dan Daerah		03
Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Jumlah Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	34	34	34	34	34	113,9	34 Provinsi		03
Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	4251	4251	4251	4251	4251	210,2	Pusat dan Daerah		03
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	60	60	60	60	60	11,6	Pusat dan Daerah		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	899	899	899	899	899	168,4	Pusat dan Daerah		03
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	43360	43360	43360	43360	43360	160,6	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Guru Pendidikan Dasar							3.646,6			
Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	17797	18000	18000	18000	18000	1.629,3	Pusat dan Daerah		03
Penataan Guru Dikdas	Jumlah Penataan Guru Dikdas	34	34	34	34	34	52,6	34 Provinsi		03
Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	24697	24697	24697	24697	24697	1.058,3	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	50	50	50	50	50	19,3	Pusat dan Daerah		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	6300	6300	6300	6300	6300	483,3	Pusat dan Daerah		03
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	800	800	850	900	950	148,3	Daerah Afiriasi		03
Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	2000	2000	2000	2000	2000	105,2	Pusat dan Daerah		03
Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	676	676	676	676	676	150,3	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Guru Pendidikan Menengah							1.301,4			
Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	2283	2283	2283	2283	2283	238,6	Pusat dan Daerah		03
Penataan Guru Dikmen	Jumlah Penataan Guru Dikmen	34	34	34	34	34	75,6	34 Provinsi		03
Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	11052	11052	11052	11052	11052	538,1	Pusat dan Daerah		03
Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	20	20	20	20	20	9,9	Pusat dan Daerah		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	1693	1693	1693	1693	1693	246,8	Pusat dan Daerah		03
Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	7330	7330	7330	7330	7330	117,7	Pusat dan Daerah		03
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	500	500	550	600	650	74,7	Daerah Afiriasi		03
Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen							627,2			
Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	Jumlah Daerah yang Melakukan Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	34	34	34	34	34	122,8	34 Provinsi		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	4300	4300	4300	4300	4300	243,8	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	90	90	90	90	90	18,7	Pusat dan Daerah		03
Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1567	1567	1567	1567	1567	96,5	Pusat dan Daerah		03
Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1508	1508	1508	1508	1508	49,2	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	204	204	204	204	204	16,6	Pusat dan Daerah		03
Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	630	630	630	630	630	79,8	Pusat dan Daerah		03
Program Pendidikan Vokasi							56.105,8			
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan							50.242,2			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1829167	1829167	1829167	1829167	1829167	8.501,3	Seluruh Indonesia		02, 03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	300	1000	1250	1500	1750	2.802,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	12150	12150	12150	12150	12150	94,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/ olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional	9261	9261	9261	9261	9261	485,7	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	0	125	125	125	125	30,8	Pusat dan Daerah		03
Siswa SMK yang Tersertifikasi	Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	128000	130000	135000	140000	145000	346,1	Pusat dan Daerah		03
Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	0	15	15	16	16	31,6	31 Lokasi	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkatkan	Jumlah Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkatkan	1100	1100	1100	1100	1100	360,7	Pusat		03
Sekolah yang Sarana dan Prasarananya Meningkatkan	Jumlah Sekolah yang Sarana dan Prasarananya Meningkatkan	400	400	400	400	400	406,6	Pusat		03
Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkatkan	Jumlah Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkatkan	200	200	200	200	200	219,3	Pusat		03
Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkatkan	Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkatkan	500	500	500	500	500	643,6	Pusat		03
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkatkan	Jumlah Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkatkan	140	140	140	140	140	65,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	200	200	200	200	200	100,0	Pusat		03
Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik	300	300	300	300	300	150,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa	600	600	600	600	600	150,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK	400	500	600	700	800	29.283,3	Pusat		03
Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan	315	315	315	315	315	1.575,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory	200	200	200	200	200	200,0	Pusat		03
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	125000	125000	125000	125000	125000	156,3	Pusat		03
Fasilitasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang Didirikan	15	15	15	15	15	477,3	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	60000	60000	60000	60000	60000	679,5	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	60000	60000	60000	60000	60000	843,1	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan	100	100	100	100	100	25,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan	40	40	40	40	40	10,0	Pusat		03
Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Fasilitasi Uji Kompetensi	10000	10000	10000	10000	10000	25,0	Pusat		03
Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Usaha	Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Usaha	3200	3600	3600	3600	3600	2.580,0	Pusat		03
Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi							5.424,5			
Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan	1800	1800	1800	1800	1800	81,9	Pusat		03
Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi		500	500	500	500	52,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Daya Tampung Politeknik Eksisting	Jumlah Politeknik yang Ditingkatkan Daya Tampungnya	10	43	43	43	43	2.400,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	15000	15000	15000	15000	15000	64,8	Pusat		03
LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	Jumlah LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	43	43	43	43	43	91,4	Pusat		03
Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	Jumlah Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	2	5	5	5	5	17,6	Pusat		03
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (retooling dosen dan sertifikasi mahasiswa, penguatan kelembagaan, dan penguatan prodi bidang prioritas)	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi	43	43	43	43	43	1.753,2	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	Jumlah Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	2	2	2	2	2	4,6	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penambahan Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU	Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU yang Ditambah	43	43	43	43	43	495,0	Pusat		03
Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri		200	200	200	200	32,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		500	500	500	500	104,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)	Jumlah Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)	240	500	500	500	500	328,0	Pusat		03
Pembinaan Kemitraan dan Penyeragaman Dunia Usaha dan Dunia Industri							439,2			
Terwujudnya Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)	Jumlah Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)	50	55	55	55	55	53,3	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan dan Penyeragaman Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/Industri	Jumlah Pemetaan dan Penyeragaman Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/Industri	33	33	33	33	33	101,8	Pusat		03
Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja	Jumlah Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja	33	33	33	33	33	58,3	Pusat		03
Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri	Jumlah Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri	60	60	60	60	60	121,1	Pusat		03
Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)	1200	1200	1200	1200	1200	86,9	Pusat		03
Penyelenggaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi	Jumlah Penyelenggaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi	50	50	50	50	50	17,8	Pusat		03
JUMLAH							196.716,4			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KESEHATAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	3.924,2
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	362,1
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2.785,2
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	7.629,4
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	75.519,2
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9.147,1
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	17.359,0
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	15.523,3
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	250.230,8
JUMLAH	382.480,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan							755,6			
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan							111,2			
Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	25	35	45	55	65	111,2	34 Provinsi		03
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							149,7			
Integrasi sistem informasi kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	10	25	45	70	100	137,2	Pusat		03
Peningkatan kualitas data rutin kesehatan	Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin	0	5	10	20	30	12,6	Pusat		03
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji							344,6			
Pelayanan kesehatan haji	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	231000	231000	231000	231000	231000	344,6	34 Provinsi		04
Pengelolaan Krisis Kesehatan							99,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengurangan risiko krisis kesehatan	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	117	123	124	124	124	65,2	1.Aceh Besar, 2.Aceh Singkil, 3.Pidie Jaya, 4.Kota Subulussalam, 5.Mandailing Natal, 6.Kota Gn.Sitoli, 7.Nias, 8.Nias Selatan, 9.Pasaman Barat, 10.Kota Pariaman, 11.Kota Solok, 12.Kota Pangkal Pinang, 13.BangkaTengah, 14.Bangka Selatan, 15.Bengkulu Selatan, 16.Kaur, 17.Seluma, 18.Kepahiang, 19.Bandung, 20.Sukabumi, 21.Cianjur, 22.Bandung Barat, 23.Klaten, 24.Boyolali, 25.Wonogiri, 26.Sukoharjo, 27.Kulon Progo,28.Gn.Kidul, 29.Malang, 30.Bojonegoro, 31.Gresik, 32.Tuban, 33.Pamekasan,		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								34.Sumenep, 35.Sumba Barat, 36.Sumba Timur, 37.Sumba Barat Daya, 38.Sumba Tengah, 39.Banggai, 40.Tojo Una Una, 41.Banggai Kep., 42.Banggai Laut, 43.Buton Utara, 44.Wakatobi, 45.Konawe Utara, 46.Kota Bau Bau, 47.Minahasa, 48.Minahasa Selatan, 49.Kota Tomohon, 50.Minahasa Tenggara, 51.Kota Tangerang, 52. Tangerang, 53.Kab.Tangerang Selatan, 54.Kep.Seribu, 55.Kota Jakarta Utara, 56.Pangandaran, 57.Tasikmalaya, 58.Ciamis, 59.Kota Banjar, 60.Garut, 61.Kota Tasikmalaya,62. Cilacap, 63.Banyumas,		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								64.Kebumen, 65.Purworejo, 66.Purbalingga, 67. Banjarnegara, 68.Wonosobo,69.Temang ung, 70.Magelang,71.Pacitan,7 2.Ponorogo, 73.Trenggalek, 74.Tulungagung, 75.Blitar, 76.Kediri, 77. Jember, 78.Banyuwangi,79. Lumajang, 80.Karangasem, 81.Klungkung, 82.Bangli, 83..50 Kota, 84..Solok, 85.Tanah Datar, 86.Muaro Jambi, 87.Kota Jambi, 88.Batanghari, 89.Bengkalis, 90.Rokan Hilir, 91.Kota Manado, 92.Kota Bitung, 93.Minahasa Utara, 94.Luwu Timur, 95.Luwu Utara,		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								96.Kota Palopo, 97.Raja Ampat, 98.Teluk Bintuni, 99.Manokwari, 100.Teluk Wondama, 101.Kota Sorong, 102.Gowa, 103.Maros, 104.Bintan, 105.Dumai, 106.Belitung Timur, 107.Karo, 108.Bantul, 109.Seram Bag.Barat, 110.Bima,111. Lombok Barat, 112.Prov.Aceh, 113.Prov.Sumatera Utara, 114.Prov.Sumatera Barat, 115.Prov.Bangka Belitung, 116.Prov.Bengkulu, 117.Prov. Jawa Barat		
Penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan	35	35	35	35	35	34,7	Kabupaten/kota terdampak Bencana dan DTPK		06
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan							50,2			
Penyusunan Rancangan Kebijakan Determinan Pembangunan Kesehatan	Jumlah Rancangan Kebijakan Determinan Pembangunan Kesehatan yang dihasilkan	4	4	4	4	4	50,2	Pusat		03
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan							1.564,2			
Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan							360,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan	3	4	4	4	4	104,7	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat		03
Penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	1	1	1	1	1	256,2	34 provinsi		03
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat							469,1			
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang upaya kesehatan masyarakat	Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait upaya kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	116,0	34 provinsi		03
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah II	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II	1	1	1	7	2	219,9	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Maluku		03
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah V	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V	1	1	1	6	2	133,1	Babel, Kalbar, Kalsel,, Sultra, Gorontalo, Pabar		03
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan							324,5			
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	Jumlah hasil riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	10,6	28 provinsi		03
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah I	Jumlah hasil status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I	1	1	1	7	2	205,6	Aceh, Riau, Jakarta, Jateng, DIY, NTT, Sulsel		03
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah IV	Jumlah hasil status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV	1	1	1	7	2	108,2	Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulbar		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan							409,8			
Penguatan sistem integrasi pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian dalam mendukung pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H)	5	8	11	14	17	120,2	17 Provinsi dan 17 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penguatan sistem pencatatan data rutin program	Jumlah rekomendasi penguatan sistem pencatatan data rutin program	2	1	1	1	1	48,5	Pusat		03
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah III	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah III	1	1	1	7	2	241,1	Ada 7 Provinsi : Sumbar, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Maluku, dan Papua		03
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat							4.938,0			
Pembinaan Gizi Masyarakat							2.857,2			
Penanggulangan Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil	Persentase ibu hamil kurang energi kronis	16	14,5	13	11,5	10	1.016,0	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Suplementasi gizi mikro pada balita	Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	90000	140000	190000	240000	290000	284,6	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	60	70	75	80	85	1.075,3	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/kota	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	51	70	90	100	100	481,3	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga							195,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja	308	334	360	385	411	195,4	Pusat dan 34 provinsi		03
Pembinaan Kesehatan Keluarga							415,5			
Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	120	200	320	470	514	134,6	70 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut lansia	45	50	55	60	65	115,4	34 Provinsi		03
Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal	960	960	960	960	960	165,5	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							568,6			
Pembinaan Kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	35	40	45	50	361,6	34 Provinsi		03
Penyusunan pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	3	6	9	12	15	24,3	Pusat		03
Pembinaan posyandu aktif	Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	51	70	90	100	100	182,7	34 Provinsi		03
Penyehatan Lingkungan							901,3			
Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kecamatan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	40	50	60	70	90	445,2	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03, 05
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	Jumlah kabupaten/kota sehat	110	220	280	380	420	76,0	34 Provinsi		03, 05
Pengawasan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	60	64	68	72	76	291,2	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03, 05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan limbah medis	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	2600	3000	4850	6250	8800	88,9	35 Provinsi	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							6.250,1			
Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan							1.811,7			
Pengembangan fasilitas rujukan di Kawasan Indonesia Timur	Jumlah RS UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan	2	2	2	2	2	1.727,5	3 Lokasi		03
Penyusunan rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1	-	-	-	2,5	34 Provinsi		03
Pembinaan FKTP yang memiliki sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	75	83	90	95	100	15,2	34 Provinsi		03
Pembinaan rumah sakit yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	80	85	90	95	100	25,9	34 Provinsi		03
Pembinaan RSUD di DTTPK (Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan)	Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina	7	14	21	28	35	24,1	15 provinsi		03
Pembinaan puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan yang ditingkatkan SPA sesuai standar	Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar	250	200	200	200	200	16,3	28 provinsi		03
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer							502,5			
Pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	18	51	84	117	150	324,9	28 provinsi		03
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	105	200	300	400	514	129,7	34 Provinsi		03
Pelayanan rujukan non spesialisistik di FKTP	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik \leq 2%	40	50	60	80	100	37,9	34 Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan UTD yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan Transfusi Darah	42	126	210	252	294	10,1	34 Provinsi		03
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							190,7			
Penerapan telemedicine	Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	67	134	201	268	335	62,2	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	Persentase rumah sakit rujukan yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	20	40	60	80	100	57,2	34 Provinsi		03
Penerapan sistem rujukan terintegrasi	Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi	34	34	34	34	34	25,2	34 Provinsi		03
Pelaksanaan pelayanan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit	Jumlah RS yang Melaksanakan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit	66	132	198	264	331	33,6	34 Provinsi		03
Pengendalian anti microbial resistance	Persentase RS kelas A dan B Pendidikan yang melakukan surveilan AMR sesuai standar	20	40	60	80	100	12,5	34 Provinsi		03
Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan							124,6			
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu FKTP untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survey akreditasi	4478	4009	4720	6110	5706	59,1	34 Provinsi		03
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu rumah sakit untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survey akreditasi	1028	851	1195	1169	991	65,5	34 Provinsi		03
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							3.620,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pencatatan kematian ibu	Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian ibu	40	50	60	80	100	23,9	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarannya RS UPT vertikal	Jumlah RS UPT vertikal yang dikembangkan dan ditingkatkan sarana dan prasarannya	6	6	6	7	7	3.596,7	7 RS		03
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							6.935,8			
Surveilans dan Karantina Kesehatan							1.202,1			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92,9	93,6	94,1	94,6	95	267,5	32 Provinsi		03
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	92,9	93,6	94,1	94,6	95	40,6	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)	60	65	70	75	80	260,9	34 Provinsi		03
Peningkatan kekarantina kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat	20	40	60	80	100	633,0	34 Provinsi		03
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik							1.031,9			
Intensifikasi upaya eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	141	130	119	110	95	315,5	32 Provinsi		03
Intensifikasi upaya eliminasi malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	10	15	20	25	30	62,9	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Intervensi eliminasi schistosomiasis	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28	22,0	28 Desa di 2 kabupaten (Poso dan Sigi)		03
Intervensi eliminasi filariasis	Jumlah kabupaten/kota dengan intervensi eliminasi filariasis	106	150	191	207	212	554,1	201 kabupaten/Kota		03
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis	6	8	14	21	25	42,0	Kab/Kota di Papua	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengendalian Penyakit Arbovirus	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	70	75	80	85	90	35,4	34 Provinsi		06
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung							2.314,0			
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90	90	90	90	90	116,2	32 Provinsi		03
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat	62	72	72	72	72	32,0	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	77	80	85	90	95	519,4	32 Provinsi		03
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	77	80	85	90	95	22,7	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Penemuan dan pengobatan TBC	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)	80	85	90	90	90	1.073,5	32 Provinsi		03
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat	65	70	75	80	85	11,2	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pencegahan dan Pengendalian ISPA	Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia standar	50	52	55	57	60	35,6	34 Provinsi		03
Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100	503,5	34 Provinsi		03
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular							1.243,1			
Deteksi dini kanker	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-59 tahun	283	309	360	411	514	170,0	34 Provinsi		03
Deteksi dini gangguan indera	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi	155	206	308	360	514	139,9	34 Provinsi		03
Deteksi dini faktor risiko PTM	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%	52	129	232	360	514	545,5	34 Provinsi		03
Pelaksanaan pengendalian PTM terpadu di Puskesmas	Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas	103	205	308	411	514	173,4	34 Provinsi		03
Pelayanan berhenti merokok (konseling dan terapi)	Jumlah kabupaten/kota dengan ≥ 40% FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	50	100	175	275	350	204,8	34 Provinsi		03
Advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514	9,5	34 Provinsi		03
Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah							753,9			
Pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	86	89	93	97	100	753,9	34 Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							242,1			
Kewaspadaan dini kejadian penyakit	Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	80	85	90	95	100	242,1	34 Provinsi		03
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA							148,8			
Pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	45	60	75	90	100	40,2	34 Provinsi		03
Pelayanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna napza	Jumlah penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	9500	10000	10500	11000	11500	108,6	34 Provinsi		07
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan							14.052,1			
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian							135,9			
Pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasyankes	Jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	3000	4000	5000	6000	7000	102,7	Fasyankes di Provinsi/kabupaten/ Kota		03
Penggunaan obat sesuai FORNAS di rumah sakit	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	70	75	80	85	90	33,2	RS Prov/kabupaten/ Kota		03
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan							13.835,2			
Penyediaan vaksin baru untuk pneumonia (PCV)	Persentase ketersediaan PCV di provinsi rencana introduksi	100	100	100	100	100	1.633,1	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Penyediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	77	79	81	83	85	38,5	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Penyediaan obat gizi	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi	100	100	100	100	100	446,9	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak	100	100	100	100	100	11,4	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis	100	100	100	100	100	1.718,0	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program HIV/AIDS	100	100	100	100	100	2.695,0	34 Provinsi		03
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian Malaria	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan	100	100	100	100	100	84,0	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penyediaan buffer obat dan perbekalan kesehatan program pelayanan kesehatan dasar	Jumlah paket buffer obat pelayanan kesehatan dasar yang disediakan	10	10	10	10	10	1.084,5	34 Provinsi		03
Penyediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	91	92	93	94	95	6.081,8	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar di instalasi farmasi kab/kota	Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	164	264	364	464	514	17,4	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Penerapan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di instalasi farmasi provinsi dan kab/kota	Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	68	136	204	272	340	24,6	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian							2,7			
Penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	1	1	1	1	1	2,7	Jakarta		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)							46,6			
Produksi alat kesehatan di dalam negeri	Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri	7	7	7	7	7	46,6	Industri Alkes di Provinsi/kabupaten/ Kota		03
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)							31,7			
Pengawasan produk Alkes dan PKRT	Persentase produk alat kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat	90	90	90	95	95	31,7	Pusat/Prov/ kabupaten/Kota		03
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)							4.137,2			
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan							633,8			
Penyediaan bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	2020	1885	1785	1650	1540	633,8	34 Provinsi		03
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan							247,3			
Pelatihan strategis sumber daya manusia kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapat pelatihan strategis	2700	2700	2700	2700	2700	237,0	34 Provinsi		03
Pelatihan tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit yang dilatih	100	100	100	100	100	10,3	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pendidikan SDM Kesehatan							377,1			
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	0	500	1000	1500	1500	155,3	Pusat dan Poltekkes Kementerian Kesehatan		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	52	104	156	208	260	221,8	Pusat dan 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan		03
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan							1.276,9			
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim	1356	1493	1200	1200	1200	296,8	100 Puskesmas		03
Pendayagunaan dokter spesialis	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan	660	660	660	660	660	75,2	455 Rumah Sakit		03
Pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat	40	40	40	40	40	6,8	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu	4177	5487	4000	4000	4000	270,0	500 Puskesmas		03
Penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat	395	270	200	200	200	14,3	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pendayagunaan dokter pasca internsip	Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	0	400	600	800	1000	613,8	34 Provinsi		03
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan							194,3			
Registrasi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi	150000	155000	160000	165000	170000	194,3	Pusat		03
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi							1.407,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendayagunaan tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes di fasyankes Pemerintah	Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	0	500	1000	1500	1500	1.407,8	34 Provinsi		03
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional							249.969,9			
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS							249.969,9			
Peningkatan kepesertaan PBI	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	107,2	108,6	110	111,4	112,9	249.938,4	34 Provinsi		03
Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional	2	2	2	2	2	31,5	Pusat		03
JUMLAH							288.603,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	379,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	477,3
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	1.719,4
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	6.623,0
Program Pendidikan Islam	128.649,9
Program Bimbingan Masyarakat Islam	11.110,9
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	3.281,1
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	1.715,8
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	1.403,7
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	905,6
Program Kerukunan Umat Beragama	322,8
Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	108,6
JUMLAH	156.697,9

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama							32,3			
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan							32,3			
Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	32,3	Pusat		03
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama							1.094,8			
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an							3,4			
Bahan Bacaan Tafsir dan Literatur Ke-Al-Qur'an	Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	0	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	1	1	1	1	1	3,0	Pusat dan Daerah		04
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan							1,2			
Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan	Diklat Alumni Tenaga Teknis Keagamaan	30	30	30	30	30	0,7	Pusat dan Daerah		04
Alumni Diklat Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu	Diklat Alumni Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu	30	30	30	30	30	0,5	Pusat dan Daerah		04
Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi							5,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	1	1	1	1	1	3,0	Pusat dan Daerah		04
Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1	1	1	1	1	2,2	Pusat dan Daerah		04
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan							931,6			
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	40510	40510	40510	40510	40510	829,4	Pusat dan Daerah		03, 04
Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	234	234	234	234	234	102,3	Pusat dan Daerah		04
Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan							153,3			
Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	18	18	18	18	18	59,6	Pusat dan Daerah		04
Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Jumlah Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	16	16	16	16	16	93,8	Pusat dan Daerah		04
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah							6.242,1			
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus							66,6			
Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina	30	100	100	100	100	25,4	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina	30	100	100	100	100	24,0	Pusat dan Daerah		04
Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	75	150	150	150	150	17,2	Pusat dan Daerah		04
Pelayanan Haji Dalam Negeri							3.518,2			
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	231000	231000	231000	231000	231000	123,6	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Asrama Haji	Pengelolaan Asrama Haji	1	1	1	1	1	16,1	Pusat dan Daerah		04
Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji	Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji yang terselenggara	2	2	2	2	2	43,3	Pusat dan Daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler	Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang terselenggara	10000	204000	204000	204000	204000	85,9	Pusat dan Daerah		04
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	Asrama Haji yang dikembangkan dan direvitalisasi	10	8	13	16	16	2.625,3	Pusat dan Daerah		04
Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang dibangun dan direvitalisasi	40	40	40	40	40	624,0	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Haji							1.823,9			
Petugas haji yang profesional	Petugas haji yang ditingkatkan profesionalismenya	50	2288	2288	2288	2288	1.641,3	Pusat dan Daerah		04
Bimbingan Jemaah Haji	Bimbingan Jemaah Haji yang terselenggara	500	500	500	500	500	171,8	Pusat dan Daerah		04
Advokasi Haji	Advokasi Haji yang terselenggara	12	12	12	12	12	10,8	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji							206,9			
Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji	Jumlah Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji	3	3	3	3	3	30,7	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Keuangan Operasional Haji	Jumlah Pengelolaan Keuangan Operasional Haji	4	4	4	4	4	51,7	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	12	12	12	12	12	124,5	Pusat dan Daerah		04
Pelayanan Atase Haji di Jeddah							594,6			
Petugas Haji di Arab Saudi	Terselenggaranya ibadah haji oleh Petugas Haji di Arab Saudi	1	1	1	1	1	594,6	Arab Saudi		04
Pelayanan Haji Luar Negeri							31,9			
Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi	Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	13,0	Arab Saudi		04
Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	10,0	Arab Saudi		04
Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	Jemaah haji yang mendapatkan Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	8,9	Arab Saudi		04
Program Pendidikan Islam							101.077,2			
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam							400,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	79	79	79	79	79	131,2	Pusat		03
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	200	210	220	230	240	15,3	Pusat dan daerah		03
Guru/Pengawas/Dosen PAI penerima Beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas/Dosen PAI yang menerima Beasiswa S2	0	500	600	700	800	118,9	Pusat dan Daerah		03
Guru PAI yang meningkat kompetensinya	Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya	3950	4000	4500	5000	5500	49,7	Pusat dan daerah		03
GPPI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah GPPI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	1000	1500	2000	2500	3000	84,9	Pusat dan Daerah		03
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam							2.567,9			
Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	500	500	500	500	500	29,3	Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	150	160	170	180	190	15,7	Pusat dan Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	133	133	133	133	133	14,7	Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	133	133	133	133	133	14,7	Daerah		03
Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill	100	200	250	300	350	40,8	Pusat dan Daerah		03
Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya	Jumlah Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya	30	30	30	30	30	17,6	Daerah		03
Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan	Jumlah Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan	1000	1000	1000	1000	1000	8,8	Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	256	260	260	260	260	63,5	Pusat dan Daerah		03
Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	245	250	250	250	250	30,7	Pusat dan Daerah		03
Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi	10	15	20	25	30	42,5	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	27540	27540	27540	27540	27540	145,4	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	114516	114516	114516	114516	114516	696,1	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	18562	18562	18562	18562	18562	153,9	Pusat dan Daerah		03
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	12	12	12	12	12	29,3	Pusat		03
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	12	12	12	12	12	29,3	Daerah		03
Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya	Jumlah Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya	10	12	14	16	18	25,2	Pusat dan Daerah Afirmasi 3T		03
Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa	Jumlah Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa	0	1000	1000	1000	1000	13,5	Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu	250	250	250	250	250	4,1	Pusat dan Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu	170	170	170	170	170	5,2	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	30176	30176	30176	30176	30176	79,7	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	105203	105203	105203	105203	105203	462,4	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	46283	46283	46283	46283	46283	314,2	Pusat dan Daerah		03, 04
Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional	4000	4000	4000	4000	4000	331,4	Daerah		03
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah							79.655,2			
Madrasah dan RA yang Terakreditasi	Jumlah Madrasah dan RA yang Terakreditasi	532	1000	1200	1400	1600	42,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa Madrasah yang Berdaya Saing	Jumlah Siswa Madrasah dan RA yang Berdaya Saing	1535	1600	1700	1800	1900	61,8	Pusat dan Daerah		03
Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	0	30	30	30	30	6,4	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas RA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas RA yang direhabilitasi	0	100	100	100	100	76,6	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MI yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MI yang dibangun	159	170	180	190	200	28,0	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MTs yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MTs yang dibangun	180	190	200	210	220	26,2	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MA yang dibangun	135	140	150	160	170	27,5	Pusat dan Daerah		03
Dokumen Standar Nasional Pendidikan	Dokumen Standar Nasional Pendidikan	35	35	35	35	35	150,0	Pusat dan Daerah		04
Ruang kelas MI yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MI yang direhabilitasi	0	300	300	300	300	229,8	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	0	300	300	300	300	229,8	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Ruang kelas MA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MA yang direhabilitasi	0	300	300	300	300	229,8	Pusat dan Daerah		03
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	0	300	350	400	450	107,0	Pusat dan Daerah		03
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	0	300	350	400	450	93,5	Pusat dan Daerah		03
Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama	136	136	136	136	136	5.871,4	Pusat dan Daerah		03
Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	0	160	170	180	190	178,4	Pusat dan Daerah		03
Laboratorium Komputer MA yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MA yang dibangun	0	160	170	180	190	178,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa MI penerima BOS	Jumlah Siswa MI penerima BOS	3894365	3894365	3894365	3894365	3894365	20.562,0	Pusat dan Daerah		03
Siswa MTs penerima BOS	Jumlah Siswa MTs penerima BOS	3358771	3358771	3358771	3358771	3358771	21.675,0	Pusat dan Daerah		03
Siswa MI penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MI penerima Bantuan PIP	939607	939607	939607	939607	939607	2.480,5	Pusat dan Daerah		03
Siswa MTs penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan PIP	745086	745086	745086	745086	745086	3.278,3	Pusat dan Daerah		03
Siswa MA penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MA penerima Bantuan PIP	320372	320372	320372	320372	320372	1.879,5	Pusat dan Daerah		03
Siswa MA penerima BOS	Jumlah Siswa MA penerima BOS	1497606	1497606	1497606	1497606	1497606	13.158,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	Jumlah Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	2500	2500	2500	2500	2500	7,4	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	0	10	10	10	10	12,8	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	0	22	22	22	22	79,0	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang Ditingkatkan Mutu UKS/M	Jumlah Madrasah yang ditingkatkan mutu UKS dan sanitasinya	58	58	58	58	58	11,7	Pusat dan Daerah		03
Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	14	15	20	25	30	25,1	Pusat dan Daerah Afirmasi 3T		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asrama pada Madrasah yang dibangun	Jumlah Asrama pada Madrasah yang dibangun	0	10	10	10	10	24,8	Pusat dan Daerah		03
BOP RA	Jumlah Siswa RA penerima BOP	1331207	1331207	1331207	1331207	1331207	4.685,8	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas RA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas RA yang dibangun	0	35	35	35	35	15,8	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang direvitalisasi	Jumlah Madrasah yang direvitalisasi	0	5	5	5	5	15,8	Pusat dan Daerah		03
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)	4	4	4	4	4	2.351,0	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	0	7	7	7	7	4,5	Pusat dan Daerah		03
MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	Jumlah MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	27	27	27	27	27	451,7	Pusat dan Daerah		03
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1	1	1	1	1	1.398,9	Pusat dan Daerah		03
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam							16.103,2			
PTKI yang Terakreditasi	Jumlah PTKI yang Terakreditasi	1	1	1	1	1	17,5	Pusat		03
Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarana Perpustakaan	58	58	58	58	58	43,0	Pusat		03
Sarana dan Prasarana PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarannya	58	58	58	58	58	400,0	Pusat		03
Penelitian pada PTKI	Penelitian pada PTKI	1	5	10	15	20	66,3	Pusat		03
Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarannya melalui SBSN	8	10	10	10	10	5.291,6	Pusat		03
Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	100	100	100	100	100	5,3	Pusat		03
Dosen yang Tersertifikasi	Jumlah Dosen yang disertifikasi	1000	1000	1000	1000	1000	11,5	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya	42	42	42	42	42	13,5	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	5300	5300	5300	5300	5300	100,0	Pusat		03
Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	Jumlah Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	425	500	500	500	500	21,0	Pusat		03
Bidik Misi PTKI	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Bidik Misi PTKI	38000	26364	18576	10788	3000	1.006,2	Pusat		03
Penyelenggaraan LPTK	Jumlah Penyelenggaraan LPTK	7	7	7	7	7	10,9	Pusat		03
Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya	99	99	99	99	99	16,2	Pusat		03
Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	115	115	115	115	115	12,0	Pusat		03
PTKIN Penerima BOPTN	Jumlah PTKIN Penerima BOPTN	58	58	58	58	58	5.315,0	Pusat		03
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		03
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	17565	37565	62565	92565	145130	3.733,3	Pusat		03
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah							2.350,9			
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	3492	3500	4000	4500	5000	14,7	Pusat dan Daerah		03
Guru/Pengawas Madrasah penerima beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2	200	200	200	200	200	44,2	Pusat dan Daerah		03
Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	Jumlah Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	1200	1500	2000	2500	3000	120,7	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus	4514	4500	4500	4500	4500	427,7	Pusat dan Daerah		03
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah dan RA	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA yang Mendapatkan Pengembangan Karir	1662	1700	2000	2200	2400	13,4	Pusat dan Daerah		03
Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	Jumlah Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	1575	1600	1700	1800	1900	25,1	Pusat dan Daerah		03
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	Jumlah KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	0	120	130	140	150	306,3	Pusat dan Daerah		03, 04
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madra	1	1	1	1	1	1.398,9	Pusat dan Daerah		03
Program Bimbingan Masyarakat Islam							10.516,8			
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah							6.144,1			
Penghulu yang Terbina	Penghulu yang Terbina	3000	3000	3000	3000	3000	102,5	Pusat dan Daerah		04
KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	2500	3000	3500	4000	4500	3.637,6	Pusat dan Daerah		04
Keluarga Sakinah yang Terbina	Keluarga Sakinah yang Terbina	18000	18000	18000	18000	18000	91,8	Pusat dan Daerah		04
Pembangunan Balai Nikah	Balai Nikah yang terbangun	228	128	128	128	128	2.090,0	Pusat dan Daerah		04
Buku dan Kartu Nikah	Buku dan Kartu Nikah yang diedarkan	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	58,7	Pusat dan Daerah		04
Rehabilitasi KUA	Jumlah KUA yang terehabilitasi	100	100	100	100	100	88,0	Pusat dan Daerah		04
Sarana dan Prasarana KUA	Sarana dan Prasarana KUA yang ditingkatkan	750	1000	1000	1000	1000	75,6	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf							303,9			
Bantuan Operasional BWI	BWI yg memanfaatkan bantuan operasional	35	35	35	35	35	44,2	Pusat dan Daerah		04
Bantuan Operasional BAZNAS	Baznas yg memanfaatkan bantuan operasional	35	35	35	35	35	13,8	Pusat dan Daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Literasi Perekonomian dan Keuangan Syariah	Orang yang melek perekonomian dan keuangan syariah	1500000	2000000	2500000	3000000	3500000	85,9	Pusat dan Daerah		04
Pengamanan Aset Wakaf	Aset wakaf terlindungi	200	250	300	350	400	66,6	Pusat dan Daerah		04
Legalitas Tanah Wakaf	Tanah wakaf tersertifikasi	350	400	450	500	550	15,0	Pusat dan Daerah		04
Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat	Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat	816	850	900	950	1000	57,1	Pusat dan Daerah		04
Lembaga zakat yg terakreditasi	Lembaga zakat yg terakreditasi	407	400	350	300	250	21,2	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam							3.292,2			
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS	Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang dapat tunjangan	45000	45000	45000	45000	45000	2.520,0	34 Provinsi		04
Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas	Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas	5148	5148	5148	5148	5148	278,9	Pusat dan Daerah		04
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	Jumlah event Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	35	35	35	35	35	150,4	Pusat dan Daerah		04
Dakwah dan Hari Besar Islam	Dakwah dan Hari Besar Islam yang terselenggara	35	35	35	35	35	43,7	Pusat dan Daerah		04
Ormas dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan	100	100	100	100	100	292,9	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam yang dikembangkan	34	34	34	34	34	6,3	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah							776,6			
Layanan Syariah	Layanan Syariah	100	100	100	100	100	20,5	Pusat dan Daerah		04
Kitab Suci	Kitab Suci Agama Islam yang dicetak	650000	650000	650000	650000	650000	46,5	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Hisab Rukyat	Pengelolaan Hisab Rukyat	1000	1000	1000	1000	1000	37,6	Pusat dan Daerah		04
Gedung Pusat Observasi Bulan	Gedung Pusat Observasi Bulan yang ditingkatkan	1	1	1	1	1	32,7	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Islam yang suci dan damai	590	1500	1500	1500	1500	639,3	Pusat dan Daerah		04
Program Bimbingan Masyarakat Kristen							2.790,6			
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen							884,5			
PIP SMTK/SMK	Jumlah Siswa SMTK penerima KIP	7953	7953	7953	7953	7953	46,7	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
PIP SMP TK	Jumlah Siswa SMP TK Penerima KIP	2838	2838	2838	2838	2838	12,5	Pusat dan Daerah		03
PIP SD TK	Jumlah Siswa SD TK Penerima KIP	1032	1032	1032	1032	1032	2,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa SMTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMTK Penerima BOS	8725	8725	8725	8725	8725	71,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa SMP TK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMP TK Penerima BOS	3088	3088	3088	3088	3088	18,1	Pusat dan Daerah		03
Siswa SD TK Penerima BOS	Jumlah Siswa SD TK Penerima BOS	2273	2273	2273	2273	2273	10,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	1158	1158	1158	1158	1158	26,4	Pusat dan Daerah		03
Guru yang mengikuti Program PPG	Jumlah Guru yang mengikuti Program PPG	700	800	800	800	800	34,4	Pusat dan Daerah		03
Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	1245	8000	9000	10000	11000	352,0	Pusat dan Daerah		03
Kepala SD TK, SMP TK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Kepala SD TK, SMP TK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0	78	100	200	300	5,1	Pusat dan Daerah		03
Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0	56	56	56	56	2,3	Pusat dan Daerah		03
Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Jumlah Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	211	211	211	211	211	268,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah (SD TK, SMP TK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	Jumlah Sekolah (SD TK, SMP TK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	52	55	60	65	70	13,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	74	80	85	90	95	21,0	Pusat dan Daerah		03
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen							876,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	Bimbingan bagi keluarga Kristiani	17	17	17	17	17	12,4	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen yang dikembangkan	23	23	23	23	23	23,1	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	9000	9000	9000	9000	9000	490,5	34 Provinsi		04
Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan	Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan	21	21	21	21	21	51,4	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Penyuluh Agama Kristen	Penyuluh Agama Kristen yang terbina	1370	2159	2159	2159	2159	94,4	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)	280	280	280	280	280	82,1	Pusat dan Daerah		04
Pesparawi Nasional	jumlah event Pesparawi Nasional		1			1	57,5	Pusat dan Daerah		04
Pesparawi Nasional	jumlah event Pesparawi Nasional	1	1	1	1	1	57,5	Pusat dan Daerah		04
Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	0	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Kitab Suci dan Buku Keagamaan Kristen lainnya	Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	14100	14100	14100	14100	14100	7,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen							1.029,7			
Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	1768	1768	1607	1107	607	77,8	Pusat		03
Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	1361	1361	1361	1361	1361	35,9	Pusat		03
PTA Penerima BOPTN	Jumlah PTA yang Menerima BOPTN	15378	15378	15378	15378	15378	143,8	Pusat		03
Sarana dan Prasarana PTK yang memenuhi Standar	Jumlah PTA yang direhabilitasi Sarana dan Prasarana PTT/AK yang memnuhi standar	95	355	355	355	355	402,5	Pusat		03
Dosen yang bersertifikat	Jumlah Dosen yang disertifikasi	100	100	100	100	100	2,0	Pusat		03
Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	1952	1952	1952	1952	1952	75,0	Daerah		03
Penelitian yang Bermutu	Penelitian yang Bermutu	150	150	150	150	150	25,0	Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	1690	3380	5070	6760	8450	267,7	Pusat		03
Program Bimbingan Masyarakat Katolik							1.331,2			
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik							118,1			
Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	Jumlah Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	2150	2150	2150	2150	2150	30,0	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bidik Misi	20	20	20	15	10	1,1	Pusat		03
Dosen PTA Katolik Tersertifikasi	Jumlah Dosen PTA Katolik yang Disertifikasi	50	50	50	50	50	1,5	Pusat		03
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	635	635	635	635	635	55,6	Pusat		03
Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	35	35	35	35	35	10,7	Pusat		03
PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN	Jumlah PTA Katolik Negeri yang Menerima BOPTN	364	364	364	364	364	3,4	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	100	200	300	400	500	15,9	Pusat		03
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik							867,2			
Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	600	600	600	600	600	3,5	Pusat dan Daerah		03
Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	4369	4369	4369	4369	4369	166,8	Pusat dan Daerah		03
Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	120	120	120	120	120	4,2	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	159	159	159	159	159	9,3	Pusat dan Daerah		03
KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	264	264	264	264	264	571,0	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	30	30	30	30	30	9,6	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	55	55	55	55	55	72,2	Pusat dan Daerah		03
SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B	Jumlah SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B	25	25	25	25	25	4,1	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	52	52	52	52	52	9,1	Pusat dan Daerah		03
Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari	Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari	53	53	53	53	53	6,5	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	163	170	175	180	185	11,1	Pusat dan Daerah		03
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik							345,9			
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	805	805	805	805	805	9,0	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	4042	4042	4042	4042	4042	222,4	34 Provinsi		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik yang dikembangkan	35	35	35	35	35	9,5	Pusat dan Daerah		04
Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	274	274	274	274	274	46,7	Pusat dan Daerah		04
Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	41	41	41	41	41	0,2	Pusat dan Daerah		04
Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	Jumlah Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	85	85	85	85	85	15,3	Pusat dan Daerah		04
Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	45	45	45	45	45	3,4	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Katolik yang Terbina	Pembinaan bagi Penyuluh Agama Katolik	45	45	45	45	45	6,6	Pusat dan Daerah		04
Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	85	85	85	85	85	15,3	Pusat dan Daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Katolik yang yang suci dan damai	62	62	62	62	62	17,7	Pusat dan Daerah		04
Program Bimbingan Masyarakat Hindu							949,7			
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu							400,9			
Peningkatan Kompetensi Guru	Jumlah Guru yang Meningkatkan Kompetensinya	5712	5712	5712	5712	5712	62,7	Pusat dan Daerah		03
Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	Jumlah Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	30	30	30	30	30	3,5	Pusat dan Daerah		03
Penguatan KKG/MGMP	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penguatan KKG/MGMP	186	186	186	186	186	324,8	Pusat dan Daerah		03
PIP Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	Jumlah Siswa Penerima Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	293	293	293	293	293	1,0	Pusat		03
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Siswa Beragama Hindu	0	34	34	34	34	9,0	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu							295,1			
Internalisasi Dharma Gita	Internalisasi Dharma Gita	1	1	1	1	1	25,3	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu	Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu yang dikembangkan	100	115	115	115	115	11,5	Pusat dan Daerah		04
Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga Sukinah yang mendapat bimbingan	1559	1559	1559	1559	1559	27,2	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Sarati Banten	Jumlah Pembinaan Sarati Banten	1	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Hindu yang suci dan damai	300	300	300	300	300	56,4	Pusat dan Daerah		04
Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS	Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS yang mendapat tunjangan	1700	1700	1700	1700	1700	102,0	34 Provinsi		04
Kelompok Binaan Penyuluh Hindu	Kelompok Binaan Penyuluh Hindu yang ditingkatkan	70	70	70	70	70	2,3	Daerah		04
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	397	397	397	397	397	20,2	Pusat dan Daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu	Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu yang ditingkatkan	1289	1289	1289	1289	1289	12,6	Pusat dan Daerah		04
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu	Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang mendapatkan bantuan operasional	330	330	330	330	330	36,8	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu							253,8			
Beasiswa BIDIK MISI	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa BIDIK MISI	1345	1345	1067	767	467	55,1	Pusat		03
Beasiswa Mahasiswa Miskin	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Mahasiswa Miskin	1135	1135	1135	1135	1135	15,6	Pusat		03
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa PPA	970	970	970	970	970	14,6	Pusat		03
Penelitian yang berkualitas	Penelitian yang berkualitas	325	325	325	325	325	56,3	Pusat		03
Sertifikasi Dosen	Jumlah Dosen Yang Disertifikasi	50	50	50	50	50	0,5	Pusat		03
Penelitian yang mendapat HAKI	Penelitian yang mendapat HAKI	5	5	5	5	5	1,0	Pusat		03
Kerjasama dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	Jumlah Kerjasama dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	4	4	4	4	4	7,5	Pusat		03
Peningkatan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa PTKH	Jumlah Dosen dan Mahasiswa PTKH yang Ditingkatkan Kompetensinya	921	921	921	921	921	40,0	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	398	796	1192	1588	1984	63,1	Pusat		03
Program Bimbingan Masyarakat Buddha							807,9			
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha							288,4			
Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan	Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan	100	100	100	100	100	1,6	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	1182	1182	1182	1182	1182	121,7	34 Provinsi		04
Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan bantuan	44	44	44	44	44	57,2	Pusat dan Daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	35	35	35	35	35	0,4	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	Keluarga Hittasukhaya yang mendapat pembinaan	100	138	190,44	262,8072	362,673936	3,3	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha yang dikembangkan	0	34	34	34	34	0,0	Pusat dan Daerah		04
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	27	27	27	27	27	3,5	Pusat dan Daerah		04
Event Keagamaan Buddha yang terselenggara	Jumlah Event Keagamaan Buddha yang Terselenggara (Swayamvara Tripitaka Gatha/STG)	1	1	1	1	1	25,3	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Buddha yang suci dan damai	0	200	200	200	200	75,5	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha							192,1			
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	1900	1900	1900	1900	1900	71,9	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	1500	1500	1500	1500	1500	48,4	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan	20	20	20	20	20	2,2	Pusat dan Daerah Afirmasi 3T		03
Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Jumlah Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	139500	139500	139500	139500	139500	20,7	Pusat dan Daerah		03
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Peserta Didik yang mendapatkan Pembinaan Karakter	2160	2160	2160	2160	2160	48,9	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha							327,4			
Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	250	250	100	150	100	12,5	Pusat		03
Mahasiswa penerima beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa PPA	75	75	75	75	75	2,0	Pusat		03
Dosen yang tingkatkan kompetensinya	Jumlah Dosen yang ditingkatkan kompetensinya	310	310	310	310	310	8,5	Pusat		03
Penelitian Dosen yang bermutu	Penelitian Dosen yang bermutu	116	116	116	116	116	272,6	Pusat		03
Penelitian Mahasiswa yang bermutu	Penelitian Mahasiswa yang bermutu	150	150	150	150	150	3,1	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	180	360	540	720	900	28,6	Pusat		03
Program Kerukunan Umat Beragama							259,3			
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama							170,4			
Penerapan Regulasi Kerukunan Umat Beragama	Penerapan Regulasi Kerukunan Umat Beragama	1	1	1	1	1	2,5	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	1000	1000	1000	1000	1000	24,1	Pusat dan Daerah		04
Desa Sadar Kerukunan	jumlah Desa Sadar Kerukunan	52	52	52	52	52	13,7	Pusat dan Daerah		04
Operasional SEKBER FKUB Provinsi	SEKBER FKUB Provinsi yang dioperasionalkan	34	34	34	34	34	10,0	Pusat dan Daerah		04
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	SEKBER FKUB Kabupaten/Kota yang dioperasionalkan	512	512	512	512	512	120,1	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu							36,9			
Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	19	19	19	19	19	29,0	Pusat dan Daerah		03
Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama Khonghucu	Jumlah Sarana dan Prasarana	24	24	24	24	24	3,3	Pusat dan Daerah		03
Kompetensi Guru Agama Khonghucu	Jumlah Guru yang Meningkatkan Kompetensinya	0	50	50	50	50	1,8	Pusat dan Daerah		03
Guru Agama Khonghucu Penerima Insentif	Jumlah Guru yang Menerima Insentif	132	132	132	132	132	2,8	Pusat dan Daerah		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu							52,0			
Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu	Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu yang dikembangkan	0	19	19	19	19	0,5	Pusat dan Daerah		04
Tunjangan Penyuluh Honorar Konghucu	Penyuluh Honorar Konghucu yang dapat tunjangan	145	145	145	145	145	10,2	34 Provinsi		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Khonghucu yang suci dan Damai	2	2	2	2	2	41,3	Pusat dan Daerah		04
Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal							51,1			
Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal							17,3			
Register Halal	Register Halal	88000	88000	88000	88000	88000	4,0	Pusat dan Daerah		04
Sertifikat Halal	Sertifikat Halal	220000	220000	220000	220000	220000	4,6	Pusat dan Daerah		04
Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	220000	220000	220000	220000	220000	8,7	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal							16,7			
Stakeholder JPH Yang Terbina	Stakeholder JPH Yang Terbina	60	60	60	60	60	9,1	Pusat dan Daerah		04
Stakeholder JPH Yang Terawasi	Stakeholder JPH Yang Terawasi	60	60	60	60	60	7,6	Pusat dan Daerah		04
Kerja Sama dan Standardisasi Halal							17,0			
Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	18	18	18	18	18	7,1	Pusat dan Daerah		04
Naskah Standardisasi Halal	Naskah Standardisasi Halal	32	32	32	32	32	9,9	Pusat dan Daerah		04
JUMLAH							125.153,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	897,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	268,6
Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	464,1
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	26.655,4
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	3.579,2
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	833,3
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	863,2
JUMLAH	33.561,7

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas							21.747,5			
Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi							2.085,2			
Tenaga kerja yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	382083	400000	400000	400000	425000	2.069,8		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNi	Jumlah skema sertifikasi kualifikasi KKNi	50	50	50	50	50	15,4		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalattas							912,0			
Instruktur pemerintah dan swasta baru	Jumlah instruktur pemerintah dan swasta baru yang dilatih	2160	240	160	160	160	168,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	7693	8890	9620	10350	11080	743,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas							8.069,4			
Pengembangan BLK Komunitas	Jumlah BLK Komunitas yang dikembangkan	2000	500	500	500	500	4.000,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang ditingkatkan kualitas mutu lembaga	1513	1500	1500	1500	1500	378,3	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	433	423	423	424	424	3.358,6	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan/Skill Development Fund	Pengembangan pola pendanaan pelatihan	1	1	1	1	1	28,7	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center	Jumlah pusat pengembangan keahlian	20	22	24	25	25	303,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas							1.121,5			
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri	200000	200000	200000	200000	200000	872,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri	1822	3000	5000	7500	8000	248,7	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas							9.559,4			
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	228820	225000	250000	260000	275000	9.559,4	34 Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja							1.793,5			
Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja							400,2			
Wirausaha baru inkubasi bisnis	Jumlah wirausaha yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis	9000	9270	9550	9835	10130	400,2	34 Provinsi		01
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri							170,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Atase di 12 negara	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri secara prosedural	250000	260000	270000	280000	300000	170,0	UEA, Brunei, Hong kong, Jeddah, Jordan, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Riyadh, Singapura, Taiwan		07
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja							1.132,1			
Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	5000	5250	5513	5788	6078	150,7	34 Provinsi		01
Wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	43340	45057	47782	50171	52680	981,4	34 Provinsi		01
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja							91,2			
Analisis Pasar Kerja pada Sektor Prioritas	Jumlah dokumen analisis pasar kerja pada sektor prioritas	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	35,4	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Layanan Informasi Pasar Kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, badan job portal swasta	Jumlah informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, dan badan job portal swasta	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	55,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							27,4			
Peningkatan Penerapan Pengupahan							27,4			
Perusahaan yang mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan struktur skala upah	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang telah menerapkan struktur dan skala upah dan mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan pengupahan	500	700	1000	1200	1500	27,4	Pusat		01
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan							128,7			
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak							16,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Jumlah Pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	9000	9500	10000	-	-	16,0	Pusat		03
Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja							50,7			
Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	5000	5000	5000	5000	5000	50,7	34 provinsi		01
Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							62,0			
Perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja	Jumlah perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja	8000	8400	8820	9261	9724,05	62,0	34 provinsi		01
JUMLAH							23.697,1			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN SOSIAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	2.015,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	139,6
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	2.216,0
Program Rehabilitasi Sosial	3.889,5
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	157.247,9
Program Pemberdayaan Sosial	2.056,7
Program Penanganan Fakir Miskin	144.816,5
JUMLAH	312.381,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN SOSIAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							1.051,3			
Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial							1.051,3			
Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	107200000	109600000	110700000	111800000	112900000	419,6	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Tersedianya Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	6	6	6	6	6	631,7	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							1.040,9			
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)							559,7			
Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	12000	12000	12000	12000	12000	559,7	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial							481,2			
Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang telah dibina/dikembangkan profesinya	27695	32000	35000	38000	40000	170,9	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	189	195	200	210	220	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	200	214	221	228	195	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang	55	55	55	55	55	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	100	100	100	100	100	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Anak	300	300	300	300	300	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	50	100	100	150	150	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	1200	1200	1200	1200	1200	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	240	288	346	415	498	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang	50	100	100	100	100	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	44	44	44	44	44	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial anak	120	140	150	170	109	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	110	250	350	450	520	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Telah Mendapatkan Akreditasi	5000	12000	18000	20000	23000	310,3	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Program Rehabilitasi Sosial							3.209,0			
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza							1.192,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	21714	25000	27000	28000	30000	0,0	34 Provinsi		03
Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	21714	25000	27000	28000	30000	1.192,6	34 Provinsi		07
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas							1.001,8			
Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	Jumlah Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra (eksemplar)	47000	50000	52000	53000	55000	19,7	BLBI Abiyoso (Jawa Barat)		04
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual	Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	45000	45000	46000	46000	46000	982,1	34 Provinsi		03
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang							5,6			
Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	50	50	50	50	50	5,6	34 Provinsi		07
Rehabilitasi Sosial Anak							365,0			
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi anak	Anak Balita, Anak/Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	27000	27000	27500	27500	27500	365,0	34 Provinsi		03
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia							644,0			
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi lanjut usia	Lanjut Usia Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	30200	31000	32000	33000	35000	644,0	34 Provinsi		03
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							156.298,6			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam							1.367,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana	Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	163500	163500	163500	163500	163500	595,1	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	247404	250000	255000	257000	260000	772,4	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihan Sosial	Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana	500	2000	2000	2000	2000	0,0	Pusat		06
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	163500	163500	163500	163500	163500	0,0	34 Provinsi		06
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	247404	250000	255000	257000	260000	0,0	34 Provinsi		06
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial							508,8			
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	10000	10000	10000	10000	10000	54,0	34 Provinsi		07
Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial	Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	43018	44000	44000	44000	44000	301,0	34 Provinsi		03
Korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Korban bencana sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan	120000	121000	121000	121000	121000	153,8	34 Provinsi		07
Jaminan Sosial Keluarga							154.422,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	154.422,2	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	1. Pemulihan pasca bencana daerah terdampak di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda; 2. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T)	02, 03
Program Pemberdayaan Sosial							1.252,0			
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat							840,7			
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Dunia Usaha yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	170	220	250	300	350	26,2	34 Provinsi		03
Pengembangan Sistem layanan dan rujukan terpadu	Kabupaten/ Kota yang mengembangkan SLRT	220	300	380	460	514	401,7	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan Sosial	360	600	760	920	1028	66,6	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang memperoleh peningkatan kapasitas	6000	6000	6000	6000	6000	57,3	34 Provinsi		03
Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan	7201	7201	7201	7201	7201	288,9	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)							411,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan	2667	3000	3500	4000	4500	411,3	Pusat		03
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)	50	50	50	-	-	0,0	Kab. Nias Selatan		02
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)	90	90	50	-	-	0,0	Kab. Sumba Timur, Belu, Kupang, Sumba Barat Daya		02
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan	-	70	70	70	70	0,0	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Toiikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Program Penanganan Fakir Miskin							144.440,4			
Penanganan Fakir Miskin Wilayah I							50.979,8			
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	45000	45000	45000	45000	45000	648,9	34 Provinsi		03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6000	6000	6000	6000	6000	477,2	34 Provinsi		05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	5513785	5513785	5513785	5513785	5513785	49.853,7	11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	02, 03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah II							48.458,0			
KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KUBE)	KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	1600	1700	1800	1900	2000	0,0	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	45000	45000	45000	45000	45000	644,3	34 Provinsi		03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6000	6000	6000	6000	6000	477,2	34 Provinsi		05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	5238377	5238377	5238377	5238377	5238377	47.336,4	12 Provinsi; 151 Kab/Kota		03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III							45.002,6			
Bantuan Kelompok Usaha Bersama Bagi Fakir Miskin	KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	1000	1100	1200	1300	1300	0,0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	4847877	4847877	4847877	4847877	4847877	43.861,7	11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una,	- Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T), - Wilayah Adat Papua : Laa Pago dan Domberay	02, 03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua,		
								Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika		
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	45000	45000	45000	45000	45000	661,4			03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6000	6000	6000	6000	6000	479,5			05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bantuan Sosial Bangunan Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	1000	1000	1000	1000	1000	0,0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	225	225	225	225	225	0,0	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una		02
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	75	75	75	75	75	0,0	Kab. Lombok Utara		02
JUMLAH							307.292,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	1.709,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	289,3
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	447,9
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	395,3
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	8.779,6
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	7.355,5
Program Planologi dan Tata Lingkungan	2.313,8
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	2.244,0
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	2.480,1
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.626,8
Program Pengendalian Perubahan Iklim	1.303,6
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	3.204,5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5.469,2
JUMLAH	39.619,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK							37,5			
Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan							37,5			
Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	20	20	20	20	20	11,4	pusat		06
Dokumen Penerapan Standar	Jumlah Dokumen Penerapan Standar	25	25	25	25	25	9,9	pusat		06
Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	10	15	20	25	7,6	pusat		06
Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	5	15	20	30	40	7,6	pusat		06
Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)	Jumlah Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	2	2	2	2	2	1,0	pusat		06
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan							337,2			
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan							28,1			
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan	5	10	10	10	10	12,1	Pusat		06
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati	Jumlah KHDTK yang mengimplementasikan pilot IPTEK hayati	0	2	2	2	2	16,0	Pusat		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan							61,3			
Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK	Jumlah data spesies kayu pada aplikasi AIKO KLHK	0	1050	1150	1250	1350	50,0	Pusat		06
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan nilai tambah hasil hutan	5	10	10	10	10	11,3	Pusat		06
Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan							106,6			
Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan	Jumlah Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang Dibangun	1	0	0	0	0	74,0	Provinsi Banten	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Sertifikasi laboratorium lingkungan hidup	Jumlah sertifikasi laboratorium lingkungan hidup daerah yang diterbitkan	-	6	6	6	6	12,0	6 wilayah pulau		06
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan	3	5	5	5	5	20,6	Pusat		06
Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Kehutanan dan Penanganan Perubahan Iklim							11,7			
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan Perubahan Iklim	5	10	10	10	10	11,7	Pusat		06
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)							129,4			
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan tematik daerah	15	30	30	30	30	65,4	Pusat		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati	Jumlah KHDTK yang mengimplementasikan pilot IPTEK hayati	0	8	8	8	8	64,0	Pusat		06
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan							284,2			
Peningkatan Usaha Hutan Produksi							50,0			
Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll)	Jumlah produksi hasil hutan kayu	47	50	55	57	60	50,0			01
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan							21,0			
Pengembangan industri kehutanan berbasis kayu	Jumlah Produk Kayu Olahan Bersertifikat Legalitas Kayu	45	45	45	45	45	6,2			01
Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu melalui Pembukaan Kran Ekspor Log Terbatas	1	1	1	1	1	4,8		9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan industri primer kehutanan berbasis nonkayu	Jumlah industri primer kehutanan berbasis nonkayu	6	6	7	7	7	10,0			01
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi							84,7			
KPH yang masuk kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk kategori Maju	10	30	50	70	100	84,7			01, 06
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)							128,5			
Produksi HHBK	Jumlah Produksi HHBK	353000	375000	400000	425000	450000	82,5			01
Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi	Luas penanaman di hutan produksi	310000	378000	403000	428000	453000	46,0			01, 06
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung							7.489,9			
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat							6.669,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	56000	40000	30000	25000	20000	5.740,5	33 Provinsi	-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana -Pemulihan 4 (empat) DAS kritis -Ibu Kota Negara (IKN)	01, 06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	3000	5000	5000	5000	5000	502,0	33 Provinsi	-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana -Pemulihan 4 (empat) DAS kritis -Ibu Kota Negara (IKN)	01, 06
Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove/pantai	1000	1250	1250	1250	1250	167,3	33 Provinsi		06
Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	Jumlah kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya	34	34	34	34	34	122,1	34 provinsi		06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	1500	1500	1500	1500	1500	137,8	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung							186,2			
KPH yang masuk kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk kategori Maju	10	20	30	40	50	90,0			01, 06
Produksi HHBK	Jumlah Produksi HHBK	3000	3000	3000	3000	3000	96,2			01
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS							534,0			
Pengembangan Sistem Data dan Informasi DAS Realtime	Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS Realtime yang dikembangkan	1	1	1	1	1	194,0	34 provinsi		06
Peningkatan Kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS	Jumlah Lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34	34	34	34	34	340,0	34 provinsi		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat							100,0			
Pengendalian Kerusakan Danau	Jumlah danau yang dilakukan pengendalian kerusakannya	15	15	15	15	15	100,0			01
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							7.173,5			
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam							1.894,8			
Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	70	70	70	70	70	1.731,3	Pusat dan Daerah		01, 06
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	552	552	552	552	552	122,1			01, 06
Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	4	4	4	5	5	5,0	Pusat		06
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Luas Kawasan IKN yang Dinventarisasi dan Verifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (Ha)	180,64	180,64	180,64	-	-	36,4	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pengelolaan Kawasan Konservasi							4.547,0			
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	950,0			01, 06
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	500	1500	2500	3500	4500	2.651,3			01, 06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderawasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	15	15	15	15	15	850,0			01
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (Ha)	1200	1200	1200	1200	1200	95,7	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Konservasi Spesies dan Genetik							621,8			
Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	10	10	10	10	10	493,2	Pusat dan Daerah		06
Pengembangan entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1000	1000	1000	1000	1000	6,8	Pusat dan Daerah		06
Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun	5	5	5	5	5	100,0	Medan, Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Ambon, Manado, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Jayapura		06
Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit)	1800	1800	1800	1800	1800	6,8	Pusat		01
Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial							109,9			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11	22	33	44	55	54,9		01	
Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	11	22	33	44	55	54,9		06	
Program Planologi dan Tata Lingkungan							2.249,0			
Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan							2.073,7			
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	65	65	65	65	65	61,0	34 Provinsi	01, 06	
Terlaksannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	130000	600000	600000	600000	600000	929,0	Pusat	03	
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	1	1,6	1	0	0	260,0		01, 06	
Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	4	8,5	9	9	3	780,0		06	
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	175000	175000	175000	-	-	43,7	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN) 02	
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor							128,6			
Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	7	7	8	7	23,1	34 provinsi	06	
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif	7	10	8	6	3	88,4		01, 06	
KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya tampung	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya tampung	30	30	30	30	30	5,0	34 provinsi	06	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN	1	-	-	-	-	12,2	Pusat	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan							46,7			
Penguatan Sistem Kajian Dampak Lingkungan serta Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan)	Pengembangan dan penerapan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan (sistem), Penguatan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja sistem kajian dampak lingkungan (Prov)	3	3	3	3	3	46,7	34 provinsi		06
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM							2.144,4			
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK							306,6			
Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak	Jumlah SDM LHK ditingkat tapak yang kompeten	2310	3210	3210	3210	3210	75,7			01
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	7000	7000	7000	7000	7000	230,8		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan							1.240,9			
Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	472	473	473	473	473	628,0	SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis SKKNI	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	472	473	473	473	473	612,9	SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan							203,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	518	730	840	960	1080	140,0	34 provinsi		06
Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya)	10	20	30	40	50	6,2			03
Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat	Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi	0	160	180	210	250	56,9	34 provinsi		03
Peningkatan Penyuluhan							393,8			
Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat	Jumlah KTH Mandiri	100	200	300	400	500	120,8			03
Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi).	5000	6000	6500	7000	7500	273,0			03
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan							2.198,3			
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial							648,4			
Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan	500000	1000000	1250000	750000	500000	648,4			03
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat							1.550,0			
Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok pengelola kawasan hutan yang meningkat kinerjanya	2077	3150	3600	3300	3250	1.388,6			03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kemitraan investasi/usaha	Jumlah mitra usaha perhutanan sosial (mitra)	125	150	175	200	225	46,4		03	
Industri nilai tambah produk	jumlah sentra pengelolaan produk unggulan (sentra industri kecil)	14	14	14	14	14	52,5		03	
Pemasaran/Promosi produk perhutanan sosial	Jumlah fasilitasi pemasaran produk perhutanan sosial (kelompok usaha)	50	50	50	50	50	62,5		03	
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan							3.470,6			
Pencegahan dan Pengamanan Hutan							1.576,9			
Operasi pengamanan Kawasan Hutan	Jumlah Operasi pengamanan Kawasan Hutan	100	130	140	160	180	548,4	33 provinsi	06	
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	110	250	300	380	400	1.028,6	34 provinsi	06	
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup							330,6			
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	46	102	112	122	140	330,6	Pusat	06	
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi							667,6			
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK	1000	1500	1700	1950	2100	489,2	Pusat	06	
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	550	700	800	900	178,5	Pusat	06	
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan							895,4			
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	173	285	315	350	400	583,6	Pusat	06	
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	210	500	600	750	1000	311,7	Pusat	06	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengendalian Perubahan Iklim							1.095,8			
Mitigasi Perubahan Iklim							51,3			
Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline	23,56	23,56	23,58	25,24	25,25	51,3	34 provinsi		06
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan							1.044,5			
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla	1200	1200	1200	1200	1200	865,5	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan		06
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pelaksanaan pemadaman udara /pemantauan dari udara	170	170	170	170	170	179,0	34 provinsi		06
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3							2.987,2			
Pengelolaan B3							70,1			
Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	5	5	5	5	70,1	25 provinsi		06
Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3							549,2			
Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	6	7	7	7	549,2	32 provinsi (diutamakan kota ibukota provinsi)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06
Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3							593,2			
Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah non-institusi yang terpulihkan	10000	20000	20000	20000	30000	560,0			06
Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan	250000	200000	250000	200000	200000	33,2			06
Pengelolaan Sampah							1.774,8			
Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah	5,64989887	6,22516131	6,811364	7,14407293	7,4827549	100,9	34 provinsi		06
Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah	19,2610189	19,1942474	19,1242143	19,0508611	18,9741285	673,9	34 provinsi		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	Tersedianya fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	0	1	1	1	1	1.000,0	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan							5.249,2			
Pengendalian Pencemaran Udara							269,6			
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS	10	25	26	26	27	249,1	Tersebar	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	1668	2625	3000	3375	3750	20,5	34 provinsi		06
Pengendalian Pencemaran Air							1.385,0			
Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum	4	10	20	20	20	124,6	Sungai Citarum		06
Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu	71	148	157	113	90	889,6	15 DAS prioritas pemulihan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	1668	2625	3000	3375	3750	75,8	34 provinsi		06
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air	49	50	50	50	50	265,5	14 DAS Prioritas		06
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)	-	33	40	60	60	29,5	Seluruh provinsi		05, 06
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut							168,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	4	5	6	8	10	37,9	34 provinsi		06
Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya	34	34	34	34	34	90,0	34 provinsi		06
Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	20	25	30	40	50	10,2	34 provinsi		06
Pemantauan Sampah Laut dan Coastal Clean Up	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up	40	50	60	70	80	25,2	34 provinsi		06
Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut	2	2	2	2	2	5,5	Batam, Bintan		06
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka							392,5			
Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	77,5	80	90	90	90	381,1	4 provinsi		06
Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	80	85	90	110	113	11,4	34 provinsi		06
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut							3.033,3			
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300000	300000	300000	300000	300000	1.858,7	7 provinsi		06
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1800	35000	35000	35000	35000	1.135,1	12 provinsi		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	75	75	75	75	75	18,4	Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.		06
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi	60	60	60	60	60	14,7	Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat		06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	300	350	400	450	500	6,5	34 provinsi		06
JUMLAH							34.716,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	1.744,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	265,6
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.656,7
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.266,0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.012,0
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.321,3
Program Pengelolaan Ruang Laut	2.569,6
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.715,5
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.452,7
JUMLAH	27.004,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP							8,3			
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri							8,3			
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan KSST Bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	2	2	2	8,3	Pusat		07
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							3.837,3			
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							1.070,4			
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	25200	26000	27000	28000	30000	289,3	34 Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	01
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	41000	42000	43000	44000	45000	543,6	34 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terstandar	7	7	7	7	10	237,5	Tegal, Banyuwangi, Ambon, Medan, Sukamandi, Bitung, Palembang		01
Pendidikan Kelautan dan Perikanan							1.901,5			
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	17	17	17	17	17	34,4	14 UPT	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (Orang)	Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Berkompeten (orang)	8293	9173	10633	12286	13115	1.155,8	19 UPT	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan	21	22	22	22	22	711,3	19 UPT	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan							22,1			
Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	6	6	7	7	7	22,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan							35,3			
Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	6	6	6	6	6	35,3	Jakarta Utara		01
Riset Perikanan							445,0			
Data dan/atau Informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	11	11	11	11	11	137,5	11 WPP	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Teknologi Hasil Riset Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan	23	30	30	30	30	105,2	5 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	10	12	12	12	12	170,3	4 Provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	8	10	12	14	14	32,1	15 PUD		01
Riset Kelautan							363,0			
Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	8	10	10	12	12	25,0	34 provinsi		06
Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	2	2	3	3	3	10,0	11 WPP		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	7	7	7	7	7	207,2	7 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	500	500	500	500	500	87,9	BROL-Perancak		01
Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar	Jumlah Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar	1	1	1	1	1	32,9	BROL-Perancak		01
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							3.300,5			
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan							344,9			
Kapal perikanan bantuan yang terbangun	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun	30	50	70	90	110	183,4	34 Provinsi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Beraraf Internasional	01
Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun	Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun	500	750	1000	1250	1500	150,5	34 Provinsi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Beraraf Internasional	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki	4	4	4	4	4	11,0	Kab. Maluku Tenggara Barat		02
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan							2.416,0			
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera	7	7	7	7	7	199,7	7 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera	80	81	82	83	84	127,9	7 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara	17	18	19	20	21	326,3	21 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara	80	81	82	83	84	132,9	21 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai	12	3	4	5	6	423,7	18 lokasi		01
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	1	2	3	4	5	444,5	15 lokasi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional	-	3	3	3	3	750,0	3 lokasi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke	4	4	4	4	5	11,0	Kab. Merauke	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan							393,7			
Alokasi Izin yang Diterbitkan	Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan	10500	10600	10650	10700	10750	16,0	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah	34	34	34	34	34	84,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang tersalurkan	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	150000	120000	120000	120000	120000	107,7	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	2000	2000	2000	2000	2000	34,3	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif)	2250	2400	2550	2750	3000	16,6	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	Jumlah fasilitas kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata	40	40	40	40	40	15,0	25 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna	4	4	4	4	4	11,0	Kab. Natuna		02
Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan yang difasilitasi sertifikasinya	Jumlah fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan	15000	15000	15000	15000	15000	27,8	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	Jumlah Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	2900	4000	5000	6000	7000	26,3	34 Provinsi		01
Kampung Nelayan Maju	Jumlah Kampung Nelayan Maju	-	10	10	15	20	55,0	20 lokasi		01
Pengelolaan Sumber Daya Ikan							145,9			
Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber dayanya	Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (Persen)	60	70	80	90	100	12,7	11 WPP		01
Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	12000	15000	16000	18000	20000	21,7	UPT Pusat dan UPT Daerah	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	11	11	11	11	101,1	11 WPP	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik	4	4	4	4	4	10,4	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							3.292,1			
Pengelolaan Perbenihan Ikan							1.057,2			
Produksi induk unggul	Jumlah produksi induk unggul (ekor, non kumulatif)	1000000	1100000	1200000	1300000	1400000	327,1	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Rote Ndao yang mandiri (skala 1-5)	4	4	5	5	5	18,5	Rote Ndao		02
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	48960722	50000000	51000000	52000000	54000000	137,1	34 provinsi		01
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	158520000	159000000	160000000	161000000	162000000	90,5	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	8277000	9000000	9500000	10000000	10500000	219,8	34 provinsi		01
Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat	200000	350000	400000	450000	500000	73,6	18 provinsi		01
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	80	110	120	140	150	42,6	18 provinsi		01
Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Ikan Skala Rakyat yang bersertifikat	Jumlah unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi	60	70	80	90	100	148,0	33 provinsi		01
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan							1.480,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	38	100	110	120	125	552,9	10 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan	Jumlah Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya Berkelanjutan	10	20	30	40	50	302,5	10 Provinsi		01
Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan	Jumlah monitoring residu	10000	14000	18000	22000	26000	256,0	24 Provinsi		01
Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	15	15	15	15	15	369,1	10 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan							566,3			
Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi	Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya	5000	6000	7500	9000	10000	39,1	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	551	800	900	1000	1100	506,7	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (Bidang)	Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya	13000	13000	13000	13000	13000	8,5	23 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang Mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha	4	4	4	4	5	12,0	Kab. Sumba Timur		02
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan							188,3			
Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan pakan mandiri	91	101	110	120	130	177,0	20 provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang	4	4	4	4	5	11,3	Kota Sabang		02
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							1.611,9			
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan							586,7			
Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan	Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan	31	35	35	40	45	385,3	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan	Jumlah Sarana Distribusi hasil perikanan yang disediakan	41	41	41	45	50	171,9	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika	4	5	5	5	5	29,6	Kab. Mimika		02
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							803,0			
Sarana dan Prasarana Pemasaran yang dibangun	Jumlah Pasar Ikan yang dibangun	4	2	2	2	2	151,8	10 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
	Jumlah Sentra Kuliner yang dibangun	2	10	10	10	10	0,0	10 Provinsi		01
Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	Jumlah Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang dibangun	0	3	3	3	3	450,0	3 Provinsi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Keikutsertaan dalam Promosi Skala internasional	Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (USD Juta)	250	275	300	325	350	63,7	5 negara	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah lokasi promosi Gemarikan	34	34	34	34	34	137,5	34 Provinsi		03
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan							146,0			
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (dokumen)	2250	2500	2750	3000	3250	54,6	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan yang disediakan	400	500	500	500	500	57,0	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	2	2	2	2	2	34,4	5 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan							76,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	20	30	35	40	45	9,5	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pelaku usaha yang difasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	1510	1620	1730	1840	1950	30,7	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penumbuhan wirausaha KP	Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan	200	200	200	200	200	11,0	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sentara Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak	4	5	5	5	5	25,0	Kab. Biak-Numfor		02
Program Pengelolaan Ruang Laut							2.084,4			
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut							593,1			
Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (ha, kumulatif)	10000000	14500000	17500000	19000000	20000000	143,6	34 Provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	11,1	Kab. Kepulauan Mentawai		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luasan kawasan konservasi baru (ha)	700000	800000	900000	900000	900000	39,9	9 Provinsi		06
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Luas Kawasan konservasi yang operasional (ha, kumulatif)	10000000	14500000	17500000	19000000	20000000	307,7	46 Lokasi		06
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	5	5	5	5	5	60,0	Pusat		06
	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	0,0	Pusat		06
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	30,8	Pusat		06
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							765,5			
Lahan Garam yang difasilitasi	Jumlah lahan garam yang difasilitasi (ha)	600	750	750	750	750	381,0	12 Provinsi		01
Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat	Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	70	100	100	100	100	170,7	12 provinsi		01
	Jumlah sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun	4	2	2	2	2	80,0	4 provinsi		01
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	Jumlah Kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya	4	5	5	5	5	17,9	Daerah		01, 06
Pengelolaan Biofarmakologi	Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun	2	2	2	2	2	20,0	10 Provinsi		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT	12	14	16	18	20	85,0	18 Provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud	4	4	4	4	4	11,0	Kepulauan Talaud		02
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							583,4			
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya	7	7	7	7	7	186,1	8 Provinsi		02
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (skala 1-5)	4	4	4	4	4	14,1	Kab. Morotai		02
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	12	12	12	12	12	130,0	Daerah		06
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	187,4	60 Lokasi		06
Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	5	12	18	24	30	30,0	7 provinsi		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	8	6	6	5	5	35,8	27 Lokasi		06
Perencanaan Ruang Laut							142,4			
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut	10	12	14	16	18	41,5	34 Provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	12	27	26	40	46	0,0	34 Provinsi		01
Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K	13	24	29	24	31	28,0	31 Provinsi		01
Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	6	6	4	0	0	19,7	10 perairan laut		01
Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan	25	28	19	9	5	41,9	75 kawasan		01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	11,3	Kab. Maluku Barat Daya		02
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							4.949,7			
Pemantauan dan Operasi Armada							4.888,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Operasional Kapal Pengawas	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	2.470,4	Pusat		07
Operasional Pesawat Patroli	Jumlah hari operasi pesawat patroli	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180,7	Pusat		07
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah hari operasional speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	279,8	Pusat dan Daerah		07
Kapal pengawas yang dibangun	Jumlah kapal pengawas yang dibangun	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	846,7	Pusat		07
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	Jumlah bangunan/pos pengawasan yang tersedia	18 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	259,0	Pusat		07
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	69,0	Pusat		07
Speed Boat Pengawas yang dibangun	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun	11 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	175,4	Pusat		07
Armada Pengawasan yang siap operasi	Jumlah armada pengawasan yang siap operasional	103 Unit	116 Unit	129 Unit	142 Unit	155 Unit	575,0	Pusat dan Daerah		07
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	1.010 Kelompok	1.050 Kelompok	1.100 Kelompok	1.150 Kelompok	1.200 Kelompok	32,8	Pusat dan Daerah		06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan							18,8			
Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	35	40	45	50	55	18,8	Daerah		06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan							42,1			
Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	17100	21500	21750	22000	22350	42,1	Pusat dan Daerah		01
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							822,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Karantina Ikan							459,2			
Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI	100	100	100	100	100	136,1	34 Provinsi	01	
Sarana dan prasarana pengawasan karantina	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan karantina	25	28	30	32	32	296,8	10 Provinsi	01	
Laporan penindakan pelanggaran perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan	Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan yang diselesaikan	95	95	95	95	95	26,3	34 Provinsi	01	
Pengendalian Mutu							275,9			
Sarana dan prasarana pengujian mutu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu	33	35	37	38	38	148,8	34 Provinsi	01	
Operasional pengawasan mutu hasil perikanan	Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor	98	98	98	98	98	113,9	34 Provinsi	01	
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	200	200	200	200	200	13,3	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							87,4			
Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	150	150	150	150	150	87,4	34 Provinsi	01	
	Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium (SNI 8340:2016)	7	7	7	7	7	0,0	34 Provinsi	01	
	Jumlah Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyusapan SNI ISO 37001:2016	3	3	3	3	3	0,0	34 Provinsi	01	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)	7	7	7	7	7	0,0	34 Provinsi		01
JUMLAH							19.906,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	1.164,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	2.871,0
Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	652,1
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	2.743,5
Program Pembinaan Konstruksi	4.402,5
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	139.740,0
Program Penyelenggaraan Jalan	290.514,6
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	195.311,8
Program Pengembangan Perumahan	54.373,0
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1.163,6
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.186,9
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	1.514,6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.922,8
JUMLAH	701.560,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR							68,0			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air							49,5			
Penyusunan pedoman rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana	Jumlah dokumen pedoman peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan (dokumen)	-	2	-	-	-	2,0	Terpusat		05
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)	-	2	2	2	2	40,0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balat, Palembang, Bengkulu,		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Cilegon, Serang, Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Palopo, Konawe, Gorontalo, Sorong, Bandung, Jabodetabek		
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	7,5	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua		05
Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman							18,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyusunan pedoman rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana</i>	<i>Jumlah dokumen pedoman peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi, geologi, dan linakunaan (dokumen)</i>	-	2	-	-	-	2,0	<i>Terpusat</i>		
<i>Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami (Kab./Kota)</i>	1	1	1	1	1	7,5	<i>Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua</i>		05
<i>Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi (Kab./Kota)</i>	1		1		1	9,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuefaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogya</i>		05
Program Pembinaan Konstruksi							90,0			
<i>Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi</i>							90,0			
<i>Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana</i>	<i>Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana (wilayah sungai)</i>	10	20	20	20	20	90,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis</i>		05
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman							128.722,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							10.442,9			
<i>Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>Jumlah luasan kawasan permukiman yang dibangun dan dikembangkan (Hektar)</i>	258	742	1.000	1.000	1.000	5.459,6	34 Provinsi		05
<i>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat</i>	<i>Jumlah luasan permukiman yang dibangun infrastruktur berbasis masyarakat (Hektar)</i>	963	5.037	-	-	-	4.703,3	34 Provinsi		05
<i>Penyediaan Infrastruktur Permukiman dalam Rangka Peremajaan</i>	<i>Jumlah kawasan yang disediakan infrastruktur permukiman dalam rangka peremajaan (kawasan)</i>	-	4	6	8	10	280,0	Kawasan Perkotaan		05
Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan							500,0			
<i>Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>	<i>Jumlah NSPK terkait penataan bangunan dan lingkungan (NSPK)</i>	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		05
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan</i>	<i>Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)</i>	48	48	48	48	48	480,0	Kawasan Metropolitan		05
Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman							82.846,2			
<i>SPALD-T Skala Kota/Regional</i>	<i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)</i>	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	18.682,0	28 Kab/Kota	<i>Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</i>	05
<i>SPALD-T Skala Permukiman</i>	<i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)</i>	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663	25.894,0	168 Kab/Kota	<i>Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</i>	05
<i>SPALD-S Skala Kota (IPLT)</i>	<i>Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)</i>	24	77	101	152	151	4.435,0	374 Kab/Kota	<i>Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</i>	05
<i>Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)</i>	<i>Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)</i>	39	46	46	46	47	25.391,0	224 kab/kota		05
<i>Sistem Pengelolaan Drainase</i>	<i>Luas (hektar) yang difasilitasi sistem pengelolaan drainase</i>	6	-	-	-	-	5,8	Kota Jayapura		05
<i>Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Alat Berat</i>	<i>Jumlah alat berat di TPA (unit)</i>	39	46	46	46	47	1.120,0	224 kab/kota		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah kapasitas sampah yang dikelola unit TPS3R (ton/hari)	189	189	377	565	565	691,0	120 kab/kota		05
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)	7	8	15	23	22	5.844,0	55 kab/kota		05
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	-	-	1	1	1	15,0	Kota Malang, Kota Palembang, dan DKI/ Kota Bogor	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	05
Implementasi Dokumen SSK (APBN)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)	66	66	62	62	52	308,0	Seluruh provinsi	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	05
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)	87	87	87	88	88	218,5	437 kab/kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	05
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBN)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)	83	83	83	84	84	208,5	417 kab/kota		05
Penyusunan Rancangan NSPK	Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun (unit)	4	4	4	4	4	16,0	Pusat	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	05
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	66	66	64	58	54	15,4	Pusat	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	05
NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah NSPK yang tersusun (unit)	1	1	-	-	-	2,0	Pusat	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	05
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							34.556,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan dan Peningkatan SPAM</i>	<i>Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/ Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota , SPAM berbasis Masyarakat, SPAM Regional (pd)</i>	2.214	2.827	3.440	4.052	4.665	25.411,3	Seluruh Provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
<i>Perluasan SPAM</i>	<i>Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)</i>	87.560	13.140	175.120	218.899	262.679	8.028,9	Seluruh Provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum di kabupaten/kota (kab/kota)</i>	509	509	509	509	509	1.055,0	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
<i>Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Peraturan pengembangan SPAM yang tersusun (NSPK)</i>	3	4	4	3	2	11,2	Pusat	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
<i>Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)</i>	<i>Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) (kab/kota)</i>	101	102	102	102	102	50,0	508 kab/kota sebagai pemenuhan akses dasar air minum dan Provinsi DKI Jakarta	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum							376,9			
<i>Peningkatan Kerjasama Investasi Penyelenggara SPAM</i>	<i>Jumlah BUMN/ BUMD yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi (BUMN/ BUMD)</i>	14	11	21	21	23	76,5	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
<i>Peningkatan Kinerja BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM</i>	<i>Jumlah BUMN/ BUMD yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja BUMN/ BUMD (BUMN/ BUMD)</i>	30	32	32	32	30	261,4	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
<i>Penyusunan Business Plan pada BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM</i>	<i>Jumlah BUMN/ BUMD yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Business Plan (BUMN/ BUMD)</i>	12	12	12	12	12	39,0	Seluruh provinsi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
Program Penyelenggaraan Jalan							195.194,5			
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional							72.944,3			
<i>Jalan Akses pusat pertahanan Natuna</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	2	15	15	8	8	1.099,0	Kepulauan Riau		05
<i>Jembatan Klarik Cs</i>	<i>Jembatan yang dibangun (lokasi)</i>	1	-	-	-	-	107,3	Kepulauan Riau		05
<i>Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Ta Berikat)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	10	12	80,0	Kepulauan Riau		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan lintas Bintan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	25	-	250,0	Kepulauan Riau		05
Jalan perbatasan Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	-	-	-	-	98,4	Kalimantan Barat		05
Jalan perbatasan Kaltara	Panjang jalan yang dibangun (km)	47	70	36	19	19	1.933,3	Kalimantan Utara		05
Jalan perbatasan NTT	Panjang jalan yang dibangun (km)	33	50	45	45	5	1.256,0	Nusa Tenggara Timur		05
Jalan Trans Kepulauan NTT	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	7	-	-	30,0	Nusa Tenggara Timur		05
Jalan Lintas Barat Aceh	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	10	100,0	Aceh		05
Jalan Lintas Barat Jambi	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	15	-	85,0	Jambi		05
Jalan Lintas Pantura Banten	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	150	-	-	85,0	Banten		05
Jalan Penggantian Jembatan Pantura Banten (cs)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	75,0	Banten		05
Jalan Lintas penghubung Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	29	57	57	57	2.330,7	Kalimantan Barat		05
Jalan Lintas Penghubung Sumsel	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	5	10	-	111,0	Sumatera Selatan		05
Jalan Lintas Penghubung Sumut	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	10	10	6	6	475,6	Sumatera Utara		05
Jalan Lintas Selatan Kalsel	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	7	8	-	-	348,0	Kalimantan Selatan		05
Jalan Lintas Tengah Aceh	Panjang jalan yang dibangun (km)	32	11	11	11	11	1.790,4	Aceh		05
Jembatan Sp. Uning - Takengon	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	140,0	Aceh		05
Jalan Lintas Tengah Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	2	-	-	11,8	Jawa Timur		05
Jalan Lintas Tengah Kalteng	Panjang jalan yang dibangun (km)	20	13	13	6	6	562,6	Kalimantan Tengah		05
Jalan Lintas Timur Riau	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	20	193,0	Riau		05
Jalan Lintas Timur Sumatera	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	65	387,0	Lampung		05
Jalan Lintas Utara Bali	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1.083	1.083	933	-	1.050,0	Bali		05
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	2	5	-	222,2	Bali		05
Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	80,0	Bali		05
Jalan Pansela Jawa Tengah	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	8	10	15	13	496,0	Jawa Tengah		05
Jalan Pansela Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun (km)	38	54	60	60	36	2.496,6	Jawa Timur		05
Jalan Pansela Yogyakarta	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	18	6	6	-	495,1	Yogyakarta		05
Jalan Selingkar Wilis Ring 2 dan Radial (APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	19	48	75	75	45	786,0	Jawa Timur		05
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)	786	-	-	-	-	1.218,7	Sulawesi Tengah		05
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	325,0	Sulawesi Tengah		05
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan dampak bencana Palu	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	23,2	Sulawesi Tengah		05
Jalan Penghubung lintas timur dan barat Sumatera	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	8	15	-	200,0	Bengkulu		05
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR)	Panjang jalan yang dibangun (km)	15	20	25	15	5	856,0	Gorontalo		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Gorontalo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	20	20	-	-	960,0	Gorontalo		05
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Jabar	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	-	-	-	-	136,6	Jawa Barat		05
Jalan Perbatasan Kaltim	Panjang jalan yang dibangun (km)	63	55	32	6	6	1.580,3	Kalimantan Timur		05
Jalan Trans Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	59	59	39	39	39	3.155,0	Papua	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	05
Jalan Trans Papua Barat	Panjang jalan yang dibangun (km)	51	51	51	51	51	2.768,6	Papua Barat	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	05
Jembatan di Jalan Trans Papua	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	3.140	3.230	2.680	2.325	2.389	7.245,6	Papua	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	
Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	887	967	967	887	887	2.206,5	Papua Barat	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	
Jalan Perbatasan Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	6	6	6	6	200,0	Papua		05
Jembatan Pulau Lembeh (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	0,0	Sulawesi Utara		05
Jembatan Samota	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	-	-	-	-	150,0	Nusa Tenggara Barat		05
Jembatan Batam-Bintan (Potensi/ Penyiapan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	10,0	Kepulauan Riau		05
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi/ Penyiapan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	10,0	Sumatera Selatan		05
Jembatan Muna-Buton (Potensi/ Penyiapan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1	-	10,0	Sulawesi Tenggara		05
Jalan Akses dan Jembatan Pulau Balang	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	1	-	-	-	549,3	Kalimantan Timur		05
Jembatan Pulau Laut (potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1	-	-	0,0	Kalimantan Selatan		05
Jembatan Lewamori	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	500,0	Nusa Tenggara Barat		05
Jalan Lintas Utara Papua (Jayapura - Sarmi)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	15	15	15	15	750,0	Papua		05
Jembatan Kapuas 3	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	300,0	Kalimantan Barat		05
Jembatan Srandaan	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	700,0	Yogyakarta		05
Jembatan Kahayan 2	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	300,0	Kalimantan Tengah		05
Jembatan Sambas Besar	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	-	1	1.860,0	Kalimantan Barat		05
Jalan penghubung lintas (tapalang-mambi)	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	2	2	-	-	120,0	Sulawesi Barat		05
Konektivitas Fakfak (jalan SP. Moyana - Windesi)	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	-	5	5	-	120,0	Papua Barat		05
Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	4	5	5	-	135,0	Papua Barat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Jalan Trans Bangka</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	10	12	16	12	350,0	<i>Bangka Belitung</i>		05
<i>Jalan Trans Belitung</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	5	8	10	7	210,0	<i>Bangka Belitung</i>		05
<i>Jalan Lingkar Rembang - Lasem</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	5	5	6	5	5	249,9	<i>Jawa Tengah</i>		05
<i>Jalan Tambakreja - Bantarsari (Lingkar Sidareja)(Pansela)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	2	-	-	-	-	25,0	<i>Jawa Tengah</i>		05
<i>Jembatan Inari</i>	<i>Jembatan yang dibangun (lokasi)</i>	-	-	1	-	-	900,0	<i>Papua Barat</i>		05
<i>Jalan By Pass Balige</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	7	7	-	-	-	135,0	<i>Sumatera Utara</i>		05
<i>Jalan Lingkar Parakan, Kab. Tembung dan Kab. Wonosobo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	4	4	4	4	150,1	<i>Jawa Tengah</i>		05
<i>Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	3	3	3	85,0	<i>Jawa Tengah</i>		05
<i>Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh Panqarengan)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	3	3	-	50,0	<i>Jawa Timur</i>		05
<i>Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	3	3	-	-	45,0	<i>Jawa Tengah</i>		05
<i>Jembatan Ploso</i>	<i>Jembatan yang dibangun (lokasi)</i>	-	1	-	-	-	200,0	<i>Jawa Timur</i>		05
<i>Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab. Purworejo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	6	6	6	6	176,0	<i>Jawa Tengah</i>		05
<i>Jalan Siantar By Pass</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	4	4	4		96,0	<i>Sumatera Utara</i>		05
<i>Jalan Akses KEK Galang Batang I</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	2	-	-	-	11,8	<i>Kepulauan Riau</i>		05
<i>Jalan Bypass BIL-Mandalika</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	17	10	11	13	1.392,0	<i>Nusa Tenggara Barat</i>		05
<i>Jalan Akses KI Seimangke</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	10	30,0	<i>Sumatera Utara</i>		05
<i>Jalan Akses KEK Sorong</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	7	7	7	7	444,1	<i>Papua Barat</i>		05
<i>Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	5	8	7	6	249,9	<i>Papua Barat</i>		05
<i>Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma</i>	<i>Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)</i>	-	5	6	2		120,0	<i>Papua Barat</i>		05
<i>Jalan Akses KI Gresik</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	5	60,0	<i>Jawa Timur</i>		05
<i>Jalan Akses KI Madura</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	5	50,0	<i>Jawa Timur</i>		05
<i>Jalan Akses KI Brebes</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	3	30,0	<i>Jawa Tengah</i>		05
<i>Jalan Akses KI Jorong</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	6	60,0	<i>Kalimantan Selatan</i>		05
<i>Jalan Akses KI Batu Licin</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	6	60,0	<i>Kalimantan Selatan</i>		05
<i>Jalan Akses KI Surya Borneo</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	1	10,0	<i>Kalimantan Tengah</i>		05
<i>Jalan Akses KI Ketapang</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	12	123,0	<i>Kalimantan Barat</i>		05
<i>Jalan Akses KI Kemuning</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	5	50,0	<i>Jambi</i>		05
<i>Jalan Akses KI Tanggamus</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	2	20,0	<i>Lampung</i>		05
<i>Jalan Akses KI/KEK Palu</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	7	60,0	<i>Sulawesi Tengah</i>		05
<i>Jalan Akses KIPI Tanah Kuning</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	-	13	13	600,0	<i>Kalimantan Utara</i>		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses KSPN Borobudur	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	20	-	-	-	175,0	Yogyakarta		05
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	Panjang jalan yang dibangun (km)	7	21	21	21	21	1.402,2	Nusa Tenggara Timur		05
Jalan Akses KSPN Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	30	225,0	Sulawesi Tenggara		05
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	20	223,0	Jawa Timur		05
Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	4	5	4	150,0	Nusa Tenggara Barat		05
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	8	-	-	48,0	Aceh		05
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	10	10	-	165,0	Banten		05
Jalan akses KI Sadai	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	4	1	-	58,5	Bangka Belitung		05
Jembatan Nibung 1-2	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1	-	-	40,0	Bangka Belitung		05
Jalan akses KI Tanjung Enim	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	4	4	-	85,0	Sumatera Selatan		05
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	4	5	-	95,0	Jawa Tengah		05
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal (Kecipir-Blangko -Kelampok), Kab. Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	5	3	-	95,0	Jawa Tengah		05
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab. Brebes	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	-	5	5	-	80,0	Jawa Tengah		05
Jalan Akses KSPN Danau Toba	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	17	13	13	13	1.333,0	Sumatera Utara		05
Jalan akses KI Weda	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	25	275,0	Maluku Utara		05
Jembatan Kapota (Wakatobi)	Jembatan yang dibangun (km)	-	-	-	-	1	250,0	Sulawesi Tenggara		05
Jalan Akses Pelabuhan Seruyan (Teluk Sigintung)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	4	5	-	-	90,0	Kalimantan Tengah		05
Jalan Akses Bandara Bima	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	4	-	-	45,0	Nusa Tenggara Barat		05
Jalan Akses Bandara Samsuudin Noer	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	2	20,0	Kalimantan Selatan		05
Jalan Akses Bandara Waingapu	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	3	-	-	120,0	Nusa Tenggara Timur		05
Jalan Akses Pelabuhan Penajam Paser	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1	1	1	1	67,2	Kalimantan Timur		05
Jalan Akses Pelabuhan Depapre	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	3	-	-	72,0	Papua		05
Jalan Akses Pelabuhan Gresik	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	5	60,0	Jawa Timur		05
Jalan Akses Pelabuhan Kuala Enok	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	4	-	40,0	Riau		05
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung Jabung	Panjang jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	400,0	Jambi		05
Jalan Akses pelabuhan Kuala Tungkal	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	3	3	3	240,0	Jambi		05
Jalan Akses Pelabuhan Pancur	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	4	-	-	30,0	Kepulauan Riau		05
Jalan Akses Pelabuhan Paritlimbungan Ketek	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	6	6	6	6	636,0	Sumatera Utara		05
Jalan Akses Pelabuhan Patimban	Panjang jalan yang dibangun (km)	8	-	-	-	-	130,0	Jawa Barat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan (dari PKN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	20	193,0	Riau		05
Jalan Akses Pelabuhan Sangata	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	-	-	-	-	48,0	Kalimantan Timur		05
Jalan Akses Pelabuhan Sintete	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	1	1	1	1	120,0	Kalimantan Barat		05
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	8	80,0	Sumatera Selatan		05
Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	8	8	8	8	816,0	Sumatera Barat		05
Jalan Akses Stasiun Gede Bage	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	6	2	-	-	193,6	Jawa Barat		05
Jalan Akses Terminal Tipe A Liwas	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	3	-	72,0	Sulawesi Utara		05
Jalan Akses Terminal Tipe A Padang	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	2	-	36,0	Sumatera Barat		05
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	-	-	-	10,0	Kalimantan Barat		05
Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	4	-	-	30,0	Jawa Timur		05
Jalan akses pelabuhan Belang Belang	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	3	-	-	60,0	Sulawesi Barat		05
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep - Pamekasan	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	4	-	-	-	30,0	Jawa Timur		05
Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Bts. Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab. Blora	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	4	4	5	-	89,0	Jawa Tengah		05
Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer/Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	6	-	-	-	30,0	Jawa Timur		05
Peningkatan Jalan Akses Kaligua Guci, Kab. Brebes dan Kab. Tegal	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	4	-	-	50,0	Jawa Tengah		05
Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	5	5	-	85,0	Jawa Tengah		05
Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	-	4	-	-	19,0	Jawa Tengah		05
Peningkatan Jalan Penghubung Lintas (Mamasa - Bts Sulse)	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	-	3	5	5	-	120,0	Sulawesi Barat		05
Penanganan jalan dan jembatan di Kab. Asmat	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	5	8	10	12	164,5	Papua		05
Penanganan jalan lingkaran Danau Anggi Giji dan Anagi Gida	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	-	4	4	-	-	60,0	Papua Barat		05
Penanganan Jalan lingkaran Numukan	Panjang Jalan lingkaran yang dibangun/ditingkatkan (km)	-	-	10	-	-	80,0	Kalimantan Utara		05
Jalan Perkotaan (Imogiri - Sentolo)	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	2	-	-	30,0	Yogyakarta		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Penghubung Lintas (Salubatu - Bonehau - Batuisi - Bts Sulse)	Panjang jalan dibangun/ dipelihara (km)		6	7	8	6	250,8	Sulawesi Barat		05
Jalan Trans Yapen	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)			3	4		74,8	Papua		05
Jalan Lingkar Pulau Weh	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	4	-	-	40,0	Aceh		05
Jalan Pulau Terluar Maluku	Panjang jalan yang dibangun (km)		25	25	25	25	1.680,0	Maluku	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	05
Jembatan Bian	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1	-	180,0	Papua		05
Pembangunan Fly Over Kemang dan Duplikasi Overpass	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)			1(berlanjut)	1 (selesai)	-	200,0	Banten		05
Pembangunan Fly Over Bitung	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	175,0	Banten		05
Pembangunan Fly Over Canguk	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	53,9	Jawa Tengah		05
Pembangunan Fly Over Madiun (Yos Sudarso)	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	75,0	Jawa Timur		05
Pembangunan Fly Over Gatot Subroto	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	1(selesai)	-	-	-	148,8	Sumatera Utara		05
Pembangunan Fly Over Pinang Baris	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	151,6	Sumatera Utara		05
Pembangunan Fly Over/Underpass Mendukung Major Project KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Fase 1 Jakarta-Semarang	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	5.346,0	Jawa Barat, Jawa Tengah	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	05
Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada Ruas Pejagan - Ketanggungan, Kab. Brebes	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Jawa Tengah		05
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan	Panjang jalan yang dibangun (km)		5	5	6	9	300,0	Sumatera Utara		05
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	30	30	18	17	2.530,2	Sulawesi Selatan		05
Jalan lingkar perkotaan Jawa	Panjang jalan yang dibangun (km)	7	-	16	-	-	350,1	Jawa Timur		05
Jalan Lingkar Pekalongan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	3	5	6	4	180,0	Jawa Tengah		05
Pembangunan Jalan Lingkar Temanggung - Parakan	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	5	4	-	98,8	Jawa Tengah		05
Jalan Lingkar Samarinda	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	4	4	4	4	373,0	Kalimantan Timur		05
Pembangunan Jalan Lingkar Tuban	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	5	5	5	220,0	Jawa Timur		05
Pembangunan Fly Over Kopo	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	381,2	Jawa Barat		05
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	379,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Fly Over Gamping	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	215,5	Yogyakarta		05
Pembangunan Underpass Bulak Kapal	Panjang Underpass terbangun (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	122,9	Jawa Barat		05
Pembangunan Fly Over Aloha	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	100	180,0	Jawa Timur		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan Frontage Road (FR) Waru - Gedangan</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	-	4	5	2	94,4	<i>Jawa Timur</i>		05
<i>Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	-	5	5	8	-	210,1	<i>Jawa Timur</i>		05
<i>Jalan Lingkar Kuningan</i>	<i>Panjang jalan yang dibangun (km)</i>	4	5	5	-	-	159,6	<i>Jawa Barat</i>		05
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol							122.250,2			
<i>Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang jalan tol yang dibangun (km)</i>	3	3	3	3	3	3.903,5	<i>Tersebar (Jawa)</i>		05
<i>Jalan Tol Semarang - Demak (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang jalan tol yang dibangun (km)</i>	-	-	-	-	16	7.100,0	<i>Jawa Tengah</i>	<i>Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa</i>	05
<i>Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang jalan tol yang dibangun (km)</i>	472	590	495	325	149	105.524,0	<i>Tersebar (Sumatera)</i>	<i>Jalan Tol Trans Sumatera Aceh- Lampung</i>	05
<i>Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang jalan tol yang dibangun (km)</i>	2	2	2	2	2	2.661,8	<i>Tersebar (Kalimantan)</i>		05
<i>Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)</i>	<i>Panjang jalan tol yang dibangun (km)</i>	3	3	3	3	3	3.061,0	<i>Tersebar (Sulawesi)</i>		05
Program Pengelolaan Sumber Daya Air							187.772,2			
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak							76.917,6			
<i>Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa</i>	<i>Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya (wilayah sungai)</i>	-	3	3	3	3	180,0	<i>Tersebar</i>		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi</i>	<i>Luas lahan irigasi yang diairi dari bendungan (Ha)</i>	105.461	14.697	116.375	53.959	52.057	5.771,0	<i>Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso,</i>		05
<i>Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat</i>	<i>Luas jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa kewenangan pusat yang dibangun (Ha)</i>	15.000	79.625	79.625	79.625	79.625	50.925,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat</i>	<i>Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi (Ha)</i>	80.000	115.403	115.403	115.403	115.403	16.070,3	<i>Tersebar</i>		05
<i>Rehabilitasi jaringan irigasi rawa</i>	<i>Luas jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi (Ha)</i>	11.388	22.153	22.153	22.153	22.153	2.056,9	<i>Tersebar</i>		05
<i>Pengembangan sistem water accounting</i>	<i>Jumlah sistem data pemantau ketersediaan air yang dibangun (unit)/kumulatif</i>	-	1	1	1	1	60,0	<i>Terpusat</i>		05
<i>Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)</i>	<i>Jumlah daerah irigasi dengan pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)(daerah irigasi)</i>	1	2	3	2	1	180,0	<i>Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan</i>		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi</i>	<i>Jumlah daerah irigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi (daerah irigasi)</i>	5	10	10	10	11	322,0	<i>Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan</i>		05
<i>Penyediaan air untuk komoditas perkebunan rakyat</i>	<i>Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk perkebunan rakyat (unit)</i>	-	1	1	2	2	24,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Penyediaan air untuk komoditas peternakan rakyat</i>	<i>Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk peternakan rakyat (unit)</i>	-	2	2	2	2	32,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Penyediaan air untuk komoditas hortikultura rakyat</i>	<i>Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk hortikultura (unit)</i>	-	2	3	3	3	44,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat</i>	<i>Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Ha)</i>	229	1.193	1.193	1.193	1.193	1.252,3	<i>Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB</i>		05
Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai							32.751,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)	5	8	9	10	10	210,0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu, Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi,		05
Penyusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara Jawa	Jumlah kawasan perkotaan pesisir utara Jawa yang memiliki rencana pengelolaan pesisir terpadu (kawasan perkotaan)	-	1	1	1	1	40,0	Terpusat	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di WS kritis (Km)	24	13	15	15	18	2.991,5	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)	32	14	10	11	4	2.845,0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Prioritas lainnya (Km)	62	50	55	60	65	6.777,2	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir		05
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis (unit)	3	5	8	10	10	1.003,5	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir</i>	<i>Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)</i>	3	4	4	10	10	866,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir</i>		05
<i>Pembangunan Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)</i>	<i>Jumlah kota dengan peningkatan sistem drainase utama (kota)</i>	20	20	20	20	20	3.870,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai melintasi perkotaan yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir</i>		05
<i>Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana bencana banjir</i>	<i>Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (km)</i>	5	8	8	10	10	3.480,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen</i>	<i>Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis (unit)</i>	2	5	10	15	20	525,0	<i>DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan</i>	<i>Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis</i>	05
<i>Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen</i>	<i>Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)</i>	12	10	10	15	20	700,0	<i>Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir</i>		05
<i>Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai prioritas</i>	<i>Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan (unit)</i>	14	15	15	15	15	1.145,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa</i>	<i>Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)</i>	13	14	15	15	15	641,5	<i>Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur</i>	<i>Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa</i>	05
<i>Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya</i>	<i>Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)</i>	9	10	15	20	20	7.656,8	<i>Kawasan prioritas lainnya dan pulau pulau terluar</i>		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu							621,8			
Penetapan peraturan pemerintah terkair SDA	Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (peraturan)	-	2	2	-	-	4,0	Pusat		05
Pembuatan dokumen pola dan rencana PSDA	Jumlah dokumen kebijakan PSDA wilayah sungai kewenangan pusat yang ditetapkan (dokumen)	29	38	47	56	64	105,3	Tersebar		05
Penyusunan dokumen penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	Jumlah pedoman penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai (dokumen)	1	-	-	-	-	2,0	Pusat		05
Penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	Jumlah wilayah sungai yang dinilai kinerja pengelolaannya (wilayah sungai)	-	2	2	3	3	15,0	Tersebar		05
Pengembangan ICT (Information and Communication Technology)	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan ICT pengelolaan infrastruktur SDA (unit)	-	7	8	9	10	68,0	Tersebar		05
Pengembangan GIS (Geographic Information System) dan Pemodelan Sumber Daya Air	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan GIS dan pemodelan sumber daya air (unit)	-	7	8	9	10	170,0	Tersebar		05
Pengembangan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air (unit)	-	7	8	9	10	170,0	Tersebar		05
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai kritis (unit)	4	4	4	4	4	50,0	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	05
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai prioritas lainnya (unit)	3	3	3	3	3	37,5	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	05
Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya							56.770,5			
Perencanaan pembangunan bendungan baru dengan protokol berkelanjutan	Jumlah dokumen perencanaan bendungan protokol berkelanjutan (dokumen)	1	1	1	1	1	25,0	Terpusat		05
Perencanaan pembangunan bendungan dengan skema KPBU	Jumlah dokumen perencanaan bendungan dengan skema KPBU (dokumen)	1	1	1	1	1	25,0	Terpusat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Perencanaan pengembangan tampungan alami</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)</i>	-	1	1	1	1	20,0	<i>Terpusat</i>		05
<i>Bendungan baru yang selesai dibangun</i>	<i>Jumlah pembangunan bendungan multiguna lanjutan (unit)</i>	<i>45 lanjutan 11 selesai</i>	<i>34 lanjutan 11 selesai</i>	<i>23 lanjutan 12 selesai</i>	<i>11 lanjutan 7 selesai</i>	<i>4 selesai</i>	42.415,1	<i>Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung,</i>		05
<i>Bendungan baru yang dibangun</i>	<i>Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (unit)</i>	-	<i>4 baru</i>	<i>3 baru 4 lanjutan</i>	<i>2 baru 7 lanjutan</i>	<i>2 baru 9 lanjutan</i>	12.401,4	<i>Bendungan Rongkong, Bendungan Matenggeng, Bendungan Mbay, Bendungan Pelosika, Bendungan Jenelata, Bendungan Digul, Bendungan Busuk, Bendungan Lambakkan, Bendungan Kusan, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Warsamson</i>	<i>18 Waduk Multiguna</i>	05
<i>Bendungan yang direhabilitasi</i>	<i>Jumlah bendungan yang direhabilitasi / ditingkatkan (unit)</i>	2	1	1	1	-	230,0	<i>Bendungan Wonogiri, Benanga, Bili-bili, Sutami</i>		05
<i>Tampungan alami yang direvitalisasi</i>	<i>Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi (kumulatif) (unit)</i>	8	8	10	10	15	1.319,0	<i>Tersebar</i>		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya</i>	<i>Jumlah tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya (unit)</i>	-	1	1	1	1	60,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Penyelesaian sertifikasi operasi bendungan</i>	<i>Jumlah bendungan yang memiliki sertifikat operasi (unit)</i>	10	17	9	7	12	275,0	<i>Tersebar</i>		05
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku							19.713,4			
<i>Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar</i>	<i>Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)</i>	0	0	0	0	0	360,2	<i>Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulaewsi Utara, Riau, Kepulauan Riau</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	05
<i>Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)</i>	<i>Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)</i>	0	4	4	5	4	5.783,8	<i>Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Penyediaan air baku di kawasan perkotaan</i>	<i>Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)</i>	1	2	2	2	2	3.320,8	<i>Kawasan Metropolitan Banjarmasin, Denpasar, Manado, Palembang, Makassar, Perkotaan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kota Baru Sofifi, Maja, Tanjungselor, Ibu Kota Negara</i>	<i>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</i>	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	-	1	1	1	1	856,7	KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, DPP Danau Toba, DPP Padang- Bukittinggi, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KEK/DPP Tanjung Kelayang, KI Sadai, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, KI Tanggamus, KEK/DPP Tanjung Lesung, DPP Borobudur dsk, KI Madura, DPP Bali, KEK/DPP Mandalika, DPP Labuan Bajo, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong-Tanah Laut, DPP Derawan-Berau, KI Batulicin, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Tanah Kuning, DPP Wakatobi, KI/KEK Palu,	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								DPP Manado-Likupang, KI/KEK Bitung, KEK/DPP Morotai, KI Teluk Weda, DPP Raja Ampat, KI/KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, KEK/DPP Singosari, KI Tenayan, KI Brebes, KEK Be Creative District Karawang, KEK Be Creative District Maja-Rangkas, KI Ladong, KI Katibung, KI Tanjung Buton, KI Sumbawa Barat, KI Pesawaran, KI Batanjung, KEK Kendal, KI Way Pisang, KI Takalar, DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih, DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh, DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya, DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya, DPP Baru Sambas-Singkawang		
Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)	-	2	0		-	796,8	Kabupaten Cirebon, Pekalongan	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)	2	3	4	3	5	5.674,6	tersebar	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	05
Rehabilitasi infrastruktur penyedia air baku	Jumlah unit infrastruktur penyedia air baku yang direhabilitasi (unit)	35	35	35	35	35	1.016,8	Tersebar		05
Pengawetan dan pengisian kembali air tanah	Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan recharge air tanah (unit)	-	7	8	9	10	340,0	Tersebar		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Pengembangan sistem penyediaan air baku terintegrasi (conjunctive use)</i>	<i>Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)</i>	-	7	8	9	10	510,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Pengembangan sistem informasi air tanah</i>	<i>Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi air tanah (unit)</i>	-	7	8	9	10	170,0	<i>Tersebar</i>		05
<i>Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku</i>	<i>Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik)</i>	6	1	10	6	1	883,7	<i>Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng,</i>		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin,		
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA							997,5			
<i>Peningkatan keamanan bendungan yang memiliki risiko tinggi</i>	<i>Jumlah bendungan dengan risiko tinggi yang dirurunkan indeks resikonua (unit)</i>	10	20	20	20	20	450,0	Tersebar		05
<i>Konservasi daerah tangkapan air bendungan</i>	<i>Jumlah konservasi daerah tangkapan air bendungan (unit)</i>	10	17	9	7	12	275,0	Tersebar		05
<i>Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara</i>	<i>Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara (unit)</i>	828	828	828	828	828	272,5	Pusat		05
Program Pengembangan Perumahan							51.081,0			
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial							3.905,5			
<i>Pembangunan PSU Perumahan</i>	<i>Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan PSU (unit)</i>	22.500	47.970	47.970	71.950	71.955	3.905,5	34 Provinsi		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Perumahan Swadaya							27.095,3			
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Mendapat Bantuan (unit)	-	3.000	3.000	4.500	4.500	1.125,0	34 Provinsi	05	
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Terbangun melalui Fasilitasi Pemerintah (Unit)	12.750	2.700	2.700	4.000	4.000	1.500,0	34 Provinsi	05	
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Bantuan peningkatan kualitas (unit)	-	40.000	40.000	60.000	60.000	10.000,0	34 Provinsi	05	
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)	166.000	72.000	72.000	108.000	146.700	13.470,2	34 Provinsi	05	
Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya Mendukung KSPN	Jumlah pembangunan baru rumah swadaya mendukung KSPN (unit)	300	440	440	660	660	250,0	10 KSPN Super Prioritas	05	
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Membangun KSPN	Jumlah Rumah Swadaya di KSPN yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)	2.450	510	510	765	765	250,1	10 KSPN Super Prioritas	05	
Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Fasilitasi Pelayanan Jasa (unit)	-	100.000	100.000	150.000	150.000	500,0	34 Provinsi	05	
Penyediaan Rumah Khusus							2.030,1			
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun (unit)	2.000	1.570	1.570	2.355	2.505	2.030,1	34 Provinsi	05	
Penyediaan Rumah Susun							18.050,1			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja, dan ASN	Jumlah Rumah Susun yang Terbangun (unit)	3.341	4.600	4.600	6.900	6.900	13.300,1	34 Provinsi	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	05
Pembangunan Rumah Susun Menggunakan Skema KPBU	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun Menggunakan Skema KPBU (unit)	-	-	-	5.000	10.000	0,0	6 Metropolitan	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	05
Pembangunan rumah ASN di ibu kota negara	Jumlah rumah yang dibangun (unit)	-	2.000	2.000	3.000	3.000	4.750,0	Ibu Kota Negara	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	05
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah							43,0			
Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah							43,0			
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 6000 Ha	1					2,0	Pusat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<i>Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara</i>	<i>Jumlah Dokumen Studi Kelayakan, AMDAL, dan DED untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang disusun</i>		3				41,0	<i>Pusat</i>		05
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo							130,0			
<i>Pengendalian Lumpur Sidoarjo</i>							130,0			
<i>Pembangunan dan peningkatan tanggul penahan lumpur di wilayah terdampak bencana lumpur Sidoarjo</i>	<i>Panjang tanggul dan infrastruktur penahan lumpur sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi (km)</i>	28	10	8	7	5	130,0	<i>Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur</i>		05
Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							2.851,8			
<i>Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan</i>							2.806,4			
<i>Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	<i>Jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui BP2BT, SBUM dan Penyelesaian SSB (rumah tangga)</i>	312	68.342	-	-	-	2.796,2	<i>34 Provinsi</i>		05
<i>Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan</i>	<i>Jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga)</i>	58.460	85.000	110.000	135.000	161.540	10,2	<i>34 Provinsi</i>		05
<i>Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>							45,4			
<i>Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi</i>	<i>Jumlah rumah tangga yang terverifikasi untuk mendapatkan subsidi perumahan (rumah tangga)</i>	102.500	157.500	200.000	220.000	220.000	45,4	<i>Pusat</i>		05
JUMLAH							565.952,9			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

034.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	270,9
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	739,9
JUMLAH	1.010,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

034.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan							28,2			
Koordinasi Penegakan Hukum							16,7			
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1	1	1	1	1	16,7	Pusat		07
Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional							11,5			
Penguatan perilaku tertib di ruang publik melalui Gerakan Indonesia Tertib	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib	1	1	1	1	1	11,5	Pusat		04
JUMLAH							28,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

035.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	212,3
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	1.122,1
JUMLAH	1.334,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

035.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian							285,0			
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi							15,0			
Koordinasi Kebijakan Reformasi Regulasi Cipta Lapangan Kerja	Ditetapkannya Undang-Undang dan Naskah Akademik UU Cipta Lapangan Kerja	1 UU dan 1 Naskah Akademik	-	-	-	-	15,0	Pusat		01
	Terselesaikannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja	15 Peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	0,0	Pusat		01
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	0,0	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri							10,0			
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	3,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Substitusi Impor	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Substitusi Impor	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	3,0	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	3,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional							5,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

035.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	2,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	2,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan							255,0			
Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan implementasi program Kartu Prakerja	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	250,0	Pusat		03
	Terselenggaranya Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja dalam Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,0	Pusat		03
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	5,0	Pusat		01
JUMLAH							285,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

036.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	191,1
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	568,7
JUMLAH	759,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

036.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							260,0			
Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya							210,0			
Perluasan diseminasi GNRM pada Masyarakat	Jumlah Layanan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1	1	1	1	1	148,4	Pusat		04
Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang Melaksanakan Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental	49	49	49	49	49	45,8	Pusat		04
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	1	1	1	1	1	15,8	Pusat		04
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)							50,0			
Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan	Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan	10	7	5	3	3	50,0	181 Kab/Kota; 11 Provinsi		03
JUMLAH							260,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	913,4
Program Pengembangan Kepariwisata	19.310,6
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.456,9
JUMLAH	24.680,9

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Kepariwisataan							12.422,9			
Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Indonesia Barat							93,4			
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	2	4	4	4	4	33,0	Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat	0	10	10	10	10	8,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	0	4	5	6	7	44,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)	1	1	1	1	1	8,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah							151,4			
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan	2	6	6	6	6	47,0	DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah	0	10	10	10	10	8,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	0	4	5	6	7	44,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)	6	6	6	6	6	52,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Indonesia Timur							206,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	4	8	8	8	8	65,0	Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Papua	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Revitalisasi Bali	Revitalisasi Bali yang terselesaikan	1	1	1	1	1	5,0	Bali	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah Timur	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah Timur	0	10	10	10	10	8,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	0	4	5	6	7	44,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)	10	10	10	10	10	84,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Wilayah II							1.203,7			
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	5	5	5	5	5	236,4	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	4	4	4	4	4	59,4	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	5	5	5	5	5	332,1	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	5	5	5	5	5	499,3	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
International MICE Bidding	Jumlah International MICE Bidding	2	2	2	2	2	51,0	Pusat		01
Promosi Wisata Gastronomi	Jumlah Promosi Wisata Gastronomi	2	2	2	2	2	25,5	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China							451,0			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	2	2	2	2	2	49,0	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	2	2	2	2	2	36,7	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	480	480	480	480	480	133,6	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Tiongkok yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah Tiongkok yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	160223	160223	160223	160223	160223	231,7	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika							314,4			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	2	2	2	2	2	126,0	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	4	4	4	4	4	51,5	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	225	225	225	225	225	51,0	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	25136	25136	25136	25136	25136	70,6	Pusat		01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	3	3	3	3	3	15,3	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa							416,0			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	5	5	5	5	5	230,4	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	4	4	4	4	4	47,9	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	340	340	340	340	340	122,4	Pusat		01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	2	2	2	2	2	15,3	Pusat		01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Wilayah I							688,9			
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	7	7	7	7	7	125,3	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	6	6	6	6	6	75,0	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	3	3	3	3	3	110,2	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	10	10	10	10	10	301,9	Pusat		01
International MICE Bidding	Jumlah International MICE Bidding	5	5	5	5	5	25,5	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Wisata Gastronomi	Jumlah Promosi Wisata Gastronomi	4	4	4	4	4	51,0	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan Thailand dan Indochina							252,3			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	3	3	3	3	3	68,5	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	4	4	4	4	4	15,3	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	50	50	50	50	50	13,1	Pusat		01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	16	16	16	16	16	30,2	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	9	9	9	9	9	115,0	Pusat		01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE	Jumlah Promosi Penjualan Stakeholder MICE	4	4	4	4	4	10,2	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei							394,8			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	3	3	3	3	3	30,6	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	3	3	3	3	3	15,3	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	80	80	80	80	80	15,3	Pusat		01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	65	65	65	65	65	198,6	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	12	12	12	12	12	102,0	Pusat		01
Misi Penjualan Stakeholder Mice	Jumlah Misi Penjualan Stakeholder Mice	6	6	6	6	6	32,9	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste, Philipina, dan Papua New Guinea							158,1			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	3	3	3	3	3	75,0	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	3	3	3	3	3	25,5	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	75	75	75	75	75	27,2	Pusat		01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	8	8	8	8	8	17,6	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	2	2	2	2	2	12,8	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Oceania							177,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pameran Wisata Destinasi Wisata Prioritas dan Destinasi Wisata Branding di Australia dan Oceania	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Wisata Prioritas dan Destinasi Wisata Branding di Australia dan Oceania	4	4	4	4	4	23,9	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	4	4	4	4	4	15,8	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	65	65	65	65	65	23,4	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	8	8	8	8	8	96,5	Pusat		01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE	Jumlah Promosi Penjualan Stakeholder MICE	6	6	6	6	6	18,3	Pusat		01
Pengembangan Manajemen Strategis							57,8			
Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan	Jumlah Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan	4	5	5	4	3	36,8	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata	Jumlah Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata	2	3	4	3	2	21,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengelolaan Kawasan Pariwisata							2.102,9			
Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	1	1	1	1	1	10,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Manajemen SDM Kepariwisataan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		250	300	300	300	300	34,8	Sumatera Utara		01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	8	8	8	8	8	929,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	7	7	7	7	7	45,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur	Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur	3	3	3	3	3	15,0	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Manajemen SDM Kepariwisata Badan Otorita Borobudur		360	400	400	400	400	10,9	DI Yogyakarta, Jawa Tengah		01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur	3	3	3	3	3	393,5	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur	Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur	2	2	4	4	4	32,0	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo	Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo	1	1	1	1	1	3,7	Nusa Tenggara Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Manajemen SDM Kepariwisata Badan Otorita Labuan Bajo		100	100	\	0	0	9,0	Nusa Tenggara Timur		01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo	11	11	11	11	11	585,0	Nusa Tenggara Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo	Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo	3	3	5	5	5	35,0	Nusa Tenggara Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem							190,7			
Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP)	Jumlah Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP)	1	3	3	3	1	28,6	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas	Jumlah Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas	5	5	5	5	5	12,5	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas	11	13	15	17	20	34,5	Destinasi Pariwisata Prioritas	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)	Jumlah Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)	10	12	12	12	12	34,8	Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi branding		01
Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO)	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO)	3	5	5	6	6	58,3	Destinasi Pariwisata Prioritas		01
Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018)	Jumlah Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018)	5	6	7	8	9	17,5	Pusat		01
Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan	Jumlah Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan	1	2	2	2	2	4,5	Pusat		01
Peningkatan Investasi Pariwisata							136,4			
Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	5	6	7	8	9	29,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas	Jumlah Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas	15	15	15	15	15	21,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah	Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah	0	10	20	34	34	49,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Market sounding di destinasi investasi	Jumlah Market sounding di destinasi investasi	0	4	4	4	4	16,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata	Jumlah Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata	0	1	2	2	2	21,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Wisata Budaya							109,0			
Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)	Jumlah Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)	4	5	6	5	0	29,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya	Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya	5	5	5	5	3	23,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha	Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha	0	5	5	5	4	19,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja	0	5	5	5	4	19,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	0	5	5	5	4	19,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Wisata Alam dan Buatan							234,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Bidding MICE Internasional	Jumlah Peningkatan Bidding MICE Internasional	6	10	12	15	18	61,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan	Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan	10	12	14	15	15	69,3	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan	Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan	0	8	8	4	4	48,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan	Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan	0	7	7	7	7	56,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Industri dan Regulasi Pariwisata							115,9			
Kajian Pengembangan Kepariwisataan	Jumlah Kajian Pengembangan Kepariwisataan	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		01
Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata	Jumlah Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata	10	15	17	10	10	27,9	Pusat		01
Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	2	5	8	6	6	13,5	Pusat		01
Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	Jumlah Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	1	0	0	0	0	1,0	Pusat		01
Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	0	5	6	7	8	26,0	Pusat		01
Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata	Jumlah Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata	0	1	0	0	0	2,0	Pusat		01
Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata	Jumlah Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata	0	1	1	1	1	20,0	Pusat		01
Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat	Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat	0	500	750	1000	1250	10,5	Pusat		01
Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga							715,5			
Assesor yang dilatih	Jumlah assesor yang dilatih	1000	1500	2000	1750	1500	77,5	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM Tersertifikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata	Jumlah SDM tersertifikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata	104000	130000	136500	102375	81900	388,5	Pusat		01
Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata	Jumlah masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata	11800	11800	12390	9912	9416,4	117,4	Pusat		01
Daerah yang mendapatkan pengembangan SDM	Jumlah daerah yang mendapatkan pengembangan SDM	21	24	27	30	30	132,0	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik							281,6			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	4	4	4	4	4	98,9	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	4	4	4	4	4	57,0	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	100	100	100	100	100	27,5	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Pasifik yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Pasifik yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	10000	10000	10000	10000	10000	82,8	Pusat		01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	3	3	3	3	3	15,3	Pusat		01
Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata							3.970,6			
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung		2350	2350	2550	2750	2800	229,0	Kota Bandung		03
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali		2400	2400	2450	2450	2450	182,6	Kab. Badung		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan		1411	1411	1611	1811	2011	156,8	Kota Medan		03
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar		2492	2492	2692	2892	3092	163,8	Kota Makassar		03
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang		1200	1300	1400	1600	1700	162,6	Kab. Lombok Tengah		03
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok		1400	1400	1500	1700	1800	129,2	Kab. Lombok Tengah		03
Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung		2500	2500	2500	2500	2500	97,5	Kota Bandung		03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung		5000	5000	0	0	0	327,1	Kota Bandung		03
Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bali		2033	2033	2500	2500	2500	160,2	Kab. Badung		03
Pembangunan Politeknik Pariwisata Palembang		14159	0	0	0	0	500,1	Kota Palembang		03
Peningkatan Sarana dan prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Medan		1220	1220	1420	1420	1420	110,3	Kota Medan		03
Percepatan Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok		14948	0	0	0	0	525,9	Kab. Lombok Tengah		03
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Lombok		439	500	700	900	1000	199,8	Kab. Lombok Tengah		03
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Palembang		500	500	700	900	1000	177,3	Kota Palembang		03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Politeknik Negeri Pariwisata Medan		11872	0	0	0	0	218,4	Kota Medan		03
Sarana dan Prasarana Politeknik Pariwisata Makassar		932	932	1000	1100	1200	33,6	Kab. Badung		03
Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali		26712	0	0	0	0	213,8	Kab. Badung		03
Lanjutan Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata Makassar		10656	0	0	0	0	186,7	Kota Makassar		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sulawesi Utara		1	0	0	0	0	2,0	Sulawesi Utara		03
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sorong		1	0	0	0	0	2,0	Kota Sorong		03
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi baru		0	1	0	0	0	2,0	Pusat		03
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sulawesi Utara		0	2	0	0	0	14,0	Pusat		03
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sorong		0	2	0	0	0	14,0	Pusat		03
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Destinasi baru		0	0	2	0	0	14,0	Pusat		03
Pembangunan PTNP Sulawesi Utara		0	0	1	1	1	106,0	Sulawesi Utara		03
Pembangunan PTNP Sorong		0	0	1	1	1	36,0	Kota Sorong		03
Pembangunan PTNP Destinasi Baru		0	0	0	1	1	6,0	Pusat		03
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif							3.961,1			
Riset dan Pengembangan							172,0			
Big Data Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan PDB, Ekspor dan tenaga kerja	3	3	3	3	3	130,9	Pusat		01
Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	4	5	7	4	3	41,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Edukasi Ekonomi Kreatif							390,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi	11200	11500	12000	11400	11200	258,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif	5000	5400	5875	5300	5000	131,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor Non-Perbankan							350,3			
Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi	Jumlah Modal yang disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi	255	270	320	240	220	255,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat	1700	1800	2000	1650	1550	38,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Social Entrepreneur Mentoring Program	Jumlah Social Entrepreneur yang difasilitasi	0	685	725	690	650	56,8	Pusat		01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor Perbankan							201,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	Jumlah Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif	5082	5225	5650	5150	4900	128,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan akses permodalan	1500	1600	1750	1450	1350	46,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI	Jumlah skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI yang dikembangkan	0	1	1	1	1	26,9	Pusat		01
Fasilitasi Infrastruktur Fisik							741,2			
Kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan	Jumlah Kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan	4	5	5	3	3	51,3	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi, khususnya di lokasi klaster kreatif	Jumlah Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi	30	31,5	34	31	27	419,9	Kabupaten/kota di 34 provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di Destinasi Pariwisata Prioritas dan lokasi Cultural Heritage Regeneration	Jumlah lokasi pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif	0	25	30	25	20	270,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Infrastruktur TIK							390,8			
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi	Jumlah Infrastruktur TIK yang Difasilitasi	8500	9000	10100	8500	7500	274,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pre-Start Up yang Difasilitasi (termasuk melalui Digital Lab, Digital Entrepreneurship, Pemagangan Internasional)	Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi	250	384,848485	400	372,727273	363,636364	116,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Pasar Dalam Negeri							184,0			
Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri (termasuk melalui platform e-commerce dan event promosi berkelas internasional dalam negeri)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri	2050	2100	2350	2000	1950	145,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan pelaku kreatif terkait manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce)	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pelatihan manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce)	1500	1600	1900	1480	1200	38,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Pasar Luar Negeri							449,4			
Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan (Gerai/Pusat)	Jumlah Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan	-	3	3	3	3	77,2	Pusat		01
Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor untuk Pelaku/Usaha Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor	1500	1650	1775	1450	1250	141,2	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri	32	34	40	30	28	231,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif							213,5			
Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)	Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)	4650	4850	5250	4650	4450	77,5	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/Jasa)	Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan (Produk/Jasa)	2500	2650	2950	2400	2300	110,4	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)	Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)	200	220	245	195	165	25,7	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi							41,1			
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi	Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi	250	270	330	230	200	41,1	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri							637,0			
Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (termasuk komersialisasi hasil riset)	Jumlah Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif	25	30	35	20	15	142,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Be Creative District (BCD)	Jumlah kawasan Be Creative District (BCD) dikembangkan	2	2	2	2	2	445,0	Jawa Barat dan Banten		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	3	3	4	3	2	49,3	Pusat		01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri							189,9			
Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB, Friend Of Creative Economy)	Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE	5	6	6	4	4	138,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif	10	10	12	10	9	51,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
JUMLAH							16.384,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

041.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	864,8
Program Pembinaan BUMN	461,1
JUMLAH	1.325,9

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN	768,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	92,4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	1.105,0
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	0,0
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	882,4
Program Penguatan Riset dan Pengembangan	12.960,9
Program Penguatan Inovasi	1.868,8
Program xxx (Nomenklatur masih dalam pembahasan)	60,0
JUMLAH	17.738,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti							1.075,7			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan							350,8			
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	Jumlah Lembaga Litbang Yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	138	138	138	138	138	185,4	Pusat		03
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang Ditetapkan	114	120	126	131	138	148,5	Pusat		03
Penjaminan mutu Pranata Litbang	Jumlah Pranata Litbang yang Terakreditasi	55	60	65	70	75	16,9	Pusat		03
Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya							724,9			
Implementasi RIRN dan ARN	Infrastruktur STP Berbasis PT/LPNK Iptek Eksisting Yang Dikembangkan	5	5	5	5	5	656,7	Pusat	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	03
Implementasi RIRN dan ARN	Inkubator pada STP Eksisting yang Fungsional	18	18	18	18	18	48,2	Pusat	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	03
Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan	Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan	0	7	7	7	7	20,0	Pusat		03
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti							662,5			
Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang							662,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa DN	400	450	450	450	450	192,0	Pusat		03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa LN	250	200	230	260	260	470,5	Pusat		03
Program Penguatan Riset dan Pengembangan							12.368,0			
Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek							2.863,0			
Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	Jumlah Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Aplikasi Sistem Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	21,4	Pusat		03
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Flagship Riset Nasional	22	43	43	43	43	2.100,0	Pusat		03
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Insentif Sistem Inovasi Nasional	260	260	260	260	260	405,2			03
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Pengembangan Teknologi Industri	24	50	60	70	80	316,4			03
Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat							9.367,8			
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	3700	3800	3900	4000	4100	2.614,3	Pusat		03
Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	Jumlah Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	1022	1100	1200	1300	1400	724,5	Pusat		03
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN Non BH	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN	13000	14000	14500	15000	15500	6.029,0	Pusat		03
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi							137,2			
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan	Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan	1200	3750	3900	4250	4500	62,5	Pusat		03
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	800	2650	2800	3000	3150	74,7	Pusat		03
Program Penguatan Inovasi							1.706,0			
Pengembangan Sistem Inovasi							4,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Klaster Inovasi	Jumlah klaster inovasi sebagai wahana kolaborasi N-Helix	4	5	5	5	5	4,0			03
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi							514,9			
Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	Jumlah Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	297	250	250	250	250	514,9	Pusat		03
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi							179,9			
Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT	115	120	130	135	150	179,9			03
Penguatan Inovasi Industri							388,0			
Produk Inovasi Litbang di Industri	Jumlah Produk Inovasi Litbang di Industri	60	65	70	75	80	388,0	Pusat		03
Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri							619,2			
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (Teaching Industry)	Jumlah Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri	11	11	11	11	11	619,2	Pusat		03
Program Pengembangan Iptek dan Inovasi							60,0			
Kegiatan Penguatan Ekosistem Inovasi							60,0			
Penguatan basis data riset/litbang industri melalui pelaksanaan survei belanja litbang industri	Persentase industri manufaktur yang terpetakan data belanja riset/litbangnya (persen)		80	90	100	100	0,0	Pusat		03
Fasilitasi penguatan inovasi produksi di daerah yang berbasis sumber daya lokal	Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis sumber daya lokal yang dihasilkan	0	10	10	10	10	4,0	34 Provinsi		04
Pembinaan dan pengiriman Tim Nasional pada Kompetisi Matematika dan Sains Internasional	Jumlah medali dan/atau penghargaan yang diperoleh dari Kompetisi Matematika dan Sains Internasional	0	1	1	1	1	4,0	34 Provinsi		04
Dukungan perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa	Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang dikomersialisasikan	0	10	10	10	10	4,0	34 Provinsi		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi forum pendanaan inovasi (pitching)	Jumlah start-up teknologi yang mendapatkan dukungan pendanaan non APBN dari fasilitasi forum pendanaan inovasi		10	10	10	10	4,0			03
Pendampingan peneliti remaja oleh fungsional peneliti	Produk riset dan produk inovasi sederhana yang dihasilkan oleh siswa pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan oleh fungsional peneliti	0	200	200	200	200	40,0	34 Provinsi		04
Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana Abadi Penelitian	Persentase hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Iptek		25	50	75	100	4,0	Pusat		03
JUMLAH							15.872,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	576,1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	10,7
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	3.017,9
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	177,8
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	495,8
JUMLAH	4.278,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi							1.194,7			
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan							9,3			
Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism	Jumlah Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism	20	21	22	23	24	9,3	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM							4,4			
Desain skema pembiayaan usaha	Jumlah skema pembiayaan yang dikembangkan	1	1	1	1	1	4,4	Pusat		01
Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil							167,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (Start Up Capital)	Tersalurnya Dukungan Modal Awal Usaha kepada Wirausaha Pemula	1900	2000	2100	2205	2315	167,1	Pusat, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Lombok Utara, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Manokwari Selatan	1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; 2. Wilayah Adat Papua : Laa Pago dan Domberay	01, 02
Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran							94,5			
Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri		200	240	252	265	278	30,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri		140	200	210	221	232	63,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi							38,8			
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar	TERFASILITASINYA KEMITRAAN strategis ANTARA KUMK DENGAN USAHA MENENGAH (UM) DAN USAHA BESAR (UB)	150 KUMK di 3 Lokasi	170 KUMK di 3 Lokasi	179 KUMK di 3 Lokasi	187 KUMK di 3 Lokasi	197 KUMK di 4 Lokasi	38,8	Pusat	1. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter 2. Penguatan Jaminan usaha Sentra 350 Koperasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan Kewirausahaan							283,9			
Penumbuhan Wirausaha Melalui Pemasyarakatan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan	2000	2100	2205	2315	2430	16,8	Pusat		04
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga	Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi	1500	2000	2100	2205	2315	50,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga		600	700	735	772	810	18,1	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan	Terlatihnya SDM KUMKM melalui pelatihan kewirausahaan	6500	7500	7875	8269	8682	194,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Forum Kewirausahaan Sosial		0	1	1	1	1	4,3	Pusat		01
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi							284,5			
Pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	3360	4000	4200	4410	4631	103,0	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pelatihan perkoperasian syariah bagi pengurus dan manajer koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	1690	2000	2100	2205	2315	51,6	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01, 04
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya	4707	4942	5189	5449	5700	129,9	Pusat, Kabupaten Belu, Kota Jayapura, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	02, 03
Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM							93,5			
SDM Koperasi dan UKM yang Difasilitasi Melalui SKKNI	Terfasilitasinya SDM KUKM Melalui SKKNI	2400	2520	2646	2778	2917	93,5	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk							63,8			
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk	1703	2000	2100	2205	2315	31,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor		400	500	525	551	579	32,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu							154,7			
Sarana prasarana layanan usaha terpadu	Terwujudnya pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (PLUT-KUMKM)	8	8	8	8	8	154,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi							36,6			
Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi							19,4			
Pengembangan akses dan jaringan koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan jaringan dan akses ke dalam dan luar negeri	0	2	3	3	3	4,3	Pusat		01
Pengembangan inovasi koperasi	Jumlah Koperasi model baru yang dikembangkan	0	3	3	3	3	15,1	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan UMKM							17,2			
Konferensi Koperasi Nasional	Terselenggaranya Konferensi Koperasi	0	1	1	1	1	17,2	Pusat		01
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro							470,6			
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan							30,9			
KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan	25	40	42	44	46	30,9	Pusat, Kabupaten Timor Tengah Utara; Kabupaten Belu	1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke) 3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan							33,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
KUKM Sektor Perikanan dan Peternakan yang diperkuat kapasitas usaha melalui Kemitraan	Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang perikanan dan peternakan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan	25	40	42	44	46	33,4	Pusat; Kabupaten Merauke; Kabupaten Nunukan	1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke) 3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01, 02
Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi							14,9			
Fasilitasi Ide usaha melalui kompetisi dan inkubasi	Terlaksananya Jumlah Inkubator yang memberikan pendampingan pengembangan ide usaha	4	5	5	6	6	14,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal							31,0			
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Didampingi Mengakses dan Mengelola Pembiayaan/Kredit KUR	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi mangakses KUR	3000	5000	5250	5513	5788	24,6	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Usaha mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mengakses kredit melalui lembaga keuangan non bank	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi melalui kerjasama dengan perusahaan fintech	0	750	788	827	868	6,5	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa							30,9			
KUKM bidang Industri dan Jasa yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan	KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA MELALUI KEMITRAAN	25	40	42	44	46	30,9	Pusat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter; Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro							304,4			
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana	20	21	22	23	24	110,1	34 provinsi dan Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kab. Malaka, Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala, Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat;	1. Pemulihan pasca bencana daerah terdampak di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Numukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke)	02, 06
Pedagang skala mikro informal/pedagag kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi	Tersedianya fasilitasi PKL untuk memperoleh kepastian tempat usaha	350	368	386	405	425	23,0	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	29	30	32	34	35	171,3	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian							25,2			
Pendampingan kelompok pra koperasi untuk membentuk koperasi	Terlaksananya Penyuluhan Pembentukan Koperasi	500	300	331	347	599	9,9	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Kenaikan jumlah PPKL	100	113	119	125	131	15,2	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
JUMLAH							1.701,9			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	153,3
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	487,0
Program Perlindungan Anak	424,5
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220,2
JUMLAH	1.285,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							300,0			
Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan							22,7			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di KL	Jumlah K/L bidang polhukam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5	10	10	10	10	6,6	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang polhukam	4	4	4	4	4	5,0	Provinsi		03
Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan penggerak pembangunan desa	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan bagi perempuan penggerak pembangunan desa	10 kab/Kota	8	7	7	7	11,1	Provinsi		07
Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan							18,6			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di KL	Jumlah K/L bidang infrastruktur dan lingkungan yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	2	10	10	10	10	6,7	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang infrastruktur dan lingkungan	9	9	9	9	9	11,9	Provinsi		03
Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga							95,8			
Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	Terlaksananya SPHPN	-	1	-	-	1	0,0	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari KDRT	Jumlah KL dan Provinsi yang difasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari KDRT	10	10	10	10	10	24,9	Provinsi		03
Fasilitasi penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT	10	10	10	10	10	5,5	Provinsi		03
	Jumlah SDM pada lembaga penyedia layanan bagi korban (UPTD dan P2TP2A) yang dilatih tentang penanganan korban dan pendataan	-	170	170	170	170	57,8	Provinsi		03
KIE Pencegahan dan Penanganan KDRT melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan KDRT melalui berbagai media	-	1	1	1	1	7,7	Pusat		03
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga							16,5			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di KL	Jumlah K/L bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRGnya	5	8	11	11	11	5,5	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga	5	7	9	9	9	7,0	Provinsi		03
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan Stunting	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan stunting	-	7	6	6	6	4,0	32 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi							55,4			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di KL	Jumlah K/L bidang ekonomi yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRGnya	8	11	11	11	11	8,4	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang ekonomi	4	8	8	8	8	6,1	Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan bagi dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dalam memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh peningkatan kapasitas berwirausaha	Jumlah dinas yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan korban kekerasan		9	9	8	8	14,4	34 Provinsi		01
Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM yang difasilitasi dalam pendampingan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	0,30985915	0,14084507	0,26760563	0,28169014	5,4	32 Provinsi		01
	Jumlah SDM pendamping perempuan pelaku kewirausahaan (Mekasar) yang ditingkatkan kapasitasnya tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	18000	18000	18000	18000	21,1	32 Provinsi		01
Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus							25,8			
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah K/L dan provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	15	15	15	15	15	10,7	Pusat dan Provinsi		03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan dan pemberdayaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	180	180	180	180	180	7,1	Pusat		03
Penyusunan pedoman perempuan tangguh bencana	Jumlah pedoman perempuan tangguh bencana	1	-	-	-	-	0,3	Pusat		03
KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	-	1	1	1	1	7,7	Pusat		03
Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang							35,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
KIE Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui berbagai media	1	1	1	1	1	9,4	Pusat		03
Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari TPPO	Jumlah K/L yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas TPPO	21	21	21	21	21	17,9	Pusat		03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan korban TPPO	Jumlah perempuan Korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan	100	100	100	100	100	8,3	Pusat		03
Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan							29,6			
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	11	11	11	11	11	11,3	Pusat		03
Layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	Jumlah perempuan yang mendapat layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	200	200	200	200	200	5,0	Pusat		03
Fasilitasi penguatan kelompok BK-PMI	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelompok BK-PMI	15	7,5	8	8	6	5,6	34 Provinsi		03
KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui Berbagai Media	-	1	1	1	1	7,7	Pusat		03
Program Perlindungan Anak							279,0			
Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi							17,8			
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perumusan kebijakan dan penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	7	7	7	7	6	10,0	34 Provinsi		03
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perumusan kebijakan dan penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	4	4	4	4	4	5,0	20Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
advokasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan ABH	jumlah SDM yang mendapatkan advokasi tentang penanganan kasus berbasis pemenuhan hak anak	-	200	200	200	200	2,8	34 Provinsi		03
Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus							2,8			
Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perlindungan anak penyandang disabilitas dan	2	3	3	3	3	2,8	14 provinsi		03
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi							135,2			
Pelaksanaannya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)	Terlaksananya SNPHAR	-	1	-	-	1	0,0	Pusat		03
Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	2	2	3	3	3	5,5	13 Provinsi		03
Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	600	670	680	690	700	3,0	34 Provinsi		03
Pelaksanaan koordinasi lintas K/L dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja	Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja	-	8	8	8	8	3,8	Pusat		03
Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)	2	30	34	40	50	78,0	208 Kab/Kota		03
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)	200	100	100	100	100	2,2	34 Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Layanan yang dilatih manajemennya dan pelayanan terpadu	Jumlah provinsi yang lembaga Layanannya mendapatkan pelatihan manajemen kasus dan pelayanan terpadu	-	8	8	9	9	5,0	34 Provinsi		03
penyediaan hotline bagi korban (TeSA)	jumlah layanan pengaduan melalui hotline bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	-	1	1	1	1	7,0	Pusat		03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi	-	416	456	496	536	4,0	34 Provinsi		03
koordinasi penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak	Jumlah daerah (prov/kab/kota) Provinsi yang dikoordinasikan dalam penyelesaian penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak	-	12	14	14	16	3,7	56 provinsi/kab/kota		03
Aktivis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah Aktivis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak	-	1584	1742	1916	2108	5,0	514 Kab/Kota		03
Fasilitasi Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan	Jumlah Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan	-	3	6	6	3	6,0	Kota Malang, Kab. Bintan, Kota Kupang, Kota Samarinda, Kab. Deli Serdang, Kota Palu, Kota Banda Aceh, kab. Solok, Kab. Gorontalo		03
Fasilitasi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Jumlah Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi	-	2	4	4	2	4,5	Kab. Berau, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Tobasa, Kab. Magelang, Kab. Bogor		03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan	-	225	250	275	300	4,0	34 Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	9	-	-	-	-	3,5	9 Provinsi		03
Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan							17,0			
promosi pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan	10	10	10	10	10	8,3	28 Kab/Kota		03
	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	10	4	5	5	6	4,7	13 Kab/Kota		03
Sosialisasi tentang upaya penurunan stunting bagi provinsi	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting	4	4	4	4	4	4,0	16 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan							46,5			
peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelatihan pengasuhan berbasis hak anak	10	9	9	9	9	6,0	13 Prov/Kab/Kota		03
	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	24	20	20	20	20	6,3	19 Kab/Kota		03
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan daycare	5	10	25	25	25	18,0	40 Provinsi/ Kab/Kota		03
pencegahan perkawinan anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	20	20	20	20	20	8,0	100 Provinsi/ Kab/Kota		03
pengembangan lingkungan ramah anak	jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak	10	10	10	10	12	8,2	11 Kab/Kota		03
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi							14,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Desa Bebas Pornografi	Jumlah Desa Bebas Pornografi	-	7	7	8	8	5,2	30 Desa/Kelurahan		03
Penyedia Layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan	Jumlah provinsi yang lembaga layanannya sudah mendapat pelatihan dukungan psikososial	-	8	8	9	9	6,3	34 Provinsi		03
Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	660	670	680	690	700	3,0	34 Provinsi		03
Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak							17,0			
Peningkatan kapasitas dan peran forum anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	34	17	17	17	17	9,0	34 Provinsi		03
peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	34	17	17	17	17	8,0	34 Provinsi		03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya							28,2			
pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah	jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan sekolah ramah anak	5	2	2	2	2	5,6	10 Provinsi		03
fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pembangunan fasilitas kreativitas dan budaya anak	5	2	2	2	2	7,6	10 Provinsi		03
Penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Kebijakan KLA	-	34	34	34	34	15,0	34 Provinsi		03
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							64,0			
Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha							15,5			
Replikasi Inovasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Program PPPA	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA	-	6	12	16	20	2,7	Pusat/34 Provinsi		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	Jumlah Provinsi yang difasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Keluarga yang Responsif Gender	-	10	20	25	34	12,8	Pusat/34 Provinsi		04
Partisipasi Media							14,2			
Fasilitasi Program Sinergi untuk Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media	Jumlah Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA	-	130	160	200	250	14,2	Pusat/34 Provinsi		04
Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan							34,3			
Fasilitasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Sinergi Percepatan Program PPPA	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA	-	100	150	200	250	14,8	Pusat/30 Provinsi		04
Replikasi Inovasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Program PPPA	Jumlah Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA	-	6	9	12	15	4,2	Pusat/34 Provinsi		04
Penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang mendapat Penguatan PUG dan PUHA di Bidang PPPA	10	50	70	100	150	15,3	Pusat/Daerah		04
JUMLAH							643,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	187,9
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	589,3
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	175,9
JUMLAH	953,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi							343,5			
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I							50,1			
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	165 Unit Kerja	350 Unit Kerja	415 Unit Kerja	485 Unit Kerja	550 Unit Kerja	13,1	Pusat/Daerah		07
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	217 IP	92 IP	82 IP	65 IP	45 IP	3,2	Pusat/Daerah		07
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	217 IP	210 IP	210 IP	210 IP	210 IP	13,0	Pusat/Daerah		07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang diriviu perencanaan kerjanya	-	4 IP	10 IP	10 IP	10 IP	0,4	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Nasional	Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4,2	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Daerah	Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah	-	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	16,2	Pusat		07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II							50,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	165 Unit Kerja	350 Unit Kerja	415 Unit Kerja	485 Unit Kerja	550 Unit Kerja	13,1	Pusat/Daerah		07
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	189 IP	92 IP	82 IP	65 IP	45 IP	3,2	Pusat/Daerah		07
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	189 IP	210 IP	210 IP	210 IP	210 IP	13,0	Pusat/Daerah		07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang diriviu perencanaan kerjanya	-	4 IP	10 IP	10 IP	10 IP	0,7	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Nasional	Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4,2	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Daerah	Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah	-	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	16,2	Pusat		07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III							52,6			
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	165 Unit Kerja	300 Unit Kerja	370 Unit Kerja	430 Unit Kerja	550 Unit Kerja	13,5	Pusat/Daerah		07
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	210 IP	91 IP	81 IP	65 IP	45 IP	3,7	Pusat/Daerah		07
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	210 IP	205 IP	205 IP	205 IP	205 IP	14,0	Pusat/Daerah		07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang diriviu perencanaan kerjanya	-	4 IP	10 IP	10 IP	10 IP	0,6	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan tim pengelola RB Nasional	Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4,3	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Daerah	Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah	-	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	16,5	Pusat		07
Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana							2,8			
Kebijakan penataan eselonisasi	Jumlah kebijakan penataan eselonisasi	1 PermenPAN	-	-	-	-	0,3	Pusat		07
Arsitektur Kelembagaan Pemerintah	Jumlah rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah	-	-	-	1 rancangan arsitektur	1 arsitektur	2,5	Pusat		07
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							21,8			
Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional	Jumlah Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	1 Perpres	-	-	-	-	1,8	Pusat		07
Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Jumlah Portal arsitektur SPBE	-	1 Portal	-	-	-	5,0	Pusat		07
Penyusunan Undang-Undang SPBE	Jumlah UU SPBE	-	1 NA	1 RUU	1 RUU	1 UU	11,0	Pusat		07
Penyusunan kebijakan tatakelola pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PAN	1. PermenPAN RB tentang Peta Rencana SPBE Nasional 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Evaluasi SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Penyusunan Arsitektur SPBE 2. PermenPAN RB tentang Pedoman SDM SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Manajemen Perubahan 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Proses Bisnis	-	-	4,0	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah							24,5			
Penataan kelembagaan bidang polhukam	Jumlah K/L yang ditata	8 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	19,6	Pusat		07
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang polhukam	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4,9	Pusat		07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman							27,4			
Penataan kelembagaan bidang perekonomian dan kemaritiman	Jumlah K/L yang ditata	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	22,0	Pusat		07
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	18 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5,4	Pusat		07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							21,2			
Penataan kelembagaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah K/L yang ditata	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	16,5	Pusat		07
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4,7	Pusat		07
Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur							7,0			
Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	Jumlah Kebijakan Penetapan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	-	1 Dokumen	-	-	-	5,0	Pusat		07
Penyusunan peta jalan dan kebijakan pemindahan ASN ke IKN	Jumlah dokumen peta jalan	2 Dokumen Peta Jalan	-	-	-	-	2,0	Pusat		02
Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Aparatur							27,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir nasional	Jumlah instansi pemerintah	3 IP	30 IP	30 IP	30 IP	30 IP	18,5	Pusat		07
Penerapan Manajemen Talenta ASN	Jumlah K/L/D yang menerapkan manajemen talenta ASN	-	-	-	89 K/L	34 Provinsi 100 Kab/Kota	7,0	Pusat		07
Kebijakan penataan jabatan fungsional	Jumlah kebijakan	1 kebijakan	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Kebijakan Smart Office	Jumlah Kebijakan	1 Kebijakan	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur							4,0			
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas	Jumlah kebijakan	-	1 kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		07
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP pensiun ASN	Jumlah kebijakan	-	1 kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		07
Kebijakan insentif untuk ASN High Performance, di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi	Jumlah kebijakan insentif untuk ASN di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi	-	-	1 Kebijakan	-	-	1,0	Pusat		07
Kebijakan insentif ASN yang berdampak pada pemindahan IKN	Jumlah kebijakan insentif ASN yang berdampak pada pemindahan IKN	-	1 Kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		02
Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik							23,3			
Review dan pemetaan sektor pelayanan strategis (dasar dan perizinan)	Jumlah sektor layanan strategis yang direview/dipetakan	-	2 sektor layanan strategis	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Pengaduan dalam LAPOR-SP4N	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	8,3	Pusat		07
Pembangunan hub (pusat pengetahuan) inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang direplikasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	5,0	Daerah		07
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Integrasi Data, Proses, dan Standar Pelayanan MPP	Jumlah kebijakan integrasi data, proses, dan standar pelayanan MPP	1 Perpres	-	-	-	-	1,0	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP	-	2 sektor pelayanan (dasar dan perizinan)	-	-	-	2,0	Pusat/Daerah		07
Integrasi proses bisnis pelayanan publik tingkat pusat	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang distandarisasi proses bisnisnya	-	1 PermenPAN RB tentang Standar Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	1 sektor pelayanan	1 sektor pelayanan	-	3,0	Pusat		07
Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik untuk Mendorong Gerakan Indonesia Melayani	Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	3,0	Pusat		04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik I							7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik II							7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik III							7,4			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah	07	
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,6	Pusat	07	
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat	04	
Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur							8,1			
Penegakan disiplin SDM Aparatur	Jumlah Instansi Pemerintah yang melakukan penegakan disiplin ASN	60 IP	60 IP	80 IP	100 IP	100 IP	3,5	Pusat	04	
Pembangunan Integritas ASN	Persentase ASN yang mengisi survey integritas	0,1	-	-	-	10%	2,0	Pusat/Daerah	07	
Kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN	Jumlah Kebijakan	-	1 Perpres	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah	07	
Penyusunan kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku	Jumlah kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku	1 Peraturan Pemerintah	-	-	-	-	1,0	Pusat	07	
Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN	Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN	1 Permenpan	-	-	-	-	0,3	Pusat	07	
Penyusunan kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN	Jumlah kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN	1 Perpres	-	-	-	-	0,3	Pusat	07	
Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur							1,5			
Penyusunan kebijakan pelaksanaan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	Jumlah kebijakan	4 Kebijakan	-	-	-	-	0,6	Pusat	07	
Piloting penerapan sistem manajemen kinerja	Jumlah IP yang di-ujicoba penerapan sistem manajemen kinerja	7 IP Pusat 10 IP Daerah	-	-	-	-	0,9	Pusat/Daerah	07	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)							90,3			
Pengawasan Implementasi Sistem Merit Aparatur Sipil Negara							90,3			
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	5,5	Pusat/Daerah		07
Penyelesaian dan Penyelidikan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Jumlah rekomendasi penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku yang ditindaklanjuti	160 rekomendasi	160 rekomendasi	160 rekomendasi	160 rekomendasi	160 rekomendasi	10,0	Pusat/Daerah		04
Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah	Jumlah IP yang dilakukan Penilaian Penerapan Sistem Merit	73 IP	637 IP	637 IP	637 IP	637 IP	28,8	Pusat/Daerah		07
Pembinaan Penerapan Sistem Merit	Jumlah IP yang dilakukan pembinaan penerapan sistem merit	67 IP	70 IP	70 IP	70 IP	70 IP	7,3	Pusat/Daerah		07
Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Jumlah IP yang patuh dalam pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku	270 IP	390 IP	510 IP	630 IP	719 IP	19,3	Pusat/Daerah		07
Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	Jumlah Rekomendasi Hasil pengawasan pelaksanaan seleksi JPT di Instansi Pemerintah	1500 Rekomendasi	1750 Rekomendasi	2000 Rekomendasi	2250 Rekomendasi	2500 Rekomendasi	19,3	Pusat/Daerah		07
JUMLAH							433,7			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

050.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN INTELIJEN NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	3.781,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	97,2
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	14.332,4
JUMLAH	18.211,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

050.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN INTELIJEN NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara							1.248,0			
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia							1.248,0			
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	Jumlah personel yang mendapatkan peningkatan kompetensi SDM intelijen siber	-	50 Personel	50 Personel	50 Personel	50 Personel	20,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)	Jumlah sistem CIA	-	7 sistem	7 sistem	7 sistem	7 sistem	1.200,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber	Jumlah tim respon ancaman intelijen siber yang dibentuk	-	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	28,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara							237,9			
Operasi Kontra Intelijen							177,9			
Operasi Intelijen Kontra Teorisme	Jumlah operasi intelijen terorisme	3670 Laporan	2898 Laporan	2999 Laporan	3104 Laporan	3104 Laporan	101,5	Pusat		07
Operasi intelijen separatisme	Jumlah operasi intelijen separatisme	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	76,5	Pusat		07
Operasi Intelijen Siber							60,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

050.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan Operasi Intelijen Siber	Jumlah kegiatan operasi intelijen siber	550 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	52,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	Jumlah kegiatan kerjasama intelijen keamanan siber	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	8,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
JUMLAH							1.485,9			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	3.303,8
Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	7.844,9
JUMLAH	11.148,7

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara							600,0			
Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi							600,0			
Penguatan National Data Center	Pusat data nasional berstandar internasional	-	1 DC berstandar Internasional (Tahap 1)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 2)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 3)	-	600,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara							3.093,2			
Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital							8,9			
Pembuatan Matriks Keamanan Siber	Standar Matriks Keamanan Siber	1 Standar	-	-	-	-	8,9	Pusat		07
Proteksi Sektor Pemerintah							61,6			
Kerjasama Regional, Bilateral dan Multilateral Bidang Keamanan Siber	Jumlah kegiatan kerjasama bidang keamanan siber		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	1 Dokumen	-	-	-	-	1,6	Pusat		07
Proteksi Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN)							122,5			
Pembentukan CSIRT pada Sektor IIKN	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor IIKN	-	1 Entitas	1 Entitas	-	-	7,5	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Infrastruktur Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	Jumlah sistem VVDP	-	1 Sistem	-	-	-	50,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pembangunan Information Sharing and Analysis Center (ISAC)	Jumlah sistem ISAC	-	1 Sistem	-	-	-	50,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Tuan Rumah Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020	Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020	1 Kegiatan	-	-	-	-	5,0	Pusat		07
Penyusunan Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	Jumlah Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	2 Regulasi	-	-	-	-	7,0	Pusat		07
Penyusunan Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IIKN	Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IIKN	1 Regulasi	-	-	-	-	3,0	Pusat		07
Proteksi Sektor Ekonomi Digital							9,7			
Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber	Nilai budaya keamanan siber masyarakat	4 Nilai	-	-	-	-	8,2	Pusat		07
Penerapan Standar Kriptografi pada Sektor Ekonomi Digital yang bersifat interoperabilitas	Jumlah PSE yang sudah menerapkan standar kriptografi	100 PSE	-	-	-	-	1,4	Pusat		07
Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah							31,7			
Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah	15 K/L/D	25 K/L/D	27 K/L/D	27 K/L/D	27 K/L/D	31,7	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional							64,0			
National Cyber Exercise Drill Test	Jumlah peserta yang mengikuti National Cyber Excercise Drill Test	1230 Orang	1250 Orang	1300 Orang	1400 Orang	1450 Orang	60,7	Pusat		07
Penyusunan Regulasi Pembentukan CERT	Jumlah Regulasi Pembentukan CERT	1 Regulasi	-	-	-	-	3,3	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Ekonomi Digital							12,7			
Membangun Kemampuan penanganan insiden di sektor ekodig (manajemen krisis siber). PGP dan Sertifikat Digital (penguatan insiden siber. capacity building)	Jumlah PSE yang memiliki kemampuan menangani insiden respon	100 PSE	100 PSE	100 PSE	100 PSE	100 PSE	4,6	Pusat		07
Penyusunan Regulasi Manajemen Krisis Keamanan Siber Nasional	Regulasi manajemen krisis siber	1 Regulasi	-	-	-	-	8,1	Pusat		07
Pengendalian Sumber Daya Manusia Siber dan Sandi Nasional							0,5			
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber	1 Regulasi	-	-	-	-	0,5	Pusat		07
Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital							454,2			
Pembuatan Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	Jumlah Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	1 Regulasi	-	-	-	-	4,2	Pusat		07
Pembangunan Sistem Monitoring Pengendalian Informasi	Jumlah sistem monitoring pengendalian informasi	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	450,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penyelenggaraan Operasi Keamanan Siber Nasional							2.243,2			
Pembangunan kapasitas National Computer Security Incident Response Team (Nat-CSIRT)	Jumlah sistem simulasi incident response	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	-	743,2	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Perluasan Cakupan Area National Cybersecurity Operation Center	Jumlah Cakupan Perluasan Area National Cybersecurity Operation Center	4 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	1.500,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Siber dan Sandi							84,2			
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi Bagi Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan Pendidikan Pelatihan Fungsional Sandi bagi pemerintah daerah	100 Lulusan	-	-	-	-	5,2	Pusat		07
Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk K/L/D	200 Lulusan tersertifikasi	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	14,7	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D	Jumlah Lulusan Pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L/D	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	32,6	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penyelenggaraan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN yang mengikuti Program Born to Defence	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	31,8	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
JUMLAH							3.693,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

052.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	11,7
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	61,1
JUMLAH	72,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

052.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN	
		2020	2021	2022	2023	2024					
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional							14,3				
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu							14,3				
Penguatan ketahanan nasional	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara	1	4	4	4	4	14,3	Pusat		04	
JUMLAH								14,3			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PUSAT STATISTIK

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.425,9
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	8.806,2
JUMLAH	11.232,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PUSAT STATISTIK

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							1.022,3			
Pengembangan dan Analisis Statistik							150,0			
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	39,7	WM Jakarta		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	1	1	1	13,4	WM Bandung		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	0	0	1	5,2	WM Semarang		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	1	1	1	19,7	WM Surabaya		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	0	1	1	6,3	WM Medan		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	17,8	WM Palembang	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	17,9	WM Banjarmasin	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	0	0	1	3,2	WM Manado		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	13,5	WM Makassar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	13,5	WM Denpasar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi							13,8			
Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA)	1	1	1	1	1	13,8	Pusat		01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata							219,8			
Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu	69	69	69	69	69	145,6	Pusat		01
Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	Jumlah publikasi/laporan statistik e-commerce yang terbit tepat waktu	35	35	35	35	35	62,5	Pusat		01
Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu	19	19	19	19	19	11,7	Pusat		01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							638,7			
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	515	515	515	515	515	277,6	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu	506	506	506	506	506	361,1	Pusat		01
Publikasi/Laporan Sensus Pertanian*	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian						0,0	Pusat		01
JUMLAH							1.022,3			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

055.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	3.543,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	50,0
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	4.090,2
JUMLAH	7.683,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

055.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas							6,1			
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional							6,1			
Pembangunan Portal Data Nasional	Terbangunnya integrasi data dan pengelolaan portal data nasional	-	-	-	1 Data Terintegrasi	1 Data Terintegrasi	5,1	Pusat		07
Penyusunan kebijakan manajemen data dan informasi implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PPN	1 Permen PPN tentang Manajemen Data dan Informasi	-	-	-	-	1,0	Pusat		07
Program Perencanaan Pembangunan Nasional							71,5			
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan							25,0			
Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Geopark (Geopark)	2	2	2	2	2	15,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

055.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	Alternatif Pendanaan Pengembangan Geopark (Skema)	1	1	1	1	1	10,0	Pusat		01
Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional							13,5			
Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Jumlah Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	1	1	1	1	1	13,5	Pusat		07
Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan							33,0			
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat	75	100	-	-	-	21,0	Pusat		07
	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	50	75	100	-	-	0,0	Daerah		07
	Persentase Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah	25	50	75	100	-	0,0	Pusat dan Daerah		07
Reviu dan Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Fitur yang diperbaiki, disempurnakan, atau ditambahkan	3	3	3	3	3	12,0	Pusat		07
JUMLAH							77,6			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	4.678,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	1.287,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	109,6
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	1.122,4
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	1.649,6
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	161,3
Program Penataan Agraria	105,0
Program Pengadaan Tanah	273,9
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	909,8
Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	92,1
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	23.278,2
JUMLAH	33.668,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN							1.140,3			
Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan							1.091,3			
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32,1	DKI Jakarta		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	28	28	28	28	28	32,1	Jawa Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	36	36	36	36	36	32,1	Jawa Tengah		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32,1	Yogyakarta		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	40	40	40	40	40	32,1	Jawa Timur		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	22	22	22	22	22	32,1	Aceh		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	26	26	26	26	26	32,1	Sumatera Utara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	20	20	20	20	20	32,1	Sumatera Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Riau		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	12	12	12	12	32,1	Jambi		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	16	16	16	16	16	32,1	Sumatera Selatan		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Lampung		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	15	15	15	15	32,1	Kalimantan Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	15	15	15	15	32,1	Kalimantan Tengah		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	14	14	14	14	32,1	Kalimantan Selatan		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	10	10	10	10	32,1	Kalimantan Timur		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	14	14	14	14	32,1	Sulawesi Utara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	12	12	12	12	32,1	Sulawesi Tengah		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	25	25	25	25	25	32,1	Sulawesi Selatan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Sulawesi Tenggara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	7	7	7	7	32,1	Maluku		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	10	10	10	10	32,1	Bali		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	23	23	23	23	23	32,1	NTB		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32,1	NTT		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Papua		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32,1	Bengkulu		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Maluku Utara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Banten		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Kep. Bangka Belitung		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	7	7	7	7	32,1	Gorontalo		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Kep. Riau		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32,1	Papua Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32,1	Sulawesi Barat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	5	5	5	5	5	32,1	Kalimantan Utara		02
Pengembangan dan pengelolaan administrasi Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian ATR/BPN							49,0			
Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Tanah Adat/Ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	34	34	34	34	34	49,0	DKI Jakarta		02
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang							506,1			
Perencanaan Tata Ruang							81,2			
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Jawa Tengah (KSN Kawasan Sangiran)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Jawa Timur		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	0	0	1	3,3	Aceh (KSN Kawasan Ekosistem Leuseur), KSN Bandar Aceh Darrusalam		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	1	0	0	3,2	Sumatera Barat (KSN TN Kerinci Seblat, KSN Danau Maninjau)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1,6	Jambi (KSN Cagar Budaya Muaro Jambi)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1,7	Sumatera Selatan		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	0	1	1,8	Sulawesi Utara		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1,6	Sulawesi Selatan (KSN Pare Pare)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Sulawesi Tenggara (KSN TN Rawa Aopa-Watumohai-Rawa Tinondo)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	0	2	0	2	9,3	Maluku (Tepa, Tiakur, Benjina, Wonreli)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	0	0	1	3,3	NTB (KSN TN. Gunung Rinjani, KSN Kawasan Bima)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	2	0	0	0	4,2	Haumeni Ana, Turiskain (NTT)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	0	1	1,8	NTT (KSN Kawasan Mbay)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	1	0	0	2	0	6,7	Yetetkun, Hamadi, Merauke (Papua)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Papua		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1,7	Bengkulu (KSN TN Bukit Barisan Selatan)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1,6	Gorontalo (KSN Gorontalo-Paguyuman-Kwandang)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	1	0	0	0	0	2,1	Serasan (Kep. Riau)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1,7	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,5	Atambua	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi Legislasi RDTR Ranai Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,5	Kabupaten Natuna		02
Fasilitasi Legislasi RDTR Nunukan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,5	Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi Legislasi RDTR Mota'ain Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,2	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi Legislasi RDTR Motamasin Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,2	Kab. Malaka		02
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,2	Kab. Timor Tengah Utara	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Rencana Tata Ruang yang diselesaikan - Revisi RTR Pulau (matek PK) - Revisi RTRW Kaltim(matek dan raperda) - Revisi RTRW Kukar (matek dan raperda) - Revisi RTRW PPU(matek dan raperda) - Revisi RTR Pulau (matek dan raperpres) - RTR KSN IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Pemerintahan IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN (matek dan raperpres) - Revisi RTRWN (Matek dan RPP) - RDTR BWK I (Matek dan Raperpres) - RDTR BWK II (Matek dan Raperpres)	7	4				26,8	Pusat	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Penataan Kawasan							124,9			
Master Plan Kawasan Rawan Bencana	jumlah rekomendasi teknis kawasan rawan bencana yang disusun	2	2	2	2	2	20,1	Pusat		06
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR Arahan Prioritas Nasional	5	12	12	12	12	104,8	Pusat		06
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah							300,0			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Aceh		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Kec. Bener Meriah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	6	6	2,3	Aceh		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	4	5	6	5,2	Aceh		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	DKI Jakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	1	0	0	0	0	0,1	DKI Jakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	0,1	DKI Jakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Jawa Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	7	9	11	12	4,5	Jawa Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	7	8	10	11	11,3	Jawa Barat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Jawa Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	6	8	9	10	3,8	Jawa Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	6	7	8	9	9,5	Jawa Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Yogyakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3,3	Yogyakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	6	8	9	8,3	Yogyakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Jawa Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Jawa Timur (Lamongan)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3,3	Jawa Timur		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	9	8,4	Jawa Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Sumatera Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	9	11	3,6	Sumatera Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	2	0	4,0	Sumatera Utara (Nias Barat dan Nias Selatan)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	10	8,5	Sumatera Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Sumatera Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	1	0	0	0	2,0	Sumatera Barat (Kep Mentawai)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3,3	Sumatera Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	8	8,2	Sumatera Barat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	4	4	6	6	2,2	Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2	3	4	6	6	5,2	Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Jambi		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	0	1	2,0	Jambi (Kab Sarolangun)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	5	7	2,3	Jambi		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	3	4	4	5	7	6,4	Jambi		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sumatera Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	9	9	3,4	Sumatera Selatan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	9	9	8,5	Sumatera Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Lampung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	7	8	2,7	Lampung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	6,9	Lampung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	7	1,3	Kalimantan Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	7	0,9	Kalimantan Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	8	1,3	Kalimantan Tengah		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	8	0,9	Kalimantan Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	7	8	1,3	Kalimantan Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	7	8	0,9	Kalimantan Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Kalimantan Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	6	7	8	1,3	Kalimantan Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	0,9	Kalimantan Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1,3	Sulawesi Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0,9	Sulawesi Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1,3	Sulawesi Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0,9	Sulawesi Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Sulawesi Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	6	6	8	10	1,3	Sulawesi Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	8	10	0,9	Sulawesi Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Tenggara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Utara)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1,3	Sulawesi Tenggara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0,9	Sulawesi Tenggara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Maluku		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	3	3	4	5	1,6	Maluku		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	3	5	1,9	Maluku		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Bali		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	5	5	2,2	Bali		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	5	5	6,3	Bali		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	NTB		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	2	3	5	6	1,8	NTB		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2	3	5	6	1,9	NTB		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	NTT		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	1	1	1	2	12,0	NTT (Kab Flores Timur, Kab. Manggarai Timur, Kab. Malaka, Kab. Sumba Tengah, Kab Alor, Kab Sabu Raijua)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	2	3	5	5	1,3	NTT		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2	3	5	5	0,9	NTT		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Papua		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	2	3	1	1	14,0	Papua (Kab. Dogiyai, Intanjaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Mappi, Nduga, Asmat)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	1	3	5	5	5	1,9	Papua		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	3	5	5	5	2,0	Papua		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Bengkulu		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	7	2,6	Bengkulu		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	7	7,7	Bengkulu		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Maluku Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	0	1	2,0	Maluku Utara (Kab. Pulau Taliabu)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	3	3	4	5	1,8	Maluku Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	4	5	2,0	Maluku Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Banten		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	4	5	2,0	Banten		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	3	3	3	3	4	4,6	Banten		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Kep. Bangka Belitung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	7	8	2,7	Kep. Bangka Belitung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	3	4	5	7	8	6,9	Kep. Bangka Belitung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Gorontalo		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	6	7	1,3	Gorontalo		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	3	4	5	6	7	0,9	Gorontalo		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kep. Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Kep. Riau (Bintan)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	6	7	2,5	Kep. Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	3	4	5	6	7	6,6	Kep. Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Papua Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	1	1	1	0	6,0	Papua Barat (Kab. Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	3	5	5	5	1,9	Papua Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1	3	5	5	5	2,0	Papua Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Barat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	5	6	1,3	Sulawesi Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	5	6	0,9	Sulawesi Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	7	8	1,3	Kalimantan Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	7	8	0,9	Kalimantan Utara		02
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan							544,3			
Survei Dan Pemetaan Tematik							4,5			
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di dalam Kawasan Hutan di kawasan Perluasan IKN	Luas lahan yang diinventarisasi kegiatan P4T di kawasan hutan di kawasan perluasan IKN (Hektar)	73169					4,5	Ibu Kota Negara	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pengukuran dan Pemetaan Dasar							539,8			
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	3189	5000	5000	5000	5000	539,8	34 Provinsi		02
Program Pengadaan Tanah							212,5			
Pemanfaatan Tanah Pemerintah							212,5			
Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	1	1	1	1	1	212,5	DKI Jakarta		02
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah							132,8			
Pengendalian Pemanfaatan Ruang							30,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah obyek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW)	6	2	0	0	0	25,9	Pusat		01
Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sistemik dan Lengkap	Jumlah kasus objek Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sistemik dan Lengkap (P3RSL)	3	0	0	0	0	4,1	Pusat		01
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan							50,6			
Teridentifikasinya Data HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian	Jumlah Bidang Tanah hasil Pengendalian HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian	15000	15000	15000	15000	15000	50,6	34 Provinsi		03
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar							52,2			
Terlaksananya Penertiban Tanah Terlantar	Jumlah Bidang Tanah Terlantar yang Ditetapkan	11400	11400	11400	11400	11400	52,2	34 Provinsi		03
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah							15.917,8			
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah							5,3			
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	1600	1000	800	1563,65	1,0	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	450	0	0	0	0,0	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	1283,46	0	0	0,0	Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	1283,57	392,15	0	0	0,2	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	0	0	0	200	0,1	Kabupaten Lamandau		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	650	0	0	0	0,1	Kabupaten Barito Kuala		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	4120	1703	0	1728,04	287	0,8	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo UnaUna, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	927	0	0	1509,71	0,3	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	450	0	0,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	900	0	0	0	0,1	Kabupaten Bima		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	1002,31	0	0	750	0,2	Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	450	0	0,1	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	0	0	0,3	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	1646,97	787	0,1	Kabupaten Gorontalo		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	750	1373	1,0	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten FakOfak		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	1378	0	0	0	0,1	Kabupaten Mamuju Tengah		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	0	2318	0,4	Kabupaten Bulungan		02
Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah							185,6			
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	-	-	-	-	-	0,0	DKI Jakarta		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	99500	125961	125961	125961	125961	1,1	Jawa Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	3403	3403	3403	3403	3403	0,1	Jawa Tengah		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	8	8	8	8	8	0,8	Yogyakarta		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	163000	521860	521860	521860	521860	4,3	Jawa Timur		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) (Ha)	38376	38376	38376	38376	38376	0,4	Aceh		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	88000	421366	421366	421366	421366	3,3	Sumatera Utara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	71045	71045	71045	71045	71045	0,7	Sumatera Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	282519	282519	282519	282519	282519	2,8	Riau		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	353625	353625	353625	353625	353625	3,5	Jambi		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	551837	551837	551837	551837	551837	5,4	Sumatera Selatan		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	104044	104044	104044	104044	104044	1,0	Lampung		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	72000	952995	952995	952995	952995	0,7	Kalimantan Barat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	163656	467144	315400	315400	315400	3,6	Kalimantan Tengah		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	65500	15760	15760	15760	15760	0,7	Kalimantan Selatan		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	130000	678868	678868	678868	678868	1,5	Kalimantan Timur		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	22112	22112	22112	22112	22112	0,4	Sulawesi Utara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	64000	275632	275632	275632	275632	4,2	Sulawesi Tengah		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	233306	233306	233306	233306	233306	4,4	Sulawesi Selatan		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	25500	62913	62913	62913	62913	1,0	Sulawesi Tenggara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	59031	59031	59031	59031	59031	6,5	Maluku		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	223	223	223	223	223	2,1	Bali		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	45000	22256	22256	22256	22256	0,5	NTB		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	23500	43347	43347	43347	43347	0,8	NTT		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	7700	1369100	1369100	1369100	1369100	115,6	Papua		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111000	122738	122738	122738	122738	1,1	Bengkulu		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	60637	60637	60637	60637	60637	6,6	Maluku Utara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	4800	10799	10799	10799	10799	0,6	Banten		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111928	111928	111928	111928	111928	1,1	Kep. Bangka Belitung		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	5439	5439	5439	5439	5439	0,1	Gorontalo		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	16489	16489	16489	16489	16489	0,2	Kep. Riau		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	77198	77198	77198	77198	77198	8,4	Papua Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	36996	36996	36996	36996	36996	0,7	Sulawesi Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	54128	219451	143579	143579	143579	1,5	Kalimantan Utara		02
Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah							9.392,8			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	-	-	-	-	-	0,0	DKI Jakarta		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	491757	384767	486958	486958	486958	420,5	Jawa Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1324000	122073	122073	122073	122073	244,2	Jawa Tengah		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	215000	43836,25	43836,25	43836,25	43836,25	69,7	Yogyakarta		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1375000	240076	240076	240076	240076	315,6	Jawa Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) (Ha)	401443	401443	401443	401443	401443	349,7	Aceh		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	816	287	0	0	60	0,0	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	80000	544330	544330	544330	544330	474,4	Sumatera Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	52000	306642	306642	306642	306642	277,6	Sumatera Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	112	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	122500	201964	201964	201964	201964	92,9	Riau		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	168000	442371	442371	442371	442371	280,2	Jambi		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	590	0	0	750	0	0,0	Kabupaten Bungo		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	272450	842774	842774	842774	842774	501,3	Sumatera Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2120	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	200000	347311	347311	347311	347311	262,2	Lampung		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	401	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	261000	929571	929571	929571	929571	210,5	Kalimantan Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	555	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	206000	308506	308506	308506	308506	166,4	Kalimantan Tengah		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	728	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Lamandau		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	269000	247829	247829	247829	247829	181,8	Kalimantan Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1720	1803	0	0	0	0,0	Kabupaten Barito Kuala		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	105000	672476	672476	672476	672476	742,6	Kalimantan Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	451	0	0	120	500	0,0	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	69000	132387	132387	132387	132387	97,0	Sulawesi Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	235700	337110	337110	337110	337110	305,0	Sulawesi Tengah		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1204	0	100	0	90	0,0	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una- Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	131500	418568	418568	418568	418568	395,0	Sulawesi Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2638	0	1075	0	307	0,0	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	91500	213099	213099	213099	213099	233,7	Sulawesi Tenggara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1726	0	300	0	75	0,0	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	59500	131408	131408	131408	131408	114,8	Maluku		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	231	95	0	1004	0	0,0	Kabupaten Maluku Tengah		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	63500	32702	32702	32702	32702	27,5	Bali		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	32500	590721	590721	590721	590721	38,9	NTB		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	320	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	160850	124198	124198	124198	124198	166,7	NTT		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1070	0	0	0	180	0,0	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	19000	1211375	1211375	1211375	1211375	1.577,3	Papua		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	746	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	40000	149861	149861	149861	149861	109,3	Bengkulu		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1075	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	19300	112954	112954	112954	112954	32,5	Maluku Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	283	0	144	0	0	0,0	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	250000	46862	46862	46862	46862	58,6	Banten		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	52000	168528	168528	168528	168528	66,4	Kep. Bangka Belitung		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	400	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Bangka Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	45000	55608	55608	55608	55608	55,6	Gorontalo		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	344	0	992	200	0	0,0	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	39000	27450	27450	27450	27450	44,0	Kep. Riau		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	13500	92685	92685	92685	92685	1.099,2	Papua Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	163	0	500	0	0	0,0	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	30000	95761	95761	95761	95761	86,5	Sulawesi Barat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.31

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	320	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	105000	195429	195429	195429	195429	88,0	Kalimantan Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2368	547	300	0	0	0,0	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Terlaksananya Legalisasi Tanah (Sertipikat Hak Atas Tanah)	Luas cakupan bidang tanah yang dilegalisasi	900000	900000	900000	900000	900000	0,0	34 Provinsi		03
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bagi Masyarakat Penerima TORA	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan	176	492	492	492	492	207,3	34 Provinsi		03
Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah							6.334,1			
Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	Jumlah Bidang Tanah yang Diinventarisasi	1161000	1000000	1000000	1000000	1000000	650,3	34 Provinsi		03
Terlaksananya Redistribusi Tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	602135	866315	866315	866315	866315	2.911,4	34 Provinsi		03
Terlaksananya operasional Gugus Tugas Reforma Agraria	Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria	72	536	536	536	536	2.772,4	34 Provinsi		03
JUMLAH							18.453,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

057.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	174,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	18,0
Program Pengembangan Perpustakaan	2.816,7
JUMLAH	3.009,5

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

057.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Perpustakaan							2.366,8			
Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional							46,0			
Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional	Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	350000	355000	360000	365000	365000	46,0	Pusat		04
Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi							128,0			
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	Jumlah alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno dan budaya etnis nusantara	50	50	50	50	50	22,2	Pusat		04
Pengembangan Mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	500	500	500	500	500	40,4	Daerah		04
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan (Perpustakaan Jakarta)	13	15	17	19	21	65,4	Pusat		04
Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan							85,2			
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan	1417	1500	1600	1700	1800	85,2	Pusat/ Daerah		04
Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional							277,0			
Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional	Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-jurnal yang dilanggan	574139	631553	688967	746381	746381	277,0	Pusat		04
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca							1.735,4			
Pembinaan dan pengembangan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	900	900	900	900	900	298,6	Daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

057.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perluasan layanan perpustakaan berbasis digital melalui Pojok Baca Digital	Jumlah Pojok Baca Digital (lokasi)	250	300	360	432	500	211,8	Daerah		04
Pengembangan budaya gemar membaca	Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca (lokasi)	100	100	100	100	100	103,1	Pusat/ Daerah		04
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial (daerah)	681	1048	1267	1634	2248	1.121,9	Daerah		04
Pengembangan Pustakawan							12,5			
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	Jumlah pustakawan yang tersertifikasi	440	700	700	700	700	12,5	Pusat/ Daerah		04
Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno							58,7			
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	Jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi	34765	34765	34765	34765	34765	58,7	Pusat		04
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	Jumlah alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno	39750	39750	39750	39750	39750	0,0	Pusat		04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno							12,0			
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (UPT Bung Karno Blitar)	10	11	12	13	14	12,0	Pusat		04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta							12,0			
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (UPT Bung Hatta Bukittinggi)	10	11	12	13	14	12,0	Pusat		04
JUMLAH							2.366,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



059.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.025,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	88,1
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.520,7
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.520,0
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.029,3
Program Pengembangan Aplikasi Informatika	1.289,5
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	899,3
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	16.226,2
JUMLAH	24.598,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika							225,2			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat							49,4			
Peyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 (*)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan (16.10.2 b)	72	80	90	100	110	8,3	Pusat		07
Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (**)	Jumlah Badan Publik yang Informatif (16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)	35	40	45	55	60	13,7	Pusat		07
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen	35	40	45	50	27,4	Pusat		07
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat							108,9			
Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	7	9	11	13	15	30,5	Pusat		07
Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang Memenuhi Standar Peraturan Perundangan Bidang Penyiaran	Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan (Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)	15 (TV Berjaringan) 4 (Radio Berjaringan) 4 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 20 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 21 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 22 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	Radio Berjarir	74,9	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio	Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan	96	97	98	99	99	3,5	Pusat		07
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers							66,9			
Pendataan dan verifikasi perusahaan pers	Jumlah perusahaan pers yang diverifikasi secara faktual	250	500	500	600	700	4,3	Pusat		07
Pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	Persentase (%) pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	85	85	90	90	90	3,5	Pusat		07
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	Persentase (%) provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	78	80	83	85	90	28,4	Pusat		07
Sertifikasi Jurnalis	Jumlah wartawan yang tersertifikasi jurnalis	490	1500	1500	1500	1500	30,7	Pusat		07
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika							1.867,2			
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik							7,0			
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big Data Pemerintah	Jumlah Kajian Strategis Penerapan Big Data Pemerintah	1	1	1	1	1	7,0	Pusat		07
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM							164,2			
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) penerima beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95	164,2	Pusat		07
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi							8,3			
Pengenalan TIK kepada masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	2000	2200	2500	3000	3500	8,3	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Profesi dan Sertifikasi bidang Kominfo							1.687,7			
Pelatihan SDM bidang TIK	Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (kumulatif)	50000	50000	50000	50000	50000	1.687,7	Tersebar		05
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika							1.174,4			
Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika							676,0			
Pelaksanaan pengujian perangkat TIK	Tahap penyelesaian laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	Perencanaan	Penyiapan konstruksi	Transaksi dan penanda tanganan	Konstruksi	Uji Rujukan Na	105,0	Pusat		05
Pengembangan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Persentase pemenuhan standar pengujian perangkat berstandar internasional	30	50	70	90	100	571,0	Pusat		05
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika							336,2			
Pengembangan infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	Jumlah penyediaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio - SMFR transportable: 75 site - Stasiun bergerak: 6 unit - Perangkat portable: 47 unit	25	27	27	26	23	336,2	Tersebar		05
Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit							162,2			
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	Pelaksanaan optimalisasi pita spektrum frekuensi radio untuk penyiaran digital	1	1	1	-	1	25,7	Pusat		05
	Penambahan spektrum Frekuensi Radio untuk broadband (Kumulatif)	30 MHz (2.3%)	50 MHz (3.8%)	1050 MHz (80%)	1120 MHz (85.5%)	1310 MHz(100%)	136,5	Pusat		05
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika							804,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran							578,1			
Penetrasi fixed broadband	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (kumulatif)	13,29	16,25	20,83	25,42	30,00	26,0	Pusat		05
Penggelaran jaringan tetap pitalebar	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60	55,3	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
Sistem infrastruktur penyiaran digital *(Belum mempertimbangkan alokasi PHLN)	Jumlah lokasi infrastruktur penyiaran TV digital	44 lokasi satuan transmisi	50 lokasi satuan transmisi	60 lokasi satuan transmisi	74 lokasi satuan transmisi	asi satuan tra	487,8	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
Fasilitasi Ducting bersama	Jumlah kabupaten/kota yang memanfaatkan ducting bersama	2	4	6	8	10	9,0	Tersebar		05
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran							105,9			
Implementasi sistem penyiaran digital	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	53	60	70	75	80	105,9	Tersebar		05
Implementasi penyiaran radio digital	Implementasi penyiaran radio digital •Simulcast AM dan DRM 30 (MF) •Simulcast FM dan DRM+ (VHF Band 2)	0	0	0	50	100	0,0	Tersebar		05
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi							120,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penataan bidang telekomunikasi untuk mendukung ekonomi digital	Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turannya: 1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. RUU Telekomunikasi (UU 36 Tahun 1999) 3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009) 4. RUU OMNIBUSLAW 5. Aturan Turunan	1. Pengesahan RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. Naskah akademik RUU OMNIBUSLAW (Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran) 3. Naskah akademik RUU Telekomunikasi 4. Naskah akademik RUU Pos	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Naskah aturan turunan UU Penyiaran	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Pengesahan aturan turunan UU Penyiaran	1. Pengesahan RUU Telekomunikasi 2. Pengesahan RUU Pos	120,0	Pusat		05	
Program Pengembangan Aplikasi Informatika						1.152,4				
Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat						175,2				
Fasilitasi literasi digital bagi masyarakat	Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi Masyarakat	10000000	20000000	30000000	40000000	50000000	34,6	Tersebar	05	
Digital technopreneur	Jumlah startup aktif yang terbentuk	25	52	81	112	150	140,5	Tersebar	05	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,1	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Penatakelolaan Aplikasi Informatika							31,0			
Gerakan menuju Smart City	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kumulatif)	40	70	100	125	150	15,0	Tersebar		05
Penyusunan kebijakan infrastruktur dan aplikasi SPBE	Jumlah Peraturan Menteri Kominfo yang mendukung implementasi SPBE	8	8	8	8	8	16,0	Pusat		07
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan							467,8			
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform (kumulatif)	8	10	12	14	16	20,0	Pusat		05
Penyelenggaraan pusat data nasional *(Belum mempertimbangkan alokasi PHLN)	Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network)	K/L:30% Pemprov/kab /kot:30%	K/L:50% Pemprov/kab /kot:50%	K/L:80% Pemprov/kab /kot:80%	K/L:100% Pemprov/kab /kot:100%	Pemprov/kab	376,0	Pusat	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05, 07
Penyelenggaraan layanan e-government (SPBE) Nasional	Persentase layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE	20	40	60	80	100	58,0	Pusat		05
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	4 Desain	4 Desain	4 Desain	4 Desain	4 Desain	3,8	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	Terselenggaranya jalur komunikasi yang berkualitas dan aman dalam penyelenggaraan layanan SPBE	Tersedianya akses yang memadai bagi penyelenggaraan aplikasi umum	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 100.000 ASN	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 500 ribu ASN	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 1 juta ASN	perbasis seluler	0,0	Pusat		07
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE	100	100	100	100	100	10,0	Pusat		07
Pengembangan Ekonomi Digital							121,6			
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	-	500	500	500	500	0,2	Kab. Timor Tengah Utara	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah User aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	-	500	500	500	500	0,2	Kab. Merauke	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi startup menjadi unicorn	Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)	0	0	1	2	3	6,1	Tersebar		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan teknologi digital pada kawasan prioritas	Persentase fasilitasi adopsi teknologi digital di Kawasan Prioritas: a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 kawasan pariwisata d. 30 kawasan IKM	Kajian pemetaan teknologi dan penyedia platform teknologi digital	50	100	100	100	65,0	Tersebar		05
Fasilitasi scaling up UMKM	Jumlah UMKM (produsen) yang naik kelas dari UMK menjadi usaha menengah (dari total 4.4 juta UMKM bidang pengolahan)	Kajian pemetaan UMKM dan kebutuhan teknologi digital	11000	22000	33000	44000	50,0		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01, 02
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,1	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,1	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Pengendalian dan Pengembangan Aplikasi Informatika							354,9			
Pengendalian konten negatif	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun	120000	150000	175000	210000	250000	354,9	Pusat		05
Kegiatan xxx							2,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan portal pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah portal pelayanan publik	-	-	-	-	2 portal	2,0	Pusat/Daerah		07
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik							62,4			
Penata Kelolaan Bidang Komunikasi Publik							44,8			
Penata Kelolaan Komunikasi Publik	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D	6	2	2	2	2	13,8	Pusat		07
Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik	Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik	500	550	600	650	700	1,1	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	Persentase (%) K/L/D yang melaksanakan urusan PIKP dan Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	65	70	75	85	90	30,0	Pusat		07
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Pemerintah							17,6			
Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka dan pertunra)	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap konten informasi publik	60	63	65	68	70	17,6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi							13.194,5			
Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi							13.194,5			
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	12 unit	6 unit	6 unit	6 unit	0,0	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	5 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0,0	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom		02
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	0,0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0,0	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak		02
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	30 unit	21 unit	21 unit	20 unit	20 unit	0,0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan jaringan nirkabel melalui pengembangan menara telekomunikasi	Jumlah BTS yang terbangun (unit)						0,0	Prov. Nusa Tenggara Barat		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	10 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	0,0	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun	10 unit	6 unit	6 unit	6 unit	5 unit	0,0	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	5 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0,0	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	0,0	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	10 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	0,0	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom		02
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	23 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0,0	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	30 unit	46 unit	47 unit	47 unit	47 unit	0,0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	20 unit	21 unit	20 unit	20 unit	20 unit	0,0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BAKTI Palapa Ring	Persentase pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%	Barat : 35% Tengah : 10% Timur : 5%	Barat : 40% Tengah : 15% Timur : 10%	Barat : 45% Tengah : 20% Timur : 15%	Barat : 50% Tengah : 30% Timur : 20%	Tengah : 40%	2.546,8			05
BAKTI SINYAL/ LASTMILE *(Belum mempertimbangkan penyesuaian PNPB BHP Frekuensi)	Desa non komersial yang mendapatkan jaringan bergerak seluler (4G) (kumulatif)	5052	5052	5052	5052	5052	2.614,7	Tersebar, Kabupaten Kep Sangihe, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bengkayang, Kota Sabang, Kabupaten Natuna	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	02, 05
BAKTI Satria Satelit Republik Indonesia	Kapasitas penyediaan satelit multi fungsi SATRIA (Gbps)	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	150	150	2.802,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
BAKTI INTERNET	Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (kumulatif)	-	1	1	1	1	0,0	Kab. Merauke	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Bakti Akses Internet	Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (kumulatif)	12000	27000	42000	61000	91000	5.231,0	Tersebar		05
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	-	0,0	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	-	0,0	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	1	0,0	Kab. Sambas	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,0	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
JUMLAH							18.480,1			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	15.172,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	130.876,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	866,9
Program Penelitian dan Pengembangan Polri	120,9
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	5.347,6
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	1.190,3
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	8.047,2
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	594,7
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	5.814,6
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	41.906,6
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	21.662,3
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	1.104,2
Program Pengembangan Hukum Kepolisian	226,6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
JUMLAH	232.930,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri							804,9			
Pelayanan Kesehatan Polri							804,9			
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Pusdokkes	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		07
Pemenuhan Rumah Sakit Polri	Jumlah Rumah Sakit Polri yang Dibangun dan di Upgrade	-	Dibangun : 2 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	800,0	Pusat		07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri							80.729,5			
Pengembangan Peralatan Polri							71.439,2			
Pembangunan Command Centre	Jumlah Command Center yang dibangun	5 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	1.287,0	Pusat dan Daerah		07
Optimalisasi Perangkat Data Center	Jumlah Perangkat Data Center yang dioptimalisasikan	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	213,1	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan Aplikasi E-Manajemen	Jumlah Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	145,7	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan SKCK Online	Jumlah SKCK Online yang dibangun dan di upgrade	100 Unit	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	61,2	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	-	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	94,9	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Hardware dan Software baru di Puslabfor Sentul* (Pengadaan melalui PLN dengan asumsi 1 USD= Rp 14.500)	Jumlah Peralatan Labforensik yang diadakan	-	-	1 Paket	-	1 Paket	58,0	Pusat dan Bidlabfor Polda	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peralatan Digital Forensik	Jumlah Peralatan Laboratorium Forensik yang diadakan	-	-	1 Paket	-	1 Paket	58,0	Pusat dan Bidlabfor Polda	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	-	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	50.936,0	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	-	10 Paket	10 Paket	10 Paket	6 Paket	1.374,9	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam TIK	Jumlah Almatsus dan Alpalkam TIK	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	792,0	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44,7	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	-	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	13.944,0	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1.374,9	Pusat dan Daerah		07
Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	Jumlah Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	-	5 Polda	5 Polda	5 Polda	5 Polda	304,8	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan Big Data Polri	Sistem Single Data Entry Polri	-	Tahap 1 (1paket)	Tahap 2 (1paket)	Tahap 3 (1 paket)	Tahap 4 (1 Paket)	750,0	Pusat		07
Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri							9.290,3			
Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Jumlah RPK Sesuai SPM yang Dibangun	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	69,0	Daerah		07
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	16 unit	-	-	-	-	162,9	Daerah		07
Pemenuhan Rumah Negara Polri	Jumlah Unit Rumah Negara Polri	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.086,0	Daerah		07
Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan	Jumlah Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan yan diabngun	-	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	28,8	Daerah		07
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Infrastruktur POLRI	-	1 Paket	1 Paket	-	-	7.352,0	Ibu Kota Negara	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	-	2 Polres	2 Polres	2 Polres	2 Polres	24,0	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	Jumlah SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	-	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	24,0	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online (Gedung BPKB Prototype)	-	5 Polda	5 Polda	5 Polda	5 Polda	495,6	Pusat dan Daerah		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	Jumlah M2 Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	-	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	48,0	Pusat dan Daerah		07
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri		-	0,64	0,65	0,66	0,67	151,1			
Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri		-	0,58	0,59	0,59	0,6	151,1			
Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	-	0,77	0,78	0,79	0,8	151,1	Pusat dan Daerah		07
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri							716,4			
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri							716,4			
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Brigade Mobil	Jumlah anggota satuan Brigade Mobil yang mendapatkan pelatihan Harkatpuan dalam Penanganan Konflik Secara Humanis	-	10.168 Orang	10.676 Orang	11.209 Orang	11.715 Orang	42,7	Pusat dan Daerah		07
Sertifikasi Profesi Anggota Polri	Jumlah Anggota yang memiliki Sertifikat Profesi	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	567,0	Pusat		07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Samapta Baharkam	Jumlah anggota Satuan Samapta yang mendapatkan Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis	-	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang	5,2	Pusat dan Daerah		07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Binmas	Jumlah anggota Satuan Binmas yang mendapatkan Peningkatan kemampuan personel Korbinmas	-	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	20,0	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan bela negara	Jumlah Keterlibatan Warga Negara dalam Upaya Bela Negara	-	875	875	875	875	51,9	Pusat		04
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang Digital Forensik	Jumlah CHFI dan ECIH yang terbentuk di Puslabfor, Bid Labfor Polda, Dittipidsiber Bareskrim dan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda	-	57 lulusan	57 lulusan	57 lulusan	57 lulusan	6,8	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kapasitas SDM Siber Polri	Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi, pelatihan, dan capacity building siber	-	269 lulusan	269 lulusan	269 lulusan	269 lulusan	17,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Sertifikasi CEH Penyidik Siber Polri	Jumlah Penyidik yang Bersertifikasi CEH	-	44 orang	44 orang	44 orang	44 orang	5,2			07
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							6.024,9			
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara							204,0			
Identifikasi dan Sosialisasi Tindak Pidana Terorisme	Jumlah kegiatan identifikasi dan sosialisasi Tindak Pidana Terorisme	-	157 Kegiatan	160 Kegiatan	162 Kegiatan	165 Kegiatan	102,0	Pusat dan Daerah		07
Pencegahan Terorisme	Jumlah Kegiatan Pencegahan Terorisme	-	50 Kegiatan	55 Kegiatan	57 Kegiatan	60 Kegiatan	102,0	Pusat dan Daerah		07
Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital							2.808,0			
Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	Jumlah Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	-	861 Obyek Vital	911 Obyek Vital	961 Obyek Vital	1011 Obyek Vital	1.404,0	Pusat dan Daerah		07
Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	Jumlah Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	-	234 Target Rentan	234 Target Rentan	234 Target Rentan	234 Target Rentan	1.404,0	Pusat dan Daerah		07
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan							3.012,9			
Penyelesaian Tindak Pidana di laut	Jumlah Kasus Keamanan Laut yang Ditangani	-	119 Kasus	131 Kasus	144 Kasus	158 Kasus	572,0	Pusat dan Daerah		07
Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing	Jumlah Tindak Pidana Illegal Fishing yang Ditangani	-	156 Kasus	159 Kasus	164 Kasus	166 Kasus	572,0	Pusat dan Daerah		07
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korpolar	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		07
Patroli Wilayah Perbatasan Laut	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Perbatasan	-	366 Jam	380 Jam	394 Jam	408 Jam	886,8	Pusat dan Daerah		07
Patroli Wilayah Selat Malaka	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Selat Malaka	-	1.088 Jam	1.123 Jam	1.158 Jam	1.193 Jam	886,8	Pusat dan Daerah		07
Operasi Keamanan Perairan	Jumlah Operasi Keamanan Perairan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90,4	Pusat dan Daerah		07
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							7.059,3			
Penindakan Tindak Pidana Umum							69,0			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Penyelesaian Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya yang Ditangani	-	0,83	0,84	0,84	0,85	69,0	Pusat dan Daerah		07
Penindakan Tindak Pidana Terorisme							2.147,4			
Penanganan Kasus Terorisme	Jumlah Kasus Terorisme yang Ditangani	-	17 Kasus	20 Kasus	22 Kasus	25 Kasus	2.147,4	Pusat		07
Penindakan Tindak Pidana Narkoba							4.581,8			
Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika	Jumlah Jaringan Sindikat Narkotika yang Terungkap	-	77 Jaringan	76 Jaringan	75 Jaringan	74 Jaringan	9,3	Pusat dan Daerah		07
Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	-	2,6 Ton	2,5 Ton	2,4 Ton	2,3 Ton	9,3	Pusat dan Daerah		07
Penanganan Kasus Kejahatan Narkotika	Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika yang Ditangani	-	38.000 Kasus	37.000 Kasus	36.000 Kasus	35.000 Kasus	4.560,0	Pusat dan Daerah		07
Penanganan Kasus TPPU Terkait Narkotika yang Ditangani	Jumlah Kasus TPPU terkait Narkotika yang ditangani	-	8 Kasus	9 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	3,2	Pusat dan Daerah		07
Penindakan Tindak Pidana Siber							261,0			
Penanganan Tindak Pidana Siber	Jumlah penanganan tindak pidana siber	-	1.247 Kasus	1.247 Kasus	1.247 Kasus	1.247 Kasus	187,4	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penyelidikan Online Dittipidsiber	Penyelidikan Online Dittipidsiber : 1080 Laporan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda : 48 Laporan	-	3.864 laporan	3.864 laporan	3.864 laporan	3.864 laporan	73,6	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi							4,9			
Penanggulangan Keamanan dalam Negeri							4,9			
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korbrimob	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		07
JUMLAH							95.490,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	1.298,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	88,3
Program Pengawasan Obat dan Makanan	5.135,5
JUMLAH	6.522,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM							352,9			
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM							5,3			
Pelaksanaan kerjasama selatan-selatan dan triangular bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	2	2	2	2	5,3	Pusat		07
Pengembangan SDM Aparatur Badan POM							101,0			
Sertifikasi pengawas obat dan makanan yang kompeten sesuai standar	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	770	820	875	935	1000	101,0	Pusat		03
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan							246,7			
Pengembangan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi	Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35	55	70	85	100	246,7	33 Provinsi		03
Program Pengawasan Obat dan Makanan							2.956,4			
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							2.613,3			
Penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	50	52	54	56	58	179,8	33 Provinsi		03
Pemeriksaan dan pengujian sampel makanan sesuai standar	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85	192,5	33 Provinsi		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	48,0	33 Provinsi		03
Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71	301,1	33 Provinsi		03
Pemenuhan laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	70	75	80	85	90	1.282,9	33 Provinsi		03
Pemeriksaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai standar	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	262,0	33 Provinsi		03
Penerapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	660	1330	2010	2700	3400	116,8	34 Provinsi		03
Penerapan desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	211	427	648	874	1105	172,2	34 Provinsi		03
Intervensi pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	84	165	255	350	450	58,1	34 Provinsi		03
Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan							13,7			
Pemberian sertifikat CPOTB untuk UMKM OT	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima Sertifikat CPOTB Bertahap	42,26	53,53	64,81	76,09	87,37	13,7	33 Provinsi		03
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru							31,2			
Penerapan manajemen risiko pada industri pangan olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko	19	38	57	76	95	31,2	Pusat		03
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor							49,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberian Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80	81	82	83	84	43,7	Pusat		03
Pemberian Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	78	80	82	84	86	5,6	Pusat		03
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif							15,5			
Penyelesaian permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16300	16500	16700	16900	17100	5,3	34 Provinsi		03
Pengawasan label dan iklan produk tembakau	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60000	60200	60400	60600	60800	10,2	33 Provinsi		03
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang							39,5			
Pengawasan produk pangan fortifikasi	Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	88	89	90	90	13,5	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pengawasan pangan olahan sesuai standar di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	50	125	200	275	350	26,0	33 Provinsi		03
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor							18,2			
Pengawasan fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat sesuai standar	Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, dan bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84	86	88	90	92	18,2	33 Provinsi		03
Registrasi Pangan Olahan							46,8			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberian keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78	79	80	81	82	46,8	Pusat		03
Registrasi Obat							49,9			
Pemberian keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	60	63	66	69	72	49,9	33 Provinsi		03
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan							79,0			
Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	74,0	33 Provinsi		03
Pengembangan grand design penguatan laboratorium dan balai POM	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan dan penguatan balai POM	0	5	20	30	40	5,0	Pusat		03
JUMLAH							3.309,3			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

064.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	142,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	8,9
Program Pengembangan Ketahanan Nasional	309,1
JUMLAH	461,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

064.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Ketahanan Nasional							36,8			
Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan							12,7			
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	-	500	500	500	500	12,7	Pusat dan Daerah		04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai Kebangsaan							12,7			
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	-	500	500	500	500	12,7	Pusat dan Daerah		04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan							11,4			
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Sosialisasi/Dialog Wawasan Kebangsaan	190	400	400	400	400	11,4	Pusat dan Daerah		04
JUMLAH							36,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	498,5
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1.597,1
JUMLAH	2.095,7

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM							218,9			
Pengelolaan Sistem Informasi							218,9			
Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS	Pengadaan Perpanjangan Lisensi/ Annual Technical Support (ATS)	1	1	1	1	1	109,9	Pusat		01
Pengembangan Data Center dan DRC yang mendukung OSS	Jumlah pengembangan data center, DRC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang handal	1	1	1	1	1	109,0	Pusat		01
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal							943,9			
Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah							10,6			
Standarisasi tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Jumlah usulan standard tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1	1	1	1	1	5,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem informasi standarisasi NSPK perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Jumlah usulan standar sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1	1	1	1	1	4,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri							36,5			
Partisipasi dalam kerjasama internasional	Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama Internasional	14	23	24	24	25	22,1	Pusat		01
Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal	14	23	24	24	25	3,2	Pusat		01
Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan pemangku kepentingan usaha	Jumlah kerjasama penanaman modal dengan Pemangku Kepentingan Usaha di dalam dan luar negeri	3	4	5	5	6	4,2	Pusat		01
Penyusunan bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment	Jumlah bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment	1	1	1	1	1	2,5	Pusat		01
Penyelenggaraan fasilitasi minat outward investment	Jumlah forum fasilitasi minat outward investment kepada perusahaan nasional	15	15	18	18	20	4,4	Pusat		01
Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal							42,7			
Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDB	Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha	10	10	10	10	10	13,4	Jakarta, Surabaya, Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	10	10	10	10	10	22,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	2	2	2	2	2	6,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah							19,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah	Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	15	15	15	15	15	19,9	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal							257,7			
Penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri	1850	1850	1850	1850	1850	246,3	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan analisis negara target dan negara pesaing	Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2	2	2	2	2	11,4	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Promosi Penanaman Modal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara							185,4			
Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	Jumlah Rencana Investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri	(Rp 1.022,8 Triliun)	(Rp 1.125,1 Triliun)	(Rp 1.237,6 Triliun)	(Rp 1.361,3 Triliun)	(Rp 1.497,4 Triliun)	47,6	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi penanaman modal dalam forum internasional	Jumlah Rencana Investasi melalui Kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan)	(Rp 2.386,5 Triliun)	(Rp 2.625,1 Triliun)	(Rp 2.887,6 Triliun)	(Rp 3.176,4 Triliun)	(Rp 3.494,0 Triliun)	137,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal							40,7			
Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri	350	450	500	500	500	40,7	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Untuk Kegiatan di dalam dan Luar Negeri							76,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Forum Internasional bekerjasama dengan Media Internasional		800	800	800	800	800	47,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Keikutsertaan pada pameran penanaman modal di dalam dan di luar negeri		700	700	700	700	700	28,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I							8,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	20	20	20	20	20	8,1	Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II							8,0			
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	33	41	44	47	50	8,0	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III							7,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III	50	50	50	50	50	7,7	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV							12,9			
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	30	33	36	39	42	12,9	Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya							17,5			
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang terfasilitasi	10	12	12	12	12	2,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Evaluasi Rencana Strategis BKPM	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Strategis BKPM	1	1	1	1		2,3	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	1	1	1	1	1	12,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur							18,4			
Fasilitasi rencana penanaman modal di bidang industri manufaktur	Jumlah Proyek di Sektor Industri Manufaktur yang terfasilitasi	6	7	7	8	8	3,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi rencana penanaman modal di daerah	Jumlah Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	4	4	5	5	6,1	Pusat		01
Evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMP/RUPMK)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota	20	24	28	32	36	2,8	Daerah di 34 Provinsi		01
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1	1	1	1	1	6,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan							30,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Proyek prioritas pemerintah yang terfasilitasi	7	8	9	10	10	17,1	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	3	3	3	3	3	10,6	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01, 02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	5	6	7	7	7	2,9	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)							6,0			
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	7	7	7	7	6,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							118,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Terintegrasi	100	150	200	250	300	20,8	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	2	2	2	2	39,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	150	200	250	300	44,0	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen tata kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8	10	10	12	12	14,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta							11,9			
Fasilitasi rencana investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU	5	7	7	8	8	11,9	Pusat		01
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat							6,7			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan mutu pelayanan PTSP Pusat	Tingkat mutu pelayanan di PTSP Pusat	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01, 04
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur							27,3			
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1	1	1	1	1	14,1	Pusat		01
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur	10	10	10	12	12	7,9	Pusat		01
Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur 2020-2024	Jumlah kajian analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur	1	1	1	1	1	5,3	Pusat		01
JUMLAH							1.162,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	2.319,2
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2.741,0
JUMLAH	5.060,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN							186,7			
Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN							4,0			
Laporan hasil Kajian Desain Strategi Active Defense Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi "Active Defense" dalam pencegahan peredaran gelap narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	4,0	Pusat		07
Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba							182,7			
Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	Jumlah Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	-	1 Laboratorium	1 Laboratorium	1 Laboratorium	1 Laboratorium	182,7	Daerah		07
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)							1.014,6			
Penyelenggaraan Advokasi							632,1			
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba)	Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa	173 Desa	346 Desa	346 Desa	346 Desa	346 Desa	33,6	Daerah		07
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Pemkab/Pemkot yang diadvokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	-	75 Kabupaten/ Kota	100 Kabupaten/ Kota	125 Kabupaten/ Kota	150 Kabupaten/ Kota	383,0	Pusat dan Daerah		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika	Jumlah "Remaja Teman Sebaya" Anti Narkotika	-	1.730 Orang	1.730 Orang	1.730 Orang	1.730 Orang	129,3	Pusat dan Daerah		07
Pelatihan Pengembangan Soft Skill Bagi SMP & SMU Sederajat	Jumlah SMP & SMU sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill	-	34 Sekolah	34 Sekolah	34 Sekolah	34 Sekolah	86,2	Pusat dan Daerah		07
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif							22,3			
Kawaasan rawan Kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gealp, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program alternatif	Jumlah Kawasan rawan Kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gealp, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program alternatif	6 Kawasan					6,3	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar		07
Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang Diintervensi Program Alternative Development	Jumlah Kawasan yang Beralih ke Tanaman Pengganti (Alternative Development)		4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	16,0	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar		07
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum							2,0			
Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika	Jumlah laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	2,0	Pusat		07
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat							162,0			
Operasionalisasi Pos Interdiksi	Jumlah Pos Interdiksi yang Operasional	-	7 Pos	9 Pos	11 Pos	13 Pos	58,0	Pusat dan Daerah		07
Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika Dari Luar Negeri	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	4,0	Pusat		07
Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun	Jumlah Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun	-	-	-	1 Sistem	1 Sistem	100,0	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba							15,0			
Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	-	-	-	-	2,4	Pusat dan Daerah		07
Pelatihan Kompetensi Teknis Rehabilitasi Bagi Agen Pemulihan	Jumlah Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	-	225 Orang	250 Orang	275 Orang	300 Orang	12,6	Pusat dan Daerah		07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah							13,2			
Operasionalisasi Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi SPM	-	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	13,2	Pusat dan Daerah		07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat							10,1			
Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi SPM	10 Fasilitas	-	-	-	-	1,7	Pusat dan Daerah		07
Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	-	45 Unit	50 Unit	55 Unit	60 Unit	8,4	Pusat dan Daerah		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika							54,0			
Titik lokasi lahan tanaman ganja yang dimusnahkan	Jumlah Titik lokasi lahan tanaman narkotika yang dimusnahkan	-	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	29,0	Pusat dan Daerah		07
Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	Jumlah Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,0	Pusat		07
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika							104,0			
Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan	Jumlah Laporan Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	4,0	Pusat		07
Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun	Jumlah Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun	-	1 Sistem	1 Sistem	-	-	100,0	Pusat		07
JUMLAH							1.201,3			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	353,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	145,7
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	1.155,5
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.745,1
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	402,5
Program Pengembangan Daerah Tertentu	424,4
Program Pembangunan Daerah Tertinggal	498,8
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1.410,3
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.273,5
JUMLAH	16.408,9

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa							10.342,3			
Pemberdayaan Masyarakat Desa							6.906,6			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2635 orang	2218 orang	2060 orang	1901 orang	1743 orang	486,7	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3874 orang	3261 orang	3028 orang	2795 orang	2562 orang	715,5	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	194 orang	164 orang	152 orang	140 orang	129 orang	35,9	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3830 orang	3224 orang	2994 orang	2763 orang	2533 orang	707,4	Bangkalán, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3228 orang	2717 orang	2523 orang	2329 orang	2134 orang	596,1	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2697 orang	2270 orang	2108 orang	1946 orang	1784 orang	498,1	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	518 orang	436 orang	405 orang	374 orang	343 orang	95,7	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	797 orang	671 orang	623 orang	575 orang	527 orang	147,2	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	694 orang	584 orang	542 orang	501 orang	459 orang	128,2	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1427 orang	1201 orang	1115 orang	1029 orang	943 orang	263,5	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1213 orang	1021 orang	948 orang	876 orang	803 orang	224,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1011 orang	851 orang	790 orang	729 orang	669 orang	186,7	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	711 orang	599 orang	556 orang	513 orang	470 orang	131,4	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	925 orang	778 orang	723 orang	667 orang	611 orang	170,8	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	417 orang	351 orang	326 orang	301 orang	276 orang	77,1	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	747 orang	629 orang	584 orang	539 orang	494 orang	138,0	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	914 orang	769 orang	714 orang	659 orang	604 orang	168,8	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1119 orang	942 orang	874 orang	807 orang	740 orang	206,6	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	977 orang	822 orang	763 orang	705 orang	646 orang	180,4	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	500 orang	421 orang	391 orang	361 orang	331 orang	92,4	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	316 orang	266 orang	247 orang	228 orang	209 orang	58,3	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	494 orang	415 orang	386 orang	356 orang	326 orang	91,2	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1512 orang	1273 orang	1182 orang	1091 orang	1000 orang	279,3	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2707 orang	2278 orang	2116 orang	1953 orang	1790 orang	499,9	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	665 orang	560 orang	520 orang	480 orang	440 orang	122,9	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	529 orang	445 orang	413 orang	382 orang	350 orang	97,7	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	614 orang	517 orang	480 orang	443 orang	406 orang	113,4	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	153 orang	129 orang	120 orang	111 orang	101 orang	28,3	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	326 orang	274 orang	255 orang	235 orang	216 orang	60,2	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	136 orang	115 orang	106 orang	98 orang	90 orang	25,2	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	939 orang	790 orang	733 orang	677 orang	621 orang	173,3	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	144 orang	121 orang	113 orang	104 orang	95 orang	26,6	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	222 orang	187 orang	173 orang	160 orang	147 orang	41,0	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Treggalek, Tuban, Tulungagung		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar							24,0			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Blora, Demak, Pemalang, Brebes, Pekalongan	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Kulon Progo, Bantul	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	14 kabupaten	14 kabupaten	14 kabupaten	14 kabupaten	14 kabupaten	2,1	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Aceh Tengah, Pidie, Aceh Timur	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	0,8	Langkat, Padang Lawas, Nias Utara, Gunung Sitoli, Simalungun	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Pasaman, Pasaman Barat, Solok	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Rokan Hulu, Kampar	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Kerinci, Tanjung Jabung Timur	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Ogankomering Ilir, Muara Enim	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	0,6	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Ketapang, Sambas, Sintang	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Penajam Paser Utara, Kutai Barat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Banggai, Parigi Moutong	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Enrekang, Bone	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Buton, Kolaka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	1,8	Gianyar, Buleleng	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	1,2	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Bima, Sumbawa Barat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	21 kabupaten	21 kabupaten	21 kabupaten	21 kabupaten	21 kabupaten	3,2	Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Rai Jua, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	0,8	Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supriori, Yahukimo, Yalimo	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Kaur, Bengkulu Utara	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Halmahera Selatan, Kepulauan Sula	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	1,8	Pandeglang, Lebak	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Bangka Barat, Bangka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Boalemo, Gorontalo, Pohuwato	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Natuna, Lingga	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	3,3	Sorong Selatan, Tambrauw, Kota Sorong, Manokwari, Pegunungan Arfak	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	0,6	Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamasa	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Malinau, Nunukan	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Pembangunan Sarana Prasarana Desa							1.703,4			
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	7,1	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	6 desa	6 desa	3 desa	3 desa	21,3	DPP Borobudur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	23,1	DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	15 desa	6 desa	3 desa	2 desa	2 desa	24,9	DPP Danau Toba	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	8,9	DPP Baru Bukittinggi-Padang	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	7,1	DPP Baru Derawan-Berau	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	3 desa	16,9	DPP Manado-Likupang	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	8,9	DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	2 desa	16,0	DPP Wakatobi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	8 desa	6 desa	6 desa	4 desa	3 desa	24,0	DPP Lombok-Mandalika	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	6 desa	6 desa	4 desa	3 desa	22,2	DPP Labuan Bajo	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	8,9	DPP Morotai	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	3 desa	2 desa	8,9	DPP Tanjung Lesung	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	3 desa	2 desa	8,9	DPP Tanjung Kelayang	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	9,8	DPP Baru Raja Ampat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	841 desa	1311 desa	1374 desa	1382 desa	0 desa	113,2	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	894 desa	1644 desa	1960 desa	1787 desa	0 desa	147,7	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	231 desa	87 desa	0 desa	144 desa	0 desa	7,5	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	550 desa	1996 desa	2494 desa	1009 desa	281 desa	158,9	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.31

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1306 desa	1522 desa	1943 desa	1453 desa	546 desa	147,4	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.32

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	470 desa	1338 desa	1528 desa	1143 desa	662 desa	121,5	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	417 desa	208 desa	182 desa	235 desa	0 desa	19,1	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.33

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	485 desa	377 desa	556 desa	197 desa	0 desa	33,5	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	639 desa	290 desa	205 desa	509 desa	65 desa	30,8	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	321 desa	786 desa	892 desa	540 desa	12 desa	62,4	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.34

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	683 desa	680 desa	404 desa	593 desa	408 desa	57,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	638 desa	319 desa	574 desa	0 desa	812 desa	42,1	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	492 desa	367 desa	314 desa	93 desa	392 desa	31,8	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	724 desa	356 desa	277 desa	478 desa	479 desa	41,6	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.35

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	522 desa	193 desa	190 desa	139 desa	169 desa	20,2	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	472 desa	231 desa	367 desa	287 desa	362 desa	31,8	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	853 desa	263 desa	695 desa	452 desa	221 desa	44,0	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una- Una, Toli-Toli		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.36

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	542 desa	435 desa	694 desa	487 desa	111 desa	47,2	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	605 desa	666 desa	497 desa	276 desa	175 desa	47,7	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	357 desa	278 desa	397 desa	307 desa	57 desa	28,8	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.37

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	133 desa	117 desa	75 desa	156 desa	133 desa	12,2	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	0 desa	157 desa	0 desa	639 desa	0 desa	19,2	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	374 desa	612 desa	393 desa	656 desa	863 desa	61,5	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.38

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	866 desa	0 desa	139 desa	524 desa	0 desa	19,5	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	390 desa	290 desa	215 desa	314 desa	324 desa	29,7	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	386 desa	190 desa	257 desa	418 desa	49 desa	24,8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	992 desa	326 desa	0 desa	340 desa	246 desa	28,7	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.39

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	50 desa	0 desa	122 desa	0 desa	50 desa	4,0	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	433 desa	191 desa	0 desa	0 desa	224 desa	13,1	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	197 desa	52 desa	70 desa	75 desa	0 desa	6,2	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	563 desa	0 desa	142 desa	281 desa	0 desa	12,6	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	291 desa	88 desa	144 desa	59 desa	168 desa	12,3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	106 desa	74 desa	0 desa	232 desa	0 desa	8,2	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna							1.533,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.40

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.41

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.42

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.43

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.44

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.45

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.46

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.47

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.48

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.49

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.50

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	60 desa	60 desa	72 desa	72 desa	72 desa	180,9	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	84 desa	84 desa	72 desa	72 desa	72 desa	204,3	Manggarai, Ngada, Sumba Timur		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	215 desa	215 desa	226 desa	226 desa	226 desa	593,8	Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, Dogiyai		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	63 desa	63 desa	72 desa	72 desa	72 desa	183,8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	78 desa	78 desa	168 desa	168 desa	168 desa	361,8	Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak, Kaimana, Maybrat		02
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa							175,1			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.51

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.52

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.53

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.54

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.55

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.56

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.57

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.58

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	0 desa	1,0	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.59

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0,7	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0,7	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.60

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0,7	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.61

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.62

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	10 desa	10 desa	3,9	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.63

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	10 desa	10 desa	3,9	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	11 desa	10 desa	4,0	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.64

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	11 desa	10 desa	4,0	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	11 desa	10 desa	4,0	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.65

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.66

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.67

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.68

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.69

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.70

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	11 desa	4,3	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan							189,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.71

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan							50,5			
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Sukabumi		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Magelang dan Kab. Kendal		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Aceh Timur		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Agam		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Muaro Jambi		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Banyuasin		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.72

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	3,4	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Kotawaringin Barat		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Minahasa Utara		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	3,4	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.73

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Maluku Tengah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Buleleng dan Klungkung		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	3,4	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kota Jayapura dan Kab. Merauke		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Bengkulu Tengah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Morotai		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Pandeglang		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.74

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Bintan		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Bulungan		02
Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan							76,1			
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab. Pamekasan		02
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab.Kubu Raya		02
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab.Buol		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.75

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab. Maluku Tengah		02
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	12,6	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur		02
Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan							52,6			
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab. Pamekasan		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab. Banyuwangi		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab.Kubu Raya		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab.Buol		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab. Maluku Tengah		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.76

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	0 kawasan	0 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	9,5	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur		02
	Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas						10,8			
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Sukabumi		02
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Magelang dan Kab. Kendal		02
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi		02
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Aceh Timur		02
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir		02
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Agam		02
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Muaro Jambi		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.77

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Banyuasin		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,7	Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Mempawah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Kotawaringin Barat		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Minahasa Utara		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Morowali, Kab. Buol, dan Kab. Poso		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,7	Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Luwu Timur, dan Kab. Bone		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.78

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Maluku Tengah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Buleleng dan Klungkung		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,7	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kota Jayapura dan Kab. Merauke		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Bengkulu Tengah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Morotai		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Pandeglang		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.79

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Bintan		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Bulungan		02
Program Pengembangan Daerah Tertentu							308,7			
Penanganan Daerah Rawan Pangan							71,9			
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	0	0	1	0	0	2,4	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1	1	0	0	0	4,2	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.80

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	0	0	1	0	0	2,4	Kab. Sumba Barat Daya		02
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan				1		2,6	Kab. Boven Digoel		02
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1				1	4,8	Kab. Keerom		02
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1	1			1	7,5	Kab. Supiori		02
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	4	4	4	4	4	48,0	Kab. Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Daerah Perbatasan							145,0			
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	200	200	100	100	96	11,6	Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	100	100	100		100	6,7	Kab. Malaka		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan		100		50		3,3	Kab. Supiori		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	50	50		50	50	3,4	Kab. Boven Digoel		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	100	100		100		5,0	Kab. Keerom		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.81

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	4	4	4			18,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru		02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	2	2				6,0	Kab. Malaka		02
Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		2	2	2	2	12,0	Kab. Supiori		02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		2	2	2	2	12,0	Kab. Boven Digoel		02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	2	2	2	2		12,0	Kab. Keerom		02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	52,8888889	52,8888889	52,8888889	52,8888889	52,8888889	13,2	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar		02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	40	40	40	40	40	10,0	Kab. Malaka, Belu, Kupang	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	5,7	Kab. Supiori		02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	21,7777778	21,7777778	21,7777778	21,7777778	21,7777778	5,4	Kab. Boven Digoel		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.82

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	60	60	60	60	60	15,0	Kab. Pegunungan Bintang	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	5,7	Kab. Keerom		02
Penanganan Daerah Rawan Bencana							42,0			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	2,5	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	2,5	Kab. Pesisir Barat		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	292,964245	289,042676	289,042676	289,042676	289,042676	7,4	Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	196,078431	196,078431	192,156863	192,156863	192,156863	4,9	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	2,5	Kab. Lombok Utara	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.83

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	490,196078	490,196078	488,235294	480,392157	480,392157	12,4	Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	392,156863	392,156863	384,313725	384,313725	384,313725	9,9	Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar							37,4			
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar		1	1	1		6,6	Kab. Nias Selatan (P. Simuk)		02
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar	1	1	1	3	2	17,6	Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kepulauan Tanimbar		02
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di daerah pulau kecil dan terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar	1	1	1			6,6	Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi)		02
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di daerah pulau kecil dan terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar	1	1			1	6,6	Kab. Teluk Wondama		02
Penanganan Daerah Pasca Konflik							12,5			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	2,1	Kab. Donggala		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	314,339623	314,339623	314,339623	314,339623	314,339623	8,3	Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.84

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	2,1	Kab. Sorong		02
Program Pembangunan Daerah Tertinggal							313,2			
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal							30,0			
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	2,3	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Pesisir Barat		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	1,8	Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	59	59	59	59	59	2,4	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Lombok Utara		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	132,75	132,75	132,75	132,75	132,75	5,3	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Malaka, Sumba Barat, Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.85

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	5,9	Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Jayawijaya	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	59	59	59	59	59	2,4	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Nabire		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	15	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Supiori		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	30	29,5	29,5	29,5	29,5	1,2	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	30	29,5	29,5	29,5	29,5	1,2	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Kepulauan Sula		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	118	118	118	118	118	4,7	Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal							35,0			
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		0,2	0,2			4,5	Kab. Nias Selatan (KSPN Teluk Dalam dskt)		02
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		0,2	0,2			4,4	Kab. Kepulauan Mentawai (KSPN Siberut dskt)		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.86

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal				0,2	0,2	10,0	Kab. Tojo Una-una (KSPN Togean-Tomini dskt); Kab. Sigi (KSPN Lore Lindu dskt dan KSPN Lore Lindu dskt)		02
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal	0,2	-	0,2	0,2	-	8,6	Kab. Lombok Utara (KSPN Gili Tramena dskt., dan KSPN Rinjani dskt)		02
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		0,2	0,2	0,2		7,5	Kab. Sumba Barat (KSPN Waikabubak-Manupeu-Tanah Daru dskt)		02
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal							135,1			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	1	0	0	0	1,3	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	1	1	0	1	0	4,9	Kab. Sigi, Tojo Una-una		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	1					1,3	Kab. Lombok Utara		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	4	3	3	1	18,2	Kab. Kupang, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.87

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	1	4	5	3	21,1	Kab. Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal					1	1,9	Kab. Kepulauan Sula		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	2	1	0	1	6,4	Kab. Teluk Wondama, Maybrat, Tambrau, Pegunungan Arfak	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5					3,0	Kab. Sigi		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5		1,5			5,1	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5					3,0	Kab. Lombok Utara		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5					3,0	Kab. Timor Tengah Selatan		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	0	7,2	10	4	8	42,1	Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal			1,91	1,91		5,6	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.88

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal		2				2,3	Mamberamo Raya		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5	3,5	2	0	0	10,2	Nabire, Intan Jaya,Dogiyai, Paniai		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	0	0	0	2	1,73	5,8	Kab. Pegunungan Arfak, Sorong	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal							113,1			
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	1	0	1	1	3,0	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	-	-	-	-	1,0	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	3	-	-	-	-	3,6	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	2	0	1	0	3,5	Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	0	0	0	0	1,1	Kab. Lombok Utara		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	0	1	1	3	12,9	Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.89

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	5	9	5	3	26,4	Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	0	0	2	0	2,4	Kab. Boven Digoel, Mappi		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	0	1	1	1	3,6	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	1	0	0	3	4,8	Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	0	0	0	0	1,2	Kab. Kepulauan Sula		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	2	2	2	1	9,6	Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Tambrauw	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05	0	0,05	0,05	0	4,0	Kab. Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0	0	0	1,0	Kab. Kepulauan Mentawai		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.90

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0	0	0	3,0	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05	0,05	0,05	0	0,05	7,0	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0,05	0	0	2,0	Kab. Lombok Utara		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	9,0	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0	0	0	0,05	2,0	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	-	-	0,05	0,05	2,0	Kab. Keerom		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	-	0,05			1,0	Kab. Nabire		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.91

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	-	-	0,05		1,0	Kab. Tolikara	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05					1,0	Kab. Kepulauan Sula		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0,05	0,05	0,05	7,0	Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tambrauw	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi							835,1			
Pembangunan Permukiman Transmigrasi							823,7			
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	3	2	1	2	57,8	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	-	-	1	1	12,5	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	24,4	Kabupaten Bungo		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.92

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	2	1	38,6	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	2	1	30,5	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	-	2	1	1	24,6	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	-	1	1	21,0	Kabupaten Lamandau		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	25,9	Kabupaten Barito Kuala		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	2	2	41,2	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	2	3	1	1	52,9	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	1	1	1	1	45,1	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.93

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	2	2	2	2	67,3	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	24,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	2	1	1	30,6	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	1	-	-	1	18,9	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	2	1	53,4	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	24,4	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	2	2	2	2	48,8	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	-	1	1	1	18,4	Kabupaten Bangka Selatan		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	2	3	1	45,9	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.94

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	1	-	29,3	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	1	1	53,8	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	2	1	34,0	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Penyediaan Tanah Transmigrasi							11,4			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	1600	1000	800	1563,65	1,9	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	450	-	-	-	0,2	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	1283,46	-	-	0,5	Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	1283,57	392,15	-	-	0,6	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	-	-	-	200	0,1	Kabupaten Lamandau		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	650	-	-	-	0,2	Kabupaten Barito Kuala		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	4120	1703	-	1728,04	287,7	1,6	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Parigi Moutong		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.95

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	300	-	0,1	Kabupaten Wajo		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	927	-	-	1509,71	0,9	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	750	-	450	-	0,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	900	-	-	-	0,3	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	1002,31	-	-	750	0,6	Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	450	-	0,2	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	750	-	-	-	0,3	Kabupaten Pulau Morotai		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	150	-	0,1	Kabupaten Bangka Selatan		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	1646,97	787	0,9	Kabupaten Gorontalo		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	750	1373	0,8	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	1378	-	-	-	0,5	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.96

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	750	-	-	2318,06	1,1	Kabupaten Bulungan	02	
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi							658,2			
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi							585,3			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	1	3	3	3	32,4	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue	02	
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Pesisir Selatan	02	
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Bungo	02	
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	3	2	2	3	30,8	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat	02	
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	2	1	2	21,5	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji	02	
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	3	2	3	1	27,8	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	02	
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Lamandau	02	
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Barito Kuala	02	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.97

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	2	2	2	1	1	24,6	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	5	4	6	5	66,2	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	3	3	3	1	37,8	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	3	3	3	33,9	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Maluku Tengah		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	-	2	2	2	26,4	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	2	1	27,1	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	3	2	33,4	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	16,7	Kabupaten Bengkulu Utara		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.98

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	2	2	23,4	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Bangka Selatan		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	4	3	2	4	40,7	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	2	2	2	24,7	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	1	2	2	21,6	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	2	2	1	2	22,2	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Pengembangan Usaha Transmigrasi							59,2			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	1	2	-	1	2,5	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	1	-	1	1,0	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	1	-	1	-	1,0	Kabupaten Bungo		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	2	1	1	2	2,9	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	-	1	2	-	1,5	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.99

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	2	1	2	1	3,0	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	-	1	1	-	1,8	Kabupaten Lamandau		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	-	1	1	1,0	Kabupaten Barito Kuala		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	-	1	1	-	1,8	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	4	3	6,4	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	2	1	-	1	2,9	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	1	2	3,2	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	1	1	1	1,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	2,0	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	2	2	1	1	3,4	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	2	2	2	2	4,0	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.100

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	-	1	-	0,5	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	2	2	2	2,9	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	-	1	-	1,0	Kabupaten Bangka Selatan		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	3	3	3	1	5,5	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	2	1	3,1	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	1	1	3,2	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	-	1	-	1	3,3	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi							13,8			
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	816	287	-	-	60	0,6	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Simeulue		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	112	-	-	-	639	0,5	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	590	-	-	750	-	0,6	Kabupaten Bungo		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	2120	-	-	-	-	0,6	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.101

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	401	-	-	-	-	0,2	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	555	-	-	-	-	0,3	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	728	-	-	-	-	0,3	Kabupaten Lamandau		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1720	1803	-	-	-	1,4	Kabupaten Barito Kuala		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	451	-	-	120	500	0,8	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1204	-	100	-	90	0,8	Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	2638	-	1075	-	307	1,5	Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1726	-	300	-	75	0,9	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	231	95	-	1004	-	0,7	Kabupaten Maluku Tengah		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	320	-	-	-	-	0,2	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1070	-	-	-	180	0,8	Kabupaten Sumba Timur		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.102

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	746	-	-	-	-	0,1	Kabupaten Merauke		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1075	-	-	-	-	0,2	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	283	-	144	-	-	0,2	Kab. Kepulauan Sula		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	400	-	-	-	-	0,1	Kabupaten Bangka Selatan		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	344	-	992	200	-	0,7	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	163	-	500	-	-	0,6	Kab. Fak-Fak		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	679	-	-	-	-	0,7	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	2368	547	300	-	-	0,7	Kabupaten Bulungan		02
JUMLAH							12.647,4			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

068.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	1.007,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	100,4
Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	828,9
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	5.233,0
JUMLAH	7.169,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



068.B.1
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga							3.711,0			
Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK							671,7			
Pemanfaatan Data dan Informasi KKBPK	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK	57,6	60,69	63,41	66,51	70,05	671,7	Pusat dan Provinsi		03
Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah							1.507,5			
Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	38,32	46,12	53,92	61,72	69,52	1.507,5	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pembinaan Keluarga Balita dan Anak							153,1			
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	38,68	39,68	40,68	41,68	42,68	153,1	Pusat dan Provinsi		04
Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan							17,8			
Peningkatan kinerja penyuluh KB dalam capaian Program KKBPK	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	60	65	70	75	85	17,8	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pembinaan Ketahanan Remaja							61,9			
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	75,72	76,22	76,72	77,22	77,72	30,9	Pusat		04
Pengembangan karakter remaja yang berkualitas	Indeks karakter remaja	67,92	68,42	68,92	69,42	69,92	30,9	Pusat		04
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi							241,0			
Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	29	32	35	38	40	241,0	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03



068.B.2
PRESIDEN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus							12,6			
Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Persentase kesertaan KB di 100 Kab/Kota dengan kesertaan KB rendah	37,96	38,46	38,96	39,46	39,96	12,6	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga							131,8			
Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga yang berwirausaha	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	131,8	Pusat dan Provinsi		04
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan							97,0			
Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	12	13	14	15	16	97,0	Pusat		04
Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk							50,2			
Peningkatan Kab/Kota yang memiliki kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan	Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	30% prov & 21% kab/kota	45% prov & 27% kab/kota	60% prov & 33% kab/kota	75% prov & 38% kab/kota	100% prov % 45% kab/kota	29,0	Pusat dan Provinsi		03
Peningkatan efektivitas kelompok kerja KKBPK Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	10% prov & 10% kab/kota	20% prov & 20% kab/kota	30% prov & 30% kab/kota	40% prov & 40% kab/kota	50% prov & 50% kab/kota	21,2	Pusat dan Provinsi		03
Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR							10,7			
Peningkatan kualitas pelayanan KB	Indeks Informasi Metode KB (method information index/MII)	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	10,7	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Analisis Dampak Kependudukan							91,0			
Penyediaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	30% prov & 10% kab/kota	45% prov & 20% kab/kota	60% prov & 30% kab/kota	75% prov & 40% kab/kota	100% prov & 50% kab/kota	91,0	Pusat dan Provinsi		03
Perencanaan Pengendalian Penduduk							28,3			
Pembentukan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	50	60	68	75	80	7,1	Pusat dan Provinsi		03
Pemanfaatan GDPK sebagai salah satu dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	30% prov & 21% kab/kota	45% prov & 27% kab/kota	60% prov & 33% kab/kota	75% prov & 38% kab/kota	100% prov % 45% kab/kota	21,2	Pusat dan Provinsi		03



068.B.3
PRESIDEN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi							636,4			
Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	9984	10215	10214	10214	10214	116,9	Provinsi		03
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	29327	29327	29327	29327	29327	340,1	Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	4122784	4122784	4122784	4122784	4122784	179,4	Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
JUMLAH							3.711,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

074.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	65,8
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	152,5
JUMLAH	218,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

074.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM							33,0			
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara							13,5			
Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	Jumlah Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	6,0	Pusat		07
Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Jumlah Surat Keterangan Korban Penanganan pelanggaran HAM yang berat	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	7,5	Pusat		07
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban							19,5			
Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	15,0	Pusat		07
Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Jumlah Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2,5	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

074.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Monitoring dan Evaluasi SPPT PKKTP	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi SPPT PKKTP	1	-	-	-	-	2,0	Pusat		03
JUMLAH							33,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg	1.042,1
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	11.272,6
JUMLAH	12.314,7

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika							7.545,3			
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG							2.354,7			
Informasi Gempabumi dan Tsunami dengan pemasangan seismograf	Jumlah penambahan peralatan seismograf untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami	117	56	55	55	55	889,1	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	Jumlah Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	300	50	50	50	50	1.441,3	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Sekolah Lapang Geofisika untuk pemahaman masyarakat terhadap informasi gempabumi dan tsunami	Jumlah peserta yang meningkat pemahaman terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami melalui sekolah lapang geofisika	300	900	900	900	900	24,4	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG							238,6			
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Iklim Terapan (Sekolah Lapang Iklim)	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim	1000	1275	1450	1650	1650	49,1	281 lokasi		06
Informasi Iklim Terapan di Pusat	Jumlah Informasi Iklim Terapan di Pusat	6	6	6	6	6	189,5	Pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa BMKG							1.681,0			
Operasional Aloptama MKG yang Prima	Persentase alat operasional utama MKG yang laik operasi	90	91	92	93	94	1.681,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG							812,5			
Jaringan komunikasi yang handal	Peningkatan persentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi	92	93	94	95	96	812,5	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG							278,5			
Informasi peringatan dini windshear	Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear	4	3	2	2	3	278,5	14 bandara	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG							346,2			
Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II	Jumlah stasiun yang menyediakan layanan informasi cuaca digital skala desa/kelurahan dengan scaling up wheather capacity II	-	1	10	34	-	346,2	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG							11,8			
Informasi Kerentanan Seismik di Kota Besar	Jumlah kota besar yang dilakukan studi informasi kerentanan seismik	5	2	2	2	2	11,8	13 kota	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG							1.822,0			
Informasi meteorologi maritim melalui Strengthening of Marine Meteorology	Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim	20	20	20	20	20	1.792,3	100 pelabuhan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Meteorologi Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)	Jumlah nelayan yang meningkat pemahamannya terhadap informasi cuaca maritim dan peringatan dini cuaca melalui sekolah lapang nelayan/SLN	500	1360	1360	1360	1360	29,7	34 provinsi		06
JUMLAH							7.545,3			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

076.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.764,2
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	813,6
JUMLAH	3.577,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

076.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							127,8			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian							127,8			
Peningkatan kompetensi SDM KPU	Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	127,8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							347,6			
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW							347,6			
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	85,1	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

076.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	21,3	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	106,4	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	71,0	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	63,8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
JUMLAH							475,4			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

077.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	78,3
Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	578,0
JUMLAH	656,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

077.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI							0,5			
Penyelenggaraan Pengawasan Intern							0,5			
Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0,5	Pusat		07
Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara							5,5			
Penanganan Perkara Konstitusi							5,5			
Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4,0	Pusat		07
Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	Penyusunan Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	1,5	Pusat		07
JUMLAH							6,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

078.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	134,9
Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	427,0
JUMLAH	561,9

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	239,5
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	4.736,7
JUMLAH	4.976,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI							185,6			
Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti							185,6			
Pengembangan Research Power-House	Peraturan Jabatan Fungsional Baru	5					5,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	5					3,7	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Program Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis	220	240	300	350	500	176,9	Provinsi Jawa Barat		03
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek							4.342,2			
Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah							26,0			
Repositori ilmiah nasional (RIN)							26,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Inovasi							1.100,6			
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual	1	1	1	0	0	496,5	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Produktif Cibinong Science and Technology Park (C-STP)	1	0	0	0	0	100,0	Provinsi Jawa Barat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi	1	1	0	0	0	259,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Procurement of Multi Purposes Research Vessels	1	1	3	3	3	0,1	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	IPTEK LIPI Termanfaatkan oleh UKM/Masyarakat	10	10	10	10	10	20,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Fasilitas laboratorium proses pangan tradisional berstandar current Good Manufacturing Practices (c-GMP)	1	1				145,0	Provinsi DI Yogyakarta		03
Peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini	Produk riset dan produk inovasi sederhana yang dihasilkan oleh siswa pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan oleh fungsional peneliti	0	200	200	200	200	40,0	Provinsi Jawa Barat		04
Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang dikomersialisasikan	0	10	10	10	10	40,0	Provinsi Jawa Barat		04
Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya Baru							170,2			
Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan	2	2	2	2	2	86,2	Provinsi Jawa Barat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary Ecoregion		2	2	2	2	84,0	DKI Jakarta		03
Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian							78,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
		18					11,9			03
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan										
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Pengemasan Makanan Olahan	2	2	2	2	2	67,0	Provinsi DI Yogyakarta		03
Penelitian Biologi							628,0			
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Vaksin Rekombinan dan HPV	2	2	2	2	2	79,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat						14,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara	21	4	5	5	7	107,5	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka	4	4	4	4	4	109,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat Amoksilin		1	1	1	1	98,6	Provinsi Jawa Barat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Hasil Pengembangan Biosimilar Insulin						67,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bioteknologi Modern dan teknologi pendukung VUB Padi produktivitas tinggi		3	3	2	2	26,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Teknologi VUB jagung potensi hasil tinggi		1	1	1	1	4,1	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Teknologi VUB Kedelai potensi hasil tinggi		1	1	1	1	7,5	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Teknologi pemuliaan dan produksi benih cabai berproduksi tinggi		2	2	1	1	19,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Perbanyakan massal umbi bawang varietas unggul untuk penyediaan benih		2	2	2	2	19,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bioteknologi modern bibit sapi potong unggul		1	2	0	0	18,8	Provinsi Jawa Barat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bioteknologi modern untuk pembentukan galur ayam lokal unggul		1	1	1	1	2,8	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Mikrostruktur Komponen Rumah Tahan Gempa dan Tahan Api		1	1			55,8	Provinsi Jawa Barat		03
Penelitian Ekonomi							366,0			
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Perubahan Masyarakat dalam Revolusi Digital	1	3	3	3	3	102,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Penguatan Demokrasi Indonesia	1	3				82,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif dan Maritim	1	11	11			95,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Penguatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Nasional	1	3	3	3	3	63,0	Provinsi DKI Jakarta		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Pengembangan Risk Culture Melalui Peningkatan Pengetahuan Kebencanaan yang Terintegrasi		1	1	1	1	12,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Kajian Pembangunan Energi Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat di Indonesia		1	1	1	1	12,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Penelitian Kimia							1.091,0			
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Kendaraan Listrik	1	1	1	1	1	873,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Radar Pertahanan Udara Nasional			1	1	1	36,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional		3	3	3	3	32,0	Provinsi Banten		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Baterai Lithium Berlisensi Indonesia			1	1	1	44,0	Provinsi Banten		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Inovasi Teknologi Katalis Isomerisasi Untuk Produksi Greenfuel		1	1	1	1	16,0	Provinsi Banten		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil pengembangan dan aplikasi alat kesehatan: clip anuarisma untuk implan bedah otak, implan tulang, dan karteter diagnostik jantung			3	3	3	3	90,0	Provinsi Banten		03
Penelitian Oseanografi							870,0			
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumihan dan Kelautan untuk Kajian Potensi Bencana		3					4,1			03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumihan untuk Ekosistem Perairan Darat dan Laut	5					13,1	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Core Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project	5	5		0	0	263,1	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	1					315,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Penguatan Riset Samudra Nasional		1	1	1	1	102,2	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)	3		16	16	16	26,5	Provinsi Jawa Barat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Konservasi & Manajemen Pengelolaan SDA: Perencanaan Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis Integritas Fungsi Ekosistem Sungai untuk Mendukung Pembangunan Daerah		1	1	1	1	26,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)		1	1	1	1	42,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Fasilitas kawasan geodiversitas Indonesia - Karang Sambung		1	0	0	0	78,0	Provinsi Jawa Tengah		03
Pengembangan Penerbitan Ilmiah							11,5			
Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan Multimedia yang Terdiseminasi kepada Stakeholder		1	1	1	1	1	11,5	DKI Jakarta		03
JUMLAH							4.527,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

080.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	362,2
Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	925,6
JUMLAH	1.287,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

080.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan							111,9			
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BATAN							29,9			
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir	15	20	20	20	20	12,7	Pusat		03
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	500	500	600	600	600	9,2	Pusat		03
Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	Jumlah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	2	2	2	2	2	8,0	Pusat		03
Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi dan Sertifikasi							6,7			
Pelaksanaan dan Penerapan Standardisasi Iptek Nuklir	Dokumen Standardisasi Produk Iptek Nuklir	6	7	7	7	7	3,5	Pusat		03
Pelaksanaan dan Penerapan Akreditasi dan Sertifikasi Iptek Nukli	Akreditasi dan Sertifikasi Iptek Nuklir	2	7	7	7	7	3,2	Pusat		03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir							75,2			
Jasa Pendidikan Iptek Nuklir	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Sertifikasi Personel	3.25	3.25	3.26	3.26	3.27	30,6			03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	96	68	107	96	96	31,9	Yogyakarta		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

080.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan Pengembangan Pendidikan Tinggi Teknologi Nuklir		3	3	3	3	3	12,7	Pusat		03
Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi							277,8			
Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Nuklir							168,3			
Pengembangan PLTN Skala Industri	Pengembangan PLTN Skala Industri	5	6	6	6	7	168,3			03
Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka							53,1			
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Prototipe RF Radiosinovektori		1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	4,2	Prov Banten		03
Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka untuk Diagnosis dan Terapi	Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka	5	5	7	7	7	31,3	Prov Banten		03
Pemeliharaan, Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Keselamatan Pendukung Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka	Dokumen Pengoperasian, Pemeliharaan Fasilitas Pengembangan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	1	1	1	1	1	17,6	Prov Banten		03
Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor Riset							23,7			
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Prototipe Senyawa Bertanda untuk Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	23,7	Prov Banten		03
Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir							32,7			
Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir	Dokumen Teknis Teknologi dan Keselamatan PLTN Besar dan SMR	4	5	6	7	8	32,7			03
JUMLAH							389,7			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	259,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt	18,0
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7.465,9
JUMLAH	7.743,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT							80,3			
Dukungan Manajemen dan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi BPPT							80,3			
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Jumlah Perekayasa yang mendapatkan Beasiswa S3	1	1	1	1	1	77,5	DKI Jakarta		03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Program Pembinaan Pejabat Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa						2,8	DKI Jakarta		03
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi							6.651,8			
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur							138,5			
Penelitian Flagship Riset Nasional	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur	1	1	1	1	1	138,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pati							5,5			
Penelitian Flagship Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	5,5	Lampung		03
Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi							34,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Pembibitan Hortikultura	1	1	1	1	1	17,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Bioteknologi untuk Pengembangan Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	17,3	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai							22,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Uji Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai untuk mendukung Bidang Maritim dan Transportasi	1	1	1	1	1	8,7	Yogyakarta	03	
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	1	1	1	1	1	14,1	Yogyakarta	03	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan							215,9			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	5	5	5	5	5	215,9	DKI Jakarta, Mentawai dan Selat Sunda	03	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri							13,4			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pangan untuk Mencegah Stunting	1	1	1	1	1	13,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten	03	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri							3,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	3,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten	03	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi							24,6			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk e-Services (e-Government dan e-Business)	1	1	1	1	1	24,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten	03	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika							110,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	110,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten	03	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Permesinan							29,1			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	4,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten	03	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Propulsi Kendaraan Berbasis Listrik	1	1	1	1	1	25,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan							607,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	3	3	3	3	3	607,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah							77,3			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases	1	1	1	1	1	77,3	Provinsi Riau		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi							1.305,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Produk bidang Transportasi Perkeretaapian	2	2	2	2	2	1.305,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan penerapan Teknologi Lingkungan							8,1			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi	2	2	2	2	2	1,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina- TEWS	2	2	2			7,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material							148,3			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi	1	1	1	1	1	1,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Implan Tulang Titanium dan Gigi	2	2	2	2	2	120,2	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Bangunan Tahan Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun dan Murah	1	1	1	1	1	10,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina- TEWS	1	1	1			4,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	11,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	1	1	1	1	1	1,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian							13,7			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi teknologi produksi bahan baku obat herbal	1	1	1	1	1	13,7	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana							2.250,0			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana	1	1	1			2.250,0	Kepulauan Mentawai dan Selat Sunda		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral							10,0			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel	1	1	1	1	1	10,0	Morowali		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika							29,5			
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Inovasi Teknologi Hidrodinamika Bidang Maritim	3	3	3	3	3	29,5	Jawa Timur		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca							479,7			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina- TEWS	4	4	4			23,7	DKI Jakarta		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Uji Teknologi dan Armada untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Rawan Bencana	4	4	4	4	4	101,0	Provinsi Riau		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Pengadaan armada pendukung modifikasi Cuaca dan Peralatannya	4	4	4			355,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika							12,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim	1	1	1	1	1	4,2	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	1	1	1	1	1	8,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Penerapan Sistem Audit Teknologi							13,4			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	1	1	1	1	1	8,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	1	1	1	1	1	0,9	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	1,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	2,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Industri Proses dan Energi							2,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	2,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Industri Manufaktur, Telematika dan Elektronika							2,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik	1	1	1	1	1	2,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi Energi							415,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil	1	1	1	1	1	331,6	Kamojang		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	83,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia							173,7			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	1	1	1	1	1	173,7	Gresik, Jawa Timur		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim							363,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Industri Perkapalan	5	5	5	5	5	363,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Elektronika							140,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik	5	5	5	5	5	5,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina- TEWS	5	5	5			135,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
JUMLAH							6.732,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	178,2
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	3.781,3
JUMLAH	3.959,5

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa							3.707,0			
Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh							331,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	3650000	3650000	3650000	3650000	3650000	296,0	Pusat		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Space Map untuk Multi Sektor (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	4	4	4	4	4	10,0	Pusat		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Produk Litbangyasa Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	9	9	9	9	9	10,0	Pusat		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		03
Pengembangan Sains Antariksa							211,9			
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Observatorium Nasional (Obsnas) di NTT	1		-	-	-	164,0	Provinsi NTT		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Informasi cuaca antariksa	3	3	3	3	3	47,9	Jawa Barat		03
Pengembangan Sains Atmosfer							320,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk Keselamatan Transportasi, Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	3	3	3	3	3	95,0	Jawa Barat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Decision Support Tools (DST) berbasis Sains dan Teknologi Atmosfer untuk mendukung Smart Water Management System	-	3	3	3	3	100,5	Jawa Barat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Laboratorium Terbang Nasional	-	1	-	-	-	125,0	Jawa Barat		03
Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh							360,2			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA (KOORDINATOR PRN)	1	2	2	2	1	35,0	Pusat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Model pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs)	19	2	2	2	2	25,0	Pusat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Layanan Pengguna Bidang Pemanfaatan Penginderaan Jauh	100	3	3	3	3	29,8	Pusat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional	-	4	4			270,4			03
Pengembangan Teknologi Penerbangan							655,1			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Mission System Pesawat Tanpa Awak MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT MALE KOMBATAN)	1	1	1	1	1	275,0	Jawa Barat		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Pesawat N219 Amphibi (KOORDINATOR PRN)	1	1	1	1	1	250,1	Jawa Barat		03
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Teknologi Operasi Terbang dan Diseminasi	2	2	2	2	2	5,0	Jawa Barat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Pembangunan Laboratorium Pengujian Komponen Pesawat Udara Berdasarkan Standar Internasional DO-160	1	-	-	-	-	125,0	Jawa Barat		03
Pengembangan Teknologi Satelit							845,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah (KOORDINATOR PRN)	1	1				844,2	Jawa Barat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Satelit Mikro LAPAN-A4	1					1,0	Jawa Barat		03
Pengembangan Teknologi Roket							983,2			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Prototipe roket bertingkat 100 KM (KOORDINATOR PRN)	1	1	1	1	1	975,0	Jawa Barat		03
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan Khusus	2					5,0	Jawa Barat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Bandar Antariksa Skala Kecil	-	-	-	-	-	3,2	Papua		03
JUMLAH							3.707,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	417,3
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	3.533,2
JUMLAH	3.950,5

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial							2.368,4			
Pembangunan Jaringan Kontrol Geodesi dan Geodinamika							387,1			
Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun	30	45	45	45	45	242,5	Cors RPJMN (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua), CORS InaTEWS (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat)		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun	Jumlah stasiun pasang surut yang dibangun	26	31	31	31	31	136,6	Pasut RPJMN (Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Lampung, NTB, Sumatera Selatan, NTT, NTB, Kalimantan Tengah), Pasut InaTEWS (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Banggai Kepulauan-Sulteng, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Aceh, Lampung, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah)		06
Titik Pantau Geodinamika yang Terkelola	Jumlah titik pantau geodinamika yang dikelola	90	90	90	90	90	8,0	Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan		06
Pemetaan Batas Wilayah							137,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	500	4000	4000	4000	4000	100,0	Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara		02
Tanda batas Negara	Jumlah pilar tanda batas negara yang dibangun	120	225	200	200	200	31,5	Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat		07
Peta batas Negara	Jumlah peta batas negara yang dihasilkan	32	20	20	20	20	2,5	RI-Malaysia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat), RI-PNG (Papua), RI-RDTL (NTT)		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas laut yang dihasilkan	6	20	20	17	15	1,4	RI-Malaysia (Selat Malaka dan Laut Sulawesi), RI- Vietnam (Natuna), RI- Palau (Samudera Pasifik), RI-India (Samudera Hindia), RI-RDTL (Laut Timor)		07
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas darat yang dihasilkan	3	20	20	20	20	2,5	RI-Malaysia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat), RI-PNG (Papua), RI- RDTL (NTT)		07
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai							165,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan Garis Pantai Prioritas	Panjang Garis Pantai Terpetakan	10000	6000	6000	6000	6000	165,5	Lombok, Selat Sunda, Bali, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Kendari, Kolaka, Labuan Bajo, Maumere, Manokwari, Makassar, Pare-pare, Selayar, Poso, Kaimana, Nabire, Biak, Serui, Merauke, Bontang, Tarakan, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Madura, Probolinggo, Jakarta, Cirebon, Indramayu, Cilacap, Rembang, Jepara, Padang, Mamuju, Gorontalo, Manado, Bengkulu, Batam, Singkawang, Palopo, Toli-toli, Waingapu, Amahae		01
Pemetaan Rupabumi dan Toponim							1.240,7			
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	6865	14000	14000	14000	14000	790,5	Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTB		02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	Cakupan peta RBI skala 1:5000	21889 (4099 NLP)	14000	14000	14000	14000	450,2	Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTB		02
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial							437,3			
Layanan Data Center	Jumlah hari layanan data center beroperasi	360	360	361	361	362	327,3	Pusat		02
Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia	Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun	300	1200	1200	1200	1200	110,0	Pusat		02
JUMLAH							2.368,4			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	185,9
Program Pengembangan Standardisasi nasional	774,5
JUMLAH	960,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Standardisasi nasional							752,2			
Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal							41,2			
Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal		200	220	240	260	280	28,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru		160	166	172	178	180	12,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi							20,5			
Standar Nasional Indonesia bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi		150	175	190	205	230	20,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif							20,5			
Standar Nasional Indonesia bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		150	170	190	210	230	20,5	Pusat		01
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian							66,1			
Pembinaan Penerapan SPK bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)		225	350	430	585	628	41,1	Pusat		01
Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis		1800	1800	2000	2000	2000	25,0	Makassar, Riau, Palembang, Surabaya, Bekasi		01
Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian							14,1			
Skema Penerapan Standar		275	375	480	600	725	14,1	Pusat		01
Peningkatan Akreditasi Laboratorium							167,2			
Penilaian Akreditasi Laboratorium		1035	1095	1150	1205	1260	97,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Laboratorium SNSU		1					70,0	Serang	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Serifikasi							41,6			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi		650	700	750	800	850	41,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi							14,5			
Sistem dan Skema Akreditasi		14	15	16	17	18	14,5	Pusat		01
Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi							110,1			
Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi		62	62	65	65	65	110,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia							169,6			
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia		71	71	73	73	73	169,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian							4,7			
Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		1	1	1	1	1	4,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Data dan Sistem Informasi							15,0			
Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		1	1	1	1	1	15,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							67,1			
Penelitian Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		4	10	12	14	18	15,2	Pusat		01
Pelatihan dan Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		3	3	3	3	3	35,9	Pusat		01
Roadmap Pengembangan SPK		1	1				1,0	Pusat		01
Pengembangan keahlian spesifik SPK bagi Standards Professionals Indonesia		1	1	1	1	1	15,0	Pusat		01
JUMLAH							752,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

085.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	16,8
Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	335,6
JUMLAH	352,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

085.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir							157,9			
Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir							157,9			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pasca bencana	Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional	4	15	15	15	15	157,9	Pusat		03
JUMLAH							157,9			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

086.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	124,5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	103,0
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	412,5
JUMLAH	640,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

086.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara							105,4			
Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat							6,5			
Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)	Jumlah Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)	1 Sistem	-	-	-	-	1,5	Pusat		07
Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional	-	-	1 Dokumen	-	-	5,0	Pusat		07
Inovasi Administrasi Negara							6,6			
Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah lab inovasi pelayanan publik	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	6,6	Daerah		07
Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara							6,2			
Skenario model kesejahteraan ASN (insentif untuk ASN High Performance, insentif untuk ASN di daerah 3T dan risiko tinggi)	Laporan rekomendasi kebijakan	3 Kajian	-	-	-	-	1,2	Pusat		07
Gap analysis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan	Jumlah dokumen gap analysis	1 Dokumen	-	-	-	-	5,0	Pusat		07
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara							2,0			
Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan ASN	Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Pengembangan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah Kebijakan/modul/pedoman	-	2 kebijakan/modul/pedoman	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

086.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Standarisasi Pembentukan Karakter Dasar dan Kader ASN							83,1			
Penerapan sekolah kader ASN	Jumlah lulusan sekolah kader ASN	-	100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta	83,1	Pusat		07
Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN							1,0			
Pengembangan Model Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah Kebijakan/modul/pedoman	-	1 kebijakan/ modul/ pedoman	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
JUMLAH							105,4			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

087.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	82,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2,8
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	215,0
JUMLAH	300,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

087.B.1

Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional							180,1			
Pembinaan Kearsipan Pusat							108,9			
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	75 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	122 Rekomendasi	7,1	Pusat		07
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	K/L = 32 Instansi Daerah = 38 Prov/Kab/Ko ta	K/L = 7 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Ko ta	K/L = 14 Instansi Daerah = 27 Prov/Kab/Ko ta	K/L = 16 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Ko ta	K/L = 8 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Ko ta	76,0	Pusat		07
Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	75 Instansi	167 Instansi	171 Instansi	168 Instansi	122 Instansi	25,9	Pusat/Daerah		07
Pemanfaatan Arsip							23,2			
Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	254650	280110	308145	338945	372835	23,2	Pusat/ Daerah		04
Preservasi Kearsipan							28,9			
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	122851	293730	323823	356845	392970	28,9	Pusat/Daerah		04
Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional							19,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

087.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	10120	10120	10120	10120	10120	19,1	Pusat/ Daerah		04
JUMLAH							180,1			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

088.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	114,6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	180,7
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	596,1
JUMLAH	891,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

088.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							58,8			
Perumusan Kebijakan Teknis Jabatan Aparatur Sipil Negara							15,3			
Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir instansi	72 IP	137 IP	137 IP	137 IP	138 IP	15,3	Pusat		07
Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian							21,2			
Data ASN yang Akurat dan Komprehensif	Jumlah Data ASN	1 Database	-	-	-	-	10,5	Pusat		07
Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi ASN Terintegrasi	1 Sistem	-	-	-	-	10,7	Pusat		07
Pelaksanaan Pengembangan Kinerja, Standardisasi Kinerja Jabatan, dan Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara							15,0			
Penerapan Sistem informasi Manajemen Kinerja ASN	Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja ASN sesuai PP 30/2019 menggunakan sistem informasi kinerja	25 IP	204 IP	204 IP	202 IP	-	15,0	Pusat/Daerah		07
Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS							6,8			
Sistem Talent Pool JPT Nasional	Jumlah Sistem Talent Pool JPT Nasional	-	-	-	1 Upgrade Sistem	-	3,0	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

088.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan kompetensi ASN (JPT dan JA) melalui Assesment Center	Jumlah ASN (JPT dan JA) yang terpetakan kompetensinya melalui assesment center	2000 Orang	100% jumlah JPT dan JA terpetakan kompetensinya	-	-	-	3,8	Pusat/Daerah		07
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kode Etik, dan Disiplin, Serta Pemberhentian dan Pensiun							0,5			
Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun	Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS	25	25	25	25	25	0,5	Pusat		04
JUMLAH							58,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

089.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.371,6
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2.155,9
JUMLAH	3.527,5

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

089.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah							394,0			
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP							394,0			
Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko	Jumlah kebijakan/ pedoman pelaksanaan manajemen resiko	1	0	0	0	0	2,3	Pusat		07
Penerapan Manajemen Risiko di K/L	Jumlah K/L dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada level 3 dari skala 1 s.d. 5	18 IP	37 IP	49 IP	60 IP	69 IP	60,8	Pusat		07
		0,2069	0,4253	0,5632	0,6697	0,7931	0,0			07
Penerapan Manajemen Risiko di Provinsi	Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada level 3 dari skala 1 s.d. 5	2 IP	6 IP	10 IP	14 IP	23 IP	15,6	Daerah		07
		0,05	0,15	0,3	0,4	0,62	0,0			07
Penerapan Manajemen Risiko di Kab / Kota	Jumlah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada level 3 dari skala 1 s.d. 5	25 IP	51 IP	76 IP	127 IP	200 IP	132,9	Daerah		07
		0,05	0,1	0,15	0,25	0,39	0,0			07
Penerapan Manajemen Risiko di Badan Usaha (BUMN/D, BLU/D)	Jumlah Badan Usaha dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	355 BU	419 BU	524 BU	622 BU	741 BU	182,4	Pusat / Daerah		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

089.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
		0,1674	0,1975	0,2471	0,2933	0,3494	0,0			07
JUMLAH							394,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	2.245,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	1.774,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	174,7
Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	184,9
Program Pengembangan Ekspor Nasional	2.086,6
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	755,0
Program Perundingan Perdagangan Internasional	802,1
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6.127,8
Program Perdagangan Berjangka Komoditi	306,9
Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.292,3
JUMLAH	15.750,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan							281,2			
Penyelenggaraan Akademi Metrologi							38,2			
Layanan Pendidikan Vokasi Kemetrolagian	Jumlah lulusan Akademi Metrologi	165	165	215	265	315	38,2	Jawa Barat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	01
Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)							243,0			
Buyer Inquiry	Jumlah buyer inquiry	9	12	15	18	21	75,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Market Intelligence dan Co Working Space di Pasar Potensial	Jumlah Market Intelligence dan Co Working Space	21 Martel dan 5 Co Working Space	22 Martel dan 6 Co Working Space	23 Martel dan 7 Co Working Space	24 Martel dan 8 Co Working Space	25 Martel dan 9 Co Working Space	168,0	Canberra, Sydney, Singapore, KL, Bangkok, Manila, Hanoi, Hongkong, Taiwan, Shanghai, Beijing, Seoul, Busan, Osaka, Tokyo, Chennai, New Delhi, Dubai, Riyadh, Jedah, Kairo, Johannesburg, Lagos, Moscow, Budapest, Roma, Barcelona, Madrid, Milan, Lyon, Jenewa, Paris, London, Denhag, Brussel, Hamburg, Berlin, Copenhagen, Santiago, Sao Paolo, Mexico, LA, Vancouver, Chicago, Washington, Ottawa	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Pengembangan Ekspor Nasional							1.175,2			
Pengembangan Produk Ekspor							121,2			
Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center	Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC	70	80	90	100	110	55,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Pengembangan produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	50	60	70	80	90	16,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekspor sektor jasa dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	25	30	35	40	45	50,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor							70,9			
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pusat promosi ekspor dalam dan luar negeri	7	7	7	7	7	40,9	Sydney, Jeddah, Lagos, Hongkong, Skow, Nunukan, Atambua		01
Pilot Project Pendirian Export Center	Jumlah Export Center di Daerah		1	2	3	4	30,0	Medan, Bandung, Surabaya, Makassar	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor							131,3			
Penghargaan Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang diberi penghargaan dan fasilitas	50	50	50	50	50	17,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang utama	6	10	15	20	25	41,4	Pusat		01
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	4	7	10	15	20	27,9	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Customer Service Center (Export helpdesk) Online/Offline	Jumlah export helpdesk	1	1	1	1	1	19,5	Pengumpulan data dilakukan di daerah(Jateng, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku)	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan market place berorientasi ekspor	Jumlah Layanan Market Place	1	1	1	1	1	25,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Promosi dan Citra							714,9			
Kegiatan Pencitraan	Jumlah kegiatan pencitraan	11	11	11	11	11	27,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca Kegiatan, World Dubai Expo 2020	Jumlah pelaksanaan WED 2020	1	1	1	1	1	330,5	Dubai	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
CA Expo Nanning China dan Penugasan Pameran Terintegrasi	Jumlah promosi terintegrasi	7	7	8	8	8	50,1	China, Jerman	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang utama	11	15	20	25	30	101,0	Amerika Serikat, Eropa Barat, Vietnam, Jepang, Australia	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	4	10	15	20	25	138,8	Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Promosi Produk dan jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	Jumlah Promosi Produk dan Jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	6	6	6	6	6	67,2	Jakarta, Surabaya	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kerja Sama Pengembangan Ekspor							39,7			
Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	5	5	5	5	5	12,6	Swiss, Amerika Serikat, RRT, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor	750	770	790	810	830	16,8	Jateng, Jatim, Kaltim, Sumut, Sumsel, Bali	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan Kerjasama Ekspor Sektor Jasa	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor sektor jasa	2	2	2	2	2	3,2	Jabar, Banten	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama	6	6	6	6	6	7,0	Sulsel, NTT, Kalbar, Jabar, Yogya, Jatim	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan SDM Bidang Ekspor							97,2			
Export Coaching Program	Jumlah peserta export coaching program	125	150	175	200	225	26,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Jumlah pendidikan dan pelatihan ekspor	119	124	129	134	139	70,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri							345,4			
Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan							26,6			
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan	7	7	7	7	7	26,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan							37,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kebijakan Ekspor Produk Industri	Jumlah Peraturan Menteri terkait ekspor produk industri	2	2	2	2	2	10,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi peningkatan hilirisasi ekspor produk perindustrian dan pertambangan berteknologi tinggi	Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk industri dan pertambangan	7	7	7	7	7	26,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor							83,3			
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui Inatrade	Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui Inatrade	1	1	1	1	1	10,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang	Negara	1	1	1	1	1	5,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	1	1	1	1	1	6,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan terhadap Implementasi Fasilitasi Perdagangan (KNFP)	Jumlah layanan KNFP	1	1	1	1	1	13,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Skema Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia	Jumlah Skema Fasilitasi Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan Lainnya	1	1	1	1	1	8,3	34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Fasilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah Perbatasan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu(SKPT)			7+13	18+13	18+13	18+13	38,0	Pusat	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Pengelolaan Impor							31,0			
Kebijakan Impor Dalam Rangka Penguatan Struktur Impor Bahan Baku dan Penolong	Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Baku dan Penolong	9	8	7	6	5	11,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kebijakan Impor Pangan yang Harmonis dengan Kebijakan Pangan Nasional	Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Pokok	4	4	4	4	4	6,3	Pusat		01
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Impor di Post Border	Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan impor di post border	1	1	1	1	1	13,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar							54,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Jumlah pengamanan dan perlindungan akses pasar	29	31	33	35	37	54,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah							112,4			
Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM	Jumlah UKM yang diberikan fasilitasi promosi dan diklat	500	550	600	650	700	99,4	Pusat		01
FTA Center di Daerah	Jumlah FTA Center di Daerah	1	1	0	0	0	13,0	Jatim	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Perundingan Perdagangan Internasional							687,7			
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional							359,5			
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra	88	90	92	94	88	218,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
FTA Center	Jumlah layanan FTA Center Piloting (Sebelum beralih ke export center)	903	910	910	910	903	70,1	Jakarta, Jateng, Maluku, Sulsel, Sumut, Jabar	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	13	15	17	19	21	17,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional	7	7	7	7	7	40,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah tindak lanjut perundingan perdagangan internasional	2	2	2	2	2	7,3	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat LN dan Daerah	2	2	2	2	2	5,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perundingan Perdagangan Jasa							94,7			
Penyusunan Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa	Jumlah dokumen Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa	3	3	3	3	3	41,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akses Pasar Jasa di Pasar	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar sektor jasa di negara mitra	40	42	44	46	48	33,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Perundingan Bidang Jasa	Jumlah dokumen koordinasi perundingan bidang jasa	1	1	1	1	1	20,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perundingan Perdagangan Multilateral							47,9			
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Multilateral	29	31	33	35	29	41,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	5	5	5	5	5	6,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN							62,1			
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum ASEAN dan Mitra ASEAN	110	115	120	125	110	56,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	8	8	8	8	8	5,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perundingan Perdagangan Bilateral							75,9			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Bilateral	90	100	110	120	100	75,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional							47,7			
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum APEC dan organisasi internasional	76	81	86	91	96	38,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	Jumlah laporan Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	8	8	8	8	8	9,4	Pusat		01
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri							5.180,0			
Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							784,4			
Peningkatan Kewirausahaan dan Bantuan Pemasaran	Jumlah bantuan sarana usaha perdagangan	10000	10000	10000	10000	10000	644,8	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	2500	3000	3500	4000	4500	77,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01, 04
Promosi Makanan dan Minuman Sehat Nusantara	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat Nusantara	300	400	500	600	700	62,5	34 Provinsi		03
Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting							228,0			
Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat	Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat	12	12	12	12	12	183,8	Pusat		01
Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	Jumlah stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN	82	82	82	82	82	44,2	Pusat		01
Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan							106,4			
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan	Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan	200	300	400	500	600	12,0	Pusat		01
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan	Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang mendapat pembinaan	2000	2000	2000	2000	2000	74,7	Pusat		01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Secara Elektronik	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik	1	1	1	1	1	6,2	Pusat		01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Konvensional	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional	5	5	5	5	5	13,6	Pusat		01
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan							4.061,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	800	800	800	800	800	191,3	Pusat		02
Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	Jumlah Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	3	10	20	30	40	51,5	Pusat		01
Penataan Perdagangan Antar Provinsi	Jumlah Sistem Perdagangan Antar Provinsi	1	1	1	1	1	30,7	Pusat		01
Verifikasi Data Gudang dan Stok Barang di Gudang	Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang dan Laporan Stok Barang di Gudang	1	1	1	1	1	75,0	Pusat		01
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	49	70	72	68	48	3.712,6	Pusat	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke; Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Beraraf Internasional	01, 02
Program Perdagangan Berjangka Komoditi							80,2			
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas							57,0			
Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	50	55	60	65	70	19,5	Pusat		01
Jumlah Pengguna Pasar Lelang	Jumlah Pelaku Pengguna Pasar Lelang	430	430	430	430	430	9,5	Riau, Jambi, Lampung, Bali, NTB, Sulut, Sultra, Gorontalo, Jabar, Jatim, Sulsel, Jateng, Sumbar, DKI Jakarta		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	Jumlah Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	6	12	17	22	27	28,0	Tanah Datar, Madiun, Kudus, Gorontalo, Tapin, Garut		01
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas							23,2			
Analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang	Jumlah analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang	7	7	7	7	7	23,2	Pusat		01
Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga							561,4			
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen							95,9			
Edukasi Konsumen	Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	6500	6500	6500	6500	6500	71,0	Pusat		04
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang dibina	500	500	500	500	500	3,4	Pusat		04
Pembinaan SDM Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah SDM LPK yang dibina	330	330	330	330	330	21,5	Pusat		01
Peningkatan Tertib Ukur							74,8			
Daerah Tertib Ukur	Jumlah Daerah Tertib Ukur	10	10	10	10	10	16,2	Pusat		01
Pengawasan Kemetrolagian	Pengawasan Kemetrolagian	15000	15000	15000	15000	15000	55,6	Pusat		01
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kemetrolagian	Jumlah pejabat fungsional bidang kemetrolagian yang diberikan pembinaan	400	400	400	400	400	3,1	Pusat		01
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa							58,4			
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ	Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang diberikan pembinaan	115	115	115	115	115	17,7	Jawa Barat		01
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis	Jumlah Pengawasan	50	50	50	50	50	5,9	Pusat		01
Pengawasan Barang Beredar terhadap Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label	Jumlah pengawasan barang beredar terhadap ketentuan SNI, MKG, dan Label	660	670	680	690	700	34,8	Pusat		01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang							69,7			
Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah contoh/sampel yang diuji mutu barang	4500	4600	4700	4800	4900	57,4	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Jumlah pejabat fungsional penguji mutu barang yang diberikan pembinaan	150	150	150	150	150	12,2	DKI Jakarta		01
Standardisasi dan Pengendalian Mutu							31,5			
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	7500	7500	7500	7500	7500	11,5	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor	Jumlah informasi standar mitra tujuan ekspor	10	11	12	13	14	4,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pemantauan Mutu BOKOR	Jumlah pemantauan mutu bokor	6	7	8	9	10	15,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi							20,3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat/sampel yang diuji layanan kalibrasi	7100	7120	7140	7160	7180	20,3	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi							13,1			
Layanan Sertifikasi	Jumlah layanan sertifikasi	169	179	189	199	209	13,1	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Tertib Niaga							197,7			
Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN	Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang diberikan pembinaan	150	150	150	150	150	26,3	Jawa Barat		01
Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diawasi	150	160	170	180	190	34,2	Pusat		01
Pengawasan Post Border	Jumlah Pengawasan Post Border	3162	3162	3162	3162	3162	137,2	Medan, Surabaya, Bekasi, Makassar	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
JUMLAH							8.311,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	636,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	41,0
Program Kepemudaan dan Keolahragaan	2.679,3
Program Pembinaan Olahraga Prestasi	3.811,2
JUMLAH	7.168,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Kepemudaan dan Keolahragaan							1.631,0			
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda							44,0			
Pemuda yang difasilitasi sebagai kader wirausaha	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	5000	5000	5000	5000	5000	24,0	Pusat		01, 03
Terfasilitasinya sentra kewirausahaan pemuda	Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi	34	34	34	34	34	20,0	Pusat		03
Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda							25,4			
Terfasilitasinya pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	1700	1700	1700	1700	1700	8,5	Pusat		03
Terfasilitasinya pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	1800	1800	1800	1800	1800	16,9	Pusat		03, 04
Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda							41,4			
Tersusun dan termanfaatkannya naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat		03
Terlaksananya koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	6	6	6	6	6	41,0	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan							93,6			
Terfasilitasinya pemuda dalam pendidikan kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarnas/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	17	17	17	17	17	50,7	Pusat		03, 04
Terfasilitasinya pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	6150	6150	6150	6150	6150	42,8	Pusat		03
Peningkatan Wawasan Pemuda							56,4			
Terfasilitasinya pemuda kader dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif	1500	1500	1500	1500	1500	28,2	Pusat		03, 07
Terfasilitasinya pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah keikutsertaan dalam Jambore Pemuda Indonesia	34	34	34	34	34	28,2	Daerah		03
Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus							25,1			
Tersampainya kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	11274	11274	11274	11274	11274	25,1	Pusat		03
Pengembangan Olahraga Pendidikan							17,5			
Tersampainya kampanye olahraga olimpiak di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Nonformal dan Informal	Jumlah peserta olahraga olimpiak yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	17000	17000	17000	17000	17000	17,5	Pusat		03
Pengembangan Olahraga Rekreasi							162,3			
Tersampainya kampanye olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata	Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata	14020	14020	14020	14020	14020	140,9	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Terfasilitasinya Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Kejuaraan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan kejuaraan olahraga rekreasi	3	3	3	3	3	21,4	Pusat		03
Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga							807,2			
Tersusun dan termanfaatkannya naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,7	Pusat		03
Meningkatnya peserta PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan di daerah	Jumlah peserta PPLP/PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Di Daerah	1381	1381	1381	1381	1381	623,0	Pusat		03
Meningkatnya kualitas pengelolaan sentra keolahragaan dan sekolah khusus keolahragaan	Jumlah peserta olahraga di sekolah khusus keolahragaan	253	253	253	253	253	183,5	Pusat		03
Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga							329,6			
Terfasilitasinya bantuan untuk Prasarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berbasis cabang olahraga olimpiik	Jumlah fasilitasi prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiik	29	29	29	29	29	64,8	Pusat		03
Terfasilitasinya bantuan untuk Sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berbasis cabang olahraga olimpiik	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasiberbasis cabang olahraga olimpiik	59	58	58	58	58	264,8	Pusat		03
Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga							28,6			
Tersusunnya Naskah Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang dapat dimanfaatkan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Terlaksananya Koordinasi dan Kemitraan Keolahragaan dengan Lembaga Lintas Sektoral, Antar Tingkat Pemerintah Daerah dan Luar Negeri	Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	10	10	10	10	10	28,2	Pusat		03
Program Pembinaan Olahraga Prestasi							2.867,0			
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan							147,3			
Terfasilitasinya pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpiik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	Jumlah pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpiik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	17	17	17	17	17	24,2	Pusat		03
Terfasilitasinya pengelola organisasi keolahragaan olimpiik dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan olimpiik yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	1250	1250	1250	1250	1250	29,6	Pusat		03
Terfasilitasinya tenaga keolahragaan olimpiik dalam pengembangan tenaga keolahragaan	Jumlah tenaga keolahragaan olimpiik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	3000	3000	3000	3000	3000	93,5	Pusat		03
Pembinaan Olahraga Prestasi							2.719,7			
Tersusun dan termanfaatkannya naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi	Jumlah naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,6	Pusat		03
Terfasilitasinya olahragawan andalan nasional	Jumlah olahragawan andalan nasional	1000	1000	1000	1000	1000	1.409,3	Pusat		03
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi event)	44	44	44	44	44	50,7	Pusat		03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional (PON, Peparnas)	2	N/A	N/A	N/A	2	328,2	Pusat		03
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional (Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games, ASEAN Para Games)	3	2	2	2	2	868,9	Pusat		03
Terfasilitasinya penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi event)	62	62	62	62	62	62,0	Pusat		03
JUMLAH							4.498,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

093.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	777,7
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1.078,9
JUMLAH	1.856,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

093.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi							74,5			
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan KPK, serta Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di Semua Lembaga Negara dan Pemerintah							28,8			
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Jumlah Instansi yang dilakukan Survei Penilaian Integritas	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	28,8	Pusat		07
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan							45,7			
Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	45,7	Pusat		07
JUMLAH							74,5			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

095.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	302,4
Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	2.441,2
JUMLAH	2.743,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

100.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI YUDISIAL RI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	99,5
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	157,1
JUMLAH	256,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

100.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI YUDISIAL RI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial							12,5			
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik							12,5			
Karakterisasi putusan	Jumlah Putusan yang dilakukan Karakterisasi	35 putusan	35 putusan	35 putusan	35 putusan	35 putusan	12,5	Pusat		07
JUMLAH							12,5			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	697,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	51,1
Program Penanggulangan Bencana	2.533,4
JUMLAH	3.281,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB							54,9			
Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana							54,9			
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Simulasi PB di Daerah	Jumlah lokasi pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah	19	19	19	19	19	54,9	34 Provinsi		06
Program Penanggulangan Bencana							1.773,5			
Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana							29,0			
Sistem dan dukungan teknis sistem penanggulangan bencana	Jumlah sistem yang dikembangkan	13	13	13	13	13	29,0	Pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui mitigasi bencana							19,5			
Satuan Pendidikan Aman Bencana	jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana	8	8	8	8	8	19,5	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi							7,9			
Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah personil yang didampingi	120	120	120	120	120	7,9	Pusat		06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat										
							1.056,4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan	10	10	10	10	10	1.056,4	34 provinsi		06
Peringatan Dini							22,0			
Sistem Peringatan Dini	jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini yang dimanfaatkan	6	6	6	6	6	22,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan							70,2			
Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	Jumlah daerah yang mendapat prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi	10	10	10	10	10	58,0	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Budaya Sadar bencana	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana	81	81	81	81	81	12,2	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Layanan pusat pengendalian operasi							8,2			
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan keposkoan	Jumlah personil yang mendapat pendampingan SKPDB dan keposkoan	105	105	105	105	105	8,2	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat							6,1			
Pengelola Infrastruktur Darurat	Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	100	100	100	6,1	34 provinsi		06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan							49,5			
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan	Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana	2	2	2	2	2	2,4	34 Provinsi		06
Desa Tangguh Bencana	jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	120	120	120	120	120	47,1	34 Provinsi		06
Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB							269,9			
Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan Logistik dan Peralatan PB	144	136	135	134	134	269,9	34 Provinsi		06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan PB							52,2			
Distribusi Logistik dan Peralatan PB	Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB	5	5	5	5	5	52,2	34 Provinsi		06
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pascabencana							16,0			
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	2,5	Provinsi Sulawesi Tengah	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	2,5	Provinsi NTB	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	2,5	Provinsi Banten	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	4	4	4	4	4	8,5	34 provinsi		06
Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA							45,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	6,0	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	7,0	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	7,0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	8	8	8	8	8	25,2	34 provinsi		06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi							57,2			
Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi	490 orang	490 orang	490 orang	490 orang	490 orang	56,0			06
Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi	80 orang	80 orang				1,2	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana							26,3			
Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana	Jumlah kajian pemetaan dan analisis risiko bencana tersusun	5	5	5	5	5	26,3	Pusat		06
Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana							37,9			
Kajian Teknis, Riset dan Dukungan Teknis Pengembangan Strategi PB	Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	18	18	18	18	18	37,9	Pusat		06
JUMLAH							1.828,4			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

104.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	669,6
JUMLAH	669,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

104.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI							365,0			
Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia							365,0			
CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural	Pelaksanaan pembekalan akhir keberangkatan	179.860 CTKI/TKI	200.000 CTKI/TKI	230.000 CTKI/TKI	260.000 CTKI/TKI	300.000 CTKI/TKI	190,0	Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta		07
CTKI/TKI yang terlindungi	Penanganan/pemulangan TKI Bermasalah	18.000 TKI	17.000 TKI	15.000 TKI	13.000 TKI	10.500 TKI	175,0	Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

104.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
JUMLAH							365,0			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

106.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	87,7
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	846,7
JUMLAH	934,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

106.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							821,8			
Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa							33,3			
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Perencanaan Pengadaan	Jumlah Pengembangan integrasi, dan Implementasi sistem informasi Perencanaan pengadaan	1	1	1	1	1	17,6	Pusat		07
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Movev Pengadaan	Jumlah Pengembangan integrasi, dan Implementasi sistem informasi movev pengadaan	1	1	1	1	1	15,7	Pusat		07
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional							465,3			
Pengembangan SPSE Terpusat	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi terpusat	10	150	300	450	600	465,3	Pusat dan Daerah		07
Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa							120,0			
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	20	20	25	30	34	120,0	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							33,9			
UKPBJ yang mencapai maturitas (level 3)	Jumlah UKPBJ yang mencapai maturitas (level 3)	100	197	290	382	481	33,9	Pusat dan daerah		07
Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							29,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

106.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	169	173	197	221	245	29,5	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							38,2			
Pelaksanaan Diklat	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	26	28	30	32	34	38,2	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan Sistem Katalog							72,8			
Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral	Jumlah Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	20	30	40	50	60	20,2	Pusat dan daerah		01
Pengembangan Produk yang Masuk e-catalogue	Jumlah Produk yang tersedia dalam e-catalogue	125000	150000	175000	200000	225000	12,8	Pusat		01
Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik	2	2	2	2	2	39,8	Pusat		01
Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum							28,8			
Rumusan Kebijakan dan Strategi Pengadaan Umum	Jumlah Dokumen Formulasi Permasalahan Penerapan Kebijakan PBJP dan Formulasi Aksi-aksi Kebijakan	2	3	3	4	4	28,8	Pusat		01
JUMLAH							821,8			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

107.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN SAR NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	371,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	801,1
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	13.019,4
JUMLAH	14.191,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

107.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN SAR NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan							11.685,2			
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR							10.601,2			
Pengadaan Peralatan SAR	Jumlah peralatan SAR yang disediakan (paket)	1	1	1	1	1	60,9	Pusat		05
Pembangunan Prasarana SAR	Jumlah Prasarana SAR yang dibangun (paket)	1	1	1	1	1	60,0	Pusat		05
Penyediaan Pesawat Fixed Wing	Jumlah Pesawat Fixed Wing yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (selesai)	1 (selesai)	1.800,0	Pusat		05
Penyediaan Medium Helicopter	Jumlah Medium Helicopter yang disediakan (unit)	1 (berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	3 (2 selesai dan 1 berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	2 (2 selesai)	1.880,0	Pusat		05
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1	Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.120,0	Pusat		05
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2	Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.960,0	Pusat		05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 1	Jumlah Rescue Boat Kelas 1 yang disediakan (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	175,3	Pusat		05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 2	Jumlah Rescue Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)	6	6	6	6	6	1.752,0	Pusat		05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1	Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 1 yang disediakan (unit)	12	15	15	15	15	354,0	Pusat		05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2	Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)	8	15	15	15	15	301,0	Pusat		05
Penyediaan Landing Craft	Jumlah Landing Craft yang disediakan (unit)	100	70	70	80	80	170,0	Pusat		05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

107.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Rafting Boat	Jumlah Rafting Boat yang disediakan (unit)	-	30	30	40	40	28,0	Pusat		05
Penyediaan Rescue Car Tipe I	Jumlah Rescue Car Tipe I yang disediakan (unit)	6	20	20	20	20	161,3	Pusat		05
Penyediaan Rescue Car Tipe II	Jumlah Rescue Car Tipe II yang disediakan (unit)	32	34	34	34	34	126,0	Pusat		05
Penyediaan Rescue Truck Tipe I	Jumlah Rescue Truck Tipe I yang disediakan (unit)	4	15	15	15	15	345,6	Pusat		05
Penyediaan Rescue Truck Tipe II	Jumlah Rescue Truck Tipe II yang disediakan (unit)	31	33	33	33	33	307,1	Pusat		05
Pengelolaan Operasi SAR							464,8			
Pengelolaan Operasi SAR	Jumlah Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (satker)	44	44	44	44	44	464,8	Pusat		05
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR							160,0			
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Jumlah sistem komunikasi SAR yang disediakan (paket)	4	6	6	8	8	160,0	Pusat		05
Pembinaan Potensi SAR							459,2			
Pengembangan SDM pencarian dan pertolongan yang kompeten	Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten (orang)	10000	10000	10000	10000	10000	459,2	Pusat		05
JUMLAH							11.685,2			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

108.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha	115,9
Program Pengawasan Persaingan Usaha	308,3
JUMLAH	424,2

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

108.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Persaingan Usaha							269,3			
Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha							15,9			
Pengawasan Persaingan Usaha	Jumlah kajian pengawasan persaingan usaha	7	7	8	8	8	15,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengawasan Kemitraan							18,6			
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	Jumlah Perkara Pengawasan Kemitraan	18	19	21	23	25	17,4	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	2	3	4	5	6	1,2	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU							45,1			
Rekomendasi Perkara Persaingan Daerah	Jumlah rekomendasi perkara persaingan usaha di daerah	36	36	40	46	46	17,6	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel		01
Harmonisasi Kebijakan Persaingan Daerah	Jumlah kebijakan daerah yang harmonis dengan nilai persaingan usaha sehat	18	20	20	20	26	19,0	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

108.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah	Jumlah pengawasan pelaku usaha di daerah	18	20	20	20	24	8,5	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel		01
Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat							36,5			
Investigasi Pelanggaran Persaingan Usaha	Jumlah investigasi pelanggaran persaingan usaha	100	117	137	157	177	36,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat							42,0			
Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Jumlah laporan pemberkasan perkara persaingan usaha	32	25	25	30	30	11,1	Pusat		01
Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi	Jumlah penuntutan perkara persaingan usaha		19	21	23	25	23,2	Pusat		01
Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU	Jumlah laporan litigasi perkara persaingan usaha		12	14	16	18	7,7	Pusat		01
Penilaian Merger dan Akuisisi							19,1			
Penilaian Merger dan Akuisisi	Jumlah penilaian merger dan akuisisi	39	38	42	46	50	16,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penanganan Perkara Merger dan Akuisisi	Jumlah dugaan perkara merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti		6	8	9	10	2,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Analisis Kebijakan Pemerintah							16,2			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

108.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan dan Monitoring Surat Saran	Jumlah surat saran pertimbangan KPPU kepada K/L/D	10	10	10	12	12	1,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Analisa dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah	Jumlah kajian analisa kebijakan persaingan	7	9	9	11	11	15,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan							17,3			
Advokasi Persaingan Usaha	Jumlah advokasi persaingan usaha	15	15	16	17	18	10,9	Pusat		01
Advokasi Kemitraan	Jumlah advokasi kemitraan	12	13	14	15	16	6,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha							58,6			
Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	Jumlah persidangan majelis dan penetapan/putusan perkara persaingan usaha	45	47	50	52	55	58,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
JUMLAH							269,3			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

109.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	29,2
Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	975,8
JUMLAH	1.005,0

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

109.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu							693,4			
Pengendalian Pengembangan Wilayah Suramadu							693,4			
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	luas lahan kawasan (ha)	50	50	25	25	25	384,8	Jawa Timur		05
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	Panjang jalan dibangun/dipelihara/ditingkatkan (km)	22,8	26,3	24,8	31,1	29,4	308,6	Jawa Timur		05
JUMLAH							693,4			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

110.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	69,6
Program Pengawasan Pelayanan Publik	216,7
JUMLAH	286,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

110.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Pelayanan Publik							194,7			
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat							90,7			
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (external complaint handling)	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan	6000	6300	6600	6800	7000	90,7	Pusat/Daerah		07
Pencegahan Maladministrasi							103,9			
Survei Kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009	Jumlah instansi Pemerintah yang disurvei terkait kepatuhan terhadap Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	587	587	587	587	587	103,9	Pusat/Daerah		07
JUMLAH							194,7			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

111.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	280,0
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	342,6
JUMLAH	622,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

111.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN	
		2020	2021	2022	2023	2024					
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan							10,5				
Pengelolaan Batas Wilayah Darat							5,5				
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam	Jumlah Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam yang terlatih dalam pengamanan perbatasan	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	5,5	Pusat		07	
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara							5,0				
Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	Jumlah PPKT yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	36 PPKT	41 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	5,0	Pusat		07	
JUMLAH							10,5				

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

112.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	667,4
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	6.255,9
JUMLAH	6.923,3

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

112.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBFB-Batam							5.654,7			
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut							816,6			
Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil	Jumlah kapasitas bongkar muat barang di pelabuhan Kabil (ton/jam)		1000				250,8		Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas Penumpang Pelabuhan Domestik (dan internasional)	Jumlah penumpang pelabuhan domestik (Orang/Tahun)	4000000		8000000			565,8	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara							909,8			
Fasilitas Bandar Udara	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)			350000		650000	909,8	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Penumpang (Orang/Tahun)		6000000	6500000	6700000	7000000	0,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan							284,0			
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah fisik bangunan (unit)			1			84,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah peralatan kesehatan (Lot)		5				200,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana							1.572,1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

112.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase	Jumlah sarana prasarana jalan dan jembatan kawasan yang dibangun (km)	60	50	30	40	4	1.572,1	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah							2.072,2			
Fasilitas air baku	Tambahan volume air baku yang tersedia (L/detik)	600	230			1000	1.644,9	Kota Batam, Bareleng	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas air limbah (Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3)	Luas kawasan pengelolaan limbah B3 (Ha)			20			427,3	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
JUMLAH							5.654,7			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Penanggulangan Terorisme	2.352,1
JUMLAH	2.352,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penanggulangan Terorisme							652,5			
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan							521,4			
Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.		187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	196,5	Pusat		07
Kegiatan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Jumlah Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)		32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	132,3	Pusat		07
Kegiatan Kontra Radikalisasi	Jumlah Kegiatan Kontra Radikalisasi		48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	192,6	Pusat		07
Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan							56,1			
Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	Jumlah Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme		90 Koordinasi	93 Koordinasi	95 Koordinasi	97 Koordinasi	49,6	Pusat		07
Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	Jumlah Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6,5	Pusat		07
Dukungan Administrasi dan SDM							75,0			
Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	Jumlah Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	30,4	Pusat		07
Wilayah Prioritas kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	Jumlah Wilayah prioritas Kegiatan Pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi		3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	44,7	Pusat		07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
JUMLAH							652,5			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

114.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKRETARIAT KABINET

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	180,2
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	431,5
JUMLAH	611,6

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

115.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	224,3
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	3.106,9
JUMLAH	3.331,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

115.B.1

Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu							234,1			
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu							234,1			
Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	42,6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif	Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah	63,8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	Jumlah kementerian/lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	85,2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	19 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	42,6			07
JUMLAH							234,1			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

116.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	393,3
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	983,5
JUMLAH	1.376,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

116.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik							253,7			
Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru							200,0			
Sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran Radio publik	Jumlah pengembangan infrastruktur stasiun radio publik (stasiun)	15	15	15	15	15	200,0	Tersebar		05
Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik							45,2			
Pengembangan Program dan Produksi Siaran (Radio Tanggap Bencana)	Jumlah lokasi Radio Early Warning System (EWS)	5	10	15	20	25	28,2	Pusat		06
Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan (Produksi Dokumenter)	Jumlah paket siaran dokumenter	65	65	65	65	65	17,0	Pusat		03
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional							8,5			
Program, Produksi, dan Pengembangan Siaran Internasional	Jumlah siaran dalam bahasa asing	9	9	10	10	10	8,5	Pusat		07
JUMLAH							253,7			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

117.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	309,0
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	2.025,4
JUMLAH	2.334,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

117.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik							1.472,5			
Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik							1.080,0			
Sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran TV publik	Jumlah unit infrastruktur penyiaran TV publik	70	80	90	100	100	1.080,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik							370,0			
Kanal Pendidikan dan Budaya	Jumlah jam siar konten pendidikan dan budaya	1460	2190	2920	2920	2920	370,0	Pusat		03
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional							22,5			
Siaran TV Publik (Siaran Pendidikan Agama)	Jumlah jam siar konten pendidikan agama	1318	1400	1485	1550	1600	22,5	Pusat		04
JUMLAH							1.472,5			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

118.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	23,3
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	485,1
JUMLAH	508,4

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

118.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang							413,1			
Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya							389,1			
Pelabuhan Nasional Balohan	Pembangunan pelabuhan	1					89,1	Kota Sabang		02
Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang	Realisasi fisik pembangunan jembatan				1		300,0	Kota Sabang		02
Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International							24,0			
Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor kepelabuhanan	Persentase Peningkatan Pendapatan dari Jasa Kepelabuhanan (%)			60	80	80	24,0	Kota Sabang		02
JUMLAH							413,1			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

119.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KEAMANAN LAUT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	2.466,4
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	512,6
JUMLAH	2.979,1

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

119.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN KEAMANAN LAUT

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla							2.136,1			
Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla							2.136,1			
Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut	Jumlah senjata yang Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut	332	51	51	51	51	568,4	Pusat		07
Pengadaan Kapal Patroli Keamanan Laut	Jumlah kapal Patroli Keamanan Laut	-	2 (Tahap 1)	2 (Tahap 2)	2 (tahap 3)	-	500,0			07
Pengadaan Amunisi	Jumlah Amunisi yang diadakan	1		1			70,0	Pusat		07
Pengadaan Boat Stopper	Jumlah Boat Stopper yang diadakan	-	3	3	3	3	27,5	Pusat		07
Pengadaan sarana prasarana operasi	Jumlah sarana prasarana operasi yang diadakan	-	77	-	-	-	15,2	Pusat		07
Pembelian Data AIS Satelit	Jumlah Data AIS satelit yang dibeli	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		07
Sistem peringatan dini terpadu untuk wilayah Natuna	Jumlah sistem peringatan dini	1	1	1	1	1	460,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Pengadaan Kapal 110 M untuk wilayah Natuna	Jumlah Kapal	-	-	1 unit (20%)	1 unit (60%)	1 unit (100%)	450,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna	Jumlah UAV	-	4 unit (tahap 1)	4 unit (tahap 2)	4 unit (tahap 3)	4 unit (tahap 4)	25,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut							465,5			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

119.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut							330,8			
Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	Jumlah hari operasi keamanan dan keselamatan laut	16	90	90	90	90	330,8	Pusat		07
Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut							134,7			
Operasi laut bersama terkoordinasi bilateral	jumlah kegiatan operasi laut bersama terkoordinasi bilateral	5	6	6	6	6	76,0	Pusat		07
Operasi Udara bersama terkoordinasi bilateral	Jumlah kegiatan operasi udara bersama terkoordinasi bilateral	4	4	4	4	4	58,7	Pusat		07
JUMLAH							2.601,6			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

120.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	441,0
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	545,8
JUMLAH	986,8

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

120.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman							90,3			
Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim							21,9			
Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindakanjutan Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim yang dikoordinasikan	9	10	10	10	10	21,9	Pusat		07
Koordinasi Jasa Kemaritiman							22,0			
Bahan Kebijakan Jasa Kemaritiman	Jumlah Bahan Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa Kemaritiman yang dikoordinasikan	9	10	10	10	10	22,0			01
Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari							24,4			
Bahan Kebijakan Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Bahari yang Dihasilkan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindakanjutan Kebijakan Bidang Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari yang Dikoordinasikan	6	7	7	7	7	24,4	Pusat		04
Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim							22,0			
Bahan Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang Dihasilkan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindakanjutan Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang dikoordinasikan	6	7	7	7	7	22,0			01
JUMLAH							90,3			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	123,7
Program Pembinaan Ideologi Pancasila	598,0
JUMLAH	721,7

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pembinaan Ideologi Pancasila							420,9			
Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila							122,3			
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lain yang diselesaikan	1	1	1	1	1	91,7	Pusat dan daerah		04
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	1	1	1	1	1	30,6	Pusat dan daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Pelaksanaan Internalisasi dan Institusional Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi							64,2			
Perumusan dan Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3	3	3	3	3	27,5	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat dan daerah yang diselesaikan	3	3	3	3	3	36,7	Pusat dan daerah		04
Dukungan Penyelenggaraan Perumusan dan Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila							33,4			
Perumusan dan Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3	3	3	3	3	33,4	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila							115,8			
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3	30,7	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3	27,6	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	1	1	1	1	1	57,5	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
	Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan	100	100	100	100	100	0,0			04
Dukungan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila							85,2			
Evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara	1	1	1	1	1	28,4	Pusat dan daerah		04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	1	1	1	1	1	28,4	Pusat dan daerah		04
Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila	Jumlah evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila	1	1	1	1	1	28,4	Pusat dan daerah		04
JUMLAH							420,9			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parkesit